

ISSN 2089-0281

Afirmasi

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FEMINIS

Vol. 02, Januari 2013



Gerakan Perempuan Bagian
Gerakan Demokrasi di Indonesia



Sapa Redaksi	iii	
Gerakan Perempuan Bagian Gerakan Demokrasi di Indonesia	1	Women Research Institute
FOKUS		
Organisasi Perempuan di tengah Keterbukaan Politik	11	Edriana Noerdin
Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan	63	Sita Aripurnami
TELAAH		
Membangun Kekuatan Ekonomi dan Politik Perempuan Akar Rumpun di Sumatera Utara	105	Ayu Anastasia, Aris Arif Mundayat
Tantangan Organisasi Perempuan di Padang	127	Rahayuningtyas, Edriana Noerdin
Upaya Membangun Pengorganisasian Perempuan di Lampung	151	Ika Wahyu Priaryani, Aris Arif Mundayat
Keragaman Kelembagaan dan Menguatnya Advokasi Kebijakan Adil Gender di Jakarta	165	Sita Aripurnami, Ayu A., Frisca A., Myra Diarsi, Rahayuningtyas, Ika W. Priaryani
Jejaring Organisasi Perempuan Membangun Gerakan di Lombok-NTB	193	Frisca Anindhita, Sita Aripurnami
ESAI		
Jelajah Gerakan Perempuan untuk Demokrasi di Indonesia	209	Sita Aripurnami
Membaca-ulang Politik: Pendekatan Feminisme dan Metodologi Penelitian	237	Chusnul Mar'iyah
WAWANCARA		
Konsep Kepemimpinan dan Representasi dalam Gerakan Perempuan	253	Ayu Anastasia
BUKU		
Ingin Tahu Sejarah Seksualitas	263	Rahayuningtyas
Dekonstruksi Institusi untuk Keadilan Gender	271	Ika Wahyu Priaryani
TENTANG PENULIS	277	

Foto Cover: Nila & Niken Nugroho

Afirmasi diterbitkan oleh Women Research Institute.
Sebagai sebuah jurnal pengembangan pemikiran feminis, Jurnal Afirmasi memuat tulisan hasil penelitian, esai atau tulisan yang bersifat opini dan resensi buku yang masih terkait dengan tema jurnal.

Tim Redaksi: Edriana Noerdin, Sekar Pireno KS, Sita Aripurnami
Editor: Debra H. Yatim - **Desain Cover & Tata Letak:** Sekar Pireno KS

Women Research Institute: Jl. Kalibata Utara II No. 78, Jakarta 12740 - INDONESIA
Tel. (62-21) 7918.7149 & 798.7345 Fax. (62-21) 798.7345 Email: office@wri.or.id Website: www.wri.or.id

Sapa Redaksi

Penelitian tentang kepemimpinan perempuan, khususnya mengenai kepemimpinan feminis di Indonesia setelah 1998 belum banyak dikaji. Terlebih lagi, kepemimpinan feminis dalam kaitannya dengan proses transformasi sosial yang lebih luas.

Hampir selalu muncul tantangan dari masyarakat manakala kelompok atau organisasi perempuan yang mendefinisikan arti kata feminisme. Secara garis besar feminisme hampir selalu diartikan sebagai tindakan, cara bicara, penulisan dan pembelaan bagi permasalahan serta hak perempuan juga mengidentifikasi ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakat.

Penggambaran kepemimpinan perempuan (feminis) dalam kaitannya dengan proses transformasi di Indonesia perlu dilihat dalam kaitannya dengan proses penguatan lokal serta pengaruh global. Penguatan lokal di Indonesia terkait dengan proses desentralisasi, sedangkan pengaruh global merupakan pengaruh politik dan ekonomi internasional di Indonesia.

Pada akhir abad 19 di Indonesia, perempuan belum menempati posisi yang sama dengan sejawatnya yang laki-laki. Perempuan lebih diharapkan untuk membatasi geraknya pada lingkup rumah dan keluarga. Perempuan tidak dikuatkan untuk mendapatkan pendidikan formal. Itulah sebabnya, akses pada pendidikan menjadi permasalahan perempuan yang mengemuka pada masa itu. Kartini, Dewi Sartika adalah beberapa nama pioner yang memperjuangkan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Setelah menikah, perempuan seringkali tidak mempunyai hak atas kepemilikan aset. Apabila terjadi perceraian, perempuan hampir selalu dirugikan bahkan dipersulit untuk mendapatkan santunan bagi pendidikan dan kehidupan anaknya. Perjuangan banyak individu perempuan serta organisasi perempuan di Indonesia mengenai pentingnya Undang-Undang Perkawinan berawal sejak 1899 dan baru berhasil disetujui pada 1974. Sebuah upaya kerja yang membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan fokus

dan stamina yang luar biasa kuat. Meski perempuan di Indonesia sudah mendapatkan hak pilihnya sejak tahun 1955, partisipasi perempuan di kancah politik masih belum memenuhi harapan batas kuota minimal 30 persen.

Upaya mengatasi permasalahan pendidikan, hak dalam perkawinan serta politik dapat dikatakan sebagai capaian yang tidak main-main dari kerja para aktivis dan organisasi perempuan di Indonesia. Bahkan, gerakan perempuan memainkan peranan yang penting dalam upaya menurunkan rezim yang otoritarian pada 1998. Beriringan dengan gerakan nasionalisme pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda hingga gerakan pro demokrasi pada 1998, gerakan perempuan selayaknya dipertimbangkan sebagai salah satu gerakan politik Indonesia yang penting di abad 20. Gerakan perempuan adalah sebuah gerakan politik dengan bentuknya yang khas – gerakan ini memiliki media, bayangan ideal, visi, pengorganisasian bahkan pendanaannya tersendiri.

Kerja aktivis perempuan dan organisasi perempuan ini telah berlangsung sejak tahun 1899. Sebuah upaya yang sudah terlaksana dalam masa dua abad serta melibatkan tiga generasi dan jutaan perempuan di Indonesia. Setiap generasi aktivis dan organisasi perempuan menjadi saksi dari upaya atau perjuangan yang dilakukan. Para aktivis perempuan generasi masa perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda membutuhkan waktu 75 tahun untuk mencapai diloloskannya Undang-Undang Perkawinan. Apakah kemudian situasi yang dihadapi perempuan di Indonesia menjadi berubah lebih sejahtera?

Women Research Institute (WRI) selama April hingga November 2012 melakukan sebuah penelitian yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Terutama, mengenai “Kepemimpinan Feminis dalam Negara Pasca Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya pada Peningkatan Kesejahteraan Perempuan”. Penelitian ini dimungkinkan berkat dukungan dari Hivos.

Tentu saja ambisi untuk menjawab pertanyaan besar mengenai kesejahteraan perempuan di Indonesia berkat kerja para aktivis dan organisasi perempuan. Namun, melalui pilihan atas lima wilayah (Jakarta, Sumatera Utara, Padang, Lampung dan Lombok) sebagai sebuah studi kasus diharapkan dapat menjadi cerminan, dan setidaknya memahami bentuk-bentuk kuasa perempuan yang muncul dalam gerakan sosial, budaya dan politik, baik di tingkat individu, keluarga, kelompok masyarakat sipil maupun masyarakat secara umum. Lebih lanjut, bagaimana hal tersebut memberi dampak pada upaya untuk menghadirkan perubahan kesejahteraan dan posisi bagi perempuan.

Harapannya, paparan data dan informasi dari penelitian WRI ini dapat menjadi sebuah awal dari upaya bersama mencari cara serta strategi untuk memperkuat posisi dan meningkatkan kesejahteraan perempuan di Indonesia.

Hasil penelitian yang tertuang dalam Jurnal Afirmasi ini merupakan persembahan kami untuk menghargai serta mengakui kerja banyak aktivis juga organisasi perempuan yang telah mendedikasikan kerja dan visinya untuk pemenuhan hak perempuan di Indonesia.

Women Research Institute

Gerakan Perempuan Bagian Gerakan Demokrasi di Indonesia

Studi Kasus: Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Padang dan Lombok

Women Research Institute

Latar Belakang

Gerakan Perempuan Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, dalam model pemerintahan Presiden Soeharto, pengendalian yang sangat ketat diberlakukan terhadap organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan. Gerakan perempuan dihancurkan secara sistematis dengan memberi stigma terhadap organisasi perempuan progresif seperti Gerakan Wanita Indonesia/Gerwani (Wieringa, 1999). Citra perempuan dalam wacana rezim Soeharto digambarkan pasrah dan patuh atas subordinasi yang dialaminya. Organisasi perempuan yang bisa berkembang pada periode pemerintahan Soeharto adalah organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah (disebut Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang diciptakan untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Pada tahun 1980-an, setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan dasawarsa perempuan yang menandai meningkatnya perhatian terhadap masalah-masalah perempuan, muncul bentuk baru dari gerakan perempuan yaitu organisasi non-pemerintah (ornop), dalam istilah pemerintah Indonesia juga dikenal sebagai LSM-- seperti organisasi perempuan yang tumbuh di Jakarta, misalnya Kalyanamitra, yang mengkhususkan diri sebagai pusat informasi dan komunikasi perempuan; Solidaritas Perempuan, dengan fokus kerja sebagai pengorganisasi buruh migran; serta berbagai organisasi yang bekerja untuk isu kesehatan reproduksi, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, seperti Rifka Annisa di Yogyakarta. Pada periode yang bersamaan, kelompok intelektual di universitas mulai membangun Pusat Studi Wanita (PSW) sebagai salah satu elemen gerakan perempuan yang melakukan kajian ilmiah terhadap masalah-masalah perempuan. PSW pertama dibangun pada 1979 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli-

tik Universitas Indonesia atas inisiatif beberapa pengajar.

Berakhirnya pemerintahan rezim militer Orde Baru pada 1998 ditandai dengan kekerasan massal dan konflik antar kelompok yang menewaskan ratusan orang, dan juga terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Puluhan perempuan jadi korban perkosaan dalam kerusuhan Mei tahun itu. Selain kekerasan yang kasat mata, rezim Orde Baru juga mewariskan ketidakpuasan terhadap pembangunan sosial yang terpusat baik secara geografis dan budaya di Jawa. Kelompok kelas menengah yang berpendidikan memiliki potensi menjadi kelompok kepentingan yang kritis, tetapi mereka punya banyak keterbatasan untuk berhubungan dengan kelas bawah. Rinaldo (2005) mengutip Budianta (2002) yang menyatakan bahwa:

“gerakan perempuan selama ini bergantung pada kelompok aktivis perempuan yang relatif kecil dan memiliki afiliasi sekaligus dengan beberapa organisasi. Keadaan ini seringkali menggagalkan optimalisasi hubungan dengan sejumlah besar kelompok perempuan kelas menengah dan kelas bawah, yang bangkit [kesadarannya] karena iklim politik masa krisis dan siap bergerak kalau diorganisir dengan tepat”.¹

Gerakan Perempuan Setelah 1998

Kajian yang dilakukan oleh Harris, Stokke dan Tornquist (2004) menunjukkan bahwa banyak gerakan LSM di Indonesia maupun

negara sedang berkembang lainnya, yang pada awalnya kekiri-kirian, lalu kemudian mengambil posisi gerakan di tingkat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Secara bersamaan, gerakan populis yang didukung oleh World Bank yang mendukung proyek neo-liberal juga mengembangkan berbagai strategi politik yang bergerak di tingkat lokal. Mereka bergerak bersamaan dengan momentum desentralisasi politik di Indonesia, dengan mengusung nilai-nilai *good governance*.

Kedua bentuk gerakan tersebut secara bersamaan mempromosikan demokratisasi dengan berbagai strategi, masing-masing sesuai dengan agenda yang saling tumpang tindih. Gerakan perempuan yang juga didukung oleh kekuatan global atau ekstra-lokal tersebut ikut andil pula mewarnai dinamika politik di tingkat lokal, dalam pengertian di tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional.

Di Asia Tenggara secara umum, termasuk di Indonesia secara khusus, kita temukan banyak kelompok LSM yang didanai oleh World Bank yang bekerja dengan menjalankan agenda neo-liberal seperti ‘good governance’ (Ungpakorn, 2003). Aktivitas World Bank pada dasarnya bukan hanya bergerak dalam menyuntikkan dana utang kepada pemerintah Indonesia, namun juga ikut aktif dalam mengembangkan proses-proses partisipasi masyarakat sipil untuk berpolitik dalam pembangunan (World Bank, 2000). Dalam konteks ini, World Bank melihat pentingnya peran LSM dalam proses pembangunan jangka panjang dan reformasi ekonomi di tingkat masyarakat, supaya itu tidak berlaku hanya di tingkat institusi ekonomi negara saja. Program se-

¹ Melani Budianta, Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia, Horisan Esai Indonesia Bunga Rampai, 2002.

perti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang melibatkan kelompok organisasi Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), adalah contoh nyata dari bergeraknya mekanisme ‘ekstra-lokal’ secara politik dalam mendorong terjadinya perubahan pola relasi kuasa di tingkat individual perempuan, keluarga dan masyarakat. Selain itu, World Bank bersama LSM yang ada di Indonesia, juga aktif dalam mempromosikan perlunya institusi publik yang menjalankan tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan berakuntabilitas melalui pengawasan publik yang partisipatif.

Di dalam konteks desentralisasi, banyak pemerintahan di tingkat daerah yang masih bertahan dengan karakter tidak demokratis dalam mengelola pemerintahan daerah, baik itu dengan menghadirkan politik komunitarian, maupun dengan praktik kekuasaan yang sifatnya *abusive*. Kekuatan LSM juga mengkritisi praktik-praktik tersebut, namun belum banyak yang berubah — bahkan pemerintah pusat seringkali membiarkan hal itu terjadi. Studi yang dilakukan oleh Rodan, Hewison dan Robison (2006) menunjukkan bahwa keberadaan rezim seperti demikian sangat sulit untuk dilucuti menjadi demokratis karena di dalamnya terkait dengan pengaturan ekonomi, sosial dan kuasa politik yang mempertahankannya. LSM perempuan yang berhadapan dengan rezim seperti itu tentu saja memiliki strategi politik gerakan yang berbeda dengan yang dilakukan di daerah lainnya, dalam mendorong terjadinya perubahan ke arah memberi kesempatan bagi perempuan untuk memiliki akses ke ranah publik secara politis. Dalam konteks tersebut, gerakan sosial perempuan pun ikut andil dalam proses desentralisasi, melalui

gerakan di bidang seperti anggaran partisipatif, pengarusutamaan perspektif gender dalam anggaran dan politik, gerakan anti-diskriminasi terhadap perempuan, dan gerakan sosial yang menaruh perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Mereka terlibat aktif dengan sumber-sumber ekstra-lokal, baik yang berkarakter mendukung proyek neo-liberal maupun yang mencurigainya. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai ranah dari pertarungan banyak kekuatan ekstra-lokal yang hendak mempengaruhi bentuk-bentuk relasi kuasa dan pola kekuasaan yang dipraktikkan, maupun yang mempengaruhi gerakan sosial perempuan tersebut.

Kajian dan penelitian tentang organisasi perempuan di Indonesia sebetulnya sudah cukup banyak dilakukan oleh akademisi dan aktivis perempuan, terutama mereka yang berasal dari luar Indonesia. Sebut saja Cora Vreede-de Stuers, Susan Blackburn dan Saskia Wieringa. De Stuers menitikberatkan diri pada kajian terhadap organisasi perempuan di Indonesia sejak masa kolonial Belanda, atau pada tahun 1920-an. Seiring dengan semangat Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928, Kongres Perempuan yang pertama diselenggarakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Sementara itu, Susan Blackburn dan Saskia Wieringa melanjutkan kajian mengenai gerakan perempuan di Indonesia dengan melihat bagaimana kegiatan organisasi perempuan sejak kurun 1920-an itu berlanjut pada 1965, dan situasinya pada masa awal Orde Baru.

Belum banyak kajian tentang organisasi perempuan dilakukan oleh pemikir perempuan Indonesia. Sukanti Soeryocondro, sa-

lah seorang aktivis dan akademisi perempuan Indonesia, adalah pionir dalam upaya mendata organisasi perempuan yang berkiprah dalam kegiatan mengatasi persoalan perempuan sejak tahun 1920-an. Bukunya, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, merupakan terbitan pertama yang menjadi klasik dan rujukan bagi pengetahuan mengenai gerakan perempuan di Indonesia. Belum terlalu banyak jumlah kajian atau penelitian yang diterbitkan, yang dilakukan oleh para aktivis dan pemikir Indonesia mengenai gerakan perempuan di Indonesia. Upaya yang telah diterbitkan sejauh ini lebih merupakan analisis spesifik mengenai isu tertentu, seperti program keluarga berencana, kebijakan pembangunan dan wajah gerakan perempuan pasca masa Orde Baru, atau pasca otoritarianisme di Indonesia. Hal yang menarik untuk ditengarai adalah kesepakatan yang diambil mengenai persoalan perempuan yang harus secara kolektif diatasi pada masa 1920-an, seperti masalah perkawinan, terutama poligami dan perceraian, masalah pendidikan, serta penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak. Masalah-masalah ini tampaknya sampai saat ini masih merupakan isu yang ditangani banyak organisasi perempuan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Women Research Institute (WRI) merupakan upaya untuk memaparkan bukan saja organisasi perempuan dan kerjanya, tetapi juga gambaran mengenai kepemimpinan perempuan yang dianggap sesuai bagi organisasi perempuan di Indonesia. WRI memilih lima wilayah di Indonesia yang mewakili gambaran tentang upaya organisasi perempuan dalam mengatasi persoalan-persoalan perempuan di seputar kehidupan mereka. Selain itu,

tentunya penelitian ini juga bertujuan untuk mendapat gambaran atas isu dan tantangan persoalan perempuan yang tengah, atau akan, dihadapi oleh organisasi perempuan.

Seperti yang telah disebutkan, studi tentang kepemimpinan perempuan, lebih spesifik lagi mengenai aspek “kepemimpinan feminis” di Indonesia pasca otoritarianisme, belum banyak dikaji dalam konteks peran mereka pada proses transformasi sosial yang lebih luas. Studi Srilata (2010) menawarkan analisis mengenai kepemimpinan perempuan dengan melihat inti yang terkandung di dalam kekuasaan, nilai, politik dan praktik, di mana kekuasaan memiliki sifat yang tampak, tersembunyi dan tidak tampak. Menurutnya, kekuasaan yang tampak melibatkan siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kekuasaan yang tersembunyi dapat dilihat dari *agenda setting* dengan mengurai siapa yang mempengaruhi agenda tersebut, dan bisa disampaikan ketika agenda tersebut bekerja di tingkat *public* maupun *private*. Studi Srilata, yang juga membahas nilai dari kekuasaan itu, haruslah diletakkan dalam konteks di mana nilai itu berada. Jika kita meletakkan nilai kuasa itu sebagai berada dalam lingkungan kekuatan ‘ekstra-lokal’ dan lokal, maka nilai itu akan menuntun tindakan-tindakan yang juga ikut dipengaruhi oleh konteks tersebut. Jika demikian, aspek kuasa, yang memiliki dimensi ‘politik dan tujuan’ (*politics and purpose*) dalam transformasi sosial dari *feminist leadership*, juga akan bersinggungan dengan aspek konteks global dan lokal.

Proses transformasi sosial di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilihat hanya dalam konteks yang sempit. Kita perlu meli-

hatnya dalam konteks transformasi yang terkait dengan penguatan lokal dan pengaruh global. Penguatan lokal di Indonesia terkait dengan proses desentralisasi, dan penguatan global merupakan pengaruh politik dan ekonomi internasional di Indonesia. Dalam hal ini, aspek politik dan kultural dari globalisasi, maupun penguatan lokal yang terkait dengan proses ekonomi di satu sisi dan kekuasaan di lain pihak, merupakan kenyataan pasca-reformasi. Kondisi ini merupakan *setting* yang penting untuk melihat '*transformational feminist leaderships*' (Srilata, 2010), seperti apa yang muncul dalam gerakan sosial untuk melakukan perubahan-perubahan sosial yang bermakna. Lebih lanjut, kita juga dapat melihat bagaimana kemampuan transformasional tersebut diterapkan dalam proses desentralisasi politik dan ekonomi di setiap kabupaten.

Kekuatan global ekonomi dan politik di Indonesia secara jelas telah memberi dampak terhadap desentralisasi kekuasaan Negara, dan tumbuhnya kekuatan non-Negara yang semakin kuat. Goetz (2009) melihat bahwa agenda *good governance*, yang diterapkan melalui desentralisasi, diharapkan mendorong terjadinya perbaikan terhadap pemahaman akan kebutuhan dan pemberian layanan yang baik, termasuk bagi perempuan. *Agenda setting* tersebut telah mendorong sejumlah organisasi perempuan non-pemerintah untuk masuk dalam aras kerja *service provider*. Selain itu, program seperti PNPM Mandiri juga disambut secara partisipatif oleh organisasi basis non-perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan partisipasi perempuan baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks tersebut, tampak bahwa kekuatan ekstra-lokal dan

lokal bersinergi memberikan ruang yang bermakna bagi perempuan untuk berorganisasi.

Pendekatan Srilata (2010) secara kritis menyajikan bagaimana kondisi kontekstual yang ada ikut mempengaruhi keseluruhan proses dan praktik dari kepemimpinan feminis yang transformasional. Organisasi perempuan non-pemerintah di lima wilayah penelitian menunjukkan adanya peran perempuan yang semakin menguat, meskipun kesetaraan gender secara substansi belum tercapai. Apa yang terjadi di lima wilayah penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi perempuan telah mengafirmasi peran perempuan dalam skala tertentu, karena mereka secara institusional memiliki kemampuan untuk membangun organisasi berbasis perempuan. Hal ini penting, mengingat Goetz juga memiliki catatan bahwa tatakelola pemerintahan yang sensitif gender tidaklah dipecahkan melalui representasi maupun aksi afirmasi yang mendorong perempuan dalam politik, namun justru dalam reformasi institusional terhadap sektor publik. Artinya, implementasi kebijakan keadilansetaraan gender menuntut perbaikan kapasitas sektor publik. Akuntabilitas sektor publik dalam hal ini menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Jika dilihat dari studi yang dilakukan di lima wilayah, tampaknya peran perempuan dalam akuntabilitas sektor publik belum terjadi secara meluas. Organisasi perempuan non-pemerintah hanya memiliki akses dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan untuk perempuan. Mereka belum terlibat dalam proses penganggaran program pembangunan. Walaupun mereka terlibat aktif, biasanya hanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hasil penelitian di lima wilayah menunjukkan kesamaan dengan studi di tingkat lokal yang dilakukan oleh Kerkvliet dan Mojares (1991:11) di Filipina. Kajian tersebut menunjukkan bahwa komunitas lokal pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi di tingkat nasional dan perkembangan dunia, namun juga mereka secara aktif merekondisikan diri mereka sendiri melalui keterlibatan sistem 'ekstra-lokal' (kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dari luar kabupaten/kota, seperti ornop) yang muncul dalam berbagai bentuk gerakan masyarakat sipil. Organisasi-organisasi seperti Hapsari, Damar, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Totalitas, Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk), Solidaritas Perempuan dan lainnya menunjukkan adanya interaksi mereka dengan sumber dana global. Ini adalah bagian dari proses transformasi sosial dalam gerakan perempuan di Indonesia. Di Indonesia, kita dapat melihat peranan organisasi masyarakat sipil dalam bentuk LSM perempuan di tingkat kabupaten/kota dengan berbagai kegiatan yang meliputi penelitian, pemberdayaan dan advokasi. Semua LSM tersebut didanai dengan uang dari kekuatan ekonomi global seperti The Ford Foundation, World Bank, The Asia Foundation, Tifa Foundation, Hivos, Partnership for Good Governance, Oxfam, Friedrich Ebert Stiftung, Friedrich Naumann Stiftung, dan sebagainya. Semua lembaga itu adalah kekuatan ekstra-lokal yang hadir di tingkat lokal dalam berbagai bentuk transformasi sosial, kultural maupun politik.

Dengan demikian, dinamika kuasa lokal, termasuk peran kepemimpinan perempuan, perlu dipahami dalam konteks yang luas me-

libatkan berbagai pihak dalam proses transformasi tersebut, sehingga agenda-agenda kuasa dan bentuk-bentuk kuasa yang dijalankannya dapat dipahami secara kontekstual. Studi dari Hines (2000), Harris, Stoke dan Tornquist (2004) dan Abdullah (2005), misalnya, pada dasarnya berangkat dari pemahaman yang menjelaskan bahwa globalisasi akan memberi dorongan terhadap perubahan relasi kekuasaan di tingkat politik seperti demokratisasi di tingkat institusional. Dalam hal ini, perubahan tersebut mengkondisikan nilai-nilai politik dan kultural (termasuk relasi gender), dan gerakan menuju proses-proses politik berubah menjadi semakin transparan. Lebih dari itu, Goetz (2009) juga yakin bahwa globalisasi memperluas alternatif kultural dan politikal bagi perempuan yang mendorong terwujudnya berbagai bentuk ruang partisipasi, yang sebelumnya jarang ditemukan. Hal ini tentu penting untuk dicatat. Namun perlu diingat bahwa hal itu juga ikut mendorong munculnya berbagai bentuk 'respons lokal'. Respons tersebut termanifestasi melalui gerakan yang mungkin kontraproduktif terhadap terbukanya ruang bagi perempuan. Misalnya muncul dan berkembangnya gerakan yang bersifat komunitarian dan kultural seperti organisasi keagamaan dan berbagai peraturan daerah yang berbasis agama, seperti di Kota Padang, maupun kekuatan ulama lokal di Lombok.

Tulisan ini merupakan paparan mengenai kepemimpinan perempuan, bagian dari Penelitian *Feminist Leaderships* Pasca Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan - Studi Kasus dari Lima Wilayah: Jakarta,

Lampung, Sumatera Utara, Padang dan Lombok.

Penelitian ini mencoba melihat dan memahami bentuk-bentuk kuasa perempuan yang muncul dalam gerakan sosial, dan implikasi sosial, budaya dan politik, baik di tingkat individu, keluarga, kelompok masyarakat sipil maupun masyarakat secara umum. Serta faktor-faktor seperti ekonomi dan politik global maupun lokal, dan keterlibatan kekuatan ‘ekstra-lokal’ dan ‘respons lokal’ terhadap *feminist leaderships* di Indonesia pasca otoritarian.

Proses Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini kami batasi pada organisasi perempuan yang terlibat dalam pengorganisasian kerja untuk kepentingan gender di empat wilayah di Indonesia, serta satu wilayah yang merepresentasikan tingkat nasional. Adapun lima wilayah penelitian yakni:

Jakarta - kota ini dipilih atas dasar kedekatan dengan sumberdaya ekonomi politik global yang banyak diakses oleh gerakan sosial perempuan. Sekaligus di kota ini terdapat respons lokal yang bersifat sektarian dan berseberangan dengan gerakan sosial perempuan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan relasi gender. Juga penting dilihat upaya aktivis untuk membangun model koalisi perempuan sebagai gerakan sosial perempuan yang pertama sesudah Kongres Perempuan pada 1928.

Sumatera Utara - dipilih atas dasar upaya yang sudah dilakukan oleh Perkumpulan

Hapsari dalam membangun Serikat Perempuan Sumatera Utara, yang menjadi model gerakan perempuan akar rumput dalam mengorganisasi dirinya guna memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Padang - kota ini dipilih atas dasar kondisi respons lokal dalam bentuk peraturan daerah (perda) Syariah Islam, yang dalam hal ini berhadapan dengan kekuatan global. Kekuatan-kekuatan gerakan sosial perempuan perlu mengembangkan strategi kepemimpinan yang secara strategis dapat berhadapan dengan respons lokal yang ada. Padang juga dipilih untuk melihat bagaimana nilai-nilai matrilineal mempengaruhi gerakan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Lampung - dipilih atas dasar pertimbangan bahwa ada sejumlah organisasi perempuan yang bergerak di wilayah Lampung, yang secara kultural sangat didominasi laki-laki. Organisasi perempuan Lampung juga cukup lama berupaya membangun kerjasama dengan institusi pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Lombok - kota ini dipilih karena cukup tingginya masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi di sana. Selain itu, kota ini merupakan kantong pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Kota ini juga merupakan markas banyak organisasi masyarakat sipil (ornop) yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk organisasi-organisasi yang bekerja untuk keadilan gender. Letaknya yang di daerah timur Indonesia menjadi-

kannya tempat yang menarik untuk diteliti, terutama untuk melihat interaksi antara nilai tradisi Sasak dan interpretasi atas ajaran agama Islam yang menempatkan posisi Tuan Guru sebagai pihak yang berpengaruh terhadap kerja-kerja memperjuangkan keadilan gender. Selain itu, Mataram memiliki sejarah hubungan kerja yang cukup panjang dengan Hivos sejak dekade 1980-an. Hivos banyak memberikan dukungan pada kerja LSM di Mataram.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap lingkungan politik dari gerakan sosial perempuan di lima wilayah penelitian. Lebih dari itu, penelitian ini juga memanfaatkan *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu dengan mengumpulkan pengurus gerakan sosial perempuan bersama konstituennya untuk melihat pola relasi kuasa dari kedua belah pihak.

Narasumber penelitian adalah organisasi dan individu yang menyatakan kesediaannya untuk membantu mengungkapkan strategi politik dan agenda gerakan mereka, untuk memperlihatkan bagaimana pola kepemimpinan gerakan sosial perempuan itu beroperasi di dalam organisasi dan juga pada tataran pemberdayaan atau advokasi terhadap perempuan.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur atas buku, jurnal, buletin, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pola pengorganisasian, strategi gerakan perempuan dan masalah gender yang muncul di tingkat nasional maupun di kelima wilayah penelitian.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisis dan diinterpretasikan, dan tidak hanya ditafsirkan dengan jalan menemukan kategori-kategori, tetapi juga dengan menghubungkan aspek-aspek yang muncul dari data yang ada. Untuk memudahkan analisis, data yang dikumpulkan dipilah-pilah berdasarkan kategori-kategori tertentu lalu dianalisis dengan perspektif feminis.

4. Jangka Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dari 1 Maret sampai akhir Agustus 2012 (lima bulan). Tahap penulisan dilakukan antara Agustus sampai Desember 2012.

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba mengungkapkan strategi politik dan agenda gerakan perempuan untuk melihat bagaimana pola kepemimpinan gerakan sosial perempuan itu beroperasi di dalam organisasi, dan juga pada tataran pemberdayaan atau advokasi terhadap perempuan.

Profil Narasumber

Total jumlah narasumber yang diwawancarai mendalam berjumlah 47 orang (tiga laki-laki dan 44 perempuan) dari 36 organisasi. Total jumlah anggota kelompok dan staf organisasi perempuan yang turut dalam FGD berjumlah 92 orang. Dengan demikian, narasumber penelitian terdiri dari 94 persen perempuan dan enam persen laki-laki.

Sebagian besar narasumber mengalami peningkatan jabatan atau posisi apabila di-

bandingkan dengan ketika mereka memulai aktivitasnya di organisasi. Antara lain tampak bahwa 24 orang narasumber menduduki jabatan atau posisi sebagai direktur atau ketua atau wakil ketua, dibandingkan ketika mereka memulainya, dengan yang menjabat direktur atau ketua hanya berjumlah delapan orang.

Dalam hal tingkat pendidikan, sebagian besar adalah individu yang memiliki pendidikan tinggi. Sejumlah 25 orang narasumber adalah lulusan S1, 12 orang lulusan S2, dan lainnya lulusan S3, atau berpendidikan SD, SMP, SMA, Madrasah Aliyah dan D3.

Sebagian besar narasumber menikah (68 persen), sedangkan 26 persen tidak menikah, dan 6 persen berstatus cerai.

Sejumlah 49 persen narasumber adalah aktivis perempuan yang telah bekerja dalam isu perempuan selama 12 tahun. Sementara itu, 36 persen narasumber telah aktif bekerja dalam isu perempuan antara 13 sampai 22 tahun, dan 15 persen telah bekerja sebagai aktivis perempuan selama lebih dari 23 tahun.***

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2005. *Diversitas Budaya, Hak-hak Budaya Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. In: Gunawan, Jamil (ed.) *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. LP3ES, Jakarta.
- Batliwala, Srilatha. 2010. *Feminist Leaderships for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*. CREA (Creating Resources for Empowerment in Action), India.
- Budianta, Melani. 2002. *Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia*. Horisan Esai Indonesia Bunga Rampai.
- Goetz, Anne Marie (ed.). 2009. *Governing Women, Women's Political Effectiveness in Contexts of Democratization and Governance Reform*. Routledge, New York-London.
- Harris, John, Kristian Stoke and Olle Tornquist, (eds.). 2004. *Politicizing Democracy: The New Local Politics of Democratization*. Palgrave Macmillan, London.
- Hines, Colin. 2000. *Localization: A Global Manifesto*. Earthscan Publication, London.
- Kerkvielt, Benedict J. and Resil B. Mojares. 1991. Themes in the Transition from Marcos to Aquino. In: Kerkvielt, Benedict J. and Resil B. Mojares (eds.) *From Marcos to Aquino: Local Perspective on Political Transition in the Philippines*. Ateneo de Manila University Press, Quezon City.
- Rodan, Garry, Kevin Hewison and Richard Robison (eds.). 2006. *Theorizing Markets in South-East Asia: Power and Contestation*. Oxford University Press, Oxford.
- Soeryocondro, Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Rajawali, Jakarta
- The World Bank. 2000. *Working Together: The World Bank's Partnerships with Civil Society*. The World Bank, Washington, D.C.
- Wieringa, Saskia. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Edisi terjemahan Indonesia, Garba Budaya dan Yayasan Kalamita, Jakarta.

Organisasi Perempuan di Tengah Keterbukaan Politik

Edriana Noerdin

Terbukanya ruang demokrasi di Indonesia sejalan dengan menguatnya nilai-nilai lokal dan nilai-nilai agama. Begitu juga dengan gerakan perempuan ternyata menjadi semakin meluas, dari sisi wilayah kerja maupun persebaran geografisnya, serta semakin beragam jumlah aktornya, bidang kerjanya dan bahkan pendefinisian persoalan gender. Keberagaman dan keluasan bidang garapan ini juga menuntut kemampuan dan kemauan dari organisasi perempuan untuk membangun dan mengembangkan jaringan kerja dalam mengatasi persoalan kemampuan pengembangan strategi kerja, pendanaan, maupun dari segi kaderisasi kepemimpinannya. Dalam tulisan ini semuanya dibahas.

Pendahuluan

Perubahan politik di Indonesia yang terjadi karena gerakan menuju demokratisasi memuncak pada 1998. Sejak kondisi ekonomi jatuh dalam krisis pada akhir 1997, berbagai tindakan protes — mulai dari diskusi publik sampai protes turun ke jalan — dilakukan banyak kelompok, sampai akhirnya Presiden Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatannya pada Mei 1998, yang menandai berakhirnya pemerintahan rezim militer Orde Baru.

Pada masa reformasi, proses negosiasi untuk ruang demokrasi di Indonesia terjadi terus-menerus. Perasaan bebas dari tekanan rezim otoriter yang sentralistik membuka

ruang untuk mempertanyakan ulang identitas nasional Indonesia. Di saat yang bersamaan, muncul desakan untuk menyertakan pertimbangan keragaman kepentingan warga Indonesia berdasarkan latar belakang budaya, kelas, gender dan lingkungan hidupnya. Terbukanya ruang demokrasi di Indonesia sejalan dengan menguatnya nilai-nilai lokal dan nilai-nilai agama, yang selama ini banyak mendapat tekanan masyarakat.

Setelah terjadinya peralihan politik pasca-1998, gerakan perempuan juga memiliki kesadaran baru — sebagai kelompok yang aktif mendefinisikan permasalahan dan politiknya sendiri, dan bukan lagi sebagai kelompok pendukung agenda politik organisasi lain. Gerakan perempuan ternyata men-

jadi semakin meluas, dari sisi wilayah kerja maupun persebaran geografisnya, serta makin beragam jumlah aktornya, bidang kerjanya dan bahkan pendefinisian persoalan gender. Keberagaman dan keluasan bidang garapan ini juga menuntut kemampuan dan kemauan dari organisasi perempuan untuk membangun dan mengembangkan jaringan kerja, demi mengatasi kekurangan — yang harus diakui masih sangat banyak, baik dari segi kemampuan pengembangan strategi kerja, pendanaan, maupun dari segi kaderisasi kepemimpinannya.

Melihat kembali sejarah gerakan perempuan di Indonesia, definisi gender yang mendasari kerja berubah seiring perkembangan waktu dan tuntutan sosial-politik-budaya yang perempuan hadapi. Karakter organisasi, strategi kerja maupun kepemimpinannya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini tidak saja mengakibatkan perbedaan bentuk organisasi, mulai dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan sampai pada organisasi massa perempuan), tapi juga pola dan strategi kerja yang dipilih, serta pelibatan aktor-aktor untuk bekerjasama atau berjejaring. Mengingat definisi gender adalah pertemuan kepentingan begitu banyak pihak, ruang gerak organisasi yang bekerja dalam wilayah ini pun meluas dan menyempit, sesuai kondisi politik.

Definisi dan Masalah Gender Organisasi Perempuan Pasca-1998

Feminism consistently tries to change the socio-political, economic and cultural contexts that bring about systematic harm or disadvantage to women. Feminism values

*an end to the oppression of women and other disadvantaged groups. It values mutuality and interdependence, inclusion and cooperation, nurturance and support, participation and self-determination, empowerment, and personal and collective transformation.*¹

Feminisme, sebagaimana dikemukakan Claire dalam kutipan ini, merupakan nilai dan prinsip yang dapat digunakan untuk mengenali dan dijadikan acuan untuk mengubah konteks sosial-politik, ekonomi dan budaya, guna mengakhiri kondisi yang menindas dan tidak menguntungkan bagi perempuan dan kelompok sosial lain, yang dirugikan hidupnya di dalam masyarakat. Nilai dan prinsip feminisme menghargai kerjasama, saling mendukung, partisipasi, penguatan dan pendudukan transformasi untuk kondisi yang lebih baik, secara personal maupun kolektif. Nilai dan prinsip inilah yang dijadikan acuan banyak kelompok dan organisasi perempuan untuk bekerja — bergerak membantu serta mendampingi kaum perempuan untuk mengatasi persoalannya.

Keterbukaan dalam bidang informasi dan politik yang dirasakan sangat berbeda pasca-1998 ini membuka ruang bagi berbagai pertukaran gagasan, termasuk bagaimana organisasi perempuan memaknai substansi gerakannya. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat dirasakan cukup kondusif bagi munculnya pemikiran dan sikap kritis terhadap kebijakan publik, dan menyediakan peluang untuk terlibat dalam proses

¹ Martin, 1993: 282, dalam tulisan Claire, *Fostering Empowerment, Building Community: The Challenge for State-Funded Feminist Organizations*, dalam jurnal *Human Relations*, June 1994: 685.

pembuatan kebijakan yang lebih transparan dari sebelumnya. Ini terasa betul pengaruhnya dalam kehidupan berorganisasi, kebebasan dalam memilih program, strategi berorganisasi maupun dalam upaya membangun jaringan untuk mengadvokasi kebijakan.

Capaian Organisasi Perempuan dalam Mengadvokasi Undang-Undang Adil Gender

Keberhasilan gerakan perempuan Era Reformasi ditandai dengan menguatnya pola jejaring antara para aktor yang peduli masalah keadilan dan kesetaraan gender dan mengadvokasi serta mendampingi lahirnya berbagai Undang-Undang yang responsif gender. Adapun Undang-Undang (UU) tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO: *trafficking*). Organisasi perempuan juga turut aktif dalam mengadvokasikan perubahan substansi yang berpotensi merugikan perempuan dalam RUU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR-DPRD, dan gerakan perempuan turut aktif mengadvokasikan kuota 30 persen bagi calon anggota DPR-DPD pada UU Pemilu Tahun 2008 dan juga 2003.

Keberhasilan gerakan perempuan dalam mengawal lahirnya perundang-undangan yang responsif gender tersebut patut mendapat penghargaan. Perundang-undangan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan

serta kedudukan perempuan di Indonesia menjadi kunci bagi perlindungan hak-hak perempuan sebagai warga negara. Pengawasan lahirnya perundang-undangan tersebut menempuh proses penggodokan yang cukup panjang di kalangan aktivis perempuan. Tiga di antaranya terkait dengan persoalan gender di ranah privat sekaligus publik, yakni mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan ibu warga negara Indonesia (WNI) dengan ayah yang warga negara asing (WNA), mengenai tindak kekerasan di dalam rumah tangga, serta mengenai pornografi.

Tercatat banyak sekali kasus mengenai status kewarganegaraan anak hasil kawin campuran perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA. Sang ibu kehilangan hak asuh atas anak mereka setelah perceraian tanpa peduli hukum apa pun yang disandang pada saat mereka menikah. Karena sistem hukum yang dianut Indonesia adalah azas Ius Sanguinis, dengan sendirinya hak asuh anak menjadi hak ayahnya, karena hak asuh itu atas dasar kewarganegaraan ayah. Kehilangan hak asuh pasca perpisahan seringkali menjadi kasus yang menyengsarakan para ibu tersebut, karena secara hukum, kedudukan ibu menjadi nihil mengikuti praktik “anak ikut ayah” tanpa memperdulikan berapa pun usia anak. Kelemahan substansi hukum ini disikapi dengan mendorong gagasan serta disahkannya undang-undang yang mengatur diperbolehkannya dwi-kewarganegaraan anak hasil kawin campuran warga negara sesuai dengan kewarganegaraan ibu dan ayahnya. Setelah anak berusia 18 tahun, anak kemudian dapat memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya. Dengan demikian, kedudukan ibu di-

akui, dan hak asuhnya jadi mungkin untuk tetap diembannya sampai anak dinyatakan dewasa secara hukum.

Mengenai UU Pornografi, tatkala rancangan undang-undang ini mulai dikumandangkan ke hadapan publik, substansinya sarat dengan gagasan mengkriminalisasikan tubuh dan seksualitas perempuan. Bahkan secara harafiah, RUU ini memperkenalkan terminologi baru: “porno-aksi”, yang dijelaskan sebagai tindakan sengaja memperlihatkan bagian tubuh di hadapan publik. Pasal ini menyasar para pelaku seni dan panggung hiburan yang pada penampilannya menggunakan pakaian yang dianggap menonjolkan bagian-bagian tubuh yang “tidak tertutup”. Pemikiran yang dikemukakan para penggagas undang-undang tersebut mengatakan bahwa tubuh perempuan seharusnya tertutup kain atau atribut penutup lainnya, sesuai asas “kesopanan”, dan tidak memancing birahi lelaki ketika melihatnya. Selain cukup absurd dan sulit menggunakannya sebagai pegangan hukum, definisi dan terminologi tersebut sangat multi-interpretatif dan berposisi menyalahkan (tubuh) perempuan sebagai biang-keladi pikiran, sikap maupun tindakan mesum terkait seksualitas. Sepanjang 2006, terjadi banyak sekali pertemuan dan konsolidasi di seluruh wilayah Indonesia untuk menolak RUU tersebut, dan sebagai gantinya, gerakan perempuan yang telah meluas bergandeng-tangan dengan kalangan seniman, budayawan dan rohaniwan mengusulkan pengaturan mengenai peredaran karya-karya pornografi agar tidak dapat diakses secara bebas oleh semua kalangan. Puncaknya adalah pada Oktober 2008, dilakukan parade budaya secara besar-besaran di sejumlah kota di In-

donesia (antara lain Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado dan Jayapura) menolak RUU tersebut. Organisasi-organisasi perempuan juga giat melakukan lobi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara intensif, dan membuahkan penghapusan pasal pornoaksi dari RUU itu, serta penundaan pengesahannya sebagai UU. Tetapi, selama dua tahun berikutnya, ternyata RUU ini dilanjutkan kembali oleh DPR secara diam-diam dengan tidak lagi menyertakan publik, dan akhirnya disahkan pada 2009. Pada praktiknya, UU Pornografi ini kemudian dipakai untuk menjerat perilaku seksual (privat) yang diincar publik, dari para selebritas maupun orang kebanyakan.

Mengenai UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), atau UU No. 23 Tahun 2004, suatu rumah tangga, atau lebih tepatnya keluarga, di Indonesia secara hukum dibatasi oleh sejumlah undang-undang. Di antaranya terdapat UU Perkawinan 1974, yang secara jelas mengatur peran gender yang dilakukan laki-laki sebagai suami dan ayah dan oleh perempuan sebagai istri dan ibu. Laki-laki dinyatakan secara hukum berperan sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Secara sosial-budaya, ketentuan hukum ini sangat senafas dengan nilai-nilai patriarki dan pengutamaan kaum laki-laki dalam institusi keluarga, yang diperteguh lagi oleh ajaran-ajaran agama yang menetapkan laki-laki sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, suami harus diagungkan dan dapat melakukan apa saja untuk “kepemimpinan”nya. Termasuk ketika di dalam rumah tangga, mereka melakukan tindakan dan perbuatan kekerasan. Jika di ranah publik, hal

tersebut tidak dapat diterima dan dapat diperkarakan ke depan hukum, di ranah privat atau domestik, itu tidak dianggap tindakan melawan hukum. Memukul, menyiksa, menghinakan dan merendahkan perempuan di dalam lingkup rumah tangga dianggap setara dengan usaha “mendidik”, atau memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan oleh sang kepala keluarga. Sementara itu, perempuan dinyatakan sebagai ibu rumah tangga, dan tidak diakui sebagai pencari nafkah utama keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan dibayar lebih murah dari laki-laki ketika mengerjakan pekerjaan yang sama. UU PKDRT mengatur ulang posisi-posisi ini.

Dengan mengajukan, menggarap isi dan memperjuangkan seluruh proses legislasinya, gerakan perempuan di Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan pengesahan UU PKDRT pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, presiden perempuan pertama di Indonesia. Terlepas dari kekurangan yang terdapat di dalamnya, dan secara terus-menerus butuh perbaikan, disahkannya undang-undang ini mencatat beberapa pencapaian isu gender berikut:

1. Relasi gender yang timpang antara suami dan istri dilihat kembali (*revisited*) dan diperbaiki (*revised*), dengan adanya peluang hukum bahwa perempuan dapat memperkarakan ke depan hukum tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya — yang semula tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Negara menjadi bertanggung jawab, melalui hukum, untuk melindungi semua warga negaranya dari tindakan pidana kekerasan, sekali pun terjadi

di ranah domestik atau rumah tangga. Ini berarti kedudukan warga negara perempuan menjadi lebih “kelihatan”, dan diperhitungkan.

3. Terlepas dari pelaksanaan dan implementasinya di lapangan, UU ini memaksa para penegak hukum untuk memperhatikan ranah privat (keluarga dan rumah tangga) sebagai wilayah hukum, padahal semula itu diabaikan sebagai tempat di mana terjadinya perbuatan pidana.

Pencapaian perjuangan gerakan perempuan dalam mengadvokasikan lahirnya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa urusan-urusan di ranah privat, termasuk seksualitas, merupakan fokus perjuangan gerakan perempuan, dan tak henti-hentinya akan merupakan garapan organisasi perempuan. Hal ini adalah penanda perlawanan terhadap pemahaman luas, bahwa pemikiran dan tindakan politik hanya berlaku dan terjadi di ranah publik. Demokratisasi pada akhirnya juga telah sampai ke ranah privat, dan ini adalah sumbangan terbesar dari gerakan perempuan pasca rezim otoritarian Orde Baru.

Keberhasilan gerakan perempuan mengorganisasi dirinya dalam melakukan advokasi kebijakan publik yang responsif gender dilanjutkan dengan memperjuangkan kuota 30 persen bagi perempuan sebagai calon jadi dalam pemilu. Pada perumusan UU Pemilu Tahun 2004, organisasi perempuan intensif terlibat dalam ‘fraksi balkon’. Secara bera- mai-ramai, para aktivis dari berbagai organisasi perempuan dengan cermat mengamati jalannya sidang pembahasan draft UU Pemilu, untuk memastikan masuknya keten-

tuan kuota 30 persen perempuan sebagai calon anggota legislatif. Ketentuan itu akhirnya bisa lolos, masuk dalam rumusan UU Pemilu tersebut. Upaya-upaya tersebut merupakan capaian yang patut

dihargai, dan kita melihat bahwa organisasi perempuan sudah bisa memobilisasi suaranya ketika melakukan gerakan, demi lahirnya undang-undang yang responsif gender.²

Catatan Dalam Pelaksanaan UU Responsif Gender

Ratna Batara Munti dari LBH APIK Jakarta mengatakan, keberhasilan pencapaian UU yang responsif gender bisa ditambahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini masih hanya memberikan perlindungan untuk kasus-kasus besar seperti korupsi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan itu pun baru masuk dalam klausul penjelasan. UU Trafficking dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) No. 21 Tahun 2007 secara substansif sudah melindungi perempuan korban trafficking. Yang terakhir, UU Bantuan Hukum memastikan negara memberikan pembagian hukum yang tidak formal, termasuk pendampingan, dan memberikan kesempatan kepada paralegal serta mitigasi, sehingga bisa dipastikan bahwa pendampingan hukum bukan hanya diberikan oleh pengacara formal.

Euforia keberhasilan yang diraih oleh organisasi perempuan juga harus disikapi dengan pengawasan, atau pengawalan, terhadap implementasi UU di lapangan. Hal ini menuntut perhatian organisasi perempuan, mengingat instrumen hukum sangat lemah. Dalam kasus Trafficking dan KDRT, memang terdapat banyak kemajuan dalam merespons kekerasan terhadap perempuan, walaupun masih cukup banyak kendala dalam implementasinya di lapangan. Terkait UU Trafficking, ada banyak kasus perdagangan manusia di daerah yang tidak bisa menggunakan UU Trafficking, karena pemikiran penegak hukum yang membenturkan UU Trafficking dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak aparat penegak hukum yang tidak terbuka terhadap UU baru seperti UU Trafficking, sehingga sosialisasi tentang UU baru bagi perangkat hukum sangat diperlukan. Hal ini sangat penting, karena keterbatasan informasi dan sosialisasi kepada para penegak

² Feminisme dan gender adalah dua konsep yang saling berhubungan, terlepas dari adanya beberapa pandangan kalangan feminis yang tidak setuju dua konsep ini dihubungkan, sebagaimana Christina Hoff Sommers dalam bukunya (1992) *Who Stole Feminism?*, yang segera dibantah oleh pionir teori dan gerakan Feminisme, Gloria Steinem, yang mengatakan dalam wawancara dalam ter-

bitan *Mother Jones* (1995), bahwa dia tidak mempercayai pemisahan tersebut. Baginya, Feminisme dan Gender berhubungan, karena Feminisme adalah cara pandang yang melihat bahwa di tengah masyarakat ada diskriminasi berdasarkan gender (lihat Pamela Aronson, *Feminist or "Post-Feminist"? Young Women's Attitudes toward Feminism and Gender Relations*, Michigan State University, 2003.

hukum mengakibatkan implementasi dari penegakan hukum yang responsif gender jadi terkendala. Contohnya, kasus seorang anak perempuan dari Jawa Barat usia 12-15 tahun yang dijual di Lombok. Karena dianggap tidak ada surat kontrak kerja, maka kasus itu tidak bisa diproses secara hukum. Ini membuktikan bahwa pemahaman para penegak hukum masih sangat minim. Juga ada pemahaman umum yang berlaku di kalangan aparat penegak hukum, bahwa kalau sebuah kasus berhasil ditangani dengan baik di kepolisian, maka nantinya pasti akan dibenturkan di kejaksaan.

Kendala dalam penerapan UU Trafficking memang karena gugus tugas dari para stakeholder, yang seharusnya bertugas untuk menjaga implementasinya, tidak berjalan dengan baik. Hal ini bukan hanya terjadi pada UU Trafficking saja, namun juga banyak terjadi pada gugus tugas dari UU lainnya, karena belum ada standar operasi penegak hukum, terutama di daerah. Maka akan butuh pengawalan ekstra untuk pelaksanaan penegakan hukum. Seharusnya ada Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan tiap UU, terutama UU yang baru, sehingga koordinasi antara departemen dengan organisasi perempuan di lapangan sangat dibutuhkan.

Euforia keberhasilan tidak boleh membuat organisasi perempuan lupa bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan. Masih ada beberapa masalah yang mengikat tangan perempuan, misalnya UU Perkawinan yang mencerminkan ketidakadilan bagi perempuan. UU tersebut menyebutkan bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga, sedang suami adalah kepala keluarga. Contoh terdapat pada UU Kesehatan, dalam hal aborsi, yang menjadi PR bagi organisasi perempuan. Contoh lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu belum ada kebijakan atau UU yang secara khusus menjelaskan tentang kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Jika dilihat, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual yang ringan pun, belum masuk dalam ranah hukum pidana, tetapi masuk sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Memang menjadi sangat penting bahwa Indonesia segera mempunyai instrumen hukum yang lebih adil bagi perempuan, khususnya dalam isu kekerasan seksual. Mempunyai instrumen hukumnya saja tidak cukup.

Selain itu, gerakan perempuan saat ini masih menghadapi banyak persoalan. Ruang privat perempuan masih terkendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Isu-isu domestik perempuan, seperti otoritas atas tubuh, poligami, perda Syariah yang mewajibkan pengenaan jilbab, seksualitas, isu perkosaan, masih harus terus mendapat

perhatian dalam definisi gender sebagaimana disebutkan. Ini menjadi catatan penting bagi organisasi perempuan. Jangan sampai organisasi perempuan terjebak memberi banyak perhatian mengadvokasikan perbaikan kondisi dan posisi perempuan di ruang publik, sementara ketidakadilan terhadap perempuan di ruang privat masih terjadi.

Saat ini, organisasi dan gerakan perempuan kembali disibukkan dengan proses pembahasan dan pembentukan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang sudah masuk dalam tahap dengar-pendapat publik di DPR.

Paradigma Gender yang Umum di Masyarakat

Sungguh pun demikian, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta kemampuan untuk mengembangkan organisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan perempuan secara umum apabila paradigma gender tidak berubah, yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Hampir seluruh organisasi perempuan menetapkan visi dan misinya sebagai bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak asasi perempuan. Melihat visi dan misi dari organisasi perempuan ini memang sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan feminisme oleh Martin, itu menunjukkan bahwa organisasi perempuan yang memperjuangkan visi dan misi tersebut sejak era Orde Baru merupakan gerakan yang menjadikan feminisme sebagai pegangan dan rambu-rambu dalam berkegiatan.

Paradigma gender yang memberikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan menjadi landasan dalam kehidupan pribadi dan berorganisasi, tercermin dalam kemampuan organisasi menjalankan kerja-kerjanya, termasuk kerja dalam mengadvokasikan lahirnya kebijakan publik yang responsif gender. Dalam kenyataan, masih banyak peraturan perundangan dan kebijakan publik yang ti-

dak berpihak kepada perempuan. Masalah konstruksi gender menjadi landasan berkegiatan bagi organisasi perempuan di berbagai tempat dengan mengamati relasi perempuan dan laki-laki.

“Waktu itu sebetulnya, pada tahun 1990, dimulai dari beberapa perempuan desa yang punya keinginan untuk mengubah dirinya. Padahal waktu itu, (berangkatnya) dari perbincangan kecil di tingkat perempuan desa, misalnya, mengapa pendidikan perempuan selalu lebih rendah? Mengapa kalau keluar rumah ada batasan-batasan? Mengapa pekerjaan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki? Dari perbincangan-perbincangan itu, terjadi *curhat-curhatan* sesama perempuan. Kemudian mereka paham bahwa ada yang tidak adil. Akhirnya mereka sepakat. Waktu itu mereka membuat kelompok-kelompok yang punya kegiatan mengorganisasi ibu-ibu, dan punya kegiatan sanggar belajar anak pendidikan anak usia dini (PAUD)”.³

Organisasi perempuan di Deli Serdang dan sekitarnya merumuskan konstruksi dan masalah gender berdasarkan kondisi sosial masyarakat setempat, dalam kehidupan nelayan dan buruh perkebunan sawit, kopi dan karet. Peran dan posisi perempuan dalam masyarakat itu dibatasi. Organisasi seperti Hapsari dan Pesada melakukan penguatan posisi kaum perempuan melalui kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang melibatkan kaum perempuan. Melihat banyak perempuan bekerja untuk mencari penghasilan bagi keluarganya, mereka juga mendorong penguatan aset bagi perempuan,

³ Wawancara dengan Zulfa Suja, Anggota Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

yang bertujuan agar perempuan mampu mandiri secara ekonomi. Pada awalnya, pengumpulan para perempuan tersebut masih melalui pendekatan normatif. Misalnya, pendekatan kepada para ibu yang punya anak, tapi tidak sanggup mereka masukkan ke Taman Kanak-kanak (TK) swasta karena bayarannya cukup tinggi. Mereka merasa butuh untuk memasukkan anaknya ke PAUD yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Hapsari dan Pesada. Ketika mulai, banyak ibu-ibu yang memasukkan anaknya ke PAUD, kemudian kegiatan dikembangkan ke arah pengorganisasian perempuan. Mereka mulai mendiskusikan persoalan sehari-hari yang mereka hadapi sebagai perempuan nelayan atau pekerja kebun. Sering mereka sebutkan persoalan kesetaraan gender, yaitu pertanyaan-pertanyaan sekitar “relasi untuk berbagi peran serta posisi antara laki-laki dan perempuan”, sampai pada pengembangan aset bagi perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif.

Selain menjadi buruh tani dan perkebunan, perempuan desa di Deli Serdang juga banyak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dan Singapura, demi menambah pendapatan agar dapat membangun rumah dan mendukung perekonomian keluarga. Dalam situasi seperti itu, perempuan memikul beban ganda karena, selain bertanggung jawab untuk urusan domestik, mereka juga bekerja membantu suami mencari nafkah.

“Hasil pendapatan suamiku sebagai nelayan sangat tidak mencukupi. Jadilah aku ke seberang menjadi TKI”.⁴

⁴ Wawancara dengan Sarah, Anggota Credit Union Hapsari, Deli Serdang 22 Mei 2012.

Di samping PAUD, melihat kenyataan di lapangan, di mana perempuan banyak menjadi tulang-punggung keluarga, baik Hapsari maupun Pesada mengembangkan model penguatan ekonomi melalui Credit Union (CU).

“Saya punya pikiran bahwa untuk kesetaraan gender, pendekatannya lewat perempuan dulu. Ini menjadi kendaraan perempuan. Setelah itu, terserah mau ke mana. Jadi Credit Union yang kami kembangkan betul-betul CU perempuan, tidak sama dengan yang lain. CU adalah tempat kami mendidik banyak pemimpin-pemimpin perempuan. Itu bukan hanya untuk menabung, tetapi juga untuk mereka mempertanyakan dirinya sebagai perempuan, aktif berkegiatan di organisasi. Dan perannya sebagai pelaku penguatan untuk menguatkan banyak orang”.⁵

Di samping permasalahan yang biasa mereka hadapi, perempuan yang sudah bergabung dalam organisasi mulai menyadari bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil. Dalam pembicaraan FGD, Habibah mengatakan:

“Saya melihat ada ketidakadilan dalam masyarakat. Ketika suami memegang sapu dan membersihkan rumah, mereka mengolok-olok seolah-olah pekerjaan itu hina bagi laki-laki. Tapi ketika perempuan memegang cangkul dan carit, mereka diam dan tidak berkomentar... Seharusnya mereka malu bahwa kami juga bisa mengerjakan pekerjaan mereka”.⁶

⁵ Wawancara dengan Dina Lumbantobing, Pendiri Pesada, Medan 25 Mei 2012.

⁶ Wawancara dengan Habibah, Anggota SPI Serdang Bedagai, Serdang Bedagai 23 Mei 2012.

Dalam wawancara dengan perempuan anggota Serikat Hapsari, komentar-komentar mirip yang dilontarkan Habibah sering kita dengar. Para perempuan juga melihat bahwa mereka terpinggirkan secara sosial. Mereka mengatakan tidak adanya pengakuan terhadap perempuan dalam musyawarah keluarga, apalagi musyawarah desa.

“Kami dulu tidak tahu informasi desa, dan juga tidak dilibatkan dalam tiap kegiatan desa”.⁷

Jumasni juga menambahkan bahwa dengan beraktivitas, dia kini semakin paham apa yang disebut sebagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dia mengatakan bahwa dengan aktif berorganisasi, perempuan menjadi mengetahui informasi dan bisa aktif dalam kegiatan desa. Para anggota Serikat Hapsari, yang tergabung dalam Serikat Perempuan Independen (SPI) Serdang Bedagai, juga merumuskan persoalan yang dihadapi perempuan di daerahnya, untuk kemudian menuliskannya dalam tujuan organisasi, sbb:

“Terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, tanpa ada penindasan antara perempuan dan laki-laki, dengan memberikan penghargaan yang sama terhadap hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki”.⁸

Sementara di Padang, permasalahan perempuan memiliki wajah yang berbeda.

Yuni Walrif, calon anggota Solidaritas Perempuan di Padang, mengatakan bahwa adat-istiadat yang ada di masyarakat Minang walau mengacu kepada garis keturunan ibu (matrilineal), dalam praktiknya membiarkan laki-laki yang mengambil keputusan-keputusan strategis keluarga, apakah itu oleh suami atau saudara laki-laki sang perempuan. Fitriyanti, direktur Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Padang, mengatakan:

“Konsep budaya di Padang memang matrilineal, tapi dalam praktiknya, banyak kasus suami tidak memberi nafkah, suami mengambil keputusan tanpa persetujuan istri, suami menjual tanah keluarga yang secara adat atas nama perempuan, padahal itu diwarisi oleh keluarga perempuan sesuai dengan konsep matrilineal”.⁹

Masyarakat Minang yang hidup dalam Syariat Islam menyatakan bahwa adat mendasari diri pada cendekia, dan cendekia mendasari diri pada kitab suci (Agama Islam). Ini berarti perintah tertinggi adalah perintah agama, yang dianggap menggariskan bahwa laki-lakilah adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, laki-laki diinterpretasikan dapat memutuskan segala hal tanpa meminta pendapat istrinya.

“Perempuan Padang tidak bisa keluar dari budaya patriarki. Hal ini mungkin terjadi karena kesalahan interpretasi

⁷ Wawancara dengan Jumasni, Anggota SPPN Serdang Bedagai, Serdang Bedagai 22 Mei 2012.

⁸ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan SPI Serdang Bedagai, Serdang Bedagai 23 Mei 2012.

⁹ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M Padang, Padang 14 Mei 2012.

“Adat basandi sara, sara basandi kita-bullah”.¹⁰

Dengan begitu, perempuan dianggap sebagai ibu rumah tangga yang harus menjaga nama baik keluarga. Terdapat istilah bahwa perempuan adalah *“limpapeh rumah gadang”*. *Limpapeh* artinya kupu-kupu, sehingga perempuan dikatakan sebagai hiasan di rumah, atau hiasan bagi keluarganya. Hal ini membuat laki-laki merasa bahwa perempuan bertanggungjawab untuk menjaga martabat keluarga, termasuk bertanggungjawab terhadap semua pekerjaan rumah tangga, sebagaimana yang disampaikan oleh Tya, relawan Women Crisis Centre (WCC) Nura-ni Perempuan Padang.

“Ketimpangan peran laki-laki dan perempuan sangat kentara: di rumah saudara laki-laki tidak akan pernah mau menyapu, mencuci piring dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika ada acara dengan kawan-kawan, anak laki-laki pasti tidak mau membantu menyapu atau mencuci piring setelah acara selesai, karena memang secara nilai dalam masyarakat, hal ini pantang dilakukan. Ini dianggap masih menjadi persoalan”.¹¹

Dalam diskusi dengan kelompok ibu-ibu pengusaha kecil anggota ASPPUK Padang, mereka mengatakan bahwa:

“Walau ada juga ibu yang menjadi pencari nafkah utama, tetapi bapak yang

merasa kepala keluarga seringkali melarang ibu ikut dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Walau tidak semua begitu, tapi masih sedikit yang bisa menerima kalau istrinya punya kegiatan lain di luar rumah. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hanya di rumah tangga, tapi juga dalam contoh lain, seperti di perbankan. Pengusaha kecil perempuan tidak bisa pinjam uang. Untuk mengakses dana pinjaman, nasabah harus menunjukkan jaminan berupa surat-surat tanah, rumah, kendaraan atau harta lainnya, yang *notabene* atas nama suami, sehingga perempuan sulit, bahkan tidak mungkin bisa mengakses pinjaman bank tanpa persetujuan suami. Begitu pun, ketika ada dana bantuan yang diberikan ke desa untuk pengusaha kecil, perempuan tidak dapat mengaksesnya. Mereka tidak diajak duduk dalam kepengurusan desa ketika rapat pemberian bantuan dana untuk pengusaha kecil tersebut dilakukan, sehingga mereka tidak mendapat informasi”.¹²

Ketimpangan tersebut juga terasa sampai ke desa-desa, namun perempuan tampaknya tidak mampu menyuarakan keinginan mereka.

“Kekuasaan masih dipegang oleh laki-laki. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan oleh perempuan korban karena takut. Persoalan ini juga terjadi pada perempuan yang bekerja, baik pada perempuan di sektor tani maupun informal, dan kerja lainnya. Mereka tertekan, karena keuangan masih dipegang oleh suami”.¹³

¹⁰ Wawancara dengan Yuni Walrif, calon anggota Solidaritas Perempuan Padang, Padang 14 Mei 2012.

¹¹ Wawancara dengan Tya, Relawan WCC Nurani Perempuan, Padang 17 Mei 2012.

¹² Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan ASPPUK Padang, 17 Mei 2012.

¹³ Wawancara dengan Tanty Herida, Sekwil KPI Wilayah Sumatera Barat, Padang 17 Mei 2012.

“Keberanian perempuan untuk bersuara di publik masih kurang, terlebih di pedesaan. Di keluarga, perempuan dianggap hanya mengerjakan urusan dapur, sumur, kasur”.¹⁴

“Kita sebagai perempuan dulu sering diremehkan, dilecehkan. Kita tidak pernah tahu hak perempuan, tidak pernah didengar oleh masyarakat... Namun dengan berkelompok, kita mulai tahu apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”.¹⁵

Sementara di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pengaruh agama Islam juga sangat kuat, membuat kondisi dan posisi perempuan tidak jauh berbeda dengan rekan-rekannya di wilayah lain Indonesia. Perempuan dalam pernikahan memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, menggambarkan kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat NTB. Budaya kawin muda membuat banyak perempuan berhenti sekolah. Akibat hambatan keuangan, mereka mengambil jalan pintas untuk menikah pada usia muda. Ternyata tidak sedikit kasus pernikahan usia muda — karena kemiskinan dan rendahnya pendidikan — sangat merugikan perempuan, karena penerapan budaya poligami dan perceraian yang terlalu mudah dilakukan.

“Yang utama, para perempuan tersebut0 banyak tidak bekerja. Janda-janda itu adalah buruh. Di awal saya turun ke sini, 98 persen buruh tani, buruh angkut, buruh kebun, bekerja saat mereka ber-

keluarga. Tetapi begitu bercerai, ya, mereka miskin kembali, karena ada budaya di sini yang membuat perempuan, jika bercerai, tidak mendapat harta apa-apa. Begitulah, saya membawa penyadaran mereka tentang ekonomi, penyadaran atas hak harta bersama. Pada saat mereka menikah lagi, mereka tidak miskin, karena sudah dibangun ekonominya. Tapi lalu cerai, dan mereka miskin lagi”.¹⁶

Hal lain yang memberatkan perempuan adalah tidak adanya kebijakan yang menjamin perempuan dapat memperoleh hak reproduksi. Walaupun di tingkat nasional sudah ada kebijakan yang menjamin pembayaran upah buruh perempuan yang cuti menstruasi dan melahirkan, kebijakan di tingkat lokal tidak sepenuhnya mendukung hal tersebut.

“Banyak kasus buruh tembakau — karena di Lombok ini ‘kan banyak perkebunan tembakau — misalnya, mereka menstruasi atau habis melahirkan atau mau melahirkan, mereka tidak digaji. Kalau tidak bekerja, ‘kan tidak dapat gaji. Bagaimana sebetulnya tanggung jawab pabrik? Kalau begitu, ini ‘kan enak *aja*, terlalu mudah bagi pabrik untuk mengeluarkan buruh perempuan. Mereka memecat orang seenaknya *aja*. Terus soal perbedaan gaji. Begitu pun dengan buruh informal, seperti pembantu rumah tangga, yang samasekali tidak dilindungi oleh undang-undang”.¹⁷

Selain permasalahan interpretasi agama dan budaya yang meminggirkan perempuan,

¹⁴ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas, Padang 15 Mei 2012.

¹⁵ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan Kelompok Pekka Mataram, Mataram 15 Mei 2012.

¹⁶ Wawancara dengan Siti Zamraini, Koordinator Wilayah Pekka NTB, Lingsar 15 Mei 2012.

¹⁷ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur LBH APIK NTB, Mataram 16 Mei 2012.

kemiskinan atau permasalahan ekonomi juga membuat perempuan mengalami ketidakadilan. Ada hal-hal spesifik, seperti kebiasaan menikah muda, yang dianggap oleh masyarakat Lombok sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Padahal ini sangat merugikan perempuan, dari segi sosial dan ekonomi, maupun dari segi kesehatan reproduksinya. Situasi ini mengakibatkan para perempuan makin terbelit di dalam kemiskinan. Selain kemiskinan, budaya poligami dan kawin-ceraai yang sangat tinggi di NTB (dan juga di wilayah Indonesia lainnya) semakin memperparah kondisi yang ada. Penghargaan terhadap perempuan begitu rendahnya, saat diceraikan oleh suaminya, tidak ada kewajiban bagi suami untuk membiayai istri atau anak hasil perkawinan tersebut. Di Lombok, apabila suami sudah mengatakan cerai kepada istri, maka itu dianggap sah, tidak ada keharusan untuk mendapatkan surat cerai resmi.

“Tradisi di sini mengusung praktik menceraikan istri. Prosesnya mudah sekali, hanya dengan mengatakan cerai, maka perceraian itu sudah sah. Yang menjadi korban, ya, perempuan lagi, karena tidak ada kewajiban yang berlaku di masyarakat untuk menghidupi bekas istri, atau anak-anaknya”.¹⁸

“Budaya di sini, kalau perempuan cerai, dia tidak dapat harta apa-apa. Penyadaran atas hak harta bersama di sini harus ada, sehingga pada saat mereka menikah lagi, mereka tidak buta sama sekali me-

ngenai harta gono-gini, sehingga waktu bercerai, mereka tidak miskin lagi”.¹⁹

Di Lampung, sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan agraris dan pesisir, dan merupakan masyarakat yang miskin. Di wilayah pesisir pantai, banyak yang bermata-pencarian nelayan dan buruh informal:

“Selesai suaminya yang nelayan pulang dari laut, ibu-ibunya menjual hasil tangkapan suaminya. Tidak ada waktu untuk ke posyandu. Perempuan disibukkan mencari nafkah dalam keluarga”.²⁰

Permasalahan kemiskinan di Lampung menimbulkan banyak kasus perkosaan. Penduduk yang miskin menempati rumah-rumah kecil yang dihuni oleh enam anggota keluarga. Kondisi ini melahirkan kesempatan terjadinya *incest* yang disertai kekerasan. Data statistik untuk kasus *incest* cukup tinggi. Tiap tahun tercatat sekitar 10 kasus dalam kurun 2005-2011. Hal ini menunjukkan bahwa institusi keluarga tidak menjamin tempat yang aman bagi perempuan. Kasus *incest* cenderung terjadi oleh bapak terhadap anak, atau kakak laki-laki terhadap adik perempuan. Ketika kasus tersebut terjadi, keluarga cenderung menutupinya, karena dianggap aib keluarga. Posisi perempuan dalam hal ini dibiarkan rentan oleh keluarganya sendiri.

¹⁸ Wawancara dengan Samsudin, Ketua Div. Pengorganisasian Basis Kerakyatan Perkumpulan Panca Karsa, Mataram 17 Mei 2012.

¹⁹ Wawancara dengan Siti Zamraini, Koordinator Wilayah Pekka NTB, Lingsar 15 Mei 2012.

²⁰ Wawancara dengan Selly Fitriani, Damar Lampung, Lampung 11 Mei 2012.

“Di Lampung, banyak perkosaan yang terjadi oleh bapak terhadap anak, *incest*, di mana kasus yang dilaporkan rata-rata 10 tiap tahun, sejak tahun 2005”.²¹

Organisasi Perempuan dan Isu Seksualitas

Beberapa organisasi pernah melakukan diskusi tentang seksualitas, namun isu tersebut belum secara berkesinambungan masuk dalam kegiatan organisasi. Persoalan seksualitas terus terjadi di ruang privat. Hal ini disebabkan karena seksualitas dianggap isu sensitif, dan kurang populer dibandingkan dengan isu sosial, politik dan ekonomi. Yang terjadi adalah, para perempuan lebih memilih untuk membatasi atau menghindari membahas masalah yang berhubungan dengan seksualitas. Bahkan tidak sedikit perempuan memilih dengan kesadaran penuh untuk mengesampingkan dulu isu ketidakadilan di ruang privat, dengan mengatakan sbb:

“Kalau saya akan pergi ke kelompok, atau ada diskusi, pelatihan atau kegiatan apa pun, saya harus menyiapkan semua kebutuhan suami dan anak-anak terlebih dahulu. Saya akan masak makanan untuk keluarga selama saya pergi, baju-baju sudah bersih tinggal dipakai, rumah sudah saya bersihkan dulu, serta kerja-kerja lainnya di rumah”.²²

Perhatian terhadap ketimpangan yang terjadi di ruang publik dianggap lebih mudah untuk diadvokasikan dibanding ketidak-

adilan yang terjadi di ruang privat. Para perempuan khawatir untuk menimbulkan keributan rumah tangga. Mereka khawatir suaminya akan melarang mereka untuk ke luar rumah guna beraktivitas. Hal ini juga mengakibatkan perempuan takut jika keributan akan berakibat buruk bagi perkawinannya. Mereka tidak siap diceraikan oleh suaminya.

Walaupun aktivis perempuan banyak yang membahas isu poligami dan pembagian peran gender dalam amandemen UU Perkawinan, isu ini tetap tidak mudah untuk dilelai, apalagi dengan menguatnya nilai-nilai dan kelompok fundamentalis yang muncul dalam tahun-tahun terakhir. Organisasi perempuan perlu memikirkan strategi untuk menghadapi kuatnya arus konservatisme dewasa ini. Sementara itu, dalam parlemen muncul pembahasan tentang pentingnya UU Keadilan dan Kesetaraan Gender, yang mengakibatkan pembahasan tentang amandemen UU Perkawinan menjadi tertunda. Pembahasan amandemen UU Perkawinan dinilai sangat sensitif, sehingga organisasi harus mengkaji secara teliti tiap aspeknya sebelum memberikan masukan untuk amandemen UU tersebut.

Perkosaan masuk dalam pembahasan revisi KUHP. KUHP yang berlaku di Indonesia masih menggunakan rumusan yang dibuat pada zaman Belanda. Banyak sekali persoalan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan yang diatur secara bias, karena perumusan KUHP itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Isu seksualitas sebetulnya sudah lama menjadi perhatian gerakan perempuan, terlihat dengan begitu besarnya respon gerakan terhadap lahirnya UU Anti Pornografi. Ge-

²¹ Wawancara dengan S.N. Laila, Gerakan Perempuan Lampung, Lampung 9 Mei 2012.

²² Wawancara dengan Riani, Ketua Dewan Eksekutif Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

lombang aksi yang sangat besar, kuat dan melibatkan banyak orang ketika pembahasan UU Anti Pornografi muncul akhirnya dipatahkan oleh kekuatan fundamentalis agama. Negara tampaknya lebih memberikan peluang kepada kelompok fundamentalis agama untuk berperan dalam mendefinisikan UU Anti Pornografi tersebut. Menurut Lia dari SP Mataram:

“Kalau di daerah seperti Mataram, bahkan aktivis sendiri masih belum yakin tentang pendapat mereka mengenai seksualitas. Mereka sendiri masih sangat bias dengan isu seksualitas”.²³

Hal ini menarik untuk dianalisis. Aktivis perempuan sangat keras menyuarakan hak perempuan, tapi kalau memasuki ranah seksualitas, terjadi keengganan untuk membicarakannya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Selly dari Damar Lampung menyatakan:

“Seksualitas belum menjadi fokus kami di Lampung, karena ternyata isu ini harus dimulai dari adanya orang yang menanyakan, mendiskusikan, atau merespons isu itu. Ketika tidak ada yang menanyakan, maka menjadi hilang isunya dan dianggap belum krusial untuk dibicarakan. Kami lebih fokus pada pembagian peran gender, lingkup perempuan, kekerasan seksual, tapi tidak menyentuh isu identitas/orientasi seksualitasnya. Kalau masalah seksual, pasti hanya kekerasan seksual saja. Di sini saya baru berpikir bahwa isu seksualitas juga penting untuk didiskusikan”.²⁴

Sementara itu, Afank dari Ardhanary Institute Jakarta mengatakan:

“Kalau menurut aku, ini salah satu kelemahan gerakan perempuan, yaitu melupakan orientasi seksual sebagai isu organisasi. Kalau di Ardhanary, kami sudah terlepas dari persoalan laki-laki dan perempuan, tapi membahas maskulin dan feminin”.²⁵

Afank mengatakan wajar jika daerah belum banyak membahas isu seksualitas, karena di Jakarta sendiri masih banyak aktivis atau organisasi perempuan yang tidak berani mengakui seksualitas sebagai isu penting. Perempuan yang lesbian pun masih belum mau terbuka kepada lingkungan tentang identitas seksualnya, karena masih curiga dan khawatir jika ia mengungkapkan pilihan orientasi seksualnya kepada khalayak ramai.

“Kadang kalau kita mau diwawancarai, harus oleh orang yang kita kenal, karena biasanya tidak banyak orang yang berani mengakui dirinya lesbian — karena tidak yakin apa itu lesbian. Ini yang menyebabkan kita menjadi eksklusif, padahal bisa jadi, orang di sekitar kita tidak mau mencari tahu lebih banyak tentang isu seksualitas”.²⁶

Sebetulnya secara eksplisit Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan sudah memiliki sektor Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), tapi isu tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik. Adanya organisasi macam Ar-

²³ Baiq Zulhiatina, Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mataram, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

²⁴ Selly Fitriani, Damar Lampung, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

²⁵ Afank, Ardhanary Institute Jakarta, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

²⁶ *Ibid.*

dhanary Institute membuat isu itu menjadi khusus dijalankan oleh Ardhanary, dan belum menjadi isu bersama organisasi perempuan.

Desi dari Harmonia Padang, saat acara FGD berlangsung di sekretariat WRI mengatakan, isu identitas gender dan orientasi seksual bahkan belum selesai dikemukakan di kalangan aktivis perempuan. Masih banyak aktivis perempuan yang justru memakai isu itu untuk mengintimidasi dan melemahkan individu sesama aktivis perempuan. Sebagai contoh, pengalaman panjang dalam kongres Koalisi Perempuan Indonesia 2010, yang sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya. Desi mendengar dengan telinga sendiri ada yang mengatakan bahwa, *“Kalau kita mendukung calon tertentu (disebutkan nama calonnya) berarti kita mendukung lesbian”*. Bahkan ada temannya yang mengatakan, *“Ngapain, sih, Desi bela orang itu? Kan dia lesbian...”*

Perkataan tersebut menimbulkan resistensi perempuan di wilayah dampingan. Beberapa bahkan menanyakan secara langsung kepada Desi tentang status identitas seksualnya. Hal ini menimbulkan munculnya penolakan di kalangan masyarakat. Namun dengan pendekatan dan penjelasan yang Desi berikan, akhirnya masyarakat bisa menerima Desi, dan menganggap bahwa identitas sosial adalah pilihan tiap orang. Dapat disimpulkan bahwa, ternyata, kalangan aktivis perempuan sendiri masih bermasalah dengan isu seksualitas, apalagi para perempuan di akar rumput.

Sementara Masni dari JarPUK Mataram, dalam kesempatan yang sama terkait soal orientasi seksualitas menambahkan:

“Saya kira perlu ada diskusi antar-gerakan perempuan, di tingkat aktivis, komunitas, basis dan kabupaten, tentang bagaimana membangun pemahaman yang sama terkait identitas dan orientasi seksualitas. Di Lombok, kalau kita berpenampilan tidak sama dengan perempuan pada umumnya, sampai ditanyakan: ‘Kamu laki-laki atau perempuan?’ Tidak hanya seksualitas, kekerasan seksual juga perlu didiskusikan. Karena kalau di Lombok, apa kata Tuan Guru adalah yang dilakukan. Jadi ketika perempuan sakit dan menolak berhubungan seks, maka akan langsung dianggap dosa. Pemahaman itu yang perlu kita luruskan di kalangan masyarakat di daerah-daerah. Saya sendiri butuh banyak belajar tentang isu itu, sehingga ketika harus menyampaikan ke masyarakat, lebih mudah”.²⁷

Juga Halwati dari Panca Karsa Lombok, masih dalam acara FGD yang sama, mengatakan:

“Panca Karsa sudah mulai mempermasalahkan di dalam komunitas jika ada kekerasan seksual di rumah tangga. Tapi masalahnya, kemudian kita dibenturkan dengan pendapat tokoh agama. Seringkali tokoh agama tidak setuju dengan isu yang kita angkat, dan akhirnya mereka memberi cap kepada negatif aktivis perempuan kepada masyarakat. Ini menjadi masalah bagi kita, karena mereka mengatakan aktivis perempuan sudah menggugat relasi, juga malah menggugat urusan seksualitas di rumah tangga. Ini sangat krusial yang kami hadapi di masyarakat. Akan lebih banyak cap-cap

²⁷ Masni, JarPUK Mataram, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

negatif bagi kita, perempuan, di masyarakat”.²⁸

Selain masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah yang banyak dialami oleh perempuan adalah kasus kesehatan reproduksi perempuan terkait KB dan dampak negatifnya. Di Lombok, alat kontrasepsi yang disosialisasikan hanya yang untuk perempuan. Alat kontrasepsi laki-laki sulit diperkenalkan, dan sosialisasi tentang vasektomi sangat tidak populer.

Yefri, dari WCC Nurani Perempuan Padang, menambahkan contoh kasus perkosaan, baik yang terjadi di ruang publik maupun domestik:

“Bukan hanya di Jakarta, tetapi di Padang bulan ini saja ada satu kasus percobaan perkosaan dalam angkot. Untungnya si korban bisa turun, melompat dari angkot, lalu jatuh dan luka-luka. Ada juga kasus perkosaan anak yang hidup di jalanan, dan satu kasus perkosaan mahasiswa, serta satu lagi kasus perkosaan mahasiswa universitas Islam. Kasus perkosaan terjadi di Minangkabau yang katanya Islami, (di mana) secara budaya perempuan “dimuliakan”, perempuan dilindungi. Namun ternyata juga banyak terjadi perkosaan yang kami laporkan ke kepolisian. Karena WCC bermitra dengan kepolisian, maka kasus cepat ditanggapi. Tapi banyak juga kasus perkosaan di mana pelakunya bebas, karena mereka membayar polisi sehingga kasus itu hilang. Atau mereka berdamai dengan perempuan korban, dengan jalan memberikan uang kepada korban, sehingga para keluarga perempuan kor-

ban menerima uang tersebut, dengan alasan anak atau saudara perempuannya yang diperkosa akan lebih malu lagi kalau kasusnya dibawa ke ranah hukum, sehingga uang ganti rugi dianggap cukup untuk menutupi kasus tersebut”.²⁹

Dalam diskusi dikatakan bahwa laki-laki menganggap seksualitas dan tubuh perempuan bisa dikuasai dengan uang. Peserta merasa perlu ada upaya besar untuk mencari solusi, untuk menghentikan penyalahan kepada perempuan. Pernah dalam diskusi dengan Bundo Kanduang, yang justru disalahkan adalah pihak yang perempuan. Pernah juga, ketika ada pembicaraan untuk mencari solusi atas masalah perkosaan, para peserta malah menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, menganggapnya bahan tertawaan, yang justru merupakan bentuk pelecehan lagi bagi perempuan.

Lia dari SP Mataram menambahkan bahwa masyarakat menganggap tubuh perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Seringkali perkosaan tidak dilaporkan ke polisi karena dianggap akan mempermalukan keluarga. Dalam mempertimbangkan kehormatan keluarga, seringkali korban justru dinikahkan dengan pelaku.

Sebenarnya, isu perkosaan sudah dikampanyekan oleh Yayasan Kalyanamitra sejak tahun 1991. Hal yang diperjuangkan, misalnya, bagaimana korban bisa menjadi *agent of change*, yang dapat berbagi pengalaman dengan rekan yang lain agar kasus yang sama tidak terulang lagi. Ternyata isu dan pokok pembahasan mengenai masalah ini ma-

²⁸ Baiq Halwati, Panca Karsa Lombok, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

²⁹ Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

sih sangat relevan untuk ditelaah sampai saat ini.

Bentuk dan Karakter Organisasi Perempuan

Suasana politik Indonesia pada masa setelah tumbanganya Orde Baru, yang disebut sebagai Era Reformasi, menjadi sangat terbuka. Ini berimplikasi luas pada dinamika gerakan sosial, khususnya gerakan perempuan di Indonesia—terlebih di Jakarta sebagai pusat arena pergulatan politik nasional. Berbagai organisasi perempuan yang lahir kemudian sangat dipengaruhi oleh konteks politik ini, dan juga pengaruh pemikiran feminis maupun kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Organisasi perempuan tumbuh subur di Jakarta, dari yang bercorak keagamaan, developmentalis, maupun yang bersifat kritis dan transformatif. Ada yang berbentuk ormas, NGO/LSM, perkumpulan, koalisi, perserikatan, federasi sampai komisi nasional, seperti Komite Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (dikenal dengan sebutan Komnas Perempuan). Bidang garapan dan isu yang dikerjakan oleh organisasi perempuan juga lebih bervariasi.

Dari penelitian yang dilakukan, maka bisa dipetakan bahwa beberapa organisasi perempuan yang tumbuh pada era reformasi masih mempertahankan bentuk yayasan, dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat, namun mempunyai kegiatan di daerah lain, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai pada tingkat desa. Kegiatan organisasi ini biasanya mendorong peningkatan kapasitas aktor-aktor lokal, baik dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan pendidikan dan pengorganisasian masyarakat.

Di samping itu, tidak sedikit organisasi yang berubah bentuk menjadi perkumpulan, dengan mengumpulkan beberapa orang yang dianggap mumpuni di bidangnya untuk duduk dalam Dewan Pembina organisasi. Dewan ini secara berkala memberikan masukan untuk arah dan tujuan organisasi, serta turut terlibat dalam evaluasi kegiatan organisasi tersebut. Dewan Eksekutif, atau Pengurus Harian diawasi oleh Dewan Pengurus atau Dewan Pembina. Dengan alasan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang seperti dalam bentuk yayasan, yang dipimpin oleh seorang direktur, maka perkumpulan dianggap lebih bertumpu pada kepemimpinan kolektif dan dianggap merupakan bentuk kepemimpinan yang ideal oleh organisasi perempuan. Ternyata, kepemimpinan kolektif yang terjadi lebih dalam bentuk bertambahnya jumlah orang yang terlibat dalam menentukan arah dan tujuan organisasi, tetapi bukan kepada pembagian kekuasaan. Adapun bentuk pengurus di dalam perkumpulan juga tidak homogen; ada eksekutif, yang bertanggungjawab kepada badan pengurus, dan ada juga yang bertanggungjawab kepada rapat umum anggota seperti tuturan Halwati dari Perkumpulan Panca Karsa Mataram.

“Dulu Panca Karsa itu Yayasan, dan sekarang Perkumpulan, karena kejar-kejaran dengan adanya UU Yayasan dan Perkumpulan yang baru. Lalu kalau Yayasan, ’kan pengambil-keputusan tertinggi ada di tangan pendiri, termasuk kepemilikan aset, dll. Kalau organisasi pailit, maka semua aset Yayasan menjadi hak badan pendiri. Kalau Pancakarsa sebagai perkumpulan, keputusan tertinggi ada di Rapat Umum Anggota (RUA) yang dilakukan secara tahunan, yang

merupakan koordinasi antar-anggota. Ada mekanisme lain, di mana rapat anggota dilakukan tiap tiga tahun, untuk memilih siapa yang akan memimpin dan menjalankan organisasi. Jadi Badan Pengurus hanya mengawasi kepemimpinan Eksekutif. Untuk keputusan substansi, tetap ada di Rapat Umum Anggota. Tanggungjawab pekerjaan tetap di Eksekutif, termasuk juga Eksekutif harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota dalam Rapat Umum Anggota. RUA, selain menentukan pemimpin dan Badan Eksekutif organisasi, juga menentukan arah kebijakan, termasuk tentang isu yang akan diangkat oleh organisasi”.³⁰

Bentuk perkumpulan lain adalah Damar Lampung seperti yang dikemukakan oleh Selly di bawah ini:

“Damar juga badan hukumnya sebagai Perkumpulan, di mana kontrol organisasi ada di tangan Badan Pengurus, sebagai pengawasan dan kontrol terhadap jalannya Eksekutif”.³¹

Fitriyanti dari LP2M Padang juga menambahkan alasan mereka untuk menjadi Perkumpulan adalah:

“Dulu kami Yayasan, sekarang menjadi Perkumpulan. Pemilik keputusan tertinggi ada di Badan Pengurus, jadi Eksekutif (direktur) dipilih Pengurus. Ketika akhir tahun, maka direktur akan mempertanggungjawabkan kepada Pengurus, dan setelahnya, Pengurus akan me-

nyampaikan kepada Rapat Umum Anggota. Jadi Pengurus mengambil peran tanggung-jawab kepada Rapat Anggota”.³²

LP2M merupakan organisasi non-pemerintah berupa Perkumpulan, dalam mana pengurus eksekutif dinamakan sebagai Badan Pelaksana yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif, dan di atasnya ada Badan Pengurus yang ada Ketua, Sekretaris dan Bendaharanya. Perkumpulan diyakini lebih terbuka dan demokratis, karena kepemimpinan tidak dipegang oleh pendiri yang otomatis menjadi badan eksekutif. Bentuk yayasan dianggap lebih tertutup. Keanggotaan Badan Pengurus adalah mantan direktur yang sudah digantikan, ditambah dengan beberapa orang yang dianggap mumpuni dalam hal organisasi maupun substansi isu yang ditangani. Struktur organisasinya mengharuskan Badan Pelaksana, atau pengurus harian, harus membuat pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus, baik pertanggungjawaban program maupun keuangan. Badan Pengurus akan menentukan rapat Badan Pengurus guna membahas laporan Badan Pelaksana, sehingga tatakelola organisasi dianggap terbuka dan demokratis. Dalam kasus LP2M, ketika terjadi konflik, maka tidak jarang Badan Pengurus (atau individu Badan Pengurus yang pernah menjadi direktur eksekutif sebelumnya) ikut terlibat untuk menyelesaikan konflik.

“Utopia kita, ’kan kepemimpinan yang baik, katanya yang partisipatif. Tapi ke-

³⁰ Baiq Halwati, Panca Karsa Lombok, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

³¹ Selly Fitriani, Direktur Damar Lampung, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

³² Fitriyanti, Direktur LP2M, FGD Jakarta 29 Oktober 2012.

nyataannya, pemimpin, ya, satu orang yang bisa manajemen. Bentuk organisasi yayasan tapi partisipatif, 'kan sulit. Kalau di LP2M, saya lihat dan saya coba untuk belajar dari pengalaman, bagaimana menjadi LSM yang akuntabel. Kalau LP2M dari manajemen berjalan baik. Tetapi, tiba-tiba organisasi harus langsung menangani masalah gempa dan harus merekrut staf banyak, sehingga yang terjadi konflik, karena staf banyak, sementara manajemen masih dipengaruhi oleh orang lama. Terjadi konflik kepentingan. Mulai ada kubu dan kepentingan yang masuk, dan melakukan kasak-kusuk. Akhirnya, organisasi yang sebelumnya aman-aman saja dengan isu perempuan lalu tiba-tiba menjadi besar, dana besar, staf membengkak, dengan isu penanganan pasca-bencana. Manajemen organisasi tidak siap, atau tidak dipersiapkan menangani organisasi yang tiba-tiba besar tersebut. Hal ini membuat organisasi tidak siap dan terjadi konflik, sehingga beberapa staf harus keluar, atau dikeluarkan".³³

Keterlibatan Badan Pengurus dalam mengatasi persoalan di tingkat eksekutif memang bisa menimbulkan dilema. Di satu sisi bisa membantu. Namun tidak jarang justru bisa memperkeruh suasana, karena timbul anggapan bahwa sosok itu tidak netral. Mantan direktur juga duduk di Badan Pengurus, sehingga sulit untuk menjaga kenetralan posisi ketika terjadi konflik. Lebih jauh, dalam kasus LP2M, bahkan Badan Pengurus sampai memecat Direktur Eksekutif dan Manajer Program.

"... Pengalaman LP2M sulit membangun kepemimpinan yang partisipatif secara utuh. Yang terjadi, lembaga besar, dana besar, prinsip di organisasi sangat sulit diterapkan karena banyak kepentingan. Sebetulnya, pada awalnya, upaya komunikasi di LP2M terjadi dan berjalan dengan baik. Tetapi karena anggota Dewan Pengurus masih terdapat bekas ketua lama, sehingga sulit baginya untuk bersikap netral. Masih ada kekuasaan tersembunyi. Maka model Perkumpulan seperti ini masih jauh dari nilai-nilai demokrasi".³⁴

Struktur organisasi Perkumpulan, apabila tidak diikuti dengan penguasaan substansi dasar pemikiran feminis, atau solidaritas persaudaraan perempuan, dalam membangun dan menjaga organisasi demi mencapai keadilan dan kesetaraan gender, akan tetap saja tidak menjamin terjadinya organisasi yang lebih terbuka dan demokratis.

Perubahan Bentuk Organisasi Perempuan dan Tantangannya

Bentuk lain yang dipilih oleh organisasi perempuan adalah menjadi organisasi massa. Di tingkat pusat ada yang disebut sebagai Sekretariat Nasional, dan lalu ada cabangnya, yang dianggap bisa menjadi organisasi independen di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan mungkin bahkan sampai ke desa, seperti yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan.

³³ Wawancara dengan Desi, mantan Direktur Program LP2M, Padang 15 Mei 2012.

³⁴ *Ibid.*

Momentum Reformasi pada 1998 membuka ruang bagi berbagai organisasi pro-demokrasi untuk lebih aktif menjalankan program-program kerja, termasuk organisasi perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi didirikan melalui kongres yang diadakan pada 22 Desember 1998 di Yogyakarta. Tanggal itu sengaja dipilih dalam rangka memperingati Kongres Perempuan yang pertama dilakukan pada 22 Desember 1928. Kongres Koalisi Perempuan Indonesia pertama tersebut digagas oleh banyak aktivis perempuan yang ingin mengisi peluang ruang demokrasi yang terbuka, dengan mengumpulkan aktivis perempuan dari berbagai daerah, kalangan, dan isu kerja yang beragam. Dihadiri oleh lebih dari 500 aktivis perempuan dari berbagai kalangan dan daerah, kongres itu menunjukkan bahwa isu perempuan cukup kuat diperjuangkan di berbagai daerah dengan beragam kepentingan dan bidang garapan. Kongres itu berhasil mengidentifikasi dan menyepakati 15 sektor kegiatan, antara lain petani, nelayan, pekerja rumah tangga, buruh migran, pekerja seks komersial (yang kemudian diganti nama menjadi perempuan yang dilacurkan), ibu rumah tangga, lansia, buruh anak dan LGBT.

Ratna Batara Munti dari LBH APIK Jakarta mengatakan:

“Awalnya Koalisi Perempuan Indonesia juga tidak memaksakan isu dari nasional. Kalau di daerah banyak isu lokal, ya, silakan saja, walaupun itu isu sensitif di nasional. Ada KPI masih bertahan di beberapa daerah karena ada perpaduan isu dengan wilayah. Saya melihat kenapa ada KPI di daerah yang tidak aktif, hal

ini lebih karena dinamika organisasinya yang memang sedang tidak aktif”.³⁵

Yang banyak ditemui adalah organisasi KPI di daerah yang masih aktif menjalankan program kerjanya, biasanya karena di daerah tersebut ada kegiatan atau program dari pusat atau sekretariat nasional, sehingga ada kucuran dana dan penugasan kegiatan.

Menurut salah seorang pengurus, KPI memang beragam dinamikanya. Ada daerah yang cukup aktif programnya, dan tidak sedikit daerah yang tidak aktif karena kesulitan mencari dana sendiri, seperti KPI Padang, Palembang, dan beberapa daerah lain. Hal yang sama dihadapi oleh organisasi massa seperti Solidaritas Perempuan dan LBH APIK. Sementara itu, KPI Makassar tetap aktif, walau tidak ada dana atau program dari pusat. Fenomena yang menarik adalah kongres Koalisi Perempuan Indonesia, yang diadakan tiap empat tahun sekali, yang selalu dihadiri secara lengkap oleh anggota KPI dari semua wilayah. Tiap kongres KPI selalu dihadiri sekitar 500 orang, walaupun sebetulnya, banyak daerah KPI yang secara organisasi tidak aktif melakukan kegiatan kerja. Maka tampak sekali upaya memobilisasi kehadiran dalam kongres tidak sepadan dengan kegiatan di wilayah kerja. Setelah peserta pulang dari kongres, mereka kembali ke kondisi non-aktif. Hal ini terjadi karena mesin organisasi yang seharusnya tetap menjadi dinamika kerja organisasi tidak bekerja dengan baik. Apakah tidak ada kesepahaman isu, atau apakah karena kurang pengalaman dan pengetahuan cara kerja or-

³⁵ Wawancara dengan Ratna Bantara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, 24 Mei 2012.

ganisasi massa? Atau bahkan karena tidak jalannya sumbangan wajib dan sumbangan suka rela yang diharapkan bisa membantu memperpanjang nafas kerja organisasi? Yang lebih mengemuka dalam wawancara di daerah faktor pendanaan ternyata menjadi isu utama. Organisasi tidak bisa menjalankan aktifitas karena dana untuk itu tidak ada, di sini terlihat sekali bahwa ketergantungan kepada donor dan selama ini banyak dikucurkan melalui sekretariat nasional menjadi faktor utama redupnya aktifitas kerja di banyak kantor KPI di daerah. Situasi ini bukan hanya dialami oleh KPI saja namun juga dialami oleh organisasi perempuan yang berbasis massa seperti Solidaritas Perempuan, LBH APIK dan juga ASPPUK.

Organisasi seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan, LBH APIK dan ASPPUK dibentuk berdasarkan isu atau sektor yang dikerjakan. Namun ada juga organisasi massa dalam bentuk Serikat, di mana persatuan dilandaskan pada daerah atau teritori tertentu seperti Hapsari di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hapsari adalah Perserikatan, yang merupakan gabungan sejumlah organisasi perempuan. Selain Hapsari, di Sumatera Utara juga ada organisasi Pesada yang juga berbentuk perserikatan.

“...dengan adanya beberapa Serikat yang dibangun oleh Hapsari lalu kemudian dibentuklah Federasi sebagai payung dari beberapa Serikat tersebut. Adapun maksud dipilihnya bentuk organisasi federasi tersebut adalah (untuk) menumbuhkan kepemimpinan lagi di setiap anggota serikat” Karena para pemimpin serikat tersebutlah yang nantinya akan duduk dalam dewan eksekutif Federasi Hapsari.

Dengan begitu serikat selalu menumbuhkan calon pemimpin baru...³⁶

Lely Zaelani dari Hapsari mengatakan:

“Organisasi dengan bentuk seperti Koalisi Perempuan, yang dilandasi oleh kumpulan isu atau sektor garapan, cenderung lebih rentan dibanding organisasi berbentuk Serikat, yang didasari oleh daerah atau teritori tempat organisasi tersebut berada, untuk menjawab kebutuhan lokal, apakah itu kebutuhan pengadaan pendidikan usia dini (PAUD), atau isu lokal lainnya. Organisasi berdasarkan isu, atau sektor bidang garapan, belum tentu mengakomodasi kebutuhan suatu daerah, karena selalu berusaha untuk mencocokkan kebutuhan lokal dengan isu atau bidang garapan yang ada dari koalisi induknya”.³⁷

Organisasi yang berbasis daerah atau teritori, seperti Perserikatan Hapsari, memiliki keanggotaan berdasarkan daerah tertentu. Dengan begitu, kegiatan dan programnya lebih hidup, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat setempat karena kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti dengan kasus kebutuhan akan PAUD. Dengan begitu, para perempuan desa dan masyarakat desa lainnya melihat manfaat keberadaan organisasi untuk menjawab kebutuhan langsung mereka. Apabila kegiatan membutuhkan dukungan dari para pengambil keputusan desa, maka lebih mudah untuk melibatkan istri

³⁶ Wawancara dengan Zulfa Suja, Anggota Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

³⁷ Wawancara dengan Lely Zaelani, Ketua Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Jakarta 28 Juni 2012.

RT, istri RW, istri Lurah, istri Camat. dan seterusnya, karena para pemimpin lokal memang dekat dengan penggiat program. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pekka, yang merupakan organisasi berbasis wilayah atau teritori, sehingga Pekka di semua wilayah kerjanya aktif berkegiatan sampai saat ini.

Sejarah pendirian KPI dan Hapsari memang berbeda. KPI merupakan koalisi dari para aktivis perempuan yang peduli pada persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Sementara Hapsari merupakan organisasi perempuan *grassroot* yang kemudian membangun organisasi. Serikat Hapsari dengan keanggotaan berbasis daerah lebih mudah berkembang, karena anggotanya berasal dari daerah tersebut, dan memiliki semangat ingin memajukan perempuan setempat.

Hapsari berdiri pada 1990, berupa sebuah kelompok. Pada 1996, Hapsari menjadi LSM dengan badan hukum Yayasan karena ada kebutuhan untuk mendirikan organisasi 'formal'. Dengan semakin besarnya organisasi dan kian banyaknya anggota, maka pada 1999, kelompok tersebut mendirikan Serikat Perempuan Independen (SPI). Namun, antara 1999 sampai 2001, mulai ada tumpang-tindih kepemimpinan, antara pengurus Hapsari dan dampungannya (SPI), yang menimbulkan kepengurusan ganda. Untuk mengakomodasi membesarnya organisasi dengan lahirnya kepemimpinan perempuan dari berbagai serikat di tingkat kabupaten, maka melalui kongres, pada 2001 Hapsari memproklamasikan diri menjadi Hapsari Federasi Serikat Perempuan Merdeka, dengan para anggota terdiri dari serikat-serikat perempuan tingkat kabupaten, yaitu SPI Labuhan Batu, SPI Sima Lungun,

SPI Deli Serdang, SPI Langkat, dan Persekitatan Organisasi Wanita dan Anak (OWA) Palembang.

Pemilihan untuk bentuk federasi ini bukanlah pemilihan singkat saat kongres, melainkan melewati sebuah proses cukup lama dan penuh pertimbangan. Adapun pertimbangannya antara lain, karena para perempuan desa berkeinginan memimpin dan menjabat sebagai ketua dan pengurus organisasi Federasi. Keinginan untuk aktif, memimpin dan berorganisasi membuat mereka yakin bahwa Federasi adalah pilihan paling tepat untuk menampung aspirasi mereka. Kemampuan para anggota untuk memimpin dianggap bisa dipelajari sambil jalan. Argumennya, Hapsari bukanlah perkumpulan akademisi, atau ahli organisasi, maka mereka siap untuk belajar berorganisasi dan memimpin dengan proses yang mereka jalani. Serikat atau Federasi selama ini hidup dari iuran anggota dan kegiatan anggota yang bisa menghasilkan seperti pembuatan sabun, kopi dll. Namun dengan keterbatasan program dari anggota maka organisasi berusaha mengembangkan usaha lainnya dengan jalan menggali ide dan potensi anggota Serikat. Usaha ini dilakukan dengan kesadaran penuh agar mereka tidak tergantung semata-mata dengan lembaga donor. Sementara tantangan dari Serikat atau Federasi Hapsari adalah belum berhasil sepenuhnya membangun kesadaran akan keadilan dan kesetaraan di ranah privat. Isu-isu yang berhubungan dengan relasi kuasa gender di ranah privat masih menjadi agenda utama yang menjadi kendala bagi para anggota untuk aktif diorganisasi. Secara kelembagaan organisasi tetap berusaha membangun kesadaran baru ditengah-tengah

masyarakat —walau tidak mudah— akan pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Isu representasi juga menjadi hal yang penting untuk mereka kaji, dalam evaluasi diri yang mereka lakukan muncul kegamangan Serikat atau Federasi mewakili siapa dan isu apakah? Pertanyaan ini selalu mereka jadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri.

Solidaritas Perempuan (SP) juga merupakan Perserikatan. Keanggotaannya individu, sementara kepemimpinannya berada pada Badan Eksekutif dan lembaga di atasnya adalah Presidium. Anggota yang hadir dalam Kongres SP mewakili perseorangan, dan hak bicara adalah hak individu. Tiap tahun diadakan Rapat Konsultasi Anggota (RKA), yang dilakukan untuk memverifikasi keaktifan anggota. Anggota yang tidak aktif bisa dikeluarkan dari SP. Namun seperti yang sudah dibahas di atas Perserikatan SP juga seperti halnya dengan KPI masih mengandalkan pendanaan dari donor, sehingga cukup banyak kegiatan di daerah yang juga mati suri.

Dengan banyak bertumbuhnya organisasi perempuan berbasiskan massa, maka sering bisa ditemui aktivis perempuan di Jakarta dan di daerah yang mempunyai keanggotaan ganda, misalnya, selain jadi anggota KPI, ia juga adalah anggota SP, atau organisasi lainnya.

Pada kurun 2008, ada geliat menarik dari organisasi perempuan di Lampung, yakni kelahiran Gerakan Perempuan Lampung (GPL). GPL dideklarasikan pada Maret 2008. GPL sebagai organisasi massa perempuan mulai digagas dan menjadi bahan diskusi pada tahun 2005-an, diawali dengan

kegelisahan alumni peserta pendidikan pelatihan-pelatihan adil-gender dan anti-kekerasan. Alumni yang berasal dari enam kabupaten/kota, pasca pendidikan membentuk organisasi di masing-masing wilayahnya. Kelahiran GPL tidak bisa dilepaskan dari kerja advokasi yang telah dilakukan Damar, dan juga ornop lainnya di wilayah Lampung.

“GPL lahir difasilitasi oleh Damar, melalui kerja pengorganisasian. Awalnya adalah penerima manfaat dari program Damar, dari proses pendidikan yang dilakukan Damar sejak tahun 2000. Seluruh anggota GPL sudah pernah menempuh pendidikan, 1618 orang. Semua menjadi anggota GPL. Ke depan, tujuannya adalah *political movement*”.³⁸

Menilik sejarahnya, pada awalnya, Damar berasal dari bentuk yayasan, yakni Yayasan Elsapa. Bentuk yayasan dianggap tidak bersifat demokratis. Maka pada tahun 2002, Damar menyatakan diri sebagai organisasi berbentuk perkumpulan.

“Perkumpulan sendiri punya mekanisme perekrutan: ada rekomendasi dari dua anggota. Perkumpulan Damar terdiri dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Lembaga Advokasi Anak Damar dan Institut Pengembangan Organisasi Rakyat”.³⁹

Contoh kasus tantangan pengorganisasian perempuan di daerah seperti yang dialami oleh organisasi berbasis massa, seperti Koalisi Perempuan Indonesia dan Solidari-

³⁸ Wawancara dengan S.N. Laila, Gerakan Perempuan Lampung, Lampung 9 Mei 2012.

³⁹ Wawancara dengan Selly Fitriani, Damar Lampung, Lampung 11 Mei 2012.

tas Perempuan, sangat nyata dilihat, dari melemahnya semangat berorganisasi di akar rumput. Solidaritas Perempuan dengan segala persoalan yang dialaminya sudah tutup di beberapa daerah, walaupun sekarang sudah mulai ada individu yang dikader untuk kembali mengembangkan cikal-bakal organisasi Solidaritas Perempuan kembali, seperti di Kota Padang.

“Saat ini SP yang ada di Kota Padang bukan merupakan komunitas. Dulu memang sudah ada komunitas SP yang resmi, namun karena suatu alasan, komunitas tersebut dibekukan. Saat ini masih ada beberapa anggota yang masih aktif menjalankan program-program SP”.⁴⁰

Koalisi Perempuan Indonesia di Padang tidak jauh berbeda, walaupun sekretaris wilayah (Sekwil) KPI masih cukup aktif menghadiri undangan-undangan yang dikirim ke organisasi tersebut. Namun untuk mengorganisasi anggotanya dirasakan ada kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan sudah mulai sepi nya balai perempuan, yang dulu merupakan kegiatan rutin anggota KPI. Alasan pertama tidak aktifnya balai perempuan adalah karena kekurangan dana untuk membiayai pertemuan-pertemuan. Namun jika dikejar, maka terungkap bahwa balai perempuan tidak lagi dirasa mewakili kebutuhan dan kepentingan para perempuan lokal. Hal ini harus dianggap serius, karena model organisasi KPI yang berbasis kepada isu dianggap sulit untuk mengembangkan dirinya di wilayah, karena belum tentu wilayah itu punya perhatian atau kepedulian kepada isu yang dita-

warkan. Dalam wawancara di bawah ini terlihat bahwa masalah dana menjadi isu kunci sulitnya organisasi tersebut menjalankan kegiatannya di daerah:

“...Kegiatan tanpa anggaran hampir sulit dilakukan, sekarang susah mencari kawan yang betul-betul tidak mengharapkan uang. Kalau tidak ada anggaran maka kegiatan tidak bisa jalan”.⁴¹

Kembali sehubungan dengan masalah dana ini kemudian Tanti juga menambahkan bahwa:

“Biasanya konflik itu muncul ketika ada masalah keuangan, karena yang sering membuat pro dan kontra itu kalau sudah ada uang, contoh kasusnya ketika ada kejadian gempa di Padang. Tahun lalu di sini katanya ada Presidium yang menyelewengkan dana Rp 21 juta dan menuduh anggota. Akhirnya kita buka bersama, kita *tunjukkan* kwitansi, karena kalau organisasi massa ini, kalau ada uang ribut, tapi kalau tidak ada uang tidak ada kegiatan”.⁴²

Tanti juga menambahkan masalah pembagian kerja dalam organisasi harus juga jelas agar tidak terjadi kerancuan dalam melakukan aktifitas di lapangan seperti:

“... Sebenarnya dalam ADRT-nya, kepemimpinan KPI berada di tangan Presidium, karena mereka yang memiliki Anggota (atau yang dipilih oleh anggota), dan Sekwil yang menjalankan. Tapi

⁴⁰ Wawancara dengan Yuni Walrif, Calon anggota Solidaritas Perempuan Padang, Padang 14 Mei 2012.

⁴¹ Wawancara dengan Tanti Herida, Sekwil KPI Wilayah Sumatera Barat, Padang 17 Mei 2012.

⁴² *Ibid*

di lapangan, Sekwil yang harus aktif mengambil alih kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, karena kesibukan Presidium itu sendiri yang juga punya kerjaan lainnya, juga permasalahan biaya transportasi. Sudah disampaikan ke pusat juga, itu setiap rapat kita ajukan, karena KPI kesulitan dana, kita dituntut harus bisa mencari dana sendiri dengan mengajukan proposal ke daerah juga”.⁴³

Tantangan untuk organisasi “cabang” dari Jakarta, seperti yang dialami KPI, SP juga dialami oleh ASPPUK, masalah keterbatasan sumberdaya juga berakibat pada berkurangnya kegiatan organisasi. ASPPUK yang banyak memiliki kegiatan untuk perempuan pengusaha kecil merasa juga banyak memiliki kendala pendanaan atau modal, sehingga produktivitas dan pemasaran produk tidak maksimal. Dari hasil FGD di bawah ini juga terlihat masalah modal kerja menjadi isu yang paling mengemuka:

“Pemasaran produk masih sulit, masih banyak saingan. Produk tidak bisa masuk ke toko. Tidak diterima karena tidak ada label. Modal masih terbatas. Ya, solusinya dengan bantuan modal dan bantuan pemasaran”.⁴⁴

Bentuk Organisasi ASPPUK seperti yang dituturkan di bawah ini adalah:

“ASPPUK itu bentuk awal organisasi adalah forum LSM yang berfokus pada Perempuan Usaha Kecil (PUK), tapi ke-

mudian mengkristal pada tahun 1997 menjadi YASPPUK (Yayasan). Karena bentuk yayasan dirasakan kurang demokratis, akhirnya berubah menjadi ASPPUK (Asosiasi). Ada forum nasional yang merupakan forum tertinggi, dan di wilayah namanya forum wilayah. Yang mengkoordinasikan di pusat namanya Seknas, dan di wilayah bernama Sekwil”.⁴⁵

Kemudian ditambahkan oleh Ririn bentuk organisasi ASPPUK:

“Kalau ASPPUK strukturnya ‘kan mengikuti dari nasional. Kepengurusannya ada Komite Eksekutif Wilayah (KEW), dan Sekretaris Eksekutif Wilayah (SEW). Kemudian ada (Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk), sebagai penerima program dari ASPPUK. Jarpuk ini ada di tiap kabupaten/kota yang membawahi kelompok-kelompok PUKnya. Salah satu kegiatan anggota Jarpuk itu ‘kan simpan-pinjam. Oleh karena itu lalu dibentuk Koperasi Wanita (Kopwan) yang diketuai Masnim”.⁴⁶

Model organisasi seperti ASPPUK yang bergerak di masalah simpan pinjam perempuan ini sebetulnya telah dilakukan terlebih dahulu oleh organisasi perempuan lainnya seperti Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Wanita (PPSW). Kemudian kegiatan serta model organisasi yang bergerak dalam bidang penguatan ekonomi keluarga salah satunya melalui simpan pinjam inipun kemudian juga menjadi inspirasi berdirinya or-

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan ASPPUK Padang, Padang 17 Mei 2012.

⁴⁵ Wawancara dengan M. Firdaus, Deputy Direktur ASPPUK, Jakarta 27 April 2012.

⁴⁶ Wawancara dengan Ririn, ASPPUK Nusa Tenggara, 18 Mei 2012.

ganisasi Pekka untuk kelompok perempuan yang berbeda, yaitu Perempuan sebagai Kepala Keluarga. Pengurus Pekka pertama kalinya sebagian besar juga berasal dari PPSW. Kegiatan utama Pekka adalah simpan-pinjam, yang banyak diminati anggota untuk modal membuka usaha dan biaya sekolah anak. Selain itu, yang menjadi tantangan mereka sama dengan ASPPUK, yakni banyaknya produk kerajinan yang sudah dibuat namun tidak bisa dipasarkan, karena produk yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seperti yang muncul dalam FGD dengan kelompok Pekka di Mataran bahwa masalah modal juga menjadi isu yang penting sehingga kegiatan sangat berhubungan dengan modal usaha:

“...dalam kelompok kita selalu membahas masalah kegiatan anggota, seperti ada produk kerajinan yang mau dijual, tapi belum tahu mau dijual ke mana dan apakah laku dijual atau tidak? Baru sebatas produksi saja. Dulu kita di sini juga pernah studi banding ke Cianjur, melihat pembuatan kerupuk wortel. Tapi di sini harga wortel mahal sekali, modalnya tidak ada. Sehingga kegiatan itu pun menjadi tidak cocok di sini”.⁴⁷

Tabel Bidang Kerja Organisasi Perempuan menunjukkan bidang kerja dari organisasi perempuan di daerah penelitian WRI. Melihat bidang garapan dari berbagai organisasi yang menjadi subyek penelitian, terlihat jelas bahwa isu bidang garapan juga

sangat beragam, mulai dari bidang perempuan dan politik, kekerasan terhadap perempuan, buruh migran, perempuan dan ekonomi — yang sering disebut dengan penguatan ekonomi perempuan — isu kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan kritis, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja seks komersial (disebut juga dengan terminologi perempuan yang dilacurkan), *trafficking*, seksualitas — termasuk isu orientasi seksual (LBT)—, penegakan hukum yang adil-gender sampai pada isu anggaran berkeadilan gender. Namun dalam praktiknya tidak terjadi pemisahan yang sangat nyata dalam setiap bidang kerja tersebut. Bagi organisasi yang bergerak dalam isu perempuan dan politik tidak bisa melepaskan diri dari isu penegakan hukum dan begitupun dengan isu-isu lainnya. Sehingga perjuangan keadilan dan kesetaraan gender memang harus dilakukan dari berbagai isu dan bidang kerja yang saling berkait berkelindan sesuai dengan rumitnya situasi yang dialami oleh perempuan.

Persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kerusuhan Mei 1998, yang sering dikenal dengan sebutan Tragedi Mei, mencuatkan isu perkosaan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap perempuan. Walaupun kasus-kasus tersebut tidak sampai diajukan ke meja hijau dengan berbagai pertimbangan, namun rangkaian peristiwa itu telah membuat organisasi perempuan menguatkan kerja dan jaringan untuk membantu perempuan korban kekerasan. Isu kekerasan ini pun menjadi keprihatinan bersa-

⁴⁷ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan Kelompok Pekka Padang, Sijunjung 16 Mei 2012.

Tabel 1.
Bidang Kerja Organisasi Perempuan

Bentuk dan Nama Organisasi	Kota	Program Kerja Organisasi
Perkumpulan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan untuk pengembangan asset lembaga keuangan perempuan (koperasi simpan pinjam) • Pelatihan manajemen pemasaran produk
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)	Jakarta Padang Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi dengan anggota Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) tentang kewirausahaan hingga penyadaran gender • Training pembukuan manajemen usaha • Advokasi ke pemerintah untuk memudahkan usaha kecil perempuan (Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Dinkes) • Membentuk koperasi simpan pinjam
Yayasan Harmonia	Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan asset ekonomi perempuan • Simpan pinjam dengan dana swadaya masyarakat
Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)	Jakarta Padang Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Simpan pinjam dan <i>revolving fund</i> untuk perempuan kepala keluarga • Pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pengembangan usaha/lembaga Kredit Mikro Berbasis Komunitas
Perkumpulan Panca Karsa (PKK)	Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Simpan pinjam untuk perempuan buruh migran • Pendidikan penyadaran gender, hak kesehatan reproduksi, hukum, keadilan, kekerasan terhadap perempuan
Yayasan Pesada	Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> • Credit Union Pesada
Federai Hapsari	Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> • Credit Union Hapsari • Memiliki unit usaha (membuat sabun, kerajinan, menjual batik, dan usaha kedai kopi) • <i>Livelihood</i> (advokasi penguatan kapasitas perempuan marginal, untuk keberlanjutan penghidupan)
Ormas Jaringan Perempuan Rakyat Pesisir (JPRP)	Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat industri rumah tangga (kompos dari limbah rumah tangga, bunga hias dari limbah plastik, tikar dan sedotan)
Hukum dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)		
Yayasan LBH APIK	Jakarta Padang Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan bantuan hukum bagi perempuan • Peningkatan penyadaran hak-hak perempuan • Seminar dan lokakarya memperjuangkan adanya mata kuliah wanita dan hukum atau gender dan hukum di fakultas hukum • Memberikan bantuan hukum untuk korban kekerasan dalam bentuk litigasi dan pendampingan pengadilan • Bekerja di jaringan untuk advokasi hukum, menjadi penggerak jaringan JKP3 (Jaringan Kerja Perempuan Pro-Prolegnas) • Publikasi dan dokumentasi kajian hukum sebagai bahan dasar melakukan advokasi kebijakan dan kampanye publik
Ormas Solidaritas Perempuan	Jakarta Padang Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi untuk melindungi dan memperkuat posisi tawar buruh migran dan keluarganya terhadap pengambil keputusan
Perkumpulan Panca Karsa (PPK)	Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadvokasikan dan pendampingan kasus-kasus yang dialami oleh perempuan buruh migran

Bentuk dan Nama Organisasi	Kota	Program Kerja Organisasi
Yayasan WCC Nurani Perempuan	Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan konseling kerjasama dengan radio setempat • Membantu Ruang Pelayanan Khusus (institusi Kepolisian), menyediakan layanan bagi korban kekerasan • Pendampingan hingga pemulihan korban kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender • Kampanye di media seperti koran, radio, televisi, dan facebook untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan • Diskusi di masyarakat sesuai dengan tema yang berkembang
Ormas Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)	Jakarta Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi tertutup korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Poligami dengan melakukan pendampingan untuk melaporkan ke Polda hingga persidangan berlangsung
Yayasan Pesada	Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> • Women Crisis Center (WCC) juga menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Federasi Hapsari	Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan penyadaran gender • Dukungan untuk perempuan korban kekerasan • Advokasi penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan • Pendidikan dan promosi demokrasi dan politik bagi perempuan pedesaan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan organisasi lainnya • Mengelola Rumah Aman untuk Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Labuhanbatu
Perkumpulan Damar	Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan hukum dan konseling bagi perempuan korban kekerasan • Advokasi masalah hukum, penyediaan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan • Pertunjukkan, yaitu pesta rakyat bekerjasama dengan teater untuk mementaskan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan • Menginisiasi berdirinya GPL (Gerakan Perempuan Lampung)
Ormas Jaringan Perempuan Rakyat Pesisir (JPRP)	Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi menuntut hak-hak kepemilikan tanah perempuan • Pengorganisasian perempuan berbasis keseharian
Perkumpulan Institut Kapal Perempuan	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga (UU PRT)
Komnas Perempuan	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan penanggulangan terhadap segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) • Catatan Tahunan (Catahu) milik Komnas Perempuan tentang <i>Violence Against Women/VAW</i> (Kekerasan Terhadap Perempuan) • Memelihara kolaborasi dan membangun sinergitas dengan semua aktor baik di bidang hukum maupun sosial politik lain
Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)	Jakarta Padang Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan bantuan hukum untuk janda dan perempuan korban kekerasan • Memberikan bantuan pelayanan pengadaan Akte Kelahiran Anak, Isbat Nikah dan Surat Cerai, dan pelayanan penasehat hukum bagi korban kekerasan
Politik		
Perkumpulan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi politik perempuan di Pesisir Selatan • Advokasi jaminan hak-hak perempuan untuk terlibat dalam proses-proses politik secara maksimal, baik sebagai caleg maupun sebagai pemilih

Bentuk dan Nama Organisasi	Kota	Program Kerja Organisasi
Ormas Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)	Jakarta Padang	• Pemberdayaan dan pendidikan politik bagi kader organisasi
		• Advokasi agar kebijakan publik di Sumatera Barat menjadi lebih adil gender dan demokratis
		• Balai Perempuan untuk memberi pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan
Ormas Solidaritas Perempuan (SP)	Jakarta Padang Mataram	• Kampanye rutin dengan tema isu anti kekerasan dan penyadaran gender untuk perempuan
		• Kerjasama dengan radio lokal untuk kampanye anti kekerasan, khususnya terhadap perempuan
		• Pendidikan kritis untuk perempuan dalam bentuk diskusi tentang permasalahan perempuan
		• Kampanye anti kemiskinan perempuan
Yayasan Pesada	Deli Serdang	• Partisipasi politik perempuan, advokasi, rumah aman perempuan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas jaringan
Federasi Hapsari	Deli Serdang	• Pendidikan politik untuk anggota serikat
Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)	Jakarta Padang Mataram	• Pemberdayaan perempuan untuk partisipasi politik dilakukan dengan pencerahan warga perempuan dalam proses pengambilan keputusan seperti musrenbang –musyawarah rencana pembangunan desa
Yayasan Kalyanamitra	Jakarta	• Pengorganisasian perempuan miskin kota dan desa
		• Mendorong agar mereka mampu berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan publik
Pencegahan Perubahan Iklim dan Bencana		
Perkumpulan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	Padang	• Mitigasi bencana
		• Kegiatan penghijauan
		• Sekolah lapang
		• Pembuatan biofor, pembibitan, dan konservasi lahan
		• Pemulihan ekonomi pasca bencana
Federasi Hapsari	Deli Serdang	• Kegiatan tanggap bencana ketika ada bencana alam terjadi yaitu bencana angin puting beliung
Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI)	Mataram	• Fasilitasi pembuatan peta Digitasi untuk lokasi rawan bencana
		• Penguatan kapasitas masyarakat terkait tentang isu-isu perubahan iklim dan penanggulangan bencana
		• Sosialisasi isu perubahan iklim dan kajian resiko bencana, pengenalan isu perubahan iklim sejak dini di sekolah
Kesehatan (Perempuan dan Anak) dan Sanitasi		
Yayasan Totalitas	Padang	• Diskusi masyarakat tentang malnutrisi anak
		• Pendekatan <i>positive defiance</i> untuk perbaikan gizi anak
		• Penguatan kapasitas pengelolaan air bersih
		• Program Sumatera Healthy School (SHSP)
Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI)	Mataram	• Pendidikan kesehatan reproduksi perempuan
		• Pendidikan kesehatan (Gizi, AKI, HIV/AIDS, dll)
		• Peningkatan pemahaman perempuan untuk mengakses fasilitas kesehatan
Jaringan Perempuan Rakyat Pesisir (JPRP)	Lampung	• Pengadaan air bersih dan kebersihan lingkungan untuk wilayah pesisir

Bentuk dan Nama Organisasi	Kota	Program Kerja Organisasi
Pendidikan		
Yayasan Harmonia	Padang	• Pendidikan kritis di tingkat masyarakat dan LSM terutama terkait dengan isu-isu gender (diskusi basis tentang gender)
Yayasan Pesada	Deli Serdang	• Mendirikan enam Taman Bermain dan Belajar Anak (TBBA) sebagai strategi mendekatkan diri dengan masyarakat
Yayasan Hapsari	Deli Serdang	• Mendirikan sembilan Taman Bermain dan Belajar Anak (TBBA) sebagai strategi mendekatkan diri dengan masyarakat
		• Mengelola sekolah Aliyah dengan tambahan kurikulum pendidikan gender dan HAM
		• Training kepada kader dan anggota serikat
Perkumpulan Institut Kapal Perempuan	Jakarta	• Melaksanakan pendidikan kritis untuk perempuan agar mampu berposisi tawar dalam relasi gendernya
		• Advokasi kebijakan, penelitian dan publikasi
		• Pendidikan untuk isu MDGs (<i>Millenium Development Goals</i>).
Yayasan Kalyanamitra	Jakarta	• Memberikan pendidikan penyadaran gender dan wacana feminisme
		• Pendidikan gender dan seksualitas, bekerjasama dengan Ardhanary Institute
Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)	Jakarta Padang Mataram	• Pendidikan dan pengaksaraan perempuan yaitu dengan penyediaan program kejar Paket A, B, dan C
		• Program pendidikan untuk anak dalam bentuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Yayasan Ardhanary Institute	Jakarta	• Pendidikan, training, dan konselor tentang <i>social practice</i> berfokus pada kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT)
Federasi Gerakan Perempuan Lampung (GPL)	Lampung	• Penguatan kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan
Publikasi dan Media (Informasi dan Komunikasi)		
Yayasan Pesada	Deli Serdang	• Menerbitkan buletin bagi perempuan di pedesaan dengan bahasa lokal
Yayasan Hapsari	Deli Serdang	• Mengelola radio komunitas
Yayasan Kalyanamitra	Jakarta	• Pendirian pusat dokumentasi sebagai salah satu penopang utama penyebaran informasi mengenai isu perempuan
		• Layanan perpustakaan (on-line dan fisik)
		• Penerbitan buku (terjemahan dan non-terjemahan)
Yayasan LBH APIK	Jakarta Padang Mataram	• Menjalin kerjasama dengan media penyiaran (radio) dengan jalan menampilkan pembicara perempuan dalam <i>talkshow</i>
		• Mengupayakan adanya perempuan yang menjadi penyumbang tulisan tetap di koran lokal
Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI)		
Ormas Solidaritas Perempuan	Jakarta Padang Mataram	• Pemberdayaan dan penguatan hak buruh migran, dengan mendorong terbentuknya serikat buruh migran
		• Pendidikan kepada buruh migran sebelum berangkat, saat di tempat kerja dan setelah kembali ke tanah air.
Yayasan Migrant Care	Jakarta	• Pelatihan dan advokasi nasional
		• Membangun dan mengembangkan jejaring di internasional untuk mengadvokasi lebih luas

Bentuk dan Nama Organisasi	Kota	Program Kerja Organisasi
Yayasan Migrant Care	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Bergabung dengan Global Platform on Migrant Worker Convention di Jenewa karena penting memanfaatkan instrument internasional untuk mengadvokasi
Perkumpulan Panca Karsa (PPK)	Mataram	<ul style="list-style-type: none"> Mengkritisi kebijakan yang terkait dengan perekonomian, kekerasan terhadap perempuan, trafficking yang tidak adil terhadap buruh migran, perempuan dan anak
		<ul style="list-style-type: none"> Penanganan kasus-kasus yang menimpa buruh migran Publikasi terkait persoalan buruh migran, perempuan dan anak, melalui dialog, seminar lintas birokrat, swasta, masyarakat buruh migran, perempuan dan anak
Perkumpulan Institut Kapal Perempuan	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Pra Pemberangkatan Pekerja Rumah Tangga Migran, bekerjasama dengan organisasi Migrant Care
Seksualitas		
Yayasan Ardhany Institute	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun perempuan yang berorientasi seksual lesbian, biseksual serta kelompok transgender female-to-male (FTM) agar mampu menggalang kekuatan untuk hidup bermasyarakat yang dirasakan masih sangat diskriminatif terhadap keberadaannya
		<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan individu melalui konseling dan pendidikan bagi lesbian, biseksual dan transgender serta keluarganya yang membutuhkan
		<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan organisasi serupa di Yogyakarta (Rifka Annisa) dan pusat konseling remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
		<ul style="list-style-type: none"> Membantu pengembangan perspektif lesbian, biseksual dan transgender untuk semua staf/awak shelter dan juga para konselor.

ma kalangan aktivis perempuan, yang bera-
mai-ramai pergi menghadap B.J. Habibie
yang pada saat itu menjadi Presiden RI, dan
mengusulkan dilahirkannya Komisi Nasio-
nal Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan.
Era Reformasi, yang menjadi momentum or-
ganisasi perempuan untuk menguatkan ba-
rian menentang berbagai bentuk kekerasan
tersebut, ditandai dengan lahirnya organisasi
baru dan penambahan fungsi organisasi yang
bergerak di bidang pendampingan korban ke-
kerasan terhadap perempuan. Momentum
itu berujung dengan banyaknya organisasi
perempuan yang mendirikan *Women's Crisis
Center*. Banyak organisasi perempuan yang
melihat isu kekerasan terhadap perempuan

merupakan isu yang tidak bisa ditunda lagi
penanganannya, berbagai organisasi perem-
puan di daerah menjadikan isu kekerasan
terhadap perempuan sebagai sentral dari
kegiatannya seperti yang diungkapkan oleh
Yefri di bawah ini:

“Dan di dua tahun terakhir ini, kita lebih
banyak menangani kasus korban keke-
rasan seksual. Sekarang Mely menangani
tiga kasus perkosaan anak-anak sekolah.
Dan kebanyakan, si korban tidak menge-
nal pelaku. Juga masih ada satu kasus
KDRT. Tetapi masih lebih banyak kasus
kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini
merupakan kekerasan yang secara khu-
sus korbannya dalah perempuan dari se-

gala lapisan masyarakat lintas kelas sosial, dari berbagai usia, berbagai budaya dan berbagai agama”.⁴⁸

Karena situasi korban kekerasan terhadap perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang tersebut secara umum bisa dikatakan sama, selain merusak harga diri korban dan keluarganya, bukan hanya merusak fisik tetapi juga psikis, termasuk merusak masa depannya sehingga kegiatan yang dilakukan memang langsung pada penguatan korban dan keluarganya seperti tuturan Selly Fitriani:

“Penguatan tidak hanya dilakukan kepada korban, tetapi juga kepada keluarga. Apa yang terjadi kepada korban bukanlah salah korban; ini bukan aib. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia”.⁴⁹

Sehingga penanganan isu kekerasan terhadap perempuan ini harus juga dilakukan melalui berbagai pendekatan. Walrif dari Padang mengatakan bahwa:

“selain penanganan korban dan keluarga korban kekerasan seksual, pendidikan masyarakat baik kepada laki-laki maupun perempuan perlu dilakukan. Kami dan kawan-kawan melakukan *Weekend Campaign* (kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan) melalui media radio, kami adakan dalam rangka mengadvokasikan isu anti kekerasan terhadap perempuan. Selain advokasi melalui radio,

kami juga mengadakan diskusi dengan masyarakat tentang hal yang sering dibahas. Tujuannya agar masyarakat paham bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kita bersama dan siapa saja bisa menjadi korban kekerasan tersebut”.⁵⁰

Lembaga advokasi perempuan Damar di Lampung, sejak berdirinya telah berusaha mewujudkan kegiatan yang mengatasi masalah ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun harus diakui, permasalahan perempuan, terutama kekerasan, masih berlangsung di Lampung. Isu kekerasan terhadap perempuan ini adalah isu bersama yang harus ditangani bersama oleh masyarakat.

“Kita bukan Sinterklas, bukan pemadam kebakaran. Pendampingan kasus, baik litigasi maupun non-litigasi yang telah kita lakukan itu adalah sebuah contoh untuk bisa melihat bagaimana karakteristik/modus operandi kekerasan terhadap perempuan. Upaya pentingnya adalah melakukan penyadaran masyarakat”.⁵¹

Agenda Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Berbagai persoalan ketidakadilan terhadap perempuan bukan hanya persoalan individu perempuan tetapi merupakan persoalan masyarakat yang harus ditangani secara serius oleh berbagai unsur masyarakat. Selain penanganan korban yang juga mendesak dila-

⁴⁸ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan Padang, 17 Mei 2012.

⁴⁹ Wawancara dengan Selly Fitriani, Damar Lampung, 11 Mei 2012.

⁵⁰ Wawancara dengan Yuni Walrif, Calon Anggota Solidaritas Perempuan Padang, Padang 14 Mei 2012.

⁵¹ Wawancara dengan Selly Fitriani, Damar Lampung, 11 Mei 2012.

kukan adalah perubahan yang mendasar dari kebijakan-kebijakan yang selama ini dikenal tidak adil gender.

Kebijakan yang tidak adil gender itu bisa kita lihat dari proses pembuatannya sampai pada produk kebijakan itu sendiri, baik proses sampai pada produk yang terjadi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Hasil studi Komnas Perempuan antara 1999 dan 2009, tercatat ada 63 kebijakan daerah yang secara langsung diskriminatif terhadap perempuan. Ada 21 kebijakan mengatur cara perempuan berpakaian, 37 kebijakan tentang pemberantasan prostitusi dimana justru perempuannya yang dikriminalisasi sehingga tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan, satu kebijakan tentang *Khahvat*, empat kebijakan tentang pengabaian hak dan perlindungan perempuan buruh migran.⁵² Hal ini terjadi dengan dalih otonomi daerah, dimana banyak sekali daerah yang melahirkan peraturan daerah (Perda) dengan semangat untuk mengatur kehidupan di daerahnya sesuai dengan adat kebiasaan, agama dan kondisi pemerintahan daerahnya. Namun pada praktiknya banyak sekali peraturan daerah tersebut yang mengakar pada budaya dan agama yang merugikan perempuan seperti hasil studi Komnas Perempuan tersebut.

Untuk merespon kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut, pada Tabel Bidang Kerja Organisasi Perempuan juga terlihat banyak organisasi perempuan menjadikan masalah hukum dan politik

sebagai bidang kerja, untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Bahkan hampir semua organisasi perempuan mengagendakan perubahan kebijakan publik, baik di level UU maupun Peraturan Daerah yang dianggap merugikan hajat hidup perempuan. Banyak yang berhasil, namun tidak jarang organisasi perempuan mendapat tantangan dari berbagai pihak. Misalnya dalam hal masih banyaknya lahir peraturan daerah, sering dikenal dengan Perda Syariah, yang melarang perempuan keluar malam (di atas pukul 18.00 WIB) tanpa didampingi oleh muhrim. Ada pula ketentuan kewajiban bagi perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab sebagai dilaporkan Komnas Perempuan dalam laporan tahunannya tersebut.

Kesadaran akan pentingnya menjaga agar kebijakan publik tidak diskriminatif terhadap perempuan membuat organisasi perempuan juga secara aktif terlibat pada kegiatan mendorong keterlibatan para perempuan dalam kancah perebutan posisi sebagai wakil rakyat di DPR. Organisasi perempuan menganggap sebagai wakil rakyat adalah posisi yang strategis bagi para perempuan untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan yang adil gender.

Secara tertulis, masing-masing organisasi memang memiliki perbedaan visi dan misi. Namun jika kita lihat, beberapa organisasi memiliki kesamaan cita-cita: keadilan untuk perempuan dan terbukanya akses yang lebih besar untuk perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh pada perempuan. Melalui kegiatan penguatan partisipasi politik perempuan, di samping aktif dalam mendorong lahirnya UU Pemilu yang memasukkan Kuota 30

⁵² Komnas Perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tata Negara-Bangsa Indonesia, Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota Pada 7 Provinsi, Jakarta 2010.

persen bagi calon legislatif, para organisasi perempuan ini juga aktif memberikan penyadaran politik bagi perempuan di daerah kerja masing-masing, mulai dari kesadaran para pemilih untuk memilih calon anggota legislatif yang peduli pada persoalan yang dihadapi perempuan, sampai pada kegiatan peningkatan kapasitas bagi perempuan calon anggota legislatif. Tidak sedikit organisasi perempuan juga membantu para perempuan calon tersebut dalam mempersiapkan perangkat kampanyenya, sampai pada membantu penggalangan dana untuk meringankan beban biaya para perempuan calon tersebut. Disamping organisasi perempuan lainnya, KPI juga merupakan organisasi yang secara khusus banyak bergerak dalam isu peningkatan partisipasi politik perempuan seperti yang diutarakan oleh Tanty, Sekjen KPI Sumatera Barat di bawah ini:

“Balai Perempuan di Sumatera Barat berjumlah 58 buah. Untuk perumusan isu dalam kegiatan Balai Perempuan, kita lakukan melalui diskusi-diskusi. Juga kita ada rapat Presidium sekali tiga bulan. Saat ini sedang banyak membahas isu persiapan Pemilu, mulai dari diskusi dengan caleg, memotivasi caleg perempuan, dan kebutuhan daerah yang harus diperjuangkan caleg perempuan nantinya”.⁵³

Sementara Perkumpulan Solidaritas Perempuan juga sangat aktif mengkampanyekan isu peningkatan partisipasi politik perempuan, karena masalah perempuan adalah masalah politik. Moto perempuan adalah

Personal is political, semua kehidupan pribadi adalah masalah politik, sehingga masalah harga sembako murah adalah masalah politik, isu kekerasan terhadap perempuan adalah masalah politik, seperti kutipan di bawah ini:

“...kegiatan kita juga memberi informasi kepada perempuan, bahwa apa sih masalah perempuan sekarang? Harga-harga mahal, anak *nggak* bisa sekolah, itu terkait dengan sebuah keputusan nasional, politik, keputusan politik nasional dan global. Dan kita mensosialisasikan informasi lebih lanjut tentang masalah-masalah yang sudah mereka identifikasi. Jadi kita bikin seri diskusi kampus. Sekarang kami sedang kampanye *anti-poverty*, judul kampanyenya: ‘Stop kemiskinan perempuan.’ Juga kami diskusi-diskusi kampung, di mana perempuan diajak berdiskusi untuk melihat persoalan tersebut, keterkaitan masalahnya dengan sebuah kebijakan politik global dan nasional, dan mengaitkan dengan persoalan keseharian mereka. Kami mengajak masyarakat bersama-sama melakukan kontrol kepada pengambil kebijakan publik. Ketika mereka sudah sadar, diharapkan mereka punya kesadaran politik terhadap persoalan yang mereka hadapi, khususnya perempuan”.⁵⁴

Namun tantangan yang dihadapi ketika bidang garapan jadi lebih spesifik, seperti yang telah kita utarakan, juga menimbulkan persoalan pengkotak-kotakan, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Persoalan yang dihadapi oleh perempuan sesungguhnya lintas-isu, lintas-wilayah dan juga lintas-kelas

⁵³ Wawancara dengan Tanty Herida, Sekjen KPI Wilayah Sumatera Barat, Padang 17 Mei 2012.

⁵⁴ Wawancara dengan Yuni Riawati, Solidaritas Perempuan, Mataram 18 Mei 2012.

sosial. Walaupun di sisi lain, pengkotakan ini juga akan lebih menciptakan organisasi dengan keahlian khusus dan menjadi mungkin di bidangnya.

Bidang Kerja Bantuan Hukum

“Pada perjalanan ke depan ini, LBH APIK menginginkan terjadinya perubahan sistem hukum agar lebih setara dan adil-gender. Dan secara khusus, agar penanganan bantuan hukum itu dapat lebih berpihak pada korban. Sistem hukum yang setara artinya menjamin persamaan di muka hukum untuk laki-laki dan perempuan. Kalau adil-gender maksudnya kaum perempuan—khususnya para korban—bisa menikmati hak-haknya. Untuk dapat adil-gender memang diperlukan *affirmative action* di dalam sistem hukum kita”.⁵⁵

Dengan visi tersebut, sejak rapat kerja 2011, yang mengangkat Ratna Batara Munti menjadi direktur, LBH APIK mempunyai dua program utama, yakni 1) layanan bantuan hukum dan 2) publikasi dan dokumentasi kajian hukum sebagai bahan dasar melakukan advokasi kebijakan, maupun kampanye publik untuk perubahan sistem hukum. Seperti yang dilakukan oleh LBH APIK Mataram di bawah ini:

“Upaya untuk men-*gendermainstreaming*-kan kurikulum Fakultas Hukum. Jadi kita membuat seminar dan lokakarya, yang output-nya itu adalah mengharap-kan supaya ada mata kuliah wanita dan hukum, atau gender dan hukum, di Fakultas

Hukum. Dan juga dosen-dosen itu se-dapat mungkin mengintegrasikan instrumen-instrumen hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan di dalam kuliah-nya sendiri-sendiri: Hukum Perburuhan, Hukum Pidana, Hukum Perkawinan..”⁵⁶

Selain LBH APIK, organisasi perempuan seperti Pekka juga melakukan kegiatan penyadaran dan penguatan para perempuan di hadapan hukum. Salah satu kegiatan Pekka yang sangat kuat dirasakan manfaatnya bagi para perempuan diberbagai daerah dan juga menjadi inspirasi bagi banyak kegiatan organisasi perempuan lainnya adalah mendekatkan akses dan proses hukum kepada perempuan seperti yang kita selalu dapatkan dalam setiap FGD dengan kelompok Pekka di berbagai daerah:

“Kegiatan yang kita ikuti dari segi hukum, mendata masyarakat yang belum punya buku nikah, buku cerai, akte lahir anak dan perwalian anak. Kami mendampingi korban, memberikan pemahaman mengenai kebutuhan bagaimana mendapatkan surat cerai, buku nikah, akte lahir anak dan lain-lain. Surat nikah dan surat cerai sangat diperlukan untuk mengurus harta gono gini apabila terjadi perceraian. Kami juga membantu perempuan yang bercerai bagaimana mendapatkan harta gono-gini...”⁵⁷

Anggota kelompok Pekka mengatakan bahwa kegiatan bantuan hukum tersebut

⁵⁵ Wawancara dengan Ratna Bantara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, Jakarta 24 Mei 2012.

⁵⁶ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur LBH APIK NTB, Mataram 16 Mei 2012.

⁵⁷ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan Kelompok Pekka Mataram, Mataram 15 Mei 2012.

merupakan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya dan pengurusan surat-surat tersebut langsung memberikan kekuatan dan kepercayaan diri para perempuan untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan Pekka.

Bidang Kerja Pendidikan

Kalyanamitra dan Kapal perempuan menjadikan isu pendidikan kritis perempuan sebagai kegiatan utama organisasinya. Melalui pendidikan kritis terhadap perempuan isu keadilan dan kesetaraan gender menjadi tiang utama penyangga isi dari semua kegiatan kritis tersebut. Kegiatan rutin memang diperlukan sebagai wadah dari pengembangan wacana dan penyadaran bagi isu keadilan dan kesetaraan gender.

“Kami tetap melanjutkan pendidikan gender, sebagaimana Kalyanamitra dari awal dulu dikenal. Kami mulai lagi tahun 2012 ini melakukan pendidikan gender dengan kurikulum tertentu, termasuk membahas isu seksualitas, bekerjasama dengan Ardhany. Pendidikan ini untuk umum, pesertanya biasanya mahasiswa, atau staf baru organisasi perempuan. Tidak banyak dulu, paling banyak berjumlah 15, dan diadakan secara bulanan, sebulan sekali selama satu hari penuh”.⁵⁸

Sementara Kapal perempuan sebagai pusat pendidikan perempuan juga melakukan penyadaran isu keadilan dan kesetaraan gender melalui pendidikan yang disebut pendidikan kritis bagi perempuan:

“Sesuai dengan nama lembaga, Kapal Perempuan memang ingin menjadi pusat pendidikan perempuan, dan memberi perhatian khusus bagi perempuan miskin yang sulit mengakses peluang pendidikan. Kapal sekarang menysasar wilayah-wilayah yang mempunyai kekhasan konflik, seperti NTB, NTT, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Juga Gorontalo, karena merupakan provinsi baru, pelepasan Islam dari dominasi Kristen. Kami ingin mempengaruhi pencegahan konflik –bukan penanganan konflik—melalui pendidikan kepada perempuan, yang biasanya sangat dirugikan dengan adanya konflik, sehingga mereka sangat berkepentingan untuk dapat mencegah terjadinya konflik”.⁵⁹

Mengemban mandat pendidikan kritis, Kapal Perempuan menysasar kelompok-kelompok tertentu, seperti buruh migran perempuan, perempuan miskin kota, perempuan di wilayah konflik dan perempuan buruh pabrik. Kaum perempuan pada sektor-sektor tersebut dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, baik untuk hal-hal praktis yang dibutuhkan, seperti pelatihan pra-keberangkatan PRT migran, maupun untuk isu-isu yang lebih strategis, seperti pluralisme dan keberagaman. Sebagaimana misi lembaga, Kapal Perempuan menekankan, bahwa untuk sasaran program pendidikan yang berbeda, harus dibangun strategi tersendiri agar upaya mengorganisasikan kaum perempuan melalui pendidikan itu dapat tercapai tujuannya.

“Strategi dan metode pendidikannya harus ditemukan sendiri, karena harus

⁵⁸ Wawancara dengan Rena Herdiyani, Direktur Eksekutif Kalyanamitra, Jakarta 21 Mei 2012.

⁵⁹ Wawancara dengan Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

dikontekstualisasikan dengan kebutuhan dan pengalaman kelompok sasaran pendidikan kita itu”.⁶⁰

Bidang Kerja Seksualitas

Akan halnya organisasi Ardhanary Institute, yang menggarap isu “*gender and sexual diversity*”, lembaga ini khusus fokuskan diri pada isu seksualitas sebagai isi program pendidikan berjangka panjang. Ardhanary bekerjasama dengan sejumlah organisasi perempuan lain, maupun lembaga pendidikan formal tingkat menengah dan sarjana. Sedangkan dalam jangka pendek, isu keragaman gender dan seksualitas digarap Ardhanary dengan melakukan pemberdayaan secara langsung, melalui konseling untuk para lesbian, biseksual dan trans-gender (LBT), dan keluarganya.

“Kita menjadikan training dan sesi-sesi diskusi sebagai program tetap Ardhanary Institute, yang mengetengahkan perspektif LBT untuk menepiskan homofobia, yang menjadi akar tumbuhnya tindakan-tindakan diskriminatif untuk kaum LBT. Misalnya dengan Sekolah Tinggi Teologia (STT), kerja samanya cukup sistematis, karena STT sudah secara rutin mengirimkan dua sampai tiga orang mahasiswanya ke Ardhanary Institute untuk praktik kerja lapangan (PKL), selama tiga bulan. Dan selama itu, mereka aktif mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Ardhanary Institute”.⁶¹

Melalui pendidikan formal dan informal tersebut, perspektif LBT dapat disosialisasikan kepada para pendidik, konselor maupun awak shelter, yang pada masa depan diprediksi akan banyak didatangi orang dengan masalah keragaman gender dan seksualitas. Isu gender dan seksualitas ini merupakan isu yang belum terlalu banyak di kerjakan oleh organisasi perempuan. Ardhanary melihat bahwa isu ini sangat penting karena sebagai kelompok yang rentan kaum LBT juga berhak mendapatkan bantuan untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Memang harus diakui isu seksualitas masih baru ditangani oleh organisasi perempuan secara masif dan sistematis, walaupun untuk diskusi-diskusi masalah seksualitas sudah lama dilakukan oleh organisasi perempuan. Untuk itu Ardhanary juga bekerjasama dengan organisasi perempuan yang juga sudah punya kegiatan penanganan isu seksualitas ini:

“Dengan lembaga *service provider* seperti WCC Rifka Anissa, dan juga Pusat Konseling Remaja PKBI Yogyakarta, Ardhanary bekerjasama dengan mereka, membantu pengembangan pengetahuan para konselor mengenai isu LBT dan seksualitas. Ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan isu keragaman gender dan seksualitas ke dalam kurikulum pelatihan konseling mereka”.⁶²

Sedangkan untuk kalangan yang lebih muda usia dan tergolong di dalam kelompok-kelompok LBT tak terorganisir, Ardhanary menyebar-luaskan buku saku berisi informasi dasar mengenai hak-hak LBT.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wawancara dengan Agustine, Direktur Ardhanary Institute, Jakarta 22 Mei 2012.

⁶² Wawancara dengan Agustine, Direktur Ardhanary Institute, Jakarta 22 Mei 2012.

Penguatan Ekonomi Perempuan

Hapsari fokus kepada pendidikan anak usia dini, perlindungan hukum karena KDRT, Credit Union, radio komunitas dan Usaha Industri Kecil Rumah Tangga, membantu layanan pemerintah desa untuk kaum perempuan. Sementara itu bidang kerja Pesada ada di isu Credit Union, Women's Crisis Centre, dan advokasi hukum karena KDRT. Hapsari juga mengadakan program kerja *livelihood*, dengan strategi advokasi penguatan kapasitas perempuan marjinal, untuk keberlanjutan penghidupan. Melalui program ini, Hapsari memperluas teknik-teknik inovatif melakukan pengorganisasian dan advokasi, dalam rangka ikut serta mempromosikan kerja-kerja penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan efisien dengan memakai metode radio komunitas dan pertunjukan teater.

Sekaitan dengan Radio Komunitas dan teater:

“Kami punya Radio Komunitas, yang merupakan salah satu media belajar bagi para anggota Hapsari untuk menjadi fasilitator dan narasumber. Selain Radio Komunitas, kami juga sering mengadakan pentas teater, yang mengangkat tema permasalahan perempuan. Teater dipentaskan di acara-acara umum seperti kelurahan”.⁶³

Kegiatan penguatan ekonomi perempuan, yang dilakukan oleh lembaga ASPPUK, yang ada di sebagian besar wilayah penelitian, juga diadakan oleh lembaga Hapsari dan Pesada.

“Penguatan ibu-ibu pengusaha kecil, pelatihan pencatatan pembukuan keuangan, pemasaran, koperasi simpan-pinjam, dan pengembangan usaha untuk mitra dan pasaran produk. Diskusi dengan ibu-ibu (khususnya Bundo Kanduang) juga menyangkut masalah ketimpangan gender yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari”.⁶⁴

“Penguatan perempuan usaha kecil, penguatan kelembagaan ekonomi perempuan, advokasi kebijakan dan partisipasi politik perempuan, program pencegahan perubahan iklim dan bencana”.⁶⁵

Bidang Kesehatan Perempuan

Sementara itu, lembaga Totalitas di Padang juga menangani isu kesehatan perempuan.

“Yang paling besar kegiatannya tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tujuannya, ibu bisa konsentrasi meningkatkan status gizi anak, bisa berdaya dengan apa yang ada di lingkungannya, tanpa bantuan kita dari luar. Kita memancing mereka untuk menggali dan mengelola potensi melalui diskusi dengan masyarakat (ibu-ibu). Ada juga kegiatan *positive defiance*, yaitu peningkatan gizi dari anak miskin. Kami lihat di komunitas ini ada yang gizi baik, jadi mereka mengadopsi apa yang dilakukan si anak gizi baik tersebut, sehingga lebih mudah diterima. Sehingga tumbuh-kembang anak baik, dan punya kehidupan yang

⁶³ Wawancara dengan Riani, Ketua Dewan Eksekutif Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

⁶⁴ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok binaan ASPPUK, Padang 17 Mei 2012.

⁶⁵ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M, Padang 14 Mei 2012.

baik. Ada juga peningkatan sarana air bersih”.⁶⁶

Selain itu, JPRP juga berupaya untuk kebutuhan air bersih yang memang dibutuhkan perempuan warga pesisir untuk kehidupan sehari-hari.

“...tentang kendala air bersih, pemerintah tidak menganggarkan. Kemudian kita mengejar CSR dari Bank Lampung. Kita sempat mencak-mencak, mendatangkan 30 orang ibu-ibu ke walikota. Kita sudah membangun dudukan tower, tinggal tower dan airnya datang. Kita ada perwakilan lima orang ke Bappeda provinsi. Kalau tidak terealisasi, kita mau ketemu wartawan agar bisa didengar”.⁶⁷

Isu kesehatan reproduksi perempuan juga banyak menjadi perhatian organisasi perempuan seperti Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI). Kesehatan reproduksi perempuan merupakan isu yang sangat penting dan menjadi perhatian dari berbagai organisasi perempuan.

YKSSI menurut Latifa juga menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan seperti pendampingan, promosi dan pelatihan tentang kesehatan reproduksi di kelompok remaja, laki-laki dan perempuan, serta ibu-ibu muda dan anak-anak, pemuda agama dan tokoh adat mengenai Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja dan perempuan.⁶⁸

Strategi Organisasi Perempuan untuk Bertahan Hidup

Strategi organisasi perempuan dalam melakukan aktivitas dan menetapkan program kerja sebagai respons terhadap isu ketidakadilan berbasis gender adalah berjejaring kerja baik di antara organisasi perempuan, maupun dengan organisasi lain guna mendesakkan perubahan kebijakan yang lebih adil gender dan berpihak pada perempuan.

Agenda penting yang juga dilakukan oleh organisasi perempuan, yakni mencari metode mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, dengan dilandasi oleh asumsi bahwa keterbelakangan perempuan dikarenakan sikap irasional yang berpegang pada kultur tradisional, yang membuat perempuan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Karenanya, program yang dibuat bersifat intervensi, untuk meningkatkan taraf hidup individu dan keluarga melalui pendidikan, keterampilan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan.

Namun, dalam perkembangannya, tak jarang terdapat organisasi perempuan yang mampu mentransformasikan dirinya keluar dari paradigma pembangunan, dan masuk dalam kegiatan yang lebih pada analisis berhubungan dengan kebutuhan strategis, seperti kebutuhan akan perjuangan isu yang lebih spesifik, misalnya kekerasan terhadap perempuan, hak seksualitas perempuan, masalah budaya yang tidak adil terhadap perempuan, serta isu tafsir agama yang membuat perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya, dan isu lainnya yang berhubungan dengan gender.

⁶⁶ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas, Padang 15 Mei 2012.

⁶⁷ Wawancara dengan Yati, JPRP, Lampung 14 Mei 2012.

⁶⁸ Wawancara dengan Latifa, Direktur YKSSI, Mataram, 15 Mei 2012.

Dari paparan tentang strategi organisasi perempuan, dapat kita lihat bahwa organisasi perempuan di Jakarta bergerak di beragam isu dengan berbagai program, yang dimaksudkan untuk responsif menjawab kebutuhan aktual perempuan sesuai dengan karakteristik struktur budaya, ekonomi, politik dan konteks zaman.

Dalam tulisan-tulisan yang kami paparkan, terlihat organisasi perempuan telah berupaya untuk mempertanyakan relasi kuasa berbasis gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dari program-program yang bersifat strategis, seperti pembentukan wacana, menggugah kesadaran kritis melalui berbagai pendidikan, pelatihan yang bersifat memberdayakan perempuan untuk menyadari dan memperjuangkan hak-haknya, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum maupun politik. Di sisi lain, ada pula organisasi yang mengembangkan program-program praktis, seperti peningkatan keterampilan perempuan di bidang-bidang “stereotip”, seperti menjahit, merias pengantin, dsb. Namun tidak jarang kegiatan “stereotip” tersebut bertujuan agar organisasi itu nantinya bisa mengembangkan program yang lebih bersifat pemberdayaan tentang hak-hak perempuan sebagai warga negara. Hal ini dapat dilihat pada organisasi yang menangani isu pemberdayaan ekonomi perempuan, yang tidak hanya memberikan bantuan kredit, simpan-pinjam, dan sejenisnya, tapi juga memberikan kesadaran untuk membangun relasi gender yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

Jaringan Koalisional antar Organisasi Perempuan

Strategi organisasi perempuan sangat terkait dengan pertimbangan-pertimbangan politik dan situasi sosial pada zamannya. Organisasi perempuan yang memilih untuk terlibat dalam kerja berjejaring, berupaya untuk belajar dari pengalaman kerja berjejaring sebelumnya, dan lebih cermat memperhatikan momentum politik serta menghitung faktor peluang dan hambatan dalam memperjuangkan suatu isu. Faktor lain yang paling menentukan keberhasilan kerja berjejaring adalah kesadaran bersama untuk menyepakati isu yang akan diperjuangkan bersama, dengan menanggalkan kepentingan individual organisasi.

“Tahun 1999-2006, Nurani Perempuan masuk jaringan Komnas Perempuan untuk kegiatan-kegiatan khusus forum belajar. Dalam forum tersebut, selalu ada perwakilan Komnas Perempuan yang datang ke pertemuan. Sejak tahun 2007-2010 WCC Nurani Perempuan tidak lagi terlibat dalam jaringan forum belajar ini. Selama terlibat dalam jaringan tersebut, kita menjadi kuat dalam advokasi. Begitu pun kampanye anti-kekerasan yang kita lakukan semakin sukses. Artinya jaringan kerja tersebut membuat organisasi kita menjadi semakin kuat”.⁶⁹

Kemudian Yefri menambahkan bahwa jaringan koalisional tersebut juga semakin diperluas untuk membantu kerja-kerja yang mereka lakukan untuk isu kekerasan terhadap perempuan:

⁶⁹ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan, Padang 17 Mei 2012.

“Sejak 2011, WCC Nurani Perempuan dipercaya menjadi koordinator lembaga layanan forum belajar di Sumatera untuk kaum perempuan. Tentang kasus, cerita-cerita pengalaman kasus merupakan bagian yang kita bangun di forum belajar di Sumatera. Forum belajar ini juga membangun kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain, baik lembaga Internasional maupun lembaga nasional. Tahun ini, kami bekerjasama dengan Puskapol UI. Mereka mengajari kita untuk bicara tentang demokrasi. Kami tertarik, karena melalui isu demokrasi, kita juga bicara nilai-nilai HAM dan Gender. Artinya, pertama, keterlibatan kita jelas membangun nilai demokrasi. Yang kedua, kita juga bicara dengan *social foundation*”.⁷⁰

Dalam membangun jaringan, beberapa organisasi perempuan memutuskan untuk memperluas daerah kerjanya dengan cara membuka cabang atau koordinasi dengan daerah-daerah di luar Jakarta, seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang berlaku sejak 1999.

Kerjasama Kelembagaan

Mengajak aktor yang berbeda dan memperluas kalangan untuk terlibat merupakan strategi yang tampaknya tak terelakkan, setelah kekuasaan rejim otoriter Soeharto digantikan oleh iklim politik yang lebih menjanjikan demokrasi, dan memungkinkan proses demokratisasi mulai berjalan di Indonesia.

Salah satu indikator keberhasilan kerja bersama yang dilakukan oleh para aktivis perempuan adalah dalam mendesak

pembentukan Komisi Nasional Anti-Kekeerasan Terhadap Perempuan pasca jatuhnya Orde Baru. Proses kerja bersama ini memang telah dimulai jauh sebelumnya, dengan mendirikan gerakan suara Ibu Peduli pada saat krisis ekonomi 1998. Pada saat itu, para aktivis perempuan berkumpul dan melakukan beberapa kali rapat intensif untuk merespons krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan perempuan langsung menjadi korban karena tidak mampu menyediakan susu murah buat anak-anaknya. Gerakan perempuan juga terlibat aktif pada masa reformasi, mendukung gerakan mahasiswa, baik melalui dapur umum, menjadi relawan, maupun aktif dalam melakukan penggalangan massa dan membangun opini. Setelah pengorganisasi dalam gerakan Suara Ibu Peduli dan aktif terlibat dalam gerakan reformasi, lalu gerakan perempuan kembali berhasil mendesak lahirnya Lembaga seperti Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan tersebut, yang pembentukannya secara hukum dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Oktober 1998), kemudian diubah dengan Keputusan Presiden RI tahun 2005. Gerakan perempuan sadar bahwa memang harus mencari dan melibatkan aktor-aktor lain serta memperluas agen perubahan, tidak saja dari masyarakat sipil, tetapi juga di kalangan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Berdirinya Komnas Perempuan merupakan satu indikator keberhasilan kerja bersama yang melibatkan aktor-aktor, yang pada masa Orde Baru dianggap sebagai kekuatan di luar dirinya. Bahkan akhirnya, beberapa aktivis perempuan juga menjadi komisioner Komnas Perempuan, sebuah lembaga yang merupakan bagian dari pemerintahan.

⁷⁰ *Ibid.*

Corak gerakan perempuan yang berhasil meluaskan aktor yang terlibat dalam gerakannya juga terlihat dengan keberhasilannya dalam memperjuangkan lahirnya berbagai Undang-undang yang responsif gender. Contohnya antara lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004), UU Trafficking, UU Kewarganegaraan dan UU Pemilihan Umum. Keberhasilan demikian tidak mungkin terjadi tanpa memperoleh dukungan dari pihak terkait seperti DPR maupun lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), serta lembaga pemerintah terkait lainnya.

Dalam menyusun Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dipublikasikan setiap tahun sebagai laporan tahunan, dan gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan bersamaan dengan peringatan Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional, Komnas Perempuan harus mengambil data dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Umum dan Agama), dan Rumah Sakit dari seluruh Indonesia. Untuk produk Laporan Tahunan ini di belakangnya ada proses panjang kerja produksi, yang mensyaratkan kesepahaman tujuan, kesamaan *platform* dan titik berangkat serta kesetaraan hubungan kerja dari berbagai aktor. Hal ini tidak mudah.

Kerjasama kelembagaan lainnya juga dilakukan oleh organisasi perempuan dengan lembaga pendidikan formal, seperti memasukkan kurikulum anti-kekerasan terhadap perempuan. Begitu pun dengan upaya yang dilakukan Ardhanary Institute untuk mewujudkan pendidikan pengetahuan Lesbian Biseksual Trans-gender, juga memberikan

informasi tentang strategi organisasi mengembangkan kerjasama yang sifatnya kelembagaan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk lembaga pendidikan formal setingkat sarjana. Kemauan untuk bekerjasama secara melembaga dapat dikatakan merupakan upaya menerjemahkan prinsip inklusifitas di dalam feminisme untuk mengajak, merangkul pihak dan aktor lain untuk secara bersama-sama melakukan perubahan.

Peluang yang diberikan otonomi daerah, dalam mana daerah bisa membuat regulasi sendiri, dimanfaatkan dengan baik untuk mendampingi dan mengawal Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan kebijakan yang pro-perempuan. Sejak 2011, di Lampung sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal kesetaraan gender, yakni Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan. Perda ini mengatur soal kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pembangunan di daerah. Selain itu, terdapat Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, di Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu 'monumen' dari Damar.

“Selain pengorganisasian, kita juga melakukan advokasi kebijakan. Damar dekat dengan aparat penegak hukum maupun aparat di tingkat daerah. Namun ada mobilisasi yang tinggi di mereka, banyak rotasi. Membangun dan menguatkan perspektif para polisi dan jaksa ini tantangannya adalah, mereka cepat sekali pindah, naik pangkat, lalu pindah”.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Selly Fitriani, Damar, Lampung 11 Mei 2012.

Hanya saja, kerjasama kelembagaan ini masih belum stabil karena meskipun pada tingkat pengurus telah terbangun kesepakatan secara substansial, akan tetapi kegiatan tersebut masih tergantung pada peluang pembiayaannya juga.

Masalah pembiayaan bukan hanya dirasakan ketika mencoba membangun hubungan yang lebih berkesinambungan antar berbagai aktor namun juga merupakan persoalan yang masih dirasakan dalam melakukan kegiatan sehari-hari organisasi perempuan.

“Dalam kerangka kerja dengan Hivos, misalnya, kita memanfaatkan untuk sungguh-sungguh ‘menghitung kepala’ berapa yang sudah berhasil dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan, sehingga outputnya jelas. Tetapi juga agak sulit meneruskan secara jangka panjang karena periodenya terbatas. Demikian juga dengan WPF, program youth selalu ramai dan menyenangkan karena kita belajar banyak sekali dari sana, tapi juga waktunya pendek”.⁷²

Kerjasama Organisasi Masyarakat Basis

Organisasi perempuan dengan garapan khusus, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, baik bagi perempuan kepala keluarga seperti yang dilakukan Pekka maupun perempuan anggota keluarga seperti yang dilakukan ASPPUK, juga tidak mungkin mengelak dari kebutuhan bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait, maupun aparat pemerintahan, mulai dari tingkat desa sam-

pai ke atasnya. Juga mereka harus bekerja dengan bank rakyat setempat dan lembaga pemasaran yang ada. Sasaran penerima manfaat yang lebih mengarah kepada perempuan *grassroot* juga memberikan keleluasaan untuk menjalin kerjasama dengan aparat pemerintahan desa secara langsung.

Demikian juga untuk program layanan bantuan hukum, seperti pengadaan Akte Kelahiran Anak, Isbat Nikah dan Surat Cerai, Pekka harus menemukan aparat di instansi terkait yang bersepaham dengan Pekka dalam kepentingan para perempuan korban. Bekerjasama dengan mereka membuka akses dan mempermudah layanan pengadaan surat-surat penting tersebut. Salah satu yang berhasil dilakukan bahkan memperpendek birokrasi mafia pengurusan surat cerai, yang pada praktiknya membutuhkan ketekunan seluruh aspek kerja pengorganisasian dan ketangkasan bekerjasama dengan instansi pemerintah, tanpa menjadi larut dengan sistem yang ada.

Menurut Nani Zulminarni,

“Pada wilayah-wilayah yang kelompok ibu-ibunya aktif seperti NTT, Pekka ditantang untuk senantiasa mampu merawat motivasi berorganisasi agar tidak bersifat sementara saja.” Inilah yang menjadikan Pekka tidak mungkin ‘berhenti’ atau ‘istirahat’ mengurusnya.⁷³

Ditambahkan oleh Kodar, “Pelajaran berorganisasi sangat dirasakan manfaatnya oleh ibu-ibu ini, jadi mereka *ngotot* dan tak kenal lelah berjuang sampai Serikat Pekka di sana menjadi peserta Mu-

⁷² Wawancara dengan Agustine, Direktur Ardhanary Institute, Jakarta 22 Mei 2012.

⁷³ Wawancara dengan Nani Zulminarni, Seknas Pekka Jakarta, Jakarta 15 Mei 2012.

srenbang mencapai tingkat kecamatan dan selanjutnya. Padahal, lazimnya, kita hanya diikutsertakan untuk musrenbang tingkat desa saja. Mereka bergotong-ro-yong kumpulkan dana transportasi sendiri, dan hanya minta bantuan Seknas untuk surat pengantar saja”.⁷⁴

Untuk keperluan ini, strategi kerja Pekka sebagaimana dituturkan Kodar adalah:

“Mendorong agar Koordinator Wilayah (korwil) melatih diri mengelola program dan kegiatan secara mandiri, dengan sedikit demi sedikit menanggalkan ketergantungan pada koordinasi langsung dari Seknas. Mereka harus berani mencoba dan *learning by doing it*”.⁷⁵

Hapsari juga mengembangkan jaringan kerjasama, baik di tingkat basis sampai pada tingkat provinsi, dan kemudian meluas hingga provinsi lain di Jawa dan Sulawesi. Selain itu, mereka juga mengembangkan program yang lebih mengarah pada usaha produktif yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi anggota. Anggota Hapsari terlibat aktif dalam tiap perkumpulan, termasuk ikut dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Perluasan jaringan tersebut juga merambah sektor pemerintahan, sehingga ikut aktif dalam menyalurkan layanan asuransi dari pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Anggota perserikatan Hapsari juga secara otonom berusaha mencari sumber dana sendiri untuk kegiatan masing-masing. Sementara itu, strategi organisasi Pesada juga mengembangkan organisasi, menjadi ja-

ringen yang meluas di tingkat provinsi dengan isu utama credit union (CU) khusus untuk perempuan. Anggota CU merupakan anggota Pesada yang aktif mengelola organisasi.

Organisasi Hapsari, setelah kuat dan berhasil mendirikan Serikat Perempuan di Deli Serdang, kemudian memperluas jaringan kerja dengan membangun serikat di wilayah lain, seperti di Bandung, Kalimantan dan Sulawesi. Dengan membangun Serikat Perempuan di berbagai daerah lain, Hapsari berusaha membangun kekuatan perempuan akar rumput agar bisa menjadi kekuatan nasional. Pemerintah memandang Hapsari sebagai mitra kerja dalam membangun kekuatan perempuan akar rumput yang menjadi organisasi nasional. Nama Hapsari, singkatan dari Harapan Desa Sukasari, tetap digunakan untuk mengenang sejarah pembentukannya.

Jaringan Kerjasama Internasional

Strategi mengembangkan jaringan kerja internasional juga dilakukan oleh organisasi perempuan secara dua arah. Apabila Migrant Care bekerjasama dengan sejumlah organisasi internasional, yang menggarap isu buruh migran seperti International Organization on Migrant Workers (IOM), ACIL dan ICMC, yang semuanya memiliki sekretariat atau kantor cabang di Jakarta, sebaliknya mereka juga mengembangkan kantor cabang Migrant Care di Malaysia. Kalyanamitra mengajukan diri sebagai Sekretariat untuk CEDAW Working Group Indonesia (CWGI). Sebagai CWGI, Kalyanamitra bertugas mengkoordinasikan penyusunan “shadow report”, atau laporan bayangan sebagai

⁷⁴ Wawancara dengan Kodar, Ketua Divisi Pengembangan Kelembagaan Seknas Pekka, Jakarta 15 Mei 2012.

⁷⁵ *Ibid.*

pendamping Laporan Resmi Pemerintah Indonesia. Tugas ini membuka kesempatan cukup luas bagi Kalyanamitra untuk mempererat jalinan kerjanya dengan organisasi-organisasi perempuan, sekaligus menyambungkan jalinan kerja berjejaring dengan organisasi pelapor CEDAW lainnya di kawasan Asia Pasifik. Kalyanamitra menjadi salah satu *focal point* untuk Asean Women's Caucus di aras regional, dan secara lebih luas di kawasan Asia Pasifik sebagai anggota aktif International Women's Rights Action Watch (IWRAP). Banyak sekali kerjasama internasional yang sudah dibangun oleh organisasi perempuan, seperti menjadi bagian dalam The Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), dan kerjasama lainnya yang lebih insidental, seperti menerbitkan tulisan bersama, maupun mengadvokasikan isu bersama.

Strategi Menghadapi Donor

Derasnya arus globalisasi yang membawa serta nilai-nilai budaya asing dan sekuler tidak serta-merta membuat organisasi perempuan untuk tunduk dengan mudah pada kepentingan donatur internasional, yang memiliki andil dalam membiayai kelangsungan hidup suatu organisasi. Ada organisasi yang dengan sengaja menyusun program mengantisipasi bahaya globalisasi seperti Solidaritas Perempuan dan KPI. Ada juga organisasi yang justru memilih bergerak di wacana keagamaan (Rahima), dan memasukkan perspektif gender dengan tujuan untuk memberdayakan komunitas pesantren serta mendorong pemahaman keagamaan yang mengembangkan pola relasi setara antara laki-laki dan perempuan.

Awalnya, organisasi perempuan berharap agar tidak bergantung pada donor asing untuk meraih cita-cita jangka panjangnya, yaitu dengan mekanisme independensi dari pendanaan. Namun organisasi sulit untuk bisa setia pada idealisme awalnya, karena mereka tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mendiskusikan rencana jangka panjang. Yang masih menjadi keprihatinan bagi hampir semua organisasi perempuan di Jakarta, adalah soal strategi menghadapi keterbatasan dana, dan bernegosiasi dengan lembaga donor sebagai mitra kerjasamanya. Bahkan lembaga seperti Komnas Perempuan, yang seyogyanya memperoleh pendanaan negara yang memadai, juga mengalami pemotongan yang cukup signifikan untuk dapat merencanakan kerja strategis berjangka panjang. Jadi lembaga Komnas Perempuan, yang *notabene* sebagai lembaga negara juga bersaing dengan lembaga perempuan non pemerintah lainnya, mengharapkan bantuan pendanaan dari lembaga donor.

Kebutuhan pendanaan organisasi diantisipasi dengan mencoba mengkompromikan antara kepentingan internal organisasi dan kepentingan lembaga donor, tanpa mengorbankan agenda gender organisasi perempuan. Ada pula organisasi yang mencoba untuk mandiri dalam pendanaan, dengan cara mengembangkan unit-unit ekonomi yang nantinya bisa menyokong kehidupan organisasi, seperti mendirikan koperasi perempuan (PPSW), menggalang iuran anggota (KPI, Solidaritas Perempuan, Fatayat), dana dari simpatisan (KPI, Kowani). Ini demi tidak bergantung sepenuhnya pada donatur asing. Namun, upaya swadaya dalam pendanaan ini tidak mampu mencukupi pembiayaan organisasi dan program kerja

yang sudah dirumuskan oleh organisasi perempuan.

Hal ini mengakibatkan tidak sedikit organisasi perempuan yang pada akhirnya harus berjuang untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari donor. Sehingga organisasi perempuan yang masih 'baru' atau dianggap tidak cukup 'besar' dianggap belum punya pengalaman administrasi untuk mengelola keuangan sulit untuk mengakses lembaga dana, karena lembaga dana lebih tertarik memberikan dananya kepada lembaga yang sudah 'besar' dan dianggap sudah punya 'nama' dan tentunya sudah berpengalaman mengelola dana dari donor. Masalah ketergantungan dana ini membatasi kreatifitas aktivitas perempuan untuk cepat tanggap merespon isu perempuan di lapangan. Organisasi perempuan yang besarpun pada akhirnya hanya sibuk menjalankan kegiatan yang memang didanai oleh donor, sehingga mereka sulit untuk bersetia pada cita-cita awal pendirian organisasi dalam melakukan pengorganisasian perempuan di lapangan.

Hal yang positif dari hubungan dengan donor adalah terjaminnya kelancaran program tanpa khawatir masalah dana, namun juga ada hal yang harus dicarikan jalan keluarnya agar organisasi perempuan tetap mempunyai cukup waktu untuk setia pada tujuan awal pendirian organisasinya, yakni memperjuangkan kepentingan keadilan gender perempuan, terutama perempuan di akar rumput. Juga bagaimana agar organisasi perempuan yang 'besar' bisa membantu lahirnya organisasi-organisasi 'baru' untuk memperjuangkan isu yang sama.

Hubungan dengan donor ternyata juga berdampak pada model kerja dan pengorganisasi lembaga perempuan. Seperti yang

terjadi di Padang, sebelum terjadinya gempa bumi pada 2009, organisasi perempuan yang tadinya cukup kuat memperjuangkan masalah ketidakadilan gender, akhirnya harus mengikuti isu yang dibawa oleh donor, dengan menjalankan isu humanitarian, misalnya isu pasca gempa. Organisasi yang tadinya hanya beranggotakan 10 sampai 14 orang seperti LP2M, jadi harus menangani jumlah dana yang cukup besar dibandingkan sumberdaya organisasi tersebut. Ketidaksiapan organisasi, baik anggota maupun sistem/manajemen, membuat organisasi tersebut mengalami konflik yang cukup serius.

Awalnya organisasi perempuan berharap agar tidak bergantung pada donor asing, untuk meraih cita-cita jangka panjang, yaitu dengan mekanisme independensi dalam hal pendanaan kegiatannya. Hapsari, setelah ditinggalkan oleh lembaga donor, Hivos, tidak mendapat donor lain. Untuk pendanaan, mereka menarik iuran Rp1.000 per bulan dan memproduksi sabun untuk dijual. Sebagian keuntungannya digunakan untuk menjalankan organisasi, walaupun memang dirasa sangat sulit menjalani kegiatan ditengah kelangkaan sumber dana. Sehingga sampai saat ini kami masih berusaha mencari sumber dana dari donor:

“Untuk menyiasati kelangkaan funding, kalau di tingkat Hapsari rajin buka internet untuk kirim beberapa proposal. Walaupun kami masih tetap bertahan dengan sumber dana sendiri seperti Credit Union juga masih menjadi harapan dalam kegiatan kami, Juga di serikat masing-masing mereka punya usaha sendiri untuk membantu bertahan hidup”.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Zulfa Suja, Anggota Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 24 Mei 2012.

Kemudian Zulfa menambahkan agar LSM juga bisa menggali sumber dana dari pemerintah daerah. Dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah ternyata banyak organisasi perempuan yang bisa mengakses dana-dana dari lembaga pemerintah seperti lembaga Hapsari dan Damar di Lampung, juga lembaga lainnya di daerah lain:

“kami juga mau mendorong agar LSM jangan berpikir kaku, dengan tidak adanya *funding* sekarang ini, maka sebaiknya LSM juga mulai membangun kerjasama dengan pemerintah untuk mendanai kegiatan di masyarakat dan kegiatan yang bersama dilakukan dengan pemerintah, Yang penting lembaga kita secara badan hukum administrasi lengkap, jadi mudah membangun kerjasama dengan kelompok lain. Kalau tidak berbadan hukum lengkap, banyak LSM yang bubar”.⁷⁷

Sementara itu, Fitriyanti dari LP2M Padang mengatakan:

“Kita sudah bermitra dengan Walhi Sumatera Barat, KPM, Lingkung Derma. Kalau donor kita dapat dari Heks, Swiss Solidarity, ASPPUK, Hivos, Global Fund for Women, BFA. Dengan pemerintah kita juga bekerjasama, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada kerjasama, tapi rendah karena respons dari mereka agak lambat, terbentur birokrasi dan rumit. Tapi secara personal masih baik”.⁷⁸

Lembaga Totalitas di Padang juga menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat.

“Kita memiliki kriteria mitra itu yang tidak terlalu banyak intervensi atau tuntutan, dan harus sama visi dan misi. Rekan kerja kita dengan LBH Padang dan banyak organisasi lainnya. Kalau *funding* dengan Project Center Internasional (PCI), HEIVER, New Zealand Aid, Johan Niter (Jerman). Dengan pemerintah juga bekerjasama, dengan Dinas Kesehatan, Kehutanan, dan Pertanian”.⁷⁹

Penutup

Reformasi politik yang terjadi pada 1998 telah membuka ruang demokrasi yang cukup luas kepada masyarakat untuk mengemukakan dan memperjuangkan terpenuhinya kepentingan mereka. Gerakan perempuan bersama-sama dengan gerakan pro demokrasi lainnya juga memanfaatkan era keterbukaan ini untuk memperjuangkan lahirnya berbagai perundang-undangan yang responsif gender. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan gerakan perempuan pada Era Reformasi ini ditandai dengan menguatnya pola jejaring antara para aktor yang peduli masalah keadilan dan kesetaraan gender. Kerja keras dengan berjejaring dari organisasi perempuan dalam keberhasilannya mengawal lahirnya perundang-undangan yang responsif gender tersebut patut mendapat penghargaan. Perundang-undangan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan serta kedudukan perempuan di Indonesia menjadi kun-

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M Padang, Padang 14 Mei 2012.

⁷⁹ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas, Padang 15 Mei 2012.

ci bagi perlindungan hak-hak perempuan sebagai warga negara.

Pun dalam era reformasi yang juga diikuti dengan penerapan sistem desentralisasi melahirkan banyaknya Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan seperti tertulis dalam Laporan Tahunan Komnas Perempuan. Dalam sistem desentralisasi yang juga memberi ruang kepada daerah untuk merumuskan peraturan daerahnya masing-masing yang didasari oleh nilai-nilai ke-daerahan yang bersumber pada nilai-nilai agama (syariah islam)⁸⁰ yang diinterpretasikan perempuan lebih rendah dari laki-laki.⁸¹ Melihat bahwa pengaturan tubuh perempuan menjadi isu yang juga dianggap penting untuk dilakukan. Sehingga disamping keberhasilan organisasi perempuan dalam mengadvokasi lahirnya Undang-Undang yang responsif gender juga diikuti oleh lahirnya kurang lebih 63 Perda⁸² yang diskriminatif terhadap perempuan di berbagai daerah di Indonesia.

Era keterbukaan politik ini juga memungkinkan organisasi-organisasi perempuan untuk menjadi tanggap terhadap keragaman masalah yang muncul di masyarakat sehingga organisasi-organisasi perempuan sekarang menangani isu dan program yang

lebih beragam dari sebelumnya. Seperti menangani isu dan program tentang penguatan politik serta peningkatan partisipasi politik perempuan, penguatan ekonomi, bantuan hukum, kekerasan terhadap perempuan, dan kesehatan reproduksi perempuan, organisasi-organisasi perempuan juga bekerja menangani isu dan program yang bersinggungan dengan berbagai masalah yang dulu bukan merupakan wilayah gerakan perempuan, seperti misalnya pluralisme, perempuan dalam Islam, lingkungan hidup dan juga seksualitas. Organisasi-organisasi perempuan di Indonesia telah berhasil beradaptasi untuk menanggapi munculnya keragaman kelompok dan kepentingan dan kebersinggungan mereka.

Selain perluasan isu dan program, gerakan perempuan juga meluaskan aktor yang terlibat dalam setiap program kegiatan mereka. Kerjasama dengan kementerian yang terkait mulai secara intensif dilakukan. Kalangan Eksekutif dan Legislatif sudah merupakan rekan kerja organisasi perempuan baik di daerah maupun di tingkat nasional untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan, alokasi anggaran dan program pemerintah yang responsif gender.

Cakupan daerah kerja organisasi-organisasi perempuan di tingkat nasional juga mengalami perubahan. Banyak organisasi perempuan di Jakarta yang punya kegiatan di daerah lain dan seringkali mereka bekerjasama dengan organisasi di daerah tersebut. Sehingga batasan kerja mereka tidak lagi bisa dikatakan bahwa organisasi perempuan di tingkat nasional hanya melakukan kegiatan di Jakarta. Kotak-kotak wilayah kerja mereka juga sudah membaur.

⁸⁰ Customary Institution, Syariah Law and The Marginalisation of Indonesian Women, Edriana Noerdin, in *Women in Indonesia, Gender, Equity and Development*, Edited by. Kathryn Robinson et al, ISEAS, Singapore, 2002.

⁸¹ Feminisme dan Relevansinya, Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, PT Gramedia Pustaka Utama dan Kalyanamitra, Jakarta, 1995.

⁸² Komnas Perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tata Negara-Bangsa Indonesia, Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota Pada 7 Provinsi, Jakarta 2010.

Bentuk atau model organisasi-organisasi perempuan juga mulai berubah untuk mengakomodasi keberagaman kepentingan mereka. Sebelum era reformasi, pilihan model organisasi mereka adalah yayasan. Namun di era pasca reformasi bentuk atau model organisasinya sudah sangat beragam. Ada yang tetap berbentuk yayasan, tapi banyak yang mengubah diri menjadi perkumpulan, Serikat, Koalisi, Federasi, bahkan sampai mengambil bentuk komisi seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Terlepas dari capaian dan perluasan program dan permasalahan yang dilakukan oleh organisasi perempuan, dapat kita lihat bahwa organisasi perempuan bergerak di berbagai isu dengan berbagai program, yang dimaksudkan untuk responsif menjawab kebutuhan aktual perempuan sesuai dengan karakteristik struktur budaya, ekonomi, politik dan konteks zaman.

Dari paparan tentang strategi organisasi perempuan, terlihat bahwa organisasi perempuan telah berupaya untuk mempertanyakan relasi kuasa berbasis gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dari program-program yang bersifat strategis, seperti pembentukan wacana, menggugah kesadaran kritis melalui berbagai pendidikan, pelatihan yang bersifat memberdayakan perempuan untuk menyadari dan memperjuangkan hak-haknya, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum maupun politik. Disamping itu organisasi perempuan pada era reformasi ini juga melihat isu dan masalah seksualitas perempuan sebagai persoalan yang sangat penting untuk ditangani karena isu seksualitas merupakan isu yang sentral yang mengatur

hidup dan kehidupan perempuan dalam relasi kuasa ditengah-tengah masyarakat yang patriarki.

Selain itu, ada juga organisasi yang mengembangkan program-program praktis, seperti peningkatan keterampilan perempuan di bidang-bidang “stereotip”, seperti menjahit, merias pengantin, dsb. Namun tidak jarang kegiatan “stereotip” tersebut bertujuan agar organisasi itu nantinya bisa mengembangkan program yang lebih bersifat pemberdayaan tentang hak-hak perempuan sebagai warga negara. Hal ini dapat dilihat pada organisasi yang menangani isu pemberdayaan ekonomi perempuan, yang tidak hanya memberikan bantuan kredit, simpan-pinjam, dan sejenisnya, tapi juga memberikan kesadaran untuk membangun relasi gender yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

Agenda penting yang juga dilakukan oleh organisasi perempuan, yakni mencari metode mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, dengan dilandasi oleh asumsi bahwa keterbelakangan perempuan dikarenakan sikap irasional yang berpegang pada kultur tradisional, yang membuat perempuan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Karenanya, program yang dibuat haruslah bersifat intervensi, untuk meningkatkan taraf hidup individu dan keluarga melalui pendidikan, keterampilan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan.

Jalan yang dilalui organisasi perempuan tampak sudah cukup jauh dan sudah diakui cukup berhasil memperbaiki kondisi kehidupan perempuan di Indonesia, setidaknya yang tercermin dari paparan para pegiat isu

perempuan di lima wilayah penelitian, Jakarta, Lombok, Padang, Lampung dan Sumatera Utara.***

Daftar Pustaka

- Anastasia, Ayu dan Aris Arif Mundayat. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Sumatera Utara*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Anindhita, Frisca dan Sita Aripurnami. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Lombok*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Aronson, Pamela. 2003. *Feminist or "Post-Feminist"? Young Women's Attitudes toward Feminism and Gender Relations*. Michigan State University, Michigan.
- Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Kalyanamitra, Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2010. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota Pada 7 Provinsi*. Komnas Perempuan, Jakarta.
- Noerdin, Edriana. 2002. Customary Institution, Syariah Law and The Marginalisation of Indonesian Women, In: Robinson, Kathryn and Sharon Bessell (eds.). *Women in Indonesia, Gender, Equity and Development*. ISEAS, Singapore.
- Priaryani, Ika Wahyu dan Aris Arif Mundayat. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Lampung*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Rahayuningtyas dan Edriana Noerdin. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Kota Padang*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Reinelt, Claire. 1995. *Fostering Empowerment, Building Community: The Challenge for State-Funded Feminist Organizations*. Human Relations Journal, Sagepub.
- Sommers, Christina Hoff. 1995. *Who Stole Feminism?: How Women Have Betrayed*. Simon & Schuster (first published 1994), New York.
- Women Research Institute. 2005. *Laporan Penelitian Perspektif, Pola Strategi dan Agenda Gender Organisasi Perempuan*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).

Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan

Sita Aripurnami

Tulisan ini mencoba melihat dan memahami bentuk-bentuk kuasa perempuan yang muncul dalam gerakan sosial, dan implikasi sosial, budaya dan politik, baik di tingkat individu, keluarga, kelompok masyarakat sipil maupun masyarakat secara umum. Serta faktor-faktor seperti ekonomi dan politik global maupun lokal, dan keterlibatan kekuatan ‘ekstra-lokal’ dan ‘respons lokal’ terhadap feminist leaderships di Indonesia pasca otoritarian. Dari pembahasan tersebut tergambarkan apa pendapat mereka yang aktif bergerak dan bekerja untuk mengatasi permasalahan perempuan mengenai isu kepemimpinan perempuan.

Pengantar

Berbicara tentang kepemimpinan (*leadership*), seringkali dikaitkan dengan upaya penguatan (*empowerment*) kapasitas diri orang yang memimpin. Sementara penguatan kapasitas berkaitan dengan upaya membangun kapasitas individu atau kelompok. Kepemimpinan selalu berkaitan dengan membangun kapasitas personal dan percaya diri serta kapasitas memobilisasi pihak lain.¹ Mempromosikan kepemimpinan perempuan

an memberikan manfaat lebih dari membangun personal perempuan, karena begitu seorang perempuan memiliki kapasitas diri, maka dirinya akan berusaha untuk membagi manfaat yang diperolehnya (yakni pengetahuan dan keterampilan) kepada anggota keluarga serta lingkungan terdekatnya.

Perempuan yang memiliki akses pada pengetahuan, modal sosial dan modal usaha, berdasarkan temuan Women Research Institute (WRI) di wilayah penelitian, menunjukkan bahwa mereka lebih mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan agar dapat mengangkat kepentingan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian WRI mencoba menangkap apa

¹ Lihat hal. 8 “Women Leading Change. Experiences Promoting Women’s Empowerment, Leadership and Gender Justice. Case Studies of Five Asian Organizations”, ed. Joanna Bouma, Pelagia Communications, Oxfam Novib, 2011.

pendapat mereka yang aktif bergerak dan bekerja untuk mengatasi permasalahan perempuan mengenai kepemimpinan perempuan.

Berikut temuan penelitian WRI di lima wilayah, yaitu Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Padang dan Lombok mengenai aspek “kepemimpinan feminis.”

Temuan Penelitian Organisasi Non-Pemerintah dan Kepemimpinan Perempuan

Tumbuhnya organisasi perempuan non-pemerintah dari tahun 1990an hingga 2000an merupakan indikasi penting untuk memahami bahwa gerakan perempuan masih terus berupaya menemukan ruang untuk mencapai keadilan gender. Ini artinya kepemimpinan perempuan juga masih terus berupaya untuk menegakkan nilai-nilai kepemimpinan tersebut. Dalam masyarakat yang patriarkal, kepemimpinan cenderung dilihat sebagai entitas yang lebih maskulin. Kepemimpinan perempuan bukanlah masalah simbolisme seperti itu, namun lebih menekankan pada prinsip nilai keadilan dan kesetaraan, serta kebersamaan dalam melaksanakan kepemimpinannya. Hambatan utama dalam menegakkan kepemimpinan yang berperspektif feminis adalah dominasi wacana ‘normativitas ibu’ dan wacana ‘normativitas bapak’, yang diletakkan secara dikotomis dengan masing-masing simbolnya. Ibu menunjuk pada simbol pengasuhan anak di rumah dan bapak sebagai simbol kepala keluarga pencari nafkah. Dikotomi ini menjadi beban bagi kaum perempuan ketika menjadi pemimpin, karena mendapat tuntutan terlalu banyak akibat dianggap

tidak sesuai dengan normativitas yang berlaku.

Gerakan perempuan melalui organisasi non-pemerintah merupakan upaya bagi kaum perempuan untuk menciptakan ruang kepemimpinan sosial yang lebih memberikan keadilan dan kesetaraan, dan bukan untuk mencapai dominasi. Akan tetapi banyak kaum laki-laki yang khawatir akan hal tersebut, karena mereka masih terbelenggu oleh normativitas baik ibu/perempuan maupun bapak/laki-laki.

Pandangan Kepemimpinan Ideal

Kepemimpinan adalah konsep abstrak yang berbasis pada proses konstruksi sosial, yang kemudian menjadi nilai untuk pemimpin. Pada dasarnya, pandangan tentang ‘kepemimpinan’ sangatlah beragam, dan keragaman tersebut terkondisikan oleh pengalaman subjektif tiap individu dalam hidupnya dan proses sosial yang membentuknya. Secara umum, imajinasi tentang kepemimpinan ideal seringkali merupakan bentukan struktural dan kultural. Jika kondisi yang ada memiliki karakter yang patriarkis, maka sosok laki-laki merupakan figur yang diidealkan dalam konteks kepemimpinan. Demikian pula sebaliknya. Artinya, kondisi struktural dan kultural merupakan proses sosial yang dapat berubah. Dalam konteks kekinian, seperti dalam masyarakat di wilayah penelitian WRI, tampak bahwa gerakan perempuan pun pada akhirnya ikut mempengaruhi apa yang masyarakat imajinasikan tentang kepemimpinan ideal. Dalam hal ini, transisi dalam memaknai kepemimpinan juga dapat kita rasakan, yaitu dari pergeseran nilai-nilai yang patriarkis, menuju penana-

man nilai-nilai feminis dalam kepemimpinan yang telah berproses di dalam kehidupan masyarakat.

Secara teoritis konsep kepemimpinan banyak menjadi dasar dari idealisasi nilai-nilai untuk bertindak dan berstrategi. Misalnya, W.A Gerungan (1996)² menjelaskan bahwa terdapat tiga ciri kepemimpinan, yaitu persepsi sosial, kemampuan berpikir abstrak dan keseimbangan emosional. Idealisasi sosok pemimpin pada dasarnya merupakan kombinasi antara persepsi masyarakat dan proses sosial yang membentuknya. Di dalam konteks ini juga ada pemahaman dan penghargaan terhadap pemimpin itu sendiri dalam proses sosial yang ada. Misalnya dari apa yang disampaikan oleh Kodar dan Mien dari Pekka Jakarta, organisasi yang menangani jaringan nasional, sebagai berikut:

“Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mendengar dan berbagi di antara tiap orang atau anggota, dan kemampuan merangkumnya menjadi sesuatu yang disepakati kelompok. Itu adalah modal awal dari kepemimpinan. Kepemimpinan feminis harus mulai dari diri sendiri, kemudian dengan orang lain”.³

Pandangan tersebut menunjukkan perlunya transformasi kepemimpinan secara dinamis dari diri ke sosial. Ini adalah proses sosial yang menghubungkan ranah privat dan publik sebagai dua entitas yang pada dasarnya tidak terpisah. Pandangan ini dile-

takkan pada basis pengalaman perempuan kepala keluarga yang berangkat dari penentuan posisi diri perempuan dalam konteks sosial dan organisasi. Pandangannya pun akan sedikit berbeda jika hanya diletakkan dalam konteks keorganisasian, baik yang skalanya daerah tertentu maupun yang skalanya nasional. Pandangan Ketua Komnas Perempuan Yuni Chusaifah, yang mengelola organisasi berskala nasional misalnya menegaskan bahwa:

“Praktik kepemimpinan memerlukan adanya *‘co-chairing’* atau *‘teaming’*, karena sosok perorangan saja tidak mencukupi untuk mengelola program dan kegiatan yang sifatnya nasional, lintas sektoral, apalagi untuk yang memerlukan kerja sinergis dengan pihak pemerintah. Untuk *teaming* ini, syaratnya adalah kemauan menciptakan *‘chemistry’* di antara individu tersebut, dan untuk itu ‘sudah saling kenal cukup lama’ merupakan dasar penumbuhan kerja sama”.⁴

Pandangan ketua Komnas Perempuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi yang besar lebih memfokuskan aspek keorganisasian yang membangun hubungan kolegial di dalam tim kerja organisasi. Tokoh yang menjadi pemimpin organisasi nasional tersebut pada dasarnya memiliki pengalaman organisasional berskala luas. Hal ini berbeda dengan perempuan kepala keluarga, yang secara sosial termarginalkan kemudian terlibat dalam organisasi, sehingga kemampuan untuk memimpin diri sendiri menjadi *point* penting untuk dapat

² Lihat hal. 135, Psikologi Sosial, Gerungan W.A, Bandung, Refika Aditama, 2002.

³ Catatan Focus Group Discussion, Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia, Jakarta 9 Mei 2012.

⁴ Wawancara dengan Yuni Chusaifah, Ketua Komnas Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

menentukan posisinya dalam ruang publik yang lebih luas.

Dalam konteks kepemimpinan di tingkat daerah, maka pemimpin organisasi perempuan di Mataram lebih mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan yang berskala daerah. Misalnya, sosok pemimpin dalam pandangan anggota kelompok Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JarPUK) bahwa pemimpin ideal harus orang yang memiliki sifat sabar, cukup berpengalaman dalam bidang kerjanya, serta memiliki sifat bijaksana dan adil.

“Jadi pemimpin itu harus punya sifat sabar, lebih pintar dari masyarakat, punya pengalaman, bijaksana dan adil... Berani mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk bawahannya, maksudnya tidak pelit mengeluarkan uang untuk anggotanya... Lalu lebih mementingkan kepentingan perempuan/anggota, loyal”.⁵

Cakupan nilai kepemimpinan dalam konteks demikian tampak berbeda dengan dua nilai ideal sebelumnya. Keberagaman akan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan konstruksi dan produk sosial yang memiliki kesesuaian dengan konteks yang ada. Berdasarkan pendapat narasumber dari Solidaritas Perempuan di Mataram, kepemimpinan seseorang bukan hanya sekadar pandangan atau persepsi ideal, namun perlu untuk dituangkan ke dalam aksi dan tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial di lingkungannya. Ini artinya kepemimpinan memiliki fungsi

agensi yang bertujuan untuk melakukan perubahan.

“Kalau menurut saya, pemimpin itu bisa berjuang untuk kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi dia tidak egois, melaksanakan sikap kepemimpinan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat”.⁶

Dua pandangan ini menunjukkan adanya keragaman dalam mempersepsikan kepemimpinan. Bagi anggota kelompok binaan Perkumpulan Panca Karsa, ciri-ciri pemimpin yang penting dimiliki adalah kemampuannya untuk menghargai pendapat orang lain, serta mampu bekerjasama dengan semua pihak dan berjejaring untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi anggota kelompoknya, yang *nota bene* adalah buruh migran dan keluarganya.

“Jujur, tanggungjawab memperjuangkan hak kaumnya, berani bicara, transparan, tidak pilih kasih... Inilah yang kita inginkan sebenarnya. Pemimpin harus pintar dan cerdas, *smart* — masa orang bodoh jadi pemimpin. Menjadi pemimpin: Pertama, harus mampu mengundang ibu-ibu untuk datang pelatihan, pertemuan dan selalu mampu mengajak ibu-ibu untuk memenuhi undangan itu; Kedua, mengikuti apa yang menjadi aturan kelompok dan menghargai pendapat orang lain, *ditambahin* satu: dia mampu bekerjasama dengan semua pihak, berjejaring, berwibawa”.⁷

⁵ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok JarPUK, Lombok Tengah 16 Mei 2012.

⁶ Wawancara dengan Bq. Zulhiatina, Solidaritas Perempuan, Mataram 15 Mei 2012.

⁷ Catatan Focus Group Discussion Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok binaan Perkumpulan Panca Karsa, Mataram 17 Mei 2012.

Hal senada juga dikemukakan oleh Merry dari Nurani Perempuan, Padang:

“Pemimpin itu hendaknya mengerti persoalan masyarakat. Dia mau mendengarkan aspirasi masyarakat, apa yang mereka butuhkan, tidak hanya membuat kebijakan. Sedangkan masyarakatnya tidak butuh itu, dan itu hanya akan merugikan energi, pikiran, materi. Hendaknya memimpin itu harus mengerti dengan keadaan yang semestinya kita lakukan, apa yang diinginkan masyarakat”.⁸

Berkaitan dengan ciri kepemimpinan yang ideal, hal ini berarti bahwa ada suatu karakter dan tindakan yang menonjol dari individu di dalam kelompok yang berpotensi untuk dikembangkan. Dalam hal pengorganisasian, Kodar dan Mien dari Seknas Pekka di Jakarta menggarisbawahi bahwa kemampuan untuk mendengar serta berbagi dengan tiap orang atau anggota, dan kemampuan merangkumnya menjadi sesuatu yang disepakati kelompok adalah hal penting yang diperlukan dalam pengorganisasian. Di lain kondisi, sosok ketua secara individu lebih diperlukan sebagai “representasi” mewakili institusi dalam pergaulan dan kehadiran di forum-forum strategis, seperti yang ditegaskan oleh pengurus LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI). Menurut Ratna Batara Munti yang mewakili LBH APIK, juga Dian Kartikasari dari KPI, kepemimpinan individual sangat penting, terutama untuk ber-

hadapan dengan institusi pemerintah. Dia menyatakan bahwa “penting sekali bagi LSM perempuan untuk mampu menampilkan ketua yang kredibel dan kehadirannya bermakna, agar tidak dipandang sebelah mata”. Ini artinya pilihan kepemimpinan yang sifatnya kolektif dan individual merupakan strategi bagi perempuan dalam memposisikan diri. Dalam pengambilan keputusan organisasi, maka kepemimpinan kolektif diperlukan. Sementara itu, kepemimpinan yang individual mereka tunjukkan dalam forum yang berhadapan dengan pemerintah untuk menunjukkan ketegasan posisi. Selanjutnya tentu saja diperlukan pembekalan ‘teknis kepemimpinan’, seperti ketangkasan mendengar kebutuhan kelompok, kearifan dalam memimpin pengambilan keputusan — yang semuanya dapat diberikan melalui latihan khusus, maupun melalui pengelolaan program.

Sementara itu, untuk isu khusus seperti Lesbian, Bisexual, Transgender (LBT) dan kelompok sasaran usia tertentu, seperti remaja-dewasa awal (18 tahun sampai pertengahan usia 20-an) yang merupakan kelompok sasaran Ardhany Institute di Jakarta, Agustin menambahkan bahwa pemimpin diharapkan jeli menangkap kebutuhan dan kesenangan kelompok akan cara berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang dimaksudkan.

“Dengan perbedaan usia, kita sering lupa dan menganggap mereka pasti sudah mengerti apa yang kita sampaikan panjang-lebar, saat kita menjelaskan. Padahal ternyata, cara komunikasi kita dianggap terlalu serius sehingga maksud

⁸ Wawancara dengan Mery, Relawan WCC Nurani Perempuan, Padang 17 Mei 2012.

tidak ditangkap seperti yang diinginkan”.⁹

Problem ini diatasi dengan meminta mereka menilai cara kita dan memberi masukan tentang cara yang lebih pas dengan “modus komunikasi” mereka. Agustin juga menyepakati bahwa dalam kepemimpinan feminis untuk menginisiasi kelompok atau komunitas, diperlukan sosok sebaya yang kemudian akan menjadi koordinator penyambung komunikasi.

Sementara itu, menurut Latifa dari Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI) di Mataram, pemimpin yang ideal adalah orang yang mampu memberi motivasi kepada kelompok yang dibinanya.

“Pemimpin adalah seseorang yang dapat mengetahui dan memahami karakter orang-orang yang dipimpinnya. Lalu juga dapat memberikan motivasi, serta bertanggungjawab terhadap lembaga atau kelompok yang dipimpinnya. Ketika seseorang sudah bisa memiliki sifat bertanggungjawab, maka sifat-sifat lain seperti jujur, adil dan bijaksana, pasti juga terkandung di dalamnya. Sifat lain yang penting juga, tegas dan loyal terhadap lembaga atau kelompok”.¹⁰

Kepemimpinan perempuan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari praktik kepemimpinan itu sendiri dalam organisasi perempuan. Kepemimpinan merupakan bentuk dari pengelolaan relasi kuasa yang mengerucut sebagai kesepakatan di antara ang-

gota masyarakat untuk menentukan siapa pemimpin itu dan apa nilai-nilai yang disepakati untuk memimpin. Dalam konteks ini, kepemimpinan sebagai konsep tentu memiliki nilai ideal untuk menjadi pedoman dalam berperilaku, ataupun untuk melakukan pengelolaan.

Dina dari Pesada menyebutkan pemimpin yang berperspektif feminis adalah:

“...Harus perempuan yang bisa memimpin dengan cara yang menghormati perbedaan, termasuk perbedaan strategi. Pikiran-pikiran feminis harus menjadi inti. Kita tahu bahwa feminisme berjuang untuk perempuan. Analisisnya harus bisa jalan ketika dia melakukan analisis terhadap kekuasaan, bukan sekadar analisis gender. Analisis kekuasaan itu harus kuat, supaya perempuan mengerti untuk tidak menindas yang lain. Ide-ide mengenai *power-sharing* penting, di mana kekuatan dari dalam akan menjadi satu kekuatan. Dan berbicara kepemimpinan tidak perlu berorientasi kepada posisi”.¹¹

Sementara itu, ada pandangan yang dikemukakan oleh salah seorang aktivis di Lampung, yang menganggap bahwa sebaiknya gerakan perempuan juga menyentuh isu-isu yang terkait dengan kemiskinan. Persoalan kaum perempuan tidak sekadar masalah adil gender. Ketika ada kemiskinan, dan kekerasan masih marak, gerakan perempuan tidak sekadar berjuang hanya di pelataran gender saja, namun juga harus memperhatikan persoalan kemasyarakatan yang lebih luas, kepemimpinannya harus visioner, jelas mau apa dalam memperjuangkan hak-

⁹ Wawancara dengan Agustin, Direktur Ardhanary Institute, Jakarta 22 Mei 2012.

¹⁰ Wawancara dengan Latifa Bay, Direktur YKSSI Mataram, Mataram 15 Mei 2012.

¹¹ Wawancara dengan Dina Lumbantobing, Pendiri Pesada, Medan 25 Mei 2012.

hak perempuan, dan juga konsisten dan taat mekanisme organisasi.

“Perempuan yang mampu keluar dari lokalnya dan punya kemampuan, contohnya Sri Mulyani. Mba Laila juga punya kapasitas itu”.¹²

Salah satu contoh dari ciri kedua, mengenai kemampuan berpikir abstrak seorang pemimpin, diungkapkan oleh pengurus JARPUK dan Solidaritas Perempuan di Mataram. Menurut pandangan mereka, salah satunya adalah, ketika melihat situasi masyarakat yang variatif, pemimpin bisa menjunjung tinggi asas demokrasi agar tetap menghargai keberagaman. Hal senada juga diungkapkan oleh Putri dari WCC Nurani Perempuan di Padang:

“Pemimpin yang ideal itu menerima perbedaan berpikir masyarakat, perbedaan latarbelakang masyarakat; dan pemimpin mampu mengakomodasi, membuat perbedaan itu menjadi bersatu. Banyak pemimpin yang tidak siap dengan perbedaan; itu bagian dari yang perlu kita garis-merahi: kita bicara tentang Pancasila, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu-itu tidak apa”.¹³

Bagi Beauty di Mataram, kemampuan untuk berpikir abstrak, termasuk juga memiliki pengetahuan tentang gender, akan memungkinkan seorang pemimpin perempuan menawarkan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan.

“Seorang pemimpin juga harus memiliki pengetahuan tentang gender, dan pro-perempuan, *mengakomodir* staf, *update* terhadap perkembangan informasi, memiliki strategi untuk menghadirkan keadilan bagi perempuan”.¹⁴

Isnaini dari Yayasan Totalitas di Padang memberikan pendapat yang serupa dengan Beauty:

“Pemimpin yang baik itu harus punya komitmen terhadap lembaga. Dia juga akuntabel, tanggungjawab, jujur, dan — yang paling penting — dia harus berperspektif gender, karena semua masalah pasti ada hubungan dengan perempuan, kalau banyak intervensi ke perempuan, masalah lebih cepat, baik pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan”.¹⁵

Ciri terakhir, yaitu keseimbangan emosional disebutkan oleh hampir semua narasumber dari kelima wilayah penelitian. Kematangan emosional diperlukan oleh seorang pemimpin untuk dapat turut merasakan keinginan dan cita-cita anggota kelompok dalam rangka melaksanakan tugas kepemimpinan dengan sukses. Sebagai contoh yang diungkapkan oleh anggota Pekka, seorang pemimpin harus bisa mendengarkan dan siap siaga ketika menangani permasalahan dan keluhan dari anggota atau masyarakat sekitar.

“...Mempunyai kepedulian, tahu kapan harus bertindak darurat. Ada kedarurat-

¹² Wawancara dengan Ahmad Yulden Erwin, Koordinator Komite Anti Korupsi, Lampung 15 Mei 2012.

¹³ Wawancara dengan Putri, Relawan WCC Nurani Perempuan, Padang 17 Mei 2012.

¹⁴ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur LBH APIK NTB, Mataram 16 Mei 2012.

¹⁵ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas, Padang 15 Mei 2012.

an harus dibantu; ada korban KDRT, atau ada yang sakit, harus siap siaga”.¹⁶

Keseimbangan emosional seseorang dalam memimpin sebuah lembaga adalah mengetahui dengan jelas tujuan dari tindakannya.

“Seorang pemimpin yang baik harus mampu memahami apa yang dia lakukan untuk lembaga. Percuma jika punya nama besar tapi tidak tahu tujuan dan risikonya, karena apa yang dilakukannya akan menjadi tak terarah dan mudah tergoyahkan”.¹⁷

Hal senada dikemukakan oleh Tya dari WCC Nurani Perempuan, Padang:

“Pemimpin yang ideal itu mesti mengerti bagaimana kondisi orang yang dipimpinnya. Dia tahu apa yang menentukan, menjadi kebutuhan dia dan orang lain, dan kemudian — yang paling penting— tidak bersikap otoriter”.¹⁸

Yuni Walrif dari Solidaritas Perempuan Padang menyebutkan bahwa relasi yang seimbang atau setara antara pemimpin dan stafnya adalah ciri penting bagi seorang pemimpin:

“... Sederhana saja, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa diterima anggotanya, dan dia bisa mengerti or-

ganisasi (nilai dan tujuan), dan memahami staf-stafnya. Ada pemimpin yang pintar tapi tidak diterima, mungkin ada arogan, cepat puas, dan mudah menepuk dada. Menurut saya, itu bukan pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baik adalah yang mampu membangun relasi seimbang”.¹⁹

Sementara itu sejumlah, anggota Hapsari di Deli Serdang yang terlibat dalam FGD memberi rangkuman pengertian kepemimpinan perempuan sebagai berikut:

“Pemimpin yang berasal dari basis, dan menjalankan mandat sesuai kebutuhan yang dipimpinnya, dan mampu membangun persaudaraan sesama perempuan guna melakukan perubahan untuk bebas dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan gender. Lebih dari itu, juga pemimpin yang tahu jalan, menunjukkan jalan, mengarahkan yang dipimpin untuk mencapai tujuan, dengan menumbuhkan kepemimpinan perempuan lokal, mulai dari tingkat desa sampai nasional untuk membangun gerakan perempuan yang bermartabat”.²⁰

Seluruh organisasi yang dikunjungi di lima wilayah penelitian dipimpin oleh perempuan. Perempuan sebagai pemimpin di organisasi, baik di tingkat akar rumput maupun jaringan, telah dapat mengorganisasi lembaga dan anggotanya secara baik. Menurut anggota kelompok basis, seperti Jar-PUK di Mataram atau Hapsari di Deli Ser-

¹⁶ Catatan Focus Group Discussion Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok binaan Pekka, 15 Mei 2012.

¹⁷ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur LBH APIK NTB, Mataram 16 Mei 2012.

¹⁸ Wawancara dengan Tya, Relawan WCC Nurani Perempuan, Padang 17 Mei 2012.

¹⁹ Wawancara dengan Yuni Walrif, calon anggota Solidaritas Perempuan Padang, Padang 14 Mei 2012.

²⁰ Catatan Focus Group Discussion Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan anggota Serikat Hapsari, 28 Mei 2012.

dang, kepemimpinan yang ada sekarang sudah sesuai dengan ciri-ciri kepemimpinan yang ada. Sedangkan bagi anggota binaan Pekka di Mataram dan Nurani Perempuan di Padang, sekali pun kepemimpinan masih belum menyerupai keseluruhan ciri-ciri kepemimpinan yang mereka sebutkan, kepemimpinan di wilayah mereka sudah cukup mampu mengangkat dan menyelesaikan masalah yang dialami anggotanya.

“Sebagai ketua kelompok ... bisa memotivasi anggota lainnya ... bisa menyelesaikan masalah dengan baik secara bersama-sama”.²¹

“Pemimpin adalah seseorang yang mampu mendengarkan, transparan, tanggungjawab, bisa menggalang anggotanya ... setiap saat meluangkan waktu, begitu ada anggota yang punya masalah, siap mendengarkan masalah anggotanya”.²²

Dari paparan ini, tampak sejumlah perbedaan dan persamaan pandangan terhadap apa yang mereka idealkan sebagai pemimpin dan kepemimpinan. Mereka menyebut karakter yang mereka anggap ideal, adalah “anti penindasan dan ketidakadilan, serta mengembangkan kolektivitas.” Lebih dari itu, semua narasumber menegaskan adanya hubungan pemimpin dengan “basis”, yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu perlu muncul dari kader dan terus semakin

matang karena pengalaman berorganisasi dan memimpin.

Selain itu, pemimpin juga selalu perlu berhubungan dengan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan proses sosial yang berakar pada pengalaman seseorang dalam pengorganisasian. Organisasi merupakan ranah yang penting bagi perempuan untuk mengkonstruksikan diri melalui proses belajar untuk menjadi pemimpin. Pada mulanya dia memimpin diri sendiri, kemudian memimpin teman-teman, membangun kolektivitas sesama perempuan, dan kemudian memimpin masyarakat untuk melakukan perubahan — hal yang merupakan perjuangan kaum perempuan dalam melawan penindasan dan ketidakadilan.

Keterlibatan perempuan dalam organisasi bukan saja memperoleh pengalaman mengorganisasi diri, namun juga memperoleh dan menanamkan nilai-nilai ideal mengenai pemimpin dan kepemimpinannya. Nilai inilah yang dalam praktik berorganisasi mengalami proses penyemaian, pertumbuhan dan penyebarluasan di antara mereka, dan kemudian meluas ke masyarakat serta memberi alternatif nilai baru.

Sekali pun demikian, terdapat pandangan yang menarik selain konsep anti penindasan, ketidakadilan dan mengembangkan kolektivitas seperti yang diungkapkan narasumber dari Hapsari berikut:

“...Di Hapsari, hirarki sangat dibutuhkan dalam konsep kepemimpinan, karena hirarki adalah sesuatu yang tidak dapat kita pisahkan dari struktur Hapsari yang federatif. Di tingkat nasional ada strukturnya sendiri yaitu Dewan Pengurus Nasional, hirarkinya yaitu kita punya

²¹ Catatan Focus Group Discussion Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok JarPUK, Mataram 16 Mei 2012.

²² Catatan Focus Group Discussion Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok binaan Pekka NTB, Lingsar 15 Mei 2012.

ketua. Di anggota Serikat ada mekanisme yang diatur bagaimana berelasi dengan tingkat nasional. Untuk di Serikat, tetap membentuk Ketua... Menurut Hapsari, struktur dan hirarki itu penting dalam sebuah organisasi karena akan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan”.²³

Dengan demikian, bagi organisasi Hapsari, kepemimpinan yang anti-hirarki belum tepat, karena dengan ada struktur dan hirarki lebih jelas dalam pembagian tugas kerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan mandatnya.

“Jika kita berbicara tentang anti-hirarki, maka kita perlu pikirkan sungguh-sungguh. Sebagian besar dari kita ingin demokratis, tetapi kadang kita tidak menghargai kewenangan-kewenangan yang berbeda untuk dihormati. Kita cenderung inginnya paguyuban, dalam sehari-hari ada keputusan yang diambil, tapi kurang dihargai. Dampaknya menjadi tidak baik, karena seolah menjadi konflik yang tidak berkesudahan. Kita coba menghargai, bukankah kita yang memilih kepemimpinan itu? Ya, menghormati kesepakatan yang sudah diambil... Menurut saya, sepanjang keputusan tertinggi lewat proses rapat dijalankan, seharusnya kita menjalankan hirarki dengan jalan demokratis juga”.²⁴

Bagaimana pun, menurut Ratna, sebuah struktur organisasi pasti memiliki hirarki. Perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan dengan rapat dan keputusan

yang bisa diselesaikan tanpa rapat. Apa gunanya ada struktur, padahal kita memilih struktur tersebut untuk memudahkan kerja kita. Seharusnya dalam sebuah organisasi, kita perlu menghargai juga mekanisme dan kepentingan yang coba dijalankan oleh seorang pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Ratna, istilah hirarki perlu dipahami dengan perspektif yang lebih luas. Hirarki tidak negatif, tapi sebaiknya memanfaatkan struktur yang ada dan menjalankannya untuk menyelesaikan kerja dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian ini, tampak bahwa idealisasi kepemimpinan dalam organisasi perempuan sangat beragam. Demikian pula keberagaman terhadap pemahaman mengenai feminisme dan kepemimpinan feminis. Pada dasarnya, nilai-nilai kepemimpinan seperti “anti-hirarki, anti-penindasan, kolektivitas, persaudaraan perempuan, berbagi, kompromi, akomodatif” telah menjadi dasar dari kepemimpinan yang digunakan pada organisasi perempuan, dan dalam beberapa hal, bahkan disebut di dalam AD/ART mereka. Pada praktiknya, pemahaman tersebut beragam. Sedikit catatan, menarik untuk menyimak beberapa pendapat yang menyatakan bahwa hirarki tidak bisa lepas dari struktur. Hirarki juga bukan sesuatu yang berkonotasi negatif, karena justru membantu mengatur kerja pemimpin dalam organisasi. Lebih jauh, proses ini tidaklah linier, namun memiliki perjalanan yang kompleks dan dinamis. Lebih dari itu, dalam praktiknya, ketika mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah, pemimpin perempuan juga menggunakan strategi inklusi, dengan merangkul banyak pihak untuk semakin menguatkan daya mereka. Pemimpin

²³ Rusmawati, Ketua Pengawas Dewan Pengurus Nasional Hapsari, FGD Jakarta, 29 Oktober 2012.

²⁴ Ratna Batara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, FGD Jakarta, 29 Oktober 2012.

organisasi perempuan seringkali tidak menggunakan penamaan bahwa itulah yang disebut dengan “kepemimpinan feminis”, namun bagi mereka yang penting adalah bagaimana menjalankan nilai-nilai tersebut dalam praktik kepemimpinan. Penamaan ini juga menjadi pertanyaan atau diskusi sendiri yang belum usai dan masih dalam proses perjalanan panjang.

Tantangan yang Dihadapi dan Strategi yang Dilakukan oleh Pemimpin Perempuan

Pada praktik kepemimpinan organisasi perempuan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pemimpinnya. Tantangan-tantangan tersebut berasal dari luar dan dari dalam individu pemimpin, yang cenderung terkait dengan dikotomi ranah privat dan publik. Salah satu contohnya, perempuan harus selalu berupaya meyakinkan orang-orang terdekat di ranah privat, dan juga lingkungan sekitar rumah, untuk memberikan pengakuan bahwa aktivitas yang dilakukan sebagai pemimpin juga berhak dilakukan oleh perempuan. Hal ini tidak terjadi pada pemimpin laki-laki. Perempuan seringkali dianggap sebagai “ketidaklumrahan”, karena hal tersebut di luar konsep “normativitas ibu”. Karena hal ini hanya dialami kaum perempuan, konsekuensi yang timbul, seorang pemimpin perempuan harus mengembangkan strategi untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Hal itu kemudian mereka atasi dengan cara bernegosiasi dan menunjukkan eksistensi, yang berdampak positif baik bagi dirinya, bagi relasi kuasa suami-istri, dan lingkungan sosialnya. Negosiasi yang paling berat justru datang dari ra-

nah privat, bukan publik. Ini karena di ranah privat nilai dari normativitas ibu berlaku, dan pemimpin perempuan dianggap ke luar dari normativitas.

Hal ini diutarakan oleh narasumber dari Solidaritas Perempuan Mataram:

“Saya melihatnya sejak saya keluar untuk bekerja, mereka lebih *respect* kepada saya, sekarang sudah berbeda. Kalau untuk masyarakat sekitar, mungkin waktu saya sering keluar malam, ibu saya yang mengatakannya. Tapi justru tantangannya yang terbesar adalah dari ibu saya, pada saat setelah saya bercerai. Setelah itu saya memberikan pengertian kepada ibu saya. Butuh waktu lama untuk ibu saya mengerti, karena saat itu ibu saya juga sedang sakit. Biasanya kalau saya pulang malam, saya pasti memberitahunya, misalnya membawa undangan atau berita-berita di koran kepada ibu saya, sehingga ibu saya bisa percaya”.²⁵

Pandangan mengenai pentingnya pengalaman sebagai bagian dari proses internalisasi nilai kepemimpinan untuk bertindak juga ditemukan dalam pemikiran pengurus dan anggota Hapsari di Deli Serdang. Hal ini penting bagi mereka, karena di dalamnya banyak sekali tantangan yang kemudian mendorong perempuan untuk menemukan jalan keluar, dalam bentuk strategi membangun relasi kuasa, baik dengan sesama perempuan maupun dengan laki-laki dalam konteks sosial. Pengurus Hapsari, misalnya, merasa mengajak perempuan masuk ke dalam organisasi bukanlah hal yang mudah. Terutama jika nilai dalam keluarga perem-

²⁵ Wawancara dengan Bq. Zulhiatina, Solidaritas Perempuan Mataram, 15 Mei 2012.

puan yang akan diajak memegang teguh nilai bahwa perempuan haruslah di rumah, dan suami yang hanya boleh berorganisasi dan ke luar rumah.

“Iya, meskipun kakak itu diizinkan dan didukung oleh suaminya untuk ikut organisasi, tetapi saat kakak mencalonkan diri menjadi caleg, suaminya sangat marah dan menahannya dari tindak mencalonkan diri. Suaminya bilang, “Kau ini jangan macam-macam. Nggak enak kalau kau juga memimpin, jadi anggota legislatif. Sekarang saja tetangga sudah mencemoohkan aku karena jauh tertinggal dari kau...”²⁶

Masalah ini bukan tantangan yang sederhana, karena masalah ini selalu terjadi dalam tiap upaya *recruitment* untuk berorganisasi. Strategi yang dikembangkan oleh pengurus Hapsari adalah dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, yaitu dengan cara mengenal seluruh anggota keluarga dengan baik. Jika mengajak, mereka melakukan pada waktu-waktu yang tidak mengganggu urusan domestik keluarga, sehingga suami tidak marah. Hal itu dilakukan terus-menerus, hingga suami pun akhirnya merasakan bahwa ketika istri aktif dalam organisasi, itu sebenarnya juga memberi manfaat bagi suami dan keluarga. Tantangan lain setelah istri berorganisasi, adalah cemoohan tetangga terhadap suami yang bersedia berbagi tugas di rumah. Masalah ini jauh lebih mudah bagi ibu-ibu untuk mengatasinya, yaitu dengan menunjukkannya secara demonstratif, sehingga membuat ibu-ibu yang

lain justru meminta suaminya untuk membantu ‘kerja perempuan’. Ini adalah proses penyebaran nilai mengenai berbagi peran dalam keluarga, yang kemudian mempengaruhi tetangga lainnya.

Seringkali tantangannya adalah nilai-nilai yang masih menempatkan perempuan di lingkup domestik. Sehingga, kerap perempuan dianggap tidak pantas apabila mereka berkiprah di lingkup publik, apalagi bila berani bersikap kritis terhadap pengambil keputusan, yang kebanyakan adalah kaum lelaki. Dikotomi antara ruang publik dan domestik sebagai pengkutuban laki-laki dan perempuan, merupakan wacana yang sebenarnya lebih membebani pemimpin perempuan daripada pemimpin laki-laki, karena hal ini di luar normativitas ibu. Misalnya, apa yang diungkapkan oleh narasumber dari Mataram, Lombok:

“Ketika ada masalah tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu, saya sempat jadi omongan orang-orang desa, terutama pemerintah desa. Katanya ‘perempuan *kok ngomong* seperti itu, menantang kepala desa’. Relasi gender di Lombok ini masih belum setara... karena pemahamannya masih perempuan harus mengerjakan tugas-tugas rumah atau domestik. Itu juga disebabkan faktor agama, yang mengatakan perempuan harus membesarkan anak, tidak boleh keluar tanpa izin suami, laki-laki tidak mau mengerjakan cuci-mencuci. Hal-hal seperti itu dibicarakan juga oleh perempuannya sendiri”²⁷.

²⁶ Wawancara dengan Zulfa Suja, Anggota Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 24 Mei 2012.

²⁷ Wawancara dengan Masnim, Kopwan JarPUK Rindang, Mataram 18 Mei 2012.

Hal senada juga dihadapi oleh para ibu dan para pendamping lapangan kelompok binaan Perkumpulan Panca Karsa.

“Kita melihat, perempuan terkungkung dalam komunitasnya, dan di rumah tangganya. Ada tanggapan dari orang-orang tua, *“Nine nine nendek ngurus sak mene mene?”* (Mengapa perempuan mengurus yang begini-gini?). Mereka diremehkan, suara perempuan tidak usah didengarkan, kurang mendapat dukungan dari masyarakat lingkungan keluarga buruh migran. Bagi keluarga dan masyarakat, perempuan harus di rumah saja, mengurus pekerjaan di rumah. Sekarang ini kita sudah bisa ‘mengeluarkan’ mereka, mereka sudah bisa mewarnai perencanaan di tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Sebenarnya mereka sudah mulai diperhitungkan keberadaannya. Caranya, kami gigih saja terus melakukan dampingan dan mengajak para perempuan beraktivitas”.²⁸

Semua praktik kepemimpinan, dengan pendekatan apa pun, pasti mempunyai tantangannya tersendiri. Bukan saja karakter personal, tetapi tentu kecakapan-kecakapan tertentu yang justru diperoleh dan dipelajari dari lingkungannya selama ini, serta faktor-faktor sosial budaya yang mampu mendorong maupun menghambat kepemimpinan. Mengenai tantangan terhadap karakter gender personal, seperti pelabelan stereotipi feminin pada perempuan pemimpin. Hal ini biasanya sudah dapat diatasi dengan pengalaman berkecimpung di kan-

cah pergerakan sosial. Berbagai macam ‘serangan’ dihadapi dengan berbagai cara juga, dari yang langsung maupun tak langsung. Sebenarnya, menurut sejumlah aktivis perempuan lebih tepat mengabaikan saja dan tidak menghiraukan pelabelan apa pun yang memang tidak berdasar.²⁹

Membicarakan perempuan pemimpin dan kepemimpinan perempuan, tentu tidak dapat mengabaikan faktor sosial budaya. Hal ini berkaitan dengan tujuan organisasi perempuan tersebut dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan gender dan keadilan sosial. Mengorganisasikan diri, kelompok atau komunitas untuk mewujudkan perubahan sosial tentu mengandung langkah yang takhala diambil, mempunyai resiko menimbulkan masalah baru, atau malah pukulan balik.³⁰ Bahkan pada tingkat kegiatan, keikutsertaan perempuan sudah dapat memunculkan tekanan dari tokoh masyarakat atau agama yang tidak bersetuju dengan aktivitas perempuan di luar ranah domestik. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perempuan pemimpin, khususnya yang berkaitan dengan soal sosial budaya? Bagaimana pertentangan publik-privat disikapi oleh para perempuan pemimpin?

Pada kesempatan Focus Group Discussion (FGD)³¹ dengan para pemimpin organisasi perempuan dan narasumber lainnya di Jakarta, lontaran soal mengenai tantangan

²⁸ Catatan Focus Group Discussion Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok binaan Perkumpulan Panca Karsa, Mataram 17 Mei 2012.

²⁹ Wawancara dengan Sitti Zamraini, Koordinator Wilayah Lingsar Pekka NTB, Lingsar 15 Mei 2012.

³⁰ Lihat hal. 44-45 Batliwala, Srilatha. 2010. *Feminist Leaderships for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*. For CREA (Creating Resources for Empowerment in Action).

³¹ Focus Group Discussion Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia, Jakarta 9 Mei 2012.

kepemimpinan feminis ini dimulai dengan suatu respons menarik dari peserta diskusi laki-laki:

“Menjadi perempuan pemimpin itu beban! Kultur politik kita memberikan beban yang berat kepada perempuan pemimpin, harus berhasil, tidak boleh keliru atau tidak hebat”.³²

Pandangan tersebut terkait dengan posisi perempuan yang secara sosial tidak boleh memiliki “cela”, karena perempuan adalah sosok ibu yang dianggap suci secara kultural. Pandangan ini kemudian justru membebani sosok perempuan ketika mereka menjadi pemimpin, karena tidak boleh memiliki cela. Lain halnya dengan laki-laki pemimpin, yang sesuai dengan normativitas patriarki yang memposisikannya sebagai pemimpin. Perempuan dengan demikian menjadi dibatasi oleh belenggu “normativitas perempuan” yang harus sempurna. Bagaimanapun cara atau pendekatan kepemimpinan laki-laki, tidak ada beban seperti yang ditimpakan kepada perempuan. Beban tersebut pada dasarnya merupakan upaya pembebanan bagi kaum perempuan agar tidak menjadi pemimpin, dan ketika menjadi wacana yang dianggap normal, maka resistensi laki-laki terhadap pemimpin perempuan menjadi dianggap wajar.

Seorang bapak yang mewakili organisasi Puan Amal Hayati menegaskan adanya keengganan dari kaum laki-laki dalam organisasi Islam terhadap kepemimpinan perempuan. Dia mencontohkannya sebagai berikut:

“Kultur Nahdlatul Ulama (NU) masih sangat resisten dengan pemimpin berjenis kelamin perempuan, kecuali untuk kalangannya sendiri sesama perempuan”.³³

Penyataan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa dalam lingkungan budaya Islam NU, kaum perempuan jika hendak menjadi pemimpin, hanya bisa memimpin di kalangan kaum perempuan saja. Sehingga tidak masuk ke ranahnya kaum laki-laki. Akibatnya, jika perempuan itu memimpin masyarakat di luar dari domainnya, maka harus diberi atribut yang jauh lebih berat daripada pemimpin laki-laki. Sejalan dengan pemikiran ini, seorang peserta FGD, perempuan yang cukup senior menambahkan:

“Memang untuk memimpin, perempuan harus punya keberanian lebih, tidak cukup hanya berani saja”.³⁴

Pandangan tersebut di atas menunjukkan adanya asumsi bahwa seorang pemimpin selalu dipandang sebagai kepemimpinan yang sifatnya individual, bukan kolektif. Pada sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa pergerakan sosial tidak selalu membutuhkan kepemimpinan individu yang kuat dan kokoh. Cukup banyak bukti, seperti Piqueteros dan Piqueteras dari Argentina, yang dinilai sangat berhasil memimpin warga desa menuntut penutupan pertambangan, dengan gaya kepemimpinan yang *dispersed* dan non-individualistik, hingga akhirnya menghasilkan

³² Wahyu Susilo, Dewan Pengurus/Policy Analyst Migrant Care, FGD Jakarta, 9 Mei 2012.

³³ Wawancara dengan A.W. Maryanto, Sekretaris Jendral Puan Amal Hayati, Jakarta 9 Mei 2012.

³⁴ Wawancara dengan Miryam S.V Nainggolan, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pulih, Jakarta 9 Mei 2012.

kan perubahan. Di dalam konteks kepemimpinan feminis, Batliwala (2011)³⁵ menekankan bahwa:

“Our concern is not merely with capacitating more women to play leadership roles, but to lead differently, with feminist values and ideology, and to advance the agenda of feminist social transformation in a way that other forms of leadership do not and can not”.

Artinya, karena yang diperlukan bukan sekadar perempuan yang menjalankan peran sebagai pemimpin, maka tantangan yang dihadapi perempuan pemimpin tidak terbatas pada tantangan tentang karakter perorangan dan kapasitas personalnya saja. Tantangan justru muncul dan tumbuh dari seluruh konteks sosial budaya di mana perempuan itu memimpin. Tantangan tersebut adalah mengenai cara menjalankan kepemimpinan dan mengelola kekuasaan yang *inherent* di dalamnya, untuk mengelola keputuhan dan resistensi. Misalnya, tiap pemimpin memiliki cara yang beragam dalam menghadapi dan mengolah resistensi. Berbagai latarbelakang perbedaan, seperti usia, jenis kelamin, sukubangsa dan pengalaman atau senioritas sangat mengkondisikan pilihan strateginya. Ratna Batara Munti dari Jakarta, misalnya, menyatakan bahwa:

“Semakin perempuan terkungkung hanya pada lingkup tertentu, dan tidak bergaul luas menghadapi kenyataan persaingan, sikut-sikutan dan permusuhan yang jamak terjadi pada dunia politik

praktis, semakin minim godakan pengalaman untuk menghadapi berbagai resistensi, dari yang main-main sampai yang cukup serius, dan yang tidak mungkin dibiarkan begitu saja”.³⁶

Oleh karenanya, aktivis perempuan harus meluaskan jejaring kerjanya, hingga ke tingkat birokrat dan politisi.

Kondisi yang dikemukakan Batliwala tersebut dirasakan pula oleh Fatiha, Koordinator ASPPUK Padang:

“... Kondisi sekitarnya membuat tidak bisa. Kalau tegas, akan diprotes orang; kalau lunak, kita melanggar aturan lainnya. Jadi seperti buah simalakama. Kalau kendala pribadi dilarang orang tua atau suami, saya rasa tidak ada”.³⁷

Pernyataan ini menunjukkan adanya tantangan internal dalam organisasi. Hal ini telah menyebabkan ketidakpastian posisi relasi kuasa antara pimpinan dan anggota dalam berorganisasi. Kepemimpinan dalam hal ini perlu memiliki kemampuan untuk menegakkan aturan organisasi, dan dapat mengambil keputusan bagi bergeraknya roda organisasi. Strategi memainkan kepemimpinan merupakan seni memimpin, sehingga ketegasan bukan berarti otoriter yang kemudian diprotes anggota. Hal ini merupakan tantangan bagi seorang pemimpin perempuan. Karena seringkali “ketegasan” dipandang sebagai hal yang kontradiktif terhadap “nilai-nilai ideal” kepemimpinan perempuan, yang mengutamakan anti-pe-

³⁵ Lihat Hal 13, Batliwala, Srilatha. 2010. *Feminist Leaderships for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*. For CREA (Creating Resources for Empowerment in Action).

³⁶ Wawancara dengan Ratna Bantara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, Jakarta 24 Mei 2012.

³⁷ Wawancara dengan Fatiha Yendreni, Koordinator ASPPUK Padang, Padang 14 Mei 2012.

nindasan, inklusif, anti hirarki, kebersamaan, *sisterhood*, kolegal, dan kolektif. Di sinilah pengalaman mengelola organisasi dan hubungan antara sesama perempuan menjadi dasar dalam kepemimpinan perempuan, yang karakternya sangat berbeda.

Dalam kepemimpinannya selama 10 tahun, Beauty Erawati mengungkapkan tantangan yang paling besar adalah ketika membantu perempuan lain, yang sebelumnya adalah korban kekerasan. Perempuan yang ada di NTB menghadapi berbagai persoalan, dan yang paling khas adalah mereka menjadi korban kekerasan berdasarkan interpretasi agama Islam. Hal ini tercermin dari penafsiran ayat di dalam kitab suci agama Islam, salah satunya menerangkan tentang diperbolehkannya berpoligami. Penafsiran tersebut ternyata menghasilkan angka kekerasan fisik terhadap perempuan yang cukup tinggi di NTB. Selama tahun 2010 terdapat sebanyak 1023 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terjadi di NTB.³⁸ Kekerasan ini terjadi ketika perempuan menuntut hak-hak mereka yang tidak dipenuhi oleh suami yang berpoligami, maupun ketika perempuan menuntut cerai.

Strategi yang dilakukan oleh Beauty adalah dengan melakukan sejumlah pelatihan, antara lain pelatihan pembuatan peraturan yang berperspektif gender, sebagaimana yang disampaikan:

“... Melatih masyarakat buat perdes, katanya tingkat masyarakat yang harus di-

berdayakan. Karena kalau orang yang tidak paham tentang pembuatan perdes, akhirnya perdesnya yang luar biasa ... justru memunculkan kekerasan terhadap perempuan. Ini sebetulnya PR besar untuk Lombok...”³⁹

Menyimak pengalaman para narasumber penelitian ini, tampak bahwa tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan banyak ragamnya. Upaya mereka melakukan perbaikan melalui bermacam kegiatan di lima wilayah penelitian terhadap oleh tantangan dari lingkup yang berbeda-beda pula. Ada tantangan yang sudah harus dihadapi, mulai dari lingkup privat, seperti tantangan dari suami dan juga orang tua atas aktivitas yang dilakukannya. Hampir semua narasumber yang aktif bekerja untuk isu perempuan di Mataram, Padang, Jakarta, Lampung dan Deli Serdang mengalami tantangan dari suami dan keluarga. Nadanya semua sama: mengingatkan akan tugas-tugas domestik yang dipandang lebih penting ketimbang kerja organisasi atau kelompok untuk mengatasi masalah perempuan.

“Kalau tiba giliran marahnya keluar, bisa tidak diizinkan aku datang ke organisasi; dia bilang buat apa buang-buang waktu? Sudah masak belum? Anak siapa yang menjaga?”⁴⁰

Tantangan yang berasal dari luar keluarga, seperti dari masyarakat, juga banyak dihadapi oleh mereka yang aktif bekerja untuk

³⁸ Lihat hal. 8, “Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2010. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2010”, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2011.

³⁹ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur LBH APIK NTB, Mataram 16 Mei 2012.

⁴⁰ Wawancara dengan Riani, Ketua Dewan Eksekutif Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

masalah perempuan ini. Sebagian besar narasumber merasakan tantangan dalam membangun kelompok atau organisasi untuk bekerja mengatasi masalah yang dihadapi kaum perempuan.

“Tantangan terberat selama memimpin? Aku mulai dari mencari, dari tidak ada kader kemudian menjadi ada. Aku menemukan anak gadis dari rumah ke rumah, kemudian aku menginap di rumah mereka dan bergaul dengan keluarga mereka supaya dikasih izin anaknya diserahkan ke aku. Aku melaluinya dengan senang, dan aku akhirnya mendapat banyak perempuan”.⁴¹

Tantangan yang berasal dari luar diri ini tidak hanya berhenti pada masyarakat atau komunitas, melainkan juga sikap yang ditunjukkan pengambil keputusan atau pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Lely Zaelani:

“Dulu, sebelum era reformasi, pemerintah mengklasifikasikan organisasi masyarakat menjadi dua: Yang pertama, organisasi masyarakat ‘plat merah’ yang didirikan oleh pemerintah sendiri, dan yang kedua, organisasi masyarakat yang dibentuk swadaya dan organisasi masyarakat seperti ini, yang diidentikkan oleh pemerintah sebagai organisasi masyarakat yang suka memasukkan proposal untuk meminta uang atau dana, dengan cara memeras dan menyoroti pemerintah. Menghadapi hal tersebut, kami berstrategi dengan menjelaskan kepada pemerintah bahwa organisasi Hapsari bukan-

lah organisasi seperti itu. Kami adalah kumpulan ibu-ibu yang ingin belajar”.⁴²

Pada kesempatan wawancara mendalam dengan para narasumber perempuan pemimpin organisasi di lima wilayah, ada masukan yang menarik tentang bagaimana di ranah privat para perempuan pemimpin ini bertindak. Secara ideal, para narasumber mempercayai bahwa seharusnya apa yang dapat mereka lakukan di ranah publik juga dapat dilakukan di ranah privat. Adapun tawar-menawar mempraktikkan kepemimpinan di ranah privat (keluarga) menurut para narasumber adalah dengan cara inklusi, mengajak anggota keluarga untuk mengikuti acara-acara kegiatan lembaga.

“Jika mereka menyaksikan sendiri bahwa kegiatan kami positif, mengajak orang melihat ke masa depan dan tidak membahayakan bagi orang lain, saya percaya mereka akan berubah pandangannya kepada kami”.⁴³

Berbagai strategi dan upaya telah dilakukan oleh para narasumber untuk merespons tantangan yang dihadapi dalam praktik kepemimpinan. Upaya yang meliputi pendekatan personal untuk terlibat mengatasi persoalan perempuan, inklusi untuk kebersamaan dan menguatkan daya, dan menyebarkan gagasan-gagasan tentang kesetaraan perempuan. Upaya-upaya tersebut dalam praktiknya ‘habis’ digunakan untuk menghadapi “praktik kuasa yang tampak”, sehingga nyaris tidak lagi tersisa untuk mengikis

⁴¹ Wawancara dengan Lely Zaelani, Ketua Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Jakarta 28 Juni 2012.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Agustin, Direktur Ardhany Institute, Jakarta 22 Mei 2012.

praktik kuasa yang “tidak tampak dan yang tersembunyi”. Mengapa ‘habis’ terpakai? Karena pada tingkat yang tampak, para pemimpin perempuan lebih menghadapi tantangan sangat masif dan datang dari segala penjuru arah. Dalam hal ini, pemimpin perempuan aktif mencari celah untuk temukan strategi merespons pada ragam tantangan, sementara agenda kuasa yang tak tampak dan tersembunyi nyaris tidak tertangani. Agenda kuasa yang tidak tampak dan tersembunyi itu bekerja dalam ranah kultural yang simbolik, dan praktik kepemimpinan perempuan belum menunjukkan efek yang bermakna sebagai agen di ranah kultural tersebut.

Analisis Konsep Kepemimpinan Perempuan

Pada dasarnya, kepemimpinan selalu berkaitan dengan membangun kapasitas personal dan percaya diri, serta kapasitas memobilisasi pihak lain. Sejauh mana seseorang dengan kapasitas pengetahuan dan kepribadiannya mampu mendorong pihak lain untuk melakukan sesuatu? Dalam hal ini, melakukan suatu tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi kaum perempuan. Seperti apa seorang pemimpin perempuan menerjemahkan relasi kuasa dalam kepemimpinannya? Hal ini dapat dilihat dari pengalaman pemimpin perempuan memulai pembentukan kelompok atau organisasinya, kemudian bagaimana pemimpin perempuan berupaya memelihara keberlangsungan kerja dan kelompok atau organisasinya. Selanjutnya, apabila ada ketidaksepahaman ataupun konflik, bagaimana pemimpin perempuan meresponnya. Dan apa upaya mereka

dalam hal kaderisasi sebagai upaya untuk melanjutkan kerja menghadirkan kesetaraan dan keadilan?

Pengalaman para narasumber di lima wilayah penelitian menunjukkan gambaran yang berbeda-beda. Upaya pemimpin untuk mengajak perempuan lain bekerja memajukan kesetaraan dan keadilan di wilayahnya terlihat ada berbagai cara. Riani dari Hapsari di Deli Serdang misalnya menggambarkan sebagai berikut:

“Mengenai pola kepemimpinan ..., misalnya kita ikut membangun organisasi buruh, kita juga memasukan kader perempuan untuk jadi pengurus, yang memang koncern pada buruh, supaya kepentingan perempuan ketika berurusan dengan buruh perempuan terwakili juga. Persoalan-persoalan buruh perempuan juga muncul di situ”.⁴⁴

Sementara Dina Lumbantobing dari Pesada mengatakan:

“Jangan pisahkan dari pengalamanmu sebagai perempuan, menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak punya anak; umur bukan poinnya, walaupun semua itu bisa dipakai untuk mendiskriminasi. Tapi pengalamanmu sebagai perempuan harus selalu bawa di dalam kepemimpinan. Berbagai pengalaman tidak perlu malu. Orang tidak berhak menghakimi kamu...”⁴⁵

Cara pemimpin perempuan menerjemahkan pengertian kepemimpinan, yakni ke-

⁴⁴ Wawancara dengan Riani, Ketua Dewan Eksekutif Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

⁴⁵ Wawancara dengan Dina Lumbantobing, Pendiri Pesada, Medan 25 Mei 2012.

mampuan mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan yang dilakukan, bisa dengan mengajak individu yang terlihat memiliki perhatian terhadap permasalahan. Sementara pengalaman pemimpin perempuan di Lampung agak berbeda. Disebutkan bahwa pada waktu pembentukan awal Damar, yang baru lepas dari Yayasan Elsap, Damar menggunakan konsultan organisasi untuk membantu pembentukan dirinya. Hal itu juga yang dilakukan ketika Damar memutuskan untuk menjadi perkumpulan, akibat tuntutan akan keterbukaan dan untuk lebih banyak melibatkan orang dalam kerja-kerja transformasi.⁴⁶

Sementara di Mataram, pengambilan keputusan di tingkat serikat, misalnya Solidaritas Perempuan, cukup otonom seperti penentuan jenis-jenis program yang akan dikembangkan di tingkat serikat. Namun pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih besar, dalam hal keputusan strategis organisasi seperti keputusan apakah pengurus atau anggota dapat menjadi kader politik, maka harus ditentukan oleh organisasi payung. Begitu pun yang berhubungan dengan arah perjuangan, visi dan misi dan AD/ART, harus diputuskan ditingkat organisasi payung yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing serikat.

Perencanaan adalah bagian yang terpenting dalam sebuah organisasi. Termasuk dalam bagian perencanaan di sini adalah pemilihan isu, penetapan program organisasi, dan perencanaan pendanaan kegiatan, yang tentunya disesuaikan dengan misi dan visi organisasi. Ada berbagai cara yang dapat di-

lakukan untuk membuat perencanaan yang tepat, di antaranya melalui *strategic planning*. Melalui *strategic planning* inilah mekanisme pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dilakukan, baik itu untuk merumuskan perubahan visi dan misi, isu, struktur organisasi, program, maupun strategi organisasi dalam melaksanakan kegiatannya.

Pengambilan keputusan dalam organisasi tentang pergantian Ketua, Pengurus, dan Anggota baru dilakukan melalui mekanisme musyawarah nasional atau kongres, namun ada pula mekanisme pemilihan ketua secara rutin. Hampir seluruh organisasi perempuan yang diwawancarai, baik itu yang berbentuk badan hukum Yayasan atau Perkumpulan, mengemukakan keinginan untuk menjalankan mekanisme pengambilan-keputusan organisasi secara demokratis dan terbuka.

“...Kalau Solidaritas Perempuan punya sistem di mana tiap tahunnamanya rapat dewan nasional, para pengurus wilayah dan pengurus tingkat nasional bertemu untuk meresolusikan masalah perempuan di tingkat lokal, nasional maupun global”.⁴⁷

Pengalaman di Hapsari lain lagi, seperti yang dituturkan oleh Zulja:

“Tiga bulan sekali kita rapat pleno, di situlah fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan kebijakan, pertanggungjawaban harian dilakukan. Ini untuk menjawab

⁴⁶ Wawancara dengan Selly Fitriani, Direktur Damar, Lampung 11 Mei 2012.

⁴⁷ Wawancara dengan Yuni Riawati, Solidaritas Perempuan Mataram, Mataram 18 Mei 2012.

bagaimana Dewan Perwakilan Nasional (DPN) bekerja”.⁴⁸

Untuk melembagakan kepemimpinan yang ada, Hapsari menyepakati aturan yang ditetapkan melalui Kongres mereka, sebagai berikut:

“Pengalaman kami di Hapsari, kalau jadi pemimpin... biasanya kita dipilih hanya bisa dua periode berturut-turut. Hampir semuanya begini: dalam periode pertama dia itu masih belajar bagaimana menjadi pemimpin. Dalam periode kedua harus dipilih lagi. Kalau tidak, sayangnya, dia sudah belajar. Periode kedua barulah mulai mereka menerapkan apa yang mereka tahu. Tahun ketiga jadi tidak bisa dipilih lagi...”⁴⁹

Namun, berdasarkan pengalaman berkegiatan, Hapsari kemudian menyepakati aturan main baru dalam hal durasi kepemimpinan.

“Makanya di Hapsari ini periodenya lima tahun, sejak tahun 2011 Desember Kongres, sampai tahun 2016. Maksudnya, supaya ketahuan dulu sebenarnya bisa tidak dia menjadi pemimpin. Sebab sayang sekali kalau berhenti ketika dia sudah bisa menjadi pemimpin, dan ternyata tidak terpilih lagi. Buat kami itu belum cukup, umur tiga tahun untuk dia memimpin”.⁵⁰

Mekanisme seperti yang dikemukakan Hapsari ini dilakukan untuk memastikan mereka telah memilih orang yang tepat untuk menjadi pemimpin, karena dalam waktu selama tiga tahun, yang kemudian disepakati diubah menjadi lima tahun, seseorang dapat dipastikan kualitas kepemimpinannya.

Hal ini tak pelak berangkat dari usulan Lely sebagai pendiri dan pemimpin Hapsari, yang memiliki kepedulian untuk keberlangsungan kepemimpinan, siapa pun nanti orang yang akan memegang jabatan itu.

Upaya untuk menjamin terjadinya kesinambungan dalam kepemimpinan sebuah organisasi atau kelompok perempuan dapat terjadi dengan berbagai cara. Sebagaimana di Mataram, terdapat juga alternatif mekanisme pengambilan-keputusan, dengan menggunakan media telepon atau pesan singkat. Hal ini karena padatnya aktivitas petugas lapangan (PL), sehingga membuat pertemuan rutin tidak bisa dihadiri oleh semua anggota. Di YKSSI, seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“...Tiap hari Jumat di minggu terakhir tiap bulannya, kami adakan rapat untuk membahas *update* kegiatan, serta *sharing*. Di hari itu juga honor atau gaji mereka dibagikan. Namun, selain rapat bulanan itu, juga kadang ada rapat-rapat yang diadakan khusus, tergantung dari urgensinya. Misalnya, rapat persiapan sebelum ada acara, kegiatan di luar Lombok, dan lainnya. Biasanya sebulan sekali minimal ada rapat, ya, rapat bulanan tersebut. Kalau tidak memungkinkan, biasanya kami berkomunikasi lewat telepon atau SMS. Bisa juga saya berkoordinasi dengan bendahara, dan dia yang pergi menyam-

⁴⁸ Wawancara dengan Zulfa Suja, Ketua Pengawas Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

⁴⁹ Wawancara dengan Lely Zaelani, Ketua Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Jakarta 28 Juni 2012.

⁵⁰ *loc cit.*

paikan ke teman-teman Pekerja Lapangan”.⁵¹

Dalam menjalankan kepemimpinannya, misalnya ketika harus menyelesaikan masalah di kelompok atau lembaga, cara yang diambil oleh pemimpin-pemimpin perempuan ini terlihat bermacam-macam, dan dipengaruhi oleh bentuk organisasi yang mereka pimpin.

Fitriyani dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Padang menuturkan:

“Kalau ada masalah di staf, diselesaikan di taraf direktur eksekutif, dan saya biasa membuka bersama untuk menyelesaikan masalah, karena saya juga tidak mau dzolim. Biasanya saya juga minta pendapat pengurus sebelum saya mengeluarkan keputusan final. Saya juga memakai metode konfirmasi dengan koordinator, dan juga staf yang bersangkutan, karena bagaimana pun, kita perlu mendengar pendapat dia. Baru setelah dipertimbangkan, saya keluarkan keputusan yang terbaik”.⁵²

Sementara pemimpin organisasi yang mempunyai cabang di daerah mengalami tarik-menarik pada aspek yang berbeda. Apabila terjadi konflik, maka diusahakan penyelesaian dengan mencari orang setempat, dengan menghadirkan orang yang ahli dalam isu yang sedang dikerjakan. Namun pada praktiknya, akhirnya dirasakan paling efektif menggunakan kekuasaan pemimpin yang

didatangkan dari pusat. Dian Kartikasari dari Seknas KPI di Jakarta kerap merasa ‘kewalahan’, karena sejumlah cabang selalu menginginkan kehadirannya untuk menyelesaikan persoalan friksi atau perselisihan yang terjadi di tingkat cabang.

“Ya, aku siap saja dipanggil dan senang memediasi, tetapi ini kan sangat boros biaya dan menghabiskan waktu dan energi yang tidak sedikit”.⁵³

Hal yang menarik, perempuan pemimpin yang diandalkan oleh yang dipimpin juga mengalami ketidaknyamanan karena merasa menciptakan ketergantungan. Seperti yang dinyatakan Nani Zulminarni dari Seknas Pekka di Jakarta:

“Kita sendiri yang harus tegas menyapih, seperti dahulu menyapih ASI bayi kita. Jika dibiarkan terus menyusui, ya, pasti tidak akan mampu mandiri. Cara mengatasinya adalah dengan memberi kesempatan sekerap mungkin bagi pemimpin-pemimpin di tingkat lokal untuk tak gentar mempraktikkan. Dan kita sendiri mengurangi permintaan untuk tampil di depan, membatasinya hanya pada acara-acara tertentu, dan mengambil peran mendukung saja dari belakang”.⁵⁴

Apakah itu karena keterbatasan dana ataupun karena bermaksud melatih kemandirian, organisasi pusat berusaha menyapih organisasi daerah agar berdiri sendiri tanpa

⁵¹ Wawancara dengan Latifa Bay, Direktur YKSSI Mataram, Mataram 15 Mei 2012.

⁵² Wawancara dengan Fitriyani, Direktur LP2M, Padang 14 Mei 2012.

⁵³ Wawancara dengan Dian Kartikasari, Seknas Koalisi Perempuan Indonesia, Jakarta 30 Mei 2012.

⁵⁴ Wawancara dengan Nani Zulminarni, Seknas Pekka Jakarta, Jakarta 15 Mei 2012.

kepemimpinan langsung dari pusat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok binaan di daerah menuntut untuk tetap dipimpin langsung dari pusat, dengan alasan karena orang pusat lebih didengar di daerah.

Namun, ada hal lain yang menarik dalam rangka kemandirian. Sebagai gambaran, dalam konteks organisasi, Seknas Pekka di Jakarta mensosialisasikan untuk membentuk Serikat Pekka agar memperoleh pelembagaan hukum. Sekali lagi, ini adalah upaya penyeragaman, yang tidak memperhatikan perbedaan kondisi antara kelompok-kelompok Pekka yang masih muda (berumur empat tahunan), dengan yang telah dewasa (berumur lebih dari delapan tahun). Padahal, ada perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Pembentukan serikat berbadan hukum ini perlu memperhatikan kondisi setempat. Artinya, pengimplementasian serikat yang berkarakter seragam merupakan hal yang problematis dan berimplikasi bagi masing-masing kelompok Pekka.⁵⁵ Serikat Pekka di NTB baru terbentuk pada 2009, satu tahun setelah Seknas Pekka memberikan bantuan dana untuk pembentukannya. Baru pada 2010, Serikat Pekka di NTB memiliki center di Karang Bayan.

Paparan ini mencoba menggambarkan bagaimana pengertian tentang kepemimpinan dimaknai dan diterjemahkan dalam memimpin kelompok atau organisasi. Hal itu menunjukkan bagaimana kepemimpinan direspons oleh pihak-pihak yang dipimpinnya.

Bentuk Kepatuhan dalam Organisasi terhadap Kepemimpinan Perempuan

Ada ragam pengalaman yang dihadapi pemimpin perempuan dalam menjalankan perannya. Salah satunya adalah tantangan yang justru dihadapi manakala pemimpin mencoba mengajak anggota kelompok atau staf lembaga yang dipimpinnya.

Wujudnya macam-macam. Sebagai gambaran, ditemukan kondisi di mana anggota lebih tunduk pada pemimpin lama daripada pemimpin baru, karena pemimpin baru dianggap oleh bawahannya belum memiliki pengalaman yang luas, dan pemimpin lama dianggap lebih berkharisma atau dekat dengan sumberdaya. Akibatnya kinerja organisasi tidak efektif.

Kondisi seperti ini antara lain pernah dialami oleh Yuni Chuzaifa, ketua Komnas Perempuan di Jakarta. Ketertundukkan atau lawan dari resistensi, sebut saja begitu, juga kerap muncul berkaitan dengan “bayang-bayang pemimpin sebelumnya”, yang sudah terlanjur disukai atau dikenal mumpuni. Sulit menghapus begitu saja harapan kawan-kawan bahwa, “Kalau Mbak X dulu begini...”, “Kok lain, ya, tidak seperti Bu Y...”. Hal ini amat dirasakan oleh para ketua baru yang menggantikan ketua lama. Sama sulitnya dengan upaya menampilkan diri apa adanya. Tarik-menarik seperti ini, menurut Yuni Chuzaifah, hanya dapat diselesaikan oleh waktu, dengan memberikan bukti. Sebagai ketua baru, Yuni mencoba mempelajari apa yang dapat ia lanjutkan dari pemimpin sebelumnya, serta mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat digunakan

⁵⁵ Lihat hal. 53, “Executive Summary Impact Assessment Program Pekka di Delapan Wilayah”, Women Research Institute 2009.

untuk memperbaiki apa yang masih kurang.⁵⁶

Kondisi serupa juga terlihat di Lampung. Meskipun staf meragukan kepemimpinan direktur yang baru, namun karena direktur yang baru dekat dan dipercaya oleh S.N. Laila (direktur lama), staf pun digiring untuk mengakui dan percaya akan kepemimpinan Sely (direktur baru). Dan akhirnya, seluruh staf mendukung dan memberi bantuan penuh pada Sely untuk dapat menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.

“Mengetahui sosok Laila, sudah terlanjur ada penokohan. Begitu melihat Damar, ya, Damar itu Laila. Saya jujur, ada rasa tidak percaya diri, tidak bisa menyamai kepemimpinan Laila. Bila di pendidikan kepemimpinan, kita bisa menularkan ke orang lain, tapi ternyata sulit untuk menerapkan ke diri sendiri”.⁵⁷

Kondisi lain, sebagaimana yang terjadi di Padang,⁵⁸ menunjukkan bahwa anggota tidak tunduk kepada keputusan Direktur dalam mengangkat program manager. Ketidak-tundukan ini diwujudkan dalam bentuk tidak hadir ketika diundang dalam rapat dengan donor. Para staf datang setelah pertemuan terjadi, dengan jalan membuat poster-poster protes dan meminta agar direktur diganti. Para staf akhirnya meminta Dewan Pembina untuk turun tangan meminta direktur diganti.

Kondisi tersebut menjadi bahan pembelajaran oleh organisasi lain di Padang, seperti yang dituturkan berikut:

“Pengalaman organisasi sebelumnya (LP2M), sulit membangun partisipasi secara utuh. Yang terjadi, lembaga besar, dana besar, prinsip di organisasi sangat sulit diterapkan karena banyak kepentingan. Poin A coba dikaburkan dengan isu B. Itu sangat berpengaruh”.⁵⁹

Dalam hal ketertundukan terhadap organisasi, Beauty Erawati,⁶⁰ Direktur LBH APIK di Mataram menceritakan pengalamannya:

“Ada staf yang seringkali terlambat datang kerja. Ditegur atau diingatkan, malah bicara yang buruk tentang LBH APIK di luar. Misalnya, menyebarkan informasi bahwa keputusan di LBH APIK selalu diambil sendiri oleh Beauty. Kalau tidak suka secara pribadi kepada saya, kenapa LBH APIK yang jadi korban? Padahal jam kerja di lembaga itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Para staf yang lain meminta saya tegas, untuk langsung menegur dan jangan dibiarkan sajamungkin terlalu longgar ya saya?”

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika pimpinan memberikan kelonggaran, justru staf memanfaatkan dan tidak menunjukkan kepatuhan terhadap kesepakatan bersama dari organisasi. Ketegasan dalam hal ini diperlukan untuk menegakkan disiplin organisasi yang telah disepakati.

⁵⁶ Wawancara dengan Yuni Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

⁵⁷ Wawancara dengan Selly Fitriani, Direktur Damar, Lampung 11 Mei 2012.

⁵⁸ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M, Padang 14 Mei 2012.

⁵⁹ Wawancara dengan Desi, Wakil Direktur Harmonia, Padang 15 Mei 2012.

⁶⁰ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur LBH APIK NTB, Mataram 16 Mei 2012.

Pengalaman di Deli Serdang menunjukkan bahwa resistensi justru tidak terjadi. Hal ini karena adanya konsistensi pada aturan yang disepakati, seperti yang disampaikan berikut:

“Menurut aku, kami itu kolektifnya kuat, percaya pada kepemimpinan. Kalau dia yang memimpin, apa pun kata dia, tidak boleh diperdebatkan, karena kita punya forum rutin tiga bulan sekali. Di situ kalau mau berdebat”.⁶¹

Dari gambaran sekilas di atas, tampak ada indikasi bahwa konsistensi setia pada aturan yang telah disepakati merupakan langkah untuk menghindari munculnya resistensi dalam menjalankan kepemimpinan lembaga atau kelompok.

Nilai atau Prinsip Feminis dalam Menjalankan Kepemimpinan atau Mengatasi Tantangan

Sebelum kita mendiskusikan apakah itu sebenarnya pemimpin yang feminis, ada baiknya kita juga melihat apa sesungguhnya yang diartikan sebagai feminis, atau seseorang yang mempercayai feminisme.

Dalam *Women's Thesaurus* yang dikutip oleh *Jurnal Analisis Sosial* edisi 4/November 1996, yang diterbitkan AKATIGA (halaman 57), disebutkan bahwa feminis, atau seseorang yang mempercayai feminisme, adalah mereka yang memiliki suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di

lingkup publik dan dalam keluarga, serta tindakan atau gerakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.

Dengan demikian, seorang pemimpin yang feminis adalah seorang pemimpin yang mampu mengajak anggota kelompok atau organisasinya untuk memiliki kesadaran akan permasalahan yang dihadapi perempuan di masyarakat, baik di tataran publik maupun privat, dan menggerakkan mereka untuk mengubah keadaan tersebut, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nilai-nilai inilah yang seyogyanya menjadi dasar seorang pemimpin yang feminis.

Dalam sebuah esai yang ditulis dengan amat menarik oleh Michele Williams,⁶² dikatakan bahwa pemimpin dalam konteks pengertian yang tradisional hampir selalu merujuk pada pemahaman bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi, dan memiliki kekuasaan terbesar dalam sebuah organisasi. Dalam konteks yang tradisional, kekuasaan tidak untuk dibagi, karena untuk berhasil maka seseorang harus berlomba-lomba untuk menjadi seseorang yang terbaik. Sebaliknya, disebutkan oleh Williams dalam organisasi feminis, pemimpin bekerja berdasarkan sebuah visi untuk berbagi kekuasaan, menyediakan kesempatan pada semua anggota organisasinya untuk berkembang, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinannya.

Berbagi kekuasaan, atau melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, sebagaimana yang dilakukan di Hapsari, Deli Serdang:

⁶¹ Wawancara dengan Zulfa Suja, Ketua Pengawas Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 24 Mei 2012.

⁶² “Principles for Feminist Leadership. Struggling to Share Power”, Michelle Williams, essay by DisAbled Women in Action (DAWN) of Ontario, October 2008.

“Kalau saya pikir, tingkatan dalam arti untuk menuju sampai cita-cita, kita harus berbagi, artinya siapa yang di partai, caleg, kemudian di Hapsari. ‘Kan tidak ada salah satu yang lebih tinggi, kita tetap sama. Itu yang selalu kami diskusikan sama-sama. Keberhasilan dia ‘kan keberhasilan bersama. Makanya, kalau keberhasilan mereka dianggap keberhasilan individu, ya memang gagal. Orang harus ingat sejarah, bagaimana dulu awal asal-muasal sampai sekarang kita jadi seperti ini”⁶³

Pandangan serupa juga dilihat dan disimpulkan, oleh para aktivis perempuan Afrika dalam pertemuan bertajuk “*Building Feminist Leadership – Looking Back, Looking Forward*” yang diorganisasi oleh CREA di Afrika Selatan pada November 2008, bahwa kepemimpinan feminis mengandung:

“A clear, shared decision-making process that pools strengths of participants, and allows everyone to have some power, and an atmosphere that facilitates every person’s strengths. Each person in an organization must have some authority, as well as tools, information, responsibility and accountability.” (Batliwala, 2011, p.49)

Selain itu, sikap akomodatif, responsif dan sensitif terhadap permasalahan perempuan juga merupakan hal yang membedakan apakah seseorang atau suatu organisasi menerapkan kepemimpinan feminis atau tidak.

“Apa yang membuat berbeda dengan kepemimpinan feminis dengan yang

tidak? Problem isu menjadi penting, karena bagi sebagian orang, ada beberapa isu yang penting, dan menurut sebagian lainnya, tidak. Misalnya, Posyandu, atau misalnya juga, di pasar tidak ada ruang menyusui menjadi masalah, padahal sejak dulu perempuan juga banyak di pasar tersebut”⁶⁴.

Lebih jauh, secara prinsip, kepemimpinan feminis harus memberi ruang pada semua generasi, memeluk keberagaman dan mengutamakan inklusi, ketimbang eksklusif. (*ibid*, p.50). Dengan demikian, semua anggota organisasi dimudahkan untuk memahami perannya masing-masing di dalam struktur organisasi, dan mampu terlibat pada pengambilan keputusan tertentu. Semua anggota organisasi dalam kepemimpinan feminis harus memiliki pengetahuan yang utuh mengenai agenda dan aturan main organisasi, mampu memilih cara bekerjanya yang terbaik untuk organisasi.

Dengan perkataan lain, prinsip dan nilai kepemimpinan yang dipegang tidak berjenjang, atau anti-hirarki, kolektif, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, tidak melakukan tindakan kekerasan dan berpegang pada etika merawat serta melayani satu sama lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang aktivis perempuan dari Padang:

“Ya, ada nilai yang coba kita legalkan dan catatkan, terutama anti-korupsi dan keterbukaan, dan anti-kekerasan. Jadi tidak boleh dalam rapat kami bertolak pinggang, kasar, dan keras. Caranya, dengan membangun sistem yang baik dan jelas, ditambah lagi itu semua sudah ter-

⁶³ Wawancara dengan Zulfa Suja, Ketua Pengawas Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 24 Mei 2012.

⁶⁴ Muhammad Firdaus, Deputi Direktur ASPPUK Jakarta, FGD Jakarta, 29 Oktober 2012.

tulis di SOP, sehingga nilai itu tetap ada, dan kami tidak boleh main-main”.⁶⁵

Demikian pula yang disebutkan oleh Baiq Halwati dari Mataram:

“Panca Karsa menganut sistem kekeluargaan. Bila ada konflik, kita komunikasi secara kekeluargaan, secara bersama-sama. Seperti di keuangan, kita satu pintu. Bagi teman-teman yang kebetulan terakomodasi di dalam program, pengelolaannya pun satu pintu. Ketika tidak terakomodasi dalam program, selalu kita komunikasi. Selain itu juga ada kesepakatan yang sudah kita bangun bersama dengan menyepakati SOP”.⁶⁶

Berdasarkan hasil FGD yang berlangsung di kantor WRI pada 29 Oktober 2012, yang mengundang perwakilan lima wilayah penelitian, konsep hirarki tetap diperlukan dalam struktur suatu organisasi. Hal ini tidak lain berfungsi untuk urusan administratif dan pertanggungjawaban seorang anggota terhadap organisasi. Seperti yang diungkapkan berikut ini:

“Ciri tentang anti-hirarki, karena kalau bicara lagi tentang bentuk struktur di Hapsari, hirarki sangat dibutuhkan dalam konsep kepemimpinan, karena hirarki... sesuatu yang tidak dapat kita pisahkan dari struktur Hapsari yang federasi. Menurut Hapsari, struktur dan hirarki itu penting dalam sebuah organisasi karena akan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, kaitannya dengan

kolektivitas juga dibutuhkan, terutama di tingkat desa, karena mereka belum percaya diri menjadi anggota, dan berbicara ketua adalah sosok yang ideal. Jadi kesimpulannya, kalau anti-hirarki ini belum tepat karena dengan ada struktur dan hirarki, jadi lebih jelas untuk kita dalam pembagian tugas kerja dan tanggungjawab untuk melaksanakan mandat”.⁶⁷

Selain persoalan dalam pengelolaan organisasi, tantangan bagi kepemimpinan feminis berkaitan dengan masalah perbedaan tingkat pengetahuan anggota, atau mitra kerja pada isu garapan organisasi. Tantangannya adalah kejituan untuk mengidentifikasi semua potensi yang dapat ditumbuhkan, mengembangkan, dan kemudian menyusun bentuk dan metode peningkatan kapasitas yang juga beragam. Ini dapat mengakomodasi keberagaman secara optimal. Untuk menghadapi tantangan ini, menurut Ratna Batara Munti:

“Individu atau pun kelompok, pemimpin harus bersikap melayani bagi yang dipimpinnya, yakni melayani dengan memberikan apa yang menjadi *expertise*-nya”.⁶⁸

Strategi mengatasi yang dianggap cukup berhasil di antaranya mendiversifikasikan sasaran, metode dan pelaksanaan pelatihan atau metode peningkatan kapasitas lainnya. Dan setelah dicobakan dan dievaluasi kelebihan dan kekurangannya, program peningkatan kapasitas ini diwujudkan dalam kebi-

⁶⁵ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M, Padang 14 Mei 2012.

⁶⁶ Wawancara dengan Baiq Halwati, Direktur Perkumpulan Panca Karsa, Mataram 17 Mei 2012.

⁶⁷ Rusmawati, Ketua Pengawas Dewan Pengurus Nasional Hapsari, FGD Jakarta, 29 Oktober 2012.

⁶⁸ Wawancara dengan Ratna Batara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, Jakarta 24 Mei 2012.

jakan organisasi. Budhis dari Kapal Perempuan menjelaskan:

“Kepemimpinan adalah suatu proses yang *on-going*. Jadi perancangan, atau desain pembentukannya, juga harus mengikuti perubahan, tidak bisa itu-itu saja. Hanya, tidak ada resep untuk itu. Jadi memang harus *learning by doing*”.⁶⁹

Agar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua, maka *lessons learned* (pembelajaran) yang diperoleh dari “*learning by doing*” perlu dilembagakan dalam bentuk regulasi prosedur pelaksanaan, yang distandarisasikan bersama dan berlaku bagi semua (atau SOP: *Standard Operational Procedures*). SOP juga mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip pengambilan keputusan diberlakukan, dan dilakukan untuk keperluan apa saja. Dari SOP juga dapat diketahui kewenangan tiap-tiap posisi dalam struktur dan corak relasi kerja yang dibangun di lembaga. Inilah yang dimaksud dengan strategi membuat aturan main bersama.

Untuk aturan main yang disepakati bersama, Fitriyanti dari Padang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam SOP, diatur bahwa rekrutmen harus terbuka, dan kami berprinsip di sini tidak boleh yang berhubungan sedarah, karena akan menimbulkan *conflict of interest*. Biasanya, kami OR melalui website dan mailing list melalui Konsorsium. Kriteria disesuaikan dengan kebutuhan”.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Budhis Utami, Wakil Ketua Badan Eksekutif Bidang Internal Institut KAPAL Perempuan, Jakarta, Jakarta 14 Mei 2012.

⁷⁰ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M, Padang 14 Mei 2012.

Selain menyusun aturan main bersama secara tertulis sebagai salah satu acuan lembaga, perempuan pemimpin perlu membudayakan kebiasaan refleksi dan melihat kembali jalan tempuhan yang telah diambil. Apakah kiranya pilihan mekanisme yang telah dijalankan sudah mengakomodasi aspirasi orang per orang, kelompok dan sekoligus menjawab kebutuhan institusi? Hal ini ditegaskan oleh Kodar dari Pekka:

“Mekanisme kerja lembaga, SOP dan aturan-aturan lain yang telah dibuat bersama-sama dan melibatkan semua itu, harus dibarengi dengan upaya melembagakannya, supaya dapat menjadi budaya lembaga. Salah satu upaya kami adalah menerapkan kebiasaan refleksi, di mana tiap orang berkesempatan melihat kembali yang sudah sebagai bekal untuk melanjutkan nanti”.⁷¹

Hal senada juga disampaikan oleh Riani dari Hapsari di Deli Serdang:

“Tidak pernah terjadi konflik. Kalaupun terjadi, kita rembugkan bareng. Misalnya kita mau mengadakan pendidikan, dan anggarannya tidak mencukupi sekian orang; Jadi bagaimana anggaran itu dikelola, misalnya dari Labuanbatu mereka memperoleh funding dari Hivos dan European Union (EU), siapa yang bisa swadaya, supaya yang lain juga bisa ikut? Jadi Labuanbatu, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), itu mereka selalu kita mintakan swadaya karena mereka punya program yang sudah ada uangnya. Kalau Serikat Petani Indonesia (SPI) itu ada, tapi masih sedikit

⁷¹ Wawancara dengan Kodar, Seknas Pekka Jakarta, Jakarta 15 Mei 2012.

dibandingkan SPI Labuanbatu dan SPPN”.⁷²

Pemahaman terhadap prinsip dan nilai yang bertujuan untuk mengajak orang lain maju secara bersama-sama adalah dasar utama dalam memimpin organisasi perempuan untuk mengatasi tantangan. Seperti yang dikatakan oleh Masnim, ketua Kopwan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JarPUK) Rindang di Mataram, bahwa ajakan bergabung untuk bersama-sama menjadi anggota koperasi akan mendukung para perempuan memiliki sumberdaya uang untuk kebutuhan mereka, berikut ini:

“Masalah-masalah yang dihadapi, contohnya pembayaran pinjaman yang macet, anggota yang keluar. Cara menyiasatnya dengan adanya PL tersebut dengan cara memberikan pemahaman jika keluar menjadi anggota, otomatis tidak mendapatkan manfaat dan layanan dari koperasi. Di samping itu, kami juga mengajarkan mereka untuk menabung. Karena di Lombok Tengah, budaya menabung susah diterapkan. Harapan kami, dengan bergabung menjadi anggota koperasi, mereka terbiasa untuk menyisihkan uangnya untuk ditabung menjadi simpanan sukarela yang bisa diambil kapan pun mereka butuh”.⁷³

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Yefri dari WCC Nurani Perempuan, dalam FGD 29 Oktober 2012:

“Tidak harus menjadi anggota DPR RI, baru menjadi pemimpin, tetapi dia mampu mendorong seseorang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di dekatnya”.⁷⁴

Selain rasa kebersamaan, atau melakukan kegiatan secara kolektif, terdapat nilai yang unik tertampil pada pengelolaan sebuah organisasi perempuan, yaitu pemimpin organisasi memiliki nilai persaudaraan perempuan, atau *sisterhood*. Pada Gerakan Perempuan Lampung (GPL) maupun Damar di Lampung, prinsip atau nilai ini diterjemahkan dalam kehidupan keseharian pemimpin dengan mengupayakan jalan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi melalui diskusi dan proses *sharing*.

Hal senada juga dikemukakan oleh Sitti Zamraini, Koordinator Pekka di Lingsar, NTB:

“Melalui pelatihan yang dilakukan Seknas mengenai analisa gender, saya menjadi tahu bagaimana melakukan identifikasi masalah yang dihadapi ibu-ibu, dan bersama-sama membuat program yang dapat memenuhi kebutuhan ibu-ibu, seperti membantu para ibu memahami hak-haknya dalam perkawinan dan perceraian”.⁷⁵

Bagi kelompok atau organisasi perempuan ini, nilai anti terhadap kekerasan adalah nilai yang dipandang penting untuk dimiliki seorang pemimpin. Seperti yang dikemukakan berikut:

⁷² Wawancara dengan Riani, Ketua Dewan Eksekutif Hapsari, Deli Serdang, 21 Mei 2012.

⁷³ Wawancara dengan Masnim, Ketua Kopwan Jarpuk Rindang, Mataram 18 Mei 2012.

⁷⁴ Yefri Heriani, WCC Nurani Perempuan, FGD Jakarta, 29 Oktober 2012.

⁷⁵ Wawancara dengan Sitti Zamraini, Koordinator Wilayah Lingsar Pekka NTB, Mataram 15 Mei 2012.

“Sebenarnya kita mencoba untuk mengkomunikasikan dengan sesama perempuan, ya, artinya ‘kan namanya kita ada etika, ketika berhadapan dengan rumah tangga orang lain, paling tidak kita coba ngobrol dengan istri mereka. Kalau.... ada persoalan-persoalan yang terjadi, kita harapkan mereka sendiri yang bisa mengkomunikasikan dengan pasangannya, misalnya, seperti ada tetangga saya yang mendapatkan kekerasan dari suaminya, kita coba untuk komunikasi apa persoalannya. Dalam kasus ini, mertuanya terlalu sering datang ke Lombok, padahal semua beban biaya harus di tanggung suaminya. Jangan sampai ada kasus KDRT karena kedatangan orang tua. Hal seperti ini menjadi masukan ke tetangga, termasuk juga menjadi masukan pada pengajian, dengan menyisipkan beberapa isu-isu yang berpihak pada perempuan....”⁷⁶

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pegiat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) yang merupakan penyintas kekerasan. Ia merasakan bisa lepas dari rantai kekerasan karena terlibat dalam organisasi. Sebelum berkenalan dengan JPrP, Yati banyak mendapat kekerasan fisik dari suaminya yang nelayan. Namun, seiring banyak bertemu dan terlibat dalam diskusi dan pertemuan di JPrP, ia mulai menyadari bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak semestinya terjadi. Ia mulai mengajak berbicara suaminya dan mengajak terlibat dalam kegiatannya.

“Baik saya, maupun suami, sering ngobrol dan berkomunikasi dengan

Heri. Sepertinya dari Heri itulah, suami saya mulai sadar dan tidak memukul saya lagi”.⁷⁷

Nilai *ethic of care* juga merupakan isian feminisme yang harus diuji dalam praktik kepemimpinan. Menurut Mariana dari *Jurnal Perempuan*, proses menjadi feminis pada aktivis perempuan salah satunya adalah menumbuh-suburkan *ethic of care* dalam seluruh aksi perjuangannya, seperti yang ia sebutkan berikut:

“Tidak semua perempuan menjadi feminis. Karena menjadi feminis itu berproses, cukup sulit dan panjang. Jatuh-bangun, naik-turun, dan tentu perlu dukungan dari sesama feminis lainnya, agar bisa saling menjaga, saling melindungi”.⁷⁸

Selanjutnya Mariana mengatakan bahwa secara harafiah, *ethic of care* adalah dasar untuk bersikap tidak menghakimi dalam relasi kerja antar perempuan. Saling berdebat, bahkan marah-marah pun hal yang biasa, tetapi *ethic of care* di dalam persaudaraan *sisterhood* akan menjaga kita dari menghakimi atau menjelekkkan kawan seperjuangan. Dengan tradisi diskusi, nilai saling “care” ini melatih kita semua untuk mampu berpikir jernih dan juga memaafkan.

Ethic of Care memang harus diemban dan diterapkan juga di antara para pemimpin kolektif, agar yang muncul dari mereka se-

⁷⁶ Wawancara dengan Baiq Halwati, Direktur Perkumpulan Panca Karsa, Mataram 17 Mei 2012.

⁷⁷ Nur Hayati, Pegiat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP), Lampung, 14 Mei 2012. (Heri yang diceritakan merupakan salah satu pegiat UPC yang mengorganisasi lahirnya JPrP).

⁷⁸ Wawancara dengan Mariana Amirudin, Direktur Jurnal Perempuan, Jakarta 2 Juli 2012.

mua menjadi daya sinergis dan bukan kompetitif. Desti dari Komnas Perempuan menegaskan bahwa, intensitas bertemu dan *sharing* bisa menjadi sarana untuk membangun kesinambungan dan sinergitas diantara para pemimpin itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Desti:

“Kami bertiga saja —dengan Yuni dan Masruchah—perlu waktu lebih dari tiga bulan untuk menemukan cara berkomunikasi yang nyaman, dalam mana masing-masing merasakan saling mengisi dan melengkapi, dan bukan malah saling persaingan. Dengan Komisioner lainnya, malah setelah hampir dua tahun ini. Kolektif *leadership* itu membutuhkan waktu”.⁷⁹

Pernyataan Masnim mengandung pengertian yang serupa. Ia menyebutkan:

“Selain itu juga, pemimpin tidak “mengkotak-kotakkan” bawahannya, Misalnya tidak membedakan satu dengan yang lain. Mungkin itu yang membuat saya bertahan, karena saya tidak membedakan jika ada teman anggota yang memiliki masalah. Saya mencoba memberikan solusi terhadapnya. Pemimpin juga harus bisa berempati terhadap kondisi lingkungan dan bawahannya”.⁸⁰

Ethic of care adalah prinsip yang mendasari kerja untuk peduli pada sesama. Melalui rasa kepedulian ini, seseorang akan mampu memimpin dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk membungkam upaya

seseorang menyuarkan pengalamannya. Hapsari di Deli Serdang merupakan gambaran yang menarik, seperti yang dikemukakan oleh Asriyani:

“Ya, keberagaman karena Hapsari tidak hanya satu organisasi dan anggotanya dari berbagai suku. Jadi hubungan emosional itu yang selalu kita bangun, karena itu jadi sumber kekuatan untuk kita bersama-sama melakukan kerja, tidak hanya sebatas program. Jadi, ada wilayah sendiri selain kita bicara program, tetapi bicara mengenai individu”.⁸¹

Petikan pendapat dari para narasumber yang dikemukakan menunjukkan bahwa semua narasumber di lima wilayah penelitian yang berbeda mempercayai nilai-nilai yang serupa dalam memimpin kelompok atau organisasinya.

Semua narasumber percaya bahwa untuk membantu anggota kelompok atau stafnya, maka mereka perlu berlaku secara setara dan tidak ada jenjang atau hirarki (*anti-hirarki*) dalam artian yang sesungguhnya, yaitu dijalankan secara demokratis, menghargai satu sama lain dengan mengedepankan sikap kekeluargaan antar-perempuan (*sisterhood*), tidak mempercayai bahwa kekerasan adalah cara untuk mengatasi persoalan (anti-kekerasan), dan menjunjung etika kepedulian di mana mereka sebagai pemimpin akan menghargai perbedaan dan menghindari sikap-sikap menghakimi satu sama lain.

Dengan demikian, pemimpin yang mengemban nilai-nilai seperti inilah yang dapat membantu perempuan lain keluar dari masa-

⁷⁹ Wawancara dengan Desti Murdiana, Wakil Ketua/ Sekjen Komnas Perempuan, Jakarta 21 Mei 2012.

⁸⁰ Wawancara dengan Masnim, Ketua Kopwan JarPUK Rindang, Mataram 18 Mei 2012.

⁸¹ Wawancara dengan Asriyani, Bendahara Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 21 Mei 2012.

lahnya, seperti yang telah dilakukan oleh saudara-saudara perempuan kita melalui kegiatan-kegiatannya di lima wilayah penelitian tersebut.

Praktik Kepemimpinan dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial

Nira Yuval-Davis, dalam bukunya *Gender and Nation* (1997), menegaskan tentang adanya dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ditempatkan dalam fungsi-fungsi reproduksi, yang *notabene* ada di wilayah domestik, sedangkan laki-laki lebih banyak berperan di ranah publik. Penindasan terhadap perempuan berhubungan erat dengan adanya perbedaan lingkungan sosial perempuan dari laki-laki, di mana penempatan perempuan di wilayah privat atau domestik menjadikannya tidak diperhitungkan dalam sejarah. Implikasi lebih lanjut adalah perempuan dibedakan dengan laki-laki dalam peraturan negara, dan seringkali hal itu dikonstruksikan sebagai ketergantungan kepada laki-laki dan suami (Yuval-Davis, 1997).

Yuval-Davis melanjutkan argumentasinya bahwa, pada umumnya, perempuan teropresi dalam hubungan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh faktor distribusi kekuasaan dan sumberdaya material dalam masyarakat yang tidak merata. Pengambilan-keputusan penting dilakukan laki-laki sesuai dengan perannya di lingkup publik, yaitu ‘penguasa dan pejuang’, sementara perempuan lebih cocok sebagai pembantu penguasa tersebut. Agaknya pendapat ini mewakili realitas yang kerap dihadapi perempuan di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagaimana yang dialami oleh Isnaini dari Yayasan Totalitas Padang:

“Saya pernah ditegur oleh ayah, karena ayah ditegur orang kelurahan karena saya pulang jam 11 malam. Akhirnya ayah menegur saya karena tidak enak terhadap omongan tetangga. Tapi ayah akhirnya bilang, kalau sudah kemalaman lebih baik menginap saja di wilayah mitra, besok baru pulang. Daripada pulang malam. Tapi aku tetap pulang malam, dan sekarang tidak pernah ada teguran lagi. Aku juga tidak menganggap itu sebagai masalah...”⁸²

Pandangan yang terbagi antara apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki mewarnai cara kita dalam melihat apa yang perlu dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Isnaini menunjukkan bagaimana pembagian peran terjadi dalam keluarganya:

“Di keluarga, saya anak kedua dari tiga bersaudara, dan perempuan satu-satunya. Biasanya, kalau pengambilan keputusan penting dan berhubungan dengan pihak luar, itu biasanya ayah. Ibu biasanya urusan rumah. Kalau urusan surat-surat itu ayah. Ayah eksternal, ibu internal. Ini tidak dianggap masalah, karena mereka sama-sama menginginkan itu. Ibuku juga sukanya urusan masalah internal saja, dan menurut aku, selama tidak ada paksaan, tidak masalah. Untuk keputusan anak-anak, biasanya mereka juga berdiskusi. Hanya untuk masalah eksternal, ayah biasanya langsung saja, karena ibuku juga menyerahkan kepada ayah”.⁸³

⁸² Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas, Padang 15 Mei 2012.

⁸³ *Ibid.*

Sementara Fatiha menyebutkan bahwa dirinya dapat melakukan kegiatan di luar rumah bahkan sampai di desa lain. Fatiha telah berhasil turut serta dalam kegiatan sosial dengan mendirikan beberapa koperasi di tempat lain, seperti yang dituturkannya:

“Saya terlibat aktif dengan koperasi berbasis syariah di lingkungan kelurahan saya. Saya juga terlibat pendirian koperasi syariah di kelurahan lain”.⁸⁴

Usaha yang dilakukan Fatiha tersebut bukan berarti tidak mendapat tantangan dari masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa budaya patriarki yang ada di masyarakat luas membuat para perempuan organisasi sulit untuk melaksanakan program mereka. Dalam konteks kepemimpinan feminis, organisasi perempuan tidak terang-terangan mengatakan istilah-istilah feminisme dalam menjalankan programnya.

“Kalau saya mengamati di lapangan, orang alergi pada istilah feminis, dan secara tidak sadar. Padahal mereka sudah menjadi bagian dari hal tersebut. Di tingkat lokal, lebih memakai aktivis perempuan atau aktivis gender. Kalau saya sendiri lebih suka dibilang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, agar tidak menimbulkan resistensi”.⁸⁵

Kebiasaan berorganisasi dan berkumpul dengan sesama perempuan juga menumbuhkan kemampuan lain dalam diri perempuan,

di antaranya kemampuan untuk mengutarakan pendapat.

“Awalnya tidak percaya diri, tapi saya selalu ingin tahu. Saya selalu menceritakan apa yang saya dapat dari pelatihan. Di situ suami saya memuji, kok sekarang bisa ngomong? Sekarang ini suami sudah membebaskan saya”.⁸⁶

Sementara di Teater Satu, Lampung, dinyatakan oleh Imas, bahwa kesetaraan di organisasi juga dia rasakan di lingkup keluarga. Bagi Imas, yang mengajarkan kesetaraan adalah suaminya, Iswadi. Iswadi pernah mengatakan bahwa kerja domestik, kerja rumah tangga, bukanlah kerja perempuan. Suaminya selalu mencontohkan dirinya sendiri dalam melakukan kerja rumah tangga.

“Is (suaminya-red) lebih feminis, mungkin. Anak saya lebih dekat dengan dia, bahkan dia yang lebih jago masak. Saya banyak mengurus manajemen teater, sehingga urusan rumah tangga justru banyak ditangani dia”.⁸⁷

Di Deli Serdang, upaya Hapsari mengajak kaum perempuan berperan dalam masyarakat sangat kuat. Bahkan, tidak jarang mereka dianggap membawa pengaruh kurang baik, karena membawa istri atau anak perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Apabila suami atau seorang ayah memberi izin untuk beraktivitas, itu sudah baik sekali, seperti yang disampaikan Lely:

⁸⁴ Wawancara dengan Fatiha Yendreni, Koordinator ASPPUK Padang, Padang 14 Mei 2012.

⁸⁵ Fitriyanti, Direktur LP2M Padang, FGD Jakarta, 29 Oktober 2012.

⁸⁶ Wawancara dengan Murni, Sekretaris Serikat Perempuan Lampung Selatan, Lampung 14 Mei 2012.

⁸⁷ Wawancara dengan Imas Sobariah, Pendiri Teater Satu, Lampung 13 Mei 2012.

“Buat kami, suami bisa kasih izin adalah prestasi. Meskipun kami tetap melakukan kewajiban kami sebagai istri, tetapi para suami sudah paham dan bangga apa yang telah kami kerjakan. Setiap benturan yang ada belum pernah kami menyerah. Bagi kami, suatu keberhasilan jika kader kami sudah mampu meminta izin untuk ke luar dan berorganisasi, dan memperoleh restu dari keluarga mereka sendiri”.⁸⁸

Bagi anggota masyarakat pun keberadaan Hapsari dirasakan manfaatnya:

“Di masyarakat atau di lingkup desa, dalam rapat-rapat desa, kami dilibatkan. Tapi tidak hanya kami, anggota-anggota juga ikut Musrenbang. Misalnya ada kebijakan dari atas yang dibuat oleh Pemerintah desa, kami bisa melakukan pengkritisan. Jadi kesadaran lebih kritis itu telah terbangun. Kami bisa mengkritisi soal raskin, Jampersal, Jamkesda, Jamkesmas. Lalu perubahan terjadi. Saya selain dilibatkan dalam Musrenbang, dan rapat-rapat di desa juga di kecamatan dan di kabupaten. Serikat-serikat anggota juga dilibatkan”.⁸⁹

Pengaruh kegiatan kelompok tampaknya membawa dampak positif bagi kemampuan perempuan untuk berperan di lingkup publik atau kegiatan sosial, seperti yang dikemukakan anggota kelompok dampingan Perkumpulan Panca Karsa berikut ini:

“Saya bergabung dengan Panca Karsa mulai 2005. Kemudian menjadi CO

(Community Organizer)... kegiatan sehari-hari sebelum bergabung di Panca Karsa, saya di kantor desa satu-satunya yang perempuan. Ketika dilantik, dari 102 laki-laki yang dilatih saya sendiri yang perempuan di Kecamatan Labuanbatu. Jadi sudah terbiasa di masyarakat desa saya. Di Desa Mirob, paling ujung perbatasan... dari hampir 80 persen dulunya memang laki-laki. Kalau seandainya perempuan muncul, dianggap awam. Sekarang udah ada perubahan: perempuan maupun laki-laki sama”.⁹⁰

Pada beberapa wilayah, agaknya pembagian kerja publik dan privat sudah tidak menjadi persoalan. Anggota kelompok sudah lebih mampu bernegosiasi dengan pasangannya apabila kegiatan kelompok atau organisasi membutuhkan partisipasi mereka. Seperti yang disampaikan Masnim:

“Saya sudah 12 tahun sama suami.. tapi Allah belum kasih saya kepercayaan untuk punya anak dari rahimku sendiri. Anak-anak yang sekarang ada di rumah, saya angkat anak dari orangtua nya yang tidak mampu merawatnya... Suami saya selalu berpikir, selama pekerjaan masih bisa dikerjakan, ya, harus dikerjakan, walaupun pekerjaan rumah yang harusnya adalah kewajiban istri, atau perempuan. Anak saya lebih lengket pada bapaknya, karena saya sering ada kegiatan di luar... Malah saya terpaksa harus meninggalkan dia ketika berusia satu bulan, masih merah betul, karena ada pertemuan koperasi di Jatinangor”.⁹¹

⁸⁸ Wawancara dengan Lely Zaelani, Ketua Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Jakarta 28 Juni 2012.

⁸⁹ Wawancara dengan Zulfa Suja, Anggota Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 24 Mei 2012.

⁹⁰ Peserta Kelompok Panca Karsa, FGD Mataram, 17 Mei 2012.

⁹¹ Wawancara dengan Masnim, Ketua Kopwan JarPUK Rindang, Mataram 18 Mei 2012.

Nada yang serupa juga disampaikan oleh Sitti Zamraini:

“Iya, kata bapak saya, perempuan harus jadi sarjana semua, justru perempuan harus dikuatkan. Apabila terjadi perceraian, tidak harus pulang ke rumah orang tua, tapi tetap *survive*. Mungkin pengalaman bapak. Bapak tidak mau anak perempuan jadi lemah”.⁹²

Meskipun sudah ada yang mampu melakukan negosiasi dengan keluarganya untuk beraktivitas di luar rumah, namun pada tingkat lokal masih ditemukan adanya dikotomi tersebut, seperti yang ditengarai oleh Dian Kartika:

“Kalau aku enggak, karena aku punya otoritas. Yang menentukan ada konflik atau tidak itu aku, baik dalam keluargaku maupun keluarga besar. Karena ada *support system* dan juga tidak ada yang mem-bagi kewenangan, karena aku *single parent*. Dalam kenyataannya, walaupun di ruang publik berjuang, namun dalam kehidupan privat sebagai istri tetap harus meminta izin pada suami, terutama di tingkat lokal”.⁹³

Dikotomi publik dan privat ini tampaknya sekali pun sudah mulai dikikis melalui contoh-contoh kepemimpinan dari kelompok dan organisasi perempuan di ke lima wilayah penelitian, masih saja tetap hadir dalam realitas kehidupan perempuan.

Sekalipun demikian, patutlah dicatat bahwa upaya atau tindakan resistensi yang

dikedepankan adalah langkah-langkah kecil menuju upaya menghadirkan kemampuan perempuan untuk mengatasi persoalan sesuai dengan harapannya yang terbaik mengenai kehidupannya.

Pengaruh Kepemimpinan pada Posisi dan Peran Perempuan Secara Politik

Partisipasi mengisyaratkan keterlibatan dalam bentuk sumbangan pemikiran maupun tindakan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun posisi dan peran perempuan secara politik adalah peran aktif melakukan sesuatu dalam kaitannya dengan kewajiban sebagai warga anggota suatu masyarakat. Dalam konteks penelitian WRI, pengertian politik tidak hanya dibatasi pada pengertian politik formal (dalam tata pemerintahan) tetapi politik dalam artian yang luas, di mana perempuan sebagai personal memiliki peranan dan *bargaining power* dalam pengambilan keputusan di berbagai ruang kehidupannya sebagai pribadi dan warga negara. Nyata betul bahwa *the personal is political*.

Keberadaan organisasi-organisasi perempuan memiliki andil dalam menyebarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, yang selama ini terbentur oleh interpretasi ajaran agama (Islam) dan budaya, seperti misalnya di Mataram. Keterlibatan perempuan dalam organisasi perempuan merupakan loncatan dari kungkungan tradisi dan agama. Ini artinya, pengenalan terhadap bentuk kepemimpinan feminis juga merupakan upaya pembebasan dari tataran nyata bentuk “kuasa yang tampak” (*visible power*), namun bukan berarti mereka terbebaskan dari berbagai penghambat psikologis (*psychological baggage*) yang me-

⁹² Wawancara dengan Sitti Zamraini, Pekka NTB, Mataram 15 Mei 2012.

⁹³ Wawancara dengan Dian Kartikasari, Seknas Koalisi Perempuan Indonesia, Jakarta 30 Mei 2012.

rugikan dari bentuk kuasa yang tidak tampak dan tersembunyi. Penghambat tersebut mewujud dalam bentuk normativitas ibu secara kultural yang tetap mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya, tataran bekerjanya bentuk kuasa yang tersembunyi dari wacana patriarkal sebenarnya masih berjalan dan belum terkikis. Meski demikian, kondisi perempuan yang bergabung dengan organisasi perempuan dikatakan telah meningkat dan hal itu berfungsi dalam berhadapan dengan bentuk kuasa yang tampak (*visible*). Misalnya, dalam hal ini, perempuan menjadi lebih mandiri, berdaya dan sadar akan hak-haknya.

“Manfaat yang dirasakan setelah ikut JarPUK itu, perempuan tidak diremehkan. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa berusaha...”⁹⁴

Upaya penyebaran gagasan akan kepemimpinan perempuan yang terjadi di ASPPUK bergerak dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan, yang merupakan fokus kerjanya. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, ASPPUK memberikan banyak pelatihan dan memfasilitasi akses permodalan usaha. Kegiatan yang diikuti banyak perempuan membuat mereka merasa terbantu untuk mendapatkan kepercayaan diri sebagai pengusaha. Hal ini membuat perempuan di kelompok pengusaha kecil menjadi merasa memiliki pengetahuan dan dapat berusaha sebagaimana pengusaha laki-laki. Nada serupa disampaikan oleh Murni dari Lampung:

⁹⁴ FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan kelompok binaan ASPPUK Lombok Tengah, Lombok Tengah 17 Mei 2012.

“Dulu, *boro-boro* bisa ngobrol dengan Pak Lurah. Sekarang karena ikut organisasi, keterlibatan saya di desa mulai diakui. Dari musyawarah di tingkat warga hingga desa, saya dipilih jadi fasilitator”.⁹⁵

Dari paparan ini terlihat perempuan mendapatkan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di publik ketika ia mempunyai identitas lain, seperti dalam hal ini identitas keorganisasian yang cukup dikenal, seperti Damar atau GPL. Bagi perempuan, kesempatan untuk berorganisasi, dan kemudian menjadi berkemampuan untuk memasuki ranah publik, merupakan posisi sebagai ‘penyintas’ dari wacana patriarkal yang menindasnya. Keterlibatan tersebut juga merupakan proses belajar melalui pengalaman bagi semua anggota organisasi perempuan.

Fungsi pengalaman bagi anggota organisasi sangat penting. Damar di Lampung, sebagai organisasi yang telah cukup lama dan berpengalaman sebagai *justice provider*, telah banyak mendidik relawan maupun staf, seperti yang disampaikan Selly:

“Pada awalnya staf dan divisi mengacu pada program. Dulu Damar punya divisi penanganan kasus dan penguatan jaringan, pendidikan publik dan pengembangan sumber daya organisasi. Penempatan berdasarkan potensi dan juga dipilih, mana staf yang lebih nyaman di kerja pengorganisasian, dan mana yang berpotensi di penanganan kasus”.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Murni, Serikat Perempuan Lampung Selatan, Lampung 14 Mei 2012.

⁹⁶ Wawancara dengan Selly Fitriani, Direktur Damar, Lampung 11 Mei 2012.

Pengalaman terlibat dalam pendidikan, jaringan, dan penanganan kasus pada dasarnya juga merupakan penguatan bagi bekerjanya “kepemimpinan feminis” pada diri anggota. Hal yang senada dikemukakan oleh Yefri, Direktur WCC Nurani Perempuan Padang, bahwa relawan dan staf memperoleh bimbingan dan arahan, sehingga pada akhirnya mereka dapat melakukan sendiri penanganan kasus di masyarakat tempat mereka beraktivitas:

“Jadi kita modelnya lebih ke situ. Tiap rapat penanganan kasus, dalam kasus itu kita belajar, kenapa kasus ini harus kita tangani, karena ini bagian dari relasi. Ini strategi berikut. Untuk kawan-kawan Mery dan Tya dan kawan-kawan seangkatanannya, kita training tentang Gender, bicara tentang kerelawanan, bicara tentang kasus, tergantung latar belakang”.⁹⁷

Adalah menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Hapsari, seperti yang disampaikan oleh Riani:

“Hapsari wajib memberikan pendidikan dan training, termasuk keadilan gender, yang diistilahkan oleh mereka sebagai konsep pembagian peran kepada seluruh anggotanya. Dukungan pendanaannya juga dilakukan oleh Hapsari. Pendidikan kepemimpinan biasanya diberikan kepada anggota yang telah diperhatikan dan dinilai layak oleh pengurus Hapsari untuk menjadi kader. Anggotanya merupakan perwakilan dari serikat. Jika ada undangan seminar, workshop, dan training,

Dewan Eksekutif akan mempertimbangkan dengan adil dan seksama siapa yang akan diutus. Adapun kriterianya adalah kebutuhan, pernah atau tidaknya mengikuti kegiatan serupa, dan kesesuaian minat anggota”.⁹⁸

Berkat upaya-upaya yang dilakukan, cukup banyak kader Hapsari yang kemudian di’taksir’ oleh berbagai pihak, baik oleh kalangan eksekutif maupun kalangan partai politik. Seperti yang diutarakan oleh Riani:

“Nah, kalau sekarang ini kader-kader kita yang di desa dilirik untuk jadi kader politik. Kita membuat batasan, boleh bukan yang sudah menjadi ketua kelompok yang di desa, boleh anggota yang biasa menjadi pengurus politik. Ada juga orang melirik ke kami untuk dimasukkan ke Partai, tetapi kesepakatan organisasi, kalau mau masuk partai, harus dimusyawarahkan, supaya nanti masuknya dia ada timbal-balik bagi organisasi Hapsari. Kita mau keberhasilan dia masuk ke lembaga tertentu itu karena keberhasilan Hapsari mendorong dia, bukan keberhasilan individu”.⁹⁹

Agaknya, pengaruh aktivitas dan kepemimpinan yang hadir pada Hapsari mampu membentuk kepercayaan diri anggota, selain peningkatan pengetahuannya, sehingga para anggota dipandang mampu untuk menempati posisi pengambil-keputusan di daerahnya. Ini adalah titik emansipasi yang bagi anggota Hapsari merupakan pengalaman yang luar biasa.

⁹⁷ Wawancara dengan Yefri Heriyani, Direktur WCC Nurani Perempuan, Padang 17 Mei 2012.

⁹⁸ Wawancara dengan Riani, Ketua Dewan Eksekutif Hapsari, Deli Serdang, 21 Mei 2012.

⁹⁹ Wawancara dengan Zulfa Suja, Anggota Dewan Pengurus Nasional Hapsari, Deli Serdang 24 Mei 2012.

Hal yang serupa juga terjadi di Lampung. Pemberangkatan kader ke seminar dan *workshop* membuat mereka mencapai pemahaman tertentu, dan mendapat kesempatan untuk membuka jaringan, bahkan juga diperbolehkan masuk jadi kader partai politik. Sementara yang belum dapat pendidikan tetap diberikan pendidikan agar mampu mencapai kapasitas tertentu yang bisa digunakan untuk mengembangkan dirinya.

“Pertama kali dikirim pelatihan oleh Damar, pertama kalinya naik kapal terbang. Dari acara itu, saya mendapat kepercayaan diri bahwa saya bisa menjadi fasilitator dan memberi pengetahuan kepada perempuan lain”.¹⁰⁰

Di Lampung, para kader didorong untuk terlibat dalam pengelolaan PNPM, mencalonkan diri menjadi kepala desa, sekretaris desa, caleg, dan seterusnya. Tampak bahwa kaderisasi dalam kepemimpinan berhasil mendorong anggota masyarakat untuk lebih bermakna di kehidupannya. Seperti pengalaman anggota Serikat Perempuan Bandar Lampung (SPBL) dan Fakta Tanggamus, ketika sudah mendapatkan pendidikan, maka mereka bisa berkembang membangun kelompok lain dalam lingkungan yang berbeda.

“Ada anggota kami yang mencalonkan diri jadi kepala desa. Itu bahkan dari desa lain ikut mendukung. Di situ kami tahu bahwa masyarakat masih menyangsikan kepemimpinan perempuan”.¹⁰¹

Sebagai ajang untuk membuktikan kepemimpinan perempuan, di salah satu desa di Tanggamus, anggota Fakta ada yang sudah berani mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selain itu anggota Fakta juga aktif di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas (Panwas) dan (Badan Himpun Pekon (BHP). Fakta memperjuangkan agar tiap BHP di wilayah Tanggamus selalu memperhatikan jumlah anggota perempuan guna keterwakilan perempuan tetap terjaga. Fakta juga mendorong keterwakilan perempuan hingga staf kelurahan dan desa serta untuk program PNPM. Keterwakilan perempuan, menurut Fakta, tidak akan diberi sendiri, harus ada tuntutan dari perempuan agar perempuan mendapat keterwakilan. Saat ini, kegiatan Fakta swadaya murni, meskipun ada usaha-usaha untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan dinas-dinas seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan. ‘Turan pekon’ digunakan untuk mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan secara bergilir dari pekon yang satu ke yang lain.

“Di organisasi, kita bertemu dengan orang-orang lebih banyak, pengalaman bertambah. Jadi waktu diterapkan di kampung sudah biasa saja”.¹⁰²

Tampaknya, jalannya kaderisasi kepemimpinan di Lampung dan Deli Serdang cukup berjalan dengan baik dan mampu mendorong anggota dan perempuan lain di lingkungan organisasi, atau kelompok beraktivitas, untuk mampu berkegiatan secara publik bahkan politik. Namun, sedikit lain cerita

¹⁰⁰ Wawancara dengan Desi, Serikat Perempuan Bandar Lampung, Lampung 14 Mei 2012.

¹⁰¹ Wawancara dengan Sri Suharni, Anggota Forum Anti Kekerasan Tanggamus, Lampung 12 Mei 2012.

¹⁰² Wawancara dengan Murni, Serikat Perempuan Lampung Selatan, Lampung 14 Mei 2012.

yang ditemukan di Padang. Tanti dari KPI Padang menyatakan bahwa kaderisasi harus berkesinambungan:

“Kaderisasi harus yang bagus. Kalau tidak ada kaderisasi, tidak akan tercipta pemimpin yang ideal, karena semua dari bawah, dari pengkaderan. Kalau mereka mengikuti kaderisasi dari A sampai Z, pasti akan berjalan. Tetapi kalau hanya di tengah jalan, penyampaian akan terputus. Dulu di KPI ada pendidikan kader dasar, menengah. Kader lanjut itu juga tidak jalan”.¹⁰³

Fitriyanti dari LP2M Padang menyebutkan bahwa undangan-undangan peningkatan kapasitas yang diberikan sedikit banyak juga akan memberi manfaat dan mendukung kapasitas kerja di tengah masyarakat:

“Pernah mengikuti beberapa training: keuangan, kebencanaan, gerakan perempuan (Yogyakarta), gender budget. Dari Asia Foundation, IDEA, Rifka, KPI. Teman-teman dari staf mendukung. Saya lebih baik juga mendukung. Saya juga berusaha agar ilmu yang saya dapat bisa digunakan untuk kebaikan organisasi, dan sebisa mungkin saya mencoba menularkan ilmu yang saya dapat dengan teman-teman di sini. Training untuk staf juga ada, biasanya masing-masing mengikuti training sesuai dengan pembagian kerja yang ada. Jadi kalau ada undangan tema tertentu, sudah jelas siapa yang harus berangkat mengikuti pelatihan”.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Tanti Herida, Sekertaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat, Padang 17 Mei 2012.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M, Padang 14 Mei 2012.

Sementara itu, organisasi perempuan di Mataram juga telah melakukan berbagai aksi untuk meningkatkan posisi tawar perempuan di masyarakat Lombok. Organisasi seperti Pekka, ASPPUK dan Panca Karsa memberikan peningkatan kapasitas bagi kelompok dampingannya, dan secara kolektif melakukan advokasi dan *hearing* kepada pemerintah daerah setempat terhadap penggunaan kain tenun sebagai seragam pegawai negeri sipil.

“Melakukan hearing dan advokasi di Lombok Tengah kami bekerjasama dengan ASPPUK/JarPUK, Konsorsium, dan kelompok perempuan lainnya mengenai seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menggunakan kain tenun”.¹⁰⁵

Dian dari Seknas KPI di Jakarta menyatakan bahwa sudah mulai terlihat pencapaian-pencapaian kecil, kelompok-kelompok di basis sudah mulai dapat mengorganisasikan diri dan melakukan upaya advokasi. Ini artinya mereka sudah mulai mampu memiliki posisi tawar di lingkup publik di tempatnya berada.

“Kalau sekarang yang dihubungkan dengan mandat kita, kawan-kawan merasakan bagaimana perempuan di desa itu tidak punya peluang berorganisasi. Di sisi lain, kawan-kawan yang berorganisasi tidak mungkin secara langsung, karena keterlibatan kawan-kawan di sini sifatnya *voluntary*. Maka perorganisasiannya dalam Rakernas dicoba agar ka-

¹⁰⁵ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia kelompok binaan Panca Karsa, Mataram 17 Mei 2012.

wan-kawan di basis dapat mengorganisasi sendiri-sendiri. Sekarang sudah ada pencapaian-pencapaian kecil, dalam mana kawan-kawan merasa diuntungkan oleh pencapaian mereka. Ini mulai terlihat. Perorganisasian dan advokasi mulai berjalan. Isunya berbeda-beda di tiap lokal. Sekarang yang belum terpegang strateginya, misalnya satu kota itu punya 50 desa, masing-masing desa punya *concern* yang berbeda-beda di desa itu”.¹⁰⁶

Sedikit catatan, pada kelompok atau organisasi tertentu di Padang, disebutkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan kaderisasi kelompok terhenti. Sehingga, disebutkan bahwa kesinambungan dalam upaya peningkatan kapasitas harus dijaga agar keberhasilan dalam memperkuat posisi perempuan di masyarakat lebih terjamin.

Penutup

Pengaruh Kepemimpinan Feminis pada Gerakan Sosial dan Korelasinya pada Kesejahteraan Perempuan

Kepemimpinan dari kelompok dan organisasi perempuan di lima wilayah menunjukkan adanya pengaruh positif, dalam arti memperkuat kapasitas perempuan, baik secara individual maupun kelompok.

Dengan menjadi anggota organisasi atau terlibat dalam kegiatan kelompok, perempuan mulai terbuka dengan pilihan lain di luar lingkup rumah dan keluarganya.

Terlibatnya perempuan dalam kegiatan ini meningkatkan kapasitas dan kepercayaan

diri, karena terpapar dengan kegiatan-kegiatan di lingkup publik. Ini merupakan modal sosial yang sangat penting bagi perempuan.

Peningkatan kapasitas dan pengalaman perempuan untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip yang diperkenalkan melalui organisasi perempuan dan kepemimpinannya menjadikan perempuan berdaya di lingkup sosial maupun publik, serta mampu melakukan negosiasi agar kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi demi peningkatan kesejahteraan kehidupan perempuan.

Pengaruh kepemimpinan dan upaya untuk menghadirkan relasi yang lebih setara di lingkup privat masih memerlukan kerja yang lebih keras agar dampaknya sama terlihatnya dengan pemberdayaan perempuan di lingkup publik.

Sekali pun dikotomi publik dan privat ini sudah mulai dikikis melalui contoh-contoh kepemimpinan dari kelompok dan organisasi perempuan di lima wilayah penelitian, tampaknya masih saja tetap hadir dalam realitas kehidupan perempuan.

Sekali pun demikian, patut dicatat bahwa upaya atau tindakan resistensi yang dike depankan adalah langkah-langkah kecil menuju upaya menghadirkan kemampuan perempuan mengatasi persoalan, sesuai dengan harapannya yang terbaik mengenai kehidupannya.

Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dengan memperkenalkan nilai dan prinsip feminis di lima wilayah telah cukup meningkatkan kapasitas perempuan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, untuk melakukan negosiasi guna pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya. Meskipun dalam praktik, mereka tidak menggunakan kon-

¹⁰⁶ Wawancara dengan Dian Kartikasari, Seknas Koalisi Perempuan Indonesia, Jakarta 17 Mei 2012.

sep-konsep feminisme itu sendiri, sebab akan memicu timbulnya resistensi dari masyarakat.

Sejak masa pasca otoritarian Indonesia, pintu partisipasi di lingkup publik lebih terbuka, selain juga berkat peningkatan kapasitas perempuan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan. Jumlah perempuan yang berperan di lingkup publik seperti di bidang politik menjadi semakin banyak. Mereka berperan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa sampai distrik dan mulai mampu menegosiasikan munculnya peraturan atau kebijakan, bahkan anggaran.

Organisasi dengan kepemimpinan perempuan menunjukkan korelasi yang cukup besar pada peningkatan kesejahteraan anggotanya yang perempuan. Jumlah perempuan di lima wilayah penelitian terlihat memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelum mereka mengikuti aktivitas organisasi perempuan. Selain kapasitas dalam bidang politik (mampu bernegosiasi, mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya), kondisi ekonominya juga membaik. Mereka memiliki cara untuk membantu diri dan keluarganya untuk bertahan hidup, bahkan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Upaya untuk lebih menghadirkan kesetaraan relasi di lingkup privat agaknya masih perlu dilakukan agar kondisi dan posisi perempuan semakin membaik. Pandangan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh perempuan juga tidak lagi dibatasi pada jenis-jenis kerja tertentu di lingkup privat, tetapi contoh-contoh yang berhasil dilakukan perempuan di lingkup publik diharapkan mampu menggeser pandangan tersebut menjadi yang mengacu pada nilai dan prinsip setara

dan berkeadilan, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kapasitas Perempuan untuk Menjalankan Peran Kepemimpinan yang Lebih Baik

Sekali pun kesenjangan gender akibat adanya ketidaksetaraan relasi kuasa dalam masyarakat sangat terasa kehadirannya, peluang untuk memperkecil ketidaksetaraan amat dimungkinkan, karena pengakuan atas permasalahan gender di tengah komunitas di tingkat lokal dan komitmen dari pemerintahan pasca otoritarian Indonesia juga meningkat. Hal ini semakin dimungkinkan karena bertambah dan meningkatnya keterlibatan masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi perempuan untuk memastikan intervensi yang berkesinambungan, serta mekanisme kontrol yang lebih baik serta kelompok sosial penekan yang lebih banyak.

Kesinambungan dalam upaya peningkatan kapasitas harus dijaga agar keberhasilan dalam memperkuat posisi perempuan di masyarakat lebih terjamin. Oleh karenanya, peluang untuk arahan upaya di masa datang adalah dengan meningkatkan kondisi, dan terutama posisi perempuan dengan:

1. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan, dengan menyiapkan mereka menjadi pelatih untuk peningkatan kapasitas tersebut. Jumlah perempuan yang semakin baik kapasitasnya akan meningkat, dan pada gilirannya jumlah perempuan yang menjadi pemimpin juga meningkat jumlahnya.

2. Pemimpin menyiapkan kader dan anggota untuk memiliki pemahaman masalah perempuan, seperti isu seksualitas dan Lesbian, Bisexual dan Transgender (LBT), atau isu-isu keagamaan seperti jilbabisasi serta perda syariah.
3. Program intervensi pada sikap komunitas, para pengambil-keputusan dan kebijakan dari tingkat desa sampai distrik, bahkan nasional, yang didorong oleh perempuan-perempuan yang sudah terkuatkan kapasitasnya.
4. Mekanisme pertemuan secara berkala dan terjaga kontinuitasnya untuk berbagi pengalaman kerja di wilayah masing-masing mengenai strategi penyelesaian masalah akibat persoalan gender, dan memperkuat organisasi dan kelompok perempuan melalui pembentukan jaringan sesama organisasi dan kelompok per wilayah (Indonesia Timur dan Indonesia Barat), dan pada gilirannya ke seluruh Indonesia. Ini untuk memperkuat jaringan kerja yang terbagi berdasarkan isu kerjanya, seperti kesehatan dan hak reproduksi, partisipasi politik, kebijakan dan sebagainya.
5. Mengadakan refleksi atas kerja organisasi dan kelompok perempuan secara berkala, sesuai kesepakatan antar organisasi dan kelompok perempuan (misalnya tiap tiga tahun atau lima tahun), baik mengenai kepemimpinan maupun strategi kerja yang akan diambil. Dikaji apakah efektif membantu mengatasi permasalahan gender di wilayah kerja masing-masing dan memetakan apa saja keberhasilan yang sudah dicapai oleh organisasi dan kelompok perempuan tersebut.
6. Pendokumentasian dari pelaksanaan atas Rekomendasi 1-5 dalam kurun waktu tiga tahun atau lima tahun ke depan, sesuai kesepakatan organisasi dan kelompok perempuan, dituliskan dan dibagikan kembali kepada organisasi dan kelompok perempuan.
7. Upaya aksi dan refleksi organisasi dan kelompok perempuan yang dibuat secara kolektif, kemudian dipublikasikan agar dapat menjadi referensi bagi pemerhati dan peminat isu gerakan perempuan.***

Daftar Pustaka

- Anastasia, Ayu dan Aris Arif Mundayat. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Sumatera Utara*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Anindhita, Frisca dan Sita Aripurnami. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Lombok*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Aripurnami, Sita *et. al.* 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Jakarta*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Batliwala, Srilatha. 2010. *Feminist Leaderships for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*. CREA (Creating Resources for Empowerment in Action), India, hal. 44-45.
- Batliwala, Srilatha. 2010. *Feminist Leaderships for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*. CREA (Creating Resources for Empowerment in Action), India, hal. 13.

- Bouma, Joanna (ed.). 2011. Case Studies of Five Asian Organizations, Pelagia Communications. *Women Leading Change. Experiences Promoting Women's Empowerment, Leadership and Gender Justice*. Oxfam Novib.
- Gerungan, W.A. 2002. *Psikologi Sosial*. Refika Aditama, Bandung.
- Komnas Perempuan. 2011. *Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010*. Komnas Perempuan, Jakarta.
- Priaryani, Ika Wahyu dan Aris Arif Mundayat. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Lampung*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Rahayuningtyas dan Edriana Noerdin. 2012. *Laporan Penelitian Feminist Leaderships Pasca Negara Otoritarian Indonesia. Studi kasus di Kota Padang*. Women Research Institute, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Women Research Institute. 2009. *Executive Summary Impact Assesment Program Pekka di Delapan Wilayah*. Women Research Institute, Jakarta.
- Williams, Michelle. 2008. *Principles for Feminist Leadership. Struggling to Share Power. DisAbled Women in Action (DAWN)*, Ontario.

Membangun Kekuatan Ekonomi dan Politik Perempuan Akar Rumput di Sumatera Utara

Ayu Anastasia & Aris Arif Mundayat

Kondisi sosial budaya dan konstruksi gender meletakkan perempuan pada posisi lemah dibandingkan dengan laki-laki di dalam masyarakat. Ini melahirkan kebutuhan pada perempuan untuk berorganisasi. Dalam tulisan ini akan dibahas upaya yang dilakukan oleh beberapa organisasi perempuan di Sumatera Utara dalam membangun model gerakan perempuan akar rumput dengan mengorganisir dirinya guna memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong perempuan untuk berorganisasi dan dapat merepresentasikan suara perempuan akar rumput dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan delapan kotamadya. Wilayah ini terdiri dari pusat industri, perkebunan dan kawasan pesisir, kesemuanya penting secara ekonomi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sampai tahun 2010, lebih banyak penduduk Sumatera Utara menetap di daerah pedesaan daripada di perkotaan. Penduduk Sumatera Utara yang tinggal di pedesaan sejumlah 6,60 juta jiwa (50,84 persen), sementara penghuni perkotaan sebesar 6,38 juta jiwa (49,16 persen). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Utara banyak menggantungkan kehidupan pada sektor perkebunan dan eksploitasi pesisir. Eks-

pansi perkebunan, terutama kelapa sawit, melesat pada masa Orde Baru, khususnya sejak 1980-an ketika pendapatan negara dari minyak dan gas bumi mulai berkurang. Ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat secara memadai.

Angkatan kerja di Sumatera Utara sampai saat ini banyak yang hanya berpendidikan SD ke bawah.¹ Rendahnya pendidikan angkatan kerja, dan semakin sempitnya lahan akibat ekspansi perkebunan, telah seca-

¹ Sumatera Utara Dalam Angka 2011, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

ra bertahap mengikis kemampuan masyarakat untuk mencari nafkah. Banyak yang menjadi buruh harian lepas, atau bekerja pada Perkebunan Inti Rakyat ketika tanah mereka menjadi lahan perkebunan. Pemilik tanah menikmati bagi hasil dengan mereka, seraya memperoleh pula tenaga kerja di lahan-lahan tersebut.

Di daerah pesisir, komunitas nelayan menghadapi berkurangnya hutan bakau. Sejak tahun 1980an, penduduk pesisir banyak terlibat dalam usaha pertambakan ikan dan udang. Usaha ini menyebabkan hutan bakau terbabat habis. Akibat itu, lahan-lahan pesisir yang tersisa rusak dan tandus setelah ditinggalkan oleh pengelola tambak. Musnahnya hutan bakau mengakibatkan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan, sehingga mereka terpaksa berlayar jauh sampai ke perbatasan Malaysia untuk mencari ikan. Tak jarang nelayan-nelayan tersebut tertangkap oleh polisi laut negara tetangga, dan dihukum. Setelah itu terjadi, banyak nelayan terpaksa pulang dengan tangan hampa. Suami salah seorang anggota perkumpulan Hapsari berulang kali tertangkap oleh penjaga perbatasan kerajaan Malaysia. Masalah yang dihadapi keluarga nelayan ini menjadi tugas bagi Serikat Perempuan Nelayan yang berada di bawah payung organisasi Hapsari.

Pada 2003, pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui proyek nasional mengeluarkan kebijakan penggunaan kapal *trawler*, yang diberikan secara kredit kepada nelayan. Tentu saja yang mampu membeli hanya nelayan bermodal besar. Jika digunakan, jaring *trawler* menangkap semua ikan, besar maupun kecil. Ini mempunyai dampak besar bagi habitat ikan. Ikan-ikan muda dan belum

berkembang biak ikut tertangkap, mempengaruhi tangkapan nelayan miskin. Di kawasan ini, nelayan mengenal sebuah pola hubungan yang disebut sebagai “juragan-Anak Buah Kapal (ABK).” Maksudnya ketika sumberdaya nafkah merosot, banyak di antara ABK jadi buka utang pada lintah darat — yang dikenal dengan nama ‘bakri’ (Batak kredit)² — karena juragan mereka juga mengalami kebangkrutan modal. Saat panen (mendapat tangkapan laut), mereka sudah terlanjur terjerat utang. Jika gagal panen, artinya tidak mendapat tangkapan, jerat utang para nelayan kian melilit. Inilah kondisi yang terus-menerus dihadapi kaum tani dan nelayan di kawasan ini.

Masyarakat nelayan tentu saja memiliki karakteristik berbeda dengan petani perkebunan. Perkampungan nelayan didominasi oleh kaum perempuan, karena para suami biasanya pergi melaut selama satu pekan sekali berlayar. Perempuan nelayan bekerja di ranah domestik — menyediakan pangan untuk anak dan suami, dan mengelola usaha pengawetan ikan hasil tangkapan suami jika para nelayan sudah mendarat kembali. Di perkebunan, baik laki-laki maupun perempuan bekerja di kebun. Biasanya laki-laki bekerja sampai sore, sementara perempuan pulang ke rumah pada siang harinya untuk mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, membenahi rumah dan menyiapkan makanan bagi keluarga. Pola hubungan laki-laki dan perempuan pada masyarakat nelayan maupun perkebunan sama: tunduk pada patriarki. Tapi pada masyarakat nelayan, otoriti

² Mereka menyebut dengan nama tersebut karena banyak etnis Batak yang menjadi pemberi kredit, dan kemudian sebutan tersebut menjadi stereotipe.

tas perempuan jauh lebih tinggi, karena mereka biasa mengambil keputusan dalam keluarga ketika suami melaut untuk kurun waktu yang panjang. Tidak ada peluang yang sama bagi perempuan di perkebunan.

Namun kondisi ekonomi kedua masyarakat sama-sama terbatasnya, terutama karena mereka tidak punya akses ke fasilitas dan infrastruktur sebagaimana penduduk di perkotaan. Dalam situasi seperti ini, perempuan desa paling rentan, terutama dalam masalah kesehatan dan pendidikan, karena fasilitas untuk kedua bidang ini sedikit, atau tidak ada. Keluarga desa cenderung memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki ke-timbang anak perempuannya. Laki-laki dianggap harus jadi penerus ekonomi keluarga dan di masa depan akan merupakan tulang punggung masyarakat. Budaya patriarki yang sudah berakar-kuat berakibat buruk bagi perempuan. Laki-laki dipancangkan sebagai pemimpin, sementara perempuan, yang memang berpendidikan rendah, dibatasi aksesnya kepada sumberdaya produktif. Akibatnya, perempuan sulit untuk diserap dalam lapangan pekerjaan.

Secara sosial dan budaya, penghargaan masyarakat terhadap perempuan sangat rendah. Sikap ini membuat masyarakat menganggap pekerjaan yang dilakukan perempuan di rumah bukan pekerjaan, dan dalam kegiatan di luar rumah, perempuan mengalami diskriminasi dalam pengupahan dan pemberian status. Perempuan yang bekerja di perkebunan kebanyakan berstatus buruh harian lepas. Jika mereka bolos satu kali saja, mereka akan langsung tidak dipekerjakan kembali. Hal ini tidak terjadi pada laki-laki. Keadaan ini mempunyai dampak besar bagi organisasi perempuan. Mereka tidak mung-

Tabel 1.
Penduduk Deli Serdang Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SD	136.641	111.211	247.852
SMTP	130.591	86.796	217.387
SMTA Umum	104.665	57.717	162.382
SMTA Kejuruan	75.542	35.794	111.336
Diploma	5.928	13.468	19.396
Universitas	16.051	13.349	29.400
Jumlah	469.418	318.335	787.753

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker.

kin mengajak anggota untuk berkumpul pada siang hari. Sementara itu, perempuan sukar mendapat izin dari suami untuk menghadiri pertemuan pada malam hari. Satu-satunya waktu yang tersedia bagi organisasi perempuan adalah mengadakan pertemuan pada sore hari.

“Serikat Perempuan Independen (SPI) Serdang Bedagai sulit mengumpulkan anggota untuk rapat pada siang hari karena mereka kebanyakan buruh harian lepas. Sekali saja mereka tidak datang bekerja, maka mereka dipecat. Mereka akan sulit untuk mendapat kesempatan menjadi buruh harian lepas kembali, karena pasti sudah ada yang menggantikan posisinya. Karena itu, jam rapat kita adalah setelah wirid malam”.³

Pekerjaan sebagai buruh perkebunan tidak memberi nafkah yang cukup untuk hidup secara layak. Guna menambah pendapatan, untuk dapat membangun rumah serta mendukung perekonomian keluarga, banyak perempuan yang menjadi Tenaga Ker-

³ Wawancara dengan Endang, Pengurus Dewan Pelaksana Desa Bintat SPI Serdang Bedagai, 23 Mei 2012.

ja Indonesia (TKI) di Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perempuan di wilayah ini memikul beban ganda: selain bertanggungjawab atas urusan rumah tangga, mereka juga bekerja untuk mencari nafkah.

Kemiskinan yang diderita para perempuan, serta tidak adanya akses kepada pendidikan dan informasi, membuat kaum perempuan di kawasan ini tidak memiliki rasa percaya diri. Mereka bahkan hampir tidak punya pengaruh di dalam keluarga mereka sendiri, jangankan memiliki suara di desa.

“Dulu, sebelum masuk organisasi, saya begitu takutnya masuk ke kantor desa, sampai saya bahkan melepaskan sandal sebelum masuk”.⁴

Meskipun mereka sibuk mengurus rumah tangga dan bekerja di kebun, kebebasan bergerak perempuan di wilayah ini acap dihambat oleh laki-laki dalam keluarga mereka sendiri. Sebelum terjadinya perubahan dan perkembangan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik, perubahan sosial lebih dulu terjadi akibat hadirnya gerakan perempuan. Beberapa perempuan dalam masyarakat di daerah ini mulai menyadari ada yang tidak tepat dengan kondisi mereka. Sekitar tahun 1990an, dua organisasi perempuan, Hapsari di Deli Serdang dan sekitar, serta Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada), mulai aktif bergerak untuk merespon permasalahan di sana dan mengubah keadaan. Dua organisasi ini memberikan penyadaran atas ketidakadilan gender dan memberikan perspektif feminis kepada para perempuan

di wilayah itu.

Pendiri Hapsari, Lely Zailani, merasakan kegelisahan mendalam melihat berbagai masalah ketidakadilan gender yang dialaminya di dalam keluarga: beban kerja yang cukup berat sebagai anak perempuan, tekanan ekonomi yang menyebabkan hidupnya bersama sang Ibunda (alm.) selalu prihatin, serta kuatnya “garis batas” yang membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dalam keluarganya. Hapsari dan Pesada merupakan organisasi yang berperspektif feminis. Anggotanya dididik untuk memahami dan menyadari ketidakadilan gender, serta melakukan perjuangan dan pelayanan untuk mengakhiri ketidakadilan tersebut. Kegelisahan yang mirip juga dirasakan oleh salah satu pendiri Pesada, Dina Lumbantobing. Dina mengamati sekian pola kebijakan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan, seperti kebijakan Keluarga Berencana (KB), sistem birokrasi, dan budaya yang berlaku di Sumatera Utara, khususnya di daerah Toba. Dina tadinya mempunyai asumsi bahwa kaum perempuan mempunyai waktu lebih senggang, karena kegiatannya cuma mencari kutu dan duduk bergosip, dan tidak menyadari bahwa hal itu adalah akibat dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Organisasi Perempuan, oleh Perempuan untuk Masyarakat

Kondisi sosial budaya dan konstruksi gender meletakkan perempuan pada posisi lemah dibandingkan dengan laki-laki di dalam masyarakat. Ini melahirkan kebutuhan pada perempuan untuk berorganisasi. Hapsari pada awalnya merupakan organisasi kaum ibu

⁴ Wawancara dengan Kurniati, SPPN Serdang Bedagai, 22 Mei 2012.

di tingkat desa yang dipelopori oleh seorang perempuan desa biasa. Hapsari, yang muncul di masa Orde Baru, mengambil strategi tidak berseberangan dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan menjunjung “normativitas ibu” sebagai nilai penting dalam masyarakat. Mereka memutuskan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk merespon kebutuhan pendidikan anak yang kala itu tidak tersedia. Mereka melibatkan para ibu untuk aktif dalam mendidik anak secara kolektif. Karena upaya ini sesuai dengan kebutuhan para ibu di daerah itu, Hapsari kemudian bisa mengumpulkan perempuan. Ternyata kebutuhan akan PAUD mampu memobilisasi kaum ibu untuk aktif terlibat dalam menjawab kebutuhan mereka sendiri.

Pesada yang sebelumnya bernama Sada Ahmo pertama kali didirikan di daerah terpencil wilayah suku Pakpak di Kabupaten Dairi. Pesada mengamati kebiasaan kaum laki-laki suku Pakpak di daerah perkebunan: setelah bekerja di perkebunan pagi hari, siang sampai sore mereka cenderung duduk-duduk di lapo (warung) menghabiskan kopi. Berlama-lama di lapo merupakan kebanggaan para laki-laki, karena di tempat itulah mereka mengakses informasi, dan itu merupakan ranah publik bagi mereka. Sementara itu, para perempuan bangun dinihari untuk menyiapkan makanan bagi suami dan anggota keluarga, dan setelah itu mereka juga bekerja di perkebunan. Pulang dari kerja di perkebunan, para perempuan langsung kembali ke rumah untuk menyiapkan makan siang dan malam. Setelah itu mereka bekerja lagi membereskan rumah. Kualitas hidup kaum perempuan jauh dari harapan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perem-

puan tidak menikmati makanan yang istimewa, karena mereka menyisihkannya untuk para suaminya. Jam kerja perempuan jauh lebih panjang dibanding laki-laki. Sementara itu, kesejahteraan keluarga lebih dinikmati kaum laki-laki. Apabila perempuan ditinggal suaminya, mereka tidak memperoleh warisan, karena warisan jatuh pada keluarga laki-laki sepeninggal suami. Perempuan tidak memiliki aset sumberdaya produktif yang dapat menanggung kehidupan mereka, karena laki-laki yang menguasai aset tersebut. Pesada berdiri atas keprihatinan pihak dari luar masyarakat setempat, bahwa peran dan posisi perempuan tidak dihargai dalam kondisi sosial Dairi yang sangat didominasi oleh laki-laki.

Ada perbedaan yang mendasar atas kemunculan dua organisasi tersebut. Hapsari berawal dari perempuan penduduk lokal yang mengorganisasi diri, sementara Pesada muncul dari kekuatan perempuan dari luar desa, yang mengorganisasi perempuan setempat untuk menjalankan sebuah program. Kedua organisasi bertahan sejak tahun 1990-an sampai sekarang, dengan jaringan yang terus semakin luas. Secara sosial, Hapsari memiliki lebih banyak anggota suku Melayu dan campuran Jawa-Melayu, dengan budaya yang relatif bersifat parental. Sementara itu, anggota Pesada sebagian besar adalah orang Batak, yang memiliki kebudayaan yang bersifat patrilineal. Budaya parental dari etnik Jawa-Melayu memiliki kecenderungan untuk memberikan peran kepada suami maupun istri dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan aset. Perempuan juga menjadi pengelola keuangan keluarga, meski laki-laki tetap menjadi pengambil keputusan utama sebagai kepala keluarga. Se-

mentara itu, dalam budaya Batak, peran laki-laki sangatlah sentral: pengambilan keputusan ada di tangan laki-laki dan keluarga laki-laki, demikian juga kepemilikan aset dan pengelolaan uang. Situasi ini menunjukkan bahwa pada awalnya, Hapsari merupakan upaya perubahan sosial oleh perempuan dari dalam masyarakat, sementara Pesada merupakan upaya perubahan sosial oleh perempuan yang dari luar.

Dalam kurun perkembangan yang cukup panjang, terutama ketika Hapsari berhubungan dengan Hivos dan memperoleh dukungan selama 10 tahun, program yang dikembangkan organisasi itu meluas, meski mereka tetap mempertahankan PAUD. Perluasan kerja organisasi juga melibatkan kaum ibu yang telah aktif dalam penyelenggaraan PAUD. Perluasan kerja sekaligus menjalankan program yang ditawarkan Hivos — yang mencakup pemberdayaan perempuan secara sosial, advokasi mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi usaha, pelatihan kepemimpinan untuk perempuan, dan pendidikan politik untuk perempuan. Sementara itu, Pesada juga memperoleh dukungan untuk program, yang pada tahun 1990-an lebih banyak bergerak pada pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, advokasi untuk perempuan, serta ekonomi usaha. Pesada dan Hapsari sama-sama menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jakarta, seperti Kalyanamitra yang memberikan bekal pengetahuan melalui pelatihan mengenai relasi kuasa gender. Sebagai organisasi perempuan yang berbasis massa, dalam perkembangan dari tahun 1990-an sampai 2000-an, keduanya telah mencapai titik yang relatif sama,

karena kedua organisasi berjalan dalam koridor yang tidak hanya bersifat lokal, tapi terintegrasi dengan organisasi perempuan berskala nasional, dan bekerjasama dengan penyandang dana internasional. Oleh karena itu, ada sejumlah agenda kerja keduanya yang memiliki kesesuaian satu sama lain, meski dalam konteks sosial yang berbeda, dan masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda.

Jika kita lihat dari kemunculannya yang berbeda dan akhirnya menuju ke perkembangan yang relatif sama, yaitu sebagai organisasi perempuan payung, maka Pesada maupun Hapsari telah memiliki dukungan politik dari kaum perempuan di tingkat akar rumput. Keperluan dan kepentingan para perempuan akar rumput itu terpenuhi melalui organisasi. Dengan demikian, organisasi telah menjadi modal kuasa bagi perempuan dalam mengaktualisasikan diri di ruang yang bersifat privat maupun di ruang publik. Di ruang privat, keberadaan organisasi telah meningkatkan posisi negosiasi perempuan terhadap suaminya. Misalnya, anggota Hapsari menjadi memiliki kemampuan untuk mengajak suami berbagi peran dalam rumah tangga secara setara. Anggota Pesada jadi mampu memiliki aset produktif yang memberikan kontribusi bagi keluarga, setara yang diberikan oleh suami. Kedua hal itu sama-sama meningkatkan kuasa perempuan dalam relasi gender di domain privat. Sementara itu, di tingkat publik, pengalaman mengelola organisasi di domain publik memberikan para anggota kedua organisasi kemampuan berartikulasi jika dibandingkan dengan sebelum mereka berorganisasi. Melalui organisasi, mereka memperoleh pengetahuan sekaligus jaringan sosial perempuan, dan

ikut andil menguatkan kuasa perempuan dalam membangun relasi sosial di ruang publik bersama laki-laki.

Pemetaan Wilayah Kerja dan Kegiatan Organisasi Perempuan

Secara garis besar, visi dan misi serta program kerja Hapsari dan Pesada di awal kelahirannya adalah untuk mencoba menjawab permasalahan ketidakadilan gender dan kemiskinan. Kedua organisasi yang muncul di masa Orde Baru tersebut mengalami banyak rintangan, dan pada awalnya mereka cenderung berkembang secara diam-diam. Hal ini disebabkan kondisi politik masa itu, dalam mana pemahaman masyarakat desa mengenai organisasi adalah hanya organisasi bentukan pemerintah yang dianggap resmi, dan aman sebagai wadah berkumpulnya masyarakat. Bagi perempuan desa, organisasi semacam itu adalah PKK. Perempuan desa cenderung lebih suka bergabung dengan PKK dibanding dengan organisasi bentukan masyarakat sendiri, karena mereka berpikir bahwa ikut organisasi lain berbahaya dan akan dikaitkan dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan kesulitan tersebut, Hapsari dan Pesada menyusun *strategic plan* awal melakukan pendekatan ke masyarakat dengan cara membuat taman bermain bagi anak-anak desa.

Program kerja Hapsari dan Pesada dibuat berdasarkan kebutuhan dan permasalahan perempuan desa menuju tercipta kesetaraan gender. Supaya dapat menjawab permasalahan perempuan di daerah serikat, Hapsari selalu menjaring pendapat orang, atau turun langsung menanyakannya ke ang-

gota serikat mereka.

Dalam pembuatan program, Hapsari memiliki empat pedoman dasar layanan yang terdapat di AD/ART mereka, yakni:

1. Melibatkan langsung penerima manfaat program.
2. Membuka akses dan menyiapkan pengurus.
3. Memberikan pendampingan bagi pengurus serikat.
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang bersifat menumbuhkan.
5. Berkomitmen menjalankan tugas-tugas organisasi.

Tidak jauh berbeda dengan Hapsari, Pesada membangun misi dan program-programnya lewat pemahaman sosial, ekonomi dan politik di Sumatera Utara dan daerah-daerah sekitar, serta dalam tingkatan makro. Sebagaimana ketidaksetaraan gender dan kemiskinan adalah utama, Pesada mengembangkan program penguatan untuk perempuan, anak, keluarga miskin dan kelompok marginal lainnya. Untuk itu, seluruh program Pesada mengacu kepada lima tingkat penguatan, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.
2. Akses ke sumberdaya (pendidikan, keahlian, informasi, pinjaman, dsb.).
3. Kesadaran kritis.
4. Keikutsertaan dalam pembuatan keputusan di rumah tangga, lingkungan, dan ruang publik/politik.
5. Mengontrol sumberdaya, implementasi pembuatan keputusan, serta mencakup keterwakilan di semua arena pengambilan keputusan.

Kerangka kerja tersebut digunakan di semua tahap dengan metode partisipasi, mulai dari evaluasi perencanaan tahunan sampai rencana kerja enam-bulanan dan rencana strategis tiga-tahunan, disamping melakukan usaha-usaha penguatan.

Pesada secara konsisten bekerja secara langsung melalui penguatan perempuan di 11 kabupaten di Sumatera Utara, sebagian besar di daerah pedesaan termasuk di daerah bencana, seperti di Pulau Nias, dan melalui membangun jaringan, kapasitas, dan advokasi di seantero Sumatera. Selain itu, Pesada menganggap diri mereka ahli dalam bidang pengarusutamaan-gender dan pemberdayaan perempuan (terutama di bidang ekonomi dan politik), serta dalam pengembangan organisasi di Sumatera dan pada tingkat nasional.

“Pendekatan Pesada bukan pendekatan feminis radikal yang menyalahkan laki-laki. Pendekatan kami tidak radikal. Jika radikal, tidak dalam arti negatif, seperti yang dipikir orang”.⁵

a. Penguatan Ekonomi

Walaupun Hapsari kini lebih fokus pada pengembangan dan pergerakan, mereka tetap mempunyai program yang dijalankan oleh tiap serikatnya untuk masyarakat. Untuk program kegiatan ekonomi, beberapa tahun lalu Hapsari mendirikan Credit Union (CU). Serikat Hapsari memiliki unit usaha guna peningkatan sumberdaya ekonomi dan untuk mendukung kelancaran program pemberdayaan. Unit usaha ini sekaligus me-

ambah penghasilan anggota, antara lain membuat sabun, kerajinan tangan, menjual batik, dan menjalankan usaha kedai kopi. Salah satu program pemberdayaan ekonomi Hapsari adalah *livelihood*, dengan menggunakan strategi advokasi penguatan kapasitas perempuan marjinal untuk keberlanjutan penghidupan. Melalui program ini, Hapsari memperluas teknik-teknik inovatif melakukan pengorganisasian dan advokasi, dalam rangka ikut serta mempromosikan kerja-kerja penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan efisien. Kegiatan ekonomi produktif juga dilakukan oleh semua serikat perempuan di bawah payung Hapsari. Mereka misalnya membuat sabun cuci dan cairan pembersih lantai. Produk tersebut mereka pasarkan di warung-warung di desa masing-masing. Kegiatan ini tidak hanya membantu menambah pendapatan kaum perempuan, tapi juga menambah uang kas organisasi, yang mereka ambil dari keuntungan penjualan produk.

Wilayah pengorganisasian difokuskan pada kelompok-kelompok di daerah yang selama ini dianggap belum maju. Penentuan dilakukan misalnya dengan menilai bahwa aspirasi kaum perempuan kurang diperhatikan, atau belum didengar serta jarang turut serta dalam proses pembangunan. Lewat program ini, Hapsari memfasilitasi salah satu serikat perempuan anggotanya, yaitu Serikat Perempuan Independen (SPI) Kulonprogo, di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menumbuhkan kader-kader baru dari kalangan perempuan basis, dengan tipe kelompok ‘perempuan miskin desa’. Ini adalah kelompok perempuan marjinal yang selama ini belum memiliki akses kepada pengetahuan (seperti peningkatan kapasitas diri, pe-

⁵ Wawancara dengan Dina Lumbantobing, Pendiri Pesada, Medan, 25 Mei 2012.

ngembangan keterampilan), teknologi, permodalan dan jaringan pasar.

Jika dibandingkan dengan Hapsari, Pesada telah jauh lebih lama dalam menjalankan CU, yaitu pada 1994. CU Hapsari terbentuk pada 2010. Pesada membangun kelompok simpan-pinjam dengan memilih bentuk CU tersebut. Menjalankan CU pada dasarnya memberikan pendidikan kepada para anggotanya, dan jika diusut, munculnya berbareng dengan gerakan ekonomi makro berperspektif feminis. Ini berbeda dengan model yang dikembangkan oleh Credit Union Coordinator Organization (CUCO), yang bersifat inklusif dengan memfasilitasi perempuan maupun laki-laki.

Pendiri Pesada berpikiran bahwa, untuk kesetaraan gender, organisasi tidak bisa mudah langsung masuk dengan gaya inklusif. Karena itu, pendekatan yang mereka lakukan adalah mengubah pandangan masyarakat tentang aset yang dikuasai perempuan. Secara kultural, upaya tersebut radikal berseberangan dengan budaya patriarki. Untuk mengatasinya, Pesada melakukan pendekatan kepada para perempuan lebih dulu. Kaum laki-laki diharapkan kemudian dapat menyepakati bahwa perempuan pun perlu menguasai aset dan tidak tergantung pada laki-laki, andaikan ada musibah pada laki-laki, atau terjadi perceraian. Strategi ini tidak secara instan berhasil dan banyak mendapat tantangan. Ada tuduhan bahwa CU tidak sesuai aturan dan bersifat eksklusif karena hanya membidik perempuan. Akan tetapi Pesada tetap berusaha, karena mereka yakin bahwa perjuangan kesetaraan gender dimulai dari pendekatan yang menguatkan perempuan terlebih dulu sebagai kelompok masyarakat yang paling tertindas. Ini menja-

di poin penting dalam napak tilas perjalanan Pesada sebagai organisasi yang berhasil memimpin dan mengembangkan usaha CU di kalangan perempuan pedesaan. Pada 2010, jumlah kelompok CU Pesada mencapai 131 kelompok dengan 9.040 anggota, dan 104 kelompok telah bergabung menjadi dua CU besar di empat kabupaten (Dairi, Pakpak Barat, Nias Selatan dan Nias Induk).

b. Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Hapsari dan Pesada memiliki keprihatinan atas isu kekerasan terhadap perempuan. Salah satu serikat mereka, SPI Labuhanbatu, telah menentukan fokus program kerja yaitu isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Daerah perkebunan kelapa sawit sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, baik KDRT maupun kekerasan seksual. Sebagian besar pengurus dan kader-kader SPI Labuhanbatu adalah perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka kemudian mampu mengatasinya dan menjadi pembela bagi perempuan korban yang lain.

Saat ini, program utama SPI Labuhanbatu berjudul “Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender”. Program utama ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain, pendidikan penyadaran gender, dukungan untuk perempuan korban kekerasan, advokasi dan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta pendidikan dan promosi demokrasi dan politik bagi perempuan pedesaan. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dinas terkait serta organisasi perempuan tingkat daerah dan nasional.

SPI juga mengelola Rumah Aman untuk Perempuan dan Anak korban kekerasan di Labuhanbatu. Sepanjang 2008-2009, SPI Labuhanbatu mengelola tiga rumah tinggal sementara (dikenal juga dengan sebutan Rumah Aman) untuk perempuan korban kekerasan berbasis gender di Kota Rantau Prapat, dan mengelola 10 Posko Pengaduan KDRT di desa-desa yang dikelola oleh kelompok-kelompok anggota SPI.

Tidak jauh berbeda, kelompok dampingan Pesada, yaitu para penyintas Women's Crisis Center (WCC) Sinceritas, juga menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada 2010, WCC Sinceritas menangani 80 kasus yang didominasi kasus KDRT sebanyak 61 kasus. Kelompok ini melaksanakan diskusi rutin. Sikap dan sifat kepemimpinan peserta ternyata berkembang dalam forum ini, Pesada dan WCC menggunakannya untuk menelurkan kader mereka.

c. Program Pendidikan

Karena pada awalnya, Hapsari dan Pesada mendirikan taman bermain dan belajar anak (TBBA) sebagai strategi mendekatkan diri dengan masyarakat, sampai kini kedua organisasi masih mengembangkan program tersebut. Jumlah anak di pra-sekolah Pesada pada enam TBBA ada 148 orang (78 di antaranya perempuan), dengan persentase swadaya sekitar 70 persen. Di Nias, lima kelompok anak sehat telah dikelola oleh masyarakat lokal dan pemerintah (dengan mekanisme transfer manajemen). Hapsari sejauh ini memiliki sembilan TBBA yang tersebar di daerah-daerah Serikat Hapsari. Selain itu, Hapsari juga mengelola sekolah aliyah dengan tambahan kurikulum pendidikan

an gender dan hak asasi manusia (HAM).

d. Publikasi dan Media

Salah satu program publikasi yang dikelola Hapsari adalah radio komunitas. Radio komunitas merupakan salah satu media belajar bagi para anggota Hapsari untuk menjadi fasilitator dan narasumber. Di wilayah program kerjanya, yaitu di Nias, Pesada mengedarkan 500 eksemplar buletin dwibulanan bagi perempuan desa dalam bahasa lokal (*Febede Ndraalawe*). Sampai akhir 2010, mereka telah menerbitkan enam edisi.

e. Kegiatan Lain

Hapsari mengelola beberapa program lain, seperti pengaderan serta pelatihan bagi kader dan anggota serikat. Di sisi lain, Pesada memiliki program kegiatan disamping pengembangan usaha kecil dan mikro, yaitu partisipasi politik perempuan, advokasi, rumah aman perempuan, pelatihan dan pengembangan kapasitas jaringan.

Selain program yang memang telah dirancang dengan baik ketika rapat umum tahunan, Hapsari dan serikatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan, sesuai kebutuhan, seperti kegiatan tanggap-bencana ketika terjadi angin puting beliung. Kegiatan ini begitu menyedot perhatian dan apresiasi masyarakat, anggota serikat bertambah secara drastis pada 2011.

Jaringan Organisasi: Perluasan Modal Sosial Perempuan

Dari perkembangan Hapsari dan Pesada, muncul keperluan untuk membangun jeja-

ring di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Hapsari mempunyai 10 SPI di Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur, dengan 200 orang anggota. Serikat perempuan tersebut ada dalam Federasi Hapsari. Sementara itu, Pesada membangun jaringan dalam bentuk 131 kelompok CU, dengan 9.040 orang anggota di empat kabupaten dan satu WCC di Medan. Strategi mobilisasi Hapsari adalah membangun “persaudaraan perempuan” guna mencapai kesetaraan relasi gender (yang mereka istilahkan sebagai berbagi peran secara setara). Ini adalah tindakan kolektif yang kemudian menjadi modal sosial kaum perempuan untuk menembus ruang publik yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Dalam konteks ini, Hapsari — yang mula pertama masuk melalui ranah domestik — semakin memiliki kemampuan membuka akses ke ranah publik bagi anggotanya. Hal ini berkontribusi dalam memposisikan perempuan dalam kehidupan sosial, serta ikut menentukan urusan berbagi peran dalam masyarakat yang harus dimainkan perempuan bersama laki-laki. Ibu Habibah, misalnya, menyatakan bahwa dengan ikut aktif dalam organisasi perempuan, paling tidak ia dapat menunjukkan kepada tetangga tentang pembagian peran yang setara di dalam rumah tangga.

“Saya melihat ada ketidakadilan di dalam masyarakat. Ketika suami memegang sapu dan membersihkan rumah, para tetangga laki-laki mengolok-olok seolah-olah pekerjaan itu hina bagi laki-laki. Tetapi ketika perempuan memegang cangkul dan carit, mereka diam dan tidak berkomentar. Seharusnya me-

reka malu bahwa kami juga mengerjakan pekerjaan laki-laki”⁶.

Sebagai organisasi yang berupaya meningkatkan kapasitas perempuan untuk mampu berbagi peran bersama laki-laki, Hapsari mengembangkan strategi. Strategi dirancang dengan tujuan agar menjadi nilai kesetaraan gender yang dipraktikkan oleh anggota keluarga aktivis Hapsari, dan kemudian menjadi nilai masyarakat. Sebagai dasar dari strategi, Hapsari dan Pesada memasukkan nilai-nilai mengenai kesetaraan gender ke dalam AD/ART mereka. AD/ART Hapsari maupun Pesada lengkap mengatur jalannya organisasi, termasuk kode etik yang harus dipatuhi anggota. Bentuk penyelesaian masalah dan konflik juga diatur di dalamnya, dan AD/ART itu senantiasa diperbaharui.

Dalam konteks jaringan, tiap anggota berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan adil gender, yang oleh Hapsari diistilahkan sebagai konsep “pembagian peran” bagi seluruh anggotanya. Hapsari mengadakan pelatihan dengan tenaga pengajar anggota Hapsari yang senior. Kegiatan ini mereka sebut sebagai “belajar bersama”. Mereka tidak terlalu sering mengundang tenaga pengajar, dan yang diundang hanya orang tertentu saja karena keterbatasan dana, juga guna mendayagunakan sumberdaya manusia yang tersedia. Hapsari, yang didukung oleh Hivos sejak 1999-2000, mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut. Pelatihan untuk para kader bertujuan untuk memperkuat kemampuan anggota dalam

⁶ Wawancara dengan Habibah, Anggota SPI Serdang Bedagai, 23 Mei 2012.

mengelola dan memimpin Serikat Perempuan Independen.

Penentuan siapa yang boleh memperoleh pelatihan didasarkan atas penilaian dan pengamatan terhadap anggota. Yang terpilih adalah yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin dan berdedikasi sebagai kader, serta berkemauan untuk mengembangkan organisasi. Selain pelatihan, Hapsari menyelenggarakan kegiatan mengikuti seminar dan *workshop*. Jika mendapat undangan seminar, *workshop*, dan *training*, Dewan Eksekutif Hapsari akan mempertimbangkan dengan adil dan seksama siapa yang akan diutus. Adapun kriterianya adalah kebutuhan, pernah atau tidaknya sang anggota mengikuti kegiatan serupa, dan kesesuaian minatnya. Orang yang berhak mewakili Hapsari cenderung mereka yang telah mengikuti pelatihan tahap akhir, sehingga dapat memberi kontribusi dalam acara tersebut. Kader-kader tersebut harus siap jika dipilih oleh anggota untuk menerima mandat.

“Kader-kader yang siap, atau pemimpin yang baik, menurut kami adalah yang ketika ditugaskan oleh organisasi, tidak lagi akan berkata “tidak”, karena dia sudah menerima mandat dari organisasi”.⁷

Proses transformasi nilai-nilai lembaga diupayakan Hapsari dengan terus mencari dan mendorong tumbuhnya kader dan anggota yang mampu mengaplikasikan nilai yang terkandung di dalam AD/ART mereka

ke masyarakat yang lebih luas — atau setidaknya dalam kehidupan pribadi mereka. Transformasi nilai tersebut telah berjalan selama 14 tahun, dan oleh Hapsari dikatakan berhasil. Program dan kegiatan yang mereka adakan sering berhasil menyedot perhatian masyarakat, juga pemerintahan kabupaten dan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Hapsari tidak menolak untuk bekerjasama dengan pemerintah, bahkan perkumpulan ini mengisi ruang yang belum digarap oleh lembaga negara. Strategi berjejaring dengan berbagai pihak membuat anggota Hapsari merasa telah memperoleh manfaat sebagai anggota. Misalnya, mereka sering menjadi mitra pemerintah dalam program yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam beberapa hal, ini membuat para anggota menjadi percaya diri sebagai perempuan yang berpotensi, mandiri, bereksistensi dan memiliki keberanian. Rasa percaya diri tersebut juga semakin kuat karena mereka mengikuti bermacam *training* dan *workshop* yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan jaringan sosial. Paling penting, mereka sadar akan hak-hak mereka sebagai warganegara, dan paham akan pentingnya kesetaraan gender dan pembagian peran dalam keluarga maupun masyarakat.

Keberhasilan tersebut bukannya tanpa kekurangan, atau tanpa perjuangan terus-menerus. Sejauh ini, nilai-nilai yang mereka coba terapkan ke dalam kehidupan pribadi dan masyarakat belum sepenuhnya berhasil bagi anggota baru. Masih banyak suami yang belum mengizinkan para istrinya untuk mengikuti kegiatan organisasi, dengan alasan mereka harus menyelesaikan terlebih dulu pekerjaan rumah tangga. Perlu waktu,

⁷ Wawancara dengan Riani, Ketua Dewan Eksekutif Hapsari, Deli Serdang, 21 Mei 2012.

memang, untuk menyelesaikan masalah ini. Anggota senior Hapsari biasanya memberikan kiat agar tidak terjadi konfrontasi dalam hubungan suami-istri, dengan teknik istri harus melakukan negosiasi dengan suami, atau menyiasati dengan memasak masakan terlebih dulu bagi suami dan anak-anak. Jika bepergian lama, istri juga perlu untuk memasak masakan yang tahan lama, sehingga suami dan anak-anak bisa makan selama ditinggal ibunya. Untuk situasi yang rumit, para anggota lainnya akan membantu teman mereka dengan mencoba semampu mungkin melakukan negosiasi dengan suami itu. Hasil yang diperoleh cukup lumayan, bahkan dalam banyak kasus, ada suami menjadi bangga karena istrinya bermanfaat bagi masyarakat luas dan tenaga dan pikirannya dipakai untuk membantu pemerintah. Dalam situasi seperti ini, sangat terasa bahwa Hapsari mampu membangun rasa persaudaraan di antara sesama anggota, sekaligus ikut andil dalam penguatan konstruksi nilai tentang posisi dan peran perempuan di ranah publik. Anggota merasa telah menimba manfaat, dengan melihatnya sebagai proses pembelajaran dan penyadaran, seperti yang dikatakan oleh Juariah:

“Banyak manfaat yang kami rasakan. Kami mengenal apa itu KDRT, dan apa itu pembagian peran dalam keluarga. Kami juga mendapat tambahan uang saku dari kegiatan ekonomi yang kami kerjakan, bisa meminjam di koperasi Hapsari, sehingga kami tidak lagi memakai jasa bakri (Batak kredit), hahaha...”⁸

⁸ Wawancara dengan Juariah, Anggota SPI Deli Serdang, 24 Mei 2012.

Apa yang dikatakan Juariah menunjukkan bahwa setelah berorganisasi, perempuan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, dan melalui kegiatan ekonomi kolektif, kaum perempuan mampu keluar dari jeratan rentenir. Melalui organisasi pula, modal sosial dalam jaringan dimanfaatkan oleh para anggota untuk berdagang dengan anggota lain, misalnya menjual barang dagangan yang berasal dari daerah lain, atau berbisnis ketika mengikuti seminar dan *workshop* di luar kota. Berjejaring juga digunakan oleh mereka untuk mengajak calon anggota baru.

Pesada juga memiliki jaringan di wilayah Sumatera Utara yang ditopang oleh Credit Union dan Women Crisis Centre. Dalam memperluas jaringan dan gerakan perempuan di tingkat masyarakat, Pesada memulai mengkoordinasi sebuah forum yang terdiri dari 29 LSM di Sumatera (FBCB), dan konsisten bekerja dengan ratusan jaringan aktivis perempuan di Sumatera Utara, LSM perempuan dan WCC di delapan provinsi pulau Sumatera, serta Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di tingkat nasional. Untuk tingkat internasional, Pesada bermitra dengan Just Associates (JASS) dan The Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPABAE). Pesada memiliki syarat bagi yang ingin menjadi mitra kerja mereka, yakni bukan Bank Dunia, bukan korporasi yang merusak lingkungan, dan harus organisasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai Pesada. Hingga saat ini Pesada belum pernah terikat kerjasama dengan pemerintah. Ini yang membuat Pesada berbeda dengan Hapsari.

Kegiatan Hapsari dan Pesada dalam

konteks lokal, dan keaktifannya berjejaringan di tingkat nasional dan internasional menunjukkan bahwa proses transformasi sosial di Indonesia tidak dapat dilihat dalam konteks sempit semata. Konteks transformasi itu berada pada ranah penguatan lokal, pengaruh nasional dan pengaruh global. Penguatan lokal di Indonesia terkait dengan proses desentralisasi yang dalam banyak hal memperkuat organisasi perempuan non-pemerintah karena tidak ada represi terhadap pengembangan jaringan organisasi massa. Sementara itu, bermitra dengan lembaga donor internasional juga memberi pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan bagi organisasi perempuan Sumatera Utara untuk berkembang dan menjalankan program lebih luas. Berjejaring dengan warga tapi juga dengan organisasi masyarakat sipil merupakan bagian dari strategi untuk melakukan transformasi sosial yang luas.

Strategi Kerja Organisasi

Pasca 1998 setelah rezim Orde Baru tumbang, Hapsari dan Pesada mulai membuka program kerja dan jaringan mereka. Karena konteks sosial dan politik di Indonesia berubah, maka Hapsari mengubah pola gerakan. Perubahan pertama yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah. Pasca 1999, pemerintah secara terbuka menerima kehadiran LSM. Hapsari mulai membangun kemitraan dengan pemerintah di kawasan dimana mereka bekerja. Hal tersebut mereka ikuti dengan membuat organisasi tampil lebih formal, antara lain dengan mengurus legalitas formal (berbadan hukum dengan akte notaris, mendaftar ke kantor Kesbang, dsb.), memasang papan

nama, memasang bendera, dan melakukan dialog-dialog formal dengan kalangan pemerintah setempat, hal-hal mana tidak dilakukan pada zaman Soeharto berkuasa.

Guna berkembang, Hapsari berjejaringan dengan KPI. Saat mula pertama KPI berdiri, kebetulan Lely Zailani adalah anggota presidium sektor nelayan. Tidak lama kemudian, Lely, yang mewakili Hapsari, mengundurkan diri dari KPI dan memilih Solidaritas Perempuan (SP), yang dirasakan lebih cocok dengan Hapsari. Sempat menjadi pengurus beberapa periode, akhirnya Lely kembali hengkang bekerjasama dengan LSM lain karena bentuk organisasi SP dinilai 'tangung' hanya komunitas dan bukan serikat seperti cita-cita Hapsari. Dari pengalaman ini akhirnya Lely, sebagai pendiri Hapsari, memutuskan untuk membangun jaringannya sendiri.

"... Mereka menyebut diri sebagai Komunitas SP Deli Serdang, tapi kalau SPI Kabupaten Deli Serdang teritorinya adalah Deli Serdang, kepengurusan kabupaten, kecamatan, desa. SP tidak. Sekelompok orang itu, ya, komunitas. Ini tidak cocok dengan kami, jadi kami berbenturan. Kami memang harus memilih salah satu. Akhirnya kami pilih Hapsari dan memutuskan membangun jaringan sendiri, karena ternyata tidak bisa bergabung di SP. Aku ke Yogyakarta untuk membangun serikat".⁹

Berdasarkan pengalaman itu, akhirnya terjadi perubahan bentuk organisasi Hapsari pada 2000 mulai dari pembentukan serikat

⁹ Wawancara dengan Lely Zailani, Ketua Dewan Nasional Hapsari, Jakarta, 28 Juni 2012.

sampai penggabungan serikat-serikat dalam satu wadah bersama, yaitu sebagai federasi. Dalam bentuk federasi, jelas bahwa bentuk organisasi yang dibangun Hapsari adalah organisasi massa perempuan. Ini memberikan dampak pada keharusan merumuskan pembagian peran antara federasi dan para serikat yang merupakan anggotanya.

Dengan bentuk federasi, Hapsari membuat program membangun dan memperkuat legitimasi dan wibawa organisasi dan seluruh serikat anggotanya di mata publik (masyarakat dan pemerintah), memperkuat kepemimpinan perempuan basis, melakukan kaderisasi kepemimpinan dan mengkampanyekan isu-isu gerakan perempuan di tingkat lokal maupun nasional. Sedangkan dalam Serikat Hapsari, program yang difokuskan langsung pada berbagai isu konkrit guna menjawab kebutuhan individu perempuan anggota serikat, mulai dari pendidikan untuk anak-anak pra-sekolah, sampai antara lain usaha simpan-pinjam, penghapusan KDRT, konservasi lingkungan.

Tidak hanya perubahan sistem politik skala nasional, perubahan politik dan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang turut mempengaruhi Hapsari dan serikat-serikatnya. Pemekaran wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai ditanggapi Hapsari dengan menumbuhkan serikat di wilayah Kabupaten Sergai, Serikat Perempuan Independen (SPI) Sergai dan Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) Sergai, yang secara otomatis menambah keanggotaan Hapsari. Momentum ini memberi peluang bagi perempuan desa anggota Hapsari, untuk belajar menjadi pemimpin organisasi di serikatnya masing-masing.

Untuk merambah dunia politik dan ma-

suk pada kepemimpinan desa secara formal, Hapsari secara organisasi juga menanggapi perkembangan politik dengan kehadiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 2001, Hapsari melakukan berbagai upaya mendorong perempuan desa anggotanya untuk menduduki posisi-posisi pengambilan keputusan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Hal ini sesuai bunyi yang tertuang pada bagian ketiga pasal 104 dan pasal 105 (secara khusus mengatur tentang otonomi desa) dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut. Tidak hanya pegang posisi dalam jajaran pemerintah, perwakilan dari Hapsari juga mampu berpartisipasi melakukan negosiasi serta memberikan pendapat.

Selain masuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan, para anggota juga berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan kepercayaan mengelola program-program yang dibuat oleh pemerintah, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), usaha pembibitan dengan dinas kehutanan setempat (SPPN Serdang Bedagai), dan Askessos dengan Kementerian Sosial RI. Disamping itu, dalam rangka kepentingan strategi jangka panjang, Hapsari dan serikatnya menjalin hubungan dengan aparat birokrasi pemerintah, seperti kepolisian, rumah sakit dan puskesmas.

Hapsari tidak sekadar membuat program untuk menjawab permasalahan yang dihadapi perempuan desa, walaupun beberapa programnya masih serupa dengan PKK — membuat kerajinan yang ‘khas perempuan’, misalnya — Hapsari lalu juga fokus untuk memperjuangkan apa yang hendak mereka capai: komitmen untuk membangun serikat

di tujuh wilayah lain di luar Sumatera Utara. Pertimbangan adalah jika ingin wilayah kerja menjadi luas dan bukan hanya di wilayah Sumatera Utara, maka kapasitas pengurus yang merekrut anggota perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan penataan organisasi dan pembangunan jaringan. Mereka banyak menyelenggarakan pembahasan soal arah pergerakan perempuan, sehingga program-program yang diadakan juga meningkatkan kapasitas pengurus dan pengelolaan organisasi.

Perkembangan Hapsari setelah 14 tahun menjadi organisasi non-pemerintah tampak signifikan dengan terbentuknya 10 serikat perempuan dalam federasi mereka. Perkembangan tersebut tidak hanya mencakup Sumatera Utara, tapi sampai Sulawesi Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur, dengan jumlah anggota sekitar 2.000 perempuan. Demi mencapai visi dan misi organisasi, Hapsari memperluas gerakan ke ranah politik. Rapat internal yang dihadiri para petinggi organisasi mendiskusikan dan membuat strategi pencalonan sosok untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu). Keinginan mereka merupakan bukti dari komitmen untuk mewujudkan perubahan kehidupan menuju lebih berkeadilan dan meninggikan derajat kaum perempuan yang selama ini direndahkan. Mereka menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tidak berpihak terhadap perempuan, dan rakyat harus mengetahui hal tersebut.

Pada awal pembentukannya, Pesada adalah Yayasan Sada Ahmo (YSA), yang mulai menguat pada 1994. Para pendiri mendedikasikan YSA bagi penguatan perempuan dan pembangunan organisasi pe-

rempuan. Saat Indonesia mengalami krisis moneter dan perubahan politik, Pesada menegaskan programnya dengan menggabungkan penguatan perempuan melalui pendidikan politik pada 1998/1999 serta penguatan partisipasi dan representasi perempuan di arena politik mulai 2003. Agar lebih independen, transparan, demokratis dan partisipatif, pada Agustus 2003, YSA memutuskan untuk berubah status menjadi Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada), dan merumuskan visi dan misi yang baru.

Berbeda dengan Hapsari, ketika terjadi perubahan suasana politik di Indonesia, Pesada tidak membuka afiliasi dengan pemerintah. Kebijakan ini diambil guna menghindari berbagai hal yang dapat mengganggu posisi Pesada sebagai ornop, menghindari konflik kepentingan dan kemungkinan terjadi kooptasi yang sangat mungkin terjadi dalam proses, dan menjaga kemandirian politik. Bagi Pesada, yang penting adalah tercapainya Indonesia yang adil, makmur dan berdaulat.

Pesada terdiri dari orang-orang yang dididik untuk memahami secara kritis masalah ketidakadilan gender dan makna feminisme sebagai perjuangan perempuan untuk memperoleh kesejahteraan secara adil. Meskipun organisasi memberikan pelayanan ekonomi, pada dasarnya, Pesada lebih banyak memberikan pendidikan penyadaran dibandingkan menanamkan kesadaran bahwa perempuan perlu untuk memiliki aset. Melalui analisis gender, Pesada berupaya membangun kesadaran kritis para perempuan dan dampungnya dan mereka yang berada dalam jaringan kerjanya. Dengan menggunakan analisis dan perspektif gender, Pesada mendorong agar tidak lagi ada diskrimi-

nasi terhadap perempuan, dan para anggota didorong untuk memiliki posisi tawar mengenai aset produktif, misalnya tanah, yang secara kultural dikuasai laki-laki. Mereka memberi pemahaman agar tanah tidak dapat dipindahkuasakan ke laki-laki, dan bahwa hendaknya pihak laki-laki menandatangani kesepakatan akan kepemilikan aset perempuan. Demikian pula dengan harta benda seperti emas, yang dapat disimpan di brankas Pesada. Upaya ini berfungsi untuk melindungi aset milik perempuan, dan dalam beberapa hal telah memunculkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan aset. Meskipun demikian, karena faktor kultural memposisikan kuasa laki-laki atas perempuan, banyak upaya curang dari laki-laki, misalnya dengan memaksa istri untuk menggunakan namanya guna memperoleh pinjaman dengan jaminan aset milik perempuan.

Tantangan

Dalam melaksanakan visi dan misi, tampak bahwa kedua organisasi tidak hanya menjalankan strategi praktis saja, tetapi juga berstrategi untuk tujuan jangka panjang dan selalu menyesuaikan program dengan perkembangan politik dan permasalahan sosial masyarakat penerima program. Kendati kedua organisasi sudah cukup lama tidak mendapat bantuan dari lembaga donor asing, mereka tetap hadir karena mempunyai kekuatan yang berasal dari anggota organisasi sendiri.

Sejak berdirinya, Hapsari memiliki anggota yang tersebar di Sumatera Utara. Hal ini tidak serta-merta mengubah posisi anggotanya dalam rumah tangga mereka masing-masing. Banyak anggota Hapsari tidak

bebas berorganisasi karena dihalangi suaminya, tidak sedikit kader Hapsari juga mengalami ini. Jangankan untuk jadi pemimpin, kadang hanya sekadar untuk hadir dalam rapat organisasi, banyak anggota yang tidak saja harus menentang larangan suami, mereka juga menghadapi cemoohan masyarakat dan keluarga. Strategi Hapsari menjalin kerjasama dengan pemerintah sebagai mitra kerja terbukti sangat efektif dalam meleraikan persoalan ini. Karena Hapsari dan Serikat-serikatnya mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola beberapa program penting, lambat laun masyarakat mengetahui manfaat menjadi anggota Hapsari. Hapsari juga mendekatkan diri dengan tokoh adat dan agama. Hal ini berguna untuk memasukkan perspektif gender pada cara kerja mereka, hal mana pada akhirnya berpengaruh bagi sudut pandang masyarakat luas.

Lewat program dan strategi seperti ini, Hapsari berhasil menunjukkan bahwa organisasi telah memberikan kontribusi atas sejumlah perubahan di tingkat privat dan publik, sebagai berikut:

1. Pada diri kader sendiri: menumbuhkan keberanian perempuan.
2. Pada keluarga para anggota: anggota keluarga menghargai perempuan; Ketika terjadi persoalan di rumah tangga, para anggota mengaku dapat berpikir dan bertindak dengan positif menghadapi persoalan tersebut.
3. Pada masyarakat: keterlibatan aktif perempuan (khususnya para anggota organisasi) meningkat dalam rapat-rapat desa. Anggota Hapsari juga mampu melakukan kritik atas pelaksanaan beberapa kebijakan publik se-

perti beras miskin (Raskin), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), karena kesadaran kritis mereka telah terbangun.

Tidak jauh berbeda, Pesada juga mengalami tantangan dalam berkegiatan. Jumlah anggota organisasi hampir mencapai 10.000 orang dan tersebar di berbagai desa dan kabupaten. Organisasi telah memberikan para anggotanya pemahaman akan nilai-nilai feminisme. Anggota juga terdidik dengan proses pengambilan kredit. Sesungguhnya, timbul pertanyaan: apakah ini berpengaruh terhadap lingkungan dalam wilayah kerja Pesada? Apakah perempuan kini lebih memiliki posisi kuat dan *bargaining power*? Dina Lumbantobing ketika diwawancarai mengatakan, mereka memang melihat dampak positif kehadiran organisasi. Masyarakat kini menjadi tahu bahwa ternyata ada lembaga perempuan yang mengelola uang, dengan sistem tidak seperti bank. Kedua, orang tidak lagi berani menjual-beli harta seorang perempuan secara semena-mena. Ketiga, sudah muncul kontrol di dalam masyarakat terhadap tindak-tanduk kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, masyarakat kini sudah tahu harus mengadu ke mana jika muncul masalah. Sebelumnya, penyelesaian masalah dilaksanakan atas nama adat dan agama, dan sering cenderung merugikan kaum perempuan.

Salah satu masalah yang harus ditelaah oleh Pesada adalah konsep kepemilikan dalam adat. Masalah pewarisan merupakan tantangan yang cukup berat yang dihadapi CU. Salah satu strategi yang dikembangkan

CU adalah mendorong kaum perempuan untuk menyisihkan harta pribadi mereka. Para anggota diberi pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk memutuskan kepemilikan harta. Selain itu, Pesada mendorong anggotanya untuk memiliki aset tak tampak, misalnya emas dan perhiasan. CU tengah merancang mekanisme untuk membangun *savings box* untuk kebutuhan para anggota. Tantangan besar CU lainnya adalah membangun kepercayaan masyarakat guna CU dapat memperluas wilayah kerja. Sebagian masyarakat mempunyai pengalaman buruk dengan lembaga simpan-pinjam pemerintah di masa lalu terkait dengan bunga pinjaman. Yang dilakukan Pesada lebih dulu adalah memberikan pendidikan komprehensif kepada anggota dan pengurus CU agar dapat menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pesada ternyata berhasil dengan program CU yang memberdayakan perempuan di daerah itu, meskipun konsep tersebut berseberangan dengan budaya Batak yang menjunjung peran sentral laki-laki. Dalam mendampingi para anggotanya, CU tidak semata mengurus uang, tapi juga memberikan perlindungan hukum dan pengetahuan kepada mereka. Tiap bulan, tim Pesada menyelenggarakan diskusi pendalaman, dan mengidentifikasi calon kader yang kuat dalam praktik dan cara berpikirnya, meski belum terlalu sempurna. Dengan pengaderan seperti ini, Pesada mereproduksi nilai, sehingga prinsip kepemimpinan feminis bergerak dan beroperasi dalam tiap anggotanya. Nilai-nilai serupa juga diupayakan untuk ditularkan kepada masyarakat perempuan desa secara lebih luas.

Menurut Dina Lumbantobing, strategi

yang diterapkan Pesada berpedoman pada *Feminist Popular Education*. Prinsip yang dipegang Pesada, misalnya, adalah bahwa manusia harus berangkat dari pengalaman hidup karena tiap pengalaman hidup adalah penanaman nilai. Perempuan belajar dari jalan hidupnya, dari cerita-cerita hidup ibu dan ayahnya, dari relasi, dari pengalaman dalam perkawinannya. Jika perempuan terlibat aktif dalam CU, dari situlah mereka memperoleh nilai-nilai berpengalaman aktif dalam ranah publik. Mereka ikut mengambil keputusan, memiliki dan mengelola aset. Dalam konteks budaya Batak, pengalaman seperti ini sedikit sekali kemungkinan dialami perempuan karena budayanya menempatkan laki-laki di tengah. Strategi CU memberikan perempuan peluang untuk mengelola aset dan menjalankan simpan-pinjam uang. Menurut Dina, ini terbukti dapat berjalan dengan baik meskipun masyarakat semula menentanginya. Tentang utama dalam proses simpan-pinjam cenderung muncul dari suami, yang sebelum-sebelumnya memanfaatkan istrinya untuk mengakses pinjaman dengan pola merugikan sang perempuan. Pihak Pesada selalu membuat kontrak ketat dalam urusan simpan-pinjam, agar perempuan tidak dimanfaatkan oleh suaminya secara merugikan. CU melindungi akses dan kontrol terhadap kepemilikan sang perempuan. Pesada tengah merancang program agar aset perempuan seperti emas dan surat tanah kelak bisa disimpan dalam brankas yang berada dalam pengawasan Pesada. Pesada menyiapkan rencana dan strategi kalamana metodenya berbenturan dengan adat dan budaya Batak. Dina mengatakan bahwa CU adalah institusi pembelajaran sekaligus kendaraan penguatan ekonomi dan politik

perempuan di mana secara hukum perempuan dilindungi, sehingga dalam konteks budaya setempat yang mengedepankan laki-laki, aset perempuan tidak dapat dituntut kepemilikannya sebagai milik sang laki-laki.

Hapsari juga mengembangkan CU, namun modal yang dimiliki tidak sebesar CU Pesada yang mencapai Rp12.474.261.592,- pada 2010. CU yang dikelola Hapsari juga bergerak untuk pemberdayaan ekonomi usaha anggota. Serikat Hapsari juga memiliki unit usaha anggota, seperti usaha produksi sabun, kerajinan tangan, penjualan batik dan usaha kedai kopi, yang memberikan penghasilan kepada para anggota. Kegiatan ini tidak hanya membantu menambah pendapatan anggota. Program ini menambah kas organisasi, yang didapati dari pemotongan hasil keuntungan penjualan produk.

Salah satu program baru pemberdayaan ekonomi Hapsari adalah program *livelihood* dengan strategi advokasi penguatan kapasitas perempuan marjinal untuk keberlanjutan penghidupan. Hapsari memperluas teknik-teknik inovatif melakukan pengorganisasian dan advokasi yang mempromosikan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara efektif dan efisien. Kegiatan ekonomi produktif dilakukan oleh perempuan dalam serikat-serikat di bawah payung Hapsari, misalnya dengan produksi sabun cuci dan cairan pembersih lantai. Produk-produk tersebut mereka pasarkan di warung di desa masing-masing. Pengorganisasian difokuskan pada kelompok-kelompok di wilayah yang dianggap sebagai daerah yang belum maju. Penentuan wilayah dilakukan dengan penilaian atas aspirasi perempuan, apakah masih kurang diperhatikan atau belum didengar serta jarang turut serta dalam proses pemba-

ngunan. Dalam program ini, Hapsari memfasilitasi salah satu serikat perempuan anggotanya, yakni SPI Kulonprogo di Yogyakarta untuk menumbuhkan kader-kader baru dari tipe kelompok 'perempuan miskin desa'. Ini disebut merupakan kelompok marjinal yang belum memiliki akses ke sumber-sumber pengetahuan (antara lain peningkatan kapasitas diri, pengembangan keterampilan), teknologi, permodalan dan jaringan pasar.

Hapsari mengelola radio komunitas yang memberikan pengalaman jadi artikulator kepada para perempuan yang dibinanya. Radio komunitas ini berfungsi untuk memobilisasi kaum perempuan ke acara-acara Hapsari dan untuk menyuarakan isu yang dihadapi perempuan di wilayah Hapsari. Radio komunitas ini penting karena dengan mengelola radio, perempuan jadi menguasai informasi dan pengetahuan. Di dalam berorganisasi, tiap anggota Hapsari maupun Pesada harus sama-sama belajar dan memiliki pengalaman dalam mempengaruhi kebijakan organisasi dan mengambil keputusan.

Penutup

Proses transformasi nilai peran setara antara laki-laki dan perempuan merupakan agenda yang terus dijalankan oleh Hapsari dan Pesada dalam berbagai program kerjanya. Menyadari bahwa kesetaraan gender merupakan konsep yang belum tentu mudah dipahami masyarakat, mereka lakukan pendekatan kepada kaum perempuan lebih dulu. Strategi ini mirip dengan yang dilakukan Hapsari. Jika Hapsari mulai kerja melalui pendidikan bagi anak usia dini yang melibatkan para ibu dari anak-anak tersebut, Pesada

da menggunakan strategi menghimpun kaum perempuan untuk menjadi anggota CU, meskipun Pesada juga menyelenggarakan PAUD. Tentu saja, taktik-taktik ini memerlukan waktu yang panjang, dan kedua organisasi banyak menghadapi tantangan dari kaum laki-laki yang dalam kebudayaan Batak dipandang merupakan tulang punggung masyarakat. Tantangan tidak hanya datang dari kaum laki-laki; sejumlah pengurus CU juga mengkritisi lembaga simpanpinjam Pesada itu sebagai bersifat eksklusif karena hanya mau melayani kaum perempuan, sehingga berseberangan dengan prinsip CU yang inklusif. Pesada bertahan pada prinsip mendahulukan perempuan yang mau masuk CU, karena mereka yakin bahwa perjuangan kesetaraan gender dimulai dengan penguatan perempuan sebagai kaum tertindas. Ini prinsip yang penting ditegakkan sebuah organisasi perempuan yang menyelenggarakan usaha CU dengan agenda perempuan pedesaan sebagai penerima manfaat. Berangkat dari ini, Pesada banyak mendidik calon pemimpin perempuan dimulai dari CU di tiap daerah. CU ternyata tidak hanya berfungsi sebagai tempat menabung, tapi juga merupakan media pendidikan bagi perempuan untuk berorganisasi dan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Lewat lembaga tersebut, posisi dan peran perempuan sebagai penguasa aset ekonomi lambat laun bisa diterima secara sosial.

Hapsari memiliki model tatakelola organisasi yang berbasis pada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing elemen kelembagaan memiliki pemimpin yang dipilih dalam kongres yang dihadiri oleh wakil dari tiap serikat. Tiga model tatakelola

organisasi merupakan model kepemimpinan kolektif yang berlaku selama lima tahun. Pada mulanya, masa kerja pimpinan ketiga lembaga adalah tiga tahun. Karena banyak anggota Hapsari adalah perempuan desa yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, waktu tiga tahun lebih banyak habis untuk belajar dan beradaptasi dengan tata cara mengelola organisasi. Waktu sekian dipandang kurang cukup. Maka itu, sejak 2011, periode kepemimpinan di ketiga lembaga diubah menjadi lima tahun. Prinsip penting dalam model ini adalah, anggota belajar dari pengalaman mengelola tiga lembaga dalam Hapsari. Mereka yakin bahwa pengalaman tersebut akan mampu mempengaruhi pola pikir yang bersangkutan dan memberikan kontribusi pada penanaman nilai

bahwa perempuan perlu untuk berorganisasi dan aktif di ranah publik. Lely Zailani menyatakan fungsi perpanjangan periode dari tiga tahun menjadi lima tahun adalah sebagai berikut:

“Di Hapsari, periode kami ubah menjadi lima tahun sejak 2011 sampai 2016. Maksudnya supaya ketahuan dulu, apakah sebenarnya sosok tersebut bisa-tidak menjadi pemimpin. Sebab sayang sekali kalau berhenti ketika dia sudah bisa menjadi pemimpin dan ternyata tidak terpilih lagi. Buat kami, tiga tahun memimpin belum cukup”.¹⁰

¹⁰ Lely Zailani, Ketua Dewan Nasional Hapsari, Jakarta, 28 Juni 2012.

Tantangan Organisasi Perempuan di Kota Padang

Rahayuningtyas & Edriana Noerdin

Organisasi perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat memilih untuk bekerja melalui institusi politik non-tradisional sebagai upaya mengubah tatanan hubungan gender setempat. Pilihan ini menunjukkan harapan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat bisa lebih banyak melibatkan perempuan. Akan tetapi persoalan adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam masih menjadi masalah besar yang menyulitkan perempuan dalam memenuhi hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya mereka. Budaya matrilineal yang seharusnya lebih menguntungkan posisi perempuan ternyata pada praktiknya belum berpihak pada kepentingan perempuan.

Garis klan Minangkabau yang diturunkan melalui garis ibu (matrilineal) menjadikan perempuan kawasan ini sebagai pemilik dan penjaga harta serta tanah pusaka keluarga. Sementara itu, laki-laki sejak kecil dibiasakan untuk hidup di luar rumah, merantau meninggalkan rumah keluarga, sehingga memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja di luar tanah pertanian keluarga. Apabila tidak merantau, sesudah perkawinan, laki-laki tinggal di rumah keluarga istrinya. Kepercayaan bahwa anak perempuan dewasa yang belum menikah adalah aib masih berlangsung hingga sekarang, seperti yang dinyatakan narasumber berikut:

“Sering saya dicemooh. Kata mereka, “Untuk apa saya harus dengar? Dia belum bersuami...” Tapi ibu-ibu membela saya. Ibu-ibu mengatakan, walaupun belum menikah, saya baik. Tapi saya tidak pernah mengambil pusing urusan itu. Bagi saya, itu hanya pandangan masyarakat yang umumnya beranggapan bahwa bersuami itu baik; jadi kalau tidak bersuami seolah buruk”.¹

Pada keluarga Minangkabau yang tinggal di perkotaan, anak perempuan disosialisasikan untuk mengambil peran kerja do-

¹ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M Kota Padang, 14 Mei 2012.

mestik, sementara anak laki-laki tidak. Bukan saja pembagian kerja tidak didasarkan pada minat anak, akses anak perempuan untuk keluar rumah pun relatif lebih terbatas dibandingkan dengan anak laki-laki. Pengalaman narasumber Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) menunjukkan kecenderungan ini:

“Dalam kegiatan, teman-teman laki-laki tidak mau menyapu dan cuci piring karena itu dianggap tugas perempuan. Begitu juga ketika di rumah, dengan saudara laki-laki. Nilai-nilai di masyarakat sangat patriarkis. Waktu kecil, saudara laki-laki boleh main jauh-jauh. Tapi anak perempuan hanya boleh yang dekat rumah...”²

Hal yang sama terjadi dalam pola relasi antara suami dan istri di dalam keluarga. Sekali pun misalnya mereka sama-sama bekerja dengan kedudukan yang sama, tetap saja ada perbedaan ketika sudah di rumah. Persoalan poligami banyak terjadi di masyarakat Kota Padang, baik di kota maupun di desa, dan perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban permasalahan yang timbul. Seperti yang dijelaskan narasumber berikut ini:

“... di lingkungan di mana saya tinggal, walaupun kita sama-sama Pegawai Negeri Sipil (PNS), perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga nyaris 24 jam. Sementara itu, suami yang PNS santai sepuluh jam kerja. Hari krida mereka menyalurkan hobi, ada yang mancing, ada yang berburu babi, se-

mentara perempuan menyiapkan hampir semua kebutuhan harian”.³

“Di kampung ayah itu, cukup besar persoalan poligami. Karena aku tinggal di kota, jadi aku tidak terlalu *open* dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau di kampung Ayah, orang heboh mengenai persoalan poligami. Awalnya, keluarga besar Ayah heboh untuk tidak berpoligami. Akhirnya, beberapa tahun kemudian ketika saya kelas 2 SMA, keluarga besarnya memperbaiki hubungan Ayah dengan istri keduanya. Setelah itu saya putus hubungan dengan keluarga Baku. Karena, memang, keluarga Baku itu tidak berada dalam kondisi bersama aku dengan keluarga”.⁴

Dari segi ekonomi, masyarakat Minangkabau juga mengeluhkan keterbatasan lapangan pekerjaan untuk pemuda lulusan sekolah, baik tingkat SMA sampai lulusan perguruan tinggi. Satu-satunya harapan untuk bekerja dengan layak di Kota Padang adalah dengan menjadi pegawai di Pabrik Semen Padang, namun kesempatan yang ada sangat kecil.⁵ Hal ini menyebabkan angka pengangguran yang tinggi di Sumatera Barat, yang pada 2010 mencapai 6,62 persen, atau sekitar 7.000 jiwa.⁶ Sebagian perempuan Minangkabau harus ikut membantu ekonomi keluarga, antara lain dengan berdagang. Menjadi pedagang di Kota Padang pun sulit karena keterbatasan pemasaran dan kurangnya jaringan dengan banyak pihak.

² Wawancara dengan Tya, Relawan WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 17 Mei 2012.

³ Wawancara dengan Sudartok, Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Kota Padang, 15 Mei 2012.

⁴ Wawancara dengan Tya, Relawan WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 17 Mei 2012.

⁵ Hasil Focus Group Discussion ASPPUK, 17 Mei 2012.

⁶ Data BPS Kota Padang, dalam minangkabaunews.com, diakses 13 September 2012.

“... kemiskinan menyebabkan pendidikan anak terhambat. Lapangan kerja terbatas: hanya industri semen yang ada, tapi masuknya susah, banyak tes dan bisa gugur. Di sana banyak terjadi sistem kekeluargaan. Selain itu ada PNS, tapi sekarang jarang ada lowongan untuk PNS. Kalau pedagang, pemasaran untuk dagangannya juga tidak banyak peluang. Banyak pengangguran, padahal orang-orang itu tamat kuliah S1 dan D3”.⁷

Adat Minangkabau sebagai nilai sosial yang dominan di Sumatera Barat disejajarkan dengan nilai Islam, seperti yang ditunjukkan oleh kredo adat Minangkabau, “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (Adat bersendi hukum, hukum bersendi agama). Masyarakat Minangkabau sendiri menyadari kemungkinan pertentangan antara adat yang berbudaya matrilineal dan agama Islam yang patrilineal. Akan tetapi mereka merasa berhasil mendamaikan pertentangan antara matrilinealitas adat dan patrilinealitas agama Islam dalam praktik kehidupan sosial mereka.⁸

Ketika otonomi daerah pasca 1999 membuka kemungkinan untuk mendefinisikan kembali identitas daerah, pembahasan mengenai posisi wacana antara adat dan nilai-nilai Islam menguat kembali. Dalam wawancara dengan para aktivis NGO perempuan Sumatera Barat, perumusan kembali wacana adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam ini selalu dibicarakan sebagai salah satu masalah besar yang menyulitkan perempuan dalam memenuhi hak-hak ekonomi, politik dan sosial mereka. Misalnya,

menguatnya kecenderungan konservatisme Islam, yang salah satu indikatornya adalah munculnya keputusan pemerintah lokal untuk mengeluarkan peraturan penggunaan jilbab bagi siswa sekolah.⁹ Di Kota Padang pada khususnya dan di Sumatera Barat pada umumnya, semua murid perempuan sekolah negeri, dari SD sampai SMA, diwajibkan memakai jilbab. Selain itu, pemerintah setempat juga pernah merancang peraturan daerah untuk menerapkan jam malam bagi perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa ditemani *mubrim*.¹⁰ Kebijakan yang diterapkan atas nama Islam menimbulkan kegelisahan di kalangan organisasi perempuan yang menjadi subjek penelitian ini, karena mereka merasa tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan tersebut. Akan tetapi dalam program mereka, organisasi-organisasi perempuan tersebut juga tidak memasukkan advokasi untuk menentang kecenderungan menguatnya konservatisme demikian karena mereka takut akan dampak baliknya,

⁷ Hasil Focus Group Discussion ASPPUK, 17 Mei 2012.

⁸ Wieringa. *loc. cit.*

⁹ Instruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-III/2005, 7 Maret 2005. Kebijakan ini dibuat dengan asumsi menurunnya moral kalangan muda dan remaja Padang, disebabkan oleh pakaian mereka yang dianggap kurang Islami. Karena itu, pilihan kebijakannya adalah mengembalikan identitas keislaman masyarakat Padang dengan busana muslim. Pembahasan mengenai tema ini bisa dilihat di <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=823>. Aturan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan umat agama non-Islam di Padang, karena di beberapa sekolah ada kecenderungan pemakaian terhadap siswi non-Islam untuk menggunakan jilbab. Walikota Padang Fauzi Bahar pernah berbicara dalam wawancara dengan televisi lokal, dan menyatakan bahwa umat non-Islam bisa juga menggunakan jilbab karena biarawati Katolik menggunakan penutup kepala semacam jilbab.

¹⁰ Pembahasan mengenai peraturan daerah ini, lihat Edriana Noerdin dkk., *Representasi Perempuan dalam Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Women Research Institute, 2004).

yaitu kemungkinan menjadi target serangan kelompok-kelompok agama yang konservatif.

Ini sama halnya dengan masalah poligami yang menjadi keprihatinan organisasi-organisasi perempuan di Sumatera Barat. Masyarakat salah menginterpretasikan poligami dan justru menganggap bahwa “poligami itu perintah Tuhan”, dan kalangan adat dan agama masyarakat Minangkabau dianggap membolehkan praktik ini. Padahal praktik poligami secara resmi tidak diizinkan menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.¹¹ Akan tetapi, organisasi-organisasi perempuan di Sumatera Barat belum ada yang mempunyai program advokasi anti-poligami. Mereka menganggap isu poligami tidak strategis untuk diangkat karena akan kontraproduktif, seperti mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok adat dan agama di Sumatera Barat. Ini dinilai akan semakin mempersulit ruang gerak mereka.

Dari hasil wawancara dengan para aktivis organisasi-organisasi perempuan di Sumatera Barat, diketahui bahwa mereka masih menganggap belum strategis untuk secara terbuka berpartisipasi dalam perumusan ulang hubungan antara wacana adat Minangkabau dengan wacana nilai-nilai agama Islam. Perumusan hubungan adat dengan agama sebenarnya sangat perlu dilakukan, karena sangat menentukan bisa atau tidaknya pemenuhan hak-hak perempuan di provinsi tersebut, baik hak ekonomi, politik, dan bu-

daya. Saat ini, organisasi perempuan cenderung fokus pada menjalankan program-program pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan, tanpa perlu berpartisipasi aktif dalam membentuk wacana baru tentang hubungan antara adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam.

Isu yang dominan diangkat oleh organisasi perempuan setelah 1998 adalah akses perempuan pada proses politik, hukum dan ekonomi, terutama dalam pengambilan kebijakan publik.

“Koalisi Perempuan Indonesia lebih fokus pada keterampilan perempuan dalam politik, sehingga muncul perjuangan pada kuota minimal bagi calon anggota legislatif. Sekarang Koalisi Perempuan Indonesia juga mencoba aktif dalam isu *trafficking* – perdagangan perempuan. ... Kalau di wilayah memang masih sangat tergantung dengan isu nasional...”¹²

Bagi LP2M, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) dan Harmonia, status ekonomi merupakan faktor penentu kemampuan perempuan untuk mengenali persoalannya. Organisasi-organisasi ini menempatkan faktor ekonomi tersebut sebagai jalan menuju akses yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik lokalnya. Sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Padang, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Solidaritas Perempuan (SP), Women Crisis Centre (WCC) Nurani Perempuan, dan Yayasan Totalitas, misalnya, melihat persoalan hak asasi perempuan dalam hubungannya dengan hu-

¹¹ Wieringa (1995) mengutip hasil sensus nasional yang terbit pada tahun 1930 yang menunjukkan bahwa angka poligami di Jawa dan Madura adalah 1,9 persen sementara di Minangkabau mencapai 8,7 persen.

¹² Wawancara dengan Tanti Herida, Sekertaris Wilayah KPI Sumatera Barat, 17 Mei 2012.

kum, ekonomi, politik dan hak-hak dasar, seperti kesehatan dan sanitasi.

Kecenderungan menghindari perumusan ulang wacana adat dan agama tersebut diperparah dengan adanya hubungan kelembagaan antara lembaga daerah seperti KPI, SP dan LBH APIK, yang merupakan afiliasi lokal dari jaringan atau koalisi nasional. Pendirian KPI, LBH APIK dan SP di Sumatera Barat lebih bersifat perluasan jaringan yang didorong oleh aktor organisasi KPI, LBH APIK dan SP di Jakarta. Sebagai afiliasi lokal dari sebuah jaringan atau koalisi nasional, mereka cenderung mengikuti isu-isu yang dirumuskan secara nasional oleh lembaga afiliasi mereka karena adanya ketergantungan dana. Bisa diduga bahwa perumusan ulang wacana adat dan agama yang bersifat lokal Sumatera Barat tersebut tidak menjadi agenda utama jaringan dan koalisi nasional di tingkat nasional (Jakarta). Karena itu, mereka tidak menganggap strategis untuk merumuskan ulang masalah wacana adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam dalam upaya mereka melakukan pemberdayaan perempuan Sumatera Barat.

“...karena dari sisi pendanaan juga sangat tergantung kepada Jakarta, sebenarnya. Bukan berarti kita tidak bisa menemukan format. Kita bisa saja menemukan isu di tingkat lokal, tapi itu tadi, kembali kepada ketergantungan dana... KPI ini *‘kan* strukturnya ada Presidium. Presidium sebenarnya sama dengan legislatif. Kemudian ada Sekretaris Wilayah. Presidium fokus kepada kebijakan-kebijakan, Sekretaris Wilayah lebih pada pelaksanaan. Persoalan di KPI Padang adalah karena Presidium juga punya pekerjaan lain. Kemudian koordinasi juga lemah di tingkat kita, sehingga rapat-rapat pen-

ting jarang dilakukan. Maka, kegiatan di wilayah Sumatera Barat lebih banyak menunggu apa yang menjadi kegiatan di nasional. Kita jadi sangat tergantung pada *report* dari Jakarta. Dan saya juga, selaku sekretaris wilayah, agak sedikit susah mengadakan kegiatan sendiri karena tergantung dari pendanaannya”.¹³

Sementara itu, lembaga lokal seperti WCC Nurani Perempuan didirikan untuk menanggapi persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tujuan tersebut sesuai dengan pengalaman kerja pendirinya di organisasi seperti Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). WCC Nurani Perempuan adalah organisasi tanpa badan hukum, dan mereka mengandalkan sumbangan tenaga, pikiran dan dana dari kawan-kawan yang mereka kenal untuk menjalankan organisasinya. Motivasi pendirian WCC Nurani Perempuan lebih cenderung ke arah kebutuhan pendiri untuk secara spesifik memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan, yang berbeda dengan layanan yang sebelumnya dikerjakan di PKBI, yang lebih ditujukan bagi remaja dan keluarga. Motivasi dan cara pendirian WCC Nurani Perempuan memperlihatkan keinginan organisasi perempuan untuk masuk ke wilayah yang lebih spesifik untuk perempuan. Tapi, lagi-lagi, para aktivisnya tidak merasa strategis untuk ikut merekonstruksi ulang wacana adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam. Selain melakukan penanganan terhadap korban kasus kekerasan, WCC Nurani Perempuan juga melakukan kampanye advokasi dan diskusi rutin tiga-bulanan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pendidikan

¹³ Wawancara dengan Mahoni, Padang, 7 Oktober 2005.

dan penyadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Selain kerja pelayanan, kita juga melakukan kampanye advokasi, kegiatan rutin diskusi satu bulan sekali, kadang tiga bulan sekali. Tapi kita usahakan terus. Artinya, pendidikan itu tetap”.¹⁴

Pemetaan Organisasi Perempuan Sumatera Barat menurut Visi dan Misinya

Bagian tulisan ini merupakan upaya pemetaan organisasi perempuan dengan melihat visi dan misi organisasi. Melalui pemetaan kita akan memahami keragaman sekaligus keserupaan organisasi perempuan yang diidentifikasi dalam proses penelitian ini. Setiap organisasi memiliki pernyataan yang berbeda mengenai visi dan misinya. Persamaan dalam visi terletak pada cita-citanya tentang keadilan bagi perempuan, dan terbukanya akses yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan lokal, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

Bentuk kelembagaan yang dipilih oleh delapan organisasi perempuan ini beragam. LP2M, LBH APIK Padang, Totalitas, Harmonia dan WCC Nurani Perempuan berbentuk Yayasan. Sementara kelembagaan KPI dan SP berbentuk perkumpulan.

Organisasi-organisasi perempuan tersebut mempunyai fokus yang berbeda dan ada juga yang serupa, sebagai berikut:

- a. Fokus kerja lembaga-lembaga tersebut beragam. LP2M, ASPPUK dan Harmonia lebih memilih fokus pada partisipasi politik perempuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber-sumber daya ekonomi. Organisasi yang bergerak di bidang ini melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan usaha kecil yang memperjuangkan akses terhadap kredit dan pemasaran, dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan lokal guna membuka ruang bagi perempuan usaha kecil.

“LP2M melihat apakah anggaran yang ada sudah menggunakan perspektif gender atau belum. Kita melibatkan perwakilan partai politik. Namun karena dalam empat tahun terakhir banyak gempa, kita fokus pada gempa dulu”.¹⁵

“Isu utamanya pemberdayaan perempuan dan isu-isu gender, penguatan berbasis ekonomi, juga membangun kesadaran kritis perempuan, dan mendorong perempuan dalam keterlibatan dan partisipasi pembuatan kebijakan ...”.¹⁶

- b. WCC Nurani Perempuan dan LBH APIK memfokuskan perhatian pada masalah kekerasan terhadap perempuan. Mereka mengupayakan adanya penegakan hukum terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi dalam rumah tangga, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk poligami, maupun di luar rumah, seperti

¹⁴ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 17 Mei 2012.

¹⁵ Wawancara dengan Fatiha, Staf LP2M, 14 Mei 2012.

¹⁶ Wawancara dengan Wiwi, Staf Harmonia, 15 Mei 2012.

perkosaan dan penyerangan seksual lainnya. Sementara itu, KPI juga punya program tentang anti-kekerasan terhadap perempuan di Padang.

“... Kegiatannya lebih ke dukungan untuk korban, jadi ada layanan konseling untuk korban”.¹⁷

- c. KPI dan SP lebih memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memenuhi hak-hak asasi perempuan sehubungan dengan hak politik mereka. Mereka juga bertujuan memberdayakan perempuan dan membuka akses mereka terhadap proses politik di ruang publik. Kegiatan yang dilakukan banyak berfokus pada pembentukan kelompok-kelompok perempuan yang mengadvokasikan hak politik perempuan, dalam bentuk diskusi kelompok, seminar, dialog publik dan pembentukan balai perempuan untuk diskusi rutin dengan tujuan meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak politik mereka.

“... itu saya motivasi mereka untuk mencoba mengkomunikasikan ketimpangan relasi dengan pemerintah desa agar perempuan bisa didengar. Saya amati, ketimpangan perempuan di ranah publik sangat jelas terlihat. Mulai 2008, perempuan sudah mulai didengar dalam musrenbang”.¹⁸

“Kalau akan ada Pemilihan Umum, kita melakukan advokasi tentang siapa saja

anggota KPI yang mencalonkan diri untuk 2014. Artinya, ada strategi politik, dan dampak pendekatan kita — khususnya keperempuannya. Kita dekati keperempuannya”.¹⁹

- d. Totalitas memfokuskan kegiatannya pada pengadaan kebutuhan dasar bagi perempuan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, gizi buruk, dan sebagainya.

“Sekarang kami melakukan kegiatan Positive Defian²⁰ yaitu peningkatan gizi untuk anak miskin. Kami lihat di komunitas ini ada yang gizi baik, jadi mereka mengadopsi apa yang dilakukan anak gizi baik tersebut sehingga lebih mudah diterima. Sehingga tumbuh-kembang anak baik dan punya kehidupan yang baik”.²¹

Secara visi, organisasi-organisasi yang diteliti juga mempunyai persamaan dan perbedaan.

- Visi organisasi LP2M, Harmonia dan ASPPUK lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan dibandingkan keadilan gender. Prioritas ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut mengasumsikan bahwa keadilan gender hanya akan dapat dicapai jika masyarakat dapat memenuhi tuntutan kesejahteraan mereka. Organisasi ini

¹⁷ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 17 Mei 2012.

¹⁸ Wawancara dengan Yuni Walrif, calon Anggota SP Padang, 14 Mei 2012.

¹⁹ Wawancara dengan Tanti Herida, Sekertaris Wilayah KPI Sumatera Barat, 17 Mei 2012.

²⁰ Positive Defian adalah pendekatan kepada masyarakat miskin di wilayah gizi buruk dengan melihat pola konsumsi keluarga yang tidak mengalami gizi buruk untuk bisa ditiru oleh keluarga yang mengalami gizi buruk.

²¹ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas, 15 Mei 2012.

mengaitkan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan gender dengan usaha meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Organisasi ini juga tidak berhenti pada peningkatan akses perempuan saja, akan tetapi juga berusaha mengidentifikasi kebutuhan untuk menumbuhkan kesadaran kritis perempuan. LP2M dan Harmonia khususnya mengidentifikasi bahwa kesadaran akan kepentingan perempuan dan posisinya dalam masyarakat merupakan syarat penting untuk mencapai keadilan gender dalam masyarakat. Organisasi ini juga memandang bahwa kebijakan publik memiliki potensi untuk merugikan masyarakat yang tidak memiliki akses pada pengambilan keputusan, sehingga merasa perlu untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan publik.

- LBH APIK Padang dan WCC Nurani Perempuan mendasarkan kerja mereka pada visi untuk mengubah keadaan yang tidak adil dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Organisasi ini mengidentifikasi bahwa ketimpangan terjadi dalam berbagai sektor kehidupan: ekonomi, politik dan sosial-budaya. Namun organisasi tersebut lebih memberi tekanan khusus pada relasi gender yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan. KPI, di samping perjuangan tentang hak politik, juga mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dalam kampanye-kampanye mereka.

- Sementara itu, KPI menyatakan keinginannya untuk berusaha agar hak-hak perempuan terpenuhi dalam berbagai bidang kehidupan. Mirip dengan SP, organisasi ini lebih mementingkan etika demokrasi, HAM, kesetaraan gender, dan dengan jelas menyebutkan feminisme sebagai landasan organisasi. Seperti juga LBH APIK Padang, organisasi KPI dan SP menggunakan landasan dan tujuan yang sama dengan organisasi nasionalnya, dan tidak merumuskan visi-misinya sendiri.

Bidang Garapan dan Strategi Kerja Organisasi Perempuan

Kegiatan Organisasi Perempuan

a. Fokus pada Akses Perempuan terhadap Ekonomi

LP2M melakukan kegiatan penguatan perempuan usaha kecil dan penguatan kelembagaan ekonomi perempuan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dampingan dengan jalan memberikan pelatihan kepada perempuan yang memiliki usaha kecil. Tema pelatihan yang diberikan beragam, mulai dari pencatatan keuangan hingga manajemen pemasaran produk usaha kecil. Dengan kegiatan ini, perempuan yang selama ini memiliki keterbatasan jaringan sudah mampu berjejaring dengan sesama pedagang, yang memudahkan mereka untuk melakukan diskusi dan meluaskan pasar produk.

“Ford Foundation pernah mendanai peningkatan kapasitas ibu-ibu untuk pe-

ngembangan aset lembaga keuangan perempuan (koperasi simpan-pinjam) dan jaringan yang ada di tingkat kota, serta bagaimana menginisiasi hingga pelaksanaannya. Saat ini, status koperasi simpan-pinjam ingin diubah menjadi koperasi serba usaha agar lebih luas, bisa menjual bahan baku, menjual hasil karya, menjual kebutuhan pokok”.²²

Di bidang politik, LP2M juga ikut ambil bagian dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di Pesisir Selatan bekerjasama dengan *Global Fund for Women*. Kegiatan ini menggunakan dua cara yaitu, pertama, melakukan advokasi supaya pemerintah menjamin hak-hak perempuan untuk terlibat dalam proses-proses politik secara maksimal; Kedua, melakukan advokasi supaya pemerintah memberikan dukungan kepada perempuan untuk terlibat dalam politik, baik sebagai calon anggota legislatif (caleg) maupun sebagai pemilih.

“Penguatan hak politik perempuan bekerjasama dengan Global Fund for Women di Pesisir Selatan ...”.²³

Selain itu, LP2M juga melakukan kegiatan di bidang pencegahan perubahan iklim dan bencana. Kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan bekerjasama dengan *Bread For All* (Jerman), dan berupa kegiatan penghijauan, sekolah lapang, pembuatan biofor, pembibitan, dan konservasi lahan (sistem penanaman). Upaya mendorong pemulihan ekonomi pasca bencana dilakukan dengan bekerjasama dalam tiga program dengan

HEKS (Jerman) dan dana dari Swss Solidarity. Program pertama adalah pengurangan risiko bencana, yang dilakukan dengan cara membentuk komite bencana di kalangan masyarakat dan memberikan pelatihan tanggap bencana serta pertolongan pertama untuk korban gempa. Program kedua berupa kegiatan ekonomi untuk pemulihan masyarakat korban gempa. Bentuk kegiatan ini beragam, dari pendirian koperasi, peningkatan keterampilan sampai bantuan peralatan modal usaha. Program ketiga adalah pengadaan air bersih dan sanitasi. Pada saat bencana, air bersih dan sanitasi yang sehat sulit didapatkan, padahal itu merupakan kebutuhan utama korban bencana. Tiga kegiatan tersebut mulai dilakukan pasca gempa 2009 di Kota Padang.

“... kita juga melakukan kegiatan mitigasi bencana bekerjasama dengan Bread For All (Jerman) kegiatan penghijauan, sekolah lapang, pembuatan biofor, pembibitan, dan konservasi lahan (sistem penanamannya)”.²⁴

Sebenarnya, empat tahun yang lalu LP2M juga melakukan advokasi kepada lembaga pemerintah yaitu dengan melihat anggaran yang dikeluarkan lembaga, apakah sudah menggunakan perspektif gender atau belum. LP2M akan melakukan advokasi kepada organisasi yang belum memiliki anggaran berperspektif gender, terlebih organisasi yang memiliki kaitan langsung dengan perempuan, seperti kesehatan. Namun, karena gempa 2009, fokus kerja LP2M untuk masalah advokasi kurang banyak dilakukan

²² Wawancara dengan Fatiha, Staf LP2M, 14 Mei 2012.

²³ Wawancara dengan Fatiha, Staf LP2M, 14 Mei 2012.

²⁴ Wawancara dengan Fatiha, Staf LP2M, 14 Mei 2012.

dan empat tahun belakangan belum ada lagi ad-vokasi yang dilakukan LP2M.

Penerima program LP2M merupakan masyarakat terpinggirkan yang tidak tersentuh pemerintah. Selain itu, wilayah kerja yang dipilih LP2M merupakan wilayah yang memiliki potensi lokal dan didukung pemerintah lokal (Nagari, Jorong, dll). Fokus kerja LP2M memang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, maka seluruh penerima manfaat kegiatan LP2M adalah perempuan.

“... di dalam program LP2M, pertama kriterianya adalah masyarakat marginal, lalu tidak mendapat sentuhan program dari pemerintah, kemudian memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah... Kita lebih spesifik kepada perempuan”.²⁵

Selain LP2M, ASPPUK Kota Padang juga memiliki beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan perempuan, khususnya perempuan usaha kecil di Kota Padang. Secara rutin, ASPPUK mengadakan diskusi dengan anggota Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JarPUK) dengan berbagai tema, mulai dari hal-hal seputar kewirausahaan sampai ke penyadaran gender. Perempuan usaha kecil diberikan penjelasan sehingga menyadari bahwa kondisi ketimpangan gender yang ada saat ini sangat menyulitkan mereka sebagai pengusaha, khususnya dalam memperoleh pinjaman modal. Oleh karenanya, perempuan diharapkan mampu memilah mana yang menjadi aset pribadinya dan mana aset ke-

luarga, sehingga perempuan pun bisa mengambil pinjaman modal dari Bank atau Lembaga keuangan lain. Selain itu, ASPPUK juga melakukan *training* pembukuan sehingga manajemen usaha lebih rapi dan kondisi keuangan lebih terkontrol. Kegiatan diskusi bersama-sama dengan seluruh anggota JarpuK membuat jaringan pengusaha kecil semakin terbuka. Mereka bisa bertukar pengalaman dalam dunia kewirausahaan bahkan bertukar produk untuk memperluas pemasaran produk olahan.

Untuk membantu pengusaha kecil meningkatkan penjualan, ASPPUK juga memfasilitasi perempuan usaha kecil bertemu dengan pihak pemerintah, misalnya dengan melakukan kunjungan bersama dengan ibu-ibu pengusaha ke dinas dan instansi yang membantu meningkatkan pemasaran, seperti untuk mendapat label halal tanpa bayar bagi produk makanan. Dinas Kesehatan (Dinkes) juga memfasilitasi agar pengusaha kecil bisa mendapatkan Nomor Izin Dinkes dengan proses yang cepat. Kegiatan lain yang dilakukan adalah membentuk koperasi simpan-pinjam. Dengan iuran masing-masing anggota ASPPUK, mereka dapat meminjam uang sebagai modal usaha sampai dengan Rp.500.000,- dalam batas waktu tertentu. Saat ini, koperasi ini akan diubah menjadi koperasi serba usaha yang memiliki fungsi lebih luas. Selain memberikan fungsi simpan-pinjam, koperasi serba usaha bisa menjadi tempat penjualan produk olahan anggota ASPPUK dan semakin memperluas pemasaran.

“Kita kerjasama dengan pemerintah. Sekarang ini kita ajak ibu-ibu kunjungan ke dinas untuk diskusi. Sekarang sudah

²⁵ Wawancara dengan Fitriyanti, Direktur LP2M, 14 Mei 2012.

mulai terlihat ibu-ibu kita diberi label, karena banyak produk makanan di Padang ini diberikan label halal secara gratis. Untuk industri rumah tangga, kita *me-link*-kan juga dengan dinas jadi sekarang ibu-ibu kalau ada pengumuman dari dinas langsung ke sana”.²⁶

ASPPUK juga melakukan diskusi di masyarakat dengan *bundo kanduang*, tokoh-tokoh perempuan, juga dengan masyarakat umum yang laki-laki dalam beberapa kegiatan. Harapannya, banyak forum diskusi bersama akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, upaya mereka tidak sampai pada perumusan ulang nilai-nilai adat dan agama yang mengekang perempuan.

Banyaknya kegiatan dan diskusi yang dilakukan ASPPUK membuat para anggotanya berani mengemukakan pendapat. Di tingkat pribadi, ibu-ibu semakin mengetahui bahwa perempuan memiliki hak bersuara dan bisa membangun desa pula. Banyak yang aktif dan ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang merupakan sebuah mekanisme *bottom up planning* dari tingkat desa sampai kota. Tapi untuk ASPPUK yang masih baru, kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada tahap penyadaran kesetaraan gender.

Sementara itu, Harmonia baru didirikan pada 2010 oleh mantan pengurus LP2M. Mereka adalah yang keluar karena konflik internal yang terjadi di LP2M pasca gempa besar pada 2009 yang melanda kota Padang dan menewaskan lebih dari 6.000 jiwa. Aki-

bat gempa tersebut, banyak sekali lembaga dana yang muncul di Padang membawa program *humanitarian relief*, dan LP2M adalah lembaga yang dianggap strategis oleh beberapa lembaga dana tersebut. Karena pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan oleh LP2M cukup kuat, lembaga-lembaga donor langsung menjalin kemitraan dan memberikan banyak dana (sekitar Rp. 8 milyar) kepada organisasi tersebut. Dalam waktu singkat, LP2M harus mengelola dana yang sangat besar sementara pengurus organisasinya belum cukup kuat, sehingga mereka banyak merekrut relawan atau staf baru. Pergesekan antara pengurus lama dengan yang baru dan ketidak-siapan organisasi dalam merespons perubahan, baik perubahan ukuran organisasi maupun pengelolaan dana yang sangat besar, memunculkan konflik yang serius di dalam organisasi. Dua orang pimpinannya mengundurkan diri dan membentuk organisasi baru yang diberi nama Harmonia.

“Pasca gempa, lembaga dana memberikan banyak bantuan dana pada LP2M. Tiba-tiba banyak sekali orang masuk, seperti semut mengerubuti gula; sementara bumer daya manusia di dalam kurang siap *me-manage* keuangan. Ketika tidak ada dana orang-orang yang bekerja siapa; ketika ada uang, orang-orang tersebut justru dikeluarkan oleh mereka yang sudah meninggalkan dan kembali lagi”.²⁷

Lembaga Harmonia yang dimotori oleh bekas pemimpin LP2M membuat organisasi

²⁶ Wawancara dengan Fatiha, Koordinator ASPPUK Padang, 14 Mei 2012.

²⁷ Wawancara dengan Desy, Direktur Harmonia (mantan Direktur LP2M), 15 Mei 2012.

cukup cepat beradaptasi dan menjalankan program yang hampir sama dengan LP2M. Organisasi ini memulai kerja dari awal dengan dana yang terbatas namun dengan semangat dan pengalaman yang cukup panjang, sehingga dianggap ‘cukup’ berhasil di bidangnya. Harmonia menjalankan beberapa program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya perempuan agar mendapatkan hak-haknya serta menjalankan kehidupannya dengan baik. Program kerja yang Harmonia lakukan dimulai dengan pendidikan kritis di tingkat masyarakat dan LSM, terutama terkait dengan isu-isu gender (diskusi basis gender). Kegiatan ini dilakukan agar kesadaran masyarakat meningkat tentang peran perempuan di masyarakat.

“Sumber dana masih swadaya, sedang berusaha cari donor. Tahun pertama pernah ada bantuan dari gubernur Rp. 5 juta, Semen Padang juga menyumbang, jadi mulai ada diskusi”.²⁸

Pengorganisasian masyarakat, terutama perempuan, dengan membangun jaringan *grassroots* perempuan adalah kegiatan lanjutan yang dilakukan Harmonia. Harmonia membangun jaringan agar perempuan dapat bermitra dengan sesamanya supaya memiliki kekuatan dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan aset ekonomi perempuan. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam bentuk

simpan pinjam dengan dana swadaya masyarakat yang dapat digunakan sebagai modal usaha, atau membantu memenuhi kebutuhan seperti biaya sekolah anak dan kebutuhan pokok lainnya.

“Bentuk kegiatan konkret kami adalah melakukan diskusi kelompok basis gender, membangun jaringan *grassroots* perempuan, simpan-pinjam dengan dana swadaya masyarakat”.²⁹

Tidak cukup dengan perjuangan di masyarakat, Harmonia juga berusaha mengubah kedudukan perempuan di masyarakat dengan melakukan advokasi kebijakan yang adil gender. Selama ini kebijakan yang ada belum memihak pada kepentingan perempuan. Dengan adanya advokasi ini, pemerintah dapat mempertimbangkan tiap keputusan yang akan diambil dengan menggunakan perspektif gender. Perempuan sebagai warga negara kurang diperhatikan kebutuhannya, padahal mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

b. Fokus pada Akses Hukum dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

LBH APIK Padang lebih banyak bekerja untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi perempuan. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh organisasi ini adalah perceraian dan beberapa klaim atas hak tanah ulayat oleh perempuan. Selain itu, organisasi ini juga menjalin kerjasama dengan

²⁸ Wawancara dengan Desy, Direktur Harmonia, 15 Mei 2012.

²⁹ Wawancara dengan Desy, Direktur Harmonia, 15 Mei 2012.

media penyiaran (radio) dengan jalan menampilkan pembicara perempuan dalam *talkshow* yang diadakan radio tersebut, dan mengupayakan adanya perempuan yang menjadi penyumbang tulisan tetap di koran lokal. Kegiatan kerjasama dengan media ini telah berhenti selama dua tahun terakhir karena terbatasnya jumlah anggota yang bekerja untuk organisasi ini. Pada akhirnya, karena kekurangan dana, LBH APIK Padang menjadi tidak terlalu aktif. Saat ini para pengurusnya bekerja di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Secara kontras dengan LP2M, LBH APIK termasuk lembaga yang menjadi mati karena para lembaga dana banyak yang beralih dari isu hukum dan keadilan gender ke isu humanitarian.

Organisasi lain yang juga menyediakan layanan korban kekerasan terhadap perempuan adalah WCC Nurani Perempuan, yang khususnya mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan. Selain menyediakan pendampingan langsung terhadap korban kekerasan, organisasi ini juga menyediakan layanan konseling melalui telepon tiap minggu melalui kerjasama dengan radio setempat. WCC Nurani Perempuan melakukan kerjasama dengan Komnas Perempuan untuk menyelenggarakan kampanye selama 16 hari mengenai kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat, dan membantu Ruang Pelayanan Khusus (RPK- bagian dari institusi Kepolisian) yang menyediakan layanan bagi korban kekerasan. WCC Nurani Perempuan bisa bertahan karena banyak dibantu oleh para relawan. Selain mendapat dana dari kerjasama dengan organisasi lain seperti Komnas Perempuan, organisasi ini

juga mengumpulkan dana dari swadaya atau bantuan individu yang tidak mengikat.

“Makanya terakhir kita lebih mefokuskan bagaimana membangun kawan-kawan yang muda supaya sekurang-kurangnya sekarang punya pengetahuan. Tujuan kita adalah membangun hubungan untuk generasi yang selama ini tidak bersentuhan; terpapar sedikit akan ada pula dampaknya. Ini dari kawan-kawan yang muda yang dari bermacam-macam *background*”.³⁰

WCC Nurani Perempuan memiliki beberapa program kerja pendampingan sampai pemulihan korban kekerasan, korban kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender. Tujuan awal WCC Nurani Perempuan berdiri memang hanya untuk melakukan pendampingan korban kekerasan berbasis gender, namun ternyata banyak perempuan yang datang dengan beragam kasus lainnya. WCC Nurani Perempuan biasanya membantu korban minimal dengan merujuk kepada pihak yang lebih menguasai permasalahan perempuan tersebut.

WCC Nurani Perempuan juga banyak melakukan kampanye di media, seperti koran, radio, televisi, dan Facebook untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, dan guna menyebarkan informasi keberadaan WCC Nurani Perempuan. Sudah dua tahun WCC Nurani Perempuan menjalani program ini, dan ternyata efektif meningkatkan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender di Kota Padang. Laporan kasus yang diterima WCC Nurani Perempuan mening-

³⁰ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan, 17 September 2012.

kat dari 54 pada tahun 2010 menjadi 84 kasus di tahun 2011.³¹ Sebenarnya, pada 2005, WCC Nurani Perempuan memiliki *hotline number* yang bisa dihubungi kapan saja oleh korban kekerasan, namun karena banyak teror yang diterima, akhirnya *hotline* ini diputus. Rencananya dalam waktu dekat kegiatan ini akan dihidupkan kembali guna memudahkan korban kekerasan melaporkan kasus yang menyimpannya.

“Itu sebetulnya kita menang di advokasi, kampanye kita semakin sukses, artinya korban semakin ada, kita kampanye di radio, koran lokal, dan Facebook”.³²

Diskusi rutin juga dilakukan oleh WCC Nurani Perempuan. Diskusi biasanya diselenggarakan sebulan atau dua bulan sekali, yang biasa dihadiri oleh 15 orang terdiri dari mahasiswa, aktivis perempuan, dan masyarakat umum. Bahasan diskusi biasanya disesuaikan dengan tema yang sedang berkembang di masyarakat. Harapannya, dengan berjalannya diskusi rutin ini, isu-isu perempuan di Kota Padang dapat dipantau dengan baik sehingga dapat ditentukan solusi terbaik untuk permasalahan yang ada.

c. Fokus pada Isu Partisipasi Politik Perempuan

KPI dan Solidaritas Perempuan menjalankan kegiatan penguatan partisipasi poli-

tik perempuan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi menjelang Pemilihan Umum 1999. KPI mengadakan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi kader organisasi serta melakukan advokasi agar kebijakan publik di Sumatera Barat menjadi lebih adil gender dan demokratis. Personel organisasi ini aktif mengadakan kerjasama dengan media penyiaran maupun media cetak untuk mengangkat persoalan gender dalam masyarakat Sumatera Barat.

Program kerja KPI Kota Padang fokus pada isu-isu korban kekerasan, mulai dari pendampingan dengan fokus kerja di wilayah Solok dengan enam Nagari. Untuk isu kekerasan yang bersifat domestik, seperti KDRT dan poligami, biasanya KPI melakukan advokasi tertutup, yaitu dengan melakukan pendampingan kepada korban untuk melaporkan ke Polda hingga pendampingan pada saat persidangan berlangsung.

“Untuk poligami, KPI pernah melakukan advokasi. Dengan advokasi tertutup, kita mendampingi sampai Polda, ada yang sudah masuk sampai sidang... Kalau pasca gempa, sampai hari ini kita advokasi Pasar Raya; kebanyakan anggota kita berjualan sayur, Bantuan Gempa, Jalan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ... yang terdaftar isunya banyak, cuma yang terdaftar di Kantor Polisi itu. KPI pernah mengadvokasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diperkosa oleh majikannya, dan kebetulan majikannya itu anggota Dewan ...”³³

Selain itu, KPI juga memiliki kegiatan rutin di masyarakat, yaitu Balai Perempuan

³¹ <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/17/01404492/WCC.Temukan.84.Kasus.Kekerasan.terhadap.Perempuan> diakses 11 Juni 2012 Pkl. 15.52 WIB.

³² Wawancara dengan Fatiha, staf LP2M, 14 Mei 2012. Wawancara dengan Tya, relawan WCC Nurani Perempuan, 17 Mei 2012.

³³ Wawancara dengan Tanti Herida, Sekertaris Wilayah KPI Sumatera Barat, 17 Mei 2012.

yang saat ini berjumlah 58 dan tersebar di Sumatera Barat. Kegiatan di Balai Perempuan biasanya membahas isu-isu yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Tema tersebut ditentukan setelah Presidium melakukan rapat koordinasi tiga bulan sekali untuk membahas isu yang tengah banyak disorot. Setelah ditentukan maka, Presidium memiliki kewajiban menjalankan Balai Perempuan dan membahas isu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi tadi. Saat ini Balai Perempuan banyak membahas isu *affirmative action* dan mempersiapkan anggota KPI yang akan mendaftar sebagai caleg. Isu ini diangkat mengingat sebentar lagi diadakan Pemilu untuk anggota legislatif. Diskusi dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan semangat kembali untuk memperjuangkan kuota 30 persen bagi caleg perempuan. Hal ini dilakukan untuk memotivasi anggota KPI untuk maju menjadi caleg. Beberapa anggota sudah ada yang menyatakan diri akan mendaftar, dan mulai melakukan pendekatan ke masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Ada juga beberapa caleg lain yang bukan anggota KPI, namun bekerjasama dan menjadikan KPI menjadi semacam konsultan untuk melakukan kegiatan penyediaan air bersih.

Untuk pendanaan kegiatan, KPI Kota Padang biasanya menuliskan proposal kepada Rakernas (KPI Nasional di Jakarta) untuk kegiatan tertentu lengkap dengan penghitungan anggaran kebutuhan dana.

Sementara SP di Kota Padang membenutk aliansi untuk menjalankan kegiatan kampanye rutin yang diberi nama *weekend campaign*. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan tim manajemen yang terdiri dari

ketua, staf keuangan, dan tim inti yang merumuskan substansi kegiatan. Isu-isu yang diangkat pada kegiatan kampanye ini, antara lain, isu anti-kekerasan, penyadaran masyarakat, serta penyadaran gender untuk perempuan. Pendanaan kegiatan *weekend campaign* di daerah dibantu oleh Aliansi Weekend Campaign Indonesia yang dicarikan dana oleh SP Nasional dengan dana bersumber dari Oxfam. Dengan keterbatasan yang ada, tim manajemen harus mampu menyiasati agar kegiatan dapat berjalan rutin dengan menggunakan dana seminimal mungkin. Oleh karenanya, aliansi banyak melakukan kerjasama dengan radio lokal, yaitu dengan meminta waktu untuk melakukan siaran kampanye anti-kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Kerjasama dibangun sebaik mungkin sehingga aliansi dapat melakukan siaran secara cuma-cuma, tanpa membayar kepada pihak radio. Selama ini kegiatan kampanye yang dilakukan masih mengangkat isu dan kegiatan bersama saja, belum dilakukan sampai kampanye untuk perubahan kebijakan daerah. Selain melakukan kampanye melalui media, calon Komunitas SP Kota Padang juga melakukan kegiatan diskusi langsung dengan masyarakat. Diskusi ini dilangsungkan sesuai dengan tema dan kebutuhan yang ada di masyarakat yang sedang menjadi *hot issue* di sana.

Sama dengan KPI, SP juga menganggap isi anti-kekerasan terhadap perempuan juga merupakan isu yang strategis untuk menarik simpati masyarakat, walau setelah itu isu partisipasi politik perempuan juga menjadi agenda utamanya, terutama menjelang pemilu langsung.

“... kita membuat *weekend campaign*, yaitu kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan. Tiap wilayah ada Aliansi Weekend Campaign, sehingga anggota SP yang terserak bisa melakukan kampanye yang dilakukan dengan bekerjasama dengan media dan radio untuk menyosialisasikan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan”.³⁴

d. Fokus pada Isu Kesehatan dan Sanitasi Sebagai Kebutuhan Dasar

Yayasan Totalitas didirikan untuk menanggapi isu kebutuhan dasar masyarakat pada umumnya. Dalam perjalanannya, mereka akhirnya menyadari bahwa dalam masyarakat, perempuan adalah kelompok yang paling rentan dan paling minim aksesnya terhadap persoalan dasar, seperti akses pada kesehatan dan sanitasi. Relawan Totalitas mulai fokus pada peningkatan gizi ibu dan anak, yaitu melakukan diskusi untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi anak dan keluarga. Mereka juga memberikan bantuan gizi berupa makanan kepada anak, karena masih banyak kasus gizi buruk dan gizi kurang (malnutrisi) yang terjadi di wilayah kerja Totalitas. Yayasan Totalitas menggunakan metode *Positive Deviance*, yaitu metode mengambil contoh penduduk dengan gizi baik yang tinggal di wilayah rentan malnutrisi dan mereka memiliki kemampuan ekonomi dan kebiasaan yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya, rumah tangga ini akan dijadikan contoh bagi rumah tangga lainnya agar dengan keterbatasan yang sa-

ma, mereka tetap dapat hidup sehat dan memiliki gizi yang baik. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Solok.

“... ibu bisa konsentrasi meningkatkan status gizi anak, bisa berdaya dengan apa yang ada di lingkungannya tanpa bantuan kita dari luar. Kita memancing mereka untuk menggali dan mengelola potensi dengan diskusi dengan masyarakat (ibu-ibu). Untuk peningkatan gizi dari anak miskin, kami lihat di komunitas ini ada yang gizi baik, jadi mereka mengadopsi apa yang dilakukan anak dengan gizi baik tersebut, sehingga lebih mudah diterima dan tumbuh-kembang anak baik dan punya kehidupan yang baik”.³⁵

Di bidang sanitasi dan air bersih, Yayasan Totalitas juga pernah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sanitasi dan air bersih. Masyarakat yang sudah memiliki sumber air bersih diberdayakan untuk membuat saluran air bersih ke rumah tangga di wilayah tersebut sehingga tidak perlu berjalan kaki mengambil air. Sejak 2001, kegiatan ini terus berjalan, dan masyarakat bahkan sudah mandiri dan membentuk LSM Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSABS) yang didasarkan pada iuran warga untuk pengelolaan sarana air bersih. Masyarakat bahkan sampai memiliki kantor lengkap dengan fasilitas komputer.

“Ada daerah intervensi kami yang sekarang sudah membentuk LSM Badan

³⁴ Wawancara dengan Yuni Walrif, calon anggota SP Padang, 14 Mei 2012.

³⁵ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas Padang, 15 Mei 2012.

Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSABS). Mereka mengelola sanitasi dan membuat program sejak 2001. Mereka dapat penghasilan dari sana. Mereka mengelola dan memungut kas dari masyarakat, tapi jauh lebih murah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena itu air mereka sendiri, hanya bayar pemeliharaan. Kantor mereka sudah maju, sudah punya komputer dan lengkap”.³⁶

Selain kegiatan di atas, Yayasan Totalitas juga melakukan kegiatan pelatihan advokasi untuk membuat masyarakat pedesaan mampu memperjuangkan hak mereka. Kegiatan dilakukan di lingkup terkecil, yaitu di lingkungan perempuan petani desa. Mereka diajarkan administrasi dan ilmu pertanian yang baik. Kebetulan saat itu, di daerah persawahan dilakukan galian pertambangan yang akan merusak lahan sawah dan membuat padi tidak tumbuh. Perempuan tani tersebut diajarkan cara mengadvokasi kepada Nagari agar proyek galian dihentikan. Setelah satu tahun pembinaan dan proses advokasi, akhirnya perempuan tani ini mampu menghentikan proyek galian tersebut.

“... ada advokasi juga dibantu LBH Padang, akhirnya perempuan mulai berani berbicara dan didengar ninik mamaknya. Di jorong sebelahnya, yang belum menjadi wilayah intervensi, galian masih ada sampai sekarang dan tanah sawah tidak subur lagi”.³⁷

Yayasan Totalitas memilih empat Kabupaten sebagai wilayah kerja mereka. Pemilihan daerah tersebut didasarkan kepada empat kriteria masyarakat, yaitu masyarakat marjinal, sulit akses ke Pemerintah Daerah, ada masalah yang berkembang di masyarakat, serta masyarakat tersebut memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah. Dengan empat kriteria tersebut, Totalitas membantu daerah yang sering terlupakan oleh pemerintah ini supaya mampu memberdayakan diri mereka sendiri sampai mereka memiliki derajat kehidupan yang lebih baik.

Pengorganisasian Perempuan

Untuk melihat strategi pengorganisasian perempuan, maka LP2M dan ASPPUK mengembangkan strategi pengelolaan kelompok dampingan guna mendorong tumbuhnya *organizer* lokal. Strategi pengorganisasian perempuan dievaluasi secara berkala oleh LP2M dan ASPPUK untuk menentukan arah selanjutnya. Berikut adalah hasil dari diskusi dengan para penerima manfaat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan.

“Setelah ikut ASPPUK, cukup berpengaruh di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing anggota kelompok perempuan ini — salah satunya pendapatannya meningkat karena ada pencerahan tentang produk usaha dan pemasaran dari produk usaha kami. Lalu ada juga yang menjawab bahwa kami juga meningkatkan kesadarannya tentang hak kami sebagai seorang perempuan, seorang isteri. Kemudian juga polanya dalam mendidik anak, tidak lagi membedakan antara anak perempuan dengan anak la-

³⁶ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas Padang, 15 Mei 2012.

³⁷ Wawancara dengan Isnaini, Direktur Yayasan Totalitas Padang, 15 Mei 2012.

ki-laki, pembagian kerja dalam rumah misalnya. Terus juga kesadaran bahwa sebagai perempuan, kami punya motivasi untuk mengembangkan diri, tahu bahwa kami sebenarnya bisa memperjuangkan hak kami untuk kepentingan kami sebagai perempuan”.³⁸

Serupa dengan ASPPUK, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) juga melakukan pengorganisasian perempuan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan domestik rumah tangga, khususnya rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Dari hasil FGD dengan kelompok Pekka, dikemukakan manfaat yang dirasakan anggotanya. Selain peningkatan wawasan, kegiatan Pekka juga dirasa memberi dorongan dan bantuan ekonomi masyarakat.

“...Kalau ada ibu-ibu datang dari Pekka Jakarta, kita dapat ilmu: cara urus surat cerai, cara mengatasi KDRT. Kasus di sini tidak banyak. Kalau di Kuningan banyak cerai karena kawin siri, tapi mulai ada yang ikut pelatihan juga dari sana sekarang. Di sini ada belajar tulis yang awalnya buta huruf. Jadi tambah ilmu, tambah wawasan, bisa silaturahmi juga. Yang paling disukai adalah simpan-pinjam. Sebelum ada Pekka, tidak ada simpan-pinjam. Dulu cuma ada Yasinan per minggu per dusun/jorong dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), sekarang Yasinan dengan ada Pekka semakin banyak pesertanya”.³⁹

Sementara itu, KPI mengarahkan strategi pengorganisasiannya demi berusaha menumbuhkan politisi dari kelompok dampingannya untuk Pemilu.

“Kita bisa mengorganisasi sekian banyak perempuan, tapi sebenarnya kita ingin lebih besar dari itu. Inginnya, tidak hanya sejumlah perempuan yang mungkin hanya 500 atau 700 orang; kita ingin punya dampak terhadap masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Kalau kita hanya sekian ratus perempuan, ya, tidak akan signifikan. Nah, di samping itu, apakah kita memang hanya sampai di situ, apakah kita juga ingin mendorong perempuan masuk di dalam pengambilan keputusan, seperti *nagari*, DPRD, kemudian sampai ke Provinsi? Jadi, sebenarnya, ketika Pemilu kemarin, ketika ada kebijakan *affirmative action*, itu sebenarnya peluang besar untuk perempuan”.⁴⁰

Ternyata dalam diskusi terungkap bahwa para perempuan tersebut juga enggan untuk aktif di ruang publik, seperti terungkap berikut:

“Kami belum berani tampil maju dalam politik (jadi caleg). Ada satu atau dua yang berani, tapi saya melihat belum signifikan. Saya juga sadar pentingnya perempuan yang sudah kita berdayakan juga mau mengambil posisi-posisi strategis di dalam politik. Tapi itu yang belum kita temukan dari perempuan-perempuan yang kita berdayakan dalam kelompok ini. Dalam kelompok kita, lebih banyak diskusi tentang strategi pemasaran, *packaging* produk, dan juga bagaima-

³⁸ Focus Group Discussion ASPPUK Sumatera Barat, 17 Mei 2012.

³⁹ Focus Group Discussion Pekka Sumatera Barat, 16 Mei 2012.

⁴⁰ Wawancara dengan Tanti Herida, KPI Sumatera Barat, 17 Mei 2012.

na cara mendapatkan dana serta simpan-pinjam yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari”.⁴¹

Yayasan Totalitas dan WCC Nurani Perempuan melakukan organisasi massa dengan menggunakan pendekatan litigasi atas kasus yang terjadi di masyarakat. Totalitas banyak bergerak di bidang kesehatan dan sanitasi, namun menggunakan perspektif gender untuk tiap kegiatan yang dilakukan.

“Pada kasus gizi buruk, kita melakukan kegiatan Positive Defian, yaitu peningkatan gizi dari anak miskin; kami lihat di komunitas ada yang gizi baik, jadi mereka mengadopsi apa yang dilakukan anak dengan gizi baik tersebut. Ibu bisa konsentrasi meningkatkan status gizi anak, bisa berdaya dengan apa yang ada di lingkungannya, tanpa bantuan kita dari luar. Kita memancing mereka untuk menggali dan mengelola potensi dengan diskusi dengan masyarakat (ibu-ibu). Ada juga program ketahanan pangan; setelah program dampingan satu tahun, ibu petani berhasil menghentikan galian pertambangan yang merusak tanah pertanian dan menghambat pertumbuhan buah padi. Mereka mampu mempengaruhi ninik mamaknya agar menyuruh keponakannya melakukan galian. Ada advokasi juga, dibantu LBH Padang. Akhirnya perempuan mulai berani berbicara dan didengar ninik mamaknya”.⁴²

WCC Nurani Perempuan banyak melakukan kegiatan dampingan terhadap korban.

“... dalam dua tahun terakhir ini, kita lebih banyak menangani kasus korban kekerasan seksual. Sekarang Mely menangani tiga kasus perkosaan, anak-anak sekolah. Dan kebanyakan si korban tidak mengenal pelaku. Masih ada satu kasus KDRT, tetapi masih lebih banyak kasus kekerasan seksual”.⁴³

Namun demikian, untuk menjawab permasalahan yang ada, Yayasan Totalitas dan WCC Nurani Perempuan pun melakukan upaya mitigasi untuk mencegah atau pun menekan permasalahan perempuan Minangkabau.

“... sebelumnya pernah ada kegiatan ketahanan pangan, untuk kelompok tani perempuan, kami kenalkan dengan pengelolaan administrasi kelompok serta kemampuan berpikir kritis terhadap lingkungan”.⁴⁴

“Selain kerja pelayanan, kita juga melakukan kampanye Advokasi, kegiatan rutin diskusi satu bulan sekali, kadang tiga bulan sekali, tapi kita usahakan terus, artinya pendidikan itu tetap”.⁴⁵

Tantangan

Tantangan pengelola yang dialami oleh organisasi berbasis massa seperti KPI dan SP sangat nyata dilihat dari melemahnya semangat berorganisasi di akar rumput. SP dengan segala persoalan yang dialaminya sudah lebih dahulu tutup di Kota Padang, wa-

⁴¹ Wawancara dengan Fatiha, ASPPUK, 14 Mei 2012.

⁴² Wawancara dengan Isnaini, Yayasan Totalitas, 15 Mei 2012.

⁴³ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 17 Mei 2012.

⁴⁴ Wawancara dengan Isnaini, Yayasan Totalitas, 14 Mei 2012.

⁴⁵ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 17 Mei 2012.

laupun sekarang sudah mulai ada individu yang dikader untuk kembali mengembangkan cikal bakal organisasi SP di Padang.

“Saat ini SP yang ada di Kota Padang bukan merupakan komunitas. Dulu memang sudah ada komunitas SP yang resmi, namun dengan suatu alasan, komunitas tersebut dibekukan. Saat ini masih ada beberapa anggota yang masih aktif menjalankan program-program SP”.⁴⁶

Koalisi Perempuan tidak jauh berbeda, walaupun sekretaris wilayah (Sekwil) KPI masih cukup aktif menghadiri undangan-undangan yang datang ke organisasi. Namun untuk mengorganisir anggotanya, dirasakan sangat sulit. Hal ini dibuktikan dengan sudah mulai sepiunya Balai Perempuan, sebagai kegiatan rutin anggota KPI. Alasan yang dikemukakan tentang tidak aktifnya Balai Perempuan adalah karena kekurangan dana untuk membiayai pertemuan-pertemuan. Namun setelah dikejar, maka terungkap bahwa selain masalah dana, Balai Perempuan tidak lagi dirasa mewakili kebutuhan dan kepentingan para perempuan di daerah tersebut. Hal ini dianggap sebagai masalah yang serius karena model organisasi KPI yang berbasis kepada isu dianggap sulit untuk mengembangkan dirinya di suatu wilayah, karena belum tentu wilayah tersebut punya perhatian atau kepedulian kepada isu yang ditawarkan.

“...Sekarang susah mencari kawan yang betul-betul tidak mengharapkan uang”.⁴⁷

“Biasanya yang sering membuat pro dan kontra itu kalau sudah ada uang. Contohnya kasus kejadian gempa tahun lalu. Katanya ada anggota Presidium yang menyelewengkan dana Rp. 21 juta. Yang menuduh anggota. Akhirnya kita buka bersama, kita tunjukkan kuitansi. Organisasi massa kalau ada uang ribut, tapi kalau tidak ada uang tidak ribut”.⁴⁸

“... sebenarnya dalam AD/ARTnya itu Presidium, karena mereka yang memiliki Anggota, dan Sekwil yang menjalankan. Tapi di lapangan, Sekwil yang mengambil semua. Banyak faktor, karena kesibukan Presidium itu sendiri, dan ada pula permasalahan biaya transportasi. Sudah disampaikan ke pusat, setiap rapat kita ajukan, karena KPI kesulitan dana. Kita dituntut harus bisa mencari dana sendiri dengan mengajukan proposal ke daerah”.⁴⁹

Permasalahan pembagian kerja diungkapkan sebagai salah satu penyebab sepiunya Balai Perempuan. Pasalnya, semua kegiatan KPI di Kota Padang seolah-olah hanya menjadi tanggungjawab Sekwil semata. Presidium cenderung pasif menjalankan kegiatan KPI dengan berbagai alasan. Dengan demikian, model organisasi yang lebih mengutamakan wilayah sebagai basis kerjanya jauh lebih bertahan lama, karena masyarakat wilayah tersebutlah yang akan menentukan isu apa yang akan dibahas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan istri kepala desa, lurah atau bahkan camat juga bisa aktif terlibat.

⁴⁶ Wawancara dengan Yuni Walrif, Calon anggota SP Padang, 14 Mei 2012.

⁴⁷ Wawancara dengan Tanti Herida, KPI, 17 Mei 2012.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

LP2M merupakan organisasi berbentuk Perkumpulan dalam mana pengurus eksekutif dinamakan sebagai Badan Pelaksana yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Di atasnya ada Badan Pengurus yang ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Perkumpulan diyakini lebih terbuka dan demokratis karena kepemimpinan tidak dipegang oleh pendiri yang langsung menjadi badan eksekutif. Sebaliknya, Yayasan dianggap lebih tertutup kepemimpinannya. Keanggotaan Badan Pengurus dalam Perkumpulan adalah mantan direktur yang sudah digantikan, ditambah dengan beberapa orang yang dianggap mumpuni dalam hal organisasi maupun substansi isu yang ditangani. Struktur organisasinya mengharuskan Badan Pelaksana atau pengurus harian membuat pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus, baik pertanggungjawaban program maupun kegiatan. Badan Pengurus akan menentukan rapat untuk membahas laporan kepada Badan Pelaksana, sehingga *governance* organisasi tampak lebih terbuka dan demokratis. Dalam kasus LP2M, ketika terjadi konflik, tidak jarang Badan Pengurus (atau individu Badan Pengurus yang pernah menjadi Direktur sebelumnya) mau tidak mau juga terlibat atau dilibatkan di dalam konflik.

“Dalam bayangan Utopia kita, kepemimpinan yang baik katanya yang partisipatif. Tapi kenyataannya, pemimpin adalah satu orang yang bisa melaksanakan manajemen. Bentuk organisasi Yayasan yang partisipatif itu sulit. Di LP2M saya lihat dan saya coba untuk belajar dari pengalaman. Itu menjadi pelajaran bagaimana menjadi LSM yang akuntabel. LP2M dari segi manajemen berjalan baik. Tetapi yang menjadi konflik karena

ada kubu yang masuk dan kasak-kusuk pasca bencana”.⁵⁰

Keterlibatan Badan Pengurus menimbulkan anggapan bahwa mereka tidak netral. Ada anggapan bahwa mantan direktur yang duduk di Badan Pengurus justru memperkeruh konflik yang ada. Lebih jauh, bahkan Badan Pengurus sampai melakukan pemecatan terhadap Direktur Eksekutif dan Manager Program.

“... pengalaman LP2M sulit membangun partisipatif secara utuh. Yang terjadi, lembaga besar, dana besar, prinsip di organisasi sangat sulit diterapkan karena banyak kepentingan. Point A coba dikaburkan dengan isu B. Itu sangat berpengaruh. Sudah coba diatasi dengan membangun dalam diri dan orang sekitar bahwa kita harus punya keterbukaan hati, keterbukaan cara pikir. Sebetulnya di LP2M ini terjadi dan jalan, tetapi sudah ada yang punya kekuasaan tersembunyi di organisasi, maka gaya partisipatif akan sulit dilakukan”.⁵¹

Struktur organisasi Perkumpulan, apabila tidak diikuti dengan penguasaan substansi dasar pemikiran feminis, atau adanya solidaritas persaudaraan perempuan dalam membangun dan menjaga organisasi demi mencapai keadilan dan kesetaraan gender, maka hal itu tetap saja tidak menjamin jalannya organisasi menjadi lebih terbuka, demokratis. Malah sebaliknya, semakin membebani organisasi, bahkan sampai pada titik krusial karena keluarnya Direktur Ekseku-

⁵⁰ Wawancara dengan Desi, mantan Direktur LP2M, 15 Mei 2012.

⁵¹ *Ibid.*

tif dan Manager Program dan digantikan sementara oleh anggota Badan Pengurus sebagai Direktur Pelaksana.

“... dalam Mubeslub, dipilih salah satu senior untuk jadi *project manager*, tapi rekan-rekan baru belum tahu apa-apa, malah menolak dia untuk dipilih jadi *project manager*. Bagaimana mereka menolak, bagaimana mereka tahu orang itu buruk, kalau mereka baru kenal dua minggu? Sangat tidak masuk akal”.⁵²

“Saya berbeda pandangan dengan pengurus lain. Saya rasa perlu dikonfirmasi dan dijelaskan masalahnya. Tapi yang lain mengatakan, sudah tidak ada apa-apa dan besok kembali bekerja. Ini tidak masuk akal. Saya tidak bisa terima keputusan. Mereka rapat lima menit dan langsung memberhentikan direktur yang sedang menjalankan lima program, dan mereka mempertahankan teman-teman yang baru kerja tiga bulan. Saya heran, saya diberhentikan sebagai pengurus, padahal saya belum dievaluasi, dan sudah bekerja 14 tahun di sana”.

Dalam hal tantangan untuk organisasi “cabang” dari Jakarta, Pekka dan ASPPUK menghadapi kendala tersendiri. Keterbatasan sumberdaya berakibat pada keterbatasan kegiatan organisasi. ASPPUK yang banyak memiliki kegiatan untuk perempuan pengusaha kecil masih merasa menghadapi kendala pendanaan modal sehingga produktivitas dan pemasaran produk tidak maksimal.

“Pemasaran produk masih sulit, masih banyak saingan. Produk tidak bisa ma-

suk ke toko karena tidak diterima akibat tidak ada label. Modal masih terbatas. Ya, solusinya dengan bantuan modal dan bantuan pemasaran”.⁵³

Pekka di Sumatera Barat sudah memiliki kegiatan rutin yang cukup baik. Koordinasi dengan Pekka Jakarta pun berjalan lancar, terbukti dengan kunjungan tiga bulan sekali dari Jakarta untuk memberikan pendidikan kepada ibu-ibu anggota. Namun, untuk bantuan pendanaan, memang belum ada dari Jakarta. Kegiatan utama Pekka adalah simpan-pinjam, yang juga banyak diminati karena bisa memperoleh modal untuk membuka usaha dan biaya sekolah anak. Selain itu, yang menjadi tantangan adalah banyaknya produk kerajinan yang sudah dibuat namun belum bisa dipasarkan karena produk yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Ada produk kerajinan yang mau dijual, tapi belum tahu mau jual kemana. Baru produksi saja. Dulu pernah studi banding ke Cianjur bikin krupuk wortel, tapi di sini harga wortel mahal sekali, modalnya tidak ada”.⁵⁴

Serupa dengan organisasi lain, WCC Nurani Perempuan juga memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan. Hanya saja WCC Nurani Perempuan tidak menganggapnya sebagai kendala untuk bergerak. Beberapa waktu lalu, sempat ada upaya bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Namun karena satu dan lain hal, kerjasama tersebut tidak berjalan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Focus Group Discussion ASPPUK, 17 Mei 2012.

⁵⁴ Focus Group Discussion Pekka, 15 Mei 2012.

dengan baik. Dalam hal pelaksanaan teknis, WCC Nurani Perempuan juga sering mendapat ancaman atau teror, seperti yang terjadi dengan *hotline* nomor kontak yang WCC Nurani Perempuan buat dengan harapan korban dapat menghubungi langsung kapan saja. Ada beberapa pihak yang tidak suka kehadirannya, dan menggunakannya untuk mengancam keberadaan WCC Nurani Perempuan.

“Mungkin saya yang pertama kali marah dengan Komnas, yang menyuruh untuk berkoordinasi dengan P2PTA pada tahun 2003-2004, karena kita waktu itu P2PTA punya dana. Tapi kami mendapat pengalaman awal yang kurang baik dengan P2PTA. Mereka menyuruh kita membuat perencanaan dan segala macam. Sebetulnya P2PTA bukan lembaga yang mengkoordinasi lembaga Perempuan Pengada Layanan. Mereka memainkan sendiri, yang isinya adalah mantan-mantan istri para pejabat, perempuan dinas”.⁵⁵

“Kita ingin membicarakan secara khusus, karena kawan-kawan kita yang kerja di lapangan itu, mereka banyak mendapat ancaman macam-macam. Kita butuh pembelajaran dan strateginya seperti apa. Kadang kita tiap malam mendapat telepon, tapi tidak ada suaranya”.⁵⁶

Yayasan Totalitas sudah menjalankan kegiatannya dengan baik. Dalam hal sumber dana pun mereka memiliki inisiatif untuk menulis proposal dan mengajukan kepada donor. Yang masih menjadi kendala adalah

melakukan perubahan sosial di masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Ketika masa satu atau dua tahun dampungan, masyarakat melaksanakan program dengan baik. Namun setelah selesai mendapat dampungan, mereka mulai melupakan dan tidak menjaga keberlangsungan kegiatan. Kendala dana sering dijadikan alasan, padahal kegiatan yang dilakukan hanya membutuhkan sedikit dana atau bahkan tidak sama sekali.

“Semua kegiatan yang dilakukan memang membutuhkan dana. Namun tidak besar dan kami juga sudah ajarkan agar mereka bisa kolektif mengumpulkan dana. Tapi sebenarnya bukan dana. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan keberanian: berani berbicara di rapat-rapat itu tidak membutuhkan dana. Memang sejak awal, kami tidak pernah memberikan intervensi bantuan dana untuk mereka. Ini sangat kita hindari, supaya mereka tidak tergantung pada uang dan tidak akan berharap terus. Jika ada organisasi lain datang, nanti kelak mereka tidak mau lagi kalau tidak ada dana”.⁵⁷

Penutup

Ruang untuk mengangkat permasalahan gender ke permukaan makin terbuka setelah perubahan politik tahun 1998. Kondisi ini memungkinkan peningkatan sejumlah or-nop perempuan di Sumatera Barat, baik yang didirikan dengan inisiatif lokal maupun karena adanya kebutuhan perluasan jaringan organisasi perempuan berskala nasional. Ornop perempuan yang berkembang di

⁵⁵ Wawancara dengan Yefri Heriani, Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 17 Mei 2012.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wawancara dengan Isnaini, Yayasan Totalitas, 15 Mei 2012.

Sumatera Barat setelah 1998 memilih fokus kerja yang beragam, mulai dari advokasi kebijakan, pengorganisasian unit ekonomi perempuan, layanan bantuan hukum sampai kepada layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan.

Pertumbuhan organisasi perempuan ini membutuhkan dukungan sumberdaya manusia, dana dan pengetahuan — yang tampaknya belum tersedia di Sumatera Barat. Dengan demikian, masing-masing organisasi berusaha untuk membuka hubungan dengan organisasi perempuan atau organisasi non-perempuan yang telah berpengalaman bekerja dalam bidang yang ditekuni organisasi. Akibatnya, prioritas pembangunan jaringan lebih diarahkan kepada organisasi perempuan di luar wilayah, dan bukan dengan organisasi perempuan di Sumatera Barat sendiri.

Dalam usaha mengubah tatanan hubungan gender setempat, ornop perempuan memilih untuk bekerja melalui institusi politik non-tradisional, seperti kelompok usaha perempuan, kelompok diskusi warga maupun parlemen lokal. Pilihan ini menunjukkan harapan bahwa peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat bisa dibenahi, dengan lebih banyak melibatkan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan yang didominasi laki-laki. Ornop pe-

rempuan menghindari cara kerja yang secara tegas berhadapan dengan institusi adat serta agama, meskipun telah mengidentifikasi bahwa sumber hambatan akses perempuan terletak pada proses pendefinisian keduanya. Sebagian besar ornop perempuan mengungkapkan kekhawatirannya akan penolakan masyarakat jika bersikap konfrontatif dengan institusi adat dan agama.

Agenda organisasi perempuan untuk meningkatkan akses perempuan berperan dalam pembuatan keputusan lokal merupakan tanggapan yang menjawab persoalan gender lokal. Akan tetapi organisasi perempuan menghadapi kendala baik internal (kekurangan sumberdaya), maupun eksternal (resistensi masyarakat terhadap problem gender) dalam melakukan kerjanya. Sumberdaya organisasi kemudian lebih dialokasikan untuk mengangkat permasalahan lain yang lebih mungkin mendapat dukungan dana untuk kelangsungan organisasi. Kesulitan untuk memperoleh dukungan untuk mengangkat persoalan lokal merupakan hambatan umum yang ditemui ornop perempuan dalam bekerja. Keadaan ini akan berlanjut jika ornop perempuan Sumatera Barat tidak menciptakan strategi untuk melibatkan diri dalam pendefinisian institusi politik adat dan agama, serta tidak menemukan dukungan baik dari wilayahnya sendiri maupun dari luar untuk melakukannya.***

Upaya Membangun Pengorganisasian Perempuan di Lampung

Ika Wahyu Priaryani & Aris Arif Mundayat

Interpretasi atas nilai-nilai agama dan budaya di Lampung merupakan penopang utama bertahan dan menguatnya nilai patriarki dalam masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar dalam mengembangkan kepemimpinan perempuan di Lampung. Perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan di Lampung sulit masuk ke ruang publik, meskipun banyak organisasi perempuan yang memiliki potensi untuk lebih aktif di kebijakan publik dan politik lokal. Bagaimana organisasi perempuan di Lampung memainkan peran strategis bagi berlangsungnya proses penyadaran akan berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam tulisan ini hal itu diungkap.

Lampung merupakan wilayah di mana perpaduan antara budaya Melayu dan Jawa sangat kental. Masyarakat Lampung terdiri dari beragam etnis; ada Jawa, Banten, Sunda, Sumatera Selatan dan Tionghoa. Banyaknya warga etnis Jawa di wilayah Lampung akibat gelombang transmigrasi yang dilakukan sejak masa penjajahan Belanda. Sayogyo (1986) dalam buku *Sosiologi Pedesaan* menulis bahwa Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di luar pulau Jawa. Wajar bila di beberapa wilayah Lampung bisa ditemui komunitas-komunitas Jawa. Selain budaya Jawa, Lampung juga mempunyai suku dengan budaya sendiri yang banyak terpengaruh oleh budaya

Melayu dari kerajaan Sriwijaya. Dalam lambang daerahnya, Provinsi Lampung mempunyai motto *Sang Bumi Ruwai Jurai*. Sang Bumi diartikan sebagai rumah tangga agung yang berbilik, Ruwai Jurai diartikan sebagai dua unsur golongan masyarakat yang mendiami Provinsi Lampung — yang juga dimaknai sebagai masyarakat asli dan pendatang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2000¹ menyebutkan, Lampung memiliki komposisi penduduk berdasarkan suku yang beragam, dalam mana suku Jawa menempati porsi terbesar,

¹ Data diambil dari tahun 2000 sebab setelahnya BPS tak lagi mengelompokkan penduduk berdasarkan suku.

yakni 4.113.731 jiwa (61,88 persen). Mereka disusul oleh Lampung, 792.312 jiwa (11,92 persen); Sunda, termasuk Banten 749.566 jiwa (11,27 persen); Semendo dan Palembang 36.292 jiwa (3,55 persen); Suku bangsa lain, antara lain adalah Bengkulu, Batak, Bugis dan Minang yakni 754.989 jiwa (11,35 persen).

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2011, Lampung berada di angka 71,42, yang masuk dalam kategori sedang. Penyandang buta aksara di Lampung sebanyak 41.742 orang, 28.386 di antaranya adalah perempuan. Perempuan dalam masyarakat Lampung, sama halnya dengan perempuan di masyarakat Jawa yang menjadi mayoritas penduduk, terperangkap dalam budaya patriarki. Interpretasi atas nilai-nilai dari agama dan budaya merupakan penopang utama bertahan dan menguatnya nilai patriarki dalam masyarakat. Interpretasi agama Islam dalam bingkai patriarki diduga menjadi salah satu tantangan besar dalam mengembangkan kepemimpinan perempuan.

Masyarakat Lampung yang menetap di pedesaan dan relatif jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi merupakan masyarakat miskin. Mata pencaharian utama di wilayah miskin adalah di sektor agraris, dan konsentrasi perempuan yang rentan terhadap kekerasan di Lampung banyak tersebar di desa-desa agraris.

Penduduk desa menempati rumah-rumah kecil yang dihuni oleh rata-rata enam anggota keluarga, hal mana mengkondisikan mudahnya terjadi *incest* atas dasar kekerasan. Data statistik untuk kasus *incest* tiap tahun cukup tinggi, yaitu sekitar 10 kasus per tahun antara 2005-2011. Hal ini menunjukkan bahwa institusi keluarga bukan me-

rupakan institusi yang menjamin keamanan bagi perempuan. Kasus *incest* cenderung terjadi antara bapak terhadap anak, atau kakak laki-laki terhadap adik perempuan. Ketika kasus terjadi, keluarga cenderung menutupinya, karena dianggap aib keluarga. Posisi perempuan dalam hal ini dibiarkan rentan oleh keluarganya sendiri.

Berangkat dari banyaknya kasus kekerasan perempuan di wilayah pedesaan di Lampung, Perkumpulan Damar yang diketuai oleh S.N. Laila hadir sebagai upaya untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, dengan fokus kegiatan pada pengorganisasian perempuan pedesaan.

Geliat Organisasi Perempuan di Lampung

Isu kekerasan terhadap perempuan pasca Tragedi 1998 merupakan latarbelakang Perkumpulan Damar mengukuhkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sebagai organisasi yang baru tumbuh, Perkumpulan Damar cukup spesifik dan khas dalam memilih isu, yaitu advokasi dan pemberdayaan di bidang hukum bagi perempuan. Tujuannya adalah agar kaum perempuan menyadari bahwa ada perlindungan hukum yang dapat diakses untuk mencegah dan mengatasi kekerasan. Sebelum Perkumpulan Damar terbentuk, terdapat organisasi yang lebih dahulu memfokuskan kerjanya pada isu perempuan dan anak, yakni Lembaga Studi Advokasi Perempuan dan Anak (Elsapa).

Perkumpulan Damar bergerak di lima kabupaten/kota (Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan). Salah satu yang diamanatkan Perkumpulan Damar ialah mandat

menjadi lembaga advokasi agar perempuan bisa bebas dari diskriminasi, dan hak-haknya terpenuhi. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang mulai aktif pada tahun 2000. Program yang dijalankan antara lain memberikan bantuan hukum dan konseling bagi perempuan korban kekerasan. Lembaga ini juga aktif melakukan advokasi ke pemerintah agar menyediakan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Advokasi ditujukan untuk menyadarkan aparat penegak hukum agar berempati terhadap perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Lembaga Advokasi Perempuan Damar memulai aktivitasnya berdasarkan kondisi bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *incest* dengan modus perkosaan banyak dihadapi oleh perempuan, dan juga anak di bawah umur. Sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil, dalam melaksanakan kegiatannya, Perkumpulan Damar dan juga Lembaga Advokasi Perempuan Damar banyak bekerjasama dengan kalangan masyarakat sipil lainnya. Sebagai upaya lebih menyuarakan dan menggaungkan kegiatan advokasi dan kesadaran adil gender Perkumpulan Damar juga menggunakan kesenian sebagai mediumnya. Perkumpulan Damar hadir di basis-basis komunitas pengorganisasian Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) lain di Lampung, guna ikut mewarnainya dengan perspektif adil gender. Komunitas yang dilayaninya beragam: ada nelayan, kaum miskin kota, petani, buruh, antara lain.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar mulai memperkenalkan diri kepada publik melalui aktivitas *tour of survivors*. Dalam ak-

tivitas itu, perempuan korban kekerasan melakukan testimoni ke oditur militer, kepolisian wilayah, kejaksaan, serta aparat penegak hukum dan beberapa pemangku kepentingan lain. Dari kegiatan itu, Lembaga Advokasi Perempuan Damar memperoleh kepercayaan untuk mendampingi korban kekerasan. Pendampingan yang dilakukan bisa dari rumah sakit, polisi ataupun para korban datang sendiri ke kantor Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Proses pendampingan awal adalah konseling berupa bimbingan psikologis. Staf Lembaga Advokasi Perkumpulan Damar menanyakan kronologis kejadian kepada pihak korban. Lembaga Advokasi Perempuan Damar tidak dapat memproses semua pengaduan korban secara hukum, karena seringkali korban merasa proses hukum akan membuka aib mereka kepada umum.

“Tidak semua kasus yang diajukan ke Damar diproses hukum. Kita juga menyediakan layanan konseling psikologis”.²

Persoalan kekerasan terhadap perempuan kerap kali dikaitkan dengan nama baik keluarga, dan hal ini menghambat posisi perempuan itu sendiri secara hukum.

Sehubungan dengan hal itu, Lembaga Advokasi Perempuan Damar memberikan bantuan bimbingan psikologis dan penguatan akan kesadaran hak kepada pihak keluarga. Tujuannya adalah supaya pihak keluarga ikut aktif berperan untuk menguatkan korban, sehingga sang korban memiliki

² Wawancara dengan Mahmudah, Divisi Jaringan dan Hukum Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Lampung 11 Mei 2012.

keberanian untuk menggugat pelaku secara hukum.

“...Penguatan tidak hanya dilakukan kepada korban, tapi juga kepada keluarga, karena apa yang terjadi kepada korban kekerasan bukan merupakan kesalahan korban. Ini bukan aib”.³

Lembaga Advokasi Perempuan Damar juga memberikan loklatih bagi kepolisian dan kejaksaan untuk terlibat aktif dalam penanganan kasus, atau litigasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Konsep pendidikan yang dilaksanakan bukan pendidikan dalam kelas atau ruang, tetapi proses belajar bersama dalam menangani kasus aduan kekerasan terhadap perempuan secara langsung. Proses advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan melibatkan banyak staf, tidak hanya staf litigasi semata. Selain pendidikan, ada pula kegiatan membangun database kasus kekerasan yang berguna untuk memahami fenomena kekerasan di wilayah dampingan advokasi. Bersama dengan Perkumpulan Damar, Lembaga advokasi Perempuan Damar juga melakukan kampanye ke desa-desa agar masyarakat memahami masalah kekerasan terhadap perempuan, supaya masyarakat dapat secara aktif ikut mencegah dan menangani kasus yang muncul. Pada awalnya, mereka membangun kerjasama dengan kelurahan dan desa untuk melibatkan unit organisasi pemerintahan terendah, yaitu tingkat RT dan RW. Strategi lain yang dilakukan Perkumpulan Damar ialah menggunakan pertunjukan, yaitu mengadakan pesta rakyat di

desa-desa, bekerjasama dengan penyelenggara teater yang mementaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya pementasan ini lebih mendekatkan Perkumpulan Damar dengan komunitas di pedesaan. Untuk kegiatan pementasan teater, Perkumpulan Damar bekerjasama dengan Teater Satu Lampung.

Teater Satu Lampung sendiri lahir pada 18 Oktober 1996, diinisiasi oleh Iswadi Pratama dan Imas Sobariah. Iswadi adalah seniman yang banyak menaruh perhatian pada lakon perempuan dan kajian feminisme. Sementara itu, Imas adalah pegiat teater yang pada akhirnya juga banyak bergulat dengan permasalahan perempuan. Perkumpulan Damar dan Teater Satu berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik karena melihat bahwa melalui kesenian, masyarakat awam dapat memahami dan menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat merugikan masyarakat sendiri. Melalui cara ini, Damar mampu menyampaikan pesan tentang mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan bagaimana mengatasi dan mencegahnya.

Perkumpulan Damar juga menginisiasi Gerakan Perempuan Lampung (GPL) yang anggotanya merupakan peserta dari kegiatan pelatihan adil gender yang diadakan Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Kelahiran GPL banyak didukung oleh laki-laki, seperti Ahmad Yulden Erwin dari Komite Anti Korupsi (KoAK), Ikram dari Universitas Lampung dan (alm.) Imam Ghozali. GPL mulai digagas dan menjadi bahan diskusi pada tahun 2005-an, diawali dari kegelisahan alumni peserta pelatihan adil gender dan anti-kekerasan. Alumni yang berasal dari kegiatan pelatihan tersebut membentuk or-

³ Wawancara dengan Selly Fitriani, Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Lampung 11 Mei 2012.

ganisasi masing-masing di wilayah kabupaten/kota. Enam organisasi tingkat kabupaten/kota kemudian mendeklarasikan GPL. Kegiatan GPL diawali dengan pertemuan organisasi lintas kabupaten secara rutin.

Kelahiran GPL tidak bisa dilepaskan dari kegiatan advokasi yang telah dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan ornop lainnya di wilayah Lampung. Anggota GPL merupakan individu-individu yang berjejaring dengan Damar maupun dampingan ornop yang merupakan mitra Damar. Ornop tersebut adalah Kantor Bantuan Hukum (KBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komite Anti Korupsi (KoAK), Yayasan Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa (YLPMD), dan lembaga lokal lainnya. GPL dideklarasikan pada Maret 2008. Dalam deklarasinya, GPL mencatat anggotanya ada di 17 kecamatan, 80 desa/kelurahan, dan beranggotakan 2.118 orang. Kepegunungan GPL ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa. Anggota GPL rata-rata adalah aktivis di masyarakat atau komunitasnya. Ada yang menjadi kader Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau kegiatan sejenis.

GPL lahir dan melakukan deklarasi menjelang hiruk-pikuk Pemilihan Umum 2009. Hal ini serta-merta dikaitkan dengan kepentingan politik praktis dalam rangka pengumpulan dan pengerahan massa. Majunya S.N. Laila dan beberapa pegiat Damar sebagai calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) banyak mendapat sorotan, baik dari yang mendukung ataupun yang tidak. Dalam deklarasinya, GPL menca-

rakat yang adil untuk semua, dan terpenuhinya hak dasar perempuan melalui kepemimpinan gerakan perempuan yang progresif.

Misi GPL,⁴ yakni:

1. Membangun dan memperkuat gerakan perempuan melalui penguatan kapasitas anggota secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Membangun mekanisme kerja organisasi yang akuntabel dan transparan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi.
3. Memperjuangkan pemenuhan hak dasar perempuan, dengan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat dan adil gender.
4. Membangun pengembangan ekonomi perempuan dengan mengembangkan ekonomi alternatif.

Selain Damar, terdapat beberapa organisasi yang bekerja pada isu perempuan, seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Solidaritas Perempuan (SP). Aktivis KPI Lampung tersebar di berbagai tempat dan aktif dalam membentuk komunitas, antara lain Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP).

JPrP terbentuk dari balai-balai di komunitas yang awalnya didirikan oleh Urban Poor Consortium (UPC). Mulai 2008, perempuan di komunitas-komunitas yang tersebar di beberapa kelurahan mulai bergabung dalam wadah JPrP. Balai-balai tersebut di antaranya Kesatuan Perempuan Sukaraja (KPS), Forum Masyarakat Kramat (For-

⁴ Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Gerakan Perempuan Lampung, 2008.

mak) dan Permata. Balai atau komunitas tersebut tersebar di wilayah pesisir Lampung yaitu di Sukaraja, Kramat, Gruntang dan Kangkung. Wilayah ini merupakan tempat kaum miskin kota, kawasan yang padat penduduk. Kawasan pesisir ini dihuni keluarga nelayan, dan seperti halnya masyarakat nelayan pada umumnya, para lelaki pergi melaut dan perempuan lebih aktif dalam kegiatan komunitas. Selain kerja domestik, perempuan juga melakukan kerja produktif untuk menopang ekonomi keluarga, seperti mengumpulkan sampah untuk diolah menjadi pupuk dan barang lainnya, juga berdagang, dll. Meskipun demikian, perempuan nelayan rentan mengalami KDRT, terutama saat musim paceklik tiba.

Salah satu pendiri JPrP, Faisal, menyatakan bahwa perempuan bisa menjadi lokomotif perubahan. Bila perempuan bisa berdaya dalam komunitasnya, kekerasan terhadap perempuan akan berkurang dan harkat perempuan dapat setara dengan laki-laki.⁵ JPrP sebagai kelompok perempuan mulanya berkumpul untuk mengambil hak kepemilikan tanah, karena tanah di wilayah pengorganisasian JPrP masih ilegal. JPrP mulai melakukan demonstrasi ke kantor-kantor pemerintah untuk menuntut hak-hak kepemilikan tanah para anggotanya. Demonstrasi dilakukan karena warga mengetahui akan ada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur wilayah pesisir, dalam mana tanah di wilayah itu akan digusur untuk proyek reklamasi pantai. Isu yang ditangani JPrP selain kasus keseharian masyarakat, juga masalah kepe-

milikan tanah, kelangkaan air bersih dan masalah layanan administrasi kependudukan seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). *Community organizer* dari JPrP adalah aktivis KPI yang juga dekat dengan UPC dengan UpLink.

Ranah Kerja Organisasi Perempuan di Lampung

Antara 2000-2008, Lembaga Advokasi Perempuan Damar melakukan advokasi anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak. Advokasi ini menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antar pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk kerjasama dengan kepolisian dan rumah sakit untuk membuka pos layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun memiliki Rumah Aman sendiri, Lembaga Advokasi Perempuan Damar juga bekerjasama dengan Rumah Aman yang dikelola oleh Dinas Sosial kabupaten/kota untuk membantu penanganan korban kekerasan. Layanan tersebut sangat nyata dirasakan oleh warga masyarakat. Ini membuat Lembaga Advokasi Perempuan Damar dikenal baik di kalangan pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum maupun masyarakat secara luas. Lembaga Advokasi Perempuan Damar juga cukup dikenal melalui pemberitaan media massa, karena melakukan kegiatan advokasi di bidang hukum untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Sementara itu Perkumpulan Damar menggerakkan kaum perempuan pedesaan

⁵ Wawancara dengan Faisal, Pendiri JPrP, Mei 2012, melalui sambungan telepon.

untuk membentuk organisasi-organisasi perempuan tingkat lokal. Pengorganisasian tersebut berbasis pada keyakinan bahwa perempuan sebagai anggota masyarakat perlu lebih berperan aktif berupaya mengakhiri kekerasan terhadap kaumnya. Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Sejak 2006, Perkumpulan Damar dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar mulai mengorganisasi perempuan di lima kabupaten di Lampung. Upaya ini telah menghasilkan Deklarasi Gerakan Perempuan Lampung dengan anggota sekitar 1.800 perempuan dari Kabupaten Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tanggamus pada Februari 2008.

Kegiatan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan tetap menjadi fokus Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Mulai 2009, Lembaga Advokasi Perempuan Damar meluaskan isu dan program kerjanya di antaranya Pemenuhan Hak Dasar Perempuan dengan mengadvokasi Hak Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Dasar untuk Semua yang Gratis dan Berkualitas, Hak Politik Perempuan, anti-kekerasan terhadap perempuan, dan anti-pemiskinan.

Kegiatan pengorganisasian yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Perkumpulan Damar sebagai berikut:

1. Terbentuk Gerakan Perempuan Lampung yang berbasis pada organisasi-organisasi perempuan di enam kabupaten/kota.
2. Menguat dan meluasnya kelompok-kelompok perempuan di enam kabupaten/kota, di 17 kecamatan, dan 80 desa/*pekon*/kampung/kelurahan,

dengan jumlah anggota 2.118 orang yang sudah terdidik.

3. Anggota yang telah mengikuti pendidikan “Adil Gender dan Anti-Kekerasan” berjumlah 2.118; anggota yang telah mengikuti pendidikan “Analisa Sosial Berperspektif Feminisme” berjumlah 370; anggota yang telah mengikuti pendidikan “Advokasi dan Pengorganisasian” berjumlah 100; dan anggota yang telah mengikuti pendidikan “Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Organisasi” berjumlah 30.
4. Lahirnya pemimpin perempuan lokal yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa, seperti antara lain menjadi kepala desa dan anggota Badan Perwakilan Desa.
5. Terbangunnya kesadaran kritis perempuan marginal untuk mengorganisasi diri dalam rangka memperkuat posisi tawar perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar muncul dengan membawa visi terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang demokratis, menuju keadilan untuk semua (perempuan dan laki-laki).

Adapun misi yang diembannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat tentang hak dasar perempuan.
2. Menguatnya basis dalam melakukan advokasi hak dasar perempuan sebagai bagian dari gerakan sosial.
3. Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan Lembaga Advokasi

Perempuan Damar dan Perkumpulan Damar sebagai organisasi yang independen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerjanya.

Peran strategis Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai berikut :

1. Melakukan advokasi penguatan hak dasar perempuan.
2. Melakukan penguatan kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan.

Sementara itu, JPrP bersama komunitas dan anggotanya melakukan kegiatan yang beragam. Mereka membuat kompos dari limbah rumah tangga. Di Balai Kramat mereka membuat kompos cair dari buah-buahan busuk. Di Kramat juga terdapat tim sertifikat tanah yang sudah berhasil. Kemudian ada Balai Melati yang menghasilkan kebang-kembangan dari limbah plastik. Balai Citra Rahayu di Bumi Waras menghasilkan tikar dari sedotan. Kendala dari semua produk balai-balai tersebut adalah pemasaran. Kegiatan JPrP banyak bersifat sayang lingkungan, seperti pengadaan air bersih dan kebersihan lingkungan. Karena komunitas tempat JPrP beraktivitas banyak mengalami kesulitan dalam kependudukan, JPrP juga mempunyai program agar anggota komunitasnya bisa mendapatkan surat tanah (sertifikat). Di atas itu semua, JPrP yang merupakan organisasi perempuan dan diketuai seorang perempuan, bergerak memelopori warga untuk menuntut hak atas tanah.

“Tanah di sini masih ilegal, tidak bersertifikat. JPrP bangkit untuk mengambil hak dasar tentang tanah. Kita buktikan

pesisir tidak kumuh dan bisa bersih. Ibu-ibu kita ajak untuk mengolah sampah”⁶

Teater Satu sebagai lembaga yang sejak awal fokus di bidang seni teater banyak mengangkat isu-isu perempuan. Salah satu lakon yang pernah dipentaskan adalah “Wanci”. Ini merupakan lakon yang bercerita mengenai perempuan pekerja seks yang berusaha keluar dari situasi kemiskinan. Karya ini merupakan karya yang dibanggakan Teater Satu, karena menjadi tonggak awal dalam mengkampanyekan isu-isu perempuan melalui media seni.

Teater menjadi sarana dan media bagi Iswadi Pratama dan Imas Sobariah yang merupakan pendiri Teater Satu, untuk menyebarluaskan ide-ide kesetaraan ke masyarakat luas. Ini penting mengingat di Lampung budaya patriarki cukup kuat. Selain itu, Teater Satu juga mengakomodasi kelompok-kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) untuk terlibat aktif dalam kegiatan teater maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Teater Satu juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang bergerak di isu perempuan lainnya.

Organisasi Perempuan dan Kebijakan

Kenyataan bahwa hukum memelihara dominasi laki-laki membuat para pegiat Lembaga Advokasi Perempuan Damar secara organisasi banyak menggugat eksistensi hukum positif, baik yang berupa kebijakan daerah maupun hukum pidana. Lembaga Advokasi Perempuan Damar selalu berusaha

⁶ Wawancara dengan Nur Hayati, Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP), Lampung, 14 Mei 2012.

ha terlibat dalam pembuatan kebijakan di tingkat daerah, terutama berkenaan dengan perempuan. Peluang otonomi daerah, dalam mana daerah bisa membuat regulasi secara otonom, dimanfaatkan dengan baik oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar, dengan mendampingi dan mengawal Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan. Sejak 2011, di Lampung sudah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur soal kesetaraan gender, yakni Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Perda ini mengatur soal kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pembangunan di daerah. Selain itu, terdapat Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu keberhasilan Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Keberadaan perda tersebut menjamin keberlanjutan pelayanan terpadu yang telah dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar untuk perempuan korban kekerasan. Dalam menginisiasi lahirnya perda tersebut, Lembaga Advokasi Perempuan Damar mendampingi Pemda menyusun naskah akademik sejak 2002, yang dilakukan bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, meskipun pada akhirnya, baru pada 2006 perda ini disahkan melalui dorongan dan kerjasama, antara lain dengan Biro Pemberdayaan Perempuan (PP) Lampung, Kanwil Hukum dan HAM, akademisi dan pemangku lainnya. Lahirnya kebijakan daerah lain dalam proses yang cukup singkat, seperti Perda Nomor 4 Tahun 2006 ten-

tang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak, menjadi buah positif dari kerja Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang cukup konsisten.

Beberapa perda digagas dan diusulkan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai bagian dari masyarakat sipil dan respons positif oleh pemerintah daerah setempat. Tidak hanya melakukan advokasi terhadap kebijakan tertulis yang dikeluarkan provinsi maupun kabupaten, Lembaga Advokasi Perempuan Damar juga mendorong berbagai perjanjian kerjasama, seperti dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan), pemerintah daerah dan rumah sakit di wilayah Lampung, dalam rangka pelayanan perempuan korban kekerasan. Hal ini dilakukan di antaranya di Provinsi Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Barat.

“Selain pengorganisasian, kita juga melakukan advokasi kebijakan. Damar dekat dengan aparat penegak hukum maupun aparat di tingkat daerah. Namun ada mobilisasi yang tinggi di mereka, banyak terjadi rotasi. Padahal kerja membangun dan menguatkan perspektif para polisi dan jaksa ini sudah lama. Namun tantangan yang kita hadapi adalah mereka cepat sekali berpindah, naik pangkat, lalu pindah lokasi kerja”.⁷

JPrP secara sporadis telah berhasil mengusahakan identitas kependudukan bagi para anggotanya. Melalui lembaga di tingkat kelurahan hingga melakukan aksi di DPRD dan Gubernur, JPrP telah berhasil mem-

⁷ Wawancara dengan Selly Fitriani, Direktur Damar Lampung, 11 Mei 2012.

buat pemerintah daerah setempat menaruh perhatian pada perempuan miskin dan lingkungannya di wilayah pesisir Bandar Lampung.

Karakter Organisasi Perempuan di Lampung

Menilik sejarahnya, pada awalnya Damar berbentuk yayasan, yakni Yayasan Elsapa. Bentuk yayasan dianggap tidak bersifat demokratis. Maka pada 2002, Damar menyatakan mengubah bentuk organisasi menjadi Perkumpulan. Sebagai Perkumpulan, Damar mempunyai struktur sendiri yang dinamakan Dewan Pengurus Perkumpulan.⁸ Ketua Dewan Pengurus ini adalah Siti Noor Laila dengan sekretaris Sofyan, sementara yang lainnya merupakan anggota perkumpulan. Dalam struktur Dewan Pengurus Nasional ada posisi Eksekutif Perempuan, Eksekutif Anak dan Eksekutif Institute for Organizational Development and Research (IPOR). Ketiga eksekutif ini merupakan lembaga yang dibentuk perkumpulan untuk advokasi perempuan, advokasi anak dan pengembangan organisasi rakyat. Sementara itu, Gerakan Perempuan Lampung merupakan organisasi federasi yang diinisiasi Damar, membawahi enam organisasi/serikat perempuan tingkat kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Forum Anti-Kekerasan Tanggamus, Serikat Perempuan Bandar Lampung, Serikat Perempuan Lampung Selatan, Kesatuan Perempuan Lampung Uta-

ra, Kesatuan Perempuan Lampung Tengah dan Serikat Perempuan Lampung Timur. Organisasi tingkat kabupaten yang tergabung di GPL mempertahankan namanya masing-masing. GPL sebagai organisasi payung menghargai organisasi perempuan tingkat kabupaten tersebut. Selain itu, tiap kabupaten bisa mempunyai tujuan yang berbeda meskipun secara umum, GPL mempunyai isu mengenai kemiskinan, kesehatan, pendidikan, politik dan hukum. Di bidang kesehatan, tiap wilayah juga bisa berbeda: di Lampung Utara soal kesehatan lebih memperhatikan soal akses; di Lampung Utara dan Bandar Lampung isunya peningkatan pelayanan kesehatan.

GPL mempunyai empat tingkatan pendidikan yakni Adil Gender dan Anti-kekerasan, Analisis Sosial Berperspektif Feminis, Advokasi dan Pengorganisasian, dan Politik dan Kepemimpinan Perempuan.

Awalnya semua pendidikan difasilitasi Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Belakangan, pendidikan Tahap 1 mulai difasilitasi sendiri oleh basis. Basis GPL yang paling banyak terdapat di Tanggamus, karena Tanggamus merupakan wilayah pengorganisasian awal Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Di Lampung Selatan terdapat Serikat Perempuan Lampung Selatan (Sepalas). Sekretaris Sepalas, Murni, bercerita bagaimana mereka banyak diminta masyarakat untuk menangani kasus dan akhirnya bisa mengadvokasi diri dan keluarga korban. Bergabung dan aktif dalam GPL dirasakan oleh para anggotanya memberikan mereka rasa percaya diri dan kemampuan untuk bisa berbicara di depan publik dengan lebih kritis. Struktur dan kepemimpinan di GPL

⁸ Dewan Pengurus Perkumpulan, Siti Noor Laila (ketua); Sekretaris: Sofyan; Anggota: Miftahul Huda, Quraisan Albi, Resa Ariyanti, Y Wibomo; Eksekutif Anak: Dede; Eksekutif Perempuan: Selly; IPOR: (alm) Imam Ghozali.

menggunakan struktur representasi, dalam mana anggota harus memunculkan wakil dari organisasi di tingkat keenam kabupaten yang berasosiasi. Struktur yang memperhatikan representasi ini membuat proses berorganisasi menjadi proses dalam mana para pimpinan bisa saling belajar satu sama lainnya.

Organisasi Perempuan dan Kepemimpinan

Norma kepemimpinan yang dilihat dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar mengacu pada sosok S.N. Laila, sebagai ketua dari Gerakan Perempuan Lampung. Hal ini diakui Selly Fitriyani, sebagai direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Kentalnya sosok S.N. Laila sebagai pemimpin perempuan di Lampung karena lamanya periode S.N. Laila memimpin Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang sudah berjalan 10 tahun. Regenerasi kepemimpinan dalam organisasi Lembaga Advokasi Perempuan Damar baru terjadi pada 2011, dan selanjutnya dipegang oleh Selly Fitriyani.

Pada awalnya, ketika Selly Fitriyani diminta memimpin Lembaga Advokasi Perempuan Damar, ada ketakutan. Hampir semua rekan-rekan yang berafiliasi dengan Lembaga Advokasi Perempuan Damar menganggap dia sudah bisa menjadi pemimpin. Dalam pelatihan kepemimpinan, Lembaga Advokasi Perempuan Damar, memang mengharapkan para peserta pendidikan bisa memimpin dirinya sendiri dan juga bisa memimpin di level keluarga.

“Pendidikan Damar awalnya dianggap pendidikan untuk mengajarkan istri melawan. Seiring waktu, pendidikan Damar berhasil membuktikan bahwa maksud dari pendidikan yang diadakan bisa bermanfaat, baik bagi laki-laki maupun perempuan”.⁹

Sebelum anggota Gerakan Perempuan Lampung mendapat pendidikan kritis maupun adil gender dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar, mereka mengakui mempunyai ketakutan terhadap proses hukum dan aparat penegak hukum.

“Dulu menghadapi polisi saya gemeteran. Tapi setelah ikut organisasi, saya jadi berani. Awalnya menghadapi polisi, komandannya *tahu* saya takut. Tapi diajak berpikir *wong* sama-sama makan nasi kenapa takut”.¹⁰

Anggota Gerakan Perempuan Lampung juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, berpartisipasi di pemerintahan desa dan program-program pemerintah. Kegiatan PNPM, Posyandu maupun kegiatan PKK di tingkat desa menjadi ajang unjuk diri dari para perempuan yang telah bersinggungan dengan Perkumpulan Damar.

“Dulu, *boro-boro* bisa ngobrol dengan Pak Lurah. Sekarang, karena ikut organisasi, keterlibatan di desa mulai diakui. Dari musyawarah di tingkat warga hingga desa, saya dipilih menjadi fasilitator”.¹¹

⁹ Wawancara dengan Selly Fitriyani, Direktur Damar Lampung, 11 Mei 2012.

¹⁰ Wawancara dengan Lilis, Serikat Perempuan Bandar Lampung, 14 Mei 2012.

¹¹ Wawancara dengan Murni, Sekretaris Serikat Perempuan Lampung Selatan (Sepalas), 14 Mei 2012.

Dari paparan ini terlihat perempuan mendapatkan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di publik ketika ia mempunyai identitas lain, seperti dalam hal ini identitas keorganisasian yang sudah cukup dikenal, seperti Lembaga Advokasi Perempuan Damar atau GPL.

“Di organisasi, kami bertemu dengan orang-orang lebih banyak, pengalaman bertambah. Jadi waktu diterapkan di kampung, sudah biasa saja”.¹²

Selain itu, kebiasaan berorganisasi dan berkumpul dengan sesama perempuan juga menumbuhkan kemampuan lain dalam diri perempuan, di antaranya kemampuan untuk mengutarakan pendapat.

“Awalnya saya tidak percaya diri. Tapi saya selalu ingin tahu. Saya selalu menceiritakan apa yang saya dapat dari pelatihan. Di situ suami saya memuji, *kok* sekarang punya kemampuan bicara? Karena itu, sekarang ini suami sudah membebaskan saya untuk mengikuti aktivitas organisasi”.¹³

Sementara di Teater Satu, sebagaimana dinyatakan oleh Imas, kesetaraan selain diterapkan di organisasi, juga dia rasakan di lingkup keluarga. Bagi Imas, yang mengajarkan kesetaraan justru adalah suaminya, Iswadi, yang dianggapnya lebih feminis daripada dirinya sendiri. Iswadi pernah mengatakan bahwa kerja domestik, kerja rumah tangga, bukanlah pekerjaan perempuan.

Suaminya selalu mencontohkan dirinya sendiri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.

Salah satu pegiat JPrP, Nur Hayati merupakan penyintas kekerasan. Ia merasa bisa lepas dari rantai kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya karena terlibat dalam organisasi.

“Baik saya maupun suami sering mengobrol dan berkomunikasi dengan Heri. Sepertinya dari Heri itulah, suami saya mulai sadar, dan tidak memukuli saya lagi”.¹⁴

Heri adalah *community organiser* Konsorsium Miskin Kota di perkotaan. Sebagai *community organiser*, ia banyak berkenalan dan mengajak kaum perempuan, terutama ibu-ibu, untuk berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak warga miskin di tempat tinggalnya.

Tantangan Organisasi Perempuan di Lampung

Tantangan Eksternal

Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Lampung menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi perempuan di Lampung. Dalam kultur patriarki, persoalan kekerasan utamanya kekerasan dalam rumah tangga sering hanya dipendam dan disikapi dengan sabar. Persoalan dalam penegakan hukum korban kekerasan banyak me-

¹² Wawancara dengan Murni, Sekretaris Serikat Perempuan Lampung Selatan (Sepalas), 14 Mei 2012.

¹³ Wawancara dengan Murni, Sekretaris Serikat Perempuan Lampung Selatan (Sepalas), 14 Mei 2012.

¹⁴ Wawancara dengan Nur Hayati, Pegiat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP), Lampung, 14 Mei 2012. (Heri yang diceritakan merupakan salah satu pegiat UPC yang mengorganisir lahirnya JPrP)

nyita waktu dan energi. Seperti menyiapkan rumah aman bagi korban, pemulangan korban ketika ia berada di luar daerah dan berusaha menguatkan korban dari tekanan psikis dan juga fisik menjadi pekerjaan harian yang tiada kunjung ada akhirnya. Belum lagi bila harus berurusan dengan pemangku kepentingan lain seperti rumah sakit, kepolisian dan juga kejaksaan. Disisi lain, perempuan yang bekerja untuk pendampingan korban kekerasan maupun pengorganisasian di tingkat komunitas dalam banyak kasus juga mengalami 'kekerasan' selama melakukan kerja pendampingannya. Menumbuhkan keberanian dan melumpuhkan rasa takut menjadi tantangan bagi organisasi perempuan dalam melakukan kerja-kerjanya.

Kultur patriarki yang kuat di Lampung membuat banyak perempuan tidak bisa masuk ke ruang publik. Damar misalnya yang memiliki potensi untuk lebih aktif di kebijakan publik dan politik lokal, harus dihadapkan pada kerja-kerja praktis seperti penanganan kasus yang terus mengalir. persoalan lainnya adalah konstruksi sosial budaya dimana perempuan diwajibkan melayani suami membuat kegiatan yang dilakukan Damar pun harus mampu bernegosiasi dengan hal tersebut. Misalnya ketika melakukan pendidikan yang mengharuskan anggotanya meninggalkan rumah untuk beberapa hari, Damar harus memintakan ijin kepada keluarga ataupun suaminya.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi organisasi perempuan di Lampung, adalah bagaimana mereka bisa masuk dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Organisasi di Lampung seperti Jaringan Perempuan Pesisir, Damar, Gerakan Perempuan Lampung mengharapkan ke depan perempuan bisa

masuk dan menduduki lembaga-lembaga politik pembuat kebijakan.

Saat ini, anggota Damar sudah banyak terlibat dengan lembaga-lembaga publik seperti Panwas daerah, PNPM dan lain sebagainya. Selain itu juga terlibat dalam kerja-kerja partai politik. Anggota Damar di desa juga berusaha mengajukan salah seorang anggotanya di daerah Tanggamus untuk menjadi kepala desa. Namun, infrastruktur dan kelembagaan yang ada belum cukup kuat untuk menunjangnya.

Di tingkat lokal/kabupaten Gerakan Perempuan Lampung cukup terseok untuk mengikuti proses kebijakan publik di lokal masing-masing. Upaya yang dilakukan organisasi perempuan di lokal adalah mengajak kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat untuk mendukung program-programnya. Sementara itu, organisasi di tingkat komunitas sudah mampu membangun *linkage* dengan pemerintah daerah setempat.

Tantangan selanjutnya sebagai kerja jangka panjang adalah bagaimana membangun '*linkage*' ke negara dan partai politik secara strategis sehingga tidak mengganggu kerja dan independensi organisasi. Negara dan partai politik tak bisa dipungkiri masih merupakan pengambil kebijakan yang tentunya harus dituntut tanggungjawabnya dalam menciptakan keadilan gender.

Tantangan Internal

Organisasi dampingan Damar yang berhimpun dalam Gerakan Perempuan Lampung, sesungguhnya mempunyai tantangan berbeda-beda di tiap wilayahnya. Di Lampung Utara misalnya, Kepal Utara, berusaha untuk menjadi pelopor dalam advokasi penye-

diaan sarana kesehatan yang layak terutama untuk perempuan. Sementara Serikat Perempuan Bandar Lampung (SPBL) yang secara geografis dekat dengan pusat pemerintahan harus lebih aktif dalam isu-isu kebijakan publik di tingkat provinsi. Sementara anggota SPBL sendiri masih banyak yang belum berdaya secara ekonomi. Banyak basis dampingan yang berada di pesisir dan kantong-kantong pemukiman padat penduduk di Kota Bandar Lampung yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Gerakan Perempuan Lampung yang menginginkan kemajuan bagi seluruh perempuan di Lampung.

Pekerjaan praktis seperti pendampingan kasus, menyita banyak waktu staf organisasi perempuan seperti Damar. Ini membuat, kerja-kerja 'besar' seperti pengembangan isu dan pendidikan bagi anggota terabaikan selain juga karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Tantangannya adalah bagaimana tetap mengembangkan isu kesetaraan gender dan keadilan perempuan di tengah kerja praktis yang sangat menyita waktu. Pengkaderan organisasi juga menjadi masalah tersendiri. Gerak dan manajemen organisasi perempuan yang non-profit dan mengandalkan dana 'program' telah menghambat pengkaderan. Proses pengkaderan yang dilakukan Damar adalah menerima mahasiswa-mahasiswa baru yang magang, dan mengikutsertakan mereka terjun bersama melakukan kerja advokasi, pendampingan ataupun pengorganisasian. Pendidikan dilakukan sambil bekerja bersama.

Selain itu, tantangan yang lain adalah mengenai keberlanjutan organisasi. Ketika lembaga dana mulai mengurangi bantuannya, sebagai organisasi harus mulai berpikir bagaimana menghidupi dan menggerakkan laju kerja organisasi. Damar misalnya, sudah mulai membangun konsep credit union selain iuran anggota. Meskipun program ini masih kecil dan belum berkembang dan dapat dikatakan belum mampu menggerakkan roda organisasi, namun sebagai upaya hal ini sudah dimulai.

Penutup

Organisasi perempuan di Lampung sesungguhnya telah memainkan peran strategis bagi berlangsungnya proses penyadaran akan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Perjalanan organisasi perempuan di Lampung cukup membuktikan bahwa mereka masih bisa bertahan dan membangun kekuatan politik perempuan di berbagai desa maupun komunitas di Lampung. Meskipun dengan bantuan dana yang kecil, karena perjalanan sejarah dan ikatan keorganisasian yang kuat, pendampingan perempuan tetap bisa berjalan meskipun terseok. Para perempuan di desa, wilayah pesisir maupun di komunitas teater juga telah mampu bernegosiasi dengan kehidupan domestiknya untuk bisa menjalani aktivitas dan menghidupkan organisasi. Jelas, ini bukanlah situasi yang mudah mengingat kultur patriarki di Lampung yang cukup kuat.***

Keragaman Kelembagaan dan Menguatnya Advokasi Kebijakan Adil Gender di Jakarta

Sita Aripurnami, Ayu Anastasia, Frisca Anindhita,
Ika Wahyu Priaryani, Myra Diarsi, Rahayuningtyas

Organisasi perempuan mendasarkan kerjanya pada analisis yang melibat bahwa akar munculnya persoalan perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural, dan kultural. Hal itu mengukuhkan sebuah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Posisi perjuangan organisasi perempuan dan penampilan isu gender dalam konstelasi politik nasional, kerja organisasi perempuan memperlihatkan bagaimana persoalan perempuan di hadapan negara dipilah-pilah menjadi persoalan politik dan masalah perempuan. Organisasi perempuan mencoba menyoroti bagaimana sebagai sebuah gerakan bereaksi terhadap kondisi persoalan semacam itu.

Kebanyakan organisasi perempuan non-pemerintah (ornop) Indonesia lahir di Jakarta, dan menjalani udara sosial politik ibu kota sebagai latar belakang penentuan isu garapan dan agenda kerja. Hal ini terutama terjadi pada masa otoritarian Soeharto. Baru setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto mulai bertumbuhan organisasi perempuan di daerah, juga seiring dengan semangat desentralisasi yang mengupayakan tersebarinya gagasan sampai ke daerah-daerah. Beberapa organisasi non-pemerintah perempuan di Jakarta mulai mengembangkan ‘cabang’ (atau perwakilan, atau menggunakan nama lain) di provinsi dan atau kabupaten pada paruh akhir 1990-an. Upaya ini men-

capai puncaknya pada 1998 sampai awal tahun 2000-an. Pada masa otoritarian, organisasi perempuan muncul dengan bendera feminisme (baik secara terang-terangan maupun secara lebih tersamar), dan memfokuskan diri pada penyebaran dan pendidikan gagasan dasar feminisme dan nilai keadilan. Organisasi yang muncul setelah 1998 cenderung lebih spesifik dalam pemilihan isu, seperti kekerasan terhadap perempuan, partisipasi politik, atau pelayanan (*women’s crisis center/shelter*, bantuan hukum, rekoneksi dan menghubungkan kembali anggota keluarga yang terpisah selama proses pendampingan).

Solidaritas Perempuan (SP) pada 1989, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada 1998, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) pada 1994, adalah contoh organisasi-organisasi yang digagas untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan perempuan. Kepentingan tersebut merupakan kebutuhan di tingkat nasional, dan pada saat yang sama membutuhkan pengikut atau anggota sampai ke tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai desa. Itu juga memerlukan pengelolaan kantor cabang di tempat lokal tersebut. Menjadi penting untuk melihat siapa saja dan kalangan mana yang direkrut untuk bergabung mengelola kantor cabang lokal tersebut.

Organisasi lainnya seperti Kalyanamitra, Institut Kapal Perempuan dan Ardhanary Institute merupakan organisasi yang sejak awal berdiri memusatkan pengelolaan organisasi di Jakarta. Mayoritas kegiatan organisasi-organisasi tersebut juga dilakukan di Jakarta, namun mereka berupaya meluaskan pengaruh isu garapan (pendidikan kritis untuk perempuan) dan perhatiannya kepada “kelompok-kelompok binaan” di daerah.

Adapun Komnas Perempuan merupakan organisasi yang sejarah kelahirannya langsung menjawab suatu situasi sosial politik skala nasional di Jakarta, atas desakan dan dukungan dari hampir semua organisasi dan kelompok perempuan masyarakat sipil. Komnas Perempuan tidak membuka cabang di daerah, tetapi menetapkan mitra kerja tertentu di wilayah-wilayah di Indonesia.

Adapun cita-cita Komnas Perempuan dibangun bertolak dari sejarah berdirinya Komnas Perempuan itu sendiri, yaitu:

“Komnas Perempuan dibangun dari sejarah korban. Komnas Perempuan bisa memastikan bahwa korban akan mendapatkan hak-hak mereka, hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Itu untuk korban merupakan kendaraan yang lain. Saya merasa kita akhirnya tumbuh menjadi salah satu lembaga HAM nasional, yang tugasnya sebetulnya sederhana: memastikan bahwa seluruh perempuan di Indonesia terlindungi dan terpenuhi hak-haknya”.¹

Berbeda dari kebanyakan organisasi perempuan, yang enggan bekerja dengan pemerintah, Komnas Perempuan justru sebaliknya.

“Karena kerja Komnas Perempuan itu tidak hanya dengan korban, atau dengan perempuan saja, tetapi juga dengan negara”.²

Dalam kasus organisasi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), yang terjadi adalah pertemuan berjodoh pada saat yang tepat, antara kebutuhan mereka untuk mengorganisasikan para janda dengan program khusus Bank Dunia, yang ingin menyalurkan dana dalam program “Justice 4 the Poor”.

Terdapat pula organisasi yang memusatkan kegiatan administrasi di Jakarta, namun harus bergerak dan berkegiatan sampai ke luar negeri. Hal ini terjadi karena mereka memiliki isu garapan di wilayah tujuan kerja buruh migran maupun di daerah pelosok kantong pengirim buruh migran. Karena

¹ Wawancara dengan Desti Murdiana, Wakil Ketua merangkap Sekretaris Jendral Komnas Perempuan, Jakarta 21 Mei 2011.

² Wawancara dengan Masruchah, Wakil Ketua Badan Eksekutif Komnas Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

harus berurusan dengan pihak otoritas dan pembuat kebijakan setempat, organisasi seperti ini juga harus membuka kegiatan administrasi dan manajerial di tempat tersebut.

“Memastikan bahwa ada bantuan hukum dari pemerintah melalui KBRI, ada lawyer-nya, memastikan pemantauan intensif terhadap kasus oleh KBRI, termasuk proses peradilannya. Kita mempunyai akses, seperti di Malaysia dan Singapura, dan Migrant Care datang langsung ke proses persidangannya. Tetapi kalau di Arab, sulit”.³

Pemetaan Organisasi Perempuan Jakarta menurut Fokus Kerja

Pemetaan organisasi perempuan dilakukan untuk memahami keragaman, sekaligus mengidentifikasi hasil penelitian ini. Secara tertulis, masing-masing organisasi memang memiliki perbedaan visi dan misi. Namun jika kita lihat lebih rinci, beberapa organisasi memiliki kesamaan cita-cita untuk keadilan perempuan, dan terbukanya akses yang lebih besar bagi perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh pada perempuan.

Bagi Institut Kapal Perempuan, bila diminta untuk bekerja dengan program dari Bank Dunia, meskipun sesuai dengan visi dan misi organisasi, mereka tidak akan menerima.

“Kami anti-Bank Dunia. Pernah ada donor yang sangat menggiurkan, saat Kapal Perempuan masih miskin. Mere-

ka berani memberikan dana yang cukup besar, sampai kita rapat tiga hari untuk menganalisis apakah organisasi ini benar-benar tidak punya maksud terselubung. Ternyata diketahui organisasi itu mendapat intervensi dari Bank Dunia. Maka kami tolak, walaupun masih miskin waktu itu”.⁴

Beberapa program yang sedang dan pernah dikerjakan Kapal Perempuan antara lain:

“Program penanggulangan kemiskinan, pendidikan gender, advokasi untuk *human leadership*, pendidikan kepemimpinan buruh perempuan”.⁵

Bentuk kelembagaan yang dipilih oleh 10 organisasi perempuan yang diteliti beragam. Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, LBH APIK, Migrant Care dan Pekka berbentuk Yayasan. Sementara itu, Institut Kapal Perempuan, ASPPUK dan Ardhany Institute berbentuk Perkumpulan. Selain itu, ada Komnas Perempuan, yang berbentuk Komisi Nasional bentukan pemerintah, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang berbentuk organisasi massa. LBH APIK, selain Yayasan, juga menyatakan diri berbentuk Federasi berkaitan dengan organisasi APIK di lokal atau di daerah.

“Federasi membantu mengkoordinasikan, *supporting system, capacity building*, mencari dana bagi APIK-APIK baru. Tapi rata-rata sudah mandiri”.⁶

³ Wawancara dengan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Jakarta 3 Juli 2012.

⁴ Wawancara dengan Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

⁵ *Ibid.*

⁶ Wawancara dengan Ratna Batara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, Jakarta 24 Mei 2012.

Beberapa organisasi perempuan tersebut mempunyai fokus yang serupa, sehingga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Kalyanamitra merupakan organisasi perempuan berbendera feminis pertama pada masa Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Mandatnya menjadi pusat komunikasi dan informasi tentang isu perempuan dan feminisme. Fokus kegiatannya adalah upaya pendidikan dan penyebaran informasi mengenai isu perempuan, serta mendirikan pusat dokumentasi sebagai salah satu penopang utamanya. Pengelolaan informasi dan dokumentasi meliputi penyusunan *database*, layanan perpustakaan (*on-line* dan fisik) dan penerbitan buku (terjemahan dan non-terjemahan). Kalyanamitra juga membuat *website* dan membentuk jaringan *Facebook* Kalyanamitra.

Sebagaimana yang tertulis dalam ulasan mengenai Kalyanamitra pada *website* Global Fund for Women:

*"Kalyanamitra came to defy the taboo against speaking out, and advocated stronger legislation against violence, while conducting public awareness campaigns. Today Kalyanamitra is an established information and documentation center, of which many other women's rights groups take advantage. The center holds gender analysis trainings for other women's groups and activists".*⁷

2. Politik

KPI memiliki 28,257 orang anggota yang mewakili 18 Sektor Kepentingan (Masyarakat Adat; Profesional; Pekerja Sektor Informal; Miskin Kota; Miskin Desa; Buruh; Ibu Rumah Tangga; Perempuan yang dilacurkan; Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa; Janda; Anak Marginal; Nelayan; Petani; Lesbian, Biseksual, dan Transgender; Perempuan Kepala Rumah Tangga dan Tidak Menikah; Lanjut Usia; Difabel; dan Pekerja Rumah Tangga) di seluruh Indonesia. Hal ini membuka peluang untuk terbangunnya sebuah gerakan perempuan dengan pengorganisasian yang kuat. KPI memilih untuk fokus pada partisipasi politik perempuan guna menggantikan kondisi "massa mengambang", yang pada rezim otoriter Soeharto menjadi ciri massa politik Indonesia. Untuk tujuan ini, KPI mendirikan Balai Perempuan di kota kecamatan, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan anggota KPI yang tersebar hingga wilayah desa. Balai Perempuan merupakan indikator berjalan atau tidaknya kegiatan anggota di tingkat basis.

"Sekarang sudah ada pencapaian-pencapaian kecil, di mana kawan-kawan sendiri merasa diuntungkan oleh pencapaian yang mulai terlihat. Pengorganisasian dan advokasi mulai berjalan. Isunya berbeda-beda di setiap lokal. Sekarang yang belum terpegang strategi, misalnya, satu kota yang punya 50 desa, masing-masing desa punya *concern* yang berbeda-beda. Masih ada *gap* untuk *concern* menjadi satu visi yang sama".⁸

⁷ <http://www.globalfundforwomen.org/impact/gender-equality-in-asia-and-the-pacific/95>.

⁸ Wawancara dengan Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Jakarta 30 Mei 2012.

Pada banyak kasus, hal ini tergantung pada bagaimana kapasitas koordinator maupun Sekretaris Wilayah menghimpun para anggota dan aktif berpartisipasi dalam program-programnya. Bagaimana pun, KPI turut berjasa dalam memperkenalkan politik dan pendidikan politik bagi perempuan. KPI mendorong perempuan untuk dapat duduk dalam posisi pengambil keputusan sebagai anggota legislatif, dan duduk dalam lembaga-lembaga pemerintah. Melalui advokasinya, lembaga ini telah menyadarkan perempuan untuk memiliki hak politik dan terlibat dalam proses perencanaan dan anggaran serta pembuatan kebijakan publik.

Anggota KPI yang besar jumlahnya merupakan basis massa yang kuat untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dalam kurun waktu hampir satu dekade, KPI telah terlibat dalam mensahkan antara lain: Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Perdagangan Manusia (*anti-trafficking*); Pekerja Migran; Kesehatan; Sistem Jaminan Sosial Nasional; Kekerasan Terhadap Perempuan; Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendiskriminasi perempuan; Amandemen Pasal 65 Ayat (1) Tentang Kuota 30 persen, mengganti kata “dapat” menjadi “harus” dan ada sanksi bagi partai politik yang tidak mengikuti; Amandemen Kebijakan Usaha Kecil menjadi Usaha Kecil dan Menengah; Kebijakan Kesenjangan dan Anti-Diskriminasi Berbasis Gender terutama pada pembentukan Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Amandemen Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga; Kebijakan Anggaran Responsif Gender; dan Kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Daerah

(Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) yang Responsif Gender.

Dalam banyak kegiatan advokasi kebijakan publik, KPI berjejaring dengan pelbagai organisasi lain. Hal ini dapat dilihat sebagai kelemahan, karena tercapainya tujuan bukan hasil kerja KPI semata tetapi oleh banyak pihak. Sekali pun demikian, banyak juga yang melihat bahwa keberhasilan advokasi itu berkat adanya kekuatan dan keluasan jaringan kerja. Dan, KPI memiliki keluasan dan kekuatan jaringan tersebut. Ditambah lagi, besarnya jumlah anggota dan jaringan yang sudah terbangun dapat berpeluang bagi KPI untuk turut serta dalam gerakan bersama, mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Pada gilirannya ini akan dapat menghadirkan keadilan dan demokrasi bagi perempuan. Bekerja di tengah ragam kepentingan dan minat dari pelbagai kelompok perempuan akan menjadi tantangan tersendiri untuk membangun sinergi guna terciptanya kebijakan yang responsif gender.

Jika KPI memiliki target politik di tingkat nasional dan regional, Pekka juga memiliki kegiatan berbasis politik perempuan di lingkup masyarakat kecil. Pemberdayaan perempuan untuk partisipasi politik dilakukan dengan pencerahan warga perempuan dalam proses pengambilan keputusan, seperti di dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang). Harapannya, keputusan lokal yang dibuat masyarakat akan ikut mengatur kebutuhan perempuan, setidaknya tidak merugikan perempuan.

Pekka menamakannya sebagai kegiatan non-ekonomi yang mempunyai tiga tujuan. Pertama, meningkatkan “kesadaran kritis” para anggota maupun masyarakat yang ting-

gal di daerah kegiatan Pekka. Kedua, meningkatkan “partisipasi” para anggota khususnya, dan masyarakat sekitar pada umumnya. Ketiga, meningkatkan kontrol atas proses pengambilan keputusan. Keberhasilan kegiatan non-ekonomi di daerah kerja Pekka bervariasi. Seknas Pekka secara nasional menetapkan program kegiatan yang meliputi pelatihan di bidang pendidikan, administrasi, pengorganisasian, keorganisasian, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

Pekka juga menunjukkan keberhasilan dalam program politik. Sebagai ilustrasi, misalnya, para perempuan kepala keluarga di Adonara berhasil memperkuat penguatan hak-hak sipil mereka dengan melakukan advokasi terhadap budaya yang selama ini menempatkan mereka pada posisi yang sulit, baik secara adat maupun ekonomi. Program Pekka di Adonara berhasil mendorong aparat desa untuk mengeluarkan Peraturan Desa tentang penyederhanaan adat. Adanya Peraturan Desa tersebut memudahkan masyarakat, termasuk perempuan, dalam melakukan pembayaran sumbangan kematian di Adonara. Contoh lain adalah seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Peraturan Desa setempat menetapkan batas minimal biaya mahar pernikahan yang harus dibayarkan oleh laki-laki demi mengurangi tingkat perceraian. Melalui program politiknya, para anggota Pekka di Adonara berjuang untuk menduduki posisi sebagai pengambil keputusan di tingkat desa, dengan ikut terlibat dalam rapat-rapat desa. Bahkan ada yang kemudian berhasil menjadi kepala desa.

Sama dengan Pekka, Kalyanamitra juga melakukan pengorganisasian perempuan

miskin kota dan desa. Untuk kota, Kalyanamitra melakukan kegiatan di wilayah Prumpong dan Muara Baru, Jakarta, sedangkan untuk pedesaan, yang dipilih adalah Desa Pasrujambe di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kalyanamitra menempatkan satu orang staf program di Lumajang.

“Kita menempatkan satu orang staf untuk mengurus diskusi, pegang *database* kelompok, membuat profil, mengikuti perkembangan kelompok. Kerja lainnya lebih banyak dilakukan bersama mitra lokal”.⁹

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan hak-hak sipil/kewarganegaraan perempuan dan mendorong agar perempuan mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Sedangkan staf khusus bekerja untuk memfasilitasi kegiatan di lapangan.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Organisasi perempuan yang memiliki fokus terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan adalah Pekka dan ASPPUK. Kedua organisasi ini melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan perempuan.

“Salah satu alasan Pekka didirikan, karena ada kasus ketidakadilan terhadap perempuan kepala keluarga, yang *notabene* dalam Kepala Keluarga dianggap laki-laki. Padahal, 14 persen Kepala Keluarga dalam data BPS adalah perempuan, dan tidak diakui keberadaannya. Pekka ada

⁹ Wawancara dengan Rena Herdiyani, Direktur Eksekutif Kalyanamitra, Jakarta 21 Mei 2012.

untuk mengangkat keberadaan Kepala Keluarga perempuan, sehingga mereka diakui keberadaannya”.¹⁰

“Jadi begini: pada tahun 1994, ada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkumpul di Surabaya. Salah satunya adalah Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), LSM yang selama ini punya pendampingan perempuan di level basis. Rata-rata mereka punya usaha. *Nah*, mereka membentuk sebuah forum di Surabaya. Akhirnya terbentuklah. Namanya Forum Pendampingan Perempuan Usaha Kecil di bawah, di level *grassroots*”.¹¹

Sekali pun penerima manfaat kedua organisasi berbeda, yakni perempuan kepala keluarga dan perempuan pengusaha kecil, namun metode yang digunakan serupa, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan pada LSM pendamping perempuan pengusaha kecil yang memiliki basis, agar lebih mampu dan lebih produktif secara ekonomi. Pekka mendorong pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pengembangan usaha dan lembaga Kredit Mikro Berbasis Komunitas, usaha simpan-pinjam dan penciptaan *revolving fund*.

Seknas Pekka menjalankan lima Program Tematik di wilayah kerjanya, yaitu Program Ekonomi, Hukum, Pendidikan, Politik, Pengorganisasian Komunitas dan Media Komunitas. Program ekonomi adalah yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh para pihak, baik anggota maupun ma-

sarakat non-anggota di daerah program Pekka.

Program Pekka berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Kesejahteraan ini paling tidak dilihat dari tersedianya sumber dana cadangan masyarakat, yang mampu memberikan rasa aman secara ekonomi. Sumber dana tersebut merupakan upaya mereka sendiri dalam bentuk simpan-pinjam, yang kemudian ditopang oleh keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM merupakan organisasi yang menyediakan bantuan dana bagi kelompok Pekka untuk usaha produktif, maupun dana talangan ketika ada kebutuhan mendadak seperti untuk kesehatan atau pendidikan. Sejak adanya Program Pekka, penghasilan para anggota meningkat dan mereka menjadi lebih mampu secara ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, sejak bergabung dengan Program Pekka, kemampuan usaha individu anggota menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan secara sosial.

Dari hasil survei yang pernah dilakukan pada 2009, program simpan-pinjam Pekka telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan penghasilan individu anggota. Para anggota di semua daerah program yang disurvei menyatakan bahwa setelah ikut dalam simpan-pinjam, penghasilan mereka meningkat. Sebagai gambaran, dalam data Seknas tentang peningkatan jumlah simpanan dan pinjaman anggota di Flores Timur misalnya, perkumpulan Pekka yang didirikan dalam waktu delapan tahun telah mampu mengakumulasi dana sejumlah sekitar Rp 200 juta.

Sebagai organisasi yang diinisiasi dari bawah, ASPPUK pernah mengalami beberapa penyesuaian dalam manajemen organisasi-

¹⁰ Nani Zulminarni, Koordinator Nasional Seknas Pekka, FGD Jakarta, 9 Mei 2012

¹¹ Wawancara dengan M. Firdaus, Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK, Jakarta 27 Juni 2012.

nya. Forum yang dibangun pada 1994 ini mengkristal pada 1997 menjadi sebuah organisasi berbentuk Yayasan. Pada 2001, bentuk diubah menjadi Asosiasi karena dirasakan bentuk tersebut lebih demokratis, dan ini bertahan sampai sekarang. ASPPUK melakukan penyesuaian berdasarkan musyawarah yang digagas oleh LSM anggotanya, dan membuat perubahan yang ditetapkan di tingkat nasional dan dijalankan oleh seluruh LSM anggota.¹²

“Berjalan kemudian di tahun 1997. Forum itu mengkristal. Forum sudah ada dari tahun 1994, lalu mengkristal menjadi jaringan: Jaringan Pendamping Perempuan Usaha Kecil. Setelah itu, ada forum nasional yang pertama, pada 1997. Kemudian karena kesulitan legalitasnya, itu berubah menjadi yayasan: Yayasan Pendamping Perempuan Usaha Kecil (YASPPUK). Kemudian kita memiliki forum tertinggi, Fornas. Anggota merasa bentuk yayasan itu tidak demokratis ... karena yayasan ada Badan Pendiri, seperti layaknya pemilik, begitu. Akhirnya, kira-kira tahun 2001, yayasan berganti nama menjadi Asosiasi, atau badan hukumnya Perkumpulan. Jadi: Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK). Di situ kata kawan-kawan jadi lebih demokratis dibandingkan dalam bentuk yayasan”.¹³

¹² Pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas) adalah yang terbentuk dari *grassroots* – dari sejumlah orang bekerja bersama, membuat keputusan yang muncul dari kebersamaan tersebut. Sebuah keputusan dari bawah ke atas menyediakan proses eksperimentasi dan kesesuaian dengan yang dibutuhkan di bawah. (http://en.wikipedia.org/wiki/Top-down_and_bottom-up_design#Management_and_organization, diakses pada 23 September 2012).

¹³ Wawancara dengan M. Firdaus, Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK, Jakarta 27 Juni 2012.

ASPPUK pada periode awal 1998, yang ditandai dengan krisis ekonomi Indonesia, kerusuhan Mei (13-15 Mei 1998) dan lengsernya Soeharto (21 Mei 1998) juga memberikan dampak pada program dan strategi kerjanya. YASPPUK termotivasi untuk memfasilitasi tumbuhnya gerakan kelompok basis Perempuan Usaha Kecil (PUK). Sampai saat ini, telah terbentuk 22 jaringan kelompok PUK di 22 wilayah, tersebar di 14 provinsi. Saat ini, YASPPUK mengklasifikasi program-programnya sebagai berikut:

- Program darurat pemenuhan kebutuhan fisik minimum, yang didanai *Terre des Hommes* (Belanda) dan bekerjasama dengan PPSW, yang memiliki basis kelompok masyarakat termiskin Jabodetabek dengan menjual beras murah (subsidi 50 persen);
- Program kredit mikro;
- Advokasi kebijakan berkaitan dengan kondisi makro sosial, ekonomi dan politik yang bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, *Friedrich Ebert Stiftung*, *CUSO* dan Kelompok Kerja Kemiskinan Struktural (Kikis), dan kelompok aktivis perempuan dengan mengadakan lokakarya, diskusi dan *hearing* ke legislatif seperti undang-undang larangan monopoli, kebijakan tentang kemiskinan, globalisasi, dan sebagainya;
- Pemberdayaan politik rakyat didukung oleh OTI-USAID, dengan melakukan pendidikan politik bagi pemilih (*voters education*). Kegiatan ini memberi warna bagi YASPPUK, karena melibatkan pengembangan modul *voters education* khusus PUK;

- Pengembangan kelembagaan jaringan, mengontrak rumah untuk menjadi sekretariat YASPPUK di Pondok Kelapa, Jakarta Timur; pembelian properti sekretariat, perekrutan staf, dan melebarkan cakupan wilayah jaringan di beberapa forum wilayah;
- Pengadaan informasi dengan menerbitkan buletin yang berkaitan dengan situasi terkini, misalnya bertema Politik dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Mulai dari forum hingga terbentuk menjadi asosiasi, ASPPUK terbagi dalam lima wilayah kerja. Untuk memudahkan koordinasi, dibentuk forum wilayah sebagai pengambilan keputusan tertinggi di wilayah masing-masing. Lima wilayah tersebut adalah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Sampai 2012, terdapat 54 LSM anggota di seluruh wilayah, yang tersebar di 21 provinsi Indonesia.

Proses penyerapan aspirasi yang dilakukan ASPPUK, sebagai wadah berjejaring para LSM pendamping perempuan usaha kecil, organisasi memiliki persyaratan untuk calon anggota yang ingin bergabung. Persyaratan ini ditetapkan dalam forum nasional yang dihadiri oleh perwakilan forum wilayah yang telah terlebih dulu mengadakan rapat dalam Forum Wilayah. Adapun persyaratan umumnya adalah lembaga non-profit atau LSM yang melakukan pemberdayaan PUK mikro dengan menerapkan perspektif gender, dan berpengalaman serta aktif melakukan pendampingan PUK mikro. Lembaga juga minimal telah mendampingi 100 PUK. Lembaga tidak berafiliasi pada partai politik, institusi pemerintah, TNI dan POLRI. Ia juga harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan ASPPUK.

“Syarat menjadi anggota ASPPUK adalah mereka sudah punya basis. Basisnya adalah perempuan pengusaha kecil minimal 100 orang di masyarakat, bahkan ada usulan akan dinaikkan lagi batasnya. Kita punya mekanisme akreditasi tiap tahun. Tiap LSM akan dilihat apakah masih layak untuk jadi anggota atau tidak. Kalau tidak layak lagi untuk pendampingan, atau tidak punya basis lagi di masyarakat, maka dengan *legowo* kita minta dia untuk mengundurkan diri. Karena dia sudah tidak ada kerja-kerja lain. Di AD/ART kita, syarat anggota begitu. Jadi sebelum jadi anggota, akan dicek di lapangan oleh kawan-kawan Forum Wilayahnya”.¹⁴

Adapun salah satu motivasi para anggota bergabung dengan ASPPUK adalah untuk mendapatkan fasilitas, atau program pengembangan kapasitas pendampingan perempuan usaha kecil. Misalnya, dengan pelatihan pembuatan lembaga setingkat koperasi sebagai alternatif perputaran modal perempuan usaha kecil, dan pelatihan-pelatihan pembukuan yang menunjang lembaga keuangan alternatif tersebut. Selain itu, daya tarik untuk bergabung dengan ASPPUK karena dirasakan kuatnya jaringan yang terjalin di seluruh Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, yang dapat bermanfaat untuk penguatan kapasitas masing-masing anggota.

“Jadi tugas kita di sekretariat ASPPUK memberikan *capacity building* bagi anggota, karena mereka sudah membayar iuran tiap tahun. Tugas kita adalah menguatkan LSM anggota itu, salah satunya

¹⁴ Wawancara dengan M. Firdaus, Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK, Jakarta 27 Juni 2012.

dengan menguatkan pendampingan, kapasitasnya. Mungkin itulah yang membuat mereka tertarik bergabung. Bisa juga karena alasan agar ada teman seajaringan, jadi masuklah dia ke ASPPUK. Ada teman berjaring yang punya isu yang sama untuk pengembangan jaringan perempuan usaha kecil di level basis tiap kabupaten. Kita juga membuat lembaga keuangan alternatif untuk perempuan, yang membantu pengembangan ekonomi integratif. Itu juga bisa jadi salah satu yang membuat mereka tertarik”.¹⁵

Keunikan dari ASPPUK adalah anggotanya berasal dari LSM pendamping perempuan usaha kecil, dan tidak berdasarkan individu. Perubahan bentuk organisasi dari Yayasan menjadi Perkumpulan, selain lebih memberikan efek demokratis, juga dirasakan lebih cocok untuk ASPPUK. Masing-masing anggota berperan dalam menentukan kebijakan yang sesuai untuk wilayahnya, dan juga untuk keberlangsungan perkumpulan secara nasional. Bentuk perkumpulan memberikan ruang transformasi kepemimpinan, karena pergantian kepengurusan dilakukan tiap dua periode.

“Kalau Yayasan, Badan Pendiri tidak boleh diganti-ganti. Kalau di Perkumpulan, bisa diganti-ganti pengurusnya, tergantung anggotanya. ASPPUK asosiasi yang anggotanya lembaga, bukan individu. Itu yang unik. Tiap Forum Nasional bisa diganti pengurusnya, dan bisa dipilih lagi tiap dua periode”.¹⁶

Selain dua organisasi tersebut, Kalyanamitra, yang dikenal sebagai pusat informasi dan komunikasi, ternyata juga melakukan kegiatan ekonomi bagi perempuan miskin sejak 2008, dengan mengembangkan kelompok di Muara Baru dan Prumpung, Jakarta, serta Pasrujambe di Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan meningkatkan kemampuan produktivitas ekonomi mereka, misalnya dengan mengajarkan cara membuat produk yang bisa dijual, seperti membuat makanan dan aksesoris.

Mulai 2008, Kalyanamitra mengembangkan program kepemimpinan perempuan melalui pendidikan komunitas. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi komunitas. Kalyanamitra menyelenggarakan pendidikan kritis, seperti memperkenalkan pemahaman mengenai hak dan kesehatan reproduksi bagi perempuan, dan pentingnya memberikan suara dalam Musrembang. Mereka melakukan penguatan ekonomi melalui pelatihan pembuatan produk yang dapat dijual, seperti makanan dan aksesoris, serta pembentukan kelompok keuangan mandiri, seperti kelompok simpan-pinjam.¹⁷

Pada 2011, perputaran dana pada kelompok-kelompok dampingan ekonomi berkisar sejumlah Rp 20 juta hingga Rp 25 juta. Jumlah ini cukup dapat membantu kelompok berusaha dan menerima uang tunjangan hari raya.¹⁸ Jumlah anggota kelompok yang tercatat hingga akhir tahun 2011

¹⁵ Wawancara dengan M. Firdaus, Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK, Jakarta 12 Juli 2012.

¹⁶ Wawancara dengan M. Firdaus, Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK, Jakarta 27 Juni 2012.

¹⁷ Lihat hal. 14-28, “Perempuan Memberi Makna pada Perubahan. Laporan Tahunan Periode 1 Januari-31 Desember 2011”, Kalyanamitra, Januari 2012, Jakarta.

¹⁸ *Ibid* hal. 27-28.

sebagai berikut: di Muara Baru dan Prumpung, dari total lima kelompok adalah 51 orang. Sementara itu, di Pasrujambe, dari enam kelompok, terhimpun 221 orang anggota.¹⁹

4. Pendidikan

Kalyanamitra dan Institut Kapal Perempuan banyak memfokuskan kegiatan organisasinya pada bidang pendidikan untuk perempuan. Pendidikan yang diberikan secara umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil gender, sekali pun materi yang disampaikan berbeda-beda. Institut Kapal Perempuan menjadikan lembaganya sebagai:

“Pusat pendidikan perempuan, pendekatan pada masyarakat sipil, terutama pada masyarakat miskin yang tingkat feminisasi kemiskinannya tinggi, tetap menjadikan perempuan sebagai korban”.²⁰

Kalyanamitra sebagai pusat komunikasi dan informasi memberikan pendidikan *gender awareness and sensitivity*, dan seksualitas.

“Kita adakan pendidikan gender tiap bulan, terbuka untuk umum. Pada 2012 dua kali, yaitu pada bulan Maret dan April. Kita membuat kurikulum tentang gender, pendidikan tentang seksualitas. Pesertanya siapapun, mahasiswa, umum, dan disebarakan melalui Facebook. Selama setahun tiap bulan, *full* satu hari. Yang direkrut maksimal hanya 15 orang peserta. Pematerinya bisa dari internal

Kalyanamitra, atau dari luar, misalnya Agustin dari Ardhanary. Cara seleksi peserta, mereka yang menaruh minat pada pendidikan diminta untuk membuat tulisan tentang perspektifnya mengenai perempuan. Dari tulisan itu, kalau yang terlihat sangat bertentangan, tidak akan kita terima. Umumnya, peserta adalah mahasiswa. Tapi ada juga ibu-ibu, dan dua laki-laki relawan dari organisasi lain”.²¹

Institut Kapal Perempuan melaksanakan pendidikan untuk perempuan agar mampu berposisi-tawar dalam relasi gender-nya, sehingga dapat terbebaskan dari penindasan atau kesewenang-wenangan.

“Pendidikan Kapal mengarah pada pendidikan perspektif perempuan untuk menghindari konflik, minimal tidak menjadi korban konflik di masyarakat”.²²

Mandat ini diwujudkan ke dalam empat bidang fokus kerja, yaitu pendidikan kritis, advokasi kebijakan, penelitian, dan publikasi. Selain pendidikan penyadaran gender, ada pula organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yang menjadi kebutuhan di tingkat domestik perempuan maupun keluarganya. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh Pekka, dengan membuat pendidikan dan pelaksanaan perempuan, yaitu dengan menyediakan Program Kejar Paket A, B, dan C. Selain itu, Pekka juga memiliki program pendidikan untuk anak dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

¹⁹ *Ibid* hal. 31-33.

²⁰ Wawancara dengan Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

²¹ Wawancara dengan Rena Herdiyani, Direktur Eksekutif Kalyanamitra, Jakarta 21 Mei 2012.

²² Wawancara dengan Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

Dengan PAUD, mereka harapkan para ibu memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan gender saat mereka mengantarkan anaknya ke PAUD. Para ibu, yang biasanya mengajarkan anak di rumah, menjadi terbantu tugasnya karena adanya PAUD, apalagi sang ibu bisa memperoleh pendidikan gender ketika anak-anaknya sedang di dalam kelas.

Pendidikan lain yang disasar adalah pendidikan untuk isu *Millenium Development Goals* (MDGs).

“Peran Kapal Perempuan dalam target MDGs lebih ke *gender mainstreaming* melalui pendidikan, dan banyak bermitra dengan jaringan-jaringan MDGs. Secara kapasitas, kita juga berikan *capacity building* kepada teman-teman di komunitas, untuk mempercepat penyebaran *gender mainstreaming*, bagaimana MDGs bisa masuk ke dalam tataran pemerintah lokal”.²³

“Dalam *mainstreaming gender*, kendala pertamanya adalah jaringan. *Mainstreaming gender* itu masuk ke dalam penganggaran dan perencanaan, dan itu yang masih susah diterima oleh pemerintah daerah, untuk memasukkan unsur MDGs dalam penganggaran dan perencanaan”.²⁴

Institut Kapal Perempuan, sebagai organisasi yang banyak bergerak untuk isu pendidikan alternatif dan kritis bagi perempuan, menyatakan hanya bermitra dengan organisasi yang tidak melakukan praktik kekerasan.

“Kita bermitra dengan yang konsisten dalam pergerakan, walaupun bukan organisasi feminis. Yang penting, tidak melakukan praktik kekerasan. Itu yang selalu menjadi pagar untuk merumuskan mitra”.²⁵

Selain isu buruh migran, Kapal Perempuan juga banyak bekerja untuk advokasi undang-undang pembantu rumah tangga. Hal ini dilakukan melalui jaringan Jala PRT.

Tidak jauh berbeda, Ardhany Institute juga mempunyai program kerja untuk pendidikan yang berfokus pada kelompok LBT. Bentuk kegiatan yang dilakukan Ardhany Institute adalah pendidikan, pelatihan dan konseling tentang *social practices*. Program kerja ini dianggap sukses karena mampu melakukan pengorganisasian, termasuk membuat *social-mapping* di komunitas.

“Keberhasilan lainnya, komunitas bisa menghasilkan pendanaan secara mandiri, jual-jual sesuatu, nanti untungnya untuk kegiatan. Dari uang itu, mereka berinisiatif bikin *training* pendidikan politik seksualitas”.²⁶

Dari pendidikan tersebut, kemudian dilakukan *assessment*, setelah mana akan diperoleh gambaran kebutuhan sasaran kegiatan pendidikan. Misalnya, para *beneficiaries* (kelompok transgender) butuh diakui identitasnya. Berdasarkan hasil *assessment*, maka Ardhany Institute akan memikirkan dan membuat program kerja sesuai kebutuhan itu.

²³ Wawancara dengan Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

²⁴ Wawancara dengan Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

²⁵ Wawancara dengan Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Jakarta 14 Mei 2012.

²⁶ Wawancara dengan Lily, Wakil Direktur Ardhany Institute, Jakarta 16 Mei 2012.

“Misalnya, dalam diskusi terungkap banyak lesbian yang tidak diterima di masyarakat. Tapi setelah ada komunitas, masyarakat bisa menerima komunitas tersebut”.²⁷

5. Kekerasan Terhadap Perempuan (*Violence Againsts Women*)

Kepedulian untuk memberikan layanan bagi perempuan yang mengalami kekerasan diawali dengan berkumpulnya aktivis perempuan dari berbagai organisasi perempuan. Ada pula para pemerhati masalah perempuan dari berbagai universitas di Jakarta, Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Papua pada 1991.

Data laporan kepolisian mengenai perkosaan antara tahun 1986-1989 menunjukkan bahwa perkosaan terjadi tiap lima jam sekali di Indonesia. Data ini juga dijadikan dasar bagi Yayasan Kalyanamitra untuk mengajak organisasi-organisasi perempuan dan pemerhati masalah perempuan untuk melakukan kampanye bersama, menyerukan anti-perkosaan.

Adalah menarik untuk melihat perkembangan, atau mungkin dapat dikatakan pergeseran pilihan beraktivitas sebuah organisasi. Misalnya saja yang terjadi pada Kalyanamitra. Setelah 15 tahun pemberitaan kekerasan seksual di media massa, pada 1991, Kalyanamitra memprakarsai kampanye Anti-Perkosaan melalui kegiatan Lokakarya Nasional, dan membentuk jaringan dari para NGO/LSM yang berpartisipasi dalam lokakarya tersebut. Kegiatan mengangkat isu ke-

kerasan seksual ini menjadi kegiatan utama Kalyanamitra pada waktu itu, selain melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan analisis gender.

Jaringan ini beraktivitas dengan menjalankan pertemuan reguler tiap minggu, selalu diadakan di kantor LBH Jakarta. Dua permasalahan besar yang dihadapi Jaringan sebagai identifikasi pembahasan bersama ketika Lokakarya Anti-Perkosaan, yaitu reformasi hukum, terutama hukum pidana dan pendefinisian perempuan dan keluarga dalam hukum pidana, serta penyediaan keahlian dalam pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Diskusi reguler dari jaringan inilah yang kemudian menjadi cikalbakal beberapa organisasi perempuan yang fokus pada salah satu atau kedua identifikasi isu, selepas Lokakarya Anti-Perkosaan.

Pada 1995, Kalyanamitra memperkuat kampanye tentang isu kekerasan terhadap perempuan. Kalyanamitra banyak menerima kasus-kasus perkosaan, dan mulai terlibat secara langsung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Titik kulminasinya ialah peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Ketika itu, terjadi perkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Kalyanamitra pun menjadi sekretariat Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) untuk korban perkosaan di Jakarta.

Sejak itu, Kalyanamitra membangun gerakan perlawanan kekerasan terhadap perempuan, baik akibat ketimpangan gender maupun oleh negara. Kerja menangani korban ini memerlukan wadah tersendiri. Dalam kaitan itu, pada 1998, dibentuklah Divisi Pendampingan Korban di Kalyanamitra. Kemudian menyusul divisi-divisi pen-

²⁷ Wawancara dengan Lily, Wakil Direktur Ardhanary Institute, Jakarta 16 Mei 2012.

dukung kerja pendampingan korban, seperti Divisi Pendidikan, Divisi Kampanye, dan Divisi Perpustakaan dan Dokumentasi.

Terpaut lebih dari 20 tahun kemudian, masalah kekerasan terhadap perempuan tetap banyak terjadi di Jakarta, dan memunculkan organisasi yang memfokuskan diri pada penanganan dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan. Kalyanamitra sejak tahun 2008 memutuskan untuk lebih fokus pada program pendampingan perempuan miskin, dengan menyelenggarakan kegiatan penguatan ekonomi. Hal ini dilakukan setelah melihat semakin buruknya kondisi ekonomi warga, terutama yang dialami oleh perempuan di komunitas miskin. Sejak saat itu, Kalyanamitra tidak lagi melakukan kegiatan pendampingan korban kekerasan, tetapi melakukan kegiatan penguatan ekonomi perempuan, pendidikan dan pelatihan analisis gender dan seksualitas, serta aktif terlibat dalam kerja jaringan antar-organisasi perempuan guna melakukan advokasi kebijakan yang responsif terhadap kepentingan perempuan.

LBH APIK menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum untuk korban kekerasan dalam bentuk litigasi, yaitu dengan menjadi penasihat hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan.

“Mandatnya melakukan perubahan sistem hukum dan sosial yang lebih setara dan adil gender. Jadi tidak hanya undang-undangnya tapi juga institusinya, termasuk berpihak pada korban”.²⁸

“Dua program utama, pertama memberikan bantuan hukum bagi perempuan kemudian untuk melakukan perubahan hukum bagi kita memiliki satu divisi pelayanan hukum dan satu divisi perubahan hukum ditunjang oleh internal”.²⁹

LBH APIK juga melakukan perubahan hukum yang meliputi kegiatan kajian, dokumentasi-publikasi, kampanye dan advokasi kebijakan.

“Melawan wacana tidak mudah, kasus dianggap lebih mudah untuk diangkat karena memiliki bukti dan data. Funding juga tertarik mendanai kegiatan yang berkaitan dengan kasus”.³⁰

LBH APIK juga banyak bekerja dalam jaringan advokasi hukum. Secara aktif, LBH APIK menjadi penggerak Jaringan Kerja Perempuan Pro Prolegnas (JKP3).

Ketika terjadi tragedi nasional penyerangan seksual dan perkosaan dalam Kerusuhan Mei 1998, banyak pihak dalam masyarakat disentakkan oleh kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu nyata ada. Sebagai respons atas peristiwa itu, berbagai pihak dalam masyarakat, seperti kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan, mulai menggalang barisan, memberikan upaya layanan bagi perempuan korban.

Negara mulai menunjukkan perhatiannya pada persoalan kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah menunjukkan sikap

²⁸ Wawancara dengan Ratna Batara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, Jakarta 24 Mei 2012.

²⁹ Wawancara dengan Ratna Batara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, Jakarta 24 Mei 2012.

³⁰ Wawancara dengan Ratna Batara Munti, Direktur Eksternal LBH APIK Jakarta, Jakarta 24 Mei 2012.

pro-aktif dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Sebagai wujud tanggungjawabnya, negara kemudian membentuk sebuah tim pencari fakta independen atas Kerusuhan Mei dan perkosaan yang terjadi, serta mendirikan sebuah lembaga, Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan, berdasarkan Keppres No. 181/1998.

Perangkat hukum yang mendasari kerja ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang merupakan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang ditetapkan pada 1979 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berangkat dari pengalaman bekerja para aktivis perempuan dan hak asasi manusia menggunakan atau mengacu pada konvensi itu, dihasilkan sebuah Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada 20 Desember 1993. Secara nyata, dalam pasal 4 Deklarasi itu, negara dituntut perannya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Kedua perangkat hukum dan aturan ini juga menjadi dasar kerja pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pada 1999, negara mengeluarkan komitmen yang diwujudkan melalui penandatanganan deklarasi bersama untuk menetapkan *Zero Tolerance Policy*. Yakni, sebuah pendekatan yang tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan, sekecil apapun, terhadap perempuan, melainkan menjadikan keselamatan dan keamanan perempuan sebagai prioritas bagi semua pihak.

Pendekatan ini kemudian dijadikan dasar Implementasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan,

yang dimotori oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (dikenal sebagai Komnas Perempuan) memiliki fokus kerja untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mempunyai sejarah pendirian yang unik, karena merupakan lembaga negara yang lahir sebagai tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah Indonesia untuk menyikapi tindak kekerasan penyerangan seksual terhadap perempuan. Meletusnya kekerasan terhadap perempuan terjadi di Jakarta pada Kerusuhan Mei 1998, pada saat memanasnya suhu politik Indonesia terkait lengsernya Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun lebih.

Prinsip kerja Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM (*National Human Rights Institution*) adalah menjaga kontinuitas pekerjaan para perintis dengan prinsip dasar pembentukannya dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penuntasan, penindaklanjutan dan pengembangan secara independen segala pemikiran sekitar Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada Presiden RI dan publik setiap tahun pada akhir periode kerja Komisi Komnas Perempuan.

Sebagaimana dilaporkan dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) 2011, sepanjang 2010, kasus KTP berjumlah 105.103. Ratusan ribu kasus terlapor ini kebanyakan terjadi di ranah personal, yakni sejumlah 101.128 (96 persen), sebanyak 3.530 kasus di ranah publik. Sisanya, sebanyak 445, di ranah nega-

ra. KTP di ranah personal, 97 persen, terjadi terhadap istri (KDRT sebanyak 98.577 kasus), sedangkan separuh kasus KTP di ranah publik berbentuk tindak perkosaan, percobaan perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Adapun kasus KTP di ranah negara berwujud penggusuran warga perempuan, tindak kekerasan atas nama agama dan moralitas, serta perdagangan manusia.

Catatan Tahunan (Catahu) milik Komnas Perempuan tentang *Violence Againsts Women* (VAW) merupakan program kerja unggulan milik Komnas Perempuan. Catahu dibuat dari hasil kerja keras menghimpun data VAW yang dilaporkan (ke WCC/LSM, kantor Polisi, Rumah Sakit, dan Pengadilan) semua mitra kerja Komnas Perempuan di seluruh Indonesia. Catahu diterbitkan rutin setiap 8 Maret melalui konferensi pers. Selain memanfaatkan Women's International Day (8 Maret), Komnas Perempuan juga mensosialisasikan *16 Days Anti-Violence Against Women Campaign* (25 November - 10 Desember), yang biasa diperingati di seluruh dunia, dan berhasil menjadikannya tradisi untuk menggelar berbagai peristiwa kultural-politikal guna mengajak masyarakat luas bersikap anti kekerasan terhadap perempuan.

“Banyak instrumen nasional yang sudah dibuat, seolah-olah Negara sudah berbuat banyak untuk peningkatan kesejahteraan perempuan. Padahal nyatanya, nasib perempuan tidak banyak berubah”.³¹

Program kerja Komnas Perempuan dijalankan melalui sejumlah divisi, yaitu: Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK), Pendidikan, Pemulihan, Pemantauan, dan Partisipasi Masyarakat (Parmas). Dalam perjalanan kerjanya, Komnas Perempuan merespons kebutuhan penanganan khusus untuk beberapa isu tertentu yang tidak termasuk tugas divisi, dengan membentuk Gugus Kerja (*Task Force*). Komnas Perempuan memiliki tiga Gugus Kerja (GK), yakni GK Papua, GK Pekerja Migran dan GK Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional (PKHN).

Tantangan bagi Komnas Perempuan adalah memastikan semua kegiatan untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin terpenuhinya HAM di Indonesia, mengintegrasikan kepentingan perempuan dan sadar gender. Hal ini berarti Komnas Perempuan juga harus memelihara kolaborasi dan membangun sinergi dengan semua aktor, baik di bidang hukum maupun sosial politik lain, apa itu di kalangan pemerintah eksekutif, legislatif pada semua aras (nasional hingga lokal), maupun kalangan swasta dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu kontribusi Komnas Perempuan adalah upaya lembaga tersebut untuk menawarkan alternatif layanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, yang telah menjadi rujukan bagi organisasi perempuan bantuan hukum, termasuk juga penegak hukum di Indonesia. Secara ringkas, tawaran alternatif layanan yang diusulkan oleh Komnas Perempuan diringkaskan dalam boks berikut.

³¹ Niniek Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan, FGD Jakarta 9 Mei 2012

Ragam Layanan dan Upaya Terpadu³²

Layanan yang Disediakan oleh Masyarakat *Crisis Center, Shelter dan Hotlines*

Organisasi pengada layanan *crisis center* sebagai tempat yang dapat menerima pengaduan dan melayani kebutuhan korban untuk memperoleh dampingan psikologis, atau jasa mendampingi, atau menemani, manakala korban perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medik, atau ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Bisa juga menyediakan layanan hukum yang dapat dimanfaatkan seorang korban, apabila dirinya ingin menyelesaikan secara hukum kekerasan yang dialaminya.

Layanan *shelter* atau rumah aman, yaitu sebuah tempat yang dirahasiakan, manakala dibutuhkan, guna menampung sementara waktu para korban dan anak-anaknya selama kasusnya ditangani. Tempat penampungan ini dibutuhkan apabila korban dan anak-anaknya merasa tidak aman lagi tinggal di tempat tinggalnya.

Layanan *hotlines* adalah menyediakan kemudahan bagi korban, yang meski sudah ingin memaparkan persoalan kekerasan yang dihadapinya, tetapi belum mampu bertatap muka untuk membicarakan persoalannya dengan orang lain.

Kendala yang dialami dalam perjalanan kegiatan menyediakan layanan *crisis center, shelter* dan *hotlines* di tingkat kota besar maupun kota kecil atau tingkat kabupaten pada dua lingkup, yaitu:

1. Lingkup Eksternal

- Nilai budaya patriarkhi yang masih mempengaruhi cara berpikir sebagian besar masyarakat, termasuk para korban, keluarga korban, bahkan juga termasuk para penyedia layanan, seperti kalangan profesional, baik dari latar belakang medik, hukum maupun psikologi.
- Materi hukum yang belum berpihak kepada korban.
- Sikap aparat hukum, seperti polisi, hakim dan jaksa, yang masih terjerat pada sistem hukum yang tersedia, yang masih kurang berpihak kepada korban.

2. Lingkup Internal

- Jumlah pekerja pendampingan yang masih sedikit akan menyebabkan kasus-kasus kekerasan kurang dapat segera ditanggapi.

³² Lihat "Layanan Yang Berpihak: Buku Rujukan untuk Menyelenggarakan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan", Adinda, et.al, Komnas Perempuan, cetakan ke dua, 2005, Jakarta.

- Jumlah pekerja yang sedikit tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan kasus kekerasan yang ada, menyebabkan munculnya perasaan akan beban kerja yang berat.
- Terbatasnya jumlah lembaga atau individu yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu dalam melakukan pendampingan bagi korban.

Upaya yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan kegiatan mendatangi korban ke tempat tinggalnya, serta membangun kegiatan kelompok dukungan di tengah masyarakat, guna membantu mereka yang menjadi korban di komunitas itu.

Layanan Berbasis Komunitas

Adalah layanan yang dilakukan oleh individu atau organisasi secara langsung di dalam komunitas, disebut juga *outreach* dan *support group*.

Pengada layanan di tingkat komunitas ini mengedepankan pemberdayaan kekuatan lokal dalam masyarakat itu sendiri. Para individu atau organisasi perempuan yang berperan sebagai pelopor pengada layanan di tingkat komunitas memberikan pelatihan kepada perempuan-perempuan dalam komunitas, untuk dapat melakukan kegiatan konseling bagi perempuan korban, serta memberikan dukungan bagi mereka yang menjadi korban.

Kegiatan awalnya, penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan, memfasilitasi terbentuknya kelompok pendamping kepada perempuan korban, juga mengikutsertakan aparat pemerintah lokal setempat.

Keterlibatan lembaga adat dan lembaga agama dalam pengadaan layanan di komunitas adalah salah satu upaya untuk menjawab tantangan itu.

Kekuatan dari layanan berbasis komunitas ini, selain berupaya untuk memperkuat posisi korban, juga untuk mencoba membangun kekuatan komunitas untuk dapat menangani perkara kekerasan terhadap perempuan. Karena layanan bersifat pro-aktif, maka dia lebih fleksibel.

Kekuatan itu berupa:

- Memperkuat posisi korban, sekaligus komunitas, untuk memahami kekerasan terhadap perempuan.
- Pro-aktif mengunjungi korban di mana pun mereka berada.
- Fleksibel dan tidak dibatasi oleh ruang konsultasi yang formal.

Kendala yang dirasakan oleh pengada layanan yang berbasis komunitas:

- Tempat yang sulit dijangkau
- Belum dikenalnya kekerasan terhadap perempuan oleh sebagian besar masyarakat
- Masih banyaknya anggota komunitas yang buta huruf
- Kurangnya akses masyarakat pada layanan hukum dan medik

Kegiatan Advokasi atau Kampanye

Adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu komunitas atau masyarakat agar memahami kekerasan terhadap perempuan, termasuk cara-cara penanggulangannya.

Pendataan atau Pendokumentasian

Sifatnya amat mendukung keefektifan pendampingan, atau kerja layanan.

LAYANAN berbasis RUMAH SAKIT

Ruang Pelayanan Khusus

Merupakan suatu tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan yang berada dalam organisasi kepolisian. Berupa ruangan khusus yang tertutup dan nyaman di Kesatuan Polri di mana perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, atau pelecehan seksual, dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empati, penuh perhatian dan profesional.

Prosedur atau hubungan tata cara kerja:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan (korban kekerasan) ditangani oleh Polwan Yanmas di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan lalu dibuatkan laporan polisi.
- b. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana diberikan upaya konseling, atau kerjasama dengan fungsi lain di lingkungan Polri, instansi terkait dan mitra kerja/LSM.
- c. Kasus memenuhi unsur pidana digunakan jalur tugas Serse sesuai KUHAP.
- d. Diperlukan koordinasi yang harmonis antara pembina kedua fungsi (Serse dan Yanmas).
- e. Penanganan ditarik dari Polsek ke RPK Polres apabila jarak masih dapat dijangkau.
- f. Tetap berpedoman pada hubungan tata cara kerja yang berlaku di lingkungan Polri.

- g. Apabila memerlukan perlindungan dan pendampingan lebih lanjut, RPK dapat bekerjasama dengan mitra kerja/LSM/organisasi lain yang memiliki fasilitas bantuan sesuai dengan kebutuhan korban.

Perbandingan Pelayanan Terpadu Model Rifka Annisa dan RSUPN Cipto Mangunkusumo

Rifka Annisa, Yogyakarta	RSUPN Cipto Mangunkusumo
Yaitu jaringan kerja bersama antar lembaga-lembaga/organisasi yang otonom dalam memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan	Yaitu sistem layanan terpadu berbasis rumah sakit yang memberikan layanan multi-disipliner (medik, psikologis, sosial masyarakat, hukum) dalam satu atap.
Unsur: 1. Rumah sakit: dokter spesialis, dokter umum, psikiater, perawat 2. Kepolisian 3. Lembaga Bantuan Hukum 4. Women Crisis Center/Organisasi advokasi hak perempuan/shelter 5. Lembaga konseling: psikolog 6. Akademisi/lembaga pendidikan: pekerja sosial	Unsur: 1. Medik: dokter spesialis, dokter umum, psikiater, perawat 2. Psikologik-sosial masyarakat; Psikolog, pekerja sosial, konselor, pengelola shelter 3. Hukum: pengacara, polisi

Kekuatan dan Tantangan Layanan Terpadu Antar Lembaga

	Kekuatan	Tantangan
Layanan Klien	Klien relatif terbuka terhadap pilihan	1. Perlu waktu dan biaya besar untuk mendapat layanan terpadu. 2. Perlu energi untuk menjawab pertanyaan yang sama yang diajukan oleh pihak yang berbeda.
Kelembagaan/Institusi	Masing-masing pihak mengelola dana secara mandiri	

Kekuatan dan Tantangan Layanan Satu Atap

	Kekuatan	Tantangan
Layanan Klien	1. Klien memperoleh layanan terpadu yang memakan waktu relatif singkat 2. Penanganan klien gawat darurat lebih cepat	1. Tidak selalu terjangkau oleh klien yang jauh dari pusat kota 2. Inefisiensi layanan karena terbentur birokrasi penanganan klien
Kelembagaan/Institusi	1. Potensi kuat untuk mempererat jaringan kerja dengan beragam institusi multidisiplin 2. Langsung ada pemrosesan <i>lesson learned</i> untuk koordinasi dan kerjasama antar disiplin	1. Hubungan kemitraan antar profesi dapat timpang karena posisi dominan salah satu pihak 2. Harus ada SOP dan mekanisme kerja yang pasti kuat 3. Membutuhkan dana yang cukup besar
Advokasi	Realisasi pelaksanaan VAW sebagai <i>public health concern</i> (kebutuhan advokasi)	Tuntutan kerja bersama sangat tinggi

Pekka yang dikenal sebagai organisasi pemberdayaan ekonomi, ternyata memiliki kegiatan penanganan bantuan hukum untuk janda dan perempuan korban kekerasan. Pada praktiknya, Pekka memberikan bantuan pelayanan pengadaan Akte Kelahiran Anak, Isbat Nikah dan Surat Cerai, dan pelayanan penasihat hukum bagi korban kekerasan yang memerlukan bantuan hukum.

6. Perlindungan Buruh Migran

Seperti yang dijelaskan, ada organisasi perempuan yang bekerja untuk pendampingan permasalahan buruh migran Indonesia yang

mayoritas perempuan. Sebagai contoh. Migrant Care dan Solidaritas Perempuan melakukan pendampingan, dan pemberian pendidikan kepada buruh migran sebelum, saat, dan setelah kembali ke tanah air, terlebih untuk buruh migran yang bermasalah di negara tempat ia bekerja. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan buruh migran, organisasi harus banyak berjejaring dengan organisasi lain, termasuk organisasi di luar negeri.

“Migrant Care bukan organisasi feminis, tetapi hanya untuk kedaulatan buruh migran secara umum. Namun wajah bu-

ruh migran Indonesia adalah perempuan”.³³

“Dibahas pula isu apa yang akan diangkat dalam program yang akan dilakukan selanjutnya oleh seluruh anggota SP. Isu awal berdirinya, SP fokus pada buruh migran pada tahun 1990-an. Untuk isu buruh migran, SP bekerjasama dengan LBH Jakarta, LBH APIK, Migrant Care, karena banyak Litigasi. Beberapa juga langsung ke kantong-kantong buruh migran di daerah”.³⁴

“Migrant Care memiliki perpanjangan tangan di Malaysia, yang dijalankan oleh Malaysia dengan bentuk kerjasama sebagai cabang dari Migrant Care Indonesia, karena di Malaysia sulit membangun LSM akibat Malaysia adalah negara otoriter”.³⁵

Institut Kapal Perempuan, yang mengemban mandat pendidikan kritis, juga menyasar kelompok-kelompok tertentu seperti buruh migran perempuan. Untuk kebutuhan yang lebih praktis, Kapal Perempuan menyiapkan Pelatihan Pra-Pemberangkatan PRT Migran, bekerja-sama dengan organisasi Migrant Care untuk membekali para PRT Migran dengan keterampilan-keterampilan pokok serta pengetahuan hukum dasar yang dibutuhkan. Selain itu, Kapal Perempuan mengambil peran membantu mengembangkan jaringan di mana para keluarga dapat dimudahkan untuk mengakses informasi

tentang anak/istri di negara tempat mereka bekerja.

“Negara tidak punya satu pun program persiapan dan penguatan untuk buruh migran perempuan, khususnya di Timur Tengah. PRT dianggap pekerjaan rendah dan mudah, bisa dilakukan tanpa persiapan khusus”.³⁶

Usaha yang dilakukan oleh Migrant Care tidak hanya pada pelatihan dan advokasi nasional, tetapi juga pada cara membangun dan mengembangkan jejaring internasional untuk mengadvokasi lebih luas masalah terkait, karena permasalahan buruh migran adalah masalah transnasional, bahkan global. Tidak cukup advokasi hanya dilakukan di ranah nasional. Langkah awal berdirinya Migrant Care adalah untuk membangun jaringan buruh migran di Asia (*Migrant Forum in Asia*). Di ranah internasional, Migrant Care juga bergabung dengan Global Platform on Migrant Worker Convention di Jenewa, karena penting memanfaatkan instrumen internasional untuk mengadvokasi. Usaha lain yang ditempuh oleh Migrant Care adalah aktif memantau kasus buruh migran yang terjadi:

“Memastikan bahwa ada bantuan hukum dari pemerintah melalui KBRI, ada pengacaranya, memastikan pemantauan intensif terhadap kasus oleh KBRI, termasuk proses peradilannya”.³⁷

³³ Wahyu Susilo, Dewan Pengurus/Policy Analyst Migrant Care, FGD Jakarta 9 Mei 2012.

³⁴ Wawancara dengan Wahidah Rustam, Direktur Eksekutif Solidaritas Perempuan, Jakarta 19 Juli 2012.

³⁵ Wawancara dengan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Jakarta 4 Juli 2012.

³⁶ Budhis Utami, Wakil Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, FGD Jakarta 9 Mei 2012.

³⁷ Wawancara dengan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Jakarta 17 Juli 2012.

Isu Seksualitas

Seksualitas adalah pengalaman mendasar yang berhubungan dengan kondisi fisik, emosi dan spiritual. Seksualitas seringkali dipahami sebagai sebuah persoalan personal, namun dapat memberikan implikasi politis.

Terkait pemahaman mengenai seksualitas, kita dapat mengenali ragam identitas seksual dan gender, seperti lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex dan *queer* (LGBTIQ). Selain itu, ada bentuk lain dari hubungan seksual, seperti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan tanpa menjadi lesbian, atau laki-laki melakukan hubungan seks dengan laki-laki tanpa menjadi *gay*.

Beberapa individu tidak dapat menerima bahwa mereka terlahir dengan organ seksual tertentu. Sehingga, mereka menolak identitas gendernya. Situasi ini muncul akibat adanya kontradiksi antara apa yang selama ini selalu diajarkan, dengan apa yang tubuh individu itu, baik laki-laki maupun perempuan, alami. Tubuh dan apa yang biasa kita lakukan dikendalikan oleh masyarakat melalui pranata-pranata sosial yang ada. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, bagaimana seorang yang secara biologis laki-laki ingin menjadi perempuan secara sosial, atau sebaliknya, jika seseorang secara biologis adalah perempuan tetapi ingin menjadi laki-laki? Jawabannya adalah tubuh kita kadangkala berbicara secara berbeda dengan bahasa yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan ideologinya. Hal inilah yang dialami oleh LGBTIQ di Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Agustine dari Ardhanary Institute, terlihat bahwa

norma dan nilai-nilai masyarakat telah melekatkan stigma kepada para LGBTIQ. Masyarakat maupun keluarga cenderung menolak mereka. Kebanyakan kasus menunjukkan bahwa mereka harus lari dari rumah dan keluarganya, karena mereka mengalami kekerasan, baik yang dilakukan oleh ayah atau anggota keluarganya yang laki-laki. Mereka juga akan ditutup akses dana untuk pendidikannya dari orang tuanya. Kebanyakan dari mereka yang telah bekerja akan menutup situasinya, karena takut kehilangan pekerjaannya.

Implikasi yang dialami oleh mereka yang lesbian atau *gay*, juga berpengaruh pada situasi lain yang berhubungan dengan akses mereka pada pelayanan kesehatan reproduksi. Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka segan untuk datang ke pusat-pusat pelayanan kesehatan reproduksi. Berdasarkan pengalaman Ardhanary Institute, misalnya, untuk menghindari pertanyaan yang terlalu banyak dari penyelenggara layanan kesehatan, mereka cenderung mencari cara alternatif untuk pemeliharaan kesehatan reproduksinya, atau bahkan sama sekali tidak mengaksesnya. Mereka menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti, "*Apakah kamu betul-betul perempuan? Mengapa kamu ingin test pap-smear?*"

Ardhanary Institute berdiri pada 2005 di Jakarta dan memfokuskan kerjanya pada penelitian, publikasi dan advokasi untuk perempuan lesbian, bisexual and transgender (LBT). Sejak awal berdirinya, organisasi ini bertujuan mengikis homofobia sehingga kegiatan pendidikan, pelatihan dan sesi-sesi diskusi yang dilakukan bertema kebebasan seksualitas sebagai hak setiap manusia.

“Ardhanary memperjuangkan ketidakadilan yang dialami teman-teman LBT, yang tidak mendapatkan haknya. Yang dimasalahkan bukan hanya ekspresi seksual, tapi juga identitas gendernya. Ardhanary mengkritisi konsep gender yang dipakai selama ini, konsep biner sehingga tidak mengakui adanya gender ketiga”.³⁸

Perhimpunan Ardhanary Institute bercita-cita membangun masyarakat yang menghargai dan melindungi hak serta pilihan seksualitas kaum lesbian, biseksual dan transgender. Visi tersebut diwujudkan dengan cara menghimpun para perempuan yang berorientasi seksual lesbian, biseksual serta kelompok transgender *female-to-male* (FTM), agar mampu menggalang kekuatan demi menghadapi hidup bermasyarakat yang dirasakan masih sangat diskriminatif terhadap keberadaan LBT.

Program pemberdayaan individu dilakukan secara langsung melalui konseling dan secara lebih berjangka panjang melalui pendidikan. Program konseling bagi para perempuan LBT dan keluarganya yang membutuhkan, selain di Jakarta, juga disusun dalam rangka kerjasama antar lembaga. Salah satunya, dengan dua lembaga penyedia layanan (*service provider*) di Yogyakarta, yaitu Women Crisis Centre (WCC) Rifka Anissa, dan pusat konseling remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Ardhanary diminta untuk membantu pengembangan perspektif LBT untuk semua staf dan awak *shelter*, serta para konselor.

“Ya, organisasi LGBT itu banyak. Cuma Ardhanary Institute ingin menjadi pusat informasi dan lembaga pendidikan. Jadi dari daerah banyak komunitas kita diberi penguatan kapasitas. Kita dorong mereka menjadi pemimpin daerah dan bikin organisasi, dan membangun kelompok. Dalam tiga tahun kerja, Ardhanary Institute sudah bangun enam buah organisasi”.³⁹

Ada beberapa lembaga atau organisasi yang bekerja untuk isu seksualitas di Jakarta. Salah satunya adalah Kalyanamitra, dan mulai 2012, Kalyanamitra melaksanakan pendidikan bagi masyarakat umum mengenai isu seksualitas bekerjasama dengan Ardhanary Institute.

KPI, melalui advokasinya mengenai isu seksualitas, juga bekerja untuk mengangkat permasalahan atau isu yang tabu dibicarakan di masyarakat, seperti isu LBT ini, serta hak seksualitas. Hal ini tampak kuat di wilayah Jakarta. Menurut sebuah evaluasi program KPI pada 2009, kerja KPI dalam isu seksualitas ini cukup tampil di wilayah Makassar dan Yogyakarta. Namun, advokasi mengenai isu seksualitas di wilayah seperti Surabaya lebih pada pembahasan hak kesehatan reproduksi, misalnya HIV yang dialami oleh perempuan.

Tantangan

Secara kelembagaan, organisasi perempuan di Jakarta terbagi dalam bentuk organisasi yang berbeda-beda. KPI, SP dan ASPPUK merupakan organisasi massa perempuan

³⁸ Lily, Wakil Direktur Ardhanary Institute, FGD Jakarta 9 Mei 2012.

³⁹ Wawancara dengan Agustine, Direktur Ardhanary Institute, Jakarta 22 Mei 2012.

yang memiliki kekuatan yang signifikan, dengan struktur mulai dari pusat, wilayah, cabang. Bahkan untuk KPI dengan Balai Perempuan mencoba bekerja untuk memperjuangkan hak perempuan dari tingkat nasional hingga daerah. Kalyanamitra, Kapal Perempuan dan Ardhanary memusatkan kegiatan utamanya di Jakarta, dan mencoba menularkan pentingnya pendidikan kritis seperti analisis gender dan seksualitas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta. Sementara itu, Migrant Care memfokuskan kegiatannya untuk bekerja membantu permasalahan yang dihadapi buruh migran, baik di kantung-kantung pengiriman buruh migran, serta di negara-negara tujuan tempat buruh migran tersebut bekerja. Akan halnya Pekka, sebuah organisasi yang lahir sejalan dengan kepentingan Program Dunia mengenai *Justice 4 the Poor*, membuat program bantuan bagi janda miskin di delapan wilayah yang dikoordinasi oleh sebuah Sekretariat Nasional berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Komnas Perempuan adalah sebuah organisasi yang dibentuk berkat desakan kelompok-kelompok perempuan untuk merespons peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 1998.

Secara tersendiri, kesembilan organisasi perempuan ini menunjukkan kerja yang luar biasa untuk membantu perempuan menemukan “titik emansipasi”, istilah yang diungkapkan Ratna Bantara Munti dari LBH APIK, Jakarta, agar perempuan menjadi lebih berdaya, mandiri dan sadar akan hak-haknya. Sebagian besar organisasi-organisasi perempuan, secara tersendiri sudah cukup mendorong perempuan untuk sadar akan hak-haknya, sebagaimana telah dipaparkan.

Namun, beberapa organisasi mengakui bahwa secara kelembagaan, mereka masih menghadapi tantangan dalam menjalankan kerjanya menghadirkan hak-hak perempuan. Salah satunya adalah Seknas KPI. Organisasi yang berpotensi untuk menggerakkan massa perempuan ini, masih merasa adanya *gap* untuk menjadikan satu keprihatinan supaya masing-masing daerah memiliki visi dan misi yang sama. Misalnya, satu wilayah bisa saja terdiri dari 50 desa, dan masing-masing desa mempunyai perhatiannya sendiri-sendiri.⁴⁰ Ada kecenderungan untuk ‘jalan’ sendiri, kurang koordinasi dan komunikasi. Hingga saat ini kegiatan dan penyelesaian masalah masih bergantung pada Sekretariat Nasional KPI. Akibatnya, yang sering terjadi adalah anggota masih sangat bergantung pada Seknas di Jakarta. KPI juga tidak dapat bekerja secara optimal, apalagi dengan sekretariat yang lebih banyak mengandalkan relawan, sehingga kegiatan tidak berjalan optimal.

Demikian pula dengan Pekka, yang melihat bahwa tantangan terbesarnya adalah pada kaderisasi. Pengurus di tingkat daerah masih saja mengharapkan pihak dari Sekretariat Nasional untuk datang ketika mereka menghadapi masalah. Seperti yang disebutkan oleh Nani Zulminarni, “Kita sendiri yang harus tegas menyapih, seperti dahulu menyapih ASI bayi kita. Jika dibiarkan terus menyusui pasti tidak akan mampu mandiri”. Cara mengatasinya adalah dengan memberi kesempatan sekerap mungkin pada anggota di daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mencoba menyelesaikan

⁴⁰ Wawancara dengan Dian Kartikasari, Sekretaris Jendral KPI, Jakarta 30 Mei 2012.

kannya sendiri. Hal ini masih dirasakan sebagai tantangan utama hingga saat ini.

Sementara, organisasi seperti Kalyanamitra pada 2008 menggeser fokus kegiatannya dari lembaga penyedia informasi mengenai perempuan, melalui layanan dokumentasi dan informasinya, serta kegiatan layanan dampingan perempuan korban kekerasan pada layanan penguatan ekonomi bagi perempuan miskin dan pendidikan seksualitas. Hal yang menarik dari Kalyanamitra adalah, mulai awal 2012, mereka bekerjasama dengan Ardhanary Institute untuk melakukan pendidikan tentang seksualitas. Disinilah sebetulnya letak inti dari tantangan terbesar dari gerakan perempuan. Yakni, kerja memperkuat dan memberdayakan perempuan akan hak-hak perempuan di wilayah domestik. Ruang-ruang dibuka untuk mendiskusikan secara terbuka dan kritis mengenai relasi gender dan konstruksi seksualitas perempuan dan laki-laki. Agaknya, kegiatan atau kerja untuk mengedepankan seksualitas merupakan tantangan cukup besar bagi organisasi perempuan. Dan inilah kerja keras yang dihadapi Kalyanamitra dan Ardhanary Institute.

Adapun Komnas Perempuan berkiprah dalam kerja membantu perempuan korban kekerasan, dan upaya menawarkan ragam cara penanganan korban. Tantangan terbesar yang tampak adalah memperkuat tautan kerja yang sudah ada dengan organisasi yang juga bekerja membantu perempuan korban kekerasan dengan tawaran ragam penanganan serta langkah dan mekanisme dari Komnas Perempuan. Efektifitas atau *impact* penanganan menjadi lebih terasa bukan saja bagi mereka yang dibantu, tetapi juga masyarakat pada umumnya.

Penutup

Pembahasan mengenai persoalan perempuan harus diletakkan dalam konteks tertentu untuk memahami esensinya, dan sebab-sebab munculnya persoalan. Dalam hal ini, konteks yang paling relevan adalah memahami penyelenggaraan negara serta dampaknya pada kehidupan perempuan dan struktur sosial masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan di Jakarta mengenai perempuan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan negara membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan.

Organisasi perempuan mendasarkan kerjanya pada analisis yang melihat bahwa akar munculnya persoalan perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural, dan kultural. Ketiganya secara saling berkait mengukuhkan sebuah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Ideologi patriarki bergandengan dengan ideologi gender telah mempengaruhi struktur dan sistem sosiokultural masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi pinggiran. Internalisasi nilai-nilai patriarki yang mengunggulkan peran dan status manusia lelaki telah mendukung terciptanya peran dan status manusia perempuan yang bersifat sekunder. Kondisi semacam itu pada dasarnya merupakan manifestasi dari diskriminasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, juga hukum dan agama terhadap perempuan. Akibat diskriminasi tersebut, muncul berbagai persoalan lain yang dapat dikategorikan spesifik perempuan, seperti kekerasan seksual maupun non-seksual, serta dampak kemiskinan pada perempuan. Pada intinya,

dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan perempuan merupakan suatu manifestasi dari suatu bentuk hubungan yang timpang antar jenis kelamin, kelas dan ras.

Sebenarnya, kesadaran akan persoalan yang dihadapi perempuan ini sudah ada sejak dekade 1970-an, ketika persoalan ketertinggalan perempuan mulai disadari dan program-program pengintegrasian perempuan mulai disebarluaskan. Muncul kritik terhadap asumsi dasar program tersebut yang menganggap bahwa ketertinggalan perempuan bukan berasal dari sistem, melainkan dari perempuan itu sendiri. Berkaitan dengan itu, kemudian muncul ide bahwa dalam melihat persoalan perempuan - yang akan dijadikan dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program untuk perempuan - diperlukan cara pandang baru yang lebih objektif dan terlepas dari nilai-nilai yang mengandung bias. Alternatif tersebut adalah penggunaan kerangka analisis gender, dan inilah yang juga menjadi tolok ukur dasar pijakan para organisasi perempuan bekerja pada era 1998 hingga sekarang.

Namun, tampaknya secara umum, masih juga ada yang belum menyadari dan memahami bahwa perempuan menghadapi persoalan yang *gender specific*, artinya persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau satu kelompok orang menyandang gender perempuan. Tidak saja di kalangan kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan sendiri masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran tersebut. Banyak indikator yang dapat menunjukkan keadaan kurang menyadari dalam pergaulan sehari-hari. Masih banyak yang tidak bisa mengerti mengapa persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi akibat

kentalnya penanaman nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan sudah kodratnya adalah pengendali urusan domestik menjadi nilai yang begitu dominan dalam masyarakat kita, sehingga pikiran-pikiran mengenai kesempatan beraktivitas di luar domain rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada. Jargon pembangunan tentang persamaan perlakuan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan justru menjadi penyumbang bagi ketidakmengertian orang terhadap ide dan gerakan yang memperjuangkan perbaikan posisi dan status perempuan. Ungkapan yang terlontar, baik oleh laki-laki maupun perempuan, tampak dalam berbagai forum ilmiah: selalu ada yang mempertanyakan mengenai diangkatnya topik permasalahan spesifik perempuan, dengan argumentasi bahwa kini kesempatan sudah sama untuk laki-laki dan perempuan, perempuan sudah banyak yang berpendidikan tinggi dan berkarir di luar rumah, dan sebagainya. Ini memberikan pertanda yang jelas bagaimana ketimpangan pengetahuan masyarakat mengenai persoalan perempuan itu masih berkuat dan merebak.

Terkait ide mengenai posisi perjuangan kelompok perempuan dan penampilan isu gender dalam konstelasi politik nasional, kerja organisasi perempuan memperlihatkan bagaimana persoalan perempuan di hadapan negara dipilah-pilah menjadi persoalan politik dan masalah perempuan. Melalui masalah-masalah kemiskinan, buruh migran dan masalah kekerasan seksual ditunjukkan pula bagaimana isu gender memudar ketika persoalan terangkat menjadi konsumsi publik. Organisasi perempuan ini mencoba menyoroati bagaimana kelompok perempuan

sebagai sebuah gerakan bereaksi terhadap kondisi persoalan semacam itu.

Tampaknya, apa yang sudah dimulai oleh organisasi perempuan di Jakarta masih perlu mengalami perjalanan yang panjang untuk terpenuhinya hak-hak perempuan secara utuh.***

Jejaring Organisasi Perempuan Membangun Gerakan di Lombok-NTB

Frisca Anindhita & Sita Aripurnami

Organisasi perempuan di Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak dalam kelompok sasaran yang berbeda-beda sesuai karakteristik dan isu yang dipilihnya, dalam upaya memberikan kontribusi bagi gerakan perempuan. Pilihan isu yang dijalankan organisasi tergantung pada situasi politik serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Kuatnya jaringan antar organisasi perempuan di NTB merupakan modal utama pendorong penegakan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam tulisan ini hal tersebut dibahas, bagaimana pemilihan isu dan kekuatan jaringan menentukan arah organisasi perempuan di NTB.

Gender Construction di Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah kerja berbagai organisasi non-pemerintah. Wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu wilayah pemberi sumbangan devisa terbesar kepada negara dengan adanya jumlah besar buruh migran perempuan, atau sebanyak 25.000 buruh migran perempuan yang ke Timur Tengah tiap tahun.¹ Dari data Bank Indonesia, jumlah *remittance* yang dihasilkan buruh migran perempuan asal NTB di seluruh negara

tujuan kerja sepanjang 2010 mencapai Rp195,68 milyar.² Tetapi, selama sekian lama, persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini juga menjadi pemberitaan media nasional.

Penggambaran kemiskinan di NTB tercermin pada Kabupaten Lombok Tengah. Daerah ini merupakan kabupaten dengan ranking *Human Development Index* (HDI) terendah dari semua kabupaten/kota di provinsi NTB, yaitu 338. Kabupaten ini juga memiliki ranking *Human Poverty Index* (HPI) kedua paling bawah dari semua kabupaten/kota di provinsi NTB, dengan angka 298.

¹ "Dewan Akan Surati Presiden", Lombok Pos, 6 Juli 2010 (www.lombokpos.co.id).

² *op.cit.*

Di luar gambaran umum tersebut, NTB adalah wilayah yang memiliki nilai-nilai budaya yang kental diwarnai ajaran Islam, yang diinterpretasikan secara seksis oleh penganutnya. Salah satu contoh dapat kita lihat pada fenomena pengambilan-keputusan dalam rumah tangga, yang berada di tangan suami. Ini merupakan perwujudan dari pemahaman dan interpretasi atas salah satu ayat dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka dengan demikian laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan yang harus mengelola rumah tangga. Seperti cuplikan wawancara berikut:

“...di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa laki-laki itu merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga...”³

Cuplikan wawancara tersebut menunjukkan bagaimana pemahaman gender kental dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, yang mengembangkan anggapan bahwa laki-laki bertanggungjawab mencari nafkah (atau bergerak di ranah publik) dan menjadi kewajiban perempuan untuk mengurus anak dan rumah tangga (atau berada di ranah domestik). Kalaupun perempuan bekerja, ia tetap harus bertanggungjawab atas urusan rumah tangga. Pemikiran ini meluas untuk merangkul pendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan muhrimnya. Interpretasi atas ayat-ayat Al-Quran seperti ini telah membatasi gerak-gerik perempuan di ruang publik.

Relasi antara perempuan dengan laki-laki dalam masyarakat NTB dapat dikategorikan sebagai hubungan yang tidak seimbang, dengan laki-laki menikmati posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ketimpangan gender tersebut terlihat dalam beberapa aspek kehidupan, antara lain dalam kehidupan pernikahan, di ranah pekerjaan dan dalam tatacara pewarisan keluarga.

“Kita sebagai perempuan dulu sering diremehkan, dilecehkan. Kita tidak pernah tahu hak perempuan; tidak pernah didengar oleh masyarakat....”⁴

Salah satu persoalan yang dihadapi perempuan di NTB adalah soal pernikahan pada usia dini, yang berujung pada perceraian di usia dini. Upacara pernikahan, yang seharusnya menjadi suatu peristiwa sakral dalam kehidupan seseorang, tidak demikian adanya bagi sebagian masyarakat desa di NTB. Secara umum, masyarakat NTB memiliki adat pernikahan yang dinamakan adat *Sorong Serah Aji Krama*. Dalam tatacara adat ini, sebelum acara *ijab kabul* pernikahan, keluarga perempuan terlebih dulu menentukan besar jumlah mahar yang harus diberikan oleh keluarga laki-laki. Apabila besarnya mahar bisa dipenuhi, maka keluarga perempuan akan ‘memberikan’ anak perempuan tersebut kepada mempelai laki-laki untuk dinikahkan. Sebaliknya, jika keluarga laki-laki tidak dapat memenuhi harga maharnya, keluarga perempuan tidak akan mengizinkan anak perempuannya dinikahi. Harga mahar seorang anak perempuan se-

³ Laporan Penelitian Perspektif, Pola Strategi dan Agenda Gender Organisasi Perempuan, Women Research Institute, Oktober 2005.

⁴ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan Kelompok Pekka, Mataram, 15 Mei 2012.

makin tinggi jika ia berasal dari keluarga ningrat.

“Perempuan yang *drop-out* dari sekolah di desa, dan di bawah umur, biasanya cepat sekali menikah. Ketika mereka menikah, mereka tidak siap mental, alat reproduksinya juga tidak siap”.⁵

Adat *Sorong Serah Aji Krama* tidak berlaku seragam di seluruh daerah NTB. Ada daerah yang masih memberlakukannya, ada juga yang tidak. Di sebagian pedesaan, adat tersebut tidak lagi secara utuh diberlakukan. Tujuan semula dari adat ini adalah untuk mengangkat nilai perempuan sebagai berharga. Dalam realita, di beberapa bagian NTB, pernikahan adalah masalah yang pelik, karena prosesnya begitu mudah dan nilai mahar untuk perempuan begitu rendah. Ada contoh di beberapa daerah di mana laki-laki cukup membayar mahar Rp50.000,- dan menyediakan beberapa gelas teh tawar serta kacang rebus untuk memperoleh istri. Pernikahan seperti itu hanya disaksikan oleh keluarga dan tetangga, dan dianggap sah dengan kedatangan penghulu yang melakukan upacara ijab kabul. Latar belakang dari merebaknya pernikahan seperti ini adalah kemiskinan, atau kehamilan di luar nikah.

Pernikahan yang begitu mudah dan murah, ditambah dengan tidak adanya kekuatan hukum pernikahan akibat ketiadaan surat nikah, berdampak buruk bagi perempuan di NTB. Kondisi perkawinan semacam ini membuat para lelaki mudah sekali memberlakukan perceraian. Karena ketika dinikahi

harga perempuan tersebut murah, disertai tidak adanya keterikatan hukum melalui surat nikah, maka sebagian perempuan dengan mudah dijatuhi talak cerai oleh suaminya. Masyarakat setempat juga memegang nilai tersendiri mengenai perceraian. Bagi masyarakat, laki-laki adalah pihak yang berhak untuk mengajukan talak. Apabila perempuan yang mengajukan perceraian, maka akan ada stigma buruk yang melekat padanya, karena masyarakat akan menganggapnya sebagai perempuan yang tidak patuh pada suami. Ini kondisi lingkaran tak berujung: apabila suami memberi talak cerai sang istri, ia tetap menyandang stigma buruk karena dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan suami. Stigma buruk yang melekat kepada perempuan yang janda adalah salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya keinginan perempuan untuk mengajukan talak cerai. Pandangan buruk terhadap janda, serta pandangan masyarakat bahwa hanya laki-laki semata yang berhak mentalak cerai, merupakan salah satu bukti adanya ketimpangan dalam relasi laki-laki dan perempuan di NTB.

“Tradisi di sini juga suka menceraikan istri; yang menjadi korban pun perempuan lagi”.⁶

Karena perceraian kerap tidak melalui proses persidangan hukum yang sah, yang terjadi bukan hanya pembagian harta *gono-gini* yang tidak adil, namun juga hak tanggung jawab perwalian anak yang juga tidak adil. Dalam penentuan harta gono-gini, keluarga laki-laki dan sang suami memiliki po-

⁵ Wawancara dengan Samsudin, Ka.Div. Pengorganisasian Basis Kerakyatan, Perkumpulan Panca Karsa, Mataram, 17 Mei 2012.

⁶ *Ibid.*

sisi tawar lebih tinggi. Demikian juga dalam penentuan hak perwalian anak. Ada kejadian di mana secara sepihak, keluarga suami atau sang suami sendiri mengambil anak tanpa izin sang istri, bahkan melarang terjadinya pertemuan antara sang ibu dengan anaknya. Ada pula kondisi dalam mana sang ayah menelantarkan anaknya. Banyak laki-laki yang menyerahkan si anak kepada ibunya, tetapi tidak memberikan nafkah untuk membesarkan anak-anak tersebut. Dengan demikian, perempuanlah yang memiliki tanggungjawab untuk membesarkan dan menghidupi anak-anak.

“Kalau menurut saya, terutama para buruh migran perempuan mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangganya; misalnya, suaminya kawin lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kadang-kadang ketika dia coba mengubah sesuatu, barangkali dia mendapat perlakuan kekerasan. Di Lombok, jika suami kawin lagi, atau sudah *bilang* cerai, walaupun tidak ada saksi, maka kita sudah cerai. Menurut negara *‘kan* harus ada surat cerai. Di sini perempuan sering merasa dirugikan, sehingga mereka harus mencari nafkah di luar negeri. Kalau sudah cerai, tidak ada nafkah, biasanya anaknya dibawa”.⁷

Penjelasan tentang kedudukan perempuan dalam pernikahan menggambarkan kuatnya budaya patriarki yang dianut masyarakat NTB. Patriarki yang melekat kental juga dapat dideteksi dari banyaknya tindak kekerasan suami terhadap istrinya. Terkait dengan perilaku kekerasan, pengamat meli-

hat bahwa sebagian masyarakat NTB gemar bermabuk-mabukan dan bermain judi dengan menyabung ayam, hal mana ditengarai merupakan beberapa faktor yang ikut mempengaruhi perilaku kekerasan suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga juga dilakukan orangtua terhadap anaknya.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri acap menjadi beban si istri seorang diri. Para perempuan jarang mengadukan kejadian kekerasan kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya sendiri. Keluarga perempuan secara garis besar bersikap diam apabila ada masalah dalam hubungan suami istri anak perempuan mereka, karena mereka merasa telah sepenuhnya menyerahkan anak putrinya kepada sang suami. Anak perempuan bahkan akan ditolak oleh keluarganya jika ia ingin kembali ke rumah keluarga, meskipun ia menjadi korban kekerasan sang suami. Keluarga perempuan baru akan menerima kembali putrinya apabila pasangan tersebut sudah bercerai.

Besarnya kebutuhan ekonomi para janda karena harus menanggung kehidupan keluarga tidak sejalan dengan kemampuan mereka untuk berusaha. Pembagian harta *gono-gini* yang tidak adil tentu berpengaruh pada ekonomi perempuan janda. Seringkali harta-benda yang dibeli selama perkawinan, yang merupakan hasil kerja perempuan, dianggap sebagai bagian dari *gono-gini* yang boleh diambilalih secara penuh menjadi milik si suami. Sebagian para janda cerai tidak dapat mengakses kembali harta yang ia himpun semasa pernikahannya. Hal ini menyebabkan kehidupan para janda, yang sebelum menikah sudah miskin, kian terjerebab di dalam kemiskinan.

⁷ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan Kelompok Panca Karsa, Mataram, 17 Mei 2012.

“Yang utama, mereka banyak tidak bekerja. Janda-janda itu adalah buruh. Di awal pertama saya turun ke sini, 98 persen mereka adalah buruh tani, buruh angkut, buruh kebun. Pada saat berke-luarga, mereka bekerja. Begitu bercerai, ya, mereka miskin kembali, karena di sini ada budaya, perempuan kalau berce-rai tidak mendapat harta apa-apa. Saya coba membawa kesadaran tentang eko-nomi kepada mereka, penyadaran atas hak harta bersama. Pada saat mereka menikah lagi, mereka tidak miskin kare-na sudah dibangun ekonominya. Tapi mereka menjadi miskin lagi”.⁸

Di samping itu, tantangan perempuan di dalam dunia kerja lebih berat dibanding-lan laki-laki. Dalam berbagai bidang peker-jaan, ternyata upah yang diberikan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk pe-kerjaan yang sama, laki-laki mendapat upah lebih tinggi. Sebagai contoh, upah bagi bu-ruh bangunan laki-laki dihargai Rp20.000,- sementara upah buruh bangunan perempu-an Rp15.000,- kendati mereka melakukan beban kerja untuk waktu kerja yang sama. Perbedaan upah tersebut menggambarkan himpitan beban yang dirasakan perempuan, yang kadang mempunyai tanggungan biaya hidup keluarga, tetapi penghasilannya ter-batas.

Selain terdapat perbedaan dalam standar upah, hal lain yang memberatkan perempu-an adalah tidak adanya kebijakan yang menjamin perempuan dapat memperoleh hak terkait reproduksinya. Walaupun di ting-kat nasional ada kebijakan yang menjamin

pembayaran upah buruh perempuan yang cuti menstruasi dan melahirkan, di tingkat lokal kebijakan tidak sepenuhnya mendu-kung itu.

“Kita banyak kasus buruh tembakau. Di Lombok ini banyak tembakau. Jika mi-salnya mereka menstruasi, atau habis melahirkan, atau mau melahirkan pun, mereka tidak digaji. Kalau tidak bekerja memang tidak dapat gaji. Bagaimana se-betulnya tanggungjawab pabrik? Kalau begitu, ini sebetulnya enak saja. Menge-nai soal perbedaan gaji, mereka memecat orang seenaknya saja, tergantung maji-kan. Dalam undang-undang tidak ter-cantum soal buruh informal, soal pem-bantu rumah tangga”.⁹

Ketimpangan hak perempuan dan laki-laki tampak pula dalam hal pembagian waris keluarga. Terdapat perbedaan hak yang sig-nifikan antara laki-laki dan perempuan. Ber-dasarkan adat mengenai warisan yang ber-kembang dalam masyarakat NTB, laki-laki mendapatkan satu bagian harta, sementara perempuan mendapatkan sepertiga warisan tersebut. Ada juga kasus di mana masyara-kat menerapkan sistem pembagian warisan berupa lahan kebun, sawah atau tambak yang hanya diberikan kepada kaum pria, se-mantara perempuan hanya memperoleh pembagian dari hasil panen lahan-lahan ter-sebut. Hal ini menunjukkan bahwa akses ekonomi perempuan sangat rendah, dan se-cara pasti di dalam itu, janda menjadi bagian yang juga dirugikan.

⁸ Wawancara dengan Sitti Zamraini, Koordinator Wila-yah Pekka NTB, Lingsar, 15 Mei 2012.

⁹ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur Eksekutif LBH APIK NTB, Mataram, 16 Mei 2012.

Latar Belakang Organisasi Perempuan Non-Pemerintah di NTB

Organisasi perempuan di NTB mulai bermunculan pada akhir 1980-an, didorong keinginan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan di daerah ini. Pada 1989, masih terang dalam ingatan para narasumber bahwa di Mataram diselenggarakan seminar “Perempuan Saksak”. Seminar ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan di NTB, dan mendorong lahirnya organisasi-organisasi perempuan, antara lain Yayasan Panca Karsa, dan program studi wanita di perguruan tinggi di Mataram.

Isu-isu yang ditangani oleh organisasi-organisasi perempuan di NTB adalah yang berkaitan dengan pendampingan ekonomi dan urusan simpan-pinjam. Hal ini berkait dengan situasi kemiskinan di NTB yang menempatkan perempuan pada posisi dirugikan.

Yayasan Panca Karsa (YPK), Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) adalah organisasi perempuan di NTB yang banyak melakukan program pendampingan bagi perempuan. YPK memulai aktivitasnya pada 1988 dan disahkan secara formal dengan akta notaris pada 1989. Organisasi ini banyak melakukan pendampingan terhadap mantan buruh migran perempuan dan keluarga buruh migran.

Pekka merupakan organisasi cabang dari Pekka di Jakarta. Pekka NTB mulai melakukan aktivitas pada 2003. Pada 2010, Pekka NTB memiliki *center*, tempat atau rumah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan membuat program simpan-

pinjam bagi para janda, yang *nota bene* adalah kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga, terutama yang berstatus janda, seringkali menghadapi tantangan yang sangat berat dari masyarakat, mereka dianggap tidak ada dan tidak memiliki hak suara. Status sosial mereka pun dipandang negatif akibat penstereotipan atas janda yang ada dalam masyarakat. Lagipula, para perempuan ini sering menerima kekerasan dan ancaman. Karena alasan-alasan ini, Pekka berkeinginan memperjuangkan hak mereka sebagai manusia yang setara.

Sementara itu, ASPPUK berdiri pada 2000 sebagai respons terhadap persoalan kemiskinan yang dihadapi perempuan. Mereka melakukan pendampingan ekonomi dan membangun usaha simpan-pinjam untuk para perempuan yang melakukan kegiatan usaha kecil.

“ASPPUK bentuk organisasi awalnya adalah forum LSM yang berfokus pada Perempuan Usaha Kecil (PUK), tapi kemudian mengkristal pada 1997 menjadi YASPPUK. Karena bentuk yayasan dirasakan kurang demokratis, akhirnya berubah menjadi ASPPUK. Ada Forum Nasional yang merupakan forum tertinggi, dan di wilayah namanya Forum Wilayah. Yang mengkoordinasikan di pusat namanya Seknas, dan di wilayah bernama Sekwil”.¹⁰

Dalam perjalanannya, YPK berpikir untuk mengadvokasi bagi buruh migran perempuan yang banyak mengalami kekerasan. Pilihan isu atau program ini berdasarkan

¹⁰ Wawancara dengan M. Firdaus, Deputi Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK, Jakarta, 27 April 2012.

kejadian yang diamati langsung. Sementara itu, menurut undang-undang, sebuah organisasi berbentuk yayasan dilarang melakukan advokasi. Maka pada 2002, YPK berubah dari Yayasan menjadi Perkumpulan supaya dapat melakukan kegiatan advokasi kasus-kasus buruh migran perempuan. Namanya berubah menjadi Perkumpulan Panca Karsa atau PPK.

“Banyak teman yang rumahnya di Lombok Timur dan Lombok Utara, memiliki anggota keluarga yang mengalami kasus. Dari situlah, dari cerita-cerita di koran-koran, kami bergerak. Tapi isu ekonomi tidak kita tinggalkan. Dalam advokasi untuk buruh migran itu ada pengorganisasian, ekonomi kerakyatan, dan advokasi kebijakan”.¹¹

Bagi PPK, dengan melakukan pendampingan ekonomi dan program simpan-pinjam, mereka dapat membantu perempuan untuk lebih berdaya secara ekonomi. Dengan berdaya secara ekonomi, maka perempuan dapat bertahan, dan akhirnya dapat pula mulai melihat hal-hal lain dalam hidupnya. PPK lalu memperkenalkan pembahasan-pembahasan mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya memperjuangkan hak individu sebagai perempuan. Kini para perempuan mantan buruh migran dan keluarganya sudah mampu melakukan *lobby* kepada pihak pengambil-keputusan dan mengorganisasikan diri untuk membuat demonstrasi menyuarakan kasus-kasus pelanggaran hak-hak buruh migran perempuan.

“Kami melakukan *bearing* ke anggota DPR, tentang Perlindungan TKI, bagaimana agar dewan pro-aktif mengenai kasus; mungkin dengan meningkatkan anggaran untuk bantu mereka melakukan advokasi; bagaimana agar Dewan peka terhadap urusan buruh migran”.¹²

Selain PPK, organisasi perempuan di NTB yang bekerja untuk isu buruh migran adalah Solidaritas Perempuan (SP). SP menyebut dirinya sebagai komunitas. Mereka berdiri pada 2001 dan bekerja untuk melakukan advokasi untuk pelanggaran hak-hak buruh migran perempuan. SP aktif bergerak dalam upaya penyadaran hak-hak perempuan dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk melakukan analisis feminis atas permasalahan-permasalahan sosial yang berdampak bagi perempuan. SP percaya bahwa dengan melakukan pendidikan — yang mereka sebut sebagai pendidikan feminis — mereka akan mampu membuat banyak perempuan, terutama para anggotanya, diperkuat kapasitasnya. Dengan demikian, perempuan lalu akan lebih mampu mendapat akses kepada proses pembuatan keputusan guna mencapai hak-haknya.

“Inti utama fokus SP adalah bagaimana perempuan bisa menemukan potensinya, dan mereka bisa berdaya. Jadi kita ingin dorong bagaimana perempuan bisa membangun dan memberdayakan dirinya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan”.¹³

¹¹ Wawancara dengan Endang, Ka.Div. Advokasi Kebijakan, Perkumpulan Panca Karsa, Mataram, 17 Mei 2012.

¹² Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan Kelompok Panca Karsa, Mataram, 17 Mei 2012.

¹³ Wawancara dengan Yuni Riawati, Anggota Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan, Mataram, 18 Mei 2012.

“Kalau di perempuan dan pangan, mereka sudah punya inisiatif sendiri untuk membuat kelompok berdiskusi. Kita hanya menjadi pendamping, setelah mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan feminisme. Sekarang teman-teman sedang advokasi tentang *awik-awik* tata ruang desa; *awik-awik* itu sejenis perdes, kearifan lokal”.¹⁴

Beranjak dari kenyataan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak buruh migran, organisasi-organisasi perempuan di NTB juga menyadari pentingnya untuk bekerja merespons kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini berkaitan erat pula dengan munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Organisasi-organisasi tersebut melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menyikapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan melakukan pendampingan kasus-kasus kekerasan yang dihadapi para anggota kelompok-kelompok dampingannya. Dengan demikian, upaya mereka tidak hanya berhenti pada melakukan pendampingan ekonomi dan program simpan-pinjam, tapi juga memperkuat kemampuan kelompok dampingannya untuk mengorganisasikan diri melakukan *lobby* dan advokasi atas kasus-kasus pelanggaran hak mereka sebagai perempuan.

“Kalau untuk menjawab semuanya, masih belum. Kita butuh jalan yang panjang untuk itu. Paling tidak, sejauh ini pendampingan salah satu cara kaderisasi anggota. Menurut saya, sudah tercapai

banyak, karena kita melakukan pendidikan. Jika mereka migrasi, mereka sudah bisa mengadvokasi masalahnya sendiri, karena sudah diberikan pendidikan. Jadi memang fokus kita adalah pendidikan politik perempuan, dan jalan masuknya adalah dengan program-program yang kita buat”.¹⁵

Dalam hal ini, para organisasi perempuan di NTB bekerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam pendampingan hukum, dan menghadirkan akses keadilan bagi perempuan, yaitu dengan LBH APIK. Meski baru berdiri secara formal pada 2010, lembaga ini sudah aktif bekerja dan mendukung kegiatan organisasi-organisasi perempuan lainnya sejak 1998. LBH APIK memberikan pelayanan edukasi terkait hak asasi dan gender, serta melakukan kajian gender terhadap agama Islam sebagai agama mayoritas di NTB. LBH APIK juga mencoba mengidentifikasi para pemuka agama, yang kerap disebut sebagai Tuan Guru, yang terbuka pada pemikiran perspektif gender. Posisi Tuan Guru dipandang sangat strategis untuk membantu upaya penegakan hak-hak perempuan. Hal ini karena konteks budaya di NTB yang sangat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai interpretasi ajaran agama Islam. Oleh masyarakat, Tuan Guru adalah pihak yang dirujuk dan dianggap paling memahami ayat, serta adalah pemegang kebenaran. LBH APIK melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para Tuan Guru, dalam upaya mereka memperoleh pemahaman tentang hak-hak perempuan. Dengan pemahaman ini, para Tuan Guru dapat me-

¹⁴ Wawancara dengan Baiq Zulhiatina, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan, Mataram, 15 Mei 2012.

¹⁵ *Ibid.*

nunjukkan bahwa nilai-nilai yang selama ini berlaku di masyarakat telah sangat merugikan kaum perempuan.

“Ada empat divisi bantuan hukum: bantuan hukum terhadap perempuan dan anak, menyangkut KDRT, *trafficking* dan buruh migran, dan kesehatan terhadap perempuan lainnya. Kedua, sebetulnya ada divisi kajian Gender dan Islam. Ini agak sensitif, dan akhirnya berubah nama menjadi Divisi Pendidikan, tetapi ada unsur gender dan Islam. Gender dan Islam ruhnya itu adalah bagaimana kita melatih tokoh agama sehingga mereka menjadi paralegal kita. Kini sudah ratusan orang, dan kita sudah punya *network* dengan 36 pondok pesantren di Lombok. Dalam kaitannya dengan divisi kajian Gender dan Islam, kita misalnya membuat buku untuk mereka, para tokoh agama, ustadz maupun Tuan Guru itu, 27 orang. Selama satu tahun menggodok, bagaimana perempuan, tentang sunat perempuan, soal poligami; Tapi yang jelas, ustadz-ustadznnya kini sudah sensitif gender, dan bukunya dijadikan bahan kurikulum pada UIN Mataram”.¹⁶

Sementara itu, Yayasan Kesehatan Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI), yang berdiri pada 1989 bekerja pada upaya kesehatan untuk ibu dan anak, dengan tujuan mencapai keadilan gender. Organisasi ini bekerja untuk beragam isu. Salah satu contoh upaya mereka adalah melakukan pendampingan bagi perempuan yang punya anak di luar nikah, untuk mendapatkan akta lahir dengan

menggunakan nama ibunya. Dari sisi peraturan, hal ini dimungkinkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Pasal 4. Namun, nilai-nilai yang berlaku, yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang diuntungkan, ditambah kurangnya informasi serta pengetahuan para pengambil keputusan NTB, sering muncul masalah ketika anak dengan status di luar nikah akan masuk sekolah. Banyak sekolah mensyaratkan adanya akta lahir saat pendaftaran. Sementara itu, berdasarkan peraturan lama, anak yang lahir di luar nikah akan disebutkan di dalam akta sebagai terlahir di luar nikah. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mengurus akta lahir jika memang demikian kondisi anaknya. Dalam peraturan baru, anak dapat disebutkan sebagai anak yang terlahir dari seorang ibu saja. YKSSI banyak membantu perempuan dan anak dalam situasi ini. Organisasi ini juga berjejaring dengan organisasi-organisasi perempuan lain di NTB untuk mensosialisasikan isu-isu kesehatan reproduksi, dan mengadvokasi mengenai pentingnya mengakses layanan kesehatan reproduksi demi tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu di NTB.

Pemetaan Organisasi Perempuan Nusa Tenggara Barat Menurut Visi dan Misinya

Secara umum, dapat disebutkan bahwa visi organisasi-organisasi perempuan yang ada mengacu pada hal yang sama. Yaitu, berkegiatan untuk memberdayakan perempuan dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat.

¹⁶ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur Eksekutif LBH APIK NTB, Mataram, 16 Mei 2012.

Secara spesifik, organisasi-organisasi ini menerjemahkan visi melalui misinya yang diwujudkan dalam berbagai cara. Perwujudan misi organisasi-organisasi perempuan ini dapat dilihat melalui pengelompokan fokus kegiatan sebagai berikut:

A. Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi

Organisasi yang bergerak di isu pemberdayaan ekonomi adalah Pekka, ASPPUK, PPK. Adapun alasan dari pemilihan isu ini adalah kondisi ekonomi perempuan yang buruk yang menimbulkan berbagai masalah, misalnya sulitnya mendapatkan hak atas kepemilikan tanah, sulitnya menjangkau akses publik seperti sarana pendidikan, kesehatan, karena keterbatasan ekonomi. Perempuan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban dalam situasi demikian. Karenanya, isu pemberdayaan ekonomi penting untuk ditangani, sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan agar kelak dapat menjangkau fasilitas publik, dan akhirnya dapat mengubah posisinya di masyarakat. PPK, Pekka dan ASPPUK merupakan organisasi yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dengan menyelenggarakan kegiatan simpan-pinjam.

Kesamaan dari ketiga organisasi ini adalah pada cara mereka mengelompokkan perempuan dalam kelompok-kelompok simpan-pinjam. Kelompok-kelompok perempuan ini didampingi agar mampu mengakses modal atau kapital, untuk mereka melakukan usaha kredit mikro. Usaha ini dapat menambah kepercayaan diri mereka, karena mereka dapat menghidupi diri dan keluarganya. Melalui kegiatan simpan-pinjam, para

perempuan juga disosialisasikan dengan pengetahuan mengenai hak-hak perempuan terkait kesehatan reproduksi, hukum dan keadilan, kekerasan terhadap perempuan dan sekaligus memiliki perspektif gender.

Kelompok perempuan yang disasar untuk bekerjasama berbeda-beda. PPK bekerja untuk perempuan buruh migran dan keluarganya; Pekka bekerja untuk perempuan kepala keluarga; dan ASPPUK bekerja untuk perempuan pengusaha kecil.

“Kegiatan yang kita ikuti dari segi hukum, mendata masyarakat yang belum punya buku nikah, mendampingi korban, memberikan pemahaman mengenai kebutuhan mendapatkan surat cerai, buku nikah dan surat nikah,... bagaimana mendapatkan harta gono gini”.¹⁷

B. Fokus pada Kekekerasan Terhadap Perempuan dan Keadilan Gender (Bantuan Hukum)

PPK, LBH APIK dan Solidaritas Perempuan. Ketiga organisasi ini memiliki kesamaan dalam upaya mereka menghadirkan keadilan gender bagi perempuan, baik melalui kegiatan advokasi maupun peningkatan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan penyadaran akan hak-hak perempuan. LBH APIK berkeinginan mengubah pola pikir sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat, agar tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan berperspektif gender.

Solidaritas Perempuan melakukan advokasi untuk melindungi dan memperkuat

¹⁷ Catatan FGD Penelitian Feminist Leadership Pasca Negara Otoritarian Indonesia dengan Kelompok Pekka, Mataram, 15 Mei 2012.

posisi tawar buruh migran dan keluarganya terhadap pihak pengambil-keputusan. Advokasi tersebut dilakukan dengan tujuan membangun kerangka perlindungan dan pemberdayaan buruh migran Indonesia, dan penguatan hak-hak buruh dengan mendorong terbentuknya organisasi serikat buruh migran dan keluarganya. Sedangkan PPK bekerja untuk mengadvokasikan dan memberikan pendampingan pada kasus-kasus yang dialami oleh perempuan buruh migran.

“Untuk memajukan perempuan, kita tidak hanya melakukan pendekatan ke perempuannya saja, tetapi juga laki-laki. Oleh karena itu, kita pernah melakukan *training* bagi pasangan suami-istri; kita mengundang kedua-duanya. Mengapa? Karena kalau hanya istri saja yang kita bangun kesadarannya, dia sadar tapi suaminya tidak sadar, maka akan sama saja. Tapi kalau kedua-duanya didekati, kedua-duanya terbangun kesadaran, dan mereka akan sama-sama mengerti. Pendekatan-pendekatan seperti itulah yang saat ini kita lakukan”.¹⁸

Kondisi berkegiatan semakin kondusif pasca Orde Baru, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003. Ada kecenderungan perubahan dan bahkan penambahan fokus pada penanganan isu di kalangan organisasi perempuan, yang sebelumnya tidak secara spesifik bergerak di isu tersebut. Contohnya, misalnya Solidaritas Perempuan dan PPK. Dalam upaya penanganan isu kekerasan terhadap perempuan, masing-masing organisasi memiliki program

tersendiri sesuai dengan apa yang menjadi fokus kerja organisasi. Pekka, misalnya, lebih menekankan pembentukan wacana kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya upaya penghapusan kekerasan melalui pelatihan anggota yang hidup dalam kemiskinan di daerah pedesaan. Solidaritas Perempuan dan PPK fokus pada buruh migran yang menjadi korban kekerasan seksual dan menjalankan proses peradilan. Adapun LBH APIK memfokuskan perhatiannya pada kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak secara umum.

Dalam melakukan kegiatan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan bantuan hukum, hal yang juga dilakukan adalah kegiatan mendorong terciptanya perubahan wacana. Wacana pendidikan yang dibangun adalah konsep yang berpihak kepada perempuan, termasuk di dalamnya pendidikan politik, pemahaman tentang kesetaraan gender, maupun perubahan pola pikir perempuan agar lebih kritis dan sadar tentang hak-haknya sebagai manusia yang dilindungi oleh negara, setara dengan kaum pria. Organisasi perempuan berharap para perempuan akan mampu memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan terlibat dalam proses pengambilan-keputusan di segala tingkatan di dalam masyarakat.

Pemilihan isu perempuan dan hukum berangkat dari kenyataan masih banyak peraturan hukum dan perundangan yang tidak berpihak kepada perempuan. Organisasi yang bergerak di isu ini adalah LBH APIK.

“Kami upayakan *gender mainstreaming* dalam kurikulum di Fakultas Hukum. Kami membuat seminar dan lokakarya

¹⁸ Wawancara dengan Samsudin, Ka.Div. Pengorganisasian Basis Kerakyatan, Perkumpulan Panca Karsa, Mataram, 17 Mei 2012.

yang *output*-nya kami harapkan adalah mata kuliah Wanita dan Hukum, atau Gender dan Hukum di Fakultas Hukum. Dosen-dosen itu sedapat mungkin mengintegrasikan instrumen-instrumen hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan di dalam kuliahnya, seperti Hukum Perburuan, Hukum Pidana, Hukum Perkawinan..”¹⁹

Organisasi yang bergerak di isu ini antara lain Solidaritas Perempuan, ASPPUK, Pekka, (yang tidak hanya memberdayakan ekonomi perempuan, tetapi juga memberikan pendidikan politik guna perempuan sadar akan hak-haknya), dan Perkumpulan Panca Karsa serta LBH APIK.

Ada pula beberapa organisasi yang dengan sadar melihat dan menelaah adanya pengaruh dari nilai-nilai globalisasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga merusak pola pikir masyarakat menjadi lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya sendiri. Di sisi lain, fokus juga ada pada penguatan lokalisme dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mensubordinasi perempuan dan mereduksinya menjadi simbol identitas daerah melalui peraturan. Hal ini banyak merugikan perempuan.

Lebih lanjut, narasumber dari LBH APIK menengarai perlunya pemahaman gender yang lebih adil dan setara, serta pemahaman yang utuh tentang kebutuhan solusi permasalahan dalam masyarakat, supaya tidak muncul bias-bias pemikiran yang bersifat negatif dalam mempengaruhi pemilihan agenda gender organisasi perempuan.

“Banyak persoalan yang terjadi. Secara umum itu karena belum adanya penghormatan terhadap hak asasi perempuan, dan berdampak pada banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena itu LBH APIK mendasarkan diri pada gerakan melakukan bantuan hukum bagi masyarakat perempuan yang selama ini dimarginalkan”.²⁰

Organisasi Solidaritas Perempuan menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan. Dalam hal ini, politik tidak hanya diartikan sebagai politik formal, namun juga secara luas mencakup kemampuan perempuan untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya.

“...Memberi informasi kepada perempuan mengenai masalah perempuan saat ini, apa yang menjadi masalah perempuan sekarang. Seperti harga-harga mahal, anak tidak bisa sekolah; itu terkait dengan sebuah keputusan nasional, politik, keputusan politik nasional dan global, dan karena itu mereka mesti tahu dan mesti melawan. Kita bikin seri diskusi-diskusi kampus. Saat ini kami sedang kampanye *anti-poverty*, judul kampanyenya “Stop Kemiskinan Perempuan”, tapi inti dari pekerjaan itu adalah, bikin diskusi-diskusi kampung di mana para perempuan diajak berdiskusi untuk melihat keterkaitan masalahnya dengan sebuah kebijakan politik global dan nasional, dan bersama-sama melakukan kontrol terhadap para pengambil-kebijakan publik, untuk melawannya. Misalnya, kalau di tingkat lokal seperti ini, de-

¹⁹ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur Eksekutif LBH APIK NTB, Mataram, 16 Mei 2012.

²⁰ Wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur Eksekutif LBH APIK NTB, Mataram, 16 Mei 2012.

ngan mereka sadar, ternyata masalahnya seperti itu...”²¹

C. Fokus pada Kesehatan Perempuan dan Anak

YKSSI adalah organisasi yang fokus pada kesehatan perempuan dan anak, bekerja dengan tujuan untuk mencapai keadilan gender. YKSSI memilih fokus kesehatan reproduksi perempuan dengan pertimbangan perempuan sebagai pihak yang potensial mengalami masalah kesehatan karena peran reproduksi dan beban tanggungjawab yang besar dalam keluarga.

Di sisi lain, kemiskinan dan keterbatasan pengetahuan perempuan membuat perempuan sulit mengakses fasilitas kesehatan, dan mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tubuhnya, apalagi kesehatan reproduksinya. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, di antaranya adalah gizi ibu hamil yang buruk, Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi, serta aborsi yang tidak aman, yang juga menyumbang terhadap peningkatan AKI.

Bahaya HIV dan AIDS juga seringkali belum dipahami dengan benar oleh kaum perempuan, terutama mereka yang berisiko tinggi, seperti perempuan pekerja seks dan buruh migran, sehingga mereka dengan berbagai keterbatasannya sulit mendapatkan pertolongan dari tenaga medis secara memadai. Karenanya, YKSSI memilih fokus sasarannya perempuan remaja dan dewasa, terutama perempuan yang miskin dan ter-

marginalkan. Organisasi ini banyak bekerja untuk sosialisasi isu kesehatan reproduksi, dan melakukan advokasi pentingnya perempuan mendapatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengurangi AKI di NTB. YKSSI juga aktif bekerja agar perempuan dan anak terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Misalnya, untuk memperoleh akta nikah atau akta lahir anak.

Pengorganisasian Perempuan

Perencanaan adalah bagian yang terpenting dalam sebuah organisasi. Termasuk dalam bagian perencanaan adalah pemilihan isu, penetapan program organisasi, dan perencanaan pendanaan kegiatan, yang tentunya disesuaikan dengan misi dan visi organisasi. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk membuat perencanaan yang tepat, antara lain dengan menyusun *strategic planning*. *Strategic plan* adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, baik itu untuk merumuskan perubahan visi dan misi, isu yang diseleksi, struktur organisasi, program mau pun strategi organisasi dalam berkegiatan.

Proses Pemilihan Isu

Proses pemilihan isu sebuah organisasi bukan hal yang sederhana. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keputusan pemilihan isu gender, antara lain situasi politik, sebagaimana sudah dipaparkan. Kehadiran lembaga donor yang dapat membiayai sebuah program juga berpengaruh. Organisasi seperti Pekka lahir guna merespons kebutuhan Komnas Perempuan dan lembaga donor asing, yang ingin memperoleh informasi dan

²¹ Wawancara dengan Yuni Riawati, Anggota Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan, Mataram, 18 Mei 2012

dokumentasi tentang kondisi janda di daerah-daerah konflik. Dalam perkembangannya, Pekka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dokumentasi, namun juga dapat bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan kepala keluarga di bidang ekonomi maupun peningkatan pemahaman gender.

Adapun proses penetapan isu dan agenda gender dalam sebuah organisasi dapat dilakukan melalui musyawarah nasional yang dihadiri oleh perwakilan organisasi di daerah. Selanjutnya, secara bersama mereka mengidentifikasi permasalahan yang paling aktual yang terjadi di daerahnya. Kemudian mereka seleksi isu berdasarkan skala prioritas dan kebijaksanaan organisasi yang bersangkutan. Penetapan isu juga dipengaruhi oleh sumber pendanaan organisasi, baik itu berasal dari pusat atau dari lembaga donor.

“Persoalan-persoalan yang timbul di lokal itulah yang kemudian yang sama yang dijadikan kampanye di tingkat nasional. Dan lalu kita bergabung mencari mitra di tingkat internasional untuk bekerja bersama dalam isu-isu tertentu”.²²

“Alasan mengapa ada program-program itu, pertama karena sesuai dengan konteks lokal. Kedua, kita juga melihat kemampuan SDM kita. Ketiga, karena hal itu bisa disetujui dan dibiayai oleh nasional”.²³

Perubahan Isu

Di dalam perjalanannya, tidak jarang suatu organisasi mengalami perubahan dalam pemilihan isu yang diperjuangkannya. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh situasi dan kondisi politik-budaya, juga permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan, perubahan situasi ekonomi pada akhir 1990-an, yang memperburuk kondisi kerja di NTB, memicu terjadinya peningkatan jumlah perempuan yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri. Ini telah mempengaruhi beberapa organisasi untuk memasukkan advokasi dan isu kekerasan terhadap perempuan di dalam agendanya, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran hak sebagai buruh migran yang perempuan. Sebetulnya, situasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu), dalam mana keterwakilan perempuan sangat rendah menjadi masalah yang serius di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di NTB.

Sebagai contoh, beberapa aktivis perempuan di NTB yang bergabung dalam Solidaritas Perempuan di tingkat nasional, yang mulai resah terkait dengan munculnya berbagai persoalan yang menimpa kaum perempuan buruh migran dan perempuan lain, secara umum. Berangkat dari komitmen untuk membangun gerakan perempuan di daerah, maka para anggota Solidaritas Perempuan di NTB bersepakat untuk membentuk komunitas daerah, yang kemudian dinamakan Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram. SP Mataram dibentuk pada 6 Desember 2000, dan dikukuhkan dalam Kongres Nasional SP ke-3, yang dilaksanakan pada 23-28 Juni 2001, di Mataram, NTB.

²² Wawancara dengan Yuni Riawati, Anggota Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan, Mataram, 18 Mei 2012.

²³ Wawancara dengan Baiq Zulhiatina, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan, Mataram, 15 Mei 2012.

“Awalnya, ketika SP berdiri, itu hanya diberi mandat oleh anggotanya untuk melakukan advokasi bagi buruh migran saja, terutama dari tahun 1995. Lalu pada 1998, itu ditambah dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Pada 2001, kita mulai melihat isu-isu globalisasi sebagai salah satu musuh utama perempuan. Sekarang kami melihat musuh perempuan itu ada lima: Pertama, pasti patriarki; kedua, globalisasi dengan seluruh turunannya; ketiga, militerisme; keempat, fundamentalisme; dan yang kelima, otoriterisme. Itu sebetulnya musuh utama perempuan, yang dianalisis SP”.²⁴

YKSSI, yang awalnya mengusung program kesehatan bagi sebuah lembaga dana, berkembang menjadi sebuah organisasi yang bekerja untuk kesehatan ibu dan anak. Dalam perkembangannya, YKSSI tidak lagi hanya bekerja untuk masalah kesehatan ibu dan anak. Organisasi itu mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan perempuan yang menjadi orang tua tunggal untuk mengurus akta lahir anak-anaknya supaya dapat menggunakan nama ibu, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Pasal 4. Saat ini, YKSSI berjejaring dengan organisasi-organisasi perempuan di Lombok dan NTB untuk mensosialisasikan isu-isu kesehatan reproduksi, serta mengadvokasi mengenai pentingnya mengakses layanan kesehatan reproduksi guna menurunkan AKI di Lombok dan NTB. YKSSI juga turut memperjuangkan akses perempuan terhadap pemanfaatan modal usaha ekonomi mikro, dengan berga-

bung di dalam ASPPUK wilayah Nusa Tenggara.

“YKSSI itu berdiri pada 1989, dengan bantuan dari USAID Jakarta, dalam sub-kontrak PATH di bawah program Strengthening Institutional Development (SID) di Nusa Tenggara. Program ini didasarkan pada lembaga-lembaga yang fokus pada kesehatan perempuan. Oleh karena itu terbentuklah YKSSI di Lombok. PKBI sebenarnya bisa menjadi target, tapi kelembagaannya di bawah BKKBN. Badan pendiri YKSSI ada tiga orang, yaitu Latifa, dr. Didi Sumarsidi dan Karim Sahidu. PATH bersama YKSSI bekerja sebagai mitra lokal dan *lead agency* dalam menjalankan beberapa proyek yang didanai USAID tersebut, seperti survei, sub-kontrak *funder* lokal terhadap LSM lokal”.²⁵

Dalam perkembangannya, YKSSI melebarkan isu kerjanya, walau tetap dikaitkan dengan kesehatan. Mengandalkan isu kesehatan sebagai pintu masuk itu telah menyingkapkan berbagai permasalahan. YKSSI mencoba merespons kebutuhan lain yang muncul di masyarakat, misalnya isu-isu seperti sumber daya alam, mitigasi bencana, pendidikan, perekonomian dan ketahanan pangan.

“YKSSI dulu pernah melakukan survei kesehatan pada 2003, pada waktu itu bekerjasama dengan World Neighbour (WN). Lalu ternyata muncul masalah-masalah kesehatan lain, yaitu adanya kasus gizi buruk, terutama di desa yang berbatasan langsung dengan hutan lin-

²⁴ Wawancara dengan Yuni Riawati, Anggota Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan, Mataram, 18 Mei 2012.

²⁵ Wawancara dengan Latifa Bay Westhoff, Direktur Eksekutif YKSSI, Mataram, 15 Mei 2012.

dung taman nasional, khususnya di Desa Lantan; tidak tersedia petugas kesehatan yang cukup di desa-desa; minimnya kader kesehatan di posyandu di dusundusun. Kemudian WN memberikan kepercayaan kepada YKSSI untuk memberikan pendampingan selama 2004-2005. Selama pendampingan itu, Desa Lantan khususnya telah menghasilkan Renstrades dalam jangka waktu lima tahun, yang mencakup berbagai permasalahan perempuan, yaitu di bidang pertanian, infrastruktur, perikanan, kesehatan, dan pendidikan”.²⁶

Penutup

Pemetaan dan uraian yang telah dipaparkan memberikan kesimpulan bahwa organisasi perempuan yang berada di NTB bergerak di beberapa isu, antara lain Kekerasan Terhadap Perempuan (termasuk KDRT), Buruh Migran, Membangun Kesadaran Politik, mendorong pemahaman tentang pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan serta Penegakan Hukum yang lebih adil, atau Hukum Berperspektif Perempuan.

Secara umum, visi dan misi para organisasi memberikan gambaran adanya kemauan kuat dari sebagian besar organisasi perempuan untuk mengupayakan penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan gender, serta menciptakan relasi kuasa yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berda-

sarkan karakteristiknya, organisasi perempuan yang ada di NTB tergolong sebagai Ornop, dalam bentuk Yayasan atau Perkumpulan, dan mereka bergerak dalam kelompok sasaran yang berbeda-beda sesuai karakteristik dan isu yang dipilihnya, dalam upaya memberikan kontribusi bagi gerakan perempuan.

Situasi politik serta kondisi sosial dan budaya masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pilihan isu yang dijalankan organisasi perempuan. Namun, tak dapat dipungkiri, peranan donor, yang menjadi penyedia dana, juga menjadi bagian dari pertimbangan organisasi perempuan dalam menetapkan isu.

Harus diakui, ada berbagai keterbatasan dan kendala untuk memperjuangkan isu yang dipilih organisasi, antara lain keterbatasan dana, keterbatasan SDM dan kemampuan pengelolaannya. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya sensitivitas organisasi dalam merespons permasalahan setempat, keterbatasan SDM mereka, dan juga posisi organisasi yang *donor-driven*, yang mempengaruhi organisasi perempuan dalam menentukan wilayah kerja serta sasaran programnya. Karena hal-hal ini, perlu dipikirkan cara-cara serta strategi tertentu demi mereka dapat mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan tersebut. Di antara berbagai cara yang sudah ditempuh oleh organisasi perempuan adalah cara mereka menjalin kerjasama, dan berjejaring erat dengan organisasi-organisasi lain.***

²⁶ Wawancara dengan Kardaeni, Koordinator Petugas Lapangan YKSSI, Mataram, 16 Mei 2012.

Jelajah Gerakan Perempuan untuk Demokrasi di Indonesia

Sita Aripurnami

“Tradisi lama, yang tidak dapat diruntuhkan dengan mudah, memenjara kita dalam tangan-tangannya yang kokoh. Suatu hari, memang benar, tangan-tangan itu harus melepaskan kita tetapi hari ini masih jauh, sangat jauh! Bahwa hari itu akan tiba, aku yakin, tetapi hanya setelah tiga atau empat generasi setelahku”

Pada 25 Mei 1899,¹ Kartini menuliskan keprihatinannya atas persoalan yang membelit kaum perempuan di seputar kehidupannya kepada Stella Zeehandelaar. Lebih lanjut, Kartini menyebutkan bahwa belenggu adat dan kebiasaan masyarakat serta hukum yang membuat dirinya dan banyak perempuan di Indonesia (pada saat itu di Jepara, Jawa) tidak mampu lari dari persoalan yang dihadapinya. Persoalan perempuan yang dihadapi rupanya terus berlanjut, menjadi perhatian dan dasar gerak kelom-

pok serta organisasi perempuan di banyak wilayah di Indonesia. Inilah yang kemudian mendorong mereka untuk berhimpun dalam sebuah Kongres Perempuan yang pertama diadakan pada 22 Desember 1928. Pada tahun 1928 itu para anggota kelompok dan organisasi perempuan mengidentifikasi bahwa persoalan yang dialami oleh perempuan adalah seputar perkawinan dan keluarga, dalam hal ini poligami serta pendidikan bagi kaum perempuan. Sekalipun 29 tahun berselang dari apa yang diungkapkan Kartini, persoalan perempuan yang dibahas pada tahun 1928 itu tidak banyak berbeda dengan persoalan perempuan yang diidentifikasi Kartini. Adalah menarik untuk menca-

² Lihat hal. 2, “Aku Mau...Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903”, Vissia Ita Yulianto, Penerbit Buku Kompas, April 2004.

tat teropong dan kajian yang dilakukan dan dipublikasikan beberapa puluh tahun kemudian, bahkan lebih dari seabad kemudian oleh banyak akademisi mancanegara mengenai gerak dan kerja kelompok serta organisasi perempuan di Indonesia. Sebut saja, Cora Vreede-de Stuers (1960),² Saskia Eleonora Wieringa (1994),³ Susan Blackburn (2004)⁴ dan Wardah Hafidz dan Tati Krisnawaty (1990).⁵

Para akademisi dan aktivis perempuan ini mengungkapkan sebuah kenyataan sejarah yang kerap tidak diketahui oleh banyak pihak tentang kerja keras dan buah pikir cemerlang dari para pioner gerakan perempuan di Indonesia. Cora mencoba memaparkan permasalahan perempuan yang coba diatasi oleh kerja organisasi perempuan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Saskia, sekalipun fokusnya pada aktivitas organisasi perempuan bernama Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), juga mencoba memaparkan kronologi gerakan perempuan dari masa kolonial hingga 1965, saat Ger-

wani dihancurkan. Susan mencoba mengungkapkan gerakan perempuan pada masa Orde Baru. Wardah dan Tati agak berbeda dengan Susan, sekalipun juga memaparkan kerja organisasi perempuan pada masa Orde Baru. Hal ini karena paparan Wardah dan Tati lebih banyak melihat kerja organisasi perempuan dalam kaitannya dengan program-program pembangunan pada masa Orde Baru.

Penelitian-penelitian yang diterbitkan mengenai gerakan perempuan di Indonesia lebih banyak memaparkan gambaran gerakan perempuan tersebut dengan membaginya dalam periode-periode perjalanan sejarah dan perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Pembagian dalam periodisasi ini memang bukan suatu cara penggambaran yang terbaik karena ada kecenderungan melakukan generalisasi. Padahal dalam kenyataannya, proses perubahan berjalan lambat dan melewati batas-batas waktu yang ada. Tulisan ini juga menggunakan pembagian periodik untuk memudahkan pembahasan. Pembagian dan batasan tahun lebih sebagai perkiraan dalam penggambaran yang dikaitkan dengan situasi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Tulisan ini ingin memaparkan secara ringkas dan mencoba merefleksikan penggambaran kecenderungan umum yang terjadi mengenai fokus kerja dan gerakan organisasi perempuan dari masa kolonial hingga masa pasca runtuhnya rezim Suharto di Indonesia. Harapannya, refleksi ini dapat melengkapi informasi terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai gerakan organisasi perempuan di Indonesia.

² Lihat "Sejarah Perempuan Indonesia. Gerakan dan Pencapaian", Cora Vreede-de Stuers, edisi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Komunitas Bambu, Jakarta, April 2008.

³ Lihat "Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia", Saskia Eleonora Wieringa, edisi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Garba Budaya dan Yayasan Kalyanamitra, Agustus 1999.

⁴ Lihat "Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern", Susan Blackburn, edisi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan Yayasan Kalyanamitra, Maret 2009.

⁵ Lihat "Perempuan dan Pembangunan. Studi Kebijakan tentang Kedudukan Perempuan dalam proses Pembangunan di Indonesia", Wardah Hafidz dan Tati Krisnawaty, tulisan ini dipresentasikan dan diseminasikan pada Pertemuan Mitra Hivos pada April 1990 di Lombok Timur, NTB.

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda: Tumbuhnya Gerakan Perempuan di Indonesia

Mulai tumbuhnya gerakan perempuan di Indonesia bisa dirunut sejak akhir abad 19 atau seputar tahun 1890-an. Pada masa itu, gerakan perempuan mulai dapat di-ukur karena gerakan tersebut sudah mulai melakukan perjuangannya melalui organisasi modern⁶ dan pada masa tersebut kesadaran perempuan mulai tercatat.

Catatan diawali oleh Kartini (1879-1904) di Jepara dan kemudian Rembang, Jawa Tengah, yang mempertanyakan banyak hal melalui tulisan-tulisannya dan gerak atau upayanya mendirikan sekolah untuk anak perempuan. Upaya serupa juga diikuti oleh Dewi Sartika (1884-1947) di Jawa Barat, Maria Walanda Maramis (1827-1924) di Sulawesi Utara, Rahmah el Yunusiah (1901-1969) dan Rasuna Said (1910-1965) di Sumatera Barat.⁷ Pada masa pemerintahan kolonial, di mana feodalisme sangat kental, perempuan dipingit dalam lingkup rumah dan ditekankan untuk berperan melakukan *masak, manak, macak* atau kerja domestik, menjadikan perempuan ti-

dak tahu dunia pengetahuan. Permasalahan perempuan yang diidentifikasi adalah diskriminasi dalam hal pendidikan. Akses pada pendidikan tertutup bagi perempuan setelah akil balik — bahkan sama sekali tertutup bagi anak-anak Indonesia yang bukan berasal dari kalangan bangsawan.

Itulah sebabnya pada masa itu, gerakan perempuan melakukan kerja untuk mengadakan pendidikan bagi anak perempuan. Upaya ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang diidentifikasi pada saat itu. Banyak anak perempuan yang tidak memiliki akses pada pengetahuan dan dunia luar. Kalau pun anak perempuan pada masa itu bisa keluar rumah, itu karena mereka harus bekerja membantu orang tua, atau dinikahkan manakala usia dirasa cukup. Akibatnya, anak perempuan bukan saja buta huruf dan tidak bisa baca tulis, tetapi juga sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, seseorang baik perempuan dan laki-laki bisa membaca situasi dan masalah. Oleh karena itu, gerakan perempuan di Indonesia dimulai dengan melakukan proses pendidikan bagi perempuan.

Faktor lain yang memunculkan gerakan perempuan pada masa ini adalah krisis ekonomi-politik yang disebabkan oleh kolonialisme. Kolonialisme atau penjajahan mengakibatkan penghisapan, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja manusia. Problem ekonomi-politik yang dihadapi langsung oleh masyarakat, khususnya perempuan, menjadi pendorong lahirnya gerakan perempuan. Konstruksi peran perempuan dalam masyarakat adalah melakukan reproduksi biologis sekaligus sosial untuk mempersiapkan tenaga baru. Dan, pada awal masa Pergerakan Nasional, tenaga ini

⁶ Organisasi modern diartikan dalam konteks perkumpulan dengan peraturan-peraturan tertulis seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan pembagian kerja antar anggota pengurus, hak dan kewajibannya dan sebagainya.

⁷ Data menarik menunjukkan pada tahun 1910, jumlah murid perempuan di Jawa adalah 280 orang, sedangkan di luar Jawa termasuk Madura jumlahnya mencapai 12,276 orang. Dari jumlah tersebut, 6,056 orang adalah jumlah perempuan yang bersekolah di Manado, (hal. 49, "Perempuan dan Pembangunan. Studi Kebijakan tentang Kedudukan Perempuan dalam proses Pembangunan di Indonesia", Wardah Hafidz dan Tati Krisnawaty, 1990)

digunakan oleh kapitalisme kolonial untuk menjadi buruh di perkebunan bahkan juga menjadi *comfort women*, atau perempuan penghibur.

Tampak bahwa pada masa Pergerakan Nasional, perempuan menghadapi dua permasalahan. Pertama, feodalisme, yang mereka jawab dengan pendidikan. Tindakan politik yang diambil organisasi perempuan pada masa ini adalah mengajukan persamaan perempuan dalam perkawinan melalui regulasi kolonial. Hal itu terjadi pada sekitar 1913-an, organisasi perempuan menuntut agar perempuan boleh mengajukan cerai, pembatasan terhadap perkawinan dini dan tidak ada pemaksaan kawin dari orang tua pada usia muda.

Kedua, masalah krisis ekonomi-politik akibat penjajahan, ternyata tidak cukup diselesaikan hanya dengan kebijakan-kebijakan perbaikan kondisi masyarakat seperti kebijakan pendidikan bagi bangsa bumiputera yang dikenal dengan Politik Etis⁸ pemerintahan kolonial Belanda. Kebijakan tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah penjajahan. Untuk menjawabnya, disadari

bahwa masalah penjajahan harus dilalui dengan proses revolusi mengusir kolonial. Maka gerakan perempuan atau organisasi perempuan pada waktu itu muncul sebagai bagian dari organisasi-organisasi nasionalis. Seperti, Puteri Mardika (1912) sebagai bagian dari Budi Utomo, Aisyiah (1917) sebagai bagian dari Muhammadiyah, dan beberapa lagi. Dibayangkan pembebasan perempuan akan terwujud bila mereka merdeka atau bebas dari penjajahan kolonial Belanda.

Setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Perempuan pada 22 Desember 1928. Kongres ini merupakan deklarasi para perempuan untuk menyatukan gerakan perempuan dalam revolusi mengusir penjajah. Meskipun ideologi organisasi perempuan pada waktu itu beragam, semua dipersatukan oleh satu keinginan mencapai kemerdekaan, bebas dari penjajahan kolonial Belanda.

Gerakan perempuan pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kebangkitan rasa nasionalisme di kalangan terpelajar. Hal ini tampak dari permasalahan yang dijadikan bahasan dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Kongres ini diadakan dua bulan setelah diadakannya Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Dipengaruhi oleh semangat yang sama organisasi dan kelompok perempuan mengadakan Kongres Perempuan yang dihadiri oleh 30 organisasi perempuan. Selain mengidentifikasi permasalahan perempuan, antara lain kedudukan perempuan dalam perkawinan, poligami dan pendidikan, Kongres ini juga menghasilkan tiga buah mosi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Yaitu, perlunya menambah sekolah untuk anak-anak perempuan, wajib menye-

⁸ Politik Etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad 19 yang memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan pribumi. Sebenarnya dibalik kebijakan politik etis ini, pemerintah kolonial sedang menerapkan kebijakan desentralisasi serta ekspansi pasar. Pendidikan tingkat rendah dan menengah diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja untuk menduduki posisi-posisi dalam birokrasi tingkat rendah pemerintah kolonial Belanda. Selain itu juga meningkatnya pendidikan juga akan meningkatkan kebutuhan dan konsumsi masyarakat. Disadari atau tidak, peningkatan pendidikan dengan model Barat ini memperkuat status quo dan menunjang kepentingan penjajah (hal. 49-50, Perempuan dan Pembangunan. Studi Kebijakan tentang kedudukan Perempuan dalam Proses Pembangunan di Indonesia, Wardah Hafidz dan Tati Krisnawaty, 1990).

butkan ta'lik pada saat akad nikah dan diadakan peraturan untuk tunjangan bagi janda dan anak piatu pegawai pemerintah kolonial Belanda.⁹

Perjuangan Gerakan Perempuan Masa Kemerdekaan Hingga Orde Baru

Perjuangan kemerdekaan pada akhirnya tercapai, dengan diproklamirkannya Indonesia menjadi republik pada 17 Agustus 1945. Namun, apakah kemerdekaan dari penjajah juga berarti perempuan bebas dari permasalahan yang membelenggunya?

Di kalangan organisasi-organisasi atau kelompok perempuan, ada perbedaan pendapat apakah perjuangan perempuan sudah terwujud atau belum. Ada kelompok yang menganggap negara sudah memberikan pengakuan persamaan seperti tercantum dalam UUD 1945. Mereka merasa bahwa dengan merdekanya Indonesia, persamaan perempuan cukup diatur dalam hukum dan kebijakan. Kelompok yang mempercayai hal ini adalah Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) yang didukung oleh organisasi dan kelompok yang lain. Tahun 1946, diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), meski juga diikuti oleh organisasi dan kelompok perempuan yang bekerja melawan kolonialisme, lebih banyak diikuti oleh kelompok seperti Perwari¹⁰ yang merasa dengan kebijakan yang menjamin kesetaraan bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, ma-

ka permasalahan yang dihadapi perempuan akan dapat diatasi. Hal yang menyatukan beragam organisasi perempuan ini adalah keinginan mereka yang sama untuk meruntuhkan feodalisme yang mewujud pada masih maraknya praktik poligami pada masa itu.

Sementara organisasi perempuan seperti Istri Sedar¹¹ (berdiri sejak 1930) menganggap meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, tapi sebenarnya belum benar-benar merdeka. Organisasi semacam Istri Sedar turut aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, dan giat memberikan pendidikan kesadaran politik bagi perempuan. Istri Sedar berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan kedudukan perempuan yang harus sejajar dengan laki-laki. Organisasi ini juga berposisi kritis terhadap norma-norma adat dan tradisi, juga agama yang merugikan perempuan. Mereka sangat pedas menyerang kolonialisme. Permasalahan politik yang muncul bisa dilihat dari banyaknya perjanjian kesepakatan, seperti Konperensi Meja Bundar (KMB), Linggar Jati, Renville yang sangat merugikan Indonesia. Perjanjian KMB misalnya membebaskan pampasan perang kepada

nasional mempertahankan kemerdekaan. Organisasi perempuan secara sadar turut serta dalam perjuangan nasional ini. Setelah revolusi usai (merdeka) organisasi perempuan kembali memperjuangkan perlindungan hukum dan perkawinan. Perwari terkenal dengan upaya menentang poligami melalui demonstrasi perempuan, dalam rangka memperingati ulang tahun sewindu Perwari, pada 17 Desember 1953 menolak PP 19/1952 yang melegalkan poligami dan menuntut disahkannya Undang Undang Perkawinan (lihat "Demonstrasi Wanita 17 Desember 1953 Sikap Perwari Menolak PP 19 Th. 1952", skripsi Umi Lasmina, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UI, 1996, <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20156863&lokasi=lokal>).

¹¹ *Ibid.*

⁹ Potret gerakan Wanita di Indonesia, Sukanti Suryochondro, Rajawali, Jakarta 1984.

¹⁰ Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) didirikan 1945. Pada masa revolusi tahun 1945-1949, gerakan perempuan diarahkan untuk mendukung perjuangan

Indonesia, yang kemudian menjadi hutang Indonesia. Belanda yang menjajah, Indonesia yang harus memberi pampasan perang.

Belanda masih berusaha untuk menduduki Indonesia agar pemerintahan kolonial Hindia Belanda tidak pergi. Proses peralihan perkebunan kolonial atau tanah-tanah rakyat yang diambil pada masa *culturstelsel* atau tanam paksa, juga tidak sepenuhnya dikembalikan. Perusahaan-perusahaan kolonial dan bahkan konsorsium negara pemerintahan kolonial, terutama perusahaan migas atau minyak, juga belum ingin meninggalkan Indonesia.

Situasi inilah yang memberikan kesadaran bagi gerakan progresif pada masa itu, termasuk organisasi perempuan seperti Isteri Sedar, bahwa Indonesia belum merdeka, karena secara ekonomi sumber-sumber kekayaan utama masih dikuasai kolonial. Inilah yang membangkitkan kembali perlawanan terhadap mereka.

Selain Isteri Sedar, pada masa ini lahir organisasi perempuan bernama Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis)¹² yang anggotanya para perempuan yang betul-betul melawan fasisme Jepang dan juga kolonialisme. Gerwis melihat bahwa isu feodalisme belum hilang setelah kemerdekaan, bahkan kembali membelenggu perempuan. Salah satu yang mereka identifikasi adalah banyaknya kaum elit yang melakukan poligami dan lebih memberikan kesempatan pendidikan bagi anak laki-laki daripada perempuan.

¹² Gerwis berdiri pada Juli 1950, sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia. Akhirnya nama ini diubah menjadi Gerwani, (lihat hal 63-64, "Perempuan dan Pembangunan. Studi Kebijakan tentang Kedudukan Perempuan dalam proses Pembangunan di Indonesia", Wardah Hafidz dan Tati Krisnawaty, 1990).

Pada 1954, Gerwis menggelar kongres dan mengubah nama menjadi Gerwani. Selain Gerwani, Partai Nasional Indonesia (PNI) juga mempunyai organisasi perempuan, yaitu Wanita Marhaen yang kemudian berubah menjadi Wanita Demokrat.¹³ Wanita Marhaen pecah dua, antara kelompok yang didukung oleh para elit partai yang pro-feodalisme, dengan kelompok yang pro-rakyat.

Gerwani dan Wanita Marhaen yang muncul antara tahun 1950-1960 merupakan organisasi massa. Organisasi massa artinya memiliki basis massa perempuan yang kuat. Organisasi seperti Fatayat atau Aisiyah juga merupakan organisasi perempuan yang mempunyai basis massa. Fatayat¹⁴ adalah organisasi perempuan yang berafiliasi dengan organisasi massa Islam Nahdatul Ulama (NU). NU memang dikenal sebagai organisasi Muslim tradisional dan sejak awal anggotanya adalah laki-laki. Namun demikian, pemimpin NU merespon isu-isu perempuan secara progresif. KH. Wahid Hasyim, yang merupakan putera KH. Hasyim Asy'ari, misalnya pernah membolehkan perempuan menjadi seorang hakim. Isu perempuan semakin mendapatkan perhatian ketika Kiai Dahlan mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU di Kongres NU ke XIII di Menes, Banten pada 11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting, karena mulai membicarakan tentang perlunya pe-

¹³ Wanita Demokrat Indonesia berdiri Januari 1951 merupakan afiliasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada tahun 1964 organisasi ini berubah namanya menjadi Gerakan Wanita Marhaenis.

¹⁴ Diambil dari "Sejarah Kelahiran Fatayat NU", <http://fatayat-nu.blogspot.com/2011/05/sejarah-kelahiran-fatayat-nu.html>, 28 Mei 2011.

perempuan mendapatkan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan agama melalui NU. Ketika itu, kongres baru menyetujui perempuan untuk menjadi anggota NU, dengan hanya bisa menjadi pendengar dan pengikut serta tidak boleh duduk dalam kepengurusan.

Perkembangan penting kembali terjadi pada kongres NU ke XV di Surabaya pada 5-9 Desember 1940. Ketika itu, terjadi perdebatan sengit merespon usulan agar anggota perempuan NU mempunyai struktur pengurusannya sendiri di dalam NU. Kiai Dahlan termasuk mereka yang gigih memperjuangkan agar usulan tersebut diterima. Sampai pada hari sebelum kongres berakhir, peserta tidak mampu memutuskan, hingga disepakati untuk menyerahkan keputusan akhirnya pada Pengurus Besar Syuriah NU. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kiai Dahlan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Setelah didapatkan, maka peserta kongres pun dengan mudah menyetujui perlunya anggota perempuan NU untuk memiliki struktur kepengurusannya sendiri di dalam NU. Pada Kongres NU ke-XVI di Purwokerto tanggal 29 Maret 1946, struktur kepengurusan anggota perempuan NU disahkan dan diresmikan sebagai bagian dari NU. Namanya ketika itu adalah Nahdhlatul Ulama Muslimat (NUM). Ketua pertama terpilih adalah Chadidjah Dahlan dari Pasuruan yang tak lain adalah isteri Kiai Dahlan.

Kebangkitan perempuan NU juga membakar semangat kalangan perempuan muda NU yang dipelopori oleh tiga serangkai, yaitu Murthasiah (Surabaya), Khuzaimah Mansur (Gresik), dan Aminah (Sidoarjo).

Pada Kongres NU ke XV tahun 1940 di Surabaya, juga hadir puteri-puteri NU dari berbagai cabang yang mengadakan pertemuan sendiri, yang menyepakati dibentuknya Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat (Puteri NUM). Mereka sebetulnya sudah mengajukan kepada Kongres NU agar disahkan sebagai organisasi yang berdiri sendiri di dalam NU, namun Kongres hanya menyetujui Puteri NUM sebagai bagian dari NUM. Dalam dua tahun, Puteri NUM meminta agar mempunyai Pimpinan Pusatnya sendiri yang terpisah dari NUM karena organisasi Puteri NUM di tingkat Cabang terus bertambah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kemudian menyetujui pembentukan Pengurus Pusat Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU pada 26 Rabiul Akhir 1399, 14 Februari 1950. Selanjutnya Kongres NU ke-XVIII pada 20 April-3 Mei 1950 di Jakarta secara resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi salah satu badan otonom NU. Namun berdasarkan proses yang berlangsung selama perintisan hingga ditetapkan, FNU menyatakan dirinya didirikan di Surabaya 24 April 1950, bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H. Pucuk Pimpinan Fatayat NU pertama adalah Nihayah Bakri (Surabaya) sebagai Ketua I dan Aminah Mansur (Sidoarjo) sebagai Ketua II. Kepengurusan pada waktu itu hanya mempunyai dua bagian, yaitu bagian penerangan dan pendidikan.

Sementara itu, Aisyiah¹⁵ berafiliasi dengan organisasi massa Islam Muhammadiyah. Sebelum Aisyiyah secara kongkrit ter-

¹⁵ Diambil dari "Aisyiyah", <http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html>, 6 Februari 2013.

bentuk, sifat gerakan pembinaan terhadap perempuan baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang senang berkumpul, kemudian diberi bimbingan oleh K.H.A. Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi lebih merupakan kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Pendidikan dan pembinaan terhadap perempuan yang usianya sudah tua pun dilakukan oleh Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan. Ajaran agama Islam tidak memperkenankan mengabaikan terhadap perempuan. Mengingat pentingnya peranan perempuan yang harus mendapat tempat yang layak, pasangan suami-istri tersebut mendirikan kelompok pengajian perempuan yang anggotanya terdiri para gadis-gadis dan perempuan yang sudah tua. Dalam perkembangannya, kelompok pengajian wanita itu diberi nama Sapa Tresna.

Sapa Tresna belum merupakan organisasi, hanya suatu gerakan pengajian saja. Oleh karena itu, untuk memberikan nama kongkrit menjadi suatu perkumpulan, K.H. Mokhtar mengadakan pertemuan dengan K.H.A. Dahlan, yang juga dihadiri oleh H. Fakhruddin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah lainnya, di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Awalnya diusulkan nama Fatimah, untuk organisasi perkumpulan kaum perempuan Muhammadiyah itu, tetapi nama itu tidak diterima oleh rapat.

Haji Fakhruddin kemudian mengusulkan nama Aisyiyah, yang diterima oleh rapat tersebut. Nama Aisyiyah dipandang lebih tepat bagi gerakan perempuan karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan perempuan yang digulirkan diharapkan dapat meniru perjuangan Aisyah, isteri Nabi Muham-

mad, yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Peresmian Aisyiyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad pada 27 Rajab 1335 H, atau pada 19 Mei 1917. Peringatan Isra' Mi'raj tersebut merupakan peringatan pertama yang diadakan Muhammadiyah. Selanjutnya, K.H. Mukhtar memberi bimbingan administrasi dan organisasi, sedangkan untuk jiwa keagamaan dibimbing langsung oleh K.H.A. Dahlan.

Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyiyah dicanangkan dengan mengadakan pemberantasan buta huruf pertama kali, baik buta huruf Arab maupun Latin pada 1923. Dalam kegiatan ini, para peserta yang terdiri dari para gadis dan ibu-ibu rumah tangga, belajar bersama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan partisipasi perempuan di dunia publik. Selain itu, pada 1926, Aisyiyah mulai menerbitkan majalah organisasi yang diberi nama Suara Aisyiyah, yang awal berdirinya menggunakan Bahasa Jawa. Melalui majalah bulanan inilah Aisyiyah antara lain mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi.

Aisyiyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi perempuan pada 1928. Dalam hal ini, Aisyiyah bersama dengan organisasi perempuan lain bangkit berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi yang terbentuk diberi nama Kongres Perempuan Indonesia, yang sekarang mejadi Kowani. Lewat federasi, berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dilakukan secara terpadu.

Hal yang membedakan Gerwani dan Wanita Marhaen dengan Fatayat dan Aisyiyah adalah, Fatayat dan Aisyiyah tidak memiliki kesadaran melawan kolonialisme dan konsorsium negara kolonial. Meskipun begitu, baik Perwari, Aisyiah, Muslimat, Gerwani dan Wanita Marhaen bisa bersatu dalam Kowani untuk satu tujuan, yakni persamaan perempuan untuk menjawab persoalan feodalisme, atau dengan kata lain berpelelang melawan kebodohan.

Perwari, Fatayat dan Aisyiah menganggap kolonialisme sudah tidak ada, sementara Wanita Marhaen, Gerakan Wanita Sosialis (GWS) menganggap permasalahan kolonialisme masih nyata di Indonesia, bahkan Gerwani mengatakan hal tersebut merupakan bahaya laten.

Untuk menghadapi kembalinya kolonialisme, Gerwani bersatu dengan gerakan tani dan buruh mengambil alih perkebunan kolonial atau dikenal dengan *nasionalisasi perkebunan*¹⁶ untuk diberikan kepada Negara. Sayangnya, gerakan pengambilalihan ini belum tuntas karena sumber-sumber ekonomi seperti minyak dan gas belum berhasil diambil alih untuk dikembalikan ke Indonesia.

“Saya sempat berbicara dengan salah seorang perempuan yang bekerja di pabrik pemintalan Belanda di Garut, Jawa Barat. Ibu ini bercerita, ia dibantu Gerwani

ketika melakukan aksi mogok untuk menuntut upah dan fasilitas yang layak. Gerwani juga membantu untuk menuntut kesejahteraan buruh pabrik. Ibu ini juga bilang mereka [buruh pabrik] mengerti persoalan perburuhan karena pendidikan yang diberikan Gerwani”¹⁷.

Pengambilalihan perkebunan dan kegiatan-kegiatan serupa inilah yang merupakan tindakan politik yang dilakukan Gerwani dalam rangka menghentikan kolonialisme. Inilah yang membedakan Gerwani dengan organisasi perempuan lain.

Pada 1950-an dua organisasi perempuan, Gerwani¹⁸ yang mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Wanita Marhaen yang nasionalis, menempati kedudukan penting dalam masyarakat. Gerwani berasal dari Gerwis yang didirikan pada 1950 dengan anggota awal berjumlah 500 orang perempuan. Para anggotanya pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Dari segi ideologi, organisasi ini meru-

sia pada 1964. Perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Dalam proses nasionalisasi perkebunan, terlihat nyata jiwa patriotisme dan nasionalisme yang kuat yang menginginkan kedaulatan ekonomi harus berada di tangan bangsa sendiri. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini untuk mengelola perusahaan perkebunan tanpa tergantung pada keahlian bangsa Belanda. Lihat “Perkebunan Dalam Lintas Zaman”, <http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/inventaris-berita/87-lintas-zaman-perkebunan.html>, 6 Februari 2013.

¹⁶ Untuk memastikan manfaat bagi bangsa Indonesia, nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan perkebunan besar dari negara asing kepada pemerintah Indonesia dilakukan berkali-kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar 1949. Kedua, sebagai perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada 10 Desember 1957. Ketiga, dalam rangka konfrontasi dengan Malay-

¹⁷ Lihat wawancara Ruth Indiyah Rahayu, “Organisasi Perempuan Harus Mengubah Strategi Gerakan”, <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/05/ruth-indiyah-rahayu-organisasi-perempuan-harus-mengubah-strategi-gerakan>.

¹⁸ Lihat “Sejarah Gerwani”, <http://indication-dawam.blogspot.com/2012/04/sejarah-gerwani.html>, 11 April 2012.

pakan kelanjutan dari Isteri Sedar. Kaum perempuan dalam Gerwis umumnya dari generasi yang lebih muda, tetapi mereka mempunyai hubungan dengan perempuan yang bergabung dalam Isteri Sedar.

Pada 1954, ketika anggotanya mencapai 80.000 orang, sejalan dengan politik PKI saat itu, Gerwis memutuskan untuk lebih menarik kaum perempuan dari kalangan massa. Sebagai simbol untuk keputusannya ini, nama organisasi diubah menjadi Gerwani. Dalam kurun waktu itu, Gerwani mengambil peranan sangat aktif dalam kampanye-kampanye untuk pemilihan umum parlementer. Bahkan, empat orang anggotanya terpilih dalam pemilihan umum 1955.

Pada 1956, keanggotaan Gerwani mencapai lebih dari setengah juta. Namun terlepas dari massa anggota yang terus meningkat (pada 1960 dikatakan telah mencapai sekitar 700.000), jumlah kader perempuan masih tetap agak kecil (tiga di pimpinan pusat, dan bahkan tidak satu orang pun di setiap cabang— sementara jumlah cabang pada 1957 tercatat 183 cabang). Dalam tahun-tahun ini, usaha pertama-tama diarahkan untuk mencapai pulau-pulau luar Jawa. Kader-kader dari Jawa dikirim ke berbagai penjuru Nusantara untuk mendirikan cabang-cabang organisasi.

Kampanye Gerwani tertuju pada beberapa masalah perkosaan di Jawa Barat dan Bali. Organisasi ini juga memberikan dukungan kepada lurah-lurah perempuan. Beberapa orang perempuan telah terpilih menjadi lurah, tetapi tidak bisa menjalankan jabatan karena hukum kolonial melarang kaum perempuan menduduki jabatan semacam ini.

Tahun 1961 anggota organisasi mencapai lebih dari satu juta orang. Cabang-cabang didirikan di seluruh penjuru negeri. Kaum perempuan tertarik pada organisasi ini karena kegiatannya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Warung koperasi dan koperasi simpan-pinjam kecil-kecilan didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah ini. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus-kursus kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi. Pada kesempatan ini juga diajarkan keterampilan teknis, misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Sejak awal, Gerwani sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani, bekerja-sama dengan bagian perempuan Barisan Tani Indonesia (BTI). Pada 1961 diselenggarakan seminar khusus untuk membahas persoalan mereka. Belakangan Gerwani juga membantu aksi-aksi pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI, dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan.

Di samping kegiatannya di tengah-tengah perempuan tani, Gerwani juga melakukan serangkaian kegiatan lain. Di antaranya kampanye pemberantasan buta huruf yang dimulai pada 1955, perubahan undang-undang perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk

perkosaan dan penculikan, dan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kaum tani dan buruh perempuan. Para aktivis Gerwani melakukan kegiatan besar-besaran pembentangan buta huruf di kalangan perempuan, sekaligus mendidik para peserta mengenai masalah-masalah politik yang hangat pada masanya, termasuk masalah-masalah perempuan. Bersama dengan kaum perempuan dari organisasi-organisasi lain, mereka saling membantu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik di tingkat kampung, kota, maupun provinsi, mengenai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, kesehatan, kebersihan, dan juga soal-soal seperti pelacuran, perkawinan anak-anak, dan perdagangan perempuan. Mereka sediakan pula bantuan hukum, juga bantuan untuk korban banjir dan bencana alam lainnya.

Secara kelembagaan, Gerwani sebenarnya belum membahas secara terbuka masalah-masalah seperti pembagian kerja seksual tradisional,¹⁹ walaupun sejumlah kader telah berjuang menentang ketidakadilan yang cukup nyata pada tingkat perorangan. Beberapa kader dengan tegas menyebutkan usaha mereka untuk mendidik anak-anak laki-laki agar mau mengerjakan tugas-tugas rumah-tangga bersama-sama, dan suami juga diharapkan mengerjakan pekerjaan rumah-tangga yang umumnya nyaris dipandang sebagai tugas perempuan saja.

Setelah peristiwa politik pada Oktober 1965, massa luas digerakkan untuk demonstrasi melawan semua organisasi yang dianggap kiri. Mereka menuntut agar semua organisasi yang dianggap kiri dinyatakan

terlarang. Kampanye menjatuhkan Gerwani berhasil dilakukan. Ingatan pada Gerwani benar-benar telah dihilangkan dari sejarah resmi gerakan perempuan Indonesia, dan orang-orang yang pernah menjadi anggotanya masih menghadapi masalah bila terang-terangan mengakui pernah terlibat Gerwani dalam bentuk apapun. Berakhirnya riwayat organisasi perempuan Indonesia yang terbesar ini sungguh mendadak, cepat, dan tidak terduga-duga.

Pada akhir Oktober 1965 Gerwani secara resmi dikeluarkan dari Kowani dan pada 1966 Gerwani secara resmi dinyatakan terlarang. Dalam proses pembentukan pemerintah “Orde Baru”, Kowani dan semua organisasi perempuan yang lain harus “menyesuaikan diri.” Secara berangsur-angsur hampir semua program sosial dan ekonomi mereka yang mengabdikan kepentingan perempuan miskin dan perempuan desa dihapuskan.

Dari sisi perjuangan organisasi perempuan, Gerwani juga mengalami pergeseran dalam giat kerja pembelaannya. Hal ini terasa mulai pada 1960-an hingga akhirnya Gerwani dilarang. Sebagaimana yang dilihat oleh Wieringa:²⁰

“...Gerwani bergeser ke arah suatu pendirian yang menyatakan masalah kelas dan bukan seks yang paling penting; dan, bahwa bukan patriarki tetapi perjuangan kelas yang harus menjadi perhatian perempuan”

¹⁹ *Loc. cit*

²⁰ Hal. 461, “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”, Saskia Eleonora Wieringa, Garba Budaya dan Kalyanamitra, Agustus 1999, Jakarta.

Gerakan Perempuan Pasca Oktober 1965 atau Masa Orde Baru

Dilarangnya seluruh gerakan kerakyatan, termasuk Gerwani, pada Oktober 1965 menandai masuknya masa yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Kepemimpinan pada masa ini berhasil menggunakan Gerwani sebagai bahan propaganda untuk menghancurkan gerakan perempuan.²¹ Mereka menyebarkan propaganda bahwa semua perempuan yang berani melawan adalah buruk, bahkan jahat. Gerakan perempuan dijinakkan. Gerakan Perempuan menjadi hanya Kowani, sementara Serikat Buruh menjadi Serikat Pekerja, serikat petani menjadi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi nelayan menjadi HSMI. Semua organisasi ini diciptakan dan bekerja untuk rezim Orde Baru. Sebagaimana yang disampaikan pula oleh I Gusti Agung Ayu Ratih²² dalam Pidato Kebudayaan yang disampaikan pada 2008:

“Dalam sejarah Indonesia proses penanaman model pemusnahan perempuan ala abad pertengahan ini berlangsung seiring dengan terbangunnya kediktatoran Suharto pada akhir 1965. Dengan cerdas (sekali pun mengerikan) penguasa militer menggunakan imaji seksual kelirian dan kebusan perempuan-perempuan ‘komunis’ yang menari-nari telanjang di Lubang Buaya untuk menumbuhkan kebencian terhadap perempuan yang berpolitik. Propaganda hitam ini

dengan segera memicu serangan fisik terhadap semua perempuan yang dianggap anggota Gerwani, serta anggota PKI dan organisasi-organisasi massa lainnya yang dianggap sehaluan. Pesannya jelas: perempuan ‘komunis’, perempuan yang berpolitik membahayakan keselamatan dan integritas bangsa ini. Oleh sebab itu, menjadi sah untuk melakukan pembasmian terhadap siapa pun yang dianggap ‘komunis’ sampai ke akar-akarnya”.²³

Organisasi-organisasi pada masa Orde Lama, seperti Gerakan Wanita Sosialis (GWS) dan Wanita Marhaen bisa diterima Kowani asal berganti nama menjadi Gerakan Wanita Sejahtera dan Wanita Demokrat. Anggota Gerwani ditangkap dan dipenjarakan tanpa ada proses pengadilan.²⁴ Akhirnya, nilai-nilai yang dipandang ideal mengenai perempuan untuk menjadi *konco wingking* kembali disosialisasikan dalam gerakan perempuan dan membentuk pemikiran banyak pihak sepanjang masa Orde Baru. Kampanye ini dilakukan antara lain melalui majalah-majalah perempuan. Muncul konsepsi tentang “peran ganda” perempuan. Perempuan bisa bekerja, namun tidak boleh melupakan tanggung jawabnya pada keluarga sebagai ibu dan istri.

Pada 1980-an, kondisi pembangunan yang dilaksanakan semakin terasa timpang dan menimbulkan krisis ekonomi politik

²¹ *Ibid.*

²² Lihat “Kita, Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan”, disampaikan Anak Agung Ayu Ratih pada Pidato Kebudayaan pada 10 November 2008, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

²³ Untuk gambaran lebih jauh tentang penggunaan imaji seksual dalam propaganda anti komunis dan politik seksualitas Orde Baru secara umum, lihat Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*.

²⁴ Lihat “Gerwani. Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan,” Amurwani Dwi Lestariningsih, PT Kompas Media Nusantara, September 2011, Jakarta.

yang kemudian menumbuhkan gerakan-gerakan protes yang dimotori LSM dan gerakan mahasiswa. Tahun 1980 juga di tingkat internasional terjadi krisis dunia. Tujuannya tentu menata dunia dengan intervensi terhadap regulasi suatu negara, debirokratisasi dan deregulasi, sekali lagi untuk investasi dan perdagangan bebas termasuk pengaturan keuangan secara bebas.

Pada saat itu, gerakan perempuan memang menyadari ada problem pembangunan yang berdampak pada perempuan. Seperti halnya gerakan perempuan tidak menyadari bahwa jauh di luar problem pembangunan itu, ada problem yang lebih besar dan mengakar, yakni kapitalisme. Oleh gerakan perempuan, upaya yang dilakukan adalah melakukan pengorganisasian pengentasan kemiskinan korban pembangunan di pedesaan melalui mikro kredit.

Beberapa LSM melihat problem tersebut dijawab dengan pendampingan perempuan miskin. Namun ada pula LSM yang melihat problem Indonesia tidak sekedar kemiskinan, tapi ada permasalahan seputar seksualitas perempuan. Karena ada kekerasan terhadap perempuan, perkosaan, pelecehan dan lain-lain, mereka melakukan kampanye melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Diawali oleh Yasanti di Yogyakarta pada 1983, yang mendorong untuk memperkuat hak-hak buruh perempuan dan perempuan yang bekerja di industri batik serta sebagai penjaga toko. Kemudian bermunculan organisasi-organisasi perempuan di kota-kota lain, seperti Kalyanamitra (1984) di Jakarta dan lainnya. Penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai upaya organisasi dan kelompok perempuan pada masa Orde baru

ini dapat dilihat pada artikel lain dalam jurnal ini. Namun, apa yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Ayu Ratih (2008):

“Pemerintah Orde Baru tidak hanya menghancurkan Gerwani tetapi juga merebut otoritas organisasi-organisasi perempuan lainnya dalam menentukan gerak mereka. Ide-ide emansipatoris tentang kemandirian perempuan yang belum selesai diperbincangkan sejak dekade ke-2 abad ke-20 dikooptasi dan diberi bentuk yang paling konservatif: ‘peran ganda wanita’. Pemerintah kemudian membentuk organisasi-organisasi istri pegawai yang strukturnya mengikuti birokrasi pemerintahan sipil dan militer dan kepemimpinannya sejalan dengan jabatan suami. Sementara itu kekerasan militer secara massal terhadap perempuan berlanjut di Aceh, Papua Barat dan Timor Leste. Di masa inilah nilai-nilai patriarkal dari jaman feodal dan kolonial menemukan peneguhan dari prinsip kerja militeristik yang menuntut hirarki dan loyalitas tak terbatas dan mengagungkan kekerasan”²⁵

Sementara itu, di sisi lain, apabila kita melihat gerakan mahasiswa, sekalipun gerakan mahasiswa sudah diberangus dengan kebijakan, menarik untuk disimak tumbuhnya kelompok-kelompok studi mahasiswa pada masa Orde Baru. Mereka belajar perkembangan teori-teori yang kritis untuk memahami dan mencari solusi atas persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan bu-

²⁵ Lihat “Kita, Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan”, disampaikan pada Pidato Kebudayaan Anak Agung Ayu Ratih pada 10 November 2008, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

daya seperti mempelajari feminisme, juga antara lain marxisme. Namun, upaya untuk memahami feminisme, misalnya di kalangan gerakan mahasiswa dan aktivis LSM, masih terbatas sebagai pengetahuan dan belum menjadi praktik sosial. Mereka belum sampai pada bagaimana mengangkat problem perempuan yang tersembunyi menjadi tampak, bagaimana hak perempuan menjadi wacana di masyarakat.

Pada 1997, kondisi ekonomi Indonesia sangat kritis. Pada masa itu, cukup banyak bermunculan kelompok-kelompok, baik dari kalangan mahasiswa, pekerja profesional, akademisi serta kelompok atau organisasi perempuan, untuk mencari jalan keluar dari krisis ekonomi, terutama untuk mencari cara atas dampak krisis ekonomi itu pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama perempuan.

Kondisi Indonesia pada masa tersebut melorot ke titik terendah, bukan saja dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial dan politik. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, oleh karena situasi yang semakin tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari semakin kecil. Harga-harga melambung tinggi. Seperti yang ditulis oleh Mahfirlana Mashadi:²⁶

“Ketika harga susu meningkat hingga hampir 400 persen, keluarga-keluarga miskin jelas tidak mampu membelinya. Para ibu dalam situasi Indonesia saat ini mulai memberikan teh manis kepada

bayi dan anak-anak kecil mereka, meskipun mereka tahu betul hal ini tidak memenuhi kandungan gizi dalam susu”

Dalam suasana tersebut, patut dicermati upaya beberapa kelompok dan organisasi perempuan untuk menjawab kondisi yang dihadapi masyarakat.

Gerakan Perempuan 1998

Menjawab krisis ekonomi yang mulai terasa pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari masyarakat pada 1997 dengan perwujudan melambungnya harga bahan pokok, muncul pelbagai upaya. Beberapa organisasi, termasuk kelompok perempuan, bergabung untuk mengadakan kegiatan penyediaan bahan pokok bagi kelompok masyarakat miskin. Mereka mencoba menjawab kondisi krisis ekonomi yang demikian menghimpit masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada kondisi para suami kehilangan pekerjaan, kebutuhan sehari-hari naik berlipat-lipat, dan anak-anak terancam putus sekolah.

Pada tahun tersebut, Indonesia berada pada situasi ekonomi yang amat buruk. Situasi ekonomi yang buruk itu memberi pengaruh yang amat besar pada perempuan. Semua barang kebutuhan dasar atau bahan pangan sangat tinggi, khususnya susu. Nilai tukar rupiah ke dollar Amerika didevaluasi dari Rp 4.850 per dollar Amerika turun menjadi Rp 17.000 per dollar Amerika pada 22 Januari 1998. Akibatnya, harga semua barang yang mengandung produk bahan impor juga menjadi sangat mahal, atau naik harganya. Keadaan itu secara jelas berpengaruh terhadap kehidupan para ibu yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari ke-

²⁶ Mahfirlana Mashadi dalam artikel “When Mothers Speak, Milk Prices Come Down - And So Does a Government”, www.mercycorps.org/countries/indonesia/10172.

luarganya. Hampir tiap hari sejak saat itu, berita di media cetak selalu memberitakan tingginya harga susu dan obat-obatan.

Situasi ekonomi ini mendorong kelompok dan organisasi perempuan untuk memperjuangkan keprihatinan mereka. Demikian pula dengan mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia. Mereka melakukan pengumpulan massa dan demonstrasi di kampus-kampus mereka menuntut perubahan

Suara Ibu Peduli (SIP)²⁷

Pada 23 Februari 1998, pada saat situasi politik sangat panas dan keamanan nasional diperketat, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) diadakan untuk melantik Soeharto sebagai presiden kembali. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata mendapat perintah untuk melarang demonstrasi dan pengumpulan massa, baik selama Sidang Umum MPR maupun setelah Sidang tersebut diselenggarakan. Adalah Suara Ibu Peduli (SIP) yang berani pada saat itu mengambil inisiatif untuk menyuarakan keprihatinan kaum perempuan mengenai tingginya harga kebutuhan pokok. Tuntutannya sederhana: pemerintah harus memberikan perhatian pada permasalahan yang dihadapi kaum ibu, yaitu tingginya harga susu dan kebutuhan pokok. Pada saat itu, SIP belum menjadi sebuah organisasi, tetapi baru sebuah nama untuk satu aksi bersama.

Suara Ibu Peduli adalah sebuah nama yang dipilih oleh para aktivis kelompok perempuan pada awal Februari 1998 untuk

membangun aksi bersama mengenai keprihatinan perempuan. Karena situasi politik saat itu, disepakati oleh para aktivis yang berkumpul untuk menggunakan kata 'ibu', karena ibu bukan sebuah kata yang dianggap mengancam, dan dimaknai sebagai sesuatu yang aman. Oleh karenanya, banyak perempuan mau terlibat untuk membantu aksi ini, aksi pertama dari SIP.

Aksi SIP adalah menyediakan susu dengan harga murah bagi ibu-ibu yang miskin. Sumber dana untuk membeli susu dikumpulkan dari sumbangan masyarakat serta donasi para pengusaha perempuan dan perusahaan-perusahaan lokal.

Pada 23 Februari 1998, pasukan polisi, yang awalnya hanya mengamati aksi demonstrasi yang diadakan di Bundaran Hotel Indonesia, menangkap dua pimpinan SIP, Karlina Leksono-Supelli dan Gadis Arivia, keduanya akademisi pengajar di Universitas Indonesia, dan Wilasih, seorang pengusaha perempuan. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat dan tercatat sebagai salah satu titik sejarah bagaimana perempuan merespons persoalan sosial ekonomi di Indonesia.

Di mata publik, sikap polisi menangkap para ibu dan memasukkan mereka ke atas truk dipandang sebagai tindakan yang sangat tidak baik. Sebagaimana disampaikan Karlina, seorang doktor dalam bidang astronomi dan filsafat, dirinya sebagai seorang ibu merasa sangat prihatin dengan kondisi nutrisi generasi mendatang. Bagaimana anak Indonesia bisa memiliki otak yang pandai apabila harga susu sangat tinggi?, tanyanya.

Penangkapan ketiga ibu dalam demonstrasi SIP mendorong para aktivis perem-

²⁷ Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli, Nur Iman Subono (ed.), Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 1999.

puan dan pro-demokrasi untuk berkumpul bersama, sekaligus menuntut tanggung jawab pemerintah atas kondisi yang terjadi di Indonesia. Demonstrasi mahasiswa terjadi pula di pelbagai kota. Di Jakarta, kelompok-kelompok perempuan menjadi pendukung aksi-aksi mahasiswa tersebut. Para pendukung SIP menyalurkan sumbangan untuk aksi mahasiswa, sehingga SIP kemudian juga mengatur distribusi sumbangan-sumbangan tersebut untuk diserahkan kepada para mahasiswa. Inilah kegiatan utama SIP sampai akhir 1998.

Kerja Logistik adalah Kerja Politik

Hal yang menarik untuk dicermati dari kerja yang dilakukan oleh SIP adalah kekuatan logistik yang ditunjukkan perempuan, yang sesungguhnya merupakan kekuatan politik. Selama ini, sejak masa gerakan melawan penjajahan dan pergantian orde-orde pemerintahan yang terdahulu, gerakan perempuan selalu dianggap hanya sebagai pendukung upaya gerakan sosial. Namun, melalui upaya yang dilakukan SIP kekuatan logistik tidak dapat dianggap hanya merupakan kegiatan domestik semata.

Sebenarnya, secara logis dalam sebuah upaya perubahan sosial logistik merupakan hal penting. Pada kurun waktu 1998, bukan hanya SIP tetapi juga beberapa organisasi dan kelompok perempuan, seperti Kalyanamitra dalam kaitannya dengan kerja Tim Relawan untuk Kemanusiaan (Truk) juga melakukan kegiatan logistik ini. Dari kekuatan logistik tampak bahwa sebuah kelompok atau organisasi perempuan bisa memobilisasi ratusan ibu-ibu untuk melakukan kekuatan logistik agar bisa melawan

kekerasan yang dilakukan pemerintah pada masa itu.

Gerakan SIP juga menjawab secara simbolis krisis ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh SIP dengan kekuatan logistik berpeluang untuk menghadirkan definisi baru mengenai peran ibu dan kekuatan logistik sebagai kekuatan politik yang luar biasa.

Sebagaimana dikatakan Yuni Chuzaifah dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan:²⁸

“SIP merupakan sebuah pertautan antara dunia akademisi dan aktivis ke dalam kerja kongkrit aktivisme. Waktu itu dengan isu-isu yang humanis, kita tidak memakai kata wanita atau perempuan, tapi menggunakan istilah Ibu untuk menyatukan semua. Dulu, gerakan perempuan di kalangan gerakan demokrasi-pun masih menjadi bahan debat. Kita bisa duduk bareng, sudah mulai *ngomong* isu perempuan. Apa yang terjadi dulu, bahwa untuk kepentingan nasionalisme, isu perempuan kerap terpinggirkan.

Kita berefleksi, geliat reformasi semakin kencang, SIP membagi nasi bungkus. Ada yang berpendapat, nanti akan dicatat sejarah bahwa kontribusi perempuan tidak ada sisi politiknya, karena pendekatannya domestik dengan melakukan pembagian nasi bungkus. Namun, ada debat bahwa sesuatu yang domestik juga merupakan sesuatu yang politis. Masyarakat akan melihat kegiatan domestik adalah politik, sehingga kita harus bermain di wilayah ini, sekaligus

²⁸ Lihat wawancara Yuniyanti Chuzaifah, “Gerakan Perempuan Perlu Meredefinisi Strategi, Membuat Pola Baru”, <http://www.komnas-perempuan.or.id/2010/05/yuniyanti-chuzaifah-gerakan-perempuan-perlu-meredefinisi-strategi-membuat-pola-baru>.

kita harus membuat strategi baru. Dalam forum-forum di SIP, terus didiskusikan soal itu oleh beberapa kawan, seperti Nursyahbani, Karlina dan sebagainya: kita mencoba membuat dua wajah untuk strategi. Kita ikut turun ke jalan, menjadi bagian dari gerakan reformasi, membangkitkan suara “adili Soeharto dan kroninya.” Kalimat anti-Soeharto dan kroninya itu muncul dari gerakan perempuan. Kelompok perempuan membuat draftnya di LBH Jakarta, dan memunculkan pertama kali di DPR. Kerja yang dilakukan oleh SIP dan para aktivis perempuan berkontribusi dan mendorong orang agar nuraninya bergerak”.

Apa yang terjadi memperlihatkan betapa Orde Baru sebetulnya abai terhadap kepentingan perempuan dan anak. Kegiatan yang dimotori oleh para aktivis dan kelompok perempuan menunjukkan betapa mudahnya mengumpulkan ibu-ibu dan perempuan lain untuk menjadi relawan baik untuk kekuatan logistik maupun investigasi. Padahal sebelumnya para perempuan ini takut dengan politik

Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK)

Bersamaan dengan upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan aktivis perempuan pada masa itu, masyarakat dihentak oleh fakta kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut kemudian dikenal dengan nama Tragedi Mei 1998.

Tragedi Mei merupakan periode kritis dalam kancah pemerintahan dan rakyat Indonesia. Tragedi Mei yang diawali dengan

peristiwa Trisakti yang terjadi di Jakarta, selain dipicu oleh Krisis Finansial Asia juga dipicu oleh aksi penembakan empat mahasiswa Trisakti yang sedang melakukan demonstrasi pada 12 Mei 1998 yang menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Aksi damai dan *long march* (turun ke jalan) mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil DPR/MPR saat itu.

Terjadinya kekerasan seksual juga dibarengi dengan aksi kerusuhan yang menyasar sampai sentra-bisnis dan membakar bangunan juga penjarahan. Kerusuhan menyebar secara cepat di tempat-tempat lain di Jakarta, khususnya di wilayah yang banyak dihuni oleh warga etnis Tionghoa. Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK)²⁹ dalam laporan menyebutkan bahwa kelompok provokator itu punya ciri serupa, yaitu: laki-laki dewasa, akan tetapi berpakaian SMA. Ketika kerusuhan terjadi, aparat keamanan tidak tampak atau walaupun ada, tidak mengambil tindakan apapun. Padahal selama aksi-aksi demonstrasi berlangsung, aparat selalu disiagakan penuh.

Aksi kerusuhan juga menyasar sampai ke Yogya Plaza, Klender. Warga dari perkampungan plaza sekitar yang menonton perusakan plaza kemudian didorong untuk masuk dan mengambil barang-barang di dalam plaza. Sebagian warga, kebanyakan anak-anak kecil dan remaja, terpancing masuk ke dalam gedung. Dalam situasi ada banyak warga di dalam, gedung tersebut dibakar oleh orang tak dikenal.

²⁹ Tim Relawan untuk Kemanusiaan (The Volunteers Team for Humanity) Early Documentation No. 3. The Rapes in the Series of Riots: The Climax of an Uncivilized Act of the Nation Life, 1998.

Tim Relawan untuk Kemanusiaan menemukan bahwa di tengah semua itu, terjadi aksi kekerasan seksual terhadap puluhan perempuan Tionghoa. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, sebenarnya diam-diam telah mengupayakan gerakan pendampingan terhadap para korban ini. Mereka menyadari, sampai saat ini sebagian besar korban belum tertangani. Juga belum ada advokasi yang terorganisasi untuk membantu para perempuan yang menjadi korban pelecehan dan perkosaan. Akhirnya berbagai organisasi dan individu dengan latar belakang dan kalangan yang beragam, sepakat membentuk Tim Relawan Kemanusiaan Divisi Perempuan.³⁰ Tim ini siap memberikan bantuan dari penanganan medis, pendampingan, shelter, terapi psikologis, jaminan keamanan, sampai bantuan hukum. Data yang dikumpulkan Tim Relawan Kemanusiaan Divisi Perempuan makin menunjukkan, betapa hak dan harkat perempuan, bahkan juga nyawa, menjadi tak berharga begitu kerusakan melanda. Tim Relawan Kemanusiaan Divisi Perempuan (TRuK) menjadikan Kalyanamitra sebagai sekretariat untuk pendampingan korban perkosaan di Jakarta.

Kalyanamitra dijadikan sekretariat karena merupakan bagian dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang diketuai Romo Sandi. Tim ini melakukan pekerjaan untuk mengungkap fakta, jumlah korban, siapa pelaku, modus, pola, dan berbagai hal di balik peristiwa Mei 1998.

Tindak kekerasan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998 itu membuat banyak orang terkejut dan prihatin. Setelah Soeharto tumbang, pada 15 Juli, 22 tokoh perempuan mendatangi istana negara untuk meminta pertanggung-jawaban negara. Atas tuntutan para pejuang hak perempuan akan pertanggungjawaban negara atas kejadian ini, tercapai kesepakatan dengan Presiden RI untuk mendirikan sebuah komisi independen di tingkat nasional yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia.

Presiden Habibie akhirnya mengeluarkan pernyataan penyesalan atas terjadinya tindak kekerasan tersebut. Ia kemudian juga mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan mengeluarkan keputusan presiden untuk mendirikan Komnas Perempuan.

TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk oleh Presiden Habibie untuk menginvestigasi kasus kerusuhan dan perkosaan, setelah mengklarifikasi hasil investigasi TRuK, menyimpulkan bahwa ada 52 perempuan yang diperkosa secara berkelompok, 14 perempuan mengalami perkosaan dan penganiayaan sekaligus, 10 perempuan mengalami penganiayaan seksual, dan 9 orang mengalami pelecehan seksual. Tragedi tersebut telah menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang beretnis Tionghoa eksodus ke negara-negara yang dianggap lebih mampu memberikan perlindungan dan rasa aman.

TGPF menegaskan bahwa ada indikasi keterlibatan aparat keamanan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerusuhan. Militer

³⁰ "Mereka Telah Kehilangan Segalanya", wawancara dengan Ita Fatia Nadia, www.oocities.org/capitolhill/4120/mi.html.

dan polisi juga dianggap bertanggung jawab membiarkan kerusuhan dan tindak kekerasan itu terjadi. Sampai saat ini, rekomendasi TGPF tidak pernah ditindaklanjuti pemerintah.

Kerja Penguatan Perempuan Pasca 1998

Upaya-upaya yang dilakukan hingga terjadinya pergantian pemerintahan di Indonesia, mempengaruhi pula pada kerja-kerja yang dilakukan oleh organisasi-organisasi serta aktivis perempuan. Kerja dampingan pada para korban kekerasan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 kemudian lebih mengaktifkan fokus kerja banyak kelompok, organisasi dan aktivis perempuan untuk melakukan pendampingan akibat adanya tindak kekerasan yang dialami perempuan. Di Jakarta organisasi yang sangat aktif melakukan pendampingan korban kekerasan antara lain adalah Mitra Perempuan, Serikat Perempuan Anti Kekerasan (Speak), LBH APIK, Puan Amal Hayati, LBH Jakarta, Kalyanamitra, Solidaritas Aksi untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (SIKAP), Pulih, Rumah Ibu dan lainnya. Jejaring ini kemudian berkembang bukan saja terdiri dari organisasi dan aktivis perempuan, tetapi juga mengajak mereka yang memiliki perhatian dari pihak Kepolisian, seperti para purnawirawan petinggi polisi perempuan serta istri para pejabat tinggi polisi, dan para profesional seperti para dokter ahli kandungan. Demikian pula dengan organisasi dan aktivis perempuan di pelbagai daerah juga aktif melakukan kerja pendampingan, seperti di Yogyakarta ada Rifka Annisa, di Bengkulu terdapat Cahaya Pe-

rempuan, di Padang dikenal Nurani Perempuan, di Surabaya ada Savy Amira dan di Palembang terdapat WCC Palembang.

Komnas Perempuan menyadari akan fungsinya kemudian dengan dukungan dari beberapa lembaga dana memfasilitasi terjadinya perjalanan anggota jejaring ini untuk mempelajari sebuah kerja pendampingan korban kekerasan yang lebih efisien dan melindungi korban. Kemudian diadakan sebuah kunjungan studi program pendampingan korban ke Manila, Kuala Lumpur dan Kolombo pada 2000. Ke tiga kota besar ini telah berhasil mendirikan sebuah program pendampingan yang disebut dengan “One Stop Crisis Centre”. Sebuah program yang memberikan pelayanan pendampingan agar korban kekerasan dengan satu kali datang sudah dapat mendapatkan penanganan secara lengkap. Program ini mensyaratkan kerja sama dengan Rumah Sakit yang menyediakan satu tempat bagi berlangsungnya sebuah pelayanan segera dari dokter ahli kandungan, psikolog, polisi perempuan dan ahli hukum. Sehingga, korban kekerasan tidak perlu cerita berulang-ulang mengenai tindak kekerasan yang dialaminya. Kunjungan studi inilah kemudian yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan untuk diterapkan di Jakarta sebagai kegiatan percontohan. Maka, kemudian pada tahun 2001 berdiri Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak yang dikenal dengan sebutan PKT RSCM di RSU Cipto Mangunkusumo, Jakarta. PKT RSCM ini berdiri dengan subsidi dari pemerintah daerah DKI Jakarta dan beberapa lembaga dana. Pada masanya PKT RSCM memberi angin segar bagi program kerja pendampingan korban kekerasan di beberapa daerah. Antara lain, RSU di Bandar

Lampung dan RSUD Dr. Soetomo kemudian juga mengikuti jejak mendirikan Pusat Krisis Terpadu ini. Namun, sangat disayangkan saat ini PKT tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana dahulu.

Para purnawirawan petinggi polisi perempuan dan istri pejabat tinggi polisi yang tergabung dalam Derap Warapsari kemudian pada tahun 2000 juga mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Hal ini dibuat untuk menghindari para korban kekerasan dan pendampingnya mengalami perlakuan yang kurang baik dan bahkan cenderung melecehkan dari para pemeriksa di kantor kepolisian manakala akan melaporkan tindak kekerasan yang dialami. RPK diadakan agar para korban kekerasan dan pendampingnya bisa dilayani dengan baik dalam sebuah ruangan tersendiri dan diterima oleh para polisi perempuan. RPK ini kemudian ditetapkan oleh Kapolri³¹ kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda No. Pol.: B/2070/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Pengawasan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Untuk itu perlu didirikan setidaknya pada setiap kantor kepolisian di tingkat Propinsi, Kota atau Kabupaten. Hingga saat ini, RPK sudah cukup banyak membantu para korban kekerasan baik perempuan maupun anak.

Organisasi-organisasi dan para aktivis perempuan yang sudah sejak beberapa waktu berjejaring bekerja melakukan saling dukung kerja pendampingan, kemudian dengan dimotori oleh LBH APIK secara bersa-

ma-sama membuat draf awal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini kemudian dibuat naskah akademiknya oleh para aktivis dan akademisi perempuan dari Universitas Brwajaya Malang untuk kemudian disosialisasikan ke seluruh pelosok Indonesia oleh jejaring organisasi dan aktivis perempuan yang aktif bekerja untuk isu kekerasan terhadap perempuan. Buah dari kerja keras ini dipetik pada tahun 2004, manakala buah pikir kolektif para aktivis dan organisasi perempuan ini disahkan menjadi UU PKDRT No. 23/2004.

Tidak lama setelah pergantian pemerintahan dari masa pemerintahan Orde Baru ke masa yang dikenal dengan pemerintahan masa Reformasi. Pada awal masa Reformasi berdiri sebuah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Secara organisasional penjelasannya dapat dibaca pada tulisan lain dalam jurnal ini.

Sebagaimana yang dituntut oleh para aktivis perempuan atas pertanggungjawaban pada peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Komisi ini bekerja untuk meneliti ragam bentuk kekerasan terhadap perempuan serta mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia. Komisi ini juga menjalankan fungsi untuk memberi masukan kepada pemerintah seputar undang-undang dan peraturan serta kebijakan yang mendiskriminasi perempuan hingga memonitor pelaksanaan penanganan peristiwa kekerasan terhadap perempuan di berbagai tempat di Indonesia. Lebih jauh lagi, komisi ini memberikan penguatan kapasitas baik bagi lembaga dan organisasi pe-

³¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

rempuan yang melakukan penanganan korban kekerasan juga kepada lembaga dan institusi pemerintah dalam menjalankan fungsi penanganan korban kekerasan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Masa pemerintahan yang baru ini menebarkan semangat untuk mengkaji kembali kerja untuk menghadirkan perbaikan kehidupan masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan aktivis perempuan. Pada Desember 1998 dengan menggunakan momentum peringatan Kongres Perempuan pertama, di Yogyakarta disepakati oleh aktivis perempuan yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk mendirikan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Organisasi ini lebih memilih untuk bekerja pada isu partisipasi politik perempuan di tingkat nasional dan regional. KPI merupakan salah satu organisasi yang secara gigih memperkenalkan politik atau pendidikan politik bagi perempuan. KPI mendorong perempuan untuk dapat duduk pada posisi pengambil keputusan sebagai anggota legislatif atau duduk dalam lembaga-lembaga pemerintah. Melalui advokasinya, KPI telah menyadarkan perempuan untuk memiliki hak politik dan dapat terlibat dalam proses perencanaan dan anggaran serta pembuatan kebijakan publik.

KPI memiliki keluasan dan kekuatan jaringan yang merupakan dasar dari banyak keberhasilan kerja advokasi. Ditambah lagi, besarnya jumlah anggota dan jaringan yang sudah terbangun dapat berpeluang bagi KPI untuk turut serta dalam gerakan bersama mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan pada gilirannya dapat menghadirkan keadilan dan demokrasi bagi perempuan.

Pemerintahan baru ini juga mendorong munculnya pendekatan dalam mengelola jalannya pemerintahan di Indonesia, sehingga masa pemerintahan baru ini juga dikenal dengan nama masa Desentralisasi atau Otonomi Daerah. Sebagai respon dari keinginan untuk memperbaiki jalannya pemerintahan, salah satunya adalah keinginan untuk menghadirkan tata pemerintahan yang lebih baik. Namun, pengertian tata pemerintahan yang baik seolah dipandang sudah mewakili kepentingan semua golongan. Kenyataannya, keadilan dan kesetaraan gender tidak secara eksplisit disebutkan sebagai sebuah prinsip dalam tata pemerintahan yang baik, sehingga suara dan kepentingan perempuan tidak terwakili dalam konsep tata pemerintahan. Atas dasar inilah kemudian pada masa pasca 1998, tepatnya tahun 2002 sekelompok aktivis perempuan mendirikan sebuah lembaga yang memfokuskan kerjanya pada kerja penelitian mengenai dampak desentralisasi terhadap kehidupan perempuan. Lembaga ini bernama Women Research Institute (WRI).

Dalam penilaian WRI ada tiga hal yang membuat perempuan terpinggirkan dalam kancah tata pemerintahan. Pertama, sempitnya akses perempuan terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan; kedua, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan; ketiga, rendahnya kapasitas wakil perempuan dalam mempengaruhi kebijakan formal dan informal. ketiga hal tersebut merupakan hambatan utama perempuan untuk bisa berkiprah dalam kancah tata pemerintahan. Untuk itu, WRI melakukan penelitian dan pengkajian yang berhubungan dengan upaya untuk memperluas akses perempuan terhadap

sumber daya dan pengambilan keputusan, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan memberdayakan para wakil perempuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Penelitian dan pengkajian WRI menggunakan metodologi feminis. Metode feminis dianggap dapat melihat dan menyuarakan kepentingan perempuan karena berangkat dari pengalaman perempuan.

Berbagai penelitian tentang posisi dan kondisi perempuan yang ada menunjukkan bahwa metodologi dan analisa yang digunakan belum berperspektif gender. Akibatnya perempuan sering dipinggirkan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karenanya WRI bekerja dalam memperjuangkan kesadaran kritis perempuan dan laki-laki, bahwa persoalan privat sama pentingnya dengan persoalan publik (*personal is political*). WRI juga mengkaji dan mengangkat pentingnya peningkatan akses, jumlah dan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, agar kebutuhan dan kepentingan perempuan dapat disuarakan. WRI juga melihat pentingnya mengkaji dan mendorong partisipasi politik perempuan dengan memperhatikan capaian kuota partisipasi politik perempuan. Selain itu, fokus dengan isu kesehatan reproduksi terkait efektifitas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sebagai upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

Sebagai lembaga penelitian, WRI berupaya menyebarluaskan perlunya penggunaan metodologi penelitian feminis agar kehidupan yang lebih baik bagi perempuan dapat terwujud di Indonesia.

Penguatan Ekonomi Perempuan sebagai Penyadaran Hak Perempuan

Ketika krisis ekonomi merebak pada 1998, kelompok perempuan melakukan konsolidasi dengan berbagai LSM lain untuk membantu para keluarga yang terlibas krisis ekonomi. Mereka mencari bantuan dengan menggalang dana dari berbagai donatur, agar bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kelompok ini mendorong perempuan untuk bangkit dari problem ekonomi-politik yang langsung mereka alami. Hal ini dilakukan karena bisa membangun satu kesadaran untuk melawan. Para perempuan aktivis melakukan proses pendidikan bagi para perempuan dalam arti penyadaran akan ketertindasan perempuan. Seperti misalnya, Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Wanita (PPSW) dan Asosiasi Perempuan Pengusaha Usaha Kecil (ASPPUK), yang mendirikan Usaha Bersama dan Koperasi untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok, dan beranggotakan perempuan yang memiliki kesulitan ekonomi. Ketika krisis ekonomi pada 1998 terjadi, organisasi seperti Suara Ibu Peduli dan Kalyanamitra juga melakukan kegiatan serupa untuk membantu perempuan miskin mampu mengakses kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Suara Ibu Peduli hingga sekarang masih melanjutkan kegiatannya untuk memberdayakan para ibu agar memiliki akses pada pembelian bahan pokok. Kegiatannya sekarang sudah bertambah dengan memberdayakan para ibu untuk menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya melalui forum-forum umum di tingkat komunitas maupun publik, serta memiliki kesadaran

akan isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan dan partisipasi politik perempuan.³²

Kalyanamitra pada 1998 mendirikan koperasi, bergabung dengan beberapa organisasi seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jaringan Kerja Budaya, dan Institut Sosial Jakarta. Koperasi memang bertujuan untuk membuka akses bagi perempuan dan keluarganya yang sudah tidak mampu lagi membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula. Sekarang koperasi ini sudah tidak ada lagi, dan kegiatan penguatan ekonomi Kalyanamitra lebih ditujukan untuk dukungan bagi keluarga korban kekerasan terhadap perempuan, serta perempuan yang berada di wilayah miskin. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Kalyanamitra dapat membaca tulisan lain pada jurnal ini.

Ada pandangan bahwa kegiatan seperti ini dianggap kembali ke sektor domestik, dan tidak sejalan dengan konsep-konsep kesetaraan yang selama ini diperjuangkan. Kegiatan yang lebih bersifat kemanusiaan ini, kenyataannya terasa lebih merangkul banyak pihak dari berbagai kalangan, juga para aktivis yang selama ini lebih banyak bergerak di bidang sosial. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti yang terjadi pada masa krisis ekonomi, amatlah penting untuk bersinergi dan bekerja sama serta saling menguatkan.

Akan tetapi benarkah upaya pemberdayaan ekonomi (baca: domestik) yang saat ini banyak dilakukan oleh para feminis ha-

nya semata-mata berurusan dengan persoalan perut?³³

PPSW dan ASPPUK menggunakan kegiatan penguatan ekonomi sebagai pintu masuk membahas persoalan-persoalan lain yang dihadapi kaum perempuan. Para perempuan yang kurang beruntung secara ekonomi juga mendapatkan pendidikan mengenai hak-hak perempuan, seperti penjelasan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya untuk mampu mengelola keuangan keluarga. Kesangsian banyak aktivis dan organisasi perempuan terhadap kegiatan penguatan ekonomi perempuan, segera patah manakala krisis ekonomi menunjukkan bahwa imbasnya juga terkena langsung pada para laki-laki kepala rumah tangga. Mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatannya, sedangkan para perempuan yang terlibat dalam kegiatan organisasi seperti PPSW dan ASPPUK mampu bertahan dan menyelamatkan keluarganya dari deraan krisis ekonomi. Di sini terlihat bahwa perempuan terlatih menjadi mandiri berkat alternatif sumber ekonomi yang dipelajarinya dari kedua organisasi tersebut. Membantu perempuan untuk mempunyai hak ekonomi tentunya merupakan salah satu capaian yang diperjuangkan oleh para feminis. Gambaran mengenai PPSW dan ASPPUK dijelaskan lebih lengkap pada bagian lain dalam jurnal ini.

Penutup

Menelusuri kerja para aktivis dan organisasi perempuan di Indonesia, dari kurun waktu

³² Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli, Nur Iman Subono (ed.), Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 1999.

³³ Lihat "Fajar Baru Gerakan Kaum Ibu", artikel, Maria Hartiningsih, KOMPAS, 20 Desember 1998.

mulai masa penjajahan baik oleh kolonial Belanda dan Jepang, pada waktu era kemerdekaan, hingga Orde Baru sampai 1998, tampak bahwa sudah amat banyak yang dilakukan oleh kaum perempuan di Indonesia.

Tulisan ini mencoba memahami apa yang terjadi dengan menggunakan cara pandang yang dalam wilayah teori sosial dikenal dengan perspektif feminisme. Sebuah perspektif yang mempertimbangkan perempuan dan relasi gender dalam tatanan sosial masyarakat. Kaum feminis menganggap hampir seluruh persoalan sosial seperti ide-ide tentang negara atau politik semata-mata merupakan representasi kekuasaan patriarki.

Agung Ayu dalam pidato kebudayaannya menyebutkan:³⁴

“Ketika menimbang tatanan patriarkal kolonialisme dan patriarkhi yang diperbaharui di masa kemerdekaan, kita sebenarnya berurusan dengan soal-soal yang sangat tua. Hampir setiap upaya penataan kehidupan masyarakat bertumpu pada kendali atas tubuh dan seksualitas perempuan. Bentuk penindasan terhadap perempuan berubah-ubah dari jaman ke jaman dan berbeda sifat antara kelompok masyarakat satu dan lainnya. Namun, yang mencengangkan adalah betapa setiap kekuasaan yang menindas melihat gairah seksual perempuan dan kemampuannya mengandung serta melahirkan manusia baru sebagai kekuatan sekaligus ancaman bagi keamanan suatu sistem sosial dan ekonomi”.

Kerja-kerja yang dilakukan oleh para aktivis dan kelompok perempuan pada tiap kurun waktu tersebut merupakan upaya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, para aktivis dan kelompok atau organisasi perempuan melihat bahwa penjajahan melahirkan situasi yang membojorkan. Pada masa itu, sekolah hanya tersedia untuk kaum bangsawan. Namun, anak perempuan secara khusus harus berhenti sekolah ketika sudah mengalami menstruasi. Perempuan dipingit dan lebih dipersiapkan untuk menjadi isteri dan ibu yang baik, dengan dilatih di dalam rumah mengenai semua yang berkaitan dengan kerumaha-tanggaan. Perempuan yang bukan dari kalangan bangsawan tidak mendapatkan akses pendidikan dan harus bekerja membantu keluarganya agar dapat bertahan hidup.

Oleh karenanya, para aktivis dan organisasi perempuan mengidentifikasi bahwa pendidikan, peraturan yang melindungi perempuan dan anak dalam perkawinan serta penjajahan adalah hal-hal yang harus diadakan dan dihadapi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perempuan. Kebanyakan organisasi perempuan kemudian melakukan kegiatan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah bagi perempuan, seperti yang diawali oleh Kartini. Karena maraknya poligami pada saat itu (dan hingga hari ini), aktivis dan organisasi perempuan memperjuangkan disebutkannya ta'lik (janji nikah) pada waktu akad nikah, serta tunjangan untuk janda dan anak piatu dari pegawai kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, muncul pula fenomena Nyai dan *co-habitants* (pasangan untuk tinggal bersama) sebagai

³⁴ Lihat “Kita, Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan”, disampaikan pada Pidato Kebudayaan Anak Agung Ayu Ratih pada 10 November 2008, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

langkah penguasa kolonial menata pola hubungan antar gender, termasuk hubungan seksual dan perkawinan. Di masa penjajahan kolonial, kendali terhadap hubungan seksual erat hubungannya dengan kebutuhan mereka memaksimalkan keuntungan dengan menghemat pengeluaran bagi kesejahteraan mereka yang didatangkan dari Belanda untuk bekerja bagi pemerintahan kolonial. Dengan sengaja pemerintah kolonial mendorong praktik pernyaaian, karena hidup bersama nyai jauh lebih murah daripada mendatangkan istri dari Belanda. Para nyai mampu memberikan layanan seksual sekaligus layanan kerumahtanggaan lainnya di luar tanggungan perusahaan.³⁵

Pada masa penjajahan Jepang, fenomena Nyai dan *co-habitants* ini muncul dalam bentuknya yang lain, yaitu *jugun ianfu* atau *comfort women*, sebuah kondisi dalam mana perempuan dijadikan penghibur bagi para serdadu penjajah Jepang. Para *jugun ianfu* mengalami kekerasan. Hal ini diperjuangkan agar pemerintah Jepang mengganti rugi atas apa yang dialami para perempuan Indonesia yang menjadi *jugun ianfu*. Namun, hingga saat ini upaya itu masih belum berhasil.

Fenomena ini, baik Nyai, *co-habitants*, *jugun ianfu*, kemudian juga dilihat sebagai akibat dari rendahnya pendidikan bagi perempuan dan penjajahan. Itulah sebabnya para aktivis dan organisasi perempuan juga turut serta dalam banyak kerja perjuangan mengusir penjajah dari Indonesia. Mereka juga terlibat dalam gerakan nasionalis, mengangkat permasalahan betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Setelah merdeka dari penjajahan baik Belanda maupun Jepang, muncul pertanyaan: Apakah setelah bebas dari penjajahan, perempuan juga akan terbebaskan dari permasalahan yang dihadapinya? Ternyata, permasalahan yang dihadapi perempuan masih tetap saja ada. Meskipun perempuan sekarang sudah memiliki akses pada pendidikan, perempuan masih menghadapi permasalahan lain. Posisi perempuan di mata hukum dan kebijakan masih perlu diperjuangkan. Itulah sebabnya, terutama dalam hubungannya dengan perkawinan, para aktivis dan organisasi perempuan bekerja untuk dilahirkannya Undang-Undang Perkawinan. Meskipun kerja untuk hukum yang melindungi perempuan dalam perkawinan ini sudah diawali dari tahun 1899, Undang-Undang tersebut baru disahkan pada tahun 1979. Membutuhkan waktu memperjuangkan selama 75 tahun dari kerja berkesinambungan yang diturunkan lintas generasi aktivis dan organisasi perempuan.

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, pada masa 1950-an hingga 1960-an, organisasi perempuan Gerwani mencoba menjawab permasalahan perempuan lebih luas dari soal perkawinan dan pendidikan. Gerwani mencoba menjawab permasalahan perempuan dan kerja, termasuk perempuan yang bekerja sebagai petani, partisipasi politik perempuan, kekerasan terhadap perempuan hingga pendirian koperasi sebagai upaya menghadirkan hak ekonomi perempuan. Namun, dengan bergantinya kekuasaan pada 1965, Gerwani dilarang. Dan, sejak itu hingga kurun waktu 1980-an aktivis dan organisasi perempuan termakan oleh propaganda negatif mengenai betapa buruk dan jahatnya perempuan yang aktif dan bicara

³⁵ *Ibid* dan juga lihat "In the Company's Shadow: A History of Plantation Women and Labor Policy in North Sumatra, hal. 43 Working Paper, Ann Stoler, 1979.

politik seperti Gerwani. Agung Ayu³⁶ secara tepat menunjukkan hal itu sebagai berikut:

“Pemerintah Orde Baru tidak hanya menghancurkan Gerwani tetapi juga merebut otoritas organisasi-organisasi perempuan lainnya dalam menentukan gerak mereka. Ide-ide emansipatoris tentang kemandirian perempuan yang belum selesai diperbincangkan sejak dekade ke-2 abad ke-20 dikooptasi dan diberi bentuk yang paling konservatif: ‘peran ganda wanita’. Pemerintah kemudian membentuk organisasi-organisasi istri pegawai yang strukturnya mengikuti birokrasi pemerintahan sipil dan militer dan kepemimpinannya sejalan dengan jabatan suami.”

Organisasi-organisasi perempuan pada masa pasca Reformasi menambahkan warna dari kerja keras para pendahulunya. Organisasi tersebut bergerak pada berbagai isu dari mengurus persoalan domestik dan seksualitas, terutama dalam kaitannya dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan, penguatan ekonomi perempuan hingga melakukan advokasi pentingnya persoalan representasi politik perempuan.

Apabila kita cermati, perjalanan kerja keras aktivis dan organisasi perempuan di Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke 19. Tanpa henti dan lelah, para aktivis perempuan telah bekerja untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kaum perempuan. 200 tahun, bukanlah waktu yang main-main. Perempuan berjuang untuk memperoleh pengakuan baik atas kerjanya di wila-

yah domestik maupun publik. Meskipun, manakala kerja di lingkup domestik ranah persoalan perempuan yang terkait dengan seksualitas terutama dalam kaitannya isu pilihan orientasi seksual juga ketimpangan relasi gender di ranah privat seperti marital rape dan kekerasan dalam hubungan pacaran masih saja meninggalkan ruang yang belum betul-betul bisa diatasi. Agaknya, apa yang disampaikan Kartini memang benar adanya “..bahwa belenggu terhadap perempuan, baru akan sirna tiga atau empat generasi setelahnya.”

Dari kilas balik cerita perempuan beraktivitas ini jelas terlihat bahwa perempuan selalu punya cara untuk bertahan, melawan dan mencari celah-celah pembebasan bagi permasalahan yang mengungkung dirinya.***

Daftar Pustaka

- Aisyiyah, [http://www.muhammadiyah.or.id / content-199-det-aisyiyah.html](http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html), 6 Februari 2013.
- Ayu Ratih, Anak Agung. 2008. “Kita, Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan”. Pidato Kebudayaan 10 November 2008. Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
- Blackburn, Susan. Maret 2009. “Perempuan dan Negara Dalam Era Indonesia Modern”, edisi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yayasan Kalyanamitra, Jakarta.
- Dwi Lestariningsih, Amurwani. September 2011. “Gerwani. Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan”. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

³⁶ Lihat “Kita, Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan”, disampaikan pada Pidato Kebudayaan Anak Agung Ayu Ratih pada 10 November 2008, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

- “Gerakan Perempuan Perlu Meredefinisi Strategi, Membuat Pola Baru”, <http://www.komnas-perempuan.or.id/2010/05/yuniyanti-chuzaifah-gerakan-perempuan-perlu-meredefinisi-strategi-membuat-pola-baru>.
- Hafidz, Wardah dan Tati Krisnawaty. 1990. “Perempuan dan Pembangunan. Studi Kebijakan tentang Kedudukan Perempuan dalam Proses Pembangunan di Indonesia”. tulisan ini dipresentasikan dan didiseminasikan pada Pertemuan Mitra Hivos pada April 1990 di Lombok Timur, NTB.
- Hartiningih, Maria. 1998. “Fajar Baru Gerakan Kaum Ibu”. KOMPAS, 20 Desember 1998.
- Lasmina, Umi. 1996. “Demonstrasi Wanita 17 Desember 1953 Sikap Perwari Menolak PP 19 Th. 1952”, (Skripsi S1) Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, [http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20156863 &lokasi=lokal](http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20156863&lokasi=lokal).
- Mashadi, Mahfirlana, “When Mothers Speak, Milk Prices Come Down - And So Does a Government”, <http://www.mercycorps.org/countries/indonesia/10172>
- “Mereka Telah Kehilangan Segalanya”, wawancara dengan Ita Fatia Nadia, www.oocities.org/capitolhill/4120/mi.html.
- “Organisasi Perempuan Harus Mengubah Strategi Gerakan”, <http://www.komnas-perempuan.or.id/2010/05/ruth-indiyah-rahayu-organisasi-perempuan-harus-mengubah-strategi-gerakan>.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- “Perkebunan Dalam Lintas Zaman”, <http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/inventaris-berita/87-lintas-zaman-perkebunan.html>, 6 Februari 2013.
- “Sejarah Gerwani”, <http://indication-dawam.blogspot.com/2012/04/sejarah-gerwani.html>, 11 April 2012.
- “Sejarah Kelahiran Fatayat NU”, dalam <http://fatayat-nu.blogspot.com/2011/05/sejarah-kelahiran-fatayat-nu.html>, 28 Mei 2011.
- Stoler, Ann. 1979. *In the Company's Shadow: A History of Plantation Women and Labor Policy in North Sumatera*, hal. 43 Working Paper.
- Stuers, Cora Vreede-de. April 2008. “Sejarah Perempuan Indonesia. Gerakan dan Pencapaian”, edisi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Subono, Nur Iman (ed.) 1999. *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli. Yayasan Jurnal Perempuan*, Jakarta.
- Suryochondro, Sukanti. 1984. “Potret Gerakan Wanita di Indonesia”. Rajawali, Jakarta.
- Tim Relawan untuk Kemanusiaan (The Volunteers Team for Humanity) Early Documentation No. 3. *The Rapes in the Series of Riots: The Climax of an Uncivilized Act of the Nation Life*, 1998.
- Wieringa, Saskia. Agustus 1999. “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”, edisi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Garba Budaya dan Yayasan Kalyanamitra, Jakarta.
- Yulianto, Vissia Ita. 2004. “Aku Mau... Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903”. Kompas, April 2004.

Membaca-ulang Politik: Pendekatan Feminisme dan Metodologi Penelitian

Chusnul Mar'iyah

Perubahan politik 1998 di Indonesia dari rezim otoriter ke rezim demokratis memberikan ruang baru bagi para scholars feminist dan activist untuk membangun data-data ilmiah tentang partisipasi perempuan. Banyak penelitian dilakukan, namun belum banyak perdebatan konsep, metodologi dalam melakukan penelitian yang sarat dengan bias gender. Tulisan ini ingin melihat bagaimana secara konsep para peneliti feminis dan aktivis berargumentasi untuk membaca kembali pemikiran-pemikiran politik mainstream atau lebih tepatnya politik male-stream mempengaruhi cara pandang dalam perkembangan Ilmu Politik. Se jauh mana pilihan metodologi yang tepat untuk menjelaskan fenomena marginalisasi perempuan? Metodologi menjadi bagian terpenting dalam bangunan Ilmu Pengetahuan. Penjelasan metodologi yang tepat dapat memberikan gambaran dan analisis persoalan secara tepat dengan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendahuluan

Pada awal reformasi menjelang Pemilu 1999, Penulis bersama dengan para aktivis perempuan terus-menerus berkampanye tentang kuota perempuan. Studi survei untuk melihat persoalan perempuan sebagaimana dihadapi oleh negara mengatakan bahwa hanya satu persen responden yang mengatakan masalah perempuan lebih penting dibandingkan dengan masalah negara. Mengapa? Instrumen survei yang dipergunakan

masih sangat dipengaruhi oleh patriarki. Setelah proses diskusi terjadi, ternyata survei yang menggunakan instrumen daftar pertanyaan yang bersifat *probing* menanyakan secara langsung: “Lebih penting manakah, urusan negara dibandingkan urusan perempuan?” Tentu saja para responden lebih banyak menjawab bahwa masalah negara lebih penting dibandingkan dengan masalah perempuan. Merumuskan instrumen pertanyaan untuk penelitian mengenai masalah perempuan membutuhkan pemahaman khu-

sus. Misalnya, apa indikator definisi masalah perempuan? Apabila pertanyaannya dipecah ke dalam indikator atau variabel yang mendefinisikan konsep masalah perempuan, maka hasilnya akan berbeda. Di antara indikator pertanyaan masalah perempuan adalah: Apakah responden menganggap penting kalau harga beras, cabai, dan daging sapi murah? Apakah jika anak sakit, membawa anak ke Rumah Sakit dan mendapat pelayanan gratis adalah hal yang penting bagi responden? Apakah pendidikan gratis untuk anak penting? Pertanyaan-pertanyaan dengan indikator semacam itu akan lebih menjelaskan kepentingan perempuan dalam masalah pendidikan, kesehatan dan harga bahan pokok, yang juga merupakan bagian penting di dalam deretan masalah negara. Dengan demikian, hasil survei yang mengatakan hanya satu persen responden menyatakan bahwa masalah negara lebih penting dibandingkan dengan masalah perempuan tidak dapat diekstrapolasi dan diambil kesimpulan bahwa masalah perempuan tidak penting.

Dari pengalaman tersebut, melakukan penelitian mengenai topik perempuan membutuhkan pemahaman konsep-konsep yang tidak konvensional. Dengan kata lain, dominasi ideologi patriarki menentukan fungsi peran perempuan dan peran laki-laki dan memberikan privilese kepada laki-laki, di samping menghadirkan konstruksi budaya yang menentukan peran perempuan di ranah domestik dan peran laki-laki di ranah publik. Oleh karena itu, memahami studi tentang perempuan membutuhkan pemahaman ideologi yang ramah gender.

Perkembangan *polling* dan survei menjadi bagian penting dan diyakini dalam pem-

buatan kebijakan. Hal ini merupakan perkembangan positif, namun kita tetap harus memperhatikan isu kesensitifan terhadap masalah, misalnya gender. Tulisan ini merupakan usaha untuk pembacaan-kembali terhadap cara memahami politik dengan menggunakan perspektif perempuan, dan penelusuran sejauh mana adanya pendekatan feminisme dalam memahami peran perempuan dalam politik. Lebih jauh lagi, perlu ada kajian terhadap bagaimana penelitian dilakukan untuk memahami politik, negara dan perempuan, terutama dalam hal metodologinya. Adakah persoalan tentang pemahaman masalah politik dan perempuan disebabkan oleh instrumen survei yang tidak memiliki perspektif perempuan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami telusuri dalam artikel ini.

‘Re-reading Political Theory’ dari Perspektif Feminis

Dekade terakhir abad ke-20 ditandai dengan demokratisasi di berbagai negara dan perubahan rezim politik dari otoritarian ke demokrasi. Demikian pula gelombang gerakan feminisme dalam politik kontemporer terjadi pada 1970-an. Para ahli politik yang sekaligus feminis, terlibat dalam gerakan untuk menuliskan-kembali sejarah politik perempuan dan warisan budayanya dengan perspektif baru yang ramah gender. Dalam pemikiran politiknya, para feminis menemukan kembali pemikiran-pemikiran yang muncul pada abad 17 yang memperhatikan hubungan sosial dan masalah gender. Misalnya, Mary Wollstonecraft (1759-1797), yang menulis tentang sejarah kerangka ge-

rakan liberalisme dengan memperhatikan cara pandang perempuan.¹

Dalam tradisi Ilmu Politik, para pemikir politik telah banyak menulis tentang masalah perempuan, namun dengan perspektif memberikan legitimasi tentang peran domestik perempuan, memberikan justifikasi terhadap subordinasi perempuan, serta ketidakmampuan mereka di ranah publik (*public invisibility*). Politik secara konsisten dapat dikatakan merupakan ranah laki-laki (*male preserve*). Dengan demikian itu memberikan legitimasi terhadap peminggiran perempuan, dengan alasan ketidakmampuan perempuan, atau tidak adanya kapasitas yang dimiliki oleh perempuan di bidang politik, misalnya dengan kalimat-kalimat seperti: *their lack of reason, autonomy, stamina, time* (kekurangan penalaran, kemandirian, keuletan, waktu di kalangan kaum perempuan) karena kodratnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, pemisahan tugas antara ranah domestik dan ranah publik berakibat terhadap dipercayainya bahwa perempuan tidak mendapatkan posisi di politik, dan bahkan dianggap tidak mungkin bisa bekerja di ranah publik. Memperhatikan teks-teks atau tradisi pemikiran-pemikiran politik tersebut menyebabkan perempuan tidak memiliki posisi dan kekuasaan di masyarakat.

Dalam perdebatan tulisan yang dikemukakan oleh para feminis untuk merespons

persoalan tradisi penulisan pemikiran-pemikiran politik yang bias gender tersebut, di satu sisi, ada sikap untuk secara radikal menolak dan meninggalkan tulisan-tulisan atau pemikiran-pemikiran politik yang patriarkis, dan mencari pemikiran baru sebagai alternatif. Di sisi lain, mereka menemukan bahwa tradisi tulisan tersebut mengandung bias laki-laki, bahkan memiliki prasangka (*prejudice*) yang sangat kuat. Dengan demikian, para feminis mengambil kesimpulan bahwa dikarenakan tulisan-tulisan tersebut bias dan penuh *prejudice* terhadap perempuan, maka tidak dapat dibiarkan saja. Untuk memahami konsep-konsep politik, yang diperlukan pertama-tama adalah tetap mempergunakan konsep-konsep atau terminologi yang ada dalam kerangka pemikiran perempuan. Liberalisasi, antara lain, merupakan wacana (*discourse*) penting dalam konsep politik. Konsep-konsep lainnya yang sangat berhubungan dengan perjuangan feminis dalam memahami partisipasi perempuan di ranah politik serta hak-haknya sebagai warga negara terutama dalam kerangka pemikiran politik kontemporer adalah kebebasan, kesetaraan, keadilan, pemberian izin untuk terlibat, emansipasi, solidaritas, kekuasaan, dan ketertindasan. Konsep-konsep tersebut menjadi konsep utama dalam tradisi penulisan politik selama berabad-abad. Maka, semua teori yang dibangun oleh feminis, terutama dalam kerangka politik, tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep tersebut.

Pemikiran alternatif yang dikemukakan oleh para feminis menjadi wacana yang menarik apabila dihadapkan dengan politik arus-utama (atau yang disebut sebagai *malestream* = arus laki-laki), seperti organisasi yang hirarkis dan birokratis. Dalam konteks

¹ Mary Wollstonecraft, "Of the Pernicious Which Arise from Unnatural Distinctions Established in Society," dalam Ann E. Cuud and Robin O. Andreasen, *Feminist Theory: A Philosophical Anthology*, Madden, MA, USA: Blackwell Publishing Ltd, 2005. Juga lihat Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Women*, Penguin, 1975. Lihat analisis Diana Coole, "Re-reading Political Theory from a Women's Perspective", *Political Studies*, 1986, XXXIV, halaman 129-148.

tersebut, kekuasaan hanya dapat diakses oleh kelompok elit. Di samping itu, teori politik tidak dapat dipisahkan dari masalah kelembagaan yang menjadi manifestasi dari kekuasaan. Pendekatan tradisional dalam Ilmu Politik adalah pendekatan kelembagaan. Posisi perempuan sangat marginal dalam kelembagaan politik. Kritik feminisme terhadap persoalan kelembagaan dan pemahaman terhadap asumsi yang dibangun sangatlah tegas. Susan Okin menyatakan:

It is important to realize from the outset that the analysis and criticism of the thoughts of political theorists of the past is not an arcane academic pursuit, but an important means of comprehending and laying bare the assumptions behind deeply rooted modes of thought that continues to affect people's lives in major ways.²

(Sangat penting untuk disadari sejak awal bahwa analisis dan kritikan atas pemikiran teoritis politik dari masa lalu bukanlah suatu penelusuran akademis sia-sia semata, namun merupakan sarana penting untuk memahami dan menelanjangi asumsi-asumsi di balik cara berpikir yang sudah berakar kuat yang masih terus mempengaruhi kehidupan masyarakat secara besar-besaran).

Dengan memperhatikan berbagai perdebatan yang dilakukan oleh para akademisi atau pengkaji feminisme (*feminist scholars*), memiliki relasi yang positif dengan pemikiran politik arus-utama (yang *male-stream*) untuk dipergunakan, memberikan alternatif pemikiran yang lebih ramah gender. Sementara itu, pada saat yang sama, itu bisa dipergunakan untuk mengkritisi gender bias yang

ada dalam tradisi pemikiran politik dan kelembagaan politik yang ada. Melakukan kritik atas bias gender terhadap konsep-konsep politik yang ada memungkinkan untuk memunculkan ideologi baru tentang subordinasi perempuan. Lebih jauh lagi, para feminis menemukan pemahaman yang baik secara lebih dalam tentang pelecehan seksual yang ada dalam masyarakat patriarkis.

Studi-studi yang dilakukan oleh para *feminist scholars* telah memberikan kontribusi terhadap bangunan teori-teori baru, atau kritik terhadap teori *male-stream* dalam perkembangan pemahaman fenomena politik. Para pemikir politik fenomenal, dari Plato sampai J.S. Mills, dapat kemudian dibaca kembali untuk memperbaiki distorsi dalam pengkajian ilmiah yang konvensional.³ Pemikir feminis yang melakukan pembacaan-kembali ikut menyumbang terhadap inkonsistensi dalam khasanah penulisan pemikiran politik, karena tidak memperhatikan posisi perempuan, terutama yang berhubungan dengan asumsi dan kontradiksi di dalam doktrin patriarki. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran politik yang sudah berkembang sesungguhnya masih terus terbuka dan memberikan inspirasi bagi gerakan sosial baru dan berbagai permasalahannya, serta terbuka untuk pengembangan lebih lanjut dengan perspektif yang pluralis. Feminisme memberikan kontribusi kepada pemahaman kita terhadap pemikiran politik masa lalu.

Dalam beberapa dekade terakhir, para teoritis politik membuat subyek untuk

² Susan Moller Okin, *Women in Western Political Thought*, London: Vigaro, 1980, halaman 3.

³ Diana Coole, "Re-reading Political Theory From a Women's Perspective", *Political Studies*, 1986, XXXIV, halaman 131.

membaca-kembali teks dari perspektif perempuan. Di antaranya, ada Susan Moller Okin yang menulis tentang *Women in Western Political Thought* (1980), Jean Bethke Elstain yang menulis *Public Man, Private Women* (1981), dan Martha Lee Osborne penulis *Women in Western Thought* (1979). Konsep demokrasi itu sendiri diyakini sebagai tuntutan agar terdapat keterwakilan perempuan, seperti yang dikatakan oleh Anne Phillips; kehadiran politik (*political presence*); kesamaan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan; serta tuntutan agar masyarakat memperhatikan kepentingan kelompok etnik yang membangun masyarakat negara tersebut. Penjelasan menarik yang dikemukakan oleh Anne Phillips adalah bahwa politik gagasan (*the politics of ideas*) bagi warga negara perempuan dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dalam konteks ideologi patriarki dapat dilakukan oleh laki-laki dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Namun demikian, konsep demokrasi dalam pembahasan tentang politik kehadiran (*the politics of presence*) menjadi tantangan bagi Ilmuwan Politik untuk menjelaskan sejauh mana keterwakilan perempuan harus dilakukan oleh wakil-wakil perempuan itu sendiri.

‘Women in Development’ vs ‘Gender and Development’

Di masa Orde Baru, pembangunan menjadi modal politik yang sangat penting di Indonesia. Soeharto sebagai presiden mendapat penyematan sebagai “Bapak Pembangunan”. Paling tidak, peningkatan pendidikan sebagai kebijakan politik Orde Baru pada tahun 1985 memberikan hasil yang cukup signifikan sekitar jumlah perempuan yang

lulus sekolah. Persoalannya adalah perdebatan mengenai apakah pembangunan tersebut ramah gender dan apakah perempuan mendapat posisi yang penting dalam proses menjadi warga negara? Di ranah internasional, fokus yang diberikan kepada kesejahteraan perempuan sebagai konsep ideologi liberal tentang hak asasi manusia⁴ terbukti antara lain dengan dirumuskannya konvensi-konvensi PBB seperti Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Pihak-pihak Lain (1949); Konvensi Imbalan Setara bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan Setara (1951); dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (1952).⁵ Dalam perdebatan pembangunan di Indonesia, yang menarik dan dianggap cukup berhasil adalah diskursus tentang kebijakan Keluarga Berencana. Perempuan, tentu saja, menjadi target dari kebijakan tersebut.

Bahkan dalam perkembangan diskursus pembangunan yang dicanangkan oleh PBB, kebijakan dasawarsa pembangunan PBB yang pertama melakukan identifikasi tentang tidak adanya prinsip egalitarian dalam politik dan ekonomi. Dalam kebijakan tersebut, tampak bahwa tidak ada penyebutan tentang perempuan secara khusus. Pada 1962, Sidang Umum PBB meminta agar Komisi Untuk Status Perempuan membuat laporan tentang peran perempuan dalam pembangunan. Baru pada 1974 muncul laporan, dan kemudian beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Boserup (1989)

⁴ Shirin M. Rai, *Gender and the Political Economy of Development*, Cambridge, UK: Polity Press, 2002, halaman 51.

⁵ *Ibid*, lihat juga Wallace with March, 1991 halaman 1.

dan Tinker (1997), tentang Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi.⁶

Studi Boserup mengkritisi istilah pembangunan, yang diartikan sebagai modernisasi. Lebih lanjut Boserup mempertanyakan persoalan kenyataan bahwa sebagian besar perempuan bekerja di pertanian, yang menyebabkan marginalisasi status perempuan.

*Boserup argued that women's status varies with the nature of productive activity and their involvement in it. She argued that women are marginalized in the economy because they gain less than men in their roles as wage workers, farmers and traders.*⁷

(Boserup mengajukan argumentasi bahwa status perempuan bergeser sesuai dengan sifat kegiatan produksi dan keterlibatan perempuan di dalam kegiatan tersebut. Ia berkilah bahwa perempuan termarginalkan di dalam perekonomian karena perempuan menerima imbalan lebih sedikit dibandingkan laki-laki dalam perannya sebagai pencari nafkah, petani dan pedagang.)

Kritik terhadap pandangan Boserup mengamati asumsi di dalam pandangan Boserup, yang kurang memperhatikan bahwa proses akumulasi kapital sudah terjadi sejak periode kolonisasi di negara-negara dunia ketiga, yang memiliki dampak marginalisasi terhadap perempuan yang secara sosial berbeda kelas. Meskipun demikian, sumbangan Boserup penting untuk dilihat bahwa untuk

meningkatkan kompetisi perempuan, perlu meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan.⁸ Persoalan konsep “Perempuan dalam Pembangunan” (*Women in Development*) adalah bahwa pemikirannya lebih mengarah kepada pemahaman meningkatkan perempuan secara individu, dan bukannya mencari akar dari persoalan perempuan akibat relasi sosial yang tidak seimbang, atau posisi perempuan sebagai subordinat.

Perkembangan berikutnya adalah pendekatan melalui kebutuhan pokok, yang diartikulasikan pada tahun 1970-an. Dalam konteks ini, indikator pertumbuhan dan pendapatan merupakan isu utama. Secara metodologi, hal tersebut dapat menjelaskan tentang dikotomi hubungan antara sarana dan tujuan (*means dan ends*).⁹ Salah satu argumennya menyatakan bahwa kemiskinan bukan “suatu akhir” karena dapat dihilangkan dengan cara meningkatkan pendapatan.¹⁰ Perdebatan beralih kepada pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan lewat kelompok *eco-feminisme* yang vocal menyuarakan peran perempuan dalam hubungan manusia dengan alam. Kebijakan pembangunan modernisasi dan modernisme mendapat banyak kritik dari wacana eco-feminisme. Kelompok ini memfokuskan kepada *the cost of progress, the limits of growth, the deficiencies of technological decision making and the urgency of conservation* (harga yang harus dibayar untuk kemajuan, keterbatasan pertumbuhan, kekurangan di dalam pengambilan-kepu-

⁶ *Ibid*, lihat juga di Easter Boserup, *Women's Role in Economic Development*, London: Easthscan, 1989. Juga dapat lihat Catherine Tinker, “The Making of a Field: Advocates, Practitioner and Scholars”, dalam Nalini Visvanthan dkk. (eds.) *The Women, Gender, and Development Reader*, London: Zed Book, 1997, halaman 34.

⁷ Rai, *op.cit.* halaman 60.

⁸ Boserup, *op.cit.* lihat Rai, *Ibid*, halaman 62.

⁹ Naila Kabeer, *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*, London: Verso, 1994 halaman 138-140.

¹⁰ *Ibid*.

Tabel
Membandingkan Pendekatan *Women in Development* dan *Gender and Development*¹²

	Perempuan dalam Pembangunan	Gender dan Pembangunan
Pendekatan	Bersudut-pandang bahwa ketidakhadiran perempuan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan merupakan permasalahan utama	Bersudut-pandang bahwa relasi sosial tidak setara antara laki-laki dan perempuan dan “pewajaran” hal tersebut merupakan isu utama
Titik Focus	Perempuan	Relasi antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi, diridhoi dan dipertahankan secara sosial, dengan penekanan khusus terhadap subordinasi atas perempuan
Permasalahan	Pengucilan perempuan dari proses pembangunan – suatu pendekatan efisiensi yang menitikberatkan kerugian tidak didayagukannya separuh dari sumberdaya pembangunan sebagai akibat dari pengucilan ini	Relasi kekuasaan tidak seimbang, yang menghambat pembangunan yang adil dan setara serta partisipasi utuh perempuan di dalamnya
Tujuan	Pembangunan yang lebih efisien dan efektif yang mengikutsertakan perempuan	Pembangunan yang setara dengan kehadiran baik perempuan maupun laki-laki sebagai partisipan penuh di dalam pengambilan-keputusan
Solusi	Mengintegrasikan perempuan di dalam proses pembangunan yang tengah berjalan	Memberdayakan kaum perempuan yang mengalami ketimpangan, dan mengubah relasi yang tidak setara dan seimbang
Strategi	<ul style="list-style-type: none">• Menitikberatkan fokus pada proyek-proyek perempuan, komponen perempuan di dalam proyek, dan pada proyek-proyek integrasi• Meningkatkan produktivitas dan pemasukan perempuan• Meningkatkan kemampuan perempuan untuk merawat rumah tangga	<ul style="list-style-type: none">• Menata kembali konsep-konsep proses pembangunan, dengan memasukkan ketidakadilan gender serta ketidaksetaraan global di dalam perhitungan• Mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan praktis, sebagaimana ditentukan oleh perempuan maupun laki-laki, guna memperbaiki keadaan mereka; dan pada saat yang sama memperhatikan kepentingan strategis kaum perempuan• Memperhatikan kebutuhan strategis kaum miskin lewat pembangunan yang menitikberatkan kemanusiaan (<i>people-centered development</i>)

Sumber: Berdasarkan Parpart, Connolly and Barriteau, 2000, halaman 141; lihat dalam Shirin M. Rai, *Gender and the Political Economy of Development*, halaman 72.

tusan berdasarkan teknologi serta mende-saknya dilakukannya konservasi alam)”¹¹

Perkembangan pendekatan dalam pem-bangunan beralih dari *women* ke *gender*. Para *feminist scholars* dan aktivis terus mencari dan mengembangkan pemikiran untuk mening-katkan posisi perempuan, yang secara kon-

septual masih termarginalkan. Pada 1980-an, *Gender and Development* memfokuskan perhatian masyarakat kepada hubungan po-sisi perempuan di dalam masyarakat sebagai inti dari kegiatan politik. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang pemahaman konsep *Women in De-velopment* — yang hanya besikap “tambah-kan saja perempuan” (*just add women*) dalam

¹¹ Carol Merchan, *The Death of Nature: Women Ecology and The Scientific Revolution*, New York: Harper and Row, 1980, halaman xix.

¹² Shirin M. Rai, *op.cit.*, halaman 72.

pembangunan, dan konsep *Gender and Development* – yang lebih mengubah cara pandang persoalan marginalisasi perempuan dari perspektif relasi sosial. Ini kami jelaskan secara lengkap dalam Tabel Membandingkan Pendekatan Women in Development dan Gender and Development:

Dengan penjelasan berbagai pendekatan tersebut, dapat dilihat bahwa diperlukan ketepatan dalam menggunakan pendekatan teoritis ataupun metodologi untuk menganalisis persoalan marginalisasi perempuan. Kritik utama yang ditujukan kepada para akademisi feminis adalah tidak adanya satu teori pamungkas untuk menjelaskan persoalan marginalisasi perempuan di dalam masyarakat. Namun, dalam ilmu-ilmu sosial memang tidak dapat ditemukan hanya satu teori untuk menjelaskan seluruh persoalan sosial dan politik. Varian dan konsep demokrasi dari masa Yunani Kuno sampai sekarang terus berkembang. Di dalam konsep demokrasi pada masa Yunani Kuno, perempuan dan budak bukanlah warganegara. Perempuan baru memperoleh hak pilih sebagai warganegara di Australia dan Selandia Baru pada tahun 1893. Dalam konsep demokrasi mutakhir, partisipasi penuh warganegara harus mengikutsertakan perempuan. Perempuan merupakan warga mayoritas, sementara kekuasaan mayoritas (*majority rule*) dan kesetaraan politik (*political equality*) merupakan indikator penting dalam demokrasi modern. Oleh karena itu, meneliti persoalan perempuan membutuhkan pemahaman ideologi yang tepat dengan menjelaskan kepentingan perempuan. Dalam pemahaman teori, dibutuhkan pembacaan-kembali teori-teori politik dengan menggunakan perspektif perempuan. Teori-teori politik arus-uta-

ma dibangun dalam konteks dan posisi ideologi patriarki yang kuat, disebut dengan teori politik *male-stream*, istilah mana banyak penulis gunakan dalam tulisan ini. Melakukan survei tentang isu gender sarat dengan ideologi.

Isu Metodologi dalam Penelitian Feminis: Redefinisi Politik

Studi yang dilakukan di 43 negara tentang partisipasi politik perempuan menunjukkan bahwa diperlukan definisi baru, atau perubahan dalam definisi politik. Dalam konteks ini, muncul kembali pertanyaan cara terbaik membuat studi lebih tepat secara metodologis dengan memperhatikan relasi sosial yang memang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan dalam metodologi dan penelitian yang lebih memperhatikan ideologi feminisme membutuhkan pemahaman terminologi politik, dengan mengingat bahwa pemahaman dalam teori-teori politik tersebut dibangun berdasarkan ideologi patriarki. Sebagai contoh, Carole Pateman melihat bahwa konsep kontrak sosial yang kita pahami sebagai konsep politik netral ternyata memiliki akar persoalan yang sangat ideologis. Para warganegara laki-laki memiliki hak untuk menjadi warganegara secara penuh, sementara perempuan bukan menjadi warganegara. Salah satu indikatornya adalah perempuan tidak memiliki hak untuk memilih. Cukup banyak studi tentang partisipasi politik perempuan dijelaskan dengan sikap buta gender (*sex blind*). Dalam konteks ini, sangat perlu dilihat kembali konsep politik dan pilihan metodologinya.

Studi yang dilakukan Chowdhury dan kawan-kawan di 43 negara tentang status

politik perempuan memberikan kontribusi terhadap penelitian politik perempuan. Temuan studi tersebut mempertegas bahwa status perempuan dalam politik di semua negara masih termarginalkan.

*...in no country do women have political status, access, or influence equal to men's. The sweep of women's political subordination encompasses the great variety of cultures, economic arrangements and regimes in which they live.*¹³

(... tidak ada satu negara pun di mana perempuan memiliki status, akses terhadap, ataupun pengaruh politik setara dengan laki-laki. Sapuan besar subordinasi politik perempuan meliputi berbagai ragam kebudayaan, tatacara perekonomian, serta rezim-rezim dimana perempuan itu hidup).

Pandangan tersebut bukan berarti bahwa perempuan tidak pernah memiliki kekuasaan yang cukup. Perempuan juga dapat menggunakan kekuasaannya. Namun, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki *privileges* dalam politik, sehingga laki-laki dapat lebih aktif di politik dibandingkan perempuan. Dengan demikian hasil studi tersebut sangatlah penting untuk perkembangan bagaimana partisipasi politik perempuan.

Metodologi Pencarian Ilmu Pengetahuan: Perspektif Feminisme

Banyak jalan untuk mendapatkan Ilmu Pengetahuan dengan perspektif feminis. Patut

dicatat, tidak semua metode penelitian dapat dikatakan sesuai dengan pandangan feminisme. Misalnya, bagaimana menjelaskan masalah survei kuantitatif tentang jumlah perkosaan jika hasil survei dari ribuan responden hanya memperoleh beberapa puluh kasus perkosaan. Bagi aktivis feminis, kasus satu orang perempuan saja diperkosa sudah menjadi isu sangat penting yang patut diperjuangkan. Dengan demikian, jumlah kasus tidak signifikan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pemahaman atas pengalaman hidup perempuan dan aktivitasnya, karena di dalam masyarakat, perempuan adalah kelompok yang dimarginalkan dan merupakan subordinat laki-laki.

Signifikansi dari peneliti feminis dalam hubungannya dengan metode penelitian menarik untuk dikaji. Pada tahun 1980-an, peneliti feminis menganggap bahwa prinsip-prinsip dan praktik penelitian yang menggunakan metode kuantitatif tidak kompatibel dengan penelitian tentang perempuan. Seperti pandangan Oakley berikut:¹⁴

...quantitative research was bound up with male values of control that can be seen in the general orientation of the research strategy – control of the research subject/respondent and control of the research context and situation.

(... penelitian kuantitatif terkait erat dengan nilai-nilai pengendalian yang sangat maskulin, yang dapat dilihat dalam orientasi umum strategi penelitian tersebut – pengendalian atas subyek/responden penelitian serta pengendalian atas konteks dan situasi penelitian itu.

¹³ Najma Chowdhury dkk., "Redefining Politics: Patterns of Women's Political Engagements from Global Perspective", dalam Barbara J. Nelson dan Najma Chowdhury, *Women and Politics Worldwide*, New Haven: Yale University Press, 1994.

¹⁴ A. Oakley, "Interviewing Women: A Contradictions in Terms", dalam H. Roberts, *Doing Feminist Research*, London: Routledge & Keagan Paul, 1981.

Lebih jauh lagi, proses penelitian dapat dikatakan bersifat satu arah. Itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip feminisme, antara lain solidaritas perempuan (*sisterhood*) dan hubungan non-hirarkis antar perempuan.¹⁵

Etnografi yang Feminis

Hal ini sesuai dengan pandangan Reinharz (1992), yang melihat bahwa etnografi yang feminis merupakan hal yang signifikan di dalam feminisme. Menarik dikemukakan disini pandangan Reinharz bahwa etnografi feminis memiliki kekuatan, sebagai berikut:¹⁶

- Etnografi feminis mendokumentasi kehidupan dan kegiatan perempuan, yang sebelumnya secara umum dipandang sebagai marginal dan tidak penting kehidupan laki-laki;
- Etnografi feminis memahami perempuan dari perspektif perempuan itu sendiri, sehingga kecenderungan untuk “meremehkan kaum perempuan” serta pemikiran-pemikirannya, atau menerjemahkan pemikiran tersebut dari sudut pandang laki-laki di dalam masyarakat atau sang peneliti yang laki-laki (Reinharz, 1992, hal. 52) ditentang; dan
- Etnografi feminis memahami perempuan di dalam konteksnya.

Lebih jauh, Skeggs (2001:430) melihat bahwa etnografi yang menitikberatkan pengalaman dan “perkataan, suara serta kehidupan para partisipan” (*the words, voice and lives of the participants*), dipandang oleh para peneliti feminis sebagai sangat tepat guna melihat tujuan dari feminisme.¹⁷ Dalam konteks ini, studi etnografi memberikan ruang untuk artikulasi dan pengalaman dari kelompok yang termarginalkan. Dengan demikian, metode etnografi dapat mengamati pengalaman-pengalaman perempuan dalam struktur di masyarakat, seperti misalnya posisi kelas dan posisi gender, juga pengalaman perempuan dalam konteks kelembagaan, misalnya dalam bingkai pendidikan dan bingkai media yang berpengaruh terhadap konstruksi perempuan sebagai subyek.¹⁸ Dalam pandangan Reinharz, ini merupakan refleksi dan komitmen untuk menuliskan pengalaman hidup perempuan guna lebih jauh memahami perempuan dalam konteks yang disebutkan oleh Reinharz.

‘Focus Group’ sebagai Metode Feminis

Perkembangan menarik dalam sekian dekade terakhir adalah kecenderungan menggunakan kelompok fokus (*focus group*) oleh para peneliti feminis. Menurut Wilkinson (1998, 199b),¹⁹ ada tiga aspek penting dalam metode *focus group* yang berhubungan dengan etika dan politik feminisme.

¹⁵ *Ibid.* Lihat Juga Brian, halaman 26.

¹⁶ Reinharz, *Feminist Method in Social Research*, New York: Oxford University Press, 1992.

¹⁷ Bryman, Alan, *Social Research Methods*, Oxford: Oxford University Press, 2008. Lihat juga Wilkinson.

¹⁸ *Ibid.* Lihat juga Skeggs, 1994 halaman 74.

¹⁹ S. Wilkinson, “Focus Groups in Feminist Research: Power, Interaction and the Co Production of Meaning,” *Women’s Studies International Forum*, 1998, 21: 111-125.

1. Penelitian dengan pola *focus group* dapat dikatakan tidak seartifisial dibandingkan dengan metode yang lain. Hal itu karena proses dalam metode ini menekankan interaksi kelompok, yang dianggap merupakan biasa, atau wajar dalam kehidupan sosial. Lebih jauh, penelitian semacam ini tidak mendapat tekanan atau pergeseran makna ketika berupaya memetik informasi dalam situasi yang tidak biasa/wajar tersebut. Dalam *focus group discussion* (FGD), peneliti cenderung dapat mengorek informasi sampai ke jenjang paling bawah para partisipan betapa pun artifisialnya metode ini. Dengan demikian, ada kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman hidup perempuan.
2. Para peneliti feminis menyatakan preferensi terhadap metodologi ini, karena studi tersebut dapat menjelaskan individu dalam konteks sosial, terutama posisi perempuan.
3. Dalam *focus group discussion*, risiko dapat dikurangi. Partisipan dapat mengungkapkan pandangannya dibandingkan dengan jika menggunakan model wawancara tradisional.

*Feminisme dan Pendekatan Kualitatif*²⁰

Peneliti feminis cenderung menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tidak menutup diri terhadap kemungkinan muncul

perubahan pandangan. Ini melalui bertolak dari nilai yang diyakini oleh peneliti feminis. Nilai (*values*) yang dianut merefleksikan keyakinan maupun perasaan sang peneliti, kenadati dalam melakukan penelitian, peneliti harus memiliki obyektifitas, dalam mana semua dan prakonsepsi harus dihilangkan. Muncul perdebatan mengenai nilai yang dianut peneliti dalam penyelenggaraan penelitian tentang perempuan, yang mengajukan agar “pokok pendirian bahwa penelitian harus bebas-nilai, netral dan tunduk kepada obyek penelitian, harus ditukar dengan kesadaran keberpihakan, yang dapat diperoleh lewat identifikasi dengan para obyek penelitian”.²¹

Wawancara tidak terstruktur dan semiterstruktur menjadi model penting dalam kerangka metode penelitian bagi para peneliti feminis. Hal itu merupakan refleksi dari preferensi menggunakan penelitian kualitatif di kalangan peneliti feminis, sebagaimana dikemukakan oleh Kelly dkk.(1994, hal. 34):

Whilst several brave women in the 1980s defended quantitative methods, it is nonetheless still the case that not just qualitative methods, but the depth face to face interview has become the paradigmatic “feminist method”.

(Sementara beberapa perempuan pemberani pada 1980-an membela penggunaan metodologi kuantitatif, namun demikian telah bertahan kenyataan bahwa, tidak saja metodologi kualitatif, tapi juga wawancara mendalam dengan cara tatap muka yang telah menjadi paradigma “metodologi feminis”).

²⁰ Alan Bryman, *op.cit.* halaman 463.

²¹ *Ibid*, halaman 25. Lihat juga argumen M. Mies, “Towards Methodology of Feminist Research”, dalam M. Hammersley, *Social Research, Philosophy, Politics and Practice*, London: Sage, 1993, halaman 68.

Wawancara survei yang lazim menurut Oakley²² adalah sebagai berikut:

- Prosesnya berjalan satu arah – pewawancara menggali informasi atau sudut-pandang dari yang diwawancarai.
- Sang pewawancara tidak menawarkan apa-apa sebagai imbalan atas penggalan informasi tersebut. Secara lazim, memang, mereka disarankan untuk tidak melakukan hal-hal semacam itu karena adanya kekhawatiran terjadi kontaminasi atas jawaban-jawaban responden.
- Hubungan pewawancara-responden merupakan suatu bentuk relasi hirarkis, atau hubungan kekuasaan.
- Pewawancara menyematkan atas dirinya hak untuk mengajukan pertanyaan, yang secara implisit menempatkan responden dalam posisi subordinat atau inferior.
- Terdapat unsur kekuasaan di dalam proses ini juga tampak dari kenyataan bahwa wawancara terstruktur menggali informasi dari perspektif sang peneliti.
- Karena hal-hal ini, wawancara survei yang lazim tidak konsisten dengan feminisme kalamana perempuan mewawancarai sesama perempuan. Sudut-pandang ini muncul karena lahir anggapan bahwa sama sekali tidak bisa diterima jika seorang perempuan “menyalahgunakan” perempuan lain dengan cara-cara semacam ini.

Seorang peneliti feminis akan memperhatikan hal-hal berikut:

- Tingkat keakraban yang tinggi antara pewawancara dengan responden
- Keinginan tinggi untuk bersikap timbal-balik dari pihak pewawancara
- Perspektif dari perempuan yang diwawancarai
- Membangun hubungan tanpa hirarki

Menarik di sini untuk mengutip bagaimana para peneliti melihat pengaruh feminisme dalam membangun pertanyaan penelitian. Pandangan Sarah Hanson sangat jelas dipengaruhi oleh feminisme dalam membangun pertanyaan penelitiannya:

My research project focused on the representation of women through the front covers of five women's magazines, combining the application of feminist theory with decoding practices of content analysis. Throughout the project I wanted to understand the nature of women's magazines, the influences they have on women's sense of self and identity and the role the magazines play. I asked: do women's magazines support or destroy women's identity and they encourage self-respect or self scrutiny? I wanted to combine theory with fact, focusing on the meanings behind the presentation of image and text.

(Proyek penelitianku mengamati representasi perempuan pada halaman sampul lima majalah wanita, dengan menggabungkan penggunaan teori feminisme dengan praktik-praktik penelusuran kodifikasi analisis konten. Di dalam proyek, saya ingin memahami sifat dari majalah-majalah wanita, pengaruhnya terhadap kesadaran diri dan jatidiri kaum perempuan, serta peran yang dimainkan majalah-majalah tersebut. Saya bertanya: apakah majalah

²² Oakley, *op.cit.*

wanita mendukung atau menghancurkan jati-diri perempuan, dan apakah majalah wanita mendorong terciptanya harga-diri dan pengkajian-diri perempuan? Saya ingin menggabungkan teori dengan fakta, dengan memfokuskan perhatian pada makna-makna di balik presentasi citra dan teks)

Hal serupa dikemukakan oleh Erin Sanders, yang mengatakan bahwa metodologi feminisme dibutuhkan untuk mengurangi kekuasaan tidak seimbang dalam hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Erin meneliti persoalan NGO dan Pekerja Seks di Thailand. Secara sengaja, Erin menggunakan metodologi feminisme.²³

Ada pula studi-studi yang dilakukan untuk melihat kekuasaan politik perempuan, yang biasanya dengan mudah hanya mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki posisi kekuasaan. Carole Pateman dan Lovenduski berpendapat bahwa ideologi patriarki sangat mempengaruhi pandangan dalam bangunan teori politik.

"The power of men over women is excluded from scrutiny and deemed irrelevant to political life and democracy by the patriarchal construction of the categories with which political theories work" (Pateman)²⁴

The dominant conception of political studies is bound to exclude women, "largely because women usually do not dispose of public power, belong to political elites or hold influential position in government institutions" (Lovenduski)²⁵

(Kekuasaan laki-laki atas perempuan disisihkan dari pengamatan dan dianggap tidak relevan bagi kehidupan politik dan demokrasi oleh konstruksi kategori-kategori yang patriarkal di mana teori-teori politik berlangsung." (Pateman)

(Konsepsi dominan kajian politik sudah barang tentu mengucilkan perempuan, "terutama karena perempuan pada umumnya tidak terlibat di dalam kekuasaan publik, tidak merupakan bagian dari elit politik, dan tidak memegang posisi-posisi berpengaruh di dalam lembaga-lembaga pemerintah." (Lovenduski).

Dengan demikian, saat menyusun pertanyaan penelitian, peneliti harus memperhatikan sejauh mana konsep politik yang akan digunakan, metode yang dipilih serta cara melakukan penelitian, supaya upaya membangun konstruksi feminisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian feminisme. Misalnya saja penelitian yang dilakukan dalam peningkatan jumlah perempuan di parlemen. Fakta di lapangan memang menunjukkan jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan sangat kurang. Oleh karena itu, harus ada pembahasan lebih dulu yang sangat rinci agar temuan survei tidak kontraproduktif terhadap perjuangan perempuan. Jangan sampai kesimpulan yang diperoleh misalnya sbb: Karena legislator yang perempuan dinilai tidak produktif, maka bisa dianggap bahwa jumlah perempuan anggota legislatif tidak perlu ditingkatkan. Contoh pertanyaan dari Inggris adalah: "Apakah politisi perempuan dinilai secara berbeda dibanding rekan-rekannya yang pria?" dan dari Kenya: "Apakah melakukan penilaian atas kinerja legis-

²³ Alan Bryman, halaman 25-26.

²⁴ Pateman, Carole, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

²⁵ Joni Lovenduski, *Women and European Politics: Contemporary Feminism and Public Policy*, Wheatsheaf, 1986.

lator perempuan terpilih kontraproduktif terhadap kaum perempuan?”²⁶

Penutup

Ilmu Pengetahuan Sosial dibangun dari pengalaman kehidupan sosial manusia. Penulis ingin mengemukakan pengalaman kalamana membimbing mahasiswa saat menulis tesis tentang partisipasi politik perempuan. Seringkali argumen yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik laki-laki tidak berdasarkan pada Ilmu tersebut dengan pilihan metode penelitian yang tepat, namun lebih mengkritisi penulis buku yang memiliki pandangan feminis dengan mengatakan: “Saya tahu penulis buku itu telah bercerai.” Pertanyaan disini adalah cara membangun argumen ilmiah, dan bukannya melihat apakah sang penulis buku tersebut belum menikah, menikah atau sudah bercerai. Ilmu Pengetahuan harus dibangun dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga posisi metodologi menjadi sangat penting. Dengan ketepatan metodologi, validitas data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam kasus yang tadi dikemukakan, pertanyaannya adalah jika partisipasi politik perempuan sangat signifikan dalam perkembangan Ilmu Politik, mengapa pengalaman perempuan tidak dianggap ilmiah? Ada pandangan yang menyatakan bahwa pilihan metode kuantitatif sangat berpengaruh untuk memperkuat kesenjangan antar gender karena asumsi yang ada memang dirasuki bias gender. Dasar ini adalah karena masya-

rakat masih memegang teguh nilai-nilai patriarki. Dalam masyarakat yang patriarkis, dapat dikatakan bahwa ‘masyarakat menilai laki-laki berdasarkan keberhasilan dan kemampuannya secara individu, sementara perempuan dinilai atas keberhasilan yang diasumsikan dimilikinya karena ia seorang perempuan.’ Dengan bahasa yang sederhana, konsep ini dapat dijabarkan sbb: ‘Jika ada seorang laki-laki yang “bodoh”, maka yang bodoh hanya laki-laki itu saja seorang. Hal itu karena kemampuan individu laki-laki tersebut. Namun, bila ada seorang perempuan yang dianggap tidak mampu dalam kehidupan politik, maka semua perempuan dianggap tidak mampu pula.’

Konsep politik dan pemikiran-pemikiran politik kontemporer perlu diredefinisi untuk lebih memperhatikan keadilan gender. Pembahasan metodologi yang memperhatikan keadilan gender menjadi kunci utama untuk memahami penelitian dan penelitian tentang kehidupan perempuan. Metodologi yang tepat sangat penting untuk membangun kesimpulan yang valid dari realitas kehidupan politik perempuan.***

Daftar Pustaka

- Benhabib, Seyla dan Cornell Drucilla (eds.). 1987. *Feminism as Critique*. Polity.
- Blaugh, Ricardo dan John Schwarzmantel. 2000. *Democracy: A Reader*. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Bronner, Stephen Eric (ed.). 1997. *Twentieth Century Political Theory: A Reader*. Routledge, London.
- Boserup, Easter. 1989. *Women's Role in Economic Development*. Eastscan, London.

²⁶ Pandangan Reni Suwarso dalam membahas tentang survei keterwakilan perempuan di Indonesia.

- Bryman, Alan. 2008. *Social Research Methods*. Oxford University Press, Oxford.
- Clayton, Susan D., dan Faye J. Crosby. 1992. *Justice, Gender, and Affirmative Action*. The University of Michigan Press, Ann Arbor.
- Cuud, Ann E. and Robin O. Andreasen. 2005. *Feminist Theory: A Philosophical Anthology*. Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, USA.
- Coole, Diana. 1986. Re-reading Political Theory from a Women's Perspective *In: Political Studies*. University of Leeds, Leeds.
- . 1988. *Women in Political Theory: From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism*. Wheateaf.
- Hay, Colin. 2002. *Political Analysis: A Critical Introduction*. Plgrave, New York.
- Karam, Azza et. al. 1998. *Women in Parliament Beyond Numbers*. IDEA.
- Kabeer, Naila. 1994. *Reversed Realities: Gender Hierarhies in Development Though*. Verso, London.
- Lovenduski, Joni dan Pippa Norris. 1993. *Gender and Party Politics*. Sage, London.
- Lovenduski, Joni. 1986. *Women and European Politics: Contemporary Feminism and Public Policy*. Wheateaf.
- Merchan, Carol. 1980. *The Death of Nature: Women Ecology and The Scientific Revolution*. Harper and Row, New York.
- Mies, M. 1993. Towards a Methodology of Feminist Research *In: Hammersley, M. Social Research, Philosophy, Politics and Practice*. Sage, London.
- Nelson, Barbara J, and Najma Chowdhury. 1994. *Women and Politics Worldwide*. Yale University Press, New Haven.
- Okin, Susan Moller. 1979. *Women in Western Political Thought*. Vigaro, London.
- . 1989. *Gender, Justice and the Family*. Basic Book, New York.
- Pennings, Paul, Hans Keman, and Jan Kleinnijenhuis. 1999. *Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Methods and Strategies*. Sage Publication, London.
- Pateman, Carole. 1970. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Pers, Cambridge.
- . 1988. *The Sexual Contract*. Polity Perss, Cambridge.
- . 1988. *The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory*. Polity Press, Cambridge.
- Phillips, Anne. 1991. *Engendering Democracy*. Polity Press, Cambridge.
- (ed.). 1987. *Feminism and Equality*. New York University Pers, New York.
- . 1993. *Democracy and Difference*. Polity Perss, Cambridge.
- . 1995. *The Politics of Presence*. Clarendon Press, Oxford.
- Rai, Shirin M. 2002. *Gender and the Political Economy of Development*. UK: Polity Press, Cambridge.
- Reinharz, S. 1992. *Feminist Method in Social Research*. Oxford University Press, New York.
- Squires, Judith. 1999. *Gender in Political Theory*. Polity Pers, Cambridge.
- Skeggs, B. 1994. Situating the Production of Feminist Ethnography *In: Maynard, M. and J. Purvis (eds.), Researching Women's Lives From Feminist Perspective*. Taylor & Francis, London.
- . 2001. Feminist Ethnography *In: Atkinson, P. et.al. (eds.). Handbook of Ethnography*. Sage, London.

- Tinker, Catherine. 1997. The Making of a Field: Advocates, Practitioner and Scholars *In*: Visvanthan, Nalini *et.al.* (eds.). *The Women, Gender, and Development Reader*. Zed Book, London.
- UNDP Report. 2004. *Human Development Report 2004*. UNDP, New York.
- Wilkinson, S. 1998. Focus Groups in Feminist Research: Power, Interaction and the Co-Production of Meaning *In*: *Women's Studies International Forum*. 21: halaman 111-125.
- , Focus Groups: A Feminist Method". *Psychology of Women Quarterly*, 23: halaman 221-224.
- Wollstonecraft, Mary. 1975. *Vindication of the Rights of Women*. Penguin. first published 1972.

Lely Zailani:

Konsep Kepemimpinan dan Representasi dalam Gerakan Perempuan

Lely Zailani adalah tokoh utama yang mendirikan Hapsari pada 1990 dan menjadi direktur 1997 ketika Hapsari berubah menjadi yayasan. Lely kemudian menjadi Ketua Dewan Eksekutif pada periode 2001-2004. Lely banyak mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, lokakarya, semiloka serta studi banding. Sejak 1997, Lely sering menjadi narasumber dan fasilitator pada beragam kegiatan organisasi non-pemerintah, terutama untuk organisasi perempuan. Pada 1999, ia menjadi anggota Presidium Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Pada 2001-2005, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus Nasional Solidaritas Perempuan Jakarta. Pada 2007, menjadi anggota Pokja Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Masyarakat Sipil di Jakarta, Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi (KKJD) Sumatera Utara. Antara 2004 sampai 2007, ia anggota Presidium Sekretariat Bersama Organisasi Rakyat Independen (Sekber ORI). Selain itu, Lely rajin menulis mengenai isu-isu perempuan. Sampai saat ini, Lely masih aktif mengembangkan Federasi Hapsari dengan menumbuhkan serikat di beberapa desa di Indonesia.

Berikut cuplikan wawancara Ayu Anastasia dari Women Research Institute dengan Lely Zailani.

Bagaimana awal mula Anda tertarik pada isu perempuan, dan mengapa?

Saya mengalami perlakuan diskriminatif dalam keluarga karena saya anak perempuan. Kami sembilan bersaudara dengan empat orang perempuan, dan dengan latar belakang ekonomi pas-pasan. Paradigma Bapak

tentang pendidikan bagus: anak-anaknya harus sekolah, harus kuliah dan menjadi sarjana. Namun, secara ekonomi, tidak mampu membiayai sembilan anak. Kakak perempuan, sebagai anak pertama, menjadi prioritas untuk sekolah. Kakak laki-laki dikorbankan, tidak kuliah; tetapi dirinya be-

bas dari pekerjaan rumah dan tidak perlu mengurus adik-adik. Sayalah yang harus berperan mengurus adik-adik. Semua energi habis untuk mengurus rumah, sehingga saya kehilangan masa remaja. Berbeda dengan saudara laki-laki saya, walaupun dia tidak diberi kesempatan bersekolah, dia tetap mempunyai kebebasan sebagai anak laki-laki: boleh sesuka hati pulang malam. Dari sanalah saya mencari jawaban, mengapa saya mengalami ini? Akhirnya saya menemukan jawaban sendiri ketika tamat SMA dan mulai berorganisasi.

Selepas SMA, saya mendirikan TK Harapan Suka Sari (cikal bakal Hapsari) untuk mencari kebebasan. Saya bertemu dengan ibu-ibu yang bercerita bahwa mereka dipukuli suami, suami kawin lagi, suami main perempuan, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ada banyak masalah yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu, saya sering melihat Ibu berhadapan dengan Bapak yang patriarkis. Kalau mereka berkelahi, Bapak sering mengatakan, “*Apa kau minta dipulangkan ke rumah orang tuamu? Kupulangkan kau...*” Dan Ibu hanya bisa menangis dan kemudian masuk ke kamar. Itulah jawabannya mengapa saya tertarik pada isu perempuan. Tetapi saya dulu tidak mengetahui kesetaraan dan keadilan gender, atau apa itu patriarki. Saya baru mengetahui itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya baru menyadari, seorang perempuan mengalami hidup yang pahit karena dia harus tunduk pada patriarki.

Sebelum membangun dan memimpin organisasi, apa pengalaman organisasi Anda?

Saya pernah bergabung dalam Remaja Masjid, Karang Taruna, PKK, dan sebagainya.

Sebetulnya itu hanya bentuk pemberontakan untuk bebas dari rumah. Saya kemudian diajak bergabung dengan PKBI, dalam projek kepemudaan PKBI bernama Kelompok Remaja Bertanggungjawab (KLBJ). Di sana saya menguasai organisasi sebagai ketua dan koordinator. Masuk KLBJ membuat saya makin banyak mengenal orang. Banyak tutor di KLBJ yang bertugas menyosialisasikan penundaan usia nikah: 25 tahun bagi laki-laki, dan 20 tahun bagi perempuan. Saya sendiri bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat, mengingatkan agar anak menunda usia nikah, juga memperkenalkan tentang isu kesehatan alat reproduksi. Setelah itu, saya masuk dalam pergaulan LSM di Sumatera Utara dan berkenalan dengan Kalyanamitra. Dari situ saya diundang untuk mengikuti Training Gender dan magang di Kalyanamitra pada tahun 1997. Jadi saya mulai mengenal konsep gender pada tahun tersebut.

Sudah berapa lama Anda meninggalkan Hapsari untuk kemudian membangun jaringan?

Kami mencatat tahun 1990 sebagai mulai keberadaan Hapsari, dan tahun 2004 saya meninggalkan Hapsari untuk memperluas jaringan. Jadi setelah 14 tahun saya meninggalkannya.

Apakah perbedaan yang Anda rasakan selama memimpin dan aktif dalam gerakan perempuan ketika terjadi perubahan sosial dan politik, seperti reformasi? Adakah perbedaan dalam konteks masalah persoalan perempuan?

Masalahnya, sama saja; bedanya hanya dalam strategi menghadapi masalah tersebut.

Perbedaannya adalah ketika awal terbentuknya Hapsari dengan setelah reformasi, dengan semakin terbukanya komunikasi kita dengan pemerintah. Dulu, sebelum Era Reformasi, pemerintah mengklasifikasikan organisasi masyarakat menjadi dua: yang pertama, organisasi masyarakat plat merah yang didirikan oleh pemerintah sendiri; dan yang kedua adalah organisasi masyarakat yang dibentuk swadaya. Organisasi masyarakat seperti ini diidentikkan oleh pemerintah sebagai organisasi masyarakat yang suka memasukkan proposal guna meminta uang dengan cara memeras dan meneror pemerintah. Menghadapi hal tersebut, kami berstrategi dengan menjelaskan kepada pemerintah bahwa Hapsari bukanlah organisasi seperti itu. Bedanya memang, sekarang sudah terbuka. Jika dulu kami sembunyi-sembunyi, sekarang kami berani terang-terangan beraktivitas, dan malah melibatkan pemerintah.

Bagaimana hubungan Anda dengan anggota-anggota Serikat Hapsari?

Secara organisasi saya hanya bertemu dengan pimpinan organisasi tingkat kabupaten. Itulah yang dinamakan oleh Hapsari sebagai usaha strategis untuk menumbuhkan kepemimpinan lokal. Kita berjenjang. Saya Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) yang membawahi 12 anggota, yang terdiri dari wakil-wakil pimpinan Serikat. Oleh karena itu saya kurang populer dibanding dengan mereka, dan jika saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan harus bersaing dengan mereka, pasti saya kalah.

Yang juga membuat saya bangga adalah, meskipun mereka telah keluar dari

Hapsari, para anggota itu tetap terus berjuang. Kami akan merasa sedih dan paling gagal jika anggota kami kembali ke rumah. Tapi hal tersebut belum pernah terjadi.

Bagaimana konteks kepemimpinan setelah Anda meninggalkan Hapsari?

Kami percaya pada kepemimpinan yang sedang berlangsung. Siapa pun yang sedang memimpin, apa pun yang dikatakannya, tidak boleh diperdebatkan, karena kita punya forum rutin tiga bulan sekali. Dalam forum tersebut, semua dapat bercerita tentang organisasi, dan di situlah tempat untuk berdebat. Ada kelemahan dalam hal menggunakan e-mail, dalam tata bahasa, maupun dalam berargumen, karena memang pada dasarnya anggota Hapsari terdiri dari ibu rumah tangga biasa, dan dalam hal pendidikan formal, di antara mereka ada yang tidak tamat SD, sedangkan yang paling tinggi tamatan SMA. Sekarang kami merasa pendidikan dan ijazah sangat penting, dan kami mendorong anggota kami untuk mengambil Paket Belajar. Kami juga mendorong kader kami yang masih muda untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Saya dulu adalah guru, mempunyai pengalaman intelektual yang berbeda, dan saya juga rajin menulis artikel.

Tahun 2002, Hapsari berubah bentuk menjadi federasi. Di situ saya digugat. Jika seluruh pendiri yayasan setuju sesuatu, kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu salah satu kelemahan yayasan, itu yang kita tolak makanya kita merubah bentuk. Saat kita berubah menjadi federasi, staf semua keluar, dan tujuh orang pendiri Hapsari membuat empat LSM perempuan dan mereka masing-masing menjadi direktur. LSM-nya

tingkat Sumatera Utara. Namun sekarang semuanya sudah bubar, seperti Solidaritas Perempuan Pekerja Seks, Institut Pembaharuan Desa dan Yaperi yang kemudian berganti menjadi Nageci, dan Hapsari sendiri.

Salah satu teman berjejaring Hapsari adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Ketika pertama kali KPI berdiri, secara kebetulan saya adalah anggota Presidium Sektor Nelayan. Karena kami cuma berdua dalam utusan Sektor Nelayan, kami tinggal *suwit* saja siapa yang mewakili. Setelah mundur dari KPI, saya bergabung dengan Solidaritas Perempuan (SP) karena saya merasa bentuk SP lebih cocok dengan Hapsari. Saya sempat menjadi pengurus di SP untuk beberapa periode. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya saya merasa tidak cocok lagi, karena bentuk organisasi itu ‘tanggung’, dalam arti, mereka menyebut diri Komunitas Solidaritas Perempuan Deli Serdang, tapi yang mereka maksudkan dengan istilah ‘komunitas’ itu hanya sekelompok orang saja. Ini berbeda dengan Serikat Perempuan Independen Kabupaten Deli Serdang (SPI Deli Serdang), dalam mana teritorinya adalah Deli Serdang, dan kepengurusannya dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa. Akhirnya kami pilih Hapsari, dan memutuskan untuk membangun jaringan kami sendiri. Kami putuskan bukan mencari jaringan, tapi membangunnya sendiri. Dan saya ke Yogyakarta untuk membangun sebuah serikat.

Hapsari diputuskan akan berbentuk federasi dengan para anggotanya para serikat. Ketika yayasan membuat serikat SPI Sumatera Utara, tidak pernah terpikirkan oleh ka-

mi untuk membentuk organisasi di mana-mana. Kala memutuskan untuk membentuk federasi, baru terpikirkan bahwa anggota federasi kami cuma tiga lembaga. Setelah Sumatera Utara, lalu kami putuskan untuk menentukan lokasi mana saja yang mudah untuk Hapsari membangun sebuah serikat. Dalam mendirikan serikat-serikat tersebut, kami mulai dengan ketentuan pengurus kabupaten minimal harus 13 orang, pengurus kecamatan sembilan orang. Semakin ke bawah tingkatnya, pengurusnya boleh berjumlah sama atau makin sedikit orangnya.

Menurut Anda, seperti apa bentuk atau konsep kepemimpinan yang ideal ?

Kepemimpinan itu adalah kemampuan kita menggerakkan, mempengaruhi, dan mempunyai pengikut untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Hapsari menentukan pemimpinnya menggunakan kriteria seperti itu. Kalau bukan Riani (Ketua Dewan Eksekutif Hapsari saat ini), tetap saja profilnya seperti Riani begitupun latar belakangnya. Kita sudah punya sistem yang berjalan untuk pemilihan pemimpin Hapsari adalah dari para pimpinan serikat atau utusan wilayah. Wilayah adalah daerah yang memiliki minimum dua serikat. Lokasi yang serikatnya masih satu tidak dapat mengutus orang sebagai utusan wilayah. Masing-masing anggota ikut memutuskan siapa yang menjadi pengurus Hapsari, jadi mereka tidak hanya sekadar tunduk pada struktur organisasi yang telah dibuat. Yang paling penting adalah bahwa kami berikrar untuk menangkap spirit juang bahwa ini adalah jalan hidup kami.

Apa tantangan terberat selama Anda memimpin?

Saya mulai mencari kader dari belum ada menjadi ada. Saya pergi dari rumah ke rumah untuk menemukan anak gadis. Kemudian saya menginap di rumah itu dan bergaul dengan keluarganya, agar mereka memberikan izin untuk anaknya menjadi kader. Saya melalui upaya ini dengan senang hati, dan akhirnya saya mendapat banyak perempuan yang bersedia bergabung dan ikut membentuk organisasi kala itu.

Setelah 2004, kami berjuang menemukan bentuk dan pola organisasi. Akhirnya kami memilih bentuk federasi, dengan harapan agar ada kekuatan melawan. Kami membentuk citra Hapsari yang baik di mata publik, pejabat pemerintah, dan politisi, bahwa kami adalah organisasi nasional guna memiliki pengaruh yang kuat, terutama di kampung-kampung. Oleh karena itu, saya tidak boleh terlalu sering beredar demi menjaga citra tersebut. Tapi faktor negatifnya, justru membuat beberapa kader Hapsari menjadi arogan.

Apa yang membedakan kepemimpinan biasa dengan kepemimpinan feminis?

Pertama, sebagai pemimpin kita harus mengajak, bukan sekadar memberi perintah. Kedua, pembebasan itu harus bersama dan perjuangan itu harus bersama. Maksudnya mengajak adalah bukan memerintah, tapi juga selalu berusaha untuk menghadirkan isu baru, informasi baru, ide baru, gagasan baru, atau apa pun yang baru agar selalu menarik bagi mereka.

Kepemimpinan feminis menurut saya akan menjadi sesuatu yang baik, karena konsepnya memberikan penghormatan dan

penghargaan kepada perempuan sesuai dengan haknya untuk dihargai. Kalau saya menempatkan seorang kader di suatu lokasi, tempat itu menjadi berbeda dengan feminisme sebagai konsep gerakan, dengan adanya seorang pemimpin yang feminis. Feminisme itu mengandung teori perubahan. Jika hanya berhenti sebagai teori, dan perubahan tidak masuk dalam semangat gerakan perubahan itu sendiri, maka tidak ada bedanya apakah pemimpinnya feminis atau bukan. Dalam implementasi, feminismenya sekadar sebangai ruh.

Kalau mau bicara feminisme, kita belum bisa langsung bicara mengenai perlawanan terhadap ketidakadilan gender. Bicara kepemimpinan, saya butuh 20 tahun untuk membangun Hapsari baru kemudian bisa melepaskan Hapsari tanpa saya. Untuk sampai ke sana, prosesnya harus dibangun terus-menerus. Hari ini, kita bicara konsep feminisme seolah konsepnya di atas meja, ada di dalam kepala, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan semuanya. Setelah berproses dan mencapai kemajuan ke arah itu, baru kita bisa bangun fase-fasenya. Kami memang membangun Hapsari begitu dan melakukannya dengan sadar. Tetapi kami tidak membangun Hapsari dengan menyiapkan konsep dan desain terlebih dulu baru lalu berjalan. Dalam fase pertama, tema kami adalah perempuan bicara; kami tahu ada kelompok-kelompok perempuan di tempat lain, membicarakan diri sendiri belum mampu. Kami tahu ada kelompok-kelompok laki-laki gagah perkasa di luar sana, tapi kami tidak berelasi dengan mereka. Jika kami sudah mampu berbicara, baru kami akan bertemu dan berdiskusi untuk menyampaikan apa yang kami inginkan dengan cara yang

tidak emosional dan tidak dengan sikap permusuhan.

Bagaimana permasalahan perempuan saat ini menurut Anda?

Patriarki sejatinya tidak bisa dibunuh, jadi tinggal bagaimana kita menjinakkannya. Memenangkan tanpa mengalahkan. Saya kira kita jangan terlalu ributkan, tetapi kita buktikan bagaimana kita bisa mengalahkannya, karena itu akan selalu ada, dan tak ada habisnya. Di satu level, kepemimpinan Hapsari masih mengalami relasi patriarki tersebut. Buat kami, suami bisa memberi izin istrinya untuk giat adalah prestasi. Di dalam rapat, kami juga membicarakan masalah-masalah keluarga dan mencari penyelesaiannya, karena permasalahan perempuan dimulai di keluarga. Kami menyelesaikan kewajiban sebagai istri, dan para suami sudah paham dan bangga apa yang telah kami kerjakan. Kami belum pernah menyerah menghadapi perbenturan yang ada. Bagi kami adalah suatu keberhasilan jika kader kami sudah mampu meminta izin dari keluarga sendiri untuk keluar berorganisasi.

Bagaimana perjalanan Federasi Hapsari sampai sekarang, menurut Anda sebagai pendirinya?

Hapsari sampai menjadi Federasi melewati beberapa fase. Fase pertama adalah antara 1990-1997 ketika Hapsari berdiri dan kemudian menjadi Yayasan. Ini adalah fase saat perempuan berbicara, dan dalam fase ini selalu muncul jargon “memecahkan bisuan” dan “mari berbicara”. Fase kedua adalah ketika Hapsari sudah menjadi Yayasan dan kita mulai masuk ke tahap Perempuan Berorganisasi. Perempuan Berorgani-



Lely Zailani lahir di Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai pada 14 Maret 1970. Lely mengenyam pen-

didikan formal di Madrasah Aliyah SKB 3 Menteri Perbaungan pada 1989. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang di Lubuk Pakam, namun tidak sampai selesai.

Selain aktif dalam gerakan perempuan basis maupun gerakan perempuan nasional, Lely pernah bersama teman-temannya mendirikan Partai Persatuan Rakyat (PPR) pada 2008, yang tidak lolos verifikasi.

sasi itu kami maknai sebagai perempuan yang memimpin dan sudah berani bicara. Asal sudah berani berbicara saja, dia sudah bisa menjadi ketua kelompok. Fase ketiga adalah, di dalam perempuan berorganisasi itu muncul isu perempuan memimpin dan melakukan perubahan. Jadi secara ringkas: Fase Pertama perempuan berani berbicara, berani bilang tidak; Fase Kedua kita berkelompok dan berkumpul dan di dalam sini kita dapat bersuara dan bicara. Kedua fase ini muncul sendiri momennya di mana kita merespons masalah yang dihadapi oleh perempuan desa, yang saat itu untuk berkumpul saja kita tidak boleh, perempuan tidak mempunyai ruang. Jangankan gerakan

perempuan, serikat petani saja tidak bisa berkumpul; Baru Fase Ketiga adalah kala perempuan masuk politik, memasuki ranah formal, yakni dari tahun 2004 sampai sekarang.

Lalu sekarang?

Sekarang saat kami bertemu, setiap kali diskusi, ada kritik di antara kami sendiri di dalam gerakan, kita mengkritisi diri dengan bertanya, “Kita mewakili siapa?” Itu adalah pertanyaan kritis. Hapsari disebut sebagai organisasi gerakan perempuan basis sampai masuk pada satu konsep. Setelah fase Perempuan dan Politik, kami menemukan fase sekarang, yaitu membangun “Representasi Gerakan Perempuan Basis”. Kamilah perempuan basis itu. Kami membangun gerakan dan kami merepresentasikan kami sendiri. Namun itu tidak sederhana. Makanya kami harus dengan jelas bisa mendefinisikan sekaligus mewujudkan seperti apa gerakan yang merepresentasikan gerakan perempuan basis. Inilah fase kami sekarang. Beberapa waktu lalu, kami melakukan evaluasi internal. Kongres terakhir yang dilakukan oleh Hapsari pada 2011 hanya memancang tonggak Hapsari sebagai organisasi nasional. Sekarang kami pada fase membangun representasi gerakan perempuan basis, kami menggambarkan diri kami dalam tiga blok: Blok pertama, 50 persen adalah diri kami dan bergerak berjuang sebagai perempuan basis yang membebaskan dirinya dan berjuang menuju keadilan yang hakiki; Blok kedua, 25 persen Hapsari juga harus menjadi representasi gerakan nasional, kami harus kontribusi untuk memperkuat gerakan perempuan Indonesia, memperkuat WRI, Kalyanamitra, KPI. Jadi pada tiap ge-

rakan perempuan yang dibangun, Hapsari harus kontribusi untuk misalnya memperkuat isu nasional, atau mengkampanyekan isu lokal yang kami perjuangkan ke tingkat nasional; Blok ketiga, 25 persen adalah bagaimana gerakan perempuan punya kontribusi untuk memperkuat pelaku-pelaku ekonomi perempuan basis yang bergabung dalam Hapsari, karena gerakan yang kami isyaratkan tidak bisa bersandar kepada kekuatan donor. Kami harus bisa hidup mandiri dengan potensi yang ada pada kami. Ini bukan kita sedang bekerja di mana, tapi, pekerjaan kita ini sedikit atau banyak, besar atau kecil, cepat atau lambat akan memperkuat ekonomi pelaku dari gerakan perempuan basis tadi. Sebab itu, lewat cara kami mengelola produk-produk yang dihasilkan anggota, produk ini menjadi sumberdaya ekonomi kami. Itulah mengapa kami mengurus teh, kopi, ikan asin, ikan teri, sapu lidi, minyak goreng dan 20 produk lainnya, aneka makanan olahan, beras, sabun. Ini komunitas buat sendiri yang kami kelola. Saat ini kami baru fokus kepada kopi dan teh. Tiap produk merupakan hasil dari Serikat Hapsari. Untuk penjualannya, kami sudah punya empat jenis pasar: pasar individu, pasar umum atau masyarakat umum, pasar komunitas dan pasar rakyat (pasar Serikat Tani, Serikat Perempuan, pasar kelompok lain).

Selama 20 tahun berjuang, adakah perubahan arah perjuangan, cita-cita, atau pergeseran ke arah yang lebih baik? Atau justru mundur?

Kalau melihat Hapsari yang dimulai dari kelompok kerja perempuan desa yang tidak memiliki identitas sampai menjadi federasi nasional, menurut saya ada perubahan yang

baik, paling tidak dari lingkungan gerakan. Kongres Serikat Perempuan seperti hari ulang tahun kemerdekaan bagi kami, sebab para suami mengantar istri-istrinya menghadiri kongres, anak-anak dengan baju baru ikut berkongres, dan buat saya itu perubahan luar biasa. Kesadaran bahwa ini hari ibunya sedang memperjuangkan organisasinya, adalah hari di mana anak-anak menjadi kader di organisasi. Hari di mana suaminya mengambil peran domestik ketika istrinya berorganisasi, buat saya itu adalah kemajuan.

Satu mimpi kami yang belum terwujud adalah membangun serikat di tempatnya Ibu Kartini, yaitu di Jepara. Ini masih cita-cita. Di dekat sana ada Pekalongan yang akan menjadi pintu masuk kami, sebab biasanya kami membangun dari serikat terdekat. Di tempat Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, kami juga membangun Serikat Independen Perempuan Kulon Progo. Kami mengadakan Kongres Nasional di Gedung Pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai Budaya Indonesia, tempat di mana diadakannya Kongres Perempuan Indonesia 1928. Tujuan kami mengadakan kegiatan di sana agar anggota Hapsari memiliki satu pemahaman, dan juga mengerti bahwa kami tidak sekadar membentuk organisasi, tapi juga ada aspek-aspek perlawanan dan nilai-nilai yang perlu kami hayati.

Setelah menempuh perjalanan panjang mencapai Fase Representasi, menurut Anda bagaimana karakter Hapsari sebagai gerakan nasional?

Menurut saya, konsep dan ideologi feminis sebagai ideologi gerakan itu adalah sama. Semua mau mengarah ke sana, tetapi proses

membangunnya itulah yang berbeda-beda. Muncul pertanyaan, “Sebenarnya, di antara sekian banyak organisasi yang menyebut diri sebagai kelompok gerakan perempuan, sebenarnya yang direpresentasikan itu siapa?” Jika merepresentasikan feminisme, itu ideologinya siapa? Ideologi di dalam kepalanya sendiri, atau ideologi perempuan basis yang banyak? Disinilah letak perbedaannya. Sehingga kalau misalnya, kita berbicara dengan organisasi perempuan yang sangat besar, sesungguhnya yang besar itu pemahaman ideologi yang dibawa oleh pemimpinnya, atau ideologi organisasi itu sendiri?

Yang mau dibangun oleh Hapsari adalah gerakan yang membawa ideologi bersama, dibangun bersama, dijalankan bersama dengan konsep dan budaya, bahasa, tindakan, perilaku yang sama. Oleh sebab itulah persoalan karakter dan persoalan gaya penampilan pun kami bahas. Kami saling mengingatkan, karena kami punya panduan bersama yang juga dievaluasi bersama-sama.

Bagaimana konsep representasi dikelola oleh Hapsari untuk jadi strategi dalam mewakili gerakan perempuan basis?

Yang pertama, bentuknya yang federasi artinya sangat jelas: Hapsari merepresentasikan serikat-serikat perempuan. Oleh karena itu, semua pengurus yang duduk di federasi adalah representatif. Yang kedua, struktur pimpinan Hapsari terdiri dari pengurus yang merupakan perwakilan dari individu anggota serikat dan berasal dari berbagai desa. Jadi yang kita maksudkan dengan membangun representasi gerakan itu adalah dari operasional programatik, kami bagi dalam tiga aspek: aspek representasi gerakan perempuan basis, aspek kontribusi memperkuat gerak-

an perempuan nasional, dan aspek kontribusi memperkuat ekonomi pelaku-pelaku gerakan perempuan basis. Tiap kegiatan Hapsari harus memenuhi tiga aspek ini.

Saat ini Hapsari sudah dalam Fase Representasi, tetapi bukan berarti akan meninggalkan perjuangan melawan patriarki, yang sejak dulu diperjuangkan. Justru ketika kami merepresentasikan perempuan basis, itu melawan patriarki, membangun dunia yang adil dan setara, dan di dalam dunia itu ada jenis kelamin yang berbeda, ada peran-peran gender yang berbeda. Tetapi dunia ini tetap menjadi dunia yang menyenangkan, karena adil dan setara. Justru kami mau tetap mengatakan visi dan misi Hapsari sesungguhnya, yaitu satu komunitas perempuan basis yang merepresentasikan perempuan basis itu sendiri, bukan orang lain. Dengan konsep ini, kami menemukan metode baru dimana semua orang berkontribusi untuk gerakan, karena dia bisa merepresentasikan Hapsari.

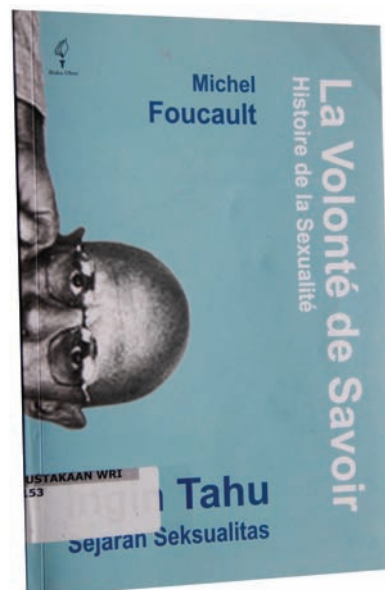
Sebagai aktivis gerakan perempuan, apa yang belum tercapai dan masih menjadi harapan Anda? Apakah Anda tidak tertarik untuk mencalonkan diri sebagai perwakilan perempuan basis dalam wilayah politik formal?

Saya ingin konsisten antara mimpi, kenyataan dengan konsep yang mau di perjuangkan. Mimpi saya adalah kesetaraan dan keadilan untuk perempuan, laki-laki, anak-anak dan orang tua. Mimpi itu harus terwujud konsisten antara harapan dan kenyataan. Keluarga saya juga harus menjadi pelaku gerakan, dan saya tidak membayangkan jika saya akan berhadapan dengan keluarga saya sendiri, yaitu pegiat gerakan perempuan. Untuk mencalonkan diri, saya rasa tidak, karena saya lebih ingin menyiapkan kader calon anggota legislatif dari Hapsari, jika diberi kepercayaan oleh Tuhan.***

La Volonte de Savoir Historie de Sexialite: Ingin Tahu Sejarah Seksualitas

Judul : La Volonte de Savoir Historie de Sexialite: Ingin Tahu Sejarah Seksualitas
Editor : Michel Foucault
Penerbit : Yayasan OBOR bekerjasama dengan FIB Universitas Indonesia
dan Forum Jakarta - Paris, 2008
Halaman : 208 Halaman
ISBN : 978-979-461-669-7

Pada abad ke-17, konon, segala hal yang berkaitan dengan seks dapat dibahas dengan bebas. Semua orang bisa mendiskusikan seksualitas kapan pun, dimana pun, dan dengan siapa pun. Namun sejak muncul era Victoria (ratu angkuh) dalam gambaran borjuis Inggris, semua hal tentang seks beralih menjadi kebungkaman, diam, represif dan semua sepakat untuk menahan diri dan tidak membicarakannya. Siapa pun yang membahasnya secara terang-terangan seolah-olah menjadi tersangka yang melanggar hukum. Andai pun seksualitas boleh dibahas terang-terangan, itu pasti karena berkaitan — atau dikait-kaitkan — dengan komoditas dan nilai ekonomi yang tinggi, mi-



salnya di rumah pelacuran dan di rumah sakit jiwa. Hanya pelacur, pelanggan, dan mucikari yang bisa membahas seks secara terang-terangan, atau hanya psikiater dan pasien rumah sakit jiwa yang dapat membahasnya tanpa batasan.

Saat ini wacana seksualitas menjadi semakin simpang-siur, terbukti dengan pendefinisian seksualitas yang banyak dipengaruhi nilai-nilai tradisi dan budaya, agama, bahkan politik. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menelusuri sejarah seksualitas dengan segala bentuk transformasinya.

Buku karangan Michel Foucault, berjudul *La Volonte de Savoir* (Ingin Tahu Sejarah Seksualitas), nampaknya dapat menjawab kebutuhan penulis. Pada buku ini, Foucault mengungkapkan analisisnya dalam mencari hal-hal yang berkaitan dengan berbagai wacana seksualitas (termasuk wacana bungkam), dengan kekuasaan (termasuk kesalahan dan kekeliruan yang disebarkan oleh pengetahuan).

Terkhusus di buku ini, Foucault berasumsi bahwa kuasa tidak selalu bersifat negatif dan represif, tapi juga beroperasi secara positif dan produktif. Baginya, kuasa secara berkesinambungan melahirkan pengetahuan, dan pengetahuan juga terus-menerus menghadirkan efek-efek kuasa. Pendapat Foucault ini bertentangan dengan kebanyakan teori modern, yang menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang netral dan objektif (aliran positivis), atau emansipatoris (Marxian). Dengan bermaksud buku ini sebagai “kritik bagi era modern”, Foucault ingin menunjukkan sejumlah produk pengetahuan modern yang terkesan wajar, padahal sangat bergantung pada kuasa. Kuasa, menurut Foucault, tidak selalu dido-

minasi struktur makro atau kelas tertentu, seperti diyakini pemikir semacam Weber dan Marx.

Resume buku ini disampaikan dalam tiga bagian. Pertama, Hipotesis Represi, yang berisi bahasan tentang rangsangan wacana seksualitas hingga munculnya penyimpangan seksual; Kedua, Sistem Seksualitas, yang berisi *scientia sexualis*, perbedaan pandangan Barat dan Timur tentang seksualitas serta sistem seksual itu sendiri; Ketiga, Hak Menentukan Ajal dan Menguasai Hidup, berisi tentang perbedaan pandangan dahulu dan sekarang.

Pembahasan yang disampaikan Foucault dalam bukunya pada tahun 1976 ternyata memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi pola gerakan organisasi perempuan di Indonesia. Sejak tahun 1990, organisasi perempuan memasukkan isu seksualitas sebagai salah satu agenda pergerakannya. Kehidupan sosial budaya yang berkembang di masyarakat dianggap telah mengambil kebebasan seksual yang dimiliki tiap individu, yaitu dengan mengelompokkannya ke dalam normal dan tak normal, serta menganggapnya sebagai hal tabu untuk dibicarakan di ruang publik. Hingga kini, organisasi perempuan masih terus memperjuangkan agar tiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan orientasi dan perilaku seksualnya.

Hipotesis Represi

Tidak seperti awalnya yang dapat dilakukan secara terang-terangan, pembahasan seksualitas memasuki masa represi dengan pembatasan bahasa, dan menjadikannya sebagai hal tabu sejak kemunculan kaum borjuis. Seksualitas boleh dibicarakan, namun de-

ngan menggunakan alias dalam menyebutkan alat reproduksi, dan adanya aturan tentang dengan siapa, di mana, dan dengan siapa apa kita membahas. Evolusi Pastoral Katolik juga ikut mengadopsi sikap represif terhadap seksualitas. Pengakuan dosa (terkait seksualitas) yang sebelumnya harus dijelaskan secara detail untuk menentukan tingkat nafsu pendosa, berubah menjadi proses yang singkat dan padat. Selain karena dianggap tabu, membicarakan masalah seksualitas dianggap hanya membicarakan dosa yang sebaiknya tidak dibahas berpanjang-panjang.

Di akhir abad ke-19, muncul buku *My Secret Life*, yang ditulis oleh seorang yang menjalankan sebagian masa hidupnya untuk melakukan aktivitas seksual. Ia menjelaskan secara rinci setiap proses kegiatan seksualnya, untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi pembacanya. Sayangnya, dalam tulisannya yang dianggap berani melawan “viktorianisme”, ternyata ia banyak menggunakan kata “maaf” karena menganggap apa yang ada dalam bukunya adalah hal tabu.

Seiring berjalannya waktu, ditemukan beberapa hal yang menjadi rangsangan munculnya wacana seksualitas. Seperti halnya di abad 18, muncul masalah penambahan jumlah penduduk yang erat kaitannya dengan seks. Untuk menekan penambahan jumlah penduduk, pemerintah, melalui kekuasaannya, mengatur agar masyarakat menggunakan seksualitas hanya sebatas mencari kesenangan dan kepuasan hidup saja, bukan untuk mendapatkan keturunan. Foucault menyimpulkan bahwa intervensi kekuasaan ke dalam seksualitas terjadi melalui politik populasi yang meregulasi

kelahiran. Di bidang kedokteran umum, seksualitas mulai dibahas terkait dengan masalah syaraf, psikiatri, bahkan penyakit “over-seks”, yang dianggap sebagai kelainan jiwa. Peradilan pidana juga mulai menyidangkan kasus-kasus pelanggaran seksual. Bahkan pada abad 19, mereka mulai menyidangkan perbuatan tak senonoh di depan umum, kekurangajaran, dan sejenisnya, sehingga mereka berpikir untuk meningkatkan kontrol sosial. Tanpa disadari hal-hal ini menimbulkan dorongan wacana seksualitas. Yang awalnya direpresikan justru semakin banyak diperbincangkan masyarakat.

Banyaknya wacana seksualitas memunculkan pandangan seks normal dan abnormal — yang menyimpang. Seksualitas masih terbatas pada pandangan monogami suami-istri. Para pelaku sodomi, onani, nekrofilia, homoseksual, masokis, sadistis, ditetapkan sebagai orang berperilaku menyimpang. Pandangan ini sesungguhnya diciptakan oleh pemilik kuasa. Contohnya, dalam pengakuan dosa agama Kristen, psikiater sebagai pendengar adalah pihak yang memiliki kuasa: ia bebas menentukan apa yang dianggap normal dan apa yang dipandang sebagai patologis (penyakit atau kelainan). Menurut Foucault, kekuasaan bukan alat yang digunakan untuk mengekang, melarang, dan memberi hukuman, melainkan untuk mengendalikan berbagai bentuk penyimpangan yang ada di masyarakat.

Homoseksualitas muncul sebagai bentuk baru dari sodomi, yang sebelumnya, baik oleh hukum maupun agama, dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Seksualitas yang pada abad 19 dipercaya hanya milik pasangan heteroseksual, ternyata memiliki bentuk lain seperti homoseksual, bertukar pasang-

an, dan onani atau masturbasi, yang dilakukan seorang diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah onani diartikan sebagai upaya mengeluarkan mani atau sperma tanpa melakukan senggama. Tujuan onani adalah untuk mendapatkan kenikmatan seksualitas tanpa berhubungan seksual. Onani juga bisa dilakukan oleh perempuan, dikenal dengan istilah masturbasi.

Semua bentuk lain dari seksualitas ini membuat kaum Victorian merasa perlu membuat batasan baru untuk menjaga moralitas masyarakat.

Sistem Seksualitas

Perbedaan pandangan antara masyarakat Barat dan Timur sudah terjadi sejak berabad lalu, termasuk dalam hal seksualitas. Landasan seksualitas masyarakat Barat adalah pengakuan, yaitu dorongan untuk membicarakannya. Ada fiksasi untuk mendapatkan “kebenaran” tentang seksualitas, seakan-akan seksualitas itu tidak ada bila tidak diungkapkan. Cara pandang ini bertentangan dengan masyarakat Timur, yang menganggap seksualitas sebagai seni dan pengalaman khusus, yang bila dibicarakan akan kehilangan keefektivitasannya (kenikmatannya). Foucault menyebut cara masyarakat Barat ini sebagai *scientia sexualis* – pengetahuan tentang seks. Sedangkan cara masyarakat Timur disebut sebagai *ars erotica* – seni kenikmatan.

Sejak dulu pengakuan dianggap sakral dalam agama Kristen, namun pergeseran mulai terjadi ketika abad 18 muncul Protestanisme, dan pada abad 19 muncul kedokteran. Menyebarnya wacana baru seksualitas mulai terkumpul dalam arsip tentang ke-

nikmatan dan penyimpangan seksual. Beberapa cara mengubah sistem paksaan tentang pengakuan menjadi catatan ilmiah, yaitu:

1. Menjadikan “menyuruh bicara” sebagai prosedur baku. Wajar jika dilakukan beberapa cara seperti interogasi, mengisahkan pengalaman, kuesioner, hipnosis, dan lain-lain.
2. Ilmu kedokteran menjadikan seksualitas sebagai penyebab munculnya berbagai penyakit, termasuk penyakit paru-paru, sehingga membuat mereka menuliskannya sebagai temuan.
3. Menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang bersifat laten. Dengan demikian, pengakuan seksualitas akan muncul tanpa paksaan, meskipun masih dengan cara sedikit demi sedikit.
4. Interpretasi: Ilmuan harus mengumpulkan data-data yang tercecer untuk menilai kebenaran, dan menarik kesimpulan untuk kemudian menyebarkan nilai kebenaran tersebut.
5. Medikalisasi dampak pengakuan: Wacana bahwa seksualitas menyimpang menyebabkan berbagai penyakit terbukti dilakukan hanya untuk menjaga ketabuan seksualitas di masyarakat. Wacana ini bisa diluruskan kembali jika pihak medis yang menjelaskannya, karena merekalah yang bertanggung-jawab terhadap pandangan keliru ini.

Beberapa abad terakhir, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait seksualitas yang menjadi awal dilakukannya penelitian seputar seksualitas. Foucault bahkan menegaskan bahwa dalam menentukan pertanyaan, penelitian harus melepaskan segala bentuk re-

presi. Represi yang dimaksud, hadir sebagai akibat adanya kekuasaan. Tidak dapat dipungkiri, seks memiliki hubungan erat dengan kekuasaan.

Berikut ini beberapa ciri pokoknya, yaitu:

1. Hubungan negatif: Kekuasaan dan seks saling meniadakan, di mana kekuasaan berusaha memisahkan seksualitas dalam kehidupan. Sebaliknya, seksualitas membungkam kekuasaan dengan kenikmatan, sehingga kekuasaan tidak mampu berbuat apa pun kecuali menolaknya.
2. Lembaga aturan: Seks ditentukan oleh kekuasaan; Pertama, seks dilihat dalam sistem biner (halal-haram, boleh-terlarang); Kedua, seks diberi batasan hukum; Ketiga, seks diwujudkan melalui bahasa (lebih tepatnya wacana), sehingga seks disebut bersifat yuridis-kewacanaan.
3. Siklus larangan: Kekuasaan menggunakan hukum larangan agar seks menyangkal dirinya sendiri. Caranya dengan membuat larangan dan ancaman bagi yang melanggar.
4. Logika sensor: Logika kekuasaan atas seks merupakan logika paradoksal dari suatu hukum yang dapat diujarkan sebagai perintah untuk tidak hadir, tidak berwujud dan bungkam.
5. Kesatuan perangkat: Kekuasaan atas seks seolah dibuat menyeluruh. Penerapannya bukan hanya dilakukan oleh negara (raja), tapi sampai ke rumah (ayah). Kekuasaan menjadi subjek pembuat aturan, sedangkan yang lain (rakyat, anak) sebagai subjek patuh.

Dalam konteks negara, kekuasaan bukan hanya milik raja, tetapi juga milik rakyat yang seharusnya disamaratakan sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Foucault berpendapat perlu membalik rumusan kekuasaan tersebut agar sesuai (atau mendekati) dengan sebagaimana mestinya. Beberapa proposisi (atau rancangan usulan) yang dapat dikemukakan, antara lain, dengan mengungkapkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang diperoleh, dirampas dan dibagi, melainkan berfungsi berdasarkan unsur yang tak terhitung jumlahnya dalam hubungan yang tak sederajat dan bergerak. Kekuasaan dianggap sama seperti hubungan lainnya, seperti perdagangan, pertemanan, yaitu sejajar dan saling menguatkan, sehingga tidak ada bentuk oposisi biner antara mendominasi dan yang didominasi.

Melihat kekuasaan yang sering disalahartikan, kita harus mampu meluruskan definisi kekuasaan tersebut dalam konteks seksualitas. Ada empat kaidah yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Imanensi. Imanen, atau imanensi, adalah paham yang menekankan berpikir dengan diri sendiri atau subyektif.¹ Istilah imanensi berasal dari bahasa Latin *immanere*, yang berarti “tinggal di dalam”. Imanen adalah lawan kata dari transenden. Pertama kali istilah ini diajukan oleh Aristoteles, dan memiliki arti “batin” dari suatu objek, fenomena atau gejala. Kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant (filsuf Jerman 22 April, 1794 – 12 Februari, 1804) dan berlaku sampai

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

sekarang. Dalam istilah Filsafat Ketuhanan, Tuhan yang imanen berarti Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia.² Berbeda dengan transenden, yang sangat mengagungkan Tuhan yang begitu jauh sehingga mereka sangat hormat. Imanensi lebih dekat dan terbatas pada pengalaman manusia, seperti dikemukakan Hume dalam teori fenomenalisme empiris dan Kanti dalam *Critique of Pure Reason*. Dalam teologi Kristen, imanen dapat dilihat dalam ajaran Trinitas, yaitu Allah yang memiliki pribadi begitu nyata, Allah menjadi begitu dekat dengan umat-Nya.³ Sifat Allah yang imanen terkadang akan membuat manusia hanya berpikir bahwa Allah dekat, hal ini kurang tepat, maka dibutuhkan sifat transenden juga. Allah yang transenden adalah Allah yang melampaui segala yang ada. Allah yang tidak terbatas untuk memimpin dunia.⁴ Harus dipahami bahwa seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan manusia, sehingga mustahil membuat hukum yang membatasinya.

- b. Perubahan berkelanjutan. Akan lebih baik jika kita mulai mencari formula yang tepat untuk modifikasi bentuk kekuasaan terhadap seksualitas.

- c. Kaidah pengkondisian ganda. Kekeliruan kondisi kekuasaan terhadap seksualitas membutuhkan pengondisian ganda. Ayah bukanlah perwakilan raja yang melarang anak-anaknya, dan raja bukanlah penguasa dan pembuat hukum atau larangan untuk masyarakatnya.
- d. Taktik polivalen dalam berbagai wacana. Secara bahasa, polivalen memiliki makna kombinasi, yaitu mengandung banyak unsur sehingga tidak terbatas pada dua kondisi yang ada dan tiada. Taktik polivalen digunakan dalam kekuasaan seksualitas untuk menghindari adanya penilaian hitam dan putih saja. Wacana seksualitas tidak bisa dikelompokkan antara wacana yang diterima dan yang ditolak, atau di antara wacana yang mendominasi dan yang didominasi, tetapi harus dibayangkan wacana sebagai unsur-unsur nalar dengan beragam strategi.

Seksualitas bukanlah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, namun jangan pula berusaha menundukkan seksualitas, karena sewajarnya ia ada dan terus ada. Seksualitas lebih menyerupai saluran yang padat bagi hubungan kekuasaan, orang tua dan anak, guru dan murid, dokter dan pasien. Sejak abad 18, ada empat strategi besar yang berkaitan dengan pengembangan seksualitas terhadap kekuasaan.

1. Histerisasi tubuh perempuan. Tubuh perempuan dianalisis dan diintegrasikan dalam sistem medis sebagai suatu patologi, kemudian dihubungkan secara organik dengan tubuh sosial. Dari strategi inilah jenis kelamin ditentukan

² Ibid. 1996.

³ Celia Deane-Drummond, *Teologi dan Ekologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

⁴ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

kan nilai fungsionalnya secara biologis dan sosial. Ironisnya, sasaran untuk menjadi korban dari strategi ini selalu perempuan.

2. Pedagogisasi seks anak-anak. Terdapat asumsi bahwa anak-anak potensial untuk melakukan kegiatan seksual. Pedagogisasi muncul dalam konteks perang dunia Barat terhadap onanisme anak. Sejak masa perang dunia, orang tua menganggap bahwa onani merupakan hal berbahaya, yang dikhawatirkan dapat mendatangkan kerusakan fisik dan moral, kolektif dan individual bagi anak. Hal ini menyebabkan orang tua, guru, dokter, dan psikolog mengatakan bahwa onani adalah tindakan berbahaya dan menentang alam.
3. Sosialisasi perilaku prokreatif (kemampuan reproduksi). Strategi ini bekerja melalui kebijakan ekonomi, sosial dan politik, dengan menormalkan monogami heteroseksual. Seksualitas semata diarahkan pada unsur prokreatifnya.
4. Psikiatrisasi kenikmatan menyimpang. Perilaku seksual menyimpang dianggap sebagai patologi dan anomali. Klaim ini dilandasi analisis naluri biologis dan psikis, bahwa perilaku seksual semacam onani, masturbasi, dan homoseksualitas dapat memperlemah tubuh dan menjadikannya rawan penyakit. Seks untuk kesenangan menjadi sesuatu yang dikutuk.

Sejarah seksualitas, jika dipusatkan pada mekanisme represi, dapat dikategorikan dalam dua periodisasi; Abad 17 adalah masa pertama pelarangan seksualitas dan pengunggulan satu-satunya seksualitas, yaitu pada orang dewasa dan suami-istri; Abad ke-20, saat mulai muncul kelonggaran represi. Mulai muncul toleransi terhadap pelanggaran seksualitas, khususnya untuk hubungan di luar pernikahan, dan menghilangkan sebagian besar ketabuan yang sebelumnya membebani seksualitas.

Hak Menentukan Ajal dan Menguasai Hidup

Berbicara tentang hak dalam menentukan ajal dan menguasai hidup, Foucault melihat bahwa sejak abad ke-17, kekuasaan telah mengendalikan kehidupan dalam dua bentuk, yaitu politik-anatomi terhadap tubuh manusia dan bio-politik terhadap kontrol populasi. Seks menjadi tema sentral karena berkaitan langsung dengan berbagai disiplin mengenai tubuh dan sekaligus menjadi bagian dari regulasi populasi. Dengan begitu, kekuasaan secara politis dan ekonomis sangat berkaitan dengan seks. Jika dulu hidup-mati seseorang ada di tangan raja, kini sudah bertransformasi menjadi wujud analisis pengetahuan, dan, tentu saja, sebagai sebuah fenomena bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan ajal dan menguasai hidupnya masing-masing.*

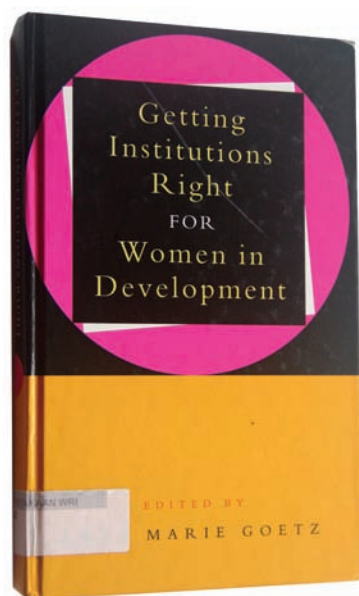
Rahayuningtyas

Dekonstruksi Institusi untuk Keadilan Gender

Judul : Getting Institutions Right for Women in Development
Editor : Anne Marie Goetz
Penerbit : Zed Books Ltd., 1997
Halaman : iv + 248 Halaman
ISBN : 1-85649-525-6

Buku ini secara keseluruhan berusaha melihat kembali karakter gender dalam pembangunan organisasi, baik di tingkat negara maupun di tingkat masyarakat sipil dan lingkungan institusinya. Buku ini sendiri banyak menaruh perhatian pada organisasi di mana gender dikonstitusikan, dan bagaimana ketika organisasi tersebut bekerja di ruang publik. Pasar dan institusi yang bersifat domestik, seperti rumah tangga, tidak disorot secara langsung tapi mendapat tempat bahasan.

Dalam buku ini terdapat 13 tulisan yang menyoal institusi dan perempuan. Bagian pembuka oleh Anne Marie Goetz memberikan pembuka pentingnya institusi dalam



mengatur dan mengkoordinasikan masyarakat, mengalokasikan sumberdaya dan membuat kebutuhan diinterpretasikan oleh pembuat kebijakan.

Buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama mengeksplorasi perspektif teoritis dari akuntabilitas untuk perempuan. Bagian ini menyediakan kerangka untuk mengingatkan mengenai pentingnya konteks dalam memahami akuntabilitas bagi perempuan. Konteks tersebut adalah politik, organisasi dan kognitif yang saling mempengaruhi struktur dalam interaksi agen pembangunan.¹ Buku ini ditulis pada era pembangunan diarahkan untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan, atau yang dikenal dengan Gender and Development (GAD).

“The key to GAD is challenging the power relation within the system or the society and leveling the playing field by changing institutional rules. In the process, it aims at reconstructing the social relations between men and women and thus, involving not only women, but also men.” (Goetz: 1997, p:3).

Bagian kedua adalah tulisan-tulisan yang menyoal institusionalisasi keadilan gender dalam birokrasi negara. Dalam studi di negaraChile dan Filipina, penulis bagian ini menganalisis kehadiran perempuan dalam birokrasi negara. Ia mengatakan bahwa rezim yang transisional dari *dictatorship* ke *popular democracy* telah memberi kesempatan perempuan untuk ada dalam birokrasi negara. Namun di Chile, aktivisme di kalangan akar rumput hanya bisa efektif di level politik

lokal, dan tidak bisa bertransisi menjadi kekuatan partisipasi politik yang lebih luas lagi. Masalah yang menarik dari bagian ini adalah, tersegregasinya perempuan yang ada di birokrasi negara dengan gerakan perempuan, karena belum ada kerjasama ataupun kolaborasi yang saling mendukung antara sesama perempuan.

Bagian ketiga membahas institusionalisasi keadilan gender di *Non-Governmental Organization* (NGO). Bagian ini mempertanyakan dan menantang asumsi umum bahwa NGO adalah institusi yang paling menerima dan mempraktikkan keadilan gender, didasarkan pada prinsip egalitarian yang selalu diusung oleh NGO. Bagian ini menunjukkan bagaimana agenda-agenda pemberdayaan perempuan bisa menjadi bumerang. Studi di Bangladesh, misalnya, banyak menunjukkan itu, di mana akses perempuan kepada peluang ekonomi pada akhirnya telah menimbulkan kecemburuan laki-laki. Hal ini disebabkan program ini ada dalam lingkungan sosial, politik, nilai ekonomi dan tradisi yang malah membahayakan hidup perempuan. Di Bangladesh, perempuan sangat tergantung pada laki-laki dalam keluarganya untuk akses mereka ke pasar dan untuk eksistensi diri mereka. Padahal, awalnya program kredit ada karena hadirnya asumsi bahwa perempuan lebih bisa mendapat kepercayaan dalam pengembalian utang dibanding laki-laki. Asumsi ini justru banyak dimanfaatkan oleh para suami mereka untuk memaksa perempuan berutang.

Bagian keempat menyorot peran dari individu sebagai agen. Di bagian ini, ulasan banyak menyoal organisasi dibandingkan institusi sendiri. Dua tulisan dalam bagian ini adalah studi kasus pekerja lapangan dari

¹ Halaman 25.

NGO dalam mempromosikan keadilan gender dengan penerima manfaat.

Bagian kelima dan terakhir membahas pengorganisasian perempuan untuk perempuan, dan mengamati bagaimana pengorganisasian perempuan dilakukan.

Anne Marie Goetz adalah ilmuwan politik feminis yang banyak melakukan penelitian di negara berkembang, seperti India, Bangladesh dan negara-negara Afrika. Goetz memahami institusi sebagai kerangka yang telah dikonstruksikan sejarah untuk aturan perilaku. Pemahaman institusi ini memberikan sumbangan untuk mengerti mengapa ketika ada agen baru masuk dalam institusi, meski dengan perspektif yang kuat sekali pun, *output* perubahan yang dihasilkan relatif kecil. Hadirnya dan meningkatnya perempuan secara kuantitas dalam institusi publik tidak selalu berkontribusi positif dan secara linear terhadap meningkatnya kebijakan-kebijakan yang feminis.

Meski pun dalam institusi yang sama, tidak semua orang yang diatur itu memiliki identitas yang sama. Untuk hal ini dia mengatakan:

"All institutions have privileged participants, included and excluded groups, superior and subordinate. Identification of the gender of winners and losers in the market or of decision-makers versus decision takers in the organization, is important in determining which group's interests are served by the particular institution."²(p:19)

Goetz memperkaya Pitkin dan Phillips dengan teori representasinya. Bila Pitkin hanya melihat pada agensi, Goetz menambahkan bahwa struktur — dalam hal ini institusi — juga mempunyai andil besar dalam mewujudkan representasi perempuan.

Pentingnya institusi ini karena Goetz melihat bahwa entitas perempuan sendiri bukanlah entitas tunggal, melainkan terbagi berdasarkan kelas sosial-ekonomi, etnis — bahkan kasta, bila didasarkan pada penelitiannya di India.

Teori-teori feminis mengakui adanya pembedaan sosial yang berasal dari pengalaman hidup perempuan dan yang juga akan berpengaruh pada perspektif politiknya. Perempuan juga bisa menjadi agen, namun sekali lagi, institusi dan lingkungannya akan sangat mempengaruhi bagaimana tindakan dan kerja yang dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi agen yang otonom.

Dalam melihat institusi publik yang dimasuki perempuan, Goetz juga melihat bahwa semua institusi di luar rumah tangga (atau ruang domestik) akan dianggap mempunyai nilai publik, atau nilai ekonomi. Dalam kaitannya dengan representasi perempuan, Goetz menjelaskan bahwa kapabilitas sosial dan fisik dari yang mendominasi institusi akan terefleksikan dari posisi di organisasi kerja. Kapasitas sosial laki-laki yang bebas dari tanggungjawab pengasuhan anak dan urusan domestik membuat laki-laki lebih memiliki banyak waktu untuk bekerja dan berorganisasi di luar rumah. Institusi publik di luar institusi keluarga diasumsikan sebagai netral-gender, sementara pembagian kerja secara gender selalu hadir dalam institusi keluarga. Goetz banyak menaruh

² Goetz, Anne Marie. *Getting Institutions Right for Women in Development*. Zed Books. New York. 1997.

perhatian dan kritik pada institusi publik ini, terutama kalangan masyarakat sipil dan lembaga perwakilan/representasi. Goetz menyatakan bahwa institusi di luar rumah tangga banyak dipengaruhi oleh bias laki-laki, dan gagal dalam mengakomodasi kerja-kerja reproduktif, atau melakukan feminisasi terhadap partisipasi perempuan seperti sebagai fungsi pembantu atau pengasuh.

Laki-laki dianggap memiliki kapasitas lebih logis untuk memerintah dan mempunyai pertimbangan moral; sebaliknya, perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas tersebut. Hal ini juga didukung oleh norma-norma adat dan agama serta nilai-nilai. Pokok-pokok ini yang membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan (dalam dan di luar rumah tangga), yang tercermin pada pembagian antara “publik” dan “domestik”, atau “pribadi”, antara yang bernilai “produktif” dan “tidak produktif”.

Shirin M. Rai, dalam buku yang disunting oleh Goetz,³ juga mengemukakan bukti empiris menarik tentang representasi perempuan di India. Rai menganalisis hubungan antara pertumbuhan gerakan perempuan dan representasi politik perempuan di India. Dia melihat ketika perempuan kecil representasinya di legislatif, gerakan perempuan justru mampu menempatkan agenda gender dalam partai politik. Selain itu, terlihat juga bahwa legislatif perempuan yang tidak pernah menjadi bagian dari gerakan perempuan akan lebih terikat pada sistem partai, dan kurang memperjuangkan isu gender. Rai melakukan *tracking record* perempuan anggota parlemen di India, dan menjabar-

kan kelas sosial dan *track record* dari MPs tersebut. Dari data tersebut dianalisis bahwa perempuan dari kelas menengah dan atas, juga dari kelas sosial yang mapan, lebih mampu untuk berkontribusi di kehidupan publik.

Goetz secara tegas menyatakan bahwa membawa perspektif keadilan gender dalam politik dan kebijakan publik, dengan mensyaratkan hadirnya tubuh perempuan adalah salah kaprah. Terkecuali, kehadiran tersebut juga didukung dengan usaha keras lainnya untuk membawa isu gender ke ruang lain, di mana kepentingan politik bermain. Hal ini sangat senada dengan pemoe feminisme yang sangat terkenal, yakni, “*The personal is political*”.

Terbukanya ruang partisipasi politik sangat penting bagi perempuan, dan bukan hanya karena hal tersebut bisa eksis dan ada karena perjuangan, advokasi dan mobilisasi dalam kebijakan publik. Ruang tersebut juga menawarkan pola pembelajaran bagi perempuan, yang memungkinkan perempuan menyadari dan mengartikulasikan kepentingannya, membangun aliansi strategis, dan mempelajari pola kerjasama serta membangun konsensus dalam ruang politik. Pembelajaran ini akan menjadi pengalaman berharga, dan bisa direplikasi bagi perempuan lain yang akan masuk dalam arena politik formal, sebuah arena pertarungan untuk mempertahankan argumen dan debat secara efektif.

Alternatif yang ditawarkan Goetz agar perempuan terepresentasikan adalah dengan membentuk apa yang ia namakan “*forms of institutions and organizations*”. Dalam hal ini Goetz menganggap organisasi perempuan bisa menjadi salah satu jawabannya.

³ Goetz, Anne-Marie (ed). *Getting institutions Right for Women in Development*. Taylor and Francis. 1997, p.107.

Dengan mengesampingkan pluralnya organisasi perempuan, diharapkan organisasi perempuan bisa menjadi 'kawah candradimuka' dan sebagai inkubator untuk lahirnya pemimpin perempuan, atau pembuat kebijakan publik yang bisa bersuara.

Kemunculan dan meluasnya institusi demokrasi seperti partai politik, serikat buruh, media massa maupun gerakan masyarakat sipil telah memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, baik langsung melalui pemilihan umum, atau tidak langsung dalam advokasi kebijakan. Dalam konteks demokrasi modern (bila tidak mau dikatakan liberal), partai politik, misalnya, menjadi institusi yang bisa menjadi arena di mana warga negara dapat berpartisipasi aktif dan mempunyai akses langsung terhadap pengambil keputusan yang merupakan representasi partai. Partai politik seharusnya bisa menjadi mediator antara kalangan masyarakat sipil dengan pemerintah. Namun di sisi lain, partai politik juga dilihat sebagai patron politik, yang ditujukan untuk kepentingan elektoral semata. Dengan demikian resistensi terhadap partai politik dari kalangan masyarakat sipil juga masih sangat kental.

Namun melihat lagi perjalanan perempuan masuk dalam politik, sebenarnya tidak ada jalan pintas dan baku, yang menyatakan bahwa perempuan harus masuk dalam aktivitas komunitas atau masyarakat sipil. Pertanyaan yang bisa diajukan kemudian adalah mengapa sangat sedikit sekali pemimpin perempuan atau aktivis feminis, yang masuk dalam ranah politik dan bisa mempengaruhi kebijakan publik secara langsung? Inkubator tradisional untuk menggodok pemimpin politik di antaranya adalah serikat

buruh, kampus dan partai politik. Arena-arena tersebut mempertajam insting politik, tapi sangat besar kemungkinan arena tersebut tidak membuat perempuan bisa 'bicara'.

Pertanyaan menarik datang dari Tahera Yasmin (p:199),⁴ "*Do women manage differently from men?*" Dan bagaimana perempuan berhadapan dengan hirarki dan pembuatan keputusan? Dalam studinya di Bangladesh, pandangan laki-laki lebih mendeterminasi, bahkan di isu-isu pembangunan yang berkaitan dengan perempuan sekali pun. Pandangan tersebut karena antara lain, perempuan tidak berpikir tentang jenjang karir seperti laki-laki, perempuan mendapat cuti lebih banyak, perempuan tidak menyukai kerja berpindah-pindah, dan lainnya. Konsekuensinya, perempuan amat jarang ditempatkan pada posisi manajerial.

Beberapa isu dan pertanyaan yang muncul untuk menjawab dan melengkapi pemikiran Goetz dalam isu representasi politik antara lain: Bagaimana perempuan memasuki dunia politik? Apa jalur yang ditempuh perempuan untuk bisa menduduki posisi di ranah politik? Bagaimana dan di mana perempuan belajar seni dan aktivitas politik? Bagaimana pembelajaran politik dilakukan? Bagaimana ragam dari institusi publik di mana perempuan berpartisipasi? Pertanyaan penting yang juga harus diajukan adalah, dalam kapasitas seperti apa demokrasi menyediakan ruang untuk mengajukan isu keadilan gender?

Sebagai penutup, membuat institusi bekerja untuk perempuan dalam pembangunan membutuhkan aktivisme politik para fe-

⁴ Goetz, Anne Marie. *Getting Institutions Right for Women in Development*. Zed Books. New York. 1997.

minis dari semua institusi maupun individu yang memberikan perhatian terhadap kesetaraan dan keadilan. Partisipasi perempuan dalam institusi publik, baik organisasi perempuan atau pun organisasi publik lainnya, hanya bisa bermakna dan berarti bila dituju-

kan dalam konteks untuk melanjutkan negosiasi dan perjuangan mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. *In the end, it's a matter of political struggle.**

Ika Wahyu Priaryani

Tentang Penulis



Ayu Anastasia, sejak mahasiswa tertarik dengan penelitian yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Beberapa penelitian yang dilakukannya

adalah dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PUSKA PA) FISIP UI. Ayu juga terlibat sebagai asisten peneliti dalam penelitian “Mewujudkan Rutan dan Lapas yang Sensitif pada Pengalaman dan Kebutuhan Khusus Perempuan yang Beragam”.

Setelah menyelesaikan S1 di Departemen Kriminologi FISIP UI pada September 2011, Ayu terlibat dalam proyek penelitian PUSKA PA dan Kementerian Sosial RI mengenai “Monitoring dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak”. Kecintaannya terhadap dunia penelitian dan isu perempuan membuat Ayu bergabung menjadi peneliti di Women Research Institute, sebuah lembaga penelitian yang menaruh perhatian terhadap perempuan dengan basis feminisme.



Chusnul Mar'iyah menyelesaikan pendidikan doktor di University of Sydney, Australia. Chusnul dikenal sebagai seorang aktivis sejak kuliah di jurusan

ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Kemudian Chusnul menjadi dosen di almaternya sampai saat ini.

Selain mengajar, Chusnul Mar'iyah tercatat pernah menjadi peneliti dan turut mendirikan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, mendirikan Perempuan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender, yang menggagas Kongres Perempuan Aceh (Duek Pakat Inong Aceh). Selain itu dia juga melibatkan diri dengan Gerakan Perempuan Sadar Pemilu, Transparency International Indonesia. Chusnul Mar'iyah juga tercatat pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2002-2007.



Edriana Noerdin aktif dalam gerakan perempuan di Indonesia sejak 1986. Kuatnya minat terhadap isu-isu perempuan membuatnya menempuh pendidikan S2 dalam Women and Development di Institute of Social Studies, The Hague, Belanda. Bersama sejumlah rekan, Edriana Noerdin mendirikan WRI, pada saat ini menjabat sebagai Direktur Program.

Sebagai akademisi dan aktivis, Edriana telah menulis artikel dan makalah terkait isu-isu perempuan di beberapa media. Ia juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum di dalam dan luar negeri serta produktif dalam menulis dan menyunting beberapa buku yang diterbitkan oleh WRI.



Frisca Anindhita tertarik pada bidang penelitian semasa mahasiswa. Pada 2008 dan 2009 Frisca bergabung dengan project World Bank “The Violent Conflict in Indonesia Study (ViCIS)” sebagai tim pengolah data digital. Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia lulusan 2010 ini, beberapa kali terlibat dalam penelitian bertemakan kesehatan, di antaranya Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2010 sebagai validator dan sebagai enumerator pada penelitian Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Frisca juga pernah bergabung dengan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI sebagai tim Operasional Siskohatkes (Sistem Surveillance

Kesehatan Haji Terpadu) Oktober-Desember 2011. Pada Januari 2012, Frisca bergabung dengan WRI sebagai peneliti.



Ika Wahyu Priaryani menyelesaikan pendidikan S1 di bidang sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan diploma di bidang teknik grafika dan penerbitan dari Politeknik Universitas Indonesia.

Sebelum bergabung sebagai peneliti di WRI 2011-2013, Ika bekerja sebagai peneliti di lembaga penelitian seperti Yayasan Akatiga, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) serta *Institute of Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). Ika terlibat dalam berbagai penelitian tentang buruh, pemilihan umum dan perempuan seperti “Peranan Perempuan dalam Kerukunan Antar Umat Beragama”, *Legislative Political Tracking*, *Tracking the Politician for Voter Education*, *Potential Women for Legislative* serta “Identitas dan Pengorganisasian Buruh di Komunitas, 2008”.



Myra Diarsi menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1984 dan meraih gelar MA, dari Institute of Social Studies (ISS) The Hague, Netherlands, 1991.

Pada 1985, Myra Diarsi mendirikan Kalyanamitra dan bergiat dalam isu gender hingga kini. Sebagai perempuan aktivis, Myra Diarsi juga dikenal sebagai pendidik dalam

berbagai pelatihan analisis gender dan sosial, sebagai (*gender expert*). Myra juga menekuni konseling bagi perempuan korban kekerasan di berbagai organisasi di Indonesia. Myra Diarsi tercatat sebagai komisioner Komnas Perempuan periode 1998-2006. Selain itu Myra merupakan salah satu pendiri WRI.



Aris Arif Mundayat menyelesaikan pendidikan doktor di Swinburne University of Technology, Australia. Tahun 2005-2010 menjabat sebagai direktur di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada, dan sejak tahun 2011 menjabat sebagai wakil direktur di lembaga tersebut. Sebagai antropolog, Aris Arif Mundayat telah mempublikasikan berbagai kajiannya dengan perspektif antropologi politik. Kajiannya meliputi budaya politik dalam masyarakat Indonesia, relasi kuasa gender dan politik seksualitas, politik konsumerisme, Islam dan perubahan sosial politik, gerakan petani dan militerisme, HAM dan demokrasi.



Rahayuningtyas sudah aktif dalam organisasi mahasiswa pada masa kuliah. Tyas juga menjadi staf ahli Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia (MWA UI) Unsur Mahasiswa 2009 bidang Kebijakan Publik. Selama menjadi staf ahli

MWA UI Tyas banyak melakukan kajian tata kelola pendidikan yang baik sehingga kebijakan Universitas Indonesia memudahkan mahasiswa memperoleh pendidikan tinggi. Tyas menjadi volunteer Spanish Speaking Woman Association (SSWA) pada 2009-2010.

Setelah menyelesaikan studinya 2010, Tyas terlibat dalam proyek penelitian Kementerian Kesehatan RI. Tahun 2011 Tyas bergabung menjadi Peneliti di Pusat Kajian Biostatistika dan Informatika Kesehatan (PKBIK) Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Dan pada awal Januari 2012 Tyas bergabung menjadi Peneliti Women Research Institute.



Sita Aripurnami menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan program S2 di bidang gender di London School of Economics and Political Science, London, Inggris. Sita Aripurnami adalah salah satu pendiri organisasi perempuan Kalyanamitra pada 1985. Saat ini, Sita Aripurnami menjabat sebagai Direktur Eksekutif WRI, dan aktif berperan sebagai advisor dan fasilitator untuk berbagai program terkait isu gender serta menjadi pembicara dan partisipan dalam berbagai forum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bersama rekan peneliti di WRI, Sita terlibat dalam penulisan berbagai hasil penelitian WRI yang dipublikasikan.***

Afirmasi

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FEMINIS

Jurnal Afirmasi merupakan media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan telaah kritis berperspektif feminis agar dapat berkontribusi pada upaya perbaikan kebijakan demi tercapainya keadilan gender bagi masyarakat di Indonesia.



ISSN 2089-0281



Women Research Institute (WRI) adalah lembaga penelitian yang memfokuskan kerjanya dengan menggunakan analisis feminis. WRI mengembangkan penelitian agar pembaharuan pengetahuan sampai kepada para pengambil keputusan dan publik pada umumnya.

